RANCANGAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2025

BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Goverment of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mencapai tujuan periode pertama yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Barat Tahun 2025-2045, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Barat Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

d. bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);

8. Peraturan Menteri . . .

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012–2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 145);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 261);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Aceh Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 257).

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Arah Kebijakan Pembangunan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat selama periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

12. Rencana . . .

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang berpedoman pada RPJM Kabupaten Aceh Barat.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi Renstra-SKPK.
14. Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Bapperida adalah perangkat Kabupaten Aceh Barat sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
15. Kepala Bapperida Kabupaten Aceh Barat adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 2

RPJM Kabupaten Aceh Barat merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Daerah;
BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah;
BAB V : Penutup.

Pasal 4

RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman

a. SKPK dalam menyusun Renstra-SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029; dan
b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPK setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat selama 5 (lima) tahun.
(2) Pengendalian dan Evaluasi wajib menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan disepakati bersama DPRK, meliputi Indikator Input, Output, Outcome, dan Dampak.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Kebijakan perencanaan pembangunan; dan
    b. Pelaksanaan rencana pembangunan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB IV
PENYUSUNAN RENSTRA SKPK

Pasal 8

(1) SKPK harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Bapperida dalam hal penyusunan Renstra SKPK.
(2) Kepala Bapperida dapat melakukan pemantauan terhadap capaian sasaran RPJM Kabupaten yang dituangkan dalam Renstra SKPK sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam Penyusunan Renstra SKPK melibatkan pemangku kepentingan seperti akademisi, dunia usaha, LSM, dan Masyarakat.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 9

(1) Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa kebijakan dan substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   b. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Kabupaten Aceh Barat kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terjadi perubahan yang mendasar.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKPK dan perubahannya serta Perubahan Renstra SKPK.

(5) Pemerintah Kabupaten wajib mempublikasikan dokumen RPJM, Renstra SKPK, dan Laporan Evaluasi Tahunan melalui media resmi Pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) Pada . . .

(2) Pada masa berakhirnya periode Bupati Aceh Barat Tahun 2025-2029 dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya maka RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk penyusunan program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat periode 2030-2034 terutama untuk program-program dan kegiatan prioritas yang capaiannya belum memenuhi target.

(3) Selama masa transisi, Bupati Wajib melaporkan pelaksanaan Program Prioritas masa Transisi kepada DPRK setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Oktober 2025 M
8 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI ACEH BARAT,

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Oktober 2025 M
8 Jumadil Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

KURDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: 8/118/2025

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 didasari oleh kebutuhan untuk merumuskan kebijakan strategis yang dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien, guna mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam proses penyusunannya, berbagai data dan analisis yang komprehensif digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Barat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Dalam penyusunannya RPJM berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa RPJM Daerah selain merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, RPJM memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RPJM Kabupaten Aceh Barat 2025-2029 disusun dengan berpedoman juga pada RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, RPJM juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di samping menelaah RPJM dan RTRW Provinsi Aceh, agar terdapat keselarasan pembangunan antara wilayah kabupaten dalam koridor wilayah regionalnya. Selain memedomani RPJMN dan RPJP Daerah, juga dilakukan penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program

Pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR : 264

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR xvi

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 5
1.4 Maksud dan Tujuan 6
1.4.1 Maksud 6
1.4.2 Tujuan 6
1.5 Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 7
1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 10

BAB II 1
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 1
A. Aspek Geografi dan Demografi 1
1. Posisi dan Peran Strategis Daerah 1
1.1. Geografi 1
1.2. Topografi 2
1.3. Geologi dan Jenis Tanah 3
1.4. Hidrologi 3
1.5. Klimatologi 4
1.6. Konribusi Ekonomi Kabupaten Aceh Barat terhadap Wilayah Sekitar 5
1.7. Kontribusi Infrastruktur Kabupaten Aceh Barat terhadap Wilayah Sekitar 6
2. Potensi Sumber Daya Alam 9
2.1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan 9
2.2. Sektor Perkebunan 10
2.3. Sektor Pertambangan 11
2.4. Penggunaan Lahan 12
2.5. Potensi Pengembangan Wilayah 14
3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 15
3.1 . Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Air 15
3.2. Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Pangan 16
3.3. Status Daya Dukung Daya Tampung Lahan Permukim 17
4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 19
4.1. Pangan 19
4.2. Indeks Ketahanan Pangan 20
4.3. Pravalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 20
4.4. Distribusi Pelanggan Listrik Menurut Wilayah 21

4.5. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum 22
5. Lingkungan Hidup Berkualitas 23
5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 24
5.2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak 25
5.3. Persampahan 26
5.4. Pertanahan 28
6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 28
6.1. Penurunan Intensitas Emisi GRK 28
6.2. Wilayah Rawan Bencana 29
6.3. Indeks Risiko Bencana 29
6.4. Indeks Ketahanan Daerah 30
7. Demografi 31
7.1. Kepadatan Penduduk 31
7.2. Jumlah Penduduk 32
7.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin 32
7.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 33
7.5. Laju Pertumbuhan Penduduk 34
7.6. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045 35
7.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 35
7.8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 35
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 36
1. Kesejahteraan Ekonomi 37
1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 37
1.2. Tingkat Kemiskinan 38
1.3. PDRB Per Kapita 39
1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka 40
1.5. Indeks Gini 42
1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 43
2. Kesehatan untuk Semua 44
2.1. Usia Harapan Hidup 44
2.2. Indeks Keluarga Sehat 45
2.3. Prevalensi Stunting 46
2.4. *Universal Health Coverage* (UHC) 47
2.5. Profil Pelayanan Kesehatan 47
3. Pendidikan Berkualitas yang Merata 51
3.1. Rata-Rata lama Sekolah 51
3.2. Harapan Lama Sekolah 52
3.3. Angka Literasi/Numerasi 53
3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 54
3.5. Indeks Literasi Digital 55
3.6. Angka Partisipasi Kasar 56
3.7. Angka Partisipasi Sekolah 56
3.8. Angka Partisipasi Murni 57
3.9. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan 57
3.10. Angka Putus Sekolah 57
3.11. Angka Kelulusan Sekolah 57
3.12. Angka Melanjutkan 58

3.13 Fasilitas Pendidikan 58
4. Perlindungan Sosial yang Adaptif 60
4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 60
4.2. Bantuan Sosial 61
4.3. Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 62
5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 63
5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama 63
5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan 63
5.3. Penduduk Menurut Agama Yang Dianut dan Jumlah Tempat Ibadah 64
5.4. Indeks Pembangunan Syariah (IPS) 65
5.5. Pelanggaran Syariat Islam 66
6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 67
6.1. Indeks Perlindungan Anak 67
6.2. Indeks Pemenuhan Hak Anak 67
6.3. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 68
6.4. Pengarusutamaan Gender 69
6.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 71
6.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 73
C. Aspek Daya Saing Daerah 76
1. Data Saing Sumber Daya Manusia 76
1.1. Angka Ketergantungan 77
1.2. Pemuda dan Olahraga 77
2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas 77
2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 79
2.2. Struktur Perekonomian 81
2.3. PDRB Per Kapita 83
2.4. Rasio PDRB Industri Pengolahan 83
2.5. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum 84
2.6. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif 84
2.7. Rasio Kewirausahaan 84
2.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 85
2.9. Indeks Daya Saing Daerah 86
2.10. Perbaikan Daya Saing Investasi 86
3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 87
3.1. Ekonomi Hijau 87
3.2. Ekonomi Biru 88
4. Transformasi Digital 89
4.1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 89
4.2. Platform Aplikasi Pelayanan Publik 90
5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 90
5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto 90
5.2. Ekspor Barang dan Jasa 91
6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 92
6.1. Indeks Infrastruktur 94
6.2. Perhubungan 94
6.3. Transportasi 95
6.4. Jumlah Kendaraan 96
6.5. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 96

6.6. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum 96
6.7. Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal per Tahun 97
6.8. Ketaatan RTRW 98
6.10. Air dan Sanitasi 98
6.11. Rasio Ketersediaan Daya Listrik 98
6.12. Jumlah Desa Berlistrik 99
6.13. Rumah Tangga dengan Hunian Layak 99
6.14. Persentase Desa Mandiri 102
6.15. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 103
7. Stabilitas Ekonomi Makro 104
7.1. Tingkat Inflasi 104
D. Aspek Pelayanan Umum 106
1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 106
1.1. Indeks Reformasi Hukum 106
1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 106
1.3. Indeks Pelayanan Publik 107
1.4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 107
1.5. Indeks Integritas Nasional 108
2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 108
2.1. Persentase Penegakan Perda 108
2.2. Persentase pencapaian Aksi HAM 109
2.3. Indeks Demokrasi Indonesia 109
2.4. Indeks Rasa Aman 110
2.5. Indeks Ketentraman dan Ketertiban 110
2.6. Angka Kriminalitas 111
3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 112
3.1. Indeks Daya Saing Daerah 112
3.2. Perbaikan Daya Saing Investasi 112
4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah 113
2.2. Gambaran Keuangan Daerah 153
A. Kinerja Keuangan Masa Lalu 153
1. Kinerja Pelaksanaan APBD 154
1.1. Pendapatan Daerah 155
1.2. Belanja Daerah 157
2. Neraca Daerah 160
B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 164
1. Proporsi Penggunaan Anggaran 164
2. Analisis Pembiayaan 166
C. Kerangka Pendanaan 168
1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 168
2. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 174
3. Kebijakan Alokasi Anggaran 174
D. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 175
2.3. Perumusan Kajian Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Barat 176
A. Analisis Indeks Diversitas Entropy *(Shannon Index)* 176
B. Analisis Keunggulan Komparatif (*Location Quotient*/LQ) 178
C. Analisis Keunggulan Kompetitif (*Shift Share Analysis*/SSA) 180

D. Sektor Basis atau Sektor Unggulan di Kabupaten Aceh Barat 183
E. Analisis Tipologi Wilayah (*Cluster Analysis*) 189
1. Metode Cluster Berhirarki 190
2. Metode Cluster Tidak Berhirarki 191
3. Hasil Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 192
F. Interpretasi Analisis Tipologi Klassen untuk Menentukan Masalah dan Isu Strategis 194
1. Kedudukan Aceh Barat dalam Konsistensi Provinsi Aceh 194
2. Fasilitas Pendidikan 198
3. Fasilitas Kesehatan 199
4. Fasilitas Ekonomi 199
5. Agregat 200
G. Analisis Lokasi Komoditas Pertanian Unggulan 201
1. Location Quontient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) 202
H. Evaluasi Kesesuaian Lahan 205
I. Analisis Klassen Typology (Sosial Ekonomi) 219
1. Persentase Penduduk Miskin dengan Rasio Penyedia Pangan 220
2. Persentase Penduduk Miskin dengan Lulusan SMA/Sederajat 221
3. Persentase Penduduk Miskin dengan Akses Listrik PLN 221
4. Persentase Penduduk Miskin dengan Rasio Fasilitas Ekonomi 222
5. Persentase Penduduk Miskin dengan Rasio Fasilitas Kesehatan 223
6. Persentase Penduduk Miskin dengan Rasio Fasilitas Pendidikan 224
7. Persentase Penduduk Miskin dengan Prevalensi Penyakit dan Tingkat Kriminalitas 225
8. Sintesis Tipologi Klassen per Kecamatan 227
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis 228
1. Permasalahan Pembangunan Daerah 228
1. Aspek Geografi dan Demografi 228
2. Aspek Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 230
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 232
4. Aspek Daya Saing Daerah 235
5. Aspek Pelayanan Umum 237
6. Aspek Keuangan Daerah 239
7. Aspek Kekhususan Aceh 240
2. Isu Strategis Daerah 241
1. Deskripsi Isu Strategis Kabupaten Aceh Barat 252

BAB III 1
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 1
3.1.1. Visi 1
3.1.2. Misi 1
3.1.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 3
3.1.4. Penyelarasan Visi dan Misi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional 9
3.2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 26
3.3. Akselerasi Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat 65
3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi 65
3.3.2. Pengentasan Kemiskinan 76

3.3.2.1. Optimalisasi Peran Perusahaan Tambang untuk Pengentasan Kemiskinan 81
3.3.2.2. Intervensi Kemiskinan dan Stunting Terintegrasi 85
3.3.3. Pengangguran 88
3.3.4. Inflasi 102
3.3.5. Pembangunan Kewilayahan 107
3.3.5.1 Pembangunan Kawasan Pertanian 107
3.3.5.2 Pembangunan Kawasan Perkebunan 112
3.3.5.3 Pembangunan Kawasan Peternakan 117
3.3.5.4 Pembangunan Kawasan Perikanan 123
3.3.5.5 Pengembangan Kawasan Transmigrasi 127
3.3.5.6 Wilayah Pertambangan Rakyat 139
3.3.5.7 Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan 142
3.3.6 Hilirisasi Komoditi unggulan 149
3.3.6.1 Potensi Hilirisasi Komoditi Padi 149
3.3.6.2 Potensi Hilirisasi Komoditi Jagung 150
3.3.6.3 Potensi Hilirisasi Komoditi Cabai 151
3.3.6.4 Potensi Hilirisasi Komoditi Kelapa Sawit 151
3.3.6.5 Potensi Hilirisasi Kelapa 152
3.3.6.6 Potensi Hilirisasi Komoditas Karet 152
3.3.6.7 Potensi Hilirisasi Komoditi Nilam 153
3.3.6.8 Potensi Hilirisasi Komoditi Kopi 153
3.3.6.9 Potensi Hilirisasi Sektor Peternakan 154
3.3.6.10 Potensi Hilirisasi Sektor Perikanan 155
3.3.7 Konsinyasi Pengembangan Sektor Perkebunan dan Peternakan 155
3.3.8 Pengembangan Pariwisata 158
3.3.8.1 Kalender Pariwisata 158
3.3.8.2 Pengembangan Kawasan Wisata 158
3.3.9 Pembangunan Desa 175
3.3.9.1 Pembangunan Nasional : Menemukan Titik Awal dari Desa 175
3.3.9.2 Wajah Desa Indonesia : antara Makro dan Kenyataan Mikro 176
3.3.9.3 Tantangan Pembangunan Desa 178
3.3.9.4 Strategi Pembangunan Desa di Kabupaten Aceh Barat 179
3.3.10 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 180
3.3.11 Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 183
3.3.12 ZIS untuk Mengakselerasi Pembangunan 188
3.3.12.1 Pengertian ZIS 188
3.3.12.2 Potensi ZIS 188
3.3.12.3 Upaya Peningkatan ZIS 189
3.3.12.4 Optimalisasi Pemanfaatan ZIS 193
3.3.12.5 Program ZIS dalam Pembangunan Daerah 197
3.3.13 MCSP 200
3.3.13.1 Pengertian MCSP 200
3.3.13.2 Tujuan *Monitoring*, *Controlling, Surveilance For Prevention* (MCSP) 200
3.3.13.3 Ruang Lingkup *Monitoring, Controlling, Surveilance For Prevention (MCSP)* 201
3.3.15 Peningkatan Mutu Pendidikan 220
3.3.15.1 Upaya dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan 220

3.3.15.2 Arah Kebijakan Mutu Pendidikan....225
3.1.15.2 Program Pembangunan Daerah Terkait Mutu Pendidikan....230
3.1.16 Peningkatan Kualitas Kesehatan....234
3.3.16.1 Kriteria Kualitas Kesehatan....234
3.3.16.2 Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan....246
3.3.17 Pengembangan Komoditi Ekspor....276
3.3.17.1 Potensi Komoditi Ekspor di Kabupaten Aceh Barat....276
3.3.17.2 Strategi Pengembangannya dari Budidaya Sampai Pemasaran....280
3.3.17.3 Arah Kebijakan....283
3.3.17.4 Program Pembangunan Daerah....296
3.3.18 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan....299
3.3.19 Kebencanaan....302
3.3.19.1 Risiko Bencana di Kabupaten Aceh Barat....302
3.3.19.1 Rekomendasi Penanggulangan Bencana Aceh Barat 2025-2029....304
3.3.20 Agenda Pembangunan Strategis....309
3.3.20.1 Bantuan Dana Bagi Keluarga Pendamping Pasien yang Dirujuk ke Luar Daerah....309
3.3.20.2 Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah....310
3.3.20.3 Pengembangan Kawasan Pertanian....312
3.3.20.4 Pengembangan Kawasan Perikanan....313
3.3.20.5 Pengembangan Kawasan Peternakan Terintegrasi....313
3.3.20.6 Pemantapan Jalan dan Jembatan untuk Peningkatan Konektivitas Daerah....314
3.3.20.7 Pemugaran Sarana dan Prasarana Olahraga yang Represantif....316
3.3.20.8 Revitalisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh .317
3.3.20.9 Pengembangan Sentra UMKM Kuliner....319
3.3.20.10 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu....322
3.3.20.11 Pembangunan Taman Olahraga....325
3.3.20.12 Pemantapan Sanitasi....328
3.3.21 Pengembangan Ekonomi Kreatif....329

BAB IV....1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH....1
4.1 Program Perangkat Daerah....1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah....77

BAB V....1
PENUTUP....1
5.1 Pedoman Transisi....1
5.2 Kaidah Pelaksanaan....1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat 2
Tabel 2.2 Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Barat 3
Tabel 2.3 Klimatologi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 4
Tabel 2.4 Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah) 5
Tabel 2.5 Panjang Jalan Menurut Jenis Tingkat Kewenangan Pemerintah, Jenis Permukaan Jalan, dan Kondisi Jalan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 6
Tabel 2.6 Jumlah Desa Berlistrik di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 8
Tabel 2.7 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 dan 2024 (hektar) 10
Tabel 2.8 Izin Usaha Pertambangan pada Kegiatan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023 11
Tabel 2.9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Barat 13
Tabel 2.10 Tutupan Lahan Kabupaten Aceh Barat 13
Tabel 2.11 Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat 15
Tabel 2.12 Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat 15
Tabel 2.13 Hasil Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2023 16
Tabel 2.14 Status Ketersediaan Pangan pada Kabupaten Aceh Barat 17
Tabel 2.15 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Kecamatan 18
Tabel 2.16 Kondisi Pangan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 19
Tabel 2.17 Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 20
Tabel 2.18 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan pada PT PLN (Persero) Wilayah I Cabang Meulaboh Tahun 2020–2024 21
Tabel 2.19 Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 23
Tabel 2.20 Klasifikasi Kategori Rentang Nilai IKLH 25
Tabel 2.21 Rumus Perhitungan IKLH (PermenLHK No. 27 Tahun 2021) 25
Tabel 2.22 Ringkasan Nilai IKLH Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 25
Tabel 2.23 Jumlah Sampah Yang Masuk Ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) 26
Tabel 2.24 Jumlah Timbulan Sampah 27
Tabel 2.25 Pertanahan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 28
Tabel 2.26 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 29
Tabel 2.27 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 31

Tabel 2.28 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 31
Tabel 2.29 Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 32
Tabel 2.30 Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 32
Tabel 2.31 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024 34
Tabel 2.32 Proyeksi Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045 35
Tabel 2.33 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045 35
Tabel 2.34 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045 36
Tabel 2.35 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 48
Tabel 2.36 Jumlah Kasus Bidang Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 48
Tabel 2.37 Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 50
Tabel 2.38 Capaian SPM di Bidang Kesehatan 51
Tabel 2.39 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Barat 56
Tabel 2.40 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 ... 56
Tabel 2.41 Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 57
Tabel 2.42 Hasil Capaian SPM di Bidang Pendidikan 57
Tabel 2.43 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 57
Tabel 2.44 Angka Kelulusan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 58
Tabel 2.45 Angka Melanjutkan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019–2023 58
Tabel 2.46 Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2023 59
Tabel 2.47 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024.. 60
Tabel 2.48 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 62
Tabel 2.49 Jumlah Penduduk dan Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 64
Tabel 2.50 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 66
Tabel 2.51 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 72
Tabel 2.52 Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 73
Tabel 2.53 Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 75
Tabel 2.54 Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 77
Tabel 2.55 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 78
Tabel 2.56 Produk Domestik Regional Bruto Aceh Barat ADHB Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 80
Tabel 2.57 Produk Domestik Regional Bruto Aceh Barat ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022 (Juta Rupiah) 80
Tabel 2.58 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Aceh Barat Menurut ADHB Tahun 2020-2024 (Persen) 81
Tabel 2.59 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Aceh Barat Menurut ADHK Tahun 2020-2024 (Persen) 82
Tabel 2.60 Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 85
Tabel 2.61 IDSD Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2023 ... 86
Tabel 2.62 Capaian Ekonomi Hijau Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 88
Tabel 2.63 Indikator Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2023 89
Tabel 2.64 Indeks SPBE Kabupaten Aceh Barat 90
Tabel 2.65 Fasilitas Jalan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 92
Tabel 2.66 Rasio TPU dan Tempat Ibadah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 93
Tabel 2.67 Capaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum 93
Tabel 2.68 Capaian SPM di Bidang Tantribmas 94
Tabel 2.69 Capaian SPM di Bidang Sosial 94
Tabel 2.70 Indikator Perhubungan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 95
Tabel 2.71 Jenis dan Jumlah Kendaraan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 96
Tabel 2.72 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 2023 96
Tabel 2.73 Jumlah Pelanggan Perusahaan Air Minum di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 98
Tabel 2.74 Jumlah Desa Berlistrik di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 99
Tabel 2.75 Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 100
Tabel 2.76 Capaian SPM di Bidang Perumahan Rakyat 100
Tabel 2.77 Akses Air Minum di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 101
Tabel 2.78 Sanitasi, Drainase, dan Irigasi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 101
Tabel 2.79 Kawasan Kumuh di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 102
Tabel 2.80 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 103
Tabel 2.81 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2024 106
Tabel 2.82 Indeks SPBE Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 107
Tabel 2.83 Target Indeks Pelayanan Publik Kab. Aceh Barat Tahun 2020-2024 107
Tabel 2.84 Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 107

Tabel 2.85 Tabel Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 110
Tabel 2.86 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 110
Tabel 2.87 Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 111
Tabel 2.88 IDSD Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2023 ..112
Tabel 2.89 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2022 113
Tabel 2.90 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2024 114
Tabel 2.91 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2022 116
Tabel 2.92 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2024 142
Tabel 2.93 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 155
Tabel 2.94 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020–2024 158
Tabel 2.95 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 160
Tabel 2.96 *Balance Sheet Ratio* Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 163
Tabel 2. 97 Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 163
Tabel 2.98 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 2020-2024 (Persen) 164
Tabel 2.99 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 166
Tabel 2.100 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 171
Tabel 2.101 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025–2030 174
Tabel 2.102 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2030 175
Tabel 2. 103 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 176
Tabel 2.104 Nilai Indeks Diversitas Entropy Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Barat 177
Tabel 2.105 Nilai Entropy Total, Entropy Maksimum, dan Entropy Relatif Provinsi Aceh Tahun 2019 dan 2023 178
Tabel 2.106 Nilai LQ untuk Masing-Masing Sektor di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 dan 2023 179
Tabel 2.107 Nilai DS (SSA) untuk Masing-Masing Sektor di Kabupaten Aceh Barat

Tahun 2019-2023 181
Tabel 2.108 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Seluruh Sektor yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 dan 2023 183
Tabel 2.109 Nilai Indeks Diversitas Entropy Kab/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2019 184
Tabel 2.110 Nilai Indeks Diversitas Entropy Kab/Kota Se-Provinsi Aceh tahun 2023 185
Tabel 2.111 Nilai Indeks Location Quotient (LQ) Kab/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2019 185
Tabel 2.112 Nilai Indeks Location Quotient (LQ) Kab/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2023 187
Tabel 2.113 Nilai Indeks *Differential Shift* (DS) Hasil Analisis SSA (*Shift Share Analysis*) Kab/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2023 188
Tabel 2.114 Variabel-Variabel yang Digunakan dalam Analisis Tipologi Wilayah (*Cluster Analysis*) 192
Tabel 2.115 Indeks Fasilitas Pendidikan dan Hierarki Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 198
Tabel 2.116 Indeks Fasilitas Kesehatan dan Hierarki Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 199
Tabel 2.117 Indeks Fasilitas Ekonomi dan Hierarki Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 199
Tabel 2.118 Nilai Indeks per Fasilitas dan Indeks Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 dan 2019 200
Tabel 2.119 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Komoditas Perkebunan yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 202
Tabel 2.120 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Komoditas Buah-Buahan yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 203
Tabel 2.121 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Komoditas Palawija yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 203
Tabel 2.122 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Peternakan yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 204
Tabel 2.123 Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Hortikultura Buah 205
Tabel 2.124 Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Hortikultura Sayuran 208
Tabel 2.125 Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Perkebunan 210
Tabel 2.126 Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Tanaman Pangan Selain Padi 216
Tabel 2.127 Luas Komoditas Unggulan Hasil Optimasi Pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat 218
Tabel 2.128 Sintesa Hasil Status Persentase Penduduk Miskin Terhadap Indikator Sosial-Ekonomi Per Kecamatan 220
Tabel 2.129 Sintesa Hasil Status Persentase Penduduk Miskin Terhadap Indikator

Sosial Per Kecamatan....225
Tabel 2.130 Sintesa Hasil (Simpulan) Pemetaan Tipologi Klassen di Masing-Masing Kecamatan....227
Tabel 2.131 *Long List* dan Skoring Isu Internal....243

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029....3
Tabel 3.2 Tabel Keselarasan Visi dan Misi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 dengan Provinsi Aceh dan Nasional....9
Tabel 3.3 Cascading RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029....11
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029....26
Tabel 3.5 Cascading Program Prioritas RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029....27
Tabel 3.6 Arah Kebijakan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029....55
Tabel 3.7 100 Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029....59
Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2024....67
Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2024....69
Tabel 3.10 Analisis komparasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat....70
Tabel 3.11 Prioritas Sektor Usaha Berpotensi Berdasarkan Pertumbuhan Riil Tahun 2024....75
Tabel 3.12 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat, 2022-2024 100
Tabel 3.13 IHK dan Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Desember 2024....105
Tabel 3.14 Potensi Alam Yang Dapat Dikembangkan Sebagai Mata Pencaharian Penduduk Yang Berada atau Disekitar Kawasan Transmigrasi....135
Tabel 3.15 Fasilitas Pendidikan yang Berada Didalam/Berdekatan dengan Kawasan Transmigrasi....136
Tabel 3.16 Fasilitas Kesehatan Yang Berada Didalam/Berdekatan dengan Kawasan Transmigrasi....136
Tabel 3.17 Lokasi Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat Komoditi Emas di Kabupaten Aceh Barat....141
Tabel 3.18 Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional, Aceh dan Aceh Barat 142

Tabel 3.19 Daftar Program Pendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang Termuat dalam Dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029.....145
Tabel 3.20 Kalender Wisata Aceh Barat 158
Tabel 3.21 Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Wisata Alam Sikundo 161
Tabel 3.22 Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Wisata Geunang Geudong.....165
Tabel 3.23 Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Wisata Mangrove 168
Tabel 3.24 Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Wisata Pantai Lanaga 175
Tabel 3.25 Proyeksi Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2030 185
Tabel 3.26 Tabel Penjelasan lebih lanjut Terkait ZIS 188
Tabel 3.27 Prinsip Utama Pemberdayaan Ekonomi ZIS.....193
Tabel 3.28 Mitra Kerja Sama Pengelolaan ZIS Kabupaten Aceh Barat 195
Tabel 3.29 Tabel hubungan antara asnaf ZIS dengan target pembangunan 196
Tabel 3.30 Capaian Rapor Pendidikan Kab/Kota se Aceh Tahun 2025 220
Tabel 3.31 Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024.....235
Tabel 3.32 Sebaran Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi Tahun 2021-2024.....237
Tabel 3.33 Distribusi Penyakit Menular Tahun 2024 245
Tabel 3.34 Strategi Penguatan Layanan Kesehatan Dasar 251
Tabel 3.35 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Barat Menurut Lapangan Usaha (2020–2024) *Dalam Miliar Rupiah* 277
Tabel 3.36 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Komoditas Perkebunan yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 279
Tabel 3.37 Implementasi Kebijakan Pengembangan Komoditi Ekspor 284
Tabel 3.38 Rencana Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Aceh Barat 315
Tabel 3.39 Lokasi Pemugaran dan Kebutuhan Sarana Prasarana Olah Raga di Kabupaten Aceh Barat.....316
Tabel 3.40 Rencana Optimalisasi PDAM Tirta Meulaboh pada SPAM Lapang, SPAM Beureugang dan SPAM Ranto Panyang 319
Tabel 3.41 Konsep Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir di Kabupaten Aceh Barat. 322
Tabel 3.42 Sarana dan Prasarana yang di Butuhkan pada Pembangunan TPST 3R di TPA Gunong Mata Ie.....325
Tabel 3.43 Produk Hasil Yang Diolah TPST di TPA Gunong Mata Ie 325
Tabel 3.44 Konsep Pengembangan Taman Olahraga di Kabupaten Aceh Barat.....327
Tabel 3.45 Ruang, Aktivitas dan Fasilitas Yang di Butuhkan Dalam Taman Olahraga 327
Tabel 3.46 Ruang, Aktivitas dan Fasilitas yang di Butuhkan Dalam Taman Olahraga 328

Tabel 3.47 Pemantapan Sanitasi Pada Lingkungan Sekitar Fasilitas Dasar dan Fasilitas Umum di Kabupaten Aceh Barat 329
Tabel 3.48 Klasifikasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Aceh Barat 329

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026-2030 2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2030 77
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2030 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 6
Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Barat 2025-2029 .. 11

Gambar 2.1 Luas Kabupaten Aceh Barat (Km²) Tahun 2024 2
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Pengguna Telepon di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 9
Gambar 2.3 Luas Panen Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 10
Gambar 2.4 Tata Guna Lahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 14
Gambar 2.5 Perubahan Tata Guna Lahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2003-2021 14
Gambar 2.6 Proyeksi Pola Pangan Harapan 2019-2023 20
Gambar 2.7 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 22
Gambar 2.8 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 24
Gambar 2.9 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 26
Gambar 2.10 Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 33
Gambar 2.11 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Usia 36
Gambar 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 37
Gambar 2.13 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, ... 39
Gambar 2.14 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 40
Gambar 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, ... 41
Gambar 2.16 Indeks Gini Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024 43
Gambar 2.17 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, ... 44
Gambar 2.18 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat, ... 45
Gambar 2.19 Prevalensi Stunting Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2023 46
Gambar 2.20 Perkembangan UHC Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2024 47
Gambar 2.21 Rasio Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat 48
Gambar 2.22 Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup 49
Gambar 2.23 Proyeksi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2025-2029 49
Gambar 2.24 Cakupan Layanan Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat 50
Gambar 2.25 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Barat, ... 52
Gambar 2.26 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Barat, ... 53
Gambar 2.27 Perbandingan Nilai Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP 54
Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat 55
Gambar 2.29 Grafik Angka Melanjutkan Sekolah di Aceh Barat 58
Gambar 2.30 Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat 59
Gambar 2.31 Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1/D4 di Kabupaten Aceh Barat 60

Gambar 2.32 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020-2024 di Kabupaten Aceh Barat 61
Gambar 2.33 Indeks Pembangunan Syariah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 dan 2024 65
Gambar 2.34 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Aceh Barat (2022-2023) 67
Gambar 2.35 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kabupaten Aceh Barat (2022-2023) 68
Gambar 2.36 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Barat, ... 69
Gambar 2.37 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Barat, ... 71
Gambar 2.38 Capaian Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Aceh Barat 73
Gambar 2.39 Laju Pertumbuhan dan TFR Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 74
Gambar 2.40 Proyeksi *Total Fertility Rate* Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 74
Gambar 2.41 Rasio Akseptor KB dan Penggunaan Kontrasepsi 75
Gambar 2.42 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 79
Gambar 2.43 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 80
Gambar 2.44 PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023 83
Gambar 2.45 Rasio PDRB Industri Pengolahan Aceh Barat Tahun 2020-2024 83
Gambar 2.46 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Aceh Barat Tahun 2020-2024 84
Gambar 2.47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 85
Gambar 2.48 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi 86
Gambar 2.49 Indeks Ekonomi Hijau Indonesia 87
Gambar 2.50 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 88
Gambar 2.51 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Aceh Barat 90
Gambar 2.52 Tingkat Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024** 91
Gambar 2.53 Fasilitas Jalan di Kabupaten Aceh Barat 92
Gambar 2.54 Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Ibadah 93
Gambar 2.55 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum 97
Gambar 2.56 Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal 97
Gambar 2.57 Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 98
Gambar 2.58 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 99
Gambar 2.59 Rasio Rumah dan Permukiman Layak di Kabupaten Aceh Barat 100
Gambar 2.60 Akses Air Minum di Aceh Barat 101
Gambar 2.61 Sanitasi dan Drainase di Kabupaten Aceh Barat 102
Gambar 2.62 Persentase Desa Berstatus Swasembada di Kabupaten Aceh Barat 102
Gambar 2.63 Jumlah Desa Berdasarkan Tingkatan Status Desa di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 103
Gambar 2.64 Indikator Pemberdayaan Masyarakat di Aceh Barat 104
Gambar 2.65 Inflasi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2019-2023 105
Gambar 2.66 Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Aceh Barat 108
Gambar 2.67 Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Aceh Barat 111
Gambar 2.68 Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan 154
Gambar 2.69 Nilai *Differential Shift* Seluruh Sektor di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 Diurutkan Dari Nilai Tertinggi Hingga Terendah 182

Gambar 2.70 Contoh Bentuk Dendogram Hasil Analisis Cluster Berhierarki 190
Gambar 2.71 Contoh Tampilan Hasil Analisis Cluster Menggunakan Metode *K-Maens Clustering* 191
Gambar 2.72 Dendogram Hasil Analisis Cluster Dengan Metode *Joining Tree Clustering* 193
Gambar 2.73 *Plot of Mean for Each Cluster* 194
Gambar 2.74 Tipologi Klassen Persentase Penduduk Miskin dengan Indikator Ekonomi 194
Gambar 2.75 Tipologi Klassen Indeks Pembangunan Manusia dengan Indikator Sosial-Ekonomi 196
Gambar 2.76 Tipologi Klassen komponen IPM dengan Indikator Sosial-Ekonomi 197
Gambar 2.77 Peta Kelas Hierarki IPK Tahun 2019 201
Gambar 2.78 Peta Kelas Hierarki IPK Tahun 2023 201
Gambar 2.79 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Jeruk 205
Gambar 2.80 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Mangga 206
Gambar 2.81 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Manggis 206
Gambar 2.82 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Nenas 207
Gambar 2.83 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Pepaya 207
Gambar 2.84 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Pisang 208
Gambar 2.85 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Cabe Merah 209
Gambar 2.86 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Bawang Merah 209
Gambar 2.87 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Sawi 210
Gambar 2.88 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Terong 210
Gambar 2.89 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Cengkeh 211
Gambar 2.90 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Duku 212
Gambar 2.91 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Durian 212
Gambar 2.92 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Gambir 213
Gambar 2.93 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Kakao 213
Gambar 2.94 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Karet 214
Gambar 2.95 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Kelapa Sawit 214
Gambar 2. 96 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Kelapa 215
Gambar 2.97 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Kopi Robusta 215
Gambar 2.98 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Rambutan 216
Gambar 2. 99 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Jagung 216
Gambar 2.100 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Ubi Kayu 217
Gambar 2.101 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Ubi Jalar 217
Gambar 2.102 Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Kedelai 218
Gambar 2.103 Peta Komoditas Unggulan Tiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat 219
Gambar 2.104 Tipologi Klassen Persentase Penduduk Miskin dengan Indikator Sosial-Ekonomi Per Kecamatan 219
Gambar 2.105 Tipologi Klassen Persentase Penduduk Miskin dengan Indikator Sosial-Ekonomi Per Kecamatan 225
Gambar 2.106 Proses Sintesis Isu Strategis 242

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 66
Gambar 3.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024 78

Gambar 3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat (2020-2024) 79
Gambar 3.4 Optimalisasi Peran Perusahaan Tambang untuk Pengentasan Kemiskinan 83
Gambar 3.5 Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting..... 86
Gambar 3.6 Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 (Jiwa). 90
Gambar 3.7 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 (Jiwa)..... 92
Gambar 3.8 Perkembangan Tingkat Partisipasi Kerja di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024..... 93
Gambar 3.9 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Barat 95
Gambar 3.10 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional (Persen) 98
Gambar 3.11 Inflasi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020- 2024.....103
Gambar 3.12 Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Pertanian Padi di Kecamatan Kaway XVI 109
Gambar 3.13 Bagan Alir Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian 111
Gambar 3.14 Kawasan Perkebunan Rakyat.....113
Gambar 3.15 Bagan Alir Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat 117
Gambar 3.16 Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan ternak sawit terintegrasi Kelapa Sawit di Kecamatan Arongan Lambalek.....119
Gambar 3.17 Bagan Alir Pengelolaan Ternak Sapi Integrasi Kelapa Sawit 121
Gambar 3.18 Rencana Lokasi Kawasan Industri Perikanan di Gampong Padang Seurahet 124
Gambar 3.19 Rencana pengembangan Kawasan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.....125
Gambar 3.20 Lokasi Transmigrasi Gp. Alue Keumeuneng Kecamatan Woyla Barat 128
Gambar 3.21 Lokasi Transmigrasi Gampong Simpang Teumarom Kecamatan Woyla Barat 129
Gambar 3.22 Lokasi Transmigrasi di Gampong Gunong Pulo Kecamatan Arongan Lamabalek.....130
Gambar 3.23 Lokasi Transmigrasi di Gampong Karang Hampa Kecamatan Arongan Lambalek 131
Gambar 3.24 Lokasi Transmigrasi di Gampong Lango Kecamatan Pante Ceureumen ..132
Gambar 3.25 Lokasi Transmigrasi di Gampong Drien Sibak Kecamatan Sungai Mas 133
Gambar 3.26 Batas HPL Nol 42 dan No.43 Kawasan Eks Transmigrasi UPT. I, II, dan III Alue Peunyareng.....134
Gambar 3.27 Bagan Alir Pengembangan Kawasan Trasnmigrasi 139
Gambar 3.28 Bagan Alir Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat 140
Gambar 3.29 Lokasi Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat Komoditi Emas.....141
Gambar 3.30 Lokasi dan Rute Menuju ke Kawasan Wisata di Kabupaten Aceh Barat ..159
Gambar 3.31 Lokasi Rencana Wisata Alam Sikundo 160
Gambar 3.32 Bagan Alir Pengembangan Wisata Alam Sikundo 162
Gambar 3.33 Lokasi Wisata Alam Geunang Geudong 163
Gambar 3.34 Pengembangan kawasan wisata Geunang Geudong.....166
Gambar 3.35 Lokasi Rencana Pengembangan Ekowisata Mangrove Kuala Bubon.....167
Gambar 3.36 Rencana Pengembangan Ekowisata Mangrove di Aceh Barat.....170

Gambar 3.37 Lokasi Rencana Pengembangan Wisata Pantai/Pasie Lanaga Gp. Langung 172
Gambar 3.38 Bagan Alir Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Lanaga Gp. Langung 174
Gambar 3.39 Realisasi Anggaran Pelaksanaan TJSLP 5 Tahun Terakhir 185
Gambar 3.40 Realisasi Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah dan Penerima pada Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 189
Gambar 3.41 Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan ZIS 191
Gambar 3.42 Grafik Capaian Rapor Pendidikan Kab/Kota se-Aceh Tahun 2025. 221
Gambar 3.43 Strategi Penguatan Produksi dan Strandarisasi Mutu untuk Akselesasi Ekspor Komoditi Unggulan 280
Gambar 3.44 Strategi Penguatan Kelembagaan Petani dan Akses Pasar 281
Gambar 3.45 Strategi Penguatan Infrastruktur Perdagangan dan Pengembangan Ekosistem Ekspor 283
Gambar 3.46 Penguatan Kelembagaan Petani serta Akses Pembiayaan dan Pasar Ekspor 285
Gambar 3.47 Lokasi Alternatif ke-I Pelabuhan Ekspor di Pelabuhan Pengumpul Meulaboh (Eksisting) di Gp. Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan 288
Gambar 3.48 Lokasi Alternatif ke-II Pembangunan Baru Pelabuhan Ekspor di Area Kawasan Peruntukan Perikanan Padang Seurahet Gp. Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan 289
Gambar 3.49 Lokasi Alternatif Ke-III Pembangunan Baru Pelabuhan Ekspor di Area Kawasan Peruntukan Industri Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo 291
Gambar 3.50 Lokasi Alternatif Ke-IV Pembangunan Baru Pelabuhan Ekspor di Rencana Kawasan Peruntukan Industri Suak Timah 292
Gambar 3.51 Lokasi Alternatif Ke-V Pembangunan Baru Pelabuhan Ekspor pada Area Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Arongan 294
Gambar 3.52 Bagan Alir Optimalisasi Lahan Yang Berkelanjutan 302
Gambar 3.53 Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Aceh Barat dan Provinsi Aceh 2015-2024 303
Gambar 3.54 Jumlah jiwa terpapar terhadap masing-masing jenis bahaya di Kabupaten Aceh Barat (kiri) dan Jumlah estimasi kerugian 303
Gambar 3.55 Matrik Penanganan Bencana di Kabupaten Aceh Barat 304
Gambar 3.56 Pertokoan yang dimodifikasi menjadi tempat evakuasi tsunami alternatif di Kota Meulaboh. 308
Gambar 3.57 Jumlah Perkiraan Pasien yang Dirujuk ke Luar Daerah Melalui Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Tahun 2024 309
Gambar 3.58 Luasan Panen Padi (Ha) di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 310
Gambar 3.59 Bagan Alir Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir .. 324

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 didasari oleh kebutuhan untuk merumuskan kebijakan strategis yang dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien, guna mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam proses penyusunannya, berbagai data dan analisis yang komprehensif digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Barat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Dalam penyusunannya RPJM berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa RPJM Daerah selain merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, RPJM memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RPJM Kabupaten Aceh Barat 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, RPJM juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di samping menelaah RPJM dan RTRW Provinsi Aceh, agar terdapat keselarasan pembangunan antara wilayah kabupaten dalam koridor wilayah regionalnya. Selain memedomani RPJMN dan RPJP Daerah, juga dilakukan penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program Pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Secara rinci, tahapan penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Kick Off Meeting* RPJMA Tahun 2025-2029 pada tanggal 11 Februari 2025;

2. Penyusunan dan Penetapan Rancangan Teknokratik RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029;
3. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 pada tanggal 6 Maret 2025;
4. Penyusunan Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029;
5. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 pada tanggal 5 Maret 2025;
6. Penyampaian Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 kepada DPRK Aceh Barat pada tanggal 21 April 2025;
7. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan Tingkat Provinsi pada tanggal 24 April 2025;
8. Penyusunan dan Penetapan RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045 pada tanggal 14 Mei 2025;
9. Penyepakatan Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 bersama DPRK Aceh Barat pada tanggal 19 Mei 2025;
10. Konsultasi Rancangan Awal RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Aceh pada tanggal 22 Mei 2025;
11. Musrenbang RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 pada tanggal 26 Juni 2025;
12. Pelaksanaan Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 pada tanggal 6 Agustus 2025;
13. Penyampaian Rancangan Qanun RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 kepada DPRK Aceh Barat;
14. Pembahasan dan Persetujuan bersama dengan DPRK Aceh Barat pada tanggal 21 Agustus 2025;
15. Evaluasi Rancangan Akhir RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 bersama Gubernur Aceh pada tanggal 1 September 2025;
16. Penetapan Qanun RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJM ini dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat/pemangku kepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun RPJM terdiri dari pendekatan politik, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif serta pendekatan atas bawah dan bawah atas, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen ini penting untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun ke depan. Beberapa poin utama yang melatarbelakangi penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat ini antara lain:

1. Kebutuhan untuk Perencanaan yang Terpadu dan Strategis
   Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu. RPJM ini akan menjadi pedoman bagi semua pihak terkait untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati.
2. Evaluasi Pencapaian Pembangunan Sebelumnya
   Penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat ini didasarkan pada evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya. Analisis terhadap keberhasilan dan hambatan yang dihadapi akan menjadi bahan pembelajaran untuk perencanaan yang lebih baik di periode berikutnya.
3. Perubahan Dinamika Sosial dan Ekonomi
   Perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cepat di Kabupaten Aceh Barat memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan inovatif. Dibuatnya Rancangan Teknokratik dibuat untuk menghadapi tantangan-tantangan baru serta memanfaatkan peluang yang ada demi kesejahteraan masyarakat.
4. Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi
   Masyarakat semakin menuntut pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Rancangan dokumen ini dibuat dengan pendekatan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Kesesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi
   Dokumen ini harus sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini untuk memastikan sinergi dan konsistensi kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

Dengan latar belakang ini, Dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengarahkan pembangunan daerah secara holistik, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 harus didasarkan pada berbagai dasar hukum yang relevan dan signifikan. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang penting dalam penyusunan dokumen RPJM Kabupaten Barat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 151);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 1).

Dasar-dasar hukum tersebut memberikan landasan yang kuat dan kerangka kerja yang jelas bagi penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029, memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diimplementasikan secara efektif.

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Berikut adalah penjelasan hubungan tersebut:

1. Hubungan dengan RPJP Kabupaten Aceh Barat 2025-2045
   RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi daerah periode pertama Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045. Dokumen RPJM ini dibuat dengan memperhatikan Sasaran Visi, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok yang telah ditetapkan sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya cita-cita pembangunan pada akhir tahun 2045.
2. Hubungan dengan RTRW Kabupaten Aceh Barat
   RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Aceh Barat adalah dokumen yang mengatur penggunaan ruang di wilayah kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun. Salah satu analisa yang dilakukan dalam pembuatan Rancangan Teknokratik adalah analisa spasial yang bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan berdasarkan potensi wilayah sehingga diperoleh keterpaduan pelaksanaan pembangunan, mendukung pembangunan berkelanjutan serta menghindari konflik pemanfaatan ruang. dilakukan harus selaras dengan RTRW agar pembangunan yang direncanakan tidak bertentangan dengan pola ruang yang telah ditetapkan. RPJM harus mempertimbangkan penataan ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan menghindari konflik pemanfaatan ruang.
3. Hubungan dengan RPJM Provinsi Aceh
   Penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 juga memperhatikan RPJM Provinsi Aceh Tahun 2025-2029 terutama dalam melakukan pemetaan masalah, isu strategis. Hal ini perlu dilakukan penyelarasan karena masalah yang terdapat di Aceh juga merupakan akumulasi masalah yang terdapat dari Kabupaten/kota di Aceh.
4. Hubungan dengan Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
   KLHS adalah dokumen yang menilai dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Dokumen harus disusun dengan mempertimbangkan hasil KLHS untuk memastikan bahwa rencana pembangunan tidak merusak lingkungan dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS memberikan panduan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap tahap perencanaan pembangunan.
5. Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
   Dokumen perencanaan lainnya yang digunakan sebagai acuan informasi antara lain adalah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Wilayah (RIPW), yang memuat model pembangunan berdasarkan potensi masing-masing wilayah sehingga menjadi data yang sangat relevan dalam penyusunan dokumen ini ini.

Dengan demikian, RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 berperan sebagai dokumen strategis untuk menyelaraskan berbagai rencana pembangunan di berbagai

tingkatan, memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Aceh Barat berjalan terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar 1.1

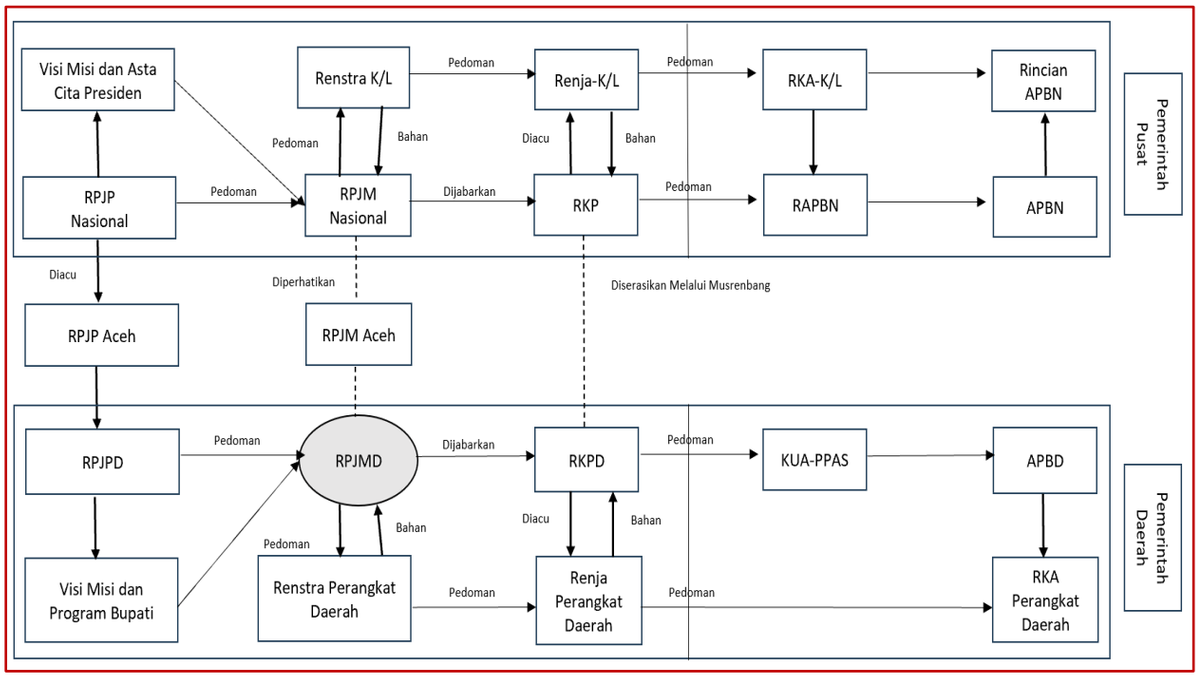

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Barat 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

1.4.2 Tujuan

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menelaah kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan
5. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat 5 (lima) tahun kedepan.
6. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah.
7. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target Tahun 2025-2029.
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan perencanaan penganggaran;

9. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.

1.5 Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang Penyusunan
   Merumuskan latar belakang penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029.
2. Dasar Hukum
   Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029.
3. Hubungan Antara Dokumen RPJM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
   Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJP Kabupaten Aceh Barat 2025- 2045 dengan RTRW serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.
4. Maksud dan Tujuan
   Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029.
5. Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini disusun melalui pengolahan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan yang disertai analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Analisis dilakukan menggunakan data 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024). Penyajian pada Bab II memuat hal-hal sebagai berikut:

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

a. Aspek Geografi dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai dengan karakteristik daerah.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Menjelaskan potensi sumber daya alam yang merupakan keunggulan komparatif daerah sehingga dapat dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan Pembangunan berkelanjutan.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menjelaskan tentang kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan

7. Demografi

Aspek demografi menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

Sub aspek ini menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi dengan menggunakan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2. Kesehatan untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa.

6. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender.

c. Aspek Daya Saing

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah

2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Menjelaskan kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan.

4. Transformasi Digital

Menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital.

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global

6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menjelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan

7. Stabilitas Ekonomi Makro

Menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan

d. Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan.

4. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Menjelaskan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.

e. Gambaran Keuangan Daerah

f. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJM 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Isu Strategis Daerah

Mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, RPJP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045, Laporan KLHS RPJM 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelasan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2025-2029, serta tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya untuk setiap misi pembangunan.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
   a. Visi
   b. Misi
   c. Tujuan, Sasaran dan Strategi
   d. Penyelarasan Visi dan Misi Kabupaten Aceh Barat
2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
   a. Arah Kebijakan
   b. Program Prioritas
3. Akselerasi Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Program Perangkat Daerah
   a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah
   b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

Bab ini memuat indikator program pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat periode RPJM Tahun 2025-2029 beserta kebutuhan pendanaan indikatif. program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
   Bab ini memuat berbagai indikator kinerja utama daerah Kabupaten Aceh Barat dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja.
   a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
   b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJM yakni bahwa RPJM merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan digunakan dalam penyusunan RKPD.

1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 merupakan proses penting, karena menjadi landasan utama dalam penyusunan RPJM yang bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Kerangka pikir penyusunan RPJM ini dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses penyusunan didasarkan pada analisis yang komprehensif dan disertai data yang akurat.

Tahapan awal dimulai dengan proses Analisis, yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi Data Capaian Pembangunan dari periode sebelumnya. Langkah ini penting untuk memahami

kondisi eksisting serta kemajuan yang telah dicapai. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan berbagai metode kuantitatif dan spasial, termasuk Indeks Diversitas Entropi, *Location Quotient* (LQ), *Shift Share Analysis* (SSA), Analisis Skalogram, Analisis Tipologi Klassen, Analisis *Cluster*, dan Analisis Kesesuaian Lahan.

Setelah data dianalisis serta mempertimbangkan standar regulasi, maka didapatlah daftar permasalahan pembangunan, kemudian dilakukan Analisis Pembobotan untuk mengidentifikasi Permasalahan Pembangunan dalam rangka menentukan isu Strategis yang memerlukan perhatian dan solusi khusus. Kemudian, isu strategis tersebut dianalisa dengan mempertimbangkan hasil FGD Permasalahan dan Isu Strategis bersama OPD untuk menentukan Isu Strategis terpilih dan juga rekomendasinya.

Secara umum kerangka pemikiran penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 1.2.

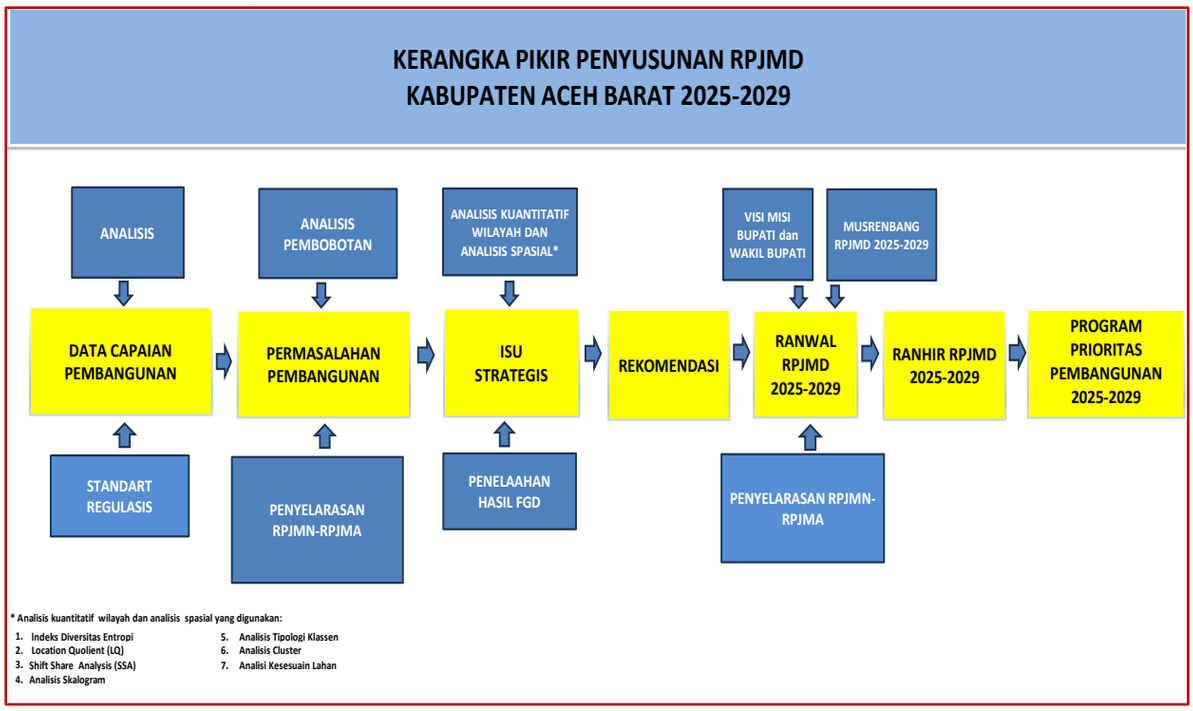

Gambar 1.2
Kerangka Pikir Penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

A. Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh, dilakukan penyesuaian administrasi dan wilayah yang mencakup pemekaran beberapa kabupaten di dalamnya. Salah satu wilayah yang mengalami pemekaran adalah Aceh Barat. Tujuan utama dari pemekaran ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat setempat. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan administrasi dan pembangunan daerah.

Pada tahun 1996, sebagai bagian dari proses pemekaran, Kabupaten Aceh Barat dibagi menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Administratif Simeulue. Proses pemekaran ini berlanjut pada tahun 2000, ketika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat diperluas dengan menambah enam kecamatan baru. Langkah ini diambil untuk lebih mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2002, Kabupaten Aceh Barat kembali mengalami pemekaran menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Barat. Pemekaran ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2002. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan kondisi umum daerah Aceh Barat dapat digambarkan dengan lebih jelas, mencerminkan perubahan administratif dan geografis yang telah terjadi, serta memperkuat struktur pemerintahan di daerah tersebut untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1.1. Geografi

Kabupaten Aceh Barat secara geografis terletak pada koordinat 04°06’ – 04°47’ Lintang Utara dan 95°52’- 96°20’ Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 292.795 Ha atau 2.927,95 km^2. Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya
- Sebelah Selatan : Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Pembagian wilayah Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan, 36 mukim, dan 322 gampong. Dari jumlah tersebut, sebanyak 192 gampong berada di dataran, 83 gampong terletak di lembah, dan 47 gampong terletak di lereng. Struktur pembagian wilayah ini mencerminkan keberagaman topografi di Kabupaten Aceh Barat, yang mempengaruhi pola kehidupan dan aktivitas masyarakat setempat. Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Barat, Woyla Timur, Kaway XVI, Meureubo, Pante Ceureumen, Panton Reu, dan Sungai Mas. Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan luas wilayah yang berbeda-beda,

yang menentukan peran dan fungsi masing-masing kecamatan dalam administrasi dan pembangunan daerah. Kecamatan terluas di Kabupaten Aceh Barat adalah Kecamatan Sungai Mas dengan luas wilayah 781,73 km^2, yang mencakup 26,70% dari total luas wilayah kabupaten. Kecamatan ini diikuti oleh Kecamatan Kaway XVI dengan luas wilayah 510,18 km^2 atau 17,42% dari luas wilayah kabupaten. Kecamatan Pante Ceureumen berada di urutan ketiga dengan luas 490,25 km^2, yang mencakup 16,74% dari luas wilayah kabupaten. Luas wilayah kecamatan lainnya berkisar antara 1,53% hingga 8,51% dari total luas Kabupaten Aceh Barat. Secara rinci, luas wilayah pada setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat disajikan dalam Tabel 2.1 dan Gambar 2.1. Informasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi geografis dan administrasi di wilayah tersebut, yang penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2.1 Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)	Luas total Area (km^2)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Johan Pahlawan	Meulaboh	0	44,91	1,53
2	Samatiga	Suak Timah	11	140,69	4,81
3	Bubon	Banda Layung	25	129,58	4,43
4	Arongan Lambalek	Drien Rampak	22	130,06	4,44
5	Woyla	Kuala Bhee	38	249,04	8,51
6	Woyla Barat	Pasi Mali	52	123,00	4,20
7	Woyla Timur	Tangkeh	43	132,60	4,53
8	Kaway XVI	Keudee Aron	14	510,18	17,42
9	Meureubo	Meureubo	3	112,87	3,85
10	Pante Ceureumen	Pante Ceureumen	44	490,25	16,74
11	Pantai Reu	Meutulang	45	83,04	2,84
12	Sungai Mas	Kajeung	65	781,73	26,70
Aceh Barat		**Meulaboh**	**0**	**2.927,95**	**100,00**

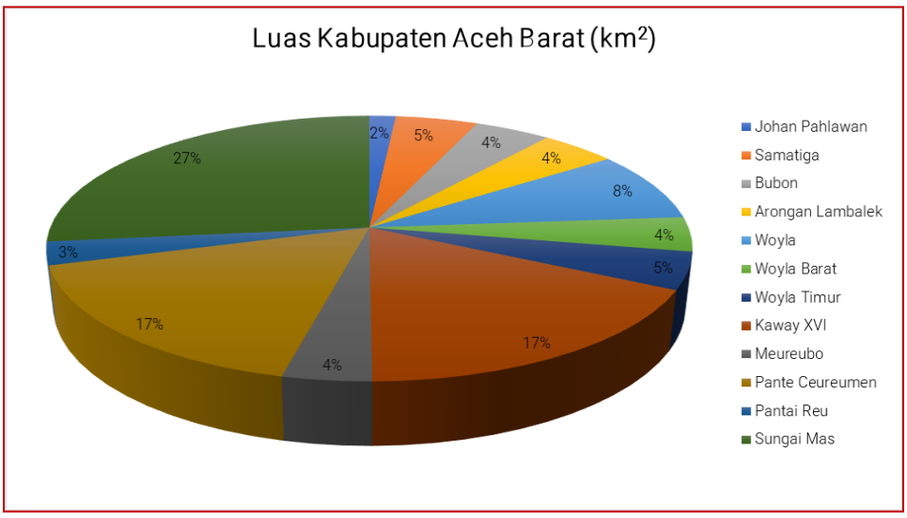

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

Gambar 2.1
Luas Kabupaten Aceh Barat (Km^2) Tahun 2024

1.2. Topografi

Topografi merupakan representasi permukaan bumi berdasarkan parameter tertentu seperti perbedaan ketinggian di atas permukaan laut, bentuk wilayah, dan kemiringan lereng. Kondisi fisik Kabupaten Aceh Barat sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dengan bentuk topografi daerah pegunungan di bagian utara yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan dan termasuk dalam ekosistem Leuser. Berdasarkan kajian lereng

dengan menggunakan skala Maberry, dapat dikatakan Kabupaten Aceh Barat memiliki lahan yang sesuai untuk pengembangan wilayah karena memiliki sudut lereng berkisar antara 0 sampai 3 persen. Apabila ditinjau dari kontur wilayah, maka sebagian wilayah di Kecamatan Sungai Mas dan Pante Ceureumen memiliki ketinggian di atas 1500 mdpl, sedangkan sekitar 20 persen dari keseluruhan wilayah yang merupakan dataran pesisir berada pada ketinggian sekitar 25 mdpl dan mencakup Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo. Kemiringan lereng Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Barat

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	< 8 %	193.171,70	69,89
2	8% - 15%	40.259,02	14,56
3	16% - 25%	31.063,29	11,24
4	26% - 40%	5.891,33	2,13
5	>40%	6.022,88	2,18
Jumlah		**276.408,23**	**100,00**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat 2012-2032

1.3. Geologi dan Jenis Tanah

Struktur geologi memberikan gambaran mengenai formasi batuan penyusun obyek di atas permukaan bumi. Formasi ini menunjukkan susunan batuan yang memiliki kesamaan ciri-ciri geologis yang terdiri dari satu macam jenis atau lebih yang terletak di bawah maupun di atas permukaan bumi. Kabupaten Aceh Barat terletak di antara dua patahan (sebelah Timur-Utara dan sebelah Barat-Selatan Kota) terletak pada pertemuan *Plate* Eurasia dan Australia, ± 130 km dari pantai barat sehingga kabupaten ini rawan terjadi tsunami. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian Departemen Pertambangan dan Energi, Kabupaten Aceh Barat mempunyai potensi bahan galian/pertambangan, termasuk batu bara (di gampong Bukit Jaya, Kecamatan Meureubo). Sebelum tsunami, 15.000 hektar minyak lepas pantai dan emas akan dieksplorasi di Kecamatan Sungai Mas, sedangkan Kecamatan Woyla dan Pante Ceureumen kaya akan batu kapur/gamping, batu koral, kerikil, dan pasir. Kondisi geologi tanah yang berbentuk sedimen mencapai 58,05% atau setara dengan 586.525 Ha. Mayoritas wilayah daratannya merupakan tanah podsolik merah kuning dengan kedalaman tanah relatif dalam, yakni lebih dari 60 cm yang terdapat di Kecamatan Kaway XVI dan Sungai Mas, sedangkan kedalaman tanah lebih dari 90 cm ditemukan hampir merata di seluruh wilayah kecamatan. Secara umum terdapat 12 jenis tanah di Kabupaten Aceh Barat antara lain Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol, Lito, Andosol, Komplek Podsolik Coklat, Podsol, Litosol, Podsolik Merah Kuning, Organosol, Gle Humus, Posolik Merah Kuning dan Regosol.

1.4. Hidrologi

Aspek hidrologi sangat erat kaitannya terhadap ketersediaan sumber daya air, di mana Daerah Aliran Sungai (DAS) atau *catchment* area memiliki peranan penting dalam menjaga ketersediaan sumber daya air tersebut. Potensi sumber daya air sangat besar karena dialiri oleh dua sungai besar yaitu Krueng Woyla dan Krueng Meureubo dengan debit lebih dari 250 liter/detik. Mengingat karakteristik dan aliran sungai ini, terdapat permasalahan berupa banjir periodik pada musim hujan. Banjir periodik ini terjadi dalam bentuk luapan air sungai, terutama di tempat yang perbedaan ketinggiannya dibandingkan muara sungai (permukaan laut) tidak terlalu besar seperti sungai di bagian Tengah dan Timur wilayah. Dari sungai-sungai di atas, yang paling banyak mengalami permasalahan banjir adalah Sungai Krueng Woyla dan Meureubo. Khususnya Krueng Meureubo yang terletak di zona banjir merupakan simpul perkotaan Meulaboh, ibu kota Aceh Barat. Selain wilayah

perkotaan Meulaboh (Kecamatan Johan Pahlawan), Kecamatan Meureubo dan Kecamatan Kaway XVI.

Sedangkan Krueng Woyla mencakup banjir yang sering terjadi di wilayah hilir sungai, khususnya Kecamatan Arongan Lambalek dan sebagian Kecamatan Samatiga. Untuk mengatasi permasalahan banjir, selain upaya membangun tanggul, mengatur atau mempersempit aliran, serta memperluas dan memperdalam sungai, perlu dipertimbangkan upaya untuk membangun waduk atau kolam retensi pada aliran Krueng Meureubo tersebut, di bagian lebih hulu dari wilayah Kecamatan Pante Ceuremen.

1.5. Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Aceh Barat termasuk kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 musim iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim mikro yang terbentuk di Kabupaten Aceh Barat dipengaruhi oleh kondisi suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, kecepatan angin, arah angin dan lamanya penyinaran matahari. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 menunjukkan bahwa Suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 26,9°C hingga 28,4°C, dengan suhu tertinggi mencapai 32,4°C pada bulan Februari dan April, sedangkan suhu terendah tercatat 23,4°C di bulan Agustus dan September. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 607 mm dengan 16 hari hujan, sementara bulan terkering terjadi pada Juli dengan curah hujan hanya 34 mm dan 6 hari hujan. Kelembapan udara juga tergolong tinggi dan relatif konstan sepanjang tahun, berkisar antara 88% hingga 91%, menunjukkan tingkat kelembapan yang mendukung iklim tropis lembap. Kecepatan angin rata-rata berada di kisaran 4–6 m/detik, dengan puncak tertinggi mencapai 9 m/detik pada bulan Mei, November, dan Desember, serta kecepatan terendah 1 m/detik pada Juli dan Agustus. Sementara itu, intensitas penyinaran matahari menunjukkan fluktuasi cukup signifikan, dengan angka tertinggi 81,3% pada Februari dan terendah 54,0% pada September. Data ini mencerminkan bahwa wilayah ini memiliki pola iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan kering, dengan karakteristik suhu dan kelembapan yang tinggi serta pola angin dan penyinaran yang relatif stabil sepanjang tahun. Adapun kondisi klimatologi Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Klimatologi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

No	Parameter	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Suhu Udara (°C)	27.6	28.0	27.8	28.2	28.4	27.7	27.6	26.9	26.9	27.0	27.0	26.9
	Terendah	23.7	24.0	24.2	24.6	24.5	23.8	23.5	23.4	23.4	23.7	23.6	23.5
	Tertinggi	32.0	32.4	32.0	32.4	32.0	31.7	31.7	31.1	31.1	31.7	31.7	31.7
2	Curah Hujan (mm)	450.0	390.0	435.0	407.0	516.0	231.0	34.00	462.0	312.0	475.0	274.0	607.0
	Hari Hujan	15	15	21	19	19	10	6	20	17	17	18	16
3	Kelembapan Udara (%)	89.0	88.0	89.0	90.0	90.0	89.0	89.0	90.0	89.0	90.0	90.0	91.0
	Terendah	70.0	73.0	68.0	76.0	75.0	70.0	69.0	73.0	73.0	73.0	71.0	74.0
	Tertinggi	98.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
4	Kecepatan Angin (m/det)	5.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	6.00
	Terendah	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00
	Tertinggi	7.00	8.00	8.00	8.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00
5	Lama Penyinaran Matahari (%)	73.6	81.3	69.1	74.6	63.4	70.3	74.0	55.6	54.0	73.3	64.1	61.5

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

1.6. Konribusi Ekonomi Kabupaten Aceh Barat terhadap Wilayah Sekitar

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu daerah dengan peran ekonomi yang cukup signifikan di Provinsi Aceh. Sebagai pusat administrasi dan ekonomi di wilayah barat Aceh, Aceh Barat memiliki struktur ekonomi yang relatif beragam, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, hingga jasa pemerintahan. Posisi geografis yang strategis serta ketersediaan infrastruktur yang memadai turut memperkuat fungsinya sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional.

Kontribusi Kabupaten Aceh Barat terhadap perekonomian Provinsi Aceh tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Aceh Barat mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp14.053,24 miliar, menempatkannya pada peringkat ke-7 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Capaian ini menegaskan bahwa Aceh Barat berada pada kelompok daerah dengan kontribusi menengah-atas di tingkat provinsi.

Tabel 2.4 Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	Rp 2,274	Rp 2,460	Rp 2,688	Rp 2,935	Rp 3,151
Aceh Singkil	Rp 2,423	Rp 2,714	Rp 3,005	Rp 3,203	Rp 3,441
Aceh Selatan	Rp 5,531	Rp 5,970	Rp 6,447	Rp 6,963	Rp 7,466
Aceh Tenggara	Rp 5,059	Rp 5,422	Rp 5,829	Rp 6,258	Rp 6,738
Aceh Timur	Rp 10,606	Rp 11,698	Rp 13,101	Rp 13,803	Rp 14,935
Aceh Tengah	Rp 7,387	Rp 8,032	Rp 8,873	Rp 9,843	Rp 10,721
Aceh Barat	Rp 8,109	Rp 9,983	Rp 12,730	Rp 13,572	Rp 14,053
Aceh Besar	Rp 13,329	Rp 14,050	Rp 15,457	Rp 17,068	Rp 18,412
Pidie	Rp 10,759	Rp 11,341	Rp 12,412	Rp 13,490	Rp 14,549
Bireuen	Rp 13,084	Rp 14,080	Rp 15,470	Rp 17,028	Rp 18,381
Aceh Utara	Rp 19,703	Rp 23,243	Rp 28,175	Rp 28,377	Rp 30,084
Aceh Barat Daya	Rp 3,917	Rp 4,138	Rp 4,546	Rp 4,965	Rp 5,368
Gayo Lues	Rp 2,693	Rp 2,861	Rp 3,077	Rp 3,336	Rp 3,583
Aceh Tamiang	Rp 7,513	Rp 8,873	Rp 10,433	Rp 10,729	Rp 11,542
Nagan Raya	Rp 7,657	Rp 9,086	Rp 10,643	Rp 11,871	Rp 12,432
Aceh Jaya	Rp 2,626	Rp 2,859	Rp 3,122	Rp 3,374	Rp 3,607
Bener Meriah	Rp 4,528	Rp 5,007	Rp 5,476	Rp 6,019	Rp 6,521
Pidie Jaya	Rp 3,500	Rp 3,680	Rp 3,980	Rp 4,349	Rp 4,725
Kota Banda Aceh	Rp 18,502	Rp 19,944	Rp 21,561	Rp 23,773	Rp 26,025
Kota Sabang	Rp 1,531	Rp 1,601	Rp 1,643	Rp 1,747	Rp 1,861
Kota Langsa	Rp 5,274	Rp 5,765	Rp 6,263	Rp 6,853	Rp 7,324
Kota Lhokseumawe	Rp 8,867	Rp 9,431	Rp 10,278	Rp 11,170	Rp 11,848
Kota Subulussalam	Rp 1,804	Rp 2,111	Rp 2,365	Rp 2,560	Rp 2,762
Provinsi Aceh	**Rp 166,676**	**Rp 184,350**	**Rp 207,572**	**Rp 223,285**	**Rp 239,530**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Berdasarkan data di atas, selama periode 2020 hingga 2024, nilai PDRB Kabupaten Aceh Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus bergerak positif, yang didorong oleh sektor-sektor utama seperti perdagangan besar dan eceran, pertanian, industri pengolahan, serta administrasi pemerintahan. Kinerja ini juga menunjukkan kapasitas fiskal dan produktivitas yang semakin baik, mencerminkan upaya daerah dalam meningkatkan basis ekonomi lokal serta memperluas jaringan ekonomi regional.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh, posisi Aceh Barat dalam peringkat ke-7 menegaskan peran strategisnya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di wilayah barat. Keunggulan ini perlu terus diperkuat melalui pengembangan sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, serta integrasi pasar antarwilayah guna mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat provinsi.

1.7. Kontribusi Infrastruktur Kabupaten Aceh Barat terhadap Wilayah Sekitar

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan tren yang positif dan progresif selama periode 2020–2024. Infrastruktur yang dibangun dan dikembangkan tidak hanya menjawab kebutuhan internal kabupaten, tetapi juga memperkuat keterkaitan antarwilayah di kawasan barat-selatan Aceh. Dalam konteks perencanaan regional, keberadaan infrastruktur yang memadai memainkan peran penting sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, integrasi sosial, serta distribusi layanan publik lintas wilayah.

1. Konektivitas dan Kualitas Jalan

Jalan merupakan prasarana vital dalam mendukung konektivitas wilayah, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas penduduk. Dalam konteks pembangunan daerah, kualitas dan keterhubungan jaringan jalan memainkan peranan penting dalam membuka akses kawasan terisolasi, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur jalan yang optimal menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan.

Kabupaten Aceh Barat secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam memperkuat konektivitas wilayah melalui peningkatan kualitas dan panjang jaringan jalan. Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai tidak hanya memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan hubungan antarwilayah, baik dalam skala regional maupun nasional. Dalam konteks wilayah sekitar, terutama kabupaten tetangga di kawasan barat Aceh, jalan-jalan penghubung yang berada di wilayah Aceh Barat menjadi jalur utama yang memperlancar arus logistik, layanan publik lintas batas, serta mobilitas sosial-ekonomi masyarakat. Berikut adalah data panjang jalan di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan kategori tingkat kewenangan, jenis permukaan, dan kondisi jalan tahun 2020–2024:

Tabel 2.5 Panjang Jalan Menurut Jenis Tingkat Kewenangan Pemerintah, Jenis Permukaan Jalan, dan Kondisi Jalan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Panjang Jalan Menurut Kategori (km)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pemerintahan yang Berwenang Mengelola					
Negara	56,28	56,28	56,64	56,54	56,54
Provinsi	140,25	140,25	140,25	140,25	128,35
Kabupaten/Kota	682,42	682,42	682,42	682,42	682,42
Total	**878,95**	**878,95**	**879,31**	**879,21**	**867,31**
2. Jenis Permukaan Jalan					
Aspal	359,84	374,15	389,41	402,76	412,98
Tidak Di Aspal	281,02	259,42	263,73	250,38	240,17
Lainnya	41,56	48,85	29,28	29,28	29,28
Total	**682,42**	**682,42**	**682,42**	**682,42**	**682,43**
3. Kondisi Jalan					
Baik	328,65	343,33	367,05	380,76	390,61

Panjang Jalan Menurut Kategori (km)	2020	2021	2022	2023	2024
Sedang	39,44	33,99	20,1	20,10	20,10
Rusak	257,82	249,90	257,53	243,82	233,97
Rusak Berat	56,50	55,20	37,75	37,75	37,75
Total	**682,42**	**682,42**	**682,43**	**682,42**	**682,42**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Berdasarkan data di atas, panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tetap stabil pada angka 682,42 km sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Penurunan total panjang jalan secara keseluruhan pada tahun 2024 menjadi 867,31 km disebabkan oleh berkurangnya panjang jalan provinsi dari 140,25 km menjadi 128,35 km, yang dapat diindikasikan sebagai adanya perubahan status pengelolaan atau penyesuaian administrasi kewenangan jalan.

Dari segi jenis permukaan, terlihat adanya peningkatan signifikan jalan beraspal dari 359,84 km pada tahun 2020 menjadi 412,98 km pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas jalan dengan mengubah jalan nonaspal menjadi beraspal. Jalan tidak beraspal mengalami penurunan dari 281,02 km menjadi 240,17 km pada periode yang sama, sejalan dengan peningkatan aspalisasi jalan.

Jika ditinjau dari kondisi jalan, terjadi perbaikan signifikan terhadap kondisi jalan di Aceh Barat. Panjang jalan dalam kondisi baik meningkat dari 328,65 km (2020) menjadi 390,61 km (2024). Sebaliknya, jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat menunjukkan tren menurun, mencerminkan efektivitas upaya rehabilitasi dan peningkatan jalan yang dilakukan pemerintah daerah.

Secara umum, tren peningkatan jalan beraspal dan kondisi jalan yang membaik mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini turut memperkuat peran Kabupaten Aceh Barat sebagai simpul konektivitas di wilayah barat Aceh, yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik antarwilayah, serta membuka akses ekonomi bagi daerah-daerah hinterland di sekitarnya.

2. Elektrifikasi dan Pemerataan Energi

Akses terhadap energi listrik merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan, peningkatan kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan. Ketersediaan listrik yang merata hingga ke desa-desa menjadi fondasi penting bagi transformasi sosial dan ekonomi, mulai dari peningkatan produktivitas rumah tangga, pengembangan usaha kecil, hingga perluasan layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, elektrifikasi desa juga menjadi indikator utama pemerataan pembangunan antarwilayah.

Di Kabupaten Aceh Barat, elektrifikasi telah menunjukkan capaian maksimal dalam lima tahun terakhir. Seluruh desa yang tersebar di 12 kecamatan telah teraliri listrik sejak tahun 2020 hingga 2024. Pencapaian elektrifikasi 100 persen ini menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan dasar di seluruh pelosok wilayah, serta menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata Aceh Barat dalam mendukung pengurangan kesenjangan akses energi di kawasan barat Provinsi Aceh. Selain memberi dampak

langsung terhadap kehidupan masyarakat desa, elektrifikasi juga menjadi faktor pendukung dalam pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan industri rumahan yang memerlukan pasokan energi stabil. Berikut data jumlah desa berlistrik di Kabupaten Aceh Barat tahun 2020–2024:

Tabel 2.6 Jumlah Desa Berlistrik di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Kecamatan	Total Desa	2020	2021	2022	2023	2024
Johan Pahlawan	21	21	21	21	21	21
Samatiga	32	32	32	32	32	32
Bubon	17	17	17	17	17	17
Arongan Lambalek	27	27	27	27	27	27
Woyla	43	43	43	43	43	43
Woyla Barat	24	24	24	24	24	24
Woyla Timur	26	26	26	26	26	26
Kaway XVI	44	43	43	43	43	44
Meureubo	26	26	26	26	26	26
Pante Ceureumen	25	25	25	25	25	25
Panton Reu	19	19	19	19	19	19
Sungai Mas	18	18	18	18	18	18
Total	**322**	**321**	**321**	**321**	**321**	**322**
% Desa Berlistrik	**–**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Aceh Barat telah teraliri listrik sejak tahun 2020, dengan pencapaian 100 persen elektrifikasi. Bahkan, pada tahun 2024 terjadi penambahan satu desa di Kecamatan Kaway XVI, sehingga total desa menjadi 322, yang juga langsung masuk dalam cakupan desa berlistrik. Konsistensi pencapaian ini mencerminkan bahwa aspek pemerataan energi di Aceh Barat tidak hanya menyentuh wilayah-wilayah perkotaan atau pusat kecamatan, tetapi juga menjangkau desa-desa terpencil. Keberhasilan ini patut diapresiasi karena telah memberikan landasan kuat bagi percepatan pembangunan desa, pengurangan ketimpangan wilayah, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) secara menyeluruh.

Dengan kondisi tersebut, Aceh Barat tidak hanya berhasil memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, tetapi juga memperkuat daya dukung energi yang berkelanjutan bagi wilayah sekitarnya. Keberhasilan elektrifikasi penuh ini dapat menjadi model inspiratif bagi kabupaten lain dalam merancang strategi pemerataan infrastruktur energi di daerah yang memiliki topografi dan sebaran penduduk yang beragam.

3. Telepon

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika pembangunan daerah. Akses terhadap layanan telepon, baik seluler maupun tetap, memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran informasi, memperkuat jejaring sosial, serta mendukung berbagai sektor, mulai dari layanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi. Dalam era transformasi digital, keterjangkauan terhadap layanan komunikasi menjadi indikator vital dari tingkat konektivitas dan kemajuan wilayah.

Di Kabupaten Aceh Barat, ketersediaan akses terhadap layanan telepon telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan merata. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, memperluas jangkauan layanan pemerintahan,

dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang bergantung pada komunikasi, seperti perdagangan dan jasa. Akses telepon juga menjadi jembatan penting dalam mengatasi keterisolasian geografis desa-desa terpencil, serta mendorong inklusi digital yang dapat meningkatkan daya saing daerah di kawasan barat Aceh. Berikut adalah data persentase penduduk pengguna telepon di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019–2023:

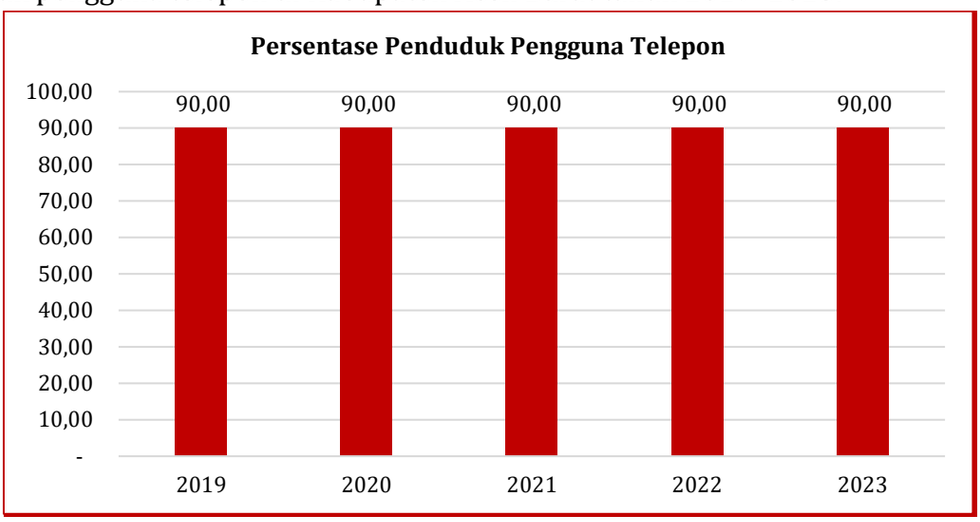

Sumber: RPJMD Kabupaten Aceh Barat

Gambar 2.2
Persentase Penduduk Pengguna Telepon di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa selama periode lima tahun terakhir, persentase penduduk pengguna telepon di Kabupaten Aceh Barat tetap stabil di angka 90 persen. Konsistensi ini menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat secara merata. Angka tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan pihak penyedia layanan dalam mempertahankan tingkat akses komunikasi yang tinggi, sekaligus menjadi bukti bahwa layanan telepon telah menjadi bagian dari kebutuhan esensial masyarakat.

Kondisi ini memberi dampak positif yang luas, tidak hanya dalam konteks komunikasi antarindividu, tetapi juga dalam efektivitas layanan pemerintahan, akses terhadap informasi publik, serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap situasi darurat. Stabilitas akses ini juga memperkuat posisi Aceh Barat sebagai daerah dengan infrastruktur komunikasi yang solid, yang dapat menunjang pembangunan lintas sektor serta memperkuat konektivitas wilayah di kawasan barat Provinsi Aceh.

2. Potensi Sumber Daya Alam

2.1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Sektor Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian Kabupaten Aceh Barat. Sebagai wilayah dengan karakteristik geografis yang mendukung, sektor ini memainkan peran strategis dalam menyediakan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di wilayah pedesaan. Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah, sektor ini juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas lahan, pengembangan infrastruktur pertanian, serta dukungan terhadap kegiatan hilirisasi. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, sektor pertanian tanaman pangan dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah sekaligus penyangga ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Aceh Barat. Berikut data megenai Luas Panen Padi sawah secara lebih rinci:

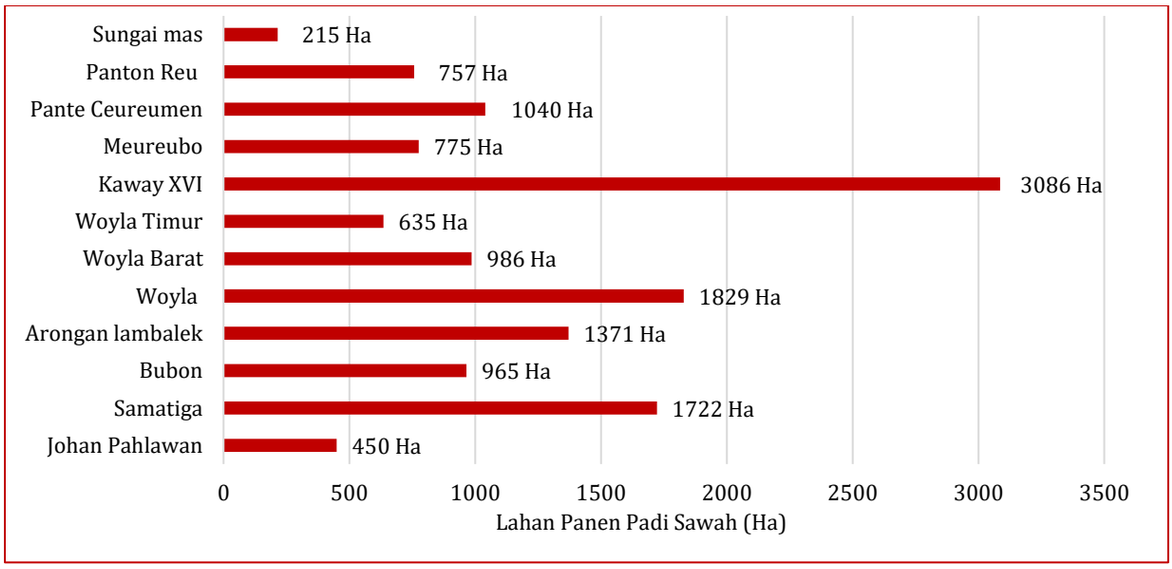

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.3
Luas Panen Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa total luas panen padi sawah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 tercatat sebesar 13.830,66 hektare, yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Kaway XVI mencatat luas panen tertinggi sebesar 3.085,90 hektare, berkontribusi signifikan terhadap total produksi padi kabupaten. Disusul oleh Woyla dengan 1.829,08 hektare, serta Samatiga dan Woyla Timur masing-masing dengan luas panen sebesar 1.722,00 hektare dan 1.635,10 hektare. Sementara itu, Kecamatan Sungai Mas mencatat luas panen paling rendah, yaitu hanya 215,00 hektare, yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan lahan sawah, kondisi geografis, atau tingkat aksesibilitas terhadap sarana pertanian. Distribusi yang timpang ini mencerminkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual untuk meningkatkan produktivitas pertanian di kecamatan-kecamatan dengan luasan terbatas, sekaligus mempertahankan keberlanjutan lahan sawah di wilayah dengan kontribusi besar.

2.2. Sektor Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan dalam struktur perekonomian daerah yang menggambarkan potensi nyata dari pemanfaatan sumber daya alam berbasis lahan. Luas areal perkebunan tidak hanya mencerminkan kapasitas produksi komoditas unggulan daerah, tetapi juga menunjukkan seberapa besar kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan petani, serta pertumbuhan ekonomi wilayah. Berikut data mengenai Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat secara rinci:

Tabel 2.7 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 dan 2024 (hektar)

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Kopi		Kakao	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Johan Pahlawan	312,00	297,00	120,50	120,00	108,00	104,00	1,50	1,75	4,18	4,18
Samatiga	365,00	265,00	612,00	592,00	1.681,00	2.270,00	24,50	35,00	28,10	60,00
Bubon	690,00	590,00	185,00	185,00	676,00	658,00	19,00	24,00	32,50	53,00
Arongan Lambalek	1.512,00	1.235,00	1.079,00	1.079,00	2.258,00	2.647,00	15,00	27,00	140,64	167,00
Woyla	1.110,00	1.080,00	109,00	109,00	2.048,00	2.193,00	32,00	72,00	75,00	116,00
Woyla Barat	642,00	640,00	94,00	94,00	4.134,87	4.510,00	42,00	78,00	68,00	98,00
Woyla Timur	798,00	731,00	55,00	55,00	1.687,00	1.670,00	28,00	64,00	9,72	20,00
Kaway XVI	3.115,00	2.986,00	343,10	343,00	2.346,00	2.855,00	64,50	100,00	68,00	130,00
Meureubo	1.172,00	1.059,00	405,00	369,00	1.331,00	1.723,00	19,00	34,00	72,60	118,00

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Kopi		Kakao	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Pante Ceureumen	926,00	936,00	272,00	303,00	1.180,00	1.198,00	38,00	44,00	25,00	60,00
Panton Reu	873,00	751,00	61,00	61,00	752,50	854,00	11,00	23,00	51,50	92,00
Sungai Mas	672,00	550,00	66,00	67,00	1.178,00	1.256,00	27,00	52,00	39,00	55,00
Aceh Barat	**12.187,00**	**11.122,00**	**3.350,60**	**3.353,00**	**19.396,37**	**21.921,00**	**323,30**	**575,75**	**594,04**	**943,18**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Berdasarkan data luasan lahan komoditas perkebunan Tahun 2023–2024 di Kabupaten Aceh Barat, terlihat dinamika perkembangan yang bervariasi antar komoditas dan kecamatan. Komoditas kelapa sawit mengalami penurunan luasan dari 12.187 ha pada 2023 menjadi 11.122 ha di 2024, yang tersebar dominan di Kaway XVI dan Arongan Lambalek, menunjukkan adanya kemungkinan alih fungsi lahan atau penurunan minat budidaya. Sebaliknya, komoditas karet menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 19.396,37 ha menjadi 21.921 ha, menandakan tingginya potensi dan minat masyarakat terhadap komoditas ini, khususnya di Woyla Barat dan Arongan Lambalek. Komoditas kelapa cenderung stagnan, dengan sedikit penurunan dari 3.350,6 ha menjadi 3.353 ha, menunjukkan belum optimalnya pengembangan sektor ini. Sementara itu, kopi dan kakao memperlihatkan perkembangan positif yang cukup tajam, khususnya kopi yang naik dari 323,3 ha menjadi 575,75 ha dan kakao dari 594,04 ha menjadi 943,18 ha, terutama di Kecamatan Woyla dan Meureubo, yang mencerminkan mulai meningkatnya perhatian terhadap komoditas unggulan alternatif yang berorientasi ekspor. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan perlunya strategi pengembangan yang adaptif dan berbasis potensi lokal, disertai mitigasi terhadap tantangan seperti degradasi lahan, fluktuasi harga, serta dukungan sarana dan prasarana produksi.

2.3. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian, karena memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, peningkatan penerimaan daerah, serta menciptakan lapangan kerja. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan batubara yang dimiliki suatu wilayah dapat menjadi motor penggerak pembangunan apabila dikelola secara bijaksana, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di banyak daerah, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dan menjadi sumber daya unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Pada tabel berikut ini menyajikan jumlah izin usaha pertambangan mineral dan batubara di Aceh Tahun 2023.

Tabel 2.8 Izin Usaha Pertambangan pada Kegiatan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2023

No	Kabupaten	Jumlah Usaha Tambang	Jumlah Usaha Tambang yang Berizin Sesuai Kewenangan	
			Izin Operasi Produksi (IUP)	Izin Eksplorasi (IUP)
1	Kabupaten Aceh Selatan	11	7	4
2	Kabupaten Aceh Tenggara	6	5	1
3	Kabupaten Aceh Timur	13	10	3
4	Kabupaten Aceh Tengah	16	11	5
5	Kabupaten Aceh Barat	18	13	5
6	Kabupaten Aceh Besar	24	20	4
7	Kabupaten Pidie	30	21	9
8	Kabupaten Aceh Utara	12	10	2
9	Kabupaten Simeulue	4	4	0

No	Kabupaten	Jumlah Usaha Tambang	Jumlah Usaha Tambang yang Berizin Sesuai Kewenangan	
			Izin Operasi Produksi (IUP)	Izin Eksplorasi (IUP)
10	Kabupaten Aceh Singkil	8	6	2
11	Kabupaten Bireuen	25	21	4
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	17	14	3
13	Kabupaten Gayo Lues	4	2	2
14	Kabupaten Aceh Jaya	24	13	11
15	Kabupaten Nagan Raya	26	18	8
16	Kabupaten Aceh Tamiang	32	26	6
17	Kabupaten Bener Meriah	9	9	0
18	Kabupaten Pidie Jaya	13	11	2
19	Kota Lhokseumawe	4	2	2
20	Kota Langsa	7	6	1
21	Kota Subulussalam	9	5	4
Jumlah		**312**	**234**	**78**

Sumber: Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Esdm Aceh Tahun 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Barat tercatat memiliki 18 usaha tambang, dengan 13 di antaranya telah memiliki Izin Operasi Produksi (IUP) dan 5 lainnya memiliki Izin Eksplorasi (IUP). Jumlah ini menempatkan Aceh Barat dalam peringkat ke-7 tertinggi dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam hal jumlah usaha tambang yang berizin, hanya berada di bawah Kabupaten Aceh Tamiang (32), Pidie (30), Nagan Raya (26), Kabupaten Bireuen (25), Kabupaten Aceh Jaya (24) dan Aceh Besar (24). Fakta ini menunjukkan bahwa Aceh Barat merupakan salah satu daerah dengan intensitas aktivitas pertambangan yang cukup tinggi dan berpotensi besar.

Potensi ini semakin diperkuat dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 yang mencapai 27,79%, menjadikannya salah satu penyumbang utama dalam struktur ekonomi daerah. Dengan posisi strategis ini, sektor pertambangan di Aceh Barat tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga memiliki potensi besar untuk didorong sebagai sektor unggulan yang mampu mempercepat pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2.4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan modifikasi lahan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya merupakan kawasan permukiman, pertanian, persawahan, padang rumput, budidaya perikanan, semak belukar, dan hutan. Berdasarkan interpretasi citra satelit menunjukkan sebagian besar merupakan hutan lindung dan lahan pertanian dengan tutupan lahan terluas hutan lindung dan hutan tanaman rakyat. Sedangkan lahan yang dibudidayakan meliputi kebun, pertanian lahan basah, lahan kering, dan pemukiman yang tersebar di sepanjang sungai dan pesisir barat Pantai Aceh. Untuk melindungi dan memelihara fungsi lingkungan hidup sekaligus tetap mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kawasan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kawasan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Barat

Uraian	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
Kawasan Lindung		
Kawasan Hutan Lindung	102.558,47	37,10
Kawasan Sempadan Pantai	391,98	13,39
Kawasan Sempadan Sungai (Termasuk Sungai)	4.529,31	1,64
Kawasan Sekitar Geunang (Termasuk Geunang Dan Rawa)	371,84	12,70
Kawasan Pantai Berhutan Bakau	372,96	0,13
Kawasan Cagar Budaya Makam Teuku Umar	500,06	17,08
Kawasan Rawan Bencana*	-	-
Sub Jumlah	108.724,61	39,33
Kawasan Budidaya		
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	4.586,97	1,66
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	21.563,95	7,80
Kawasan Peruntukan Lahan Kering	12.713,87	20,18
Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar	52.421,35	20,18
Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat	64.269,20	22,04
Kawasan Pertambangan**	-	-
Kawasan Peruntukan Industri	177,64	0,06
Kawasan Peruntukan Pariwisata	149,93	0,05
Kawasan Peruntukan Pendidikan	85,53	0,03
Kawasan Peruntukan Militer	20,81	0,01
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	5.885,98	2,13
Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan	4.117,41	0,14
Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau	388,81	0,14
Sub Jumlah	167.685,13	60,67
Jumlah	**276.409,74**	**100,00**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2032

Tutupan lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati untuk menunjang kegiatan manusia. Tutupan lahan di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya merupakan sawah, hutan primer, hutan sekunder, gambut, tubuh air, permukiman, ladang, tanah terbuka, dan kebun. Berdasarkan interpretasi citra satelit menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tersebut merupakan hutan primer dan hutan sekunder yang berada di sebelah utara dan timur wilayah Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan lahan yang dibudidayakan umumnya terdiri dari kebun, pertanian lahan basah, lahan kering, dan permukiman yang menyebar di sepanjang aliran sungai dan pesisir barat pantai Aceh. Lebih jelasnya mengenai kondisi tutupan lahan di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10 Tutupan Lahan Kabupaten Aceh Barat

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
Sawah	30.275,22	10,95
Hutan Primer	81.178,12	29,37
Hutan sekunder	50.648,01	18,32
Gambut	6.585,43	2,38
Tubuh Air	1.375,14	0,5
Permukiman	5.829,03	21,11
Ladang	49.128,97	17,77
Tanah Terbuka	2.582,63	0,93
Kebun	48.805,68	17,66
Total	**276.408,23**	**100,00**

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Versi KLHK)

Seiring berjalannya waktu tentunya banyak terjadi perubahan termasuk perubahan tutupan lahan. Berdasarkan data tutupan lahan (*land use*) Tahun 2021, jenis tutupan lahan yang terluas yakni perkebunan dengan luas total 85.145 ha atau sebesar 30,8% dari total luas area. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat 2025-2029

Gambar 2.4
Tata Guna Lahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat 2025-2029

Gambar 2.5
Perubahan Tata Guna Lahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2003-2021

Apabila dibandingkan dengan tutupan lahan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2003, terdapat perubahan tutupan lahan, khususnya hutan lahan kering sekunder, Hutan Rawa Sekunder, Pertanian lahan kering dan campur, perkebunan, pertambangan dan pemukiman. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5. Perubahan *land use* yang signifikan terjadi pada: Hutan Lahan Kering Sekunder menurun 13.029 ha; Hutan Rawa Sekunder menurun 8384 ha; Pertanian lahan kering dan campur menurun 28.471 ha; Perkebunan meningkat 77.114 ha; Pertambangan meningkat 1284 ha; Pemukiman meningkat 7573 ha.

2.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi wilayah untuk dikembangkan yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan lindung dan kawasan budidaya di pantai barat-selatan yang dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1	Kawasan Lindung	Gunung Leuser	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
2	Kawasan Lindung Wilayah Sungai	Wilayah Sungai Woyla-Batee	Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya alam	Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya alam dan pengendalian daya rusak air

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Tabel 2.12 Kawasan Andalan dan Strategis Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1	Kawasan Andalan	Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pertambangan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan
			Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
2	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Kawasan Strategis Ekosistem Leuser	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	Kepentingan Lingkungan Hidup Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa arah pengembangan wilayah difokuskan pada dua kawasan utama, yaitu Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan dan Kawasan Strategis Ekosistem Leuser. Kawasan Andalan diarahkan pada pengembangan potensi sektoral seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan perkebunan melalui strategi rehabilitasi dan optimalisasi sektor unggulan. Sementara itu, Kawasan Strategis Ekosistem Leuser difokuskan pada upaya rehabilitasi dan pengembangan yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kapasitas dan keberlanjutan sumber daya yang tersedia.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan landasan penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029 telah menyusun analisis berdasarkan tiga komponen utama, yakni ketersediaan air, penyediaan pangan, dan lahan permukiman.

3.1. Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Air

Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Air menggambarkan kapasitas lingkungan dalam menyediakan air bersih yang cukup dan berkelanjutan bagi kebutuhan manusia serta aktivitas ekonomi. Penilaian ini mempertimbangkan aspek ketersediaan air

permukaan maupun air tanah, kebutuhan air untuk sektor domestik dan non-domestik, serta keseimbangan antara suplai dan permintaan air. Evaluasi daya dukung air menjadi penting dalam mendeteksi potensi risiko krisis air akibat pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, perubahan iklim, atau degradasi daerah tangkapan air. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menjadi dasar untuk perencanaan pengelolaan sumber daya air, tetapi juga menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan wilayah yang tidak melebihi kapasitas ekologisnya.

Tabel 2.13 Hasil Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Proyeksi Kebutuhan Air Rumah Tangga 2023 (m3/tahun)			Proyeksi Kebutuhan Air Pertanian 2023 (m3/tahun)	Total Kebutuhan Air Tahun 2023 (m3/tahun)	Neraca Air Tahun 2023 (m3/tahun)
				Domestik	Non Domestik	Total			
1	Johan Pahlawan	67,156.00	1,663,659,911.28	3,349,083.98	4,556,097.20	7,905,181.14	35,277,557.00	46,531,822.30	1,617,128,088.00
2	Samatiga	16,174.00	5,210,098,108.39	809,565.95	4,366,709.20	5,176,275.15	84,602,006.00	90,587,864.76	5,119,510,261.00
3	Bubon	6,924.00	4,798,667,347.10	347,457.42	4,594,388.00	4,609,325.20	21,489,621.00	26,779,014.30	4,771,888,359.00
4	Arongan Lambalek	12,167.00	4,816,440,644.38	609,977.69	4,609,325.20	5,219,302.91	63,412,715.00	69,241,995.54	4,747,407,963.00
5	Woyla	13,946.00	9,222,566,192.50	698,559.00	3,977,910.31	4,676,469.30	76,802,774.00	82,177,802.72	9,140,388,356.30
6	Woyla Barat	8,054.00	4,554,993,742.16	403,661.70	4,532,426.90	4,936,088.60	52,293,121.00	57,632,871.61	4,497,360,854.54
7	Woyla Timur	5,321.00	4,910,505,031.50	266,911.96	4,159,239.10	4,426,151.02	32,815,731.00	37,508,793.86	4,872,996.64
8	Kaway XVI	21,795.00	18,893,225,196.79	1,091,989.90	4,653,881.00	5,745,869.90	103,727,707.00	110,565,565.51	18,782,659,361.28
9	Meureubo	31,090.00	4,179,854,811.95	1,552,742.68	4,564,452.10	6,117,194.70	52,644,811.00	60,314,748.20	4,119,540,064.00
10	Pante Ceureumen	11,433.00	18,155,168,823.08	573,489.28	3,895,515.03	4,469,004.31	52,644,811.00	88,284,288.48	18,066,883,794.80
11	Panton Reu	6,769.00	3,075,176,252.19	266,911.96	2,241,165.11	4,560,680.11	38,251,402.00	43,151,597.09	3,032,024,655.10
12	Sungai Mas	4,331.00	28,949,329,240.17	217,248.49	3,350,258.55	3,567,507.04	22,347,797.00	26,132,552.71	28,923,259,687.46

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat 2025-2029

Berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2023 di Kabupaten Aceh Barat, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kecamatan memiliki neraca air yang sangat positif, artinya ketersediaan air jauh melebihi total kebutuhan air rumah tangga dan pertanian. Kecamatan dengan ketersediaan air terbesar adalah Sungai Mas, dengan ketersediaan mencapai hampir 29 miliar m^3 per tahun, sedangkan kebutuhan totalnya hanya sekitar 26 juta m^3, menghasilkan surplus air yang sangat besar. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak seperti Johan Pahlawan, meskipun memiliki kebutuhan air cukup tinggi (sekitar 46 juta m^3), tetap menunjukkan ketersediaan air yang mencukupi dengan neraca surplus sekitar 1,6 miliar m^3. Kebutuhan air rumah tangga, baik domestik maupun non-domestik, umumnya jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk pertanian. Secara keseluruhan, tidak ada kecamatan yang mengalami defisit air; semua menunjukkan bahwa sumber daya air di Aceh Barat masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan potensi yang besar untuk pengembangan wilayah, dengan catatan pengelolaan air dilakukan secara berkelanjutan.

3.2. Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Pangan

Status Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Pangan merujuk pada kemampuan ekosistem suatu wilayah dalam menyediakan kebutuhan pangan secara berkelanjutan bagi penduduk yang menempatinya. Kemampuan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti kesuburan tanah, ketersediaan air, kondisi iklim, jenis tutupan lahan, serta sistem penggunaan lahan yang berlaku. Penilaian daya dukung ekosistem pangan sangat penting

dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena menjamin bahwa produksi pangan tidak melampaui kapasitas alami lingkungan dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, indikator ini membantu mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan potensi pertanian sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah atau sangat rendah, sehingga arah kebijakan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap tekanan lingkungan maupun perubahan iklim.

Tabel 2.14 Status Ketersediaan Pangan pada Kabupaten Aceh Barat

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan (ha)	Kebutuhan (ha)	Selisih (ha)	Keterangan
Johan Pahlawan	67,156	2,204,000	7,179	2,196,821	Belum Terlampaui
Samatiga	16,174	676,000	15,033	660,967	Belum Terlampaui
Bubon	6,924	2,664,000	3,677	2,660,323	Belum Terlampaui
Arongan Lambalek	12,167	1,439,000	1,916	1,437,084	Belum Terlampaui
Woyla	13,946	5,061,000	581	5,060,419	Belum Terlampaui
Woyla Barat	8,054	2,360,000	4,186	2,355,814	Belum Terlampaui
Woyla Timur	5,321	3,287,000	3,595	3,283,405	Belum Terlampaui
Kaway XVI	21,795	1,584,000	791	1,547,209	Belum Terlampaui
Meureubo	31,090	2,186,000	2,339	2,183,661	Belum Terlampaui
Pante Ceureumen	11,433	1,046,000	1,704	1,044,296	Belum Terlampaui
Panton Reu	6,769	1,921,000	3,473	1,917,527	Belum Terlampaui
Sungai Mas	4,331	1,084,000	674	1,083,326	Belum Terlampaui
Grand Total	**205,100**	**25,476,000**	**45,149**	**25,430,851**	

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat 2025-2029

Berdasarkan data status ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh Barat, seluruh kecamatan memiliki jumlah ketersediaan pangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakatnya. Misalnya, Kecamatan Johan Pahlawan dengan jumlah penduduk sekitar 67.156 jiwa memiliki ketersediaan pangan sebesar 2.204.000 hektare, sedangkan kebutuhannya hanya 7.179 hektare, sehingga terdapat surplus sebesar 2.196.821 hektare. Hal serupa juga terjadi di kecamatan lainnya seperti Bubon, Woyla, dan Kaway XVI yang menunjukkan selisih (surplus) ketersediaan pangan lebih dari 1 juta hektare. Total secara keseluruhan, Kabupaten Aceh Barat memiliki ketersediaan pangan sebesar 25.476.000 hektare, dengan total kebutuhan hanya 45.149 hektare, menghasilkan surplus pangan sebesar 25.430.851 hektare. Dengan demikian, data status ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh Barat,semua kecamatan dalam wilayah ini masih berada dalam kategori "Belum Terlampaui", yang berarti bahwa luas lahan pangan masih mencukupi dan belum melewati batas daya dukung optimal untuk produksi pangan.

3.3. Status Daya Dukung Daya Tampung Lahan Permukim

Status Daya Dukung Daya Tampung Lahan Permukiman mengukur kemampuan lahan dalam menampung pertumbuhan penduduk dan pembangunan fisik tanpa menimbulkan degradasi lingkungan maupun konflik pemanfaatan ruang. Daya dukung menunjukkan luas lahan yang tersedia dan sesuai untuk permukiman, sementara daya tampung mencerminkan jumlah maksimum penduduk yang dapat ditampung dalam suatu kawasan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, ruang terbuka, serta infrastruktur pendukung lainnya. Penilaian indikator ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses urbanisasi dan penyebaran permukiman berlangsung secara terkendali, aman, dan berwawasan lingkungan. Dengan memahami status ini, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan penataan ruang yang lebih responsif terhadap tekanan spasial dan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.15 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas Permukiman (ha)	Luas Permukiman (m2)	Jumlah Penduduk	Luas Permukiman / JP	DDDT Permukiman	Keterangan
Arongan Lambalek	638	6,376,607.99	12,167	524.09	3.9	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Bubon	485	4,849,554.56	6,924	700.40	5.3	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Johan Pahlawan	1,509	15,086,511.36	67,156	224.65	1.7	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Kaway XVI	1,021	10,210,813.92	21,795	468.49	3.5	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Meureubo	1,159	11,591,902.81	31,090	372.85	2.8	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Pante Ceureumen	387	3,869,487.50	11,433	338.27	2.9	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Panton Reu	256	2,555,212.16	6,769	377.49	3.0	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Samatiga	1,186	11,863,515.01	16,174	733.49	5.2	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Sungai Mas	251	2,513,401.00	4,331	580.33	4.1	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Woyla	600	6,001,755.99	13,946	430.36	3.2	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Woyla Barat	415	4,152,500.59	8,054	515.58	4.2	Belum Terlampaui/ Tercukupi
Woyla Timur	268,07	2,680,711.34	5,321	503.80	3.8	Belum Terlampaui/ Tercukupi

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat 2025-2029

Tabel tersebut menunjukkan kondisi daya dukung lahan permukiman di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan masing-masing kecamatan. Daya dukung lahan permukiman diukur berdasarkan luas lahan permukiman dibandingkan dengan jumlah penduduk (dalam m^2 per jiwa) dan diperkuat dengan nilai DDDT (Daya Dukung Daya Tampung) permukiman. Secara umum, seluruh kecamatan di Aceh Barat menunjukkan keterangan **"Belum Terlampaui/Tercukupi"**, yang artinya ketersediaan lahan permukiman masih mencukupi untuk menampung jumlah penduduk yang ada. Misalnya, Kecamatan Bubon memiliki rasio luas permukiman per jiwa sebesar 700,40 m^2/jiwa dengan DDDT sebesar 5,3, menunjukkan kapasitas yang sangat memadai. Demikian pula Kecamatan Samatiga menunjukkan nilai tertinggi yaitu 733,49 m^2/jiwa.

Sebaliknya, Kecamatan Johan Pahlawan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 67.156 jiwa memiliki rasio terendah yaitu hanya 224,65 m^2/jiwa, meskipun masih dalam kategori tercukupi. Hal ini perlu mendapat perhatian karena potensi tekanan lahan bisa meningkat seiring pertumbuhan penduduk.Dari sisi luas lahan, Kecamatan Johan Pahlawan memiliki luas permukiman terbesar (1.508,65 ha), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Panton Reu (255,52 ha). Namun, ukuran luas ini tidak serta-merta mencerminkan kelayakan jika tidak disesuaikan dengan jumlah penduduk.Secara keseluruhan, kondisi daya dukung lahan permukiman di seluruh kecamatan di Aceh Barat masih aman dan belum mengalami tekanan berarti. Namun, pemantauan rutin dan pengendalian tata ruang perlu terus dilakukan, khususnya di kecamatan dengan kepadatan tinggi seperti Johan Pahlawan dan Meureubo.

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

4.1. Pangan

Pangan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan ketahanan pangan dan akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi merupakan hak dasar setiap individu dan memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Data menunjukkan bahwa distribusi dan akses pangan Kabupaten Aceh Barat menunjukkan kondisi yang sudah baik yaitu mencapai 100% sejak tahun 2019 hingga 2023. Sementara untuk indikator ketersediaan pangan utama menunjukkan pola yang meningkat dari tahun ke tahun. Ketersediaan pangan tertinggi terjadi pada tahun 2023, sementara ketersediaan pangan terendah terjadi pada tahun 2019. Kondisi pangan Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023) secara lengkap disajikan pada Tabel 2.16 di bawah ini.

Tabel 2.16 Kondisi Pangan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan pangan utama	Ton	20.873	138.032	21.300	23.967	46.712
Ketersediaan energi per kapita	Kkal/Per-kapita/ Hari	N/A	N/A	2150	4.961	2.042
Ketersediaan protein per kapita	Gram/kapita/hari	97	N/A	57	170	61
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	67,75	68,75	69,50	75,50	78.13*
Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	62,55	63,75	90,00	92,00	82,5
Penganekaragaman pangan	Jenis	1	1	1	0	1*
Distribusi dan akses pangan	Persen	100	100	100	100	100*
Desa Swasembada Pangan	Persen	15	17	19	21	23*
Jumlah lumbung pangan	unit	15	15	15	15	15
Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	1	1	1	1	1*
Ketersediaan cadangan pangan Daerah	Ton	100	102	104	4	5
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	15	15	25	30	32*
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Persen	50,08	56,34	44,07	43,85	44,42

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat dan BPS Kabupaten Aceh Barat 2020-2024
*Keterangan: *Angka proyeksi data tahun 2018-2022*

Berdasarkan tren data pola pangan harapan (konsumsi) Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2022, analisis proyeksi dilakukan untuk mengetahui besaran persentase peningkatan atau penurunan pola pangan harapan selama 5 tahun ke depan. Konsumsi atau pola pangan harapan Kabupaten Aceh Barat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai angka 82,5. Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) sendiri adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Adapun peningkatan pola pangan harapan tersebut menggambarkan adanya peningkatan keragaman pangan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang semakin tinggi. Secara jelas dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

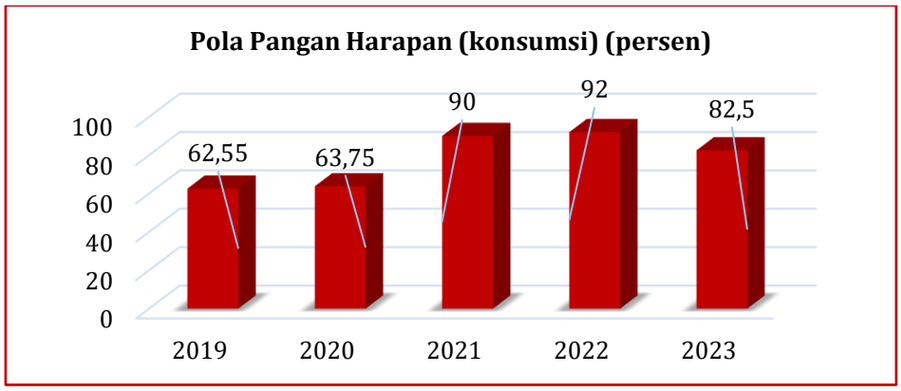

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

Gambar 2.6
Proyeksi Pola Pangan Harapan 2019-2023

4.2. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP yaitu Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, Persentase rumah tangga tanpa akses listrik, Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*), dan Angka harapan hidup pada saat lahir. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

No	Kabupaten	Nilai IKP					Kategori
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Aceh Barat	78,61	77,98	77,56	79,95	78,27	Sangat Tahan

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan 2025

Berdasarkan hasil IKP tahun 2024, Kabupaten Aceh Barat menduduki posisi ke 281 di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai 78.27 dan tergolong Prioritas 6 “Sangat Tahan“ (Badan Ketahanan Pangan 2024)

4.3. Pravalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP) merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kerawanan pangan penduduk, khususnya dalam hal akses terhadap pangan yang cukup secara energi (kalori) untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Tingginya angka PKKP menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan produksi pangan lokal, rendahnya daya beli masyarakat, infrastruktur pertanian yang belum optimal, hingga pola konsumsi yang belum beragam dan bergizi seimbang. Oleh karena itu, menurunkan

PKKP harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis data.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui program unggulan seperti Cetak Sawah Baru dengan nama SAPA (Sawah Bertambah Pangan Berjaya) dan Mekanisasi serta Penerapan Teknologi di Sektor Pertanian yang dikemas dalam program MESIN (Mekanisasi dan Teknologi Pertanian), telah menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Program SAPA secara langsung memperluas lahan tanam pangan strategis, sementara program MESIN meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil produksi melalui teknologi modern. Kedua program ini sangat relevan dalam menekan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dengan cara meningkatkan ketersediaan pangan lokal, memperkuat daya saing petani, serta menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, program-program ini berpotensi besar menurunkan angka PKKP dan mendorong tercapainya ketahanan pangan yang inklusif dan berkeadilan di Aceh Barat.

4.4. Distribusi Pelanggan Listrik Menurut Wilayah

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat vital dalam kehidupan modern. Kehadiran energi listrik tidak hanya menopang aktivitas rumah tangga dan individu, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian dan memperkuat layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ketersediaan serta pemerataan akses listrik menjadi indikator krusial dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia yang layak dan berkeadilan. Lebih jauh, listrik berperan strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, karena mendukung terciptanya efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai sektor. Oleh karena itu, distribusi dan pemanfaatan energi listrik yang merata dan berkelanjutan merupakan prioritas penting dalam setiap upaya pembangunan daerah. Berikut data mengenai Distribusi Pelanggan Listrik menurut Wilayah di Aceh Barat Tahun 2024:

Tabel 2.18 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan pada PT PLN (Persero) Wilayah I Cabang Meulaboh Tahun 2020–2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Johan Pahlawan	22,234	22,698	23,334	26,392	27,957
Samatiga	6,487	6,639	6,825	5,692	6,247
Bubon	1,859	1,933	1,987	2,455	2,634
Arongan Lambalek	3,797	3,924	4,053	4,048	5,112
Woyla	2,623	2,768	2,859	4,298	5,116
Woyla Barat	2,125	2,213	2,286	2,297	3,670
Woyla Timur	2,039	2,131	2,201	1,494	2,461
Kaway XVI	5,135	5,475	5,656	5,387	6,751
Meureubo	9,125	9,429	9,740	9,888	10,121
Pante Ceureumen	3,472	3,528	3,644	4,260	5,964
Panton Reu	1,865	1,992	2,058	2,091	3,528
Sungai Mas	3,503	3,586	3,704	1,681	2,346
Aceh Barat	**64,264**	**66,316**	**68,347**	**69,983**	**81,907**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah pelanggan listrik yang tercatat pada PT PLN (Persero) Wilayah I Cabang Meulaboh menunjukkan tren peningkatan yang

signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan berada di angka 64.264 dan meningkat secara konsisten setiap tahun hingga mencapai 81.907 pelanggan pada tahun 2024.

Kecamatan Johan Pahlawan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelanggan listrik tertinggi setiap tahunnya, mencapai 27.957 pelanggan pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi di kawasan tersebut. Sementara itu, kecamatan seperti Sungai Mas dan Panton Reu memiliki jumlah pelanggan yang relatif kecil, namun tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Peningkatan jumlah pelanggan ini mencerminkan adanya ekspansi infrastruktur kelistrikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tumbuhnya aktivitas ekonomi rumah tangga maupun usaha kecil. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin ke-7 yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Maka dari itu, penguatan sektor energi, khususnya kelistrikan, di Aceh Barat perlu terus didorong agar dapat mendukung produktivitas masyarakat serta pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh.

4.5. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum merupakan aspek esensial dalam menjamin kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Air minum yang layak konsumsi harus memenuhi standar keamanan dan kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang menetapkan parameter fisik, kimia, mikrobiologi, dan radioaktivitas untuk memastikan air aman dikonsumsi tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Ketiadaan akses terhadap air minum yang memenuhi standar ini dapat berdampak pada meningkatnya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tifus, dan gangguan pencernaan lainnya. Selain menjadi kebutuhan dasar manusia, ketersediaan air minum yang aman juga berperan penting dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan nomor 6 yaitu "Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua." Oleh karena itu, memastikan akses air minum layak bagi setiap rumah tangga harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

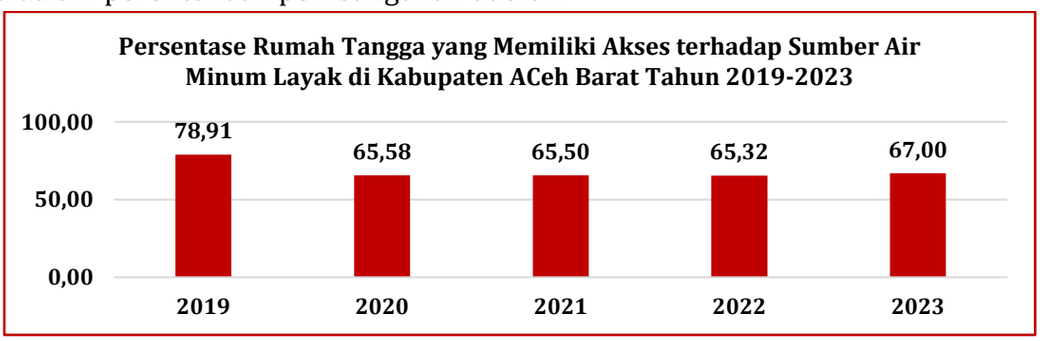

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025

Gambar 2.7
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan dinamika yang signifikan selama periode 2019–2023.

Pada tahun 2019, akses air minum layak mencapai 78,91%, namun mengalami penurunan tajam menjadi 65,58% pada tahun 2020 dan relatif stagnan hingga 2022, dengan persentase sedikit menurun ke 65,32%. Penurunan tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat pelayanan infrastruktur dasar, termasuk distribusi air bersih di wilayah perdesaan dan terpencil. Pada tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan menjadi 67%.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan program prioritas "Menyediakan Air Bersih di Seluruh Wilayah" yang dikemas dalam inisiatif *TIRTA* (Tingkatkan Ketersediaan Air Bersih). Program ini menjadi sangat relevan dalam menjawab isu keterbatasan akses air minum yang layak bagi rumah tangga, terutama di wilayah terpencil dan pedesaan. Melalui pembangunan infrastruktur air bersih seperti jaringan distribusi, sumur bor, dan sistem pengolahan air, serta edukasi sanitasi, program TIRTA tidak hanya akan meningkatkan persentase rumah tangga yang mengonsumsi air minum aman, tetapi juga mendukung pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan lingkungan. Dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran, TIRTA berkontribusi langsung dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari penyakit yang ditularkan melalui air tidak layak konsumsi di Kabupaten Aceh Barat.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Indikator yang mencerminkan aspek lingkungan hidup dalam fokus layanan urusan pemerintah wajib non-dasar di antaranya yaitu tersusunnya RPPLH kabupaten. Sejak tahun 2012 hingga 2019, Kabupaten Aceh Barat belum memiliki dokumen RPPLH tersebut. Namun pada tahun 2020, dokumen RPPLH Kabupaten sudah tersedia. Adapun persentase jumlah sampah yang tertangani menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 yang mencapai 100%, di mana persentase pada tahun 2019 hanya 88%. Peningkatan persentase tersebut terus berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 83%. Data mengenai lingkungan hidup selengkapnya disajikan pada Tabel 2.19 di bawah ini.

Tabel 2.19 Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada*
Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Ada/Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada*
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah Provinsi	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada*
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	65	67	69	71	73*
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,93	85,93	86,93	87,93	90,66
Luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	5.521	5.6	5.6	6.0	6.13*
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	20	20	23	26	27.9*
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	1	1	1	1	1*
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	Kali	3	3	3	3	3*

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
masyarakat						
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota,	Kasus	6	7	6	5	5.4*
Timbulan sampah yang ditangani	m^3/hari	114	125	130	140	144
Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persen	25	30	35	40	42
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	Persen	88	90	95	100	83
Pencemaran Mutu Air	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

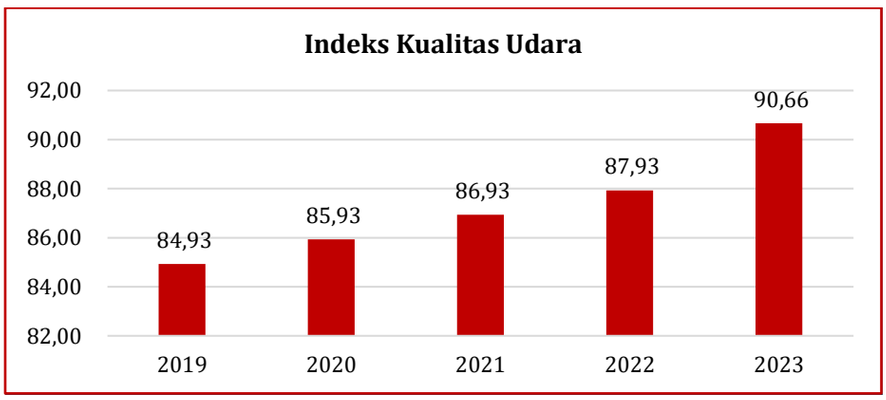

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

Gambar 2.8
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2019-2023 nilainya meningkat dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun ke depan, Kabupaten Aceh Barat diprediksi tidak akan mengalami peningkatan indeks kualitas udara. Pada tahun 2025, nilai IKU akan mencapai 92,66. Sementara pada tahun 2029, IKU Kabupaten Aceh Barat akan meningkat menjadi 98,04. Nilai IKU antara 101-150 mencerminkan keadaan yang tidak sehat untuk masyarakat dan rentan dengan penyakit pernafasan. Oleh karena itu, tindakan preventif tetap harus dilakukan dengan mempertahankan dan/atau memperluas RTH di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, pembangunan juga harus menggunakan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengklasifikasikan nilai IKLH menjadi lima kategori: kategori sangat baik, baik, sedang, kurang dan sangat kurang. Berikut merupakan perincian klasifikasinya disajikan pada Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20 Klasifikasi Kategori Rentang Nilai IKLH

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90 ≤I KLH ≤ 100
2	Baik	70 ≤ IKLH < 90
3	Sedang	50 ≤ IKLH < 70
4	Kurang	25 ≤ IKLH < 50
5	Sangat Kurang	0 ≤ IKLH < 25

Pada tingkat kabupaten/kota, IKLH dihitung hanya berdasarkan nilai persentase Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks IKLH dihitung berdasarkan analisis: (1) Indeks kualitas air diukur dengan menggunakan parameter TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform. (2) Indeks kualitas udara diukur menggunakan parameter SO2 dan NO. (3) Indeks kualitas tutupan lahan diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Persentase kontribusi masing-masing indeks nilai IKLH dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.21 Rumus Perhitungan IKLH (PermenLHK No. 27 Tahun 2021)

No	Tingkat	Rumus Perhitungan
1	Kabupaten/Kota	IKLH = (37,6% x IKA)+(40,5% x IKU) + (21,9% x IKL)
2	Provinsi	IKLH = (34,0% x IKA)+(42,8% x IKU) + (13,3% x IKL)+(9,9% x IKAL)
3	Nasional	IKLH = (34,0% x IKA)+(42,8% x IKU) + (13,3% x IKL)+(9,9% x IKAL)

Tabel 2.22 Ringkasan Nilai IKLH Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

No	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh Barat	78,98	70,77	72,41	73,93	76,72
2	Provinsi Aceh	78,99	74,71	73,55	78,53	79,66

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, selama periode 2020–2024, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Barat menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, nilai IKLH tercatat sebesar 78,98, namun mengalami penurunan tajam menjadi 70,77 pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pembangunan pascapandemi yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan, seperti pengelolaan limbah, kualitas udara, dan tutupan lahan. Seiring berjalannya waktu, nilai IKLH mulai mengalami perbaikan bertahap 72,41 pada 2022, 73,93 pada 2023, hingga mencapai 76,72 pada 2024 yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk implementasi program penghijauan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan peningkatan pengawasan terhadap pencemaran. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh, yang nilainya naik lebih stabil dari 78,99 pada 2020 menjadi 79,66 pada 2024, Aceh Barat masih berada di bawah capaian provinsi. Hal ini menandakan perlunya komitmen yang lebih kuat dalam kebijakan lingkungan di tingkat daerah untuk mengejar ketertinggalan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

5.2. Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak

Sanitasi layak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Akses terhadap sanitasi yang memadai tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam penyediaan infrastruktur dasar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan

penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan nomor 6 yaitu "air bersih dan sanitasi layak untuk semua. Berikut data mengenai Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024:

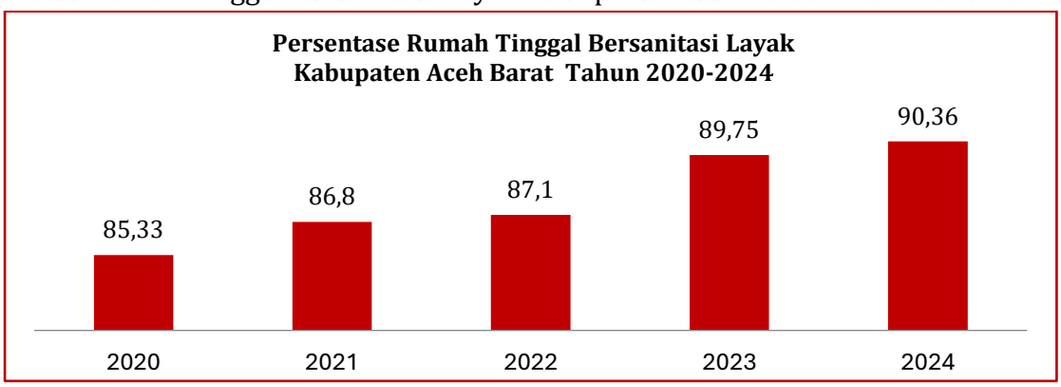

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

Gambar 2.9
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, terjadi peningkatan yang konsisten dalam persentase rumah tinggal dengan sanitasi layak di Kabupaten Aceh Barat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, hanya 85.33% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Angka ini meningkat signifikan dengan capaian 86,8% pada 2021, 87,1% pada 2022, 89,75% pada tahun 2023 dan mencapai angka tertinggi sebesar 90.36 % pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki akses infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Secara kumulatif, peningkatan sebesar hampir 10 persen selama lima tahun menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Barat telah menikmati kondisi sanitasi yang lebih baik, yang pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas hidup secara umum.

5.3. Persampahan

Pengelolaan persampahan merupakan aspek krusial dalam menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan, terutama di daerah yang sedang berkembang seperti Kabupaten Aceh Barat. Persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan ketahanan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus mencakup seluruh siklusnya mulai dari pengurangan timbulan, pemilahan di sumber, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kebijakan, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta melibatkan masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan partisipatif.

Tabel 2.23 Jumlah Sampah Yang Masuk Ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA)

Jumlah	Luas TPA (Ha)	Kapasitas TPA (Ton/Hari)	Volume Sampah Masuk TPA (m3/Hari)	Tonase sampah masuk ke TPA (Ton/Hari)	Desain TPA	Sistem Operasi TPA
1	10	80.9	109.28	54.64	Sanitary Landfill	Open Dumping

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025

Tabel 2.23 menunjukkan bahwa TPA di Kabupaten Aceh Barat memiliki luas 10 hektar dengan kapasitas tampung sebesar 80,90 ton per hari. Volume sampah yang masuk ke TPA tercatat sebesar 109,28 m^3 per hari dengan tonase aktual mencapai 54,64 ton per hari. Meskipun kapasitas TPA terlihat cukup untuk menampung beban sampah harian, sistem pengoperasiannya masih menggunakan metode *open dumping* yang tidak ramah lingkungan dan berisiko terhadap pencemaran tanah, air tanah, dan udara. Hal ini menjadi alasan utama bahwa sistem pengelolaan saat ini belum ideal. Dalam kondisi ideal, pengelolaan sampah di TPA seharusnya menggunakan sistem *sanitary landfill*, yakni sistem pemrosesan sampah berlapis yang dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan, dilengkapi dengan fasilitas pemisahan, daur ulang, dan pemanfaatan gas metana. Dengan desain TPA sudah mengarah ke *sanitary landfill* namun implementasinya masih *open dumping*, menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan yang perlu segera diatasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tabel 2.24 Jumlah Timbulan Sampah

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan sampah per orang (Kg/org hari)	Jumlah Timbulan sampah per Kecamatan (Kg/Hari)	Tonase Timbulan sampah per Kecamatan (Ton/Hari)	Persentase Layanan sampah (%)	Jumlah Penduduk terlayani (Jiwa)	Jumlah sampah yang diangkut per Kecamatan (Kg/Hari)	Jumlah sampah yang diangkut per Kecamatan (Ton/Hari)
Johan Pahlawan	64,646	0.78	50,423.88	50.42	90	58,181	45,381.49	45.38
Meureubo	30,066	0.78	23,451.48	23.45	34	10,222	7,973.50	7.97
Samatiga	15,561	0.78	12,137.58	12.14	7	1,078	1,074.50	1.07
Woyla	13,576	0.78	10,589.28	10.59	2	272	211.79	0.21
Jumlah	**123,944**	**0.78**	**96,672.32**	**95.68**		**70,053**	**54,641.41**	**54.64**

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025

Tabel 2.24 menyajikan data timbulan sampah per kecamatan di Aceh Barat. Kecamatan Johan Pahlawan menyumbang timbulan sampah terbesar sebesar 50,42 ton per hari dari total timbulan 95,68 ton per hari, diikuti oleh Meureubo (23,45 ton/hari), Samatiga (11,07 ton/hari), dan Woyla (10,74 ton/hari). Rata-rata timbulan sampah per orang di seluruh kecamatan adalah sebesar 0,78 kg per orang per hari. Persentase layanan pengangkutan sampah juga menunjukkan kesenjangan signifikan, di mana hanya Kecamatan Johan Pahlawan yang memiliki cakupan layanan tinggi sebesar 90%, sedangkan Woyla hanya 2%. Dari total jumlah penduduk 123.944 jiwa, hanya 70.053 jiwa (sekitar 56%) yang terlayani pengumpulan sampah, dan jumlah sampah yang berhasil diangkut hanya sebesar 54,64 ton per hari, mengindikasikan adanya gap antara timbulan dan kapasitas layanan angkut yang tersedia.

Rendahnya jumlah timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan dan rendahnya proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah, sebagaimana ditunjukkan pada data tahun 2023, mengindikasikan tantangan serius dalam sistem manajemen sampah di Aceh Barat. Dari total 96,67 ton sampah yang dihasilkan per hari, hanya 54,64 ton yang diangkut ke TPA, dan sisanya kemungkinan besar tidak terkelola secara baik atau dibuang sembarangan. Program GEBRAK (Gerak Bersama untuk Kebersihan) yang mengedepankan kemitraan dengan perusahaan swasta dalam pengelolaan TPA, dapat menjadi solusi strategis untuk memperbaiki sistem operasi TPA yang masih menggunakan metode *open dumping* menuju *sanitary landfill* yang lebih modern dan berkelanjutan. Sementara itu, program BURSA (BUMG Urusan Sampah) yang bertujuan membentuk unit layanan sampah di setiap gampong melalui BUMG (Badan

Usaha Milik Gampong) dapat memperluas cakupan pelayanan pengumpulan sampah rumah tangga secara signifikan. Sinergi kedua program ini sangat relevan untuk menjawab persoalan hilir dan hulu pengelolaan sampah: GEBRAK memperkuat pengolahan akhir, sedangkan BURSA memperkuat sistem pengumpulan di tingkat masyarakat. Dengan implementasi yang konsisten dan partisipatif, kedua program ini berpotensi meningkatkan volume sampah yang terolah dan memperluas cakupan rumah tangga terlayani secara signifikan, sehingga menciptakan tata kelola persampahan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di Aceh Barat.

5.4. Pertanahan

Persentase luas lahan di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dan ATR/BPN Kabupaten Aceh Barat berhasil dalam melaksanakan programnya. Perkembangan positif juga ditunjukkan pada data penyelesaian izin lokasi yang mencapai 100%. Data pertanahan selengkapnya di Kabupaten Aceh Barat ditunjukkan pada Tabel 2.25 di bawah ini.

Tabel 2.25 Pertanahan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	50,00	85,00	85,00	90,00	100*
Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	50,00	75,00	90,00	100	100*
Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	100	100	100*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka proyeksi data tahun 2018-2022*

6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

6.1. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah pelepasan gas-gas seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), dan gas fluor lainnya ke atmosfer, yang menyebabkan peningkatan efek rumah kaca dan berdampak pada pemanasan global. Secara ilmiah, GRK menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah, sehingga meningkatkan suhu permukaan bumi secara bertahap. Proses ini mengganggu keseimbangan energi planet dan memicu perubahan iklim yang ekstrem, termasuk peningkatan frekuensi bencana, naiknya permukaan laut, dan kerusakan ekosistem. Penurunan intensitas emisi GRK berarti menurunkan jumlah emisi per satuan aktivitas ekonomi (misalnya emisi per unit Produk Domestik Regional Bruto/PDRB), bukan sekadar mengurangi total emisi. Pendekatan ini dianggap realistis bagi wilayah yang masih dalam tahap pembangunan karena memungkinkan pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung sembari meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Dengan demikian, penurunan intensitas emisi GRK menjadi indikator penting dalam transisi menuju pembangunan rendah karbon dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Upaya penurunan intensitas emisi GRK di tingkat daerah dapat dilakukan melalui berbagai program berbasis pendekatan ilmiah dan teknologi rendah karbon. Misalnya, dalam sektor energi, transisi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan seperti surya, mikrohidro, dan biomassa dapat secara signifikan menurunkan emisi CO_2. Di sektor transportasi, pengembangan transportasi publik ramah lingkungan dan kendaraan listrik menjadi alternatif untuk mengurangi emisi dari kendaraan bermotor. Dalam pengelolaan limbah, penerapan sistem pengomposan, daur ulang, serta teknologi landfill yang mengontrol pelepasan metana dapat mengurangi emisi CH_4 secara signifikan. Selain itu, pelestarian

hutan dan peningkatan tutupan vegetasi melalui reforestasi dan agroforestri berfungsi sebagai penyerap karbon alami (carbon sink). Strategi-strategi tersebut harus didukung dengan penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan riset dan inovasi teknologi lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam perubahan perilaku konsumsi dan produksi. Dengan berbasis pada prinsip ekologi industri dan efisiensi sistem, program-program tersebut tidak hanya menurunkan emisi GRK, tetapi juga mendorong ketahanan sosial-ekologis di tingkat lokal.

6.2. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana merupakan daerah yang mempunyai risiko tinggi terjadinya bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh ulah manusia ataupun faktor alam. Wilayah ini cenderung lebih rentan terhadap dampak bencana alam dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana. Kabupaten Aceh Barat mempunyai potensi bencana alam yang tinggi. Berdasarkan catatan historis kebencanaan, Aceh Barat banyak mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan dan lahan. Potensi bencana gempa bumi relatif tinggi seperti di wilayah lain di sepanjang Patahan Semangko yang membentang di seluruh pantai barat Aceh. Potensi bencana ini dapat menimbulkan kerusakan serius karena sebagian besar wilayah perkotaan tumbuh di wilayah Pantai Barat. Potensi bencana di Kabupaten Aceh Barat antara lain: Potensi bencana geologi; berupa gempa bumi yang melanda seluruh wilayah Aceh Barat. Potensi bencana tsunami; umumnya tersebar luas di sepanjang pantai barat dalam jarak 1 km dari pantai. Wilayah yang berisiko terkena dampak serius adalah wilayah perkotaan Meulaboh. Potensi terjadinya bencana alam dan banjir; berupa banjir rob (pasang surut) di sekitar kota Meulaboh dan banjir bandang di cekungan Krueng Meurubo. Potensi bencana kebakaran; berupa kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Samatiga, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, dan Bubon.

6.3. Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko Bencana merupakan indeks untuk menentukan tingkat risiko bencana di suatu daerah. Indeks risiko dihitung berdasarkan komponen penyusunan yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurungan risiko bencana di suatu daerah. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2021, bencana yang sering terjadi di Provinsi Aceh adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, dan puting beliung. Selain itu, tsunami yang terjadi pada tahun 2004 banyak menimbulkan dampak korban jiwa, kerusakan fisik, dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan.

Dalam kurun waktu 2020-2024, Indeks Resko Bencana Kabupaten Aceh Barat menunjukkan kondisi yang lebih baik, hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 IRB Aceh Barat 155,99 dan pada tahun 2024 turun menjadi 146,22. Hal ini terjadi karena penguatan Sumber daya Manusia kebencanaan, pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan yang semakin baik, Sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan kebencanaan di gampong. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko
1	Aceh Barat	155.99	156.07	156.07	157.74	146.22	Rendah

Sumber: Website InaRisk.BNPB.go.id/irbi Tahun 2024

6.4. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kemampuan penanggulangan bencana suatu wilayah administratif baik di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya penurunan indeks risiko bencana dapat dilaksanakan di daerah melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023 memiliki nilai IKD senilai 0,42 dengan kategori sedang. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Barat memiliki kemampuan penanggulangan bencana yang sudah ada, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori yang lebih tinggi seperti "baik" atau "sangat baik". Untuk memperbaiki kondisi tersebut dan meningkatkan nilai IKD, Kabupaten Aceh Barat perlu melakukan beberapa langkah strategis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

1. Perencanaan
    - **Pemutakhiran Data Risiko Bencana:** Melakukan pembaruan data risiko bencana secara berkala untuk memahami ancaman yang ada dan merencanakan tindakan yang tepat.
    - **Pengembangan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB):** Menyusun dan memperbarui RPB yang komprehensif dan mencakup berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.
2. Pelaksanaan
    - **Pelatihan dan Simulasi:** Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat terkait melalui pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana, sehingga mereka lebih siap menghadapi situasi darurat.
    - **Peningkatan Infrastruktur:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti gedung sekolah, rumah sakit, dan jembatan.
    - **Sistem Peringatan Dini:** Mengembangkan dan memelihara sistem peringatan dini untuk bencana seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami.
3. Pemantauan
    - **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperbaikinya secara terus-menerus.
    - **Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi seperti satelit, drone, dan aplikasi mobile untuk pemantauan dan koordinasi penanggulangan bencana.
4. Evaluasi
    - **Evaluasi Kinerja:** Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
    - **Feedback dari Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam memberikan feedback terkait penanganan bencana yang telah dilakukan, sehingga pemerintah dapat memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.
5. Kebijakan dan Regulasi
    - **Penguatan Regulasi:** Mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan ketahanan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- **Pendanaan dan Sumber Daya:** Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program penanggulangan bencana dan memastikan sumber daya manusia yang kompeten.

6. Kolaborasi dan Kerjasama
   - **Kerjasama dengan Lembaga Terkait:** Membangun kerjasama dengan BNPB, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial.
   - **Peningkatan Kesadaran Publik:** Melakukan kampanye peningkatan kesadaran dan pendidikan publik mengenai kesiapsiagaan bencana.

Tabel 2.27 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	Nilai IKD				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh Barat	N/A	N/A	0,42	0,42	0,42

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Aceh

7. Demografi

Demografi merupakan aspek fundamental dalam memahami kondisi dan dinamika suatu daerah. Secara umum, demografi mencakup berbagai karakteristik penduduk, seperti jumlah dan kepadatan penduduk, laju pertumbuhan, distribusi wilayah, komposisi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, serta ciri-ciri sosial lainnya. Pemahaman terhadap struktur dan persebaran penduduk menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Berikut data-data mengenai karakteristik demografi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024.

7.1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, yang mencerminkan seberapa padat suatu wilayah dihuni oleh manusia. Berikut data mengenai Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024:

Tabel 2.28 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Persentase (%)
1	Johan Pahlawan	44,91	66.113	1.472	31,6
2	Samatiga	140,69	16.525	117	7,9
3	Bubon	129,58	7.156	55	3,42
4	Arongan Lambalek	130,06	12.528	96	5,99
5	Woyla	249,04	14.482	58	6,92
6	Woyla Barat	123,00	8.186	66	3,91
7	Woyla Timur	132,60	5.510	42	2,63
8	Kaway XVI	510,8	22.286	44	10,65
9	Meureubo	112,87	32.460	288	15,51
10	Pante Ceureumen	490,25	12.214	25	5,84
11	Panton Reu	83,04	7.022	85	3,36
12	Sungai Mas	781,73	4.738	6	2,26
Aceh Barat		**2.927,95**	**209.220**	**71**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat 2025

Berdasarkan data tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat, kepadatan penduduk bervariasi secara signifikan antar kecamatan. Kecamatan Johan Pahlawan menjadi wilayah dengan kepadatan tertinggi, yakni 1.472 jiwa/km^2, yang mencerminkan fungsi wilayah tersebut sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Diikuti oleh Meureubo dengan

kepadatan 288 jiwa/km^2, keduanya jauh melampaui kepadatan rata-rata kabupaten sebesar 71 jiwa/km^2. Sebaliknya, kecamatan seperti Sungai Mas (6 jiwa/km^2) dan Pante Ceureumen (25 jiwa/km^2) memiliki kepadatan terendah, menunjukkan bahwa wilayah ini masih sangat jarang dihuni dan berpotensi untuk pengembangan wilayah secara lebih merata.

7.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah indikator dasar demografi yang mencerminkan dinamika pertumbuhan populasi. Berikut data mengenai Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024:

Tabel 2.29 Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Johan Pahlawan	44,91	64.646	65.289	66.216	64.983	66.113
2	Samatiga	140,69	15.656	15.840	16.006	16.250	16.525
3	Bubon	129,58	6.817	6.817	6.870	7.000	7.156
4	Arongan Lambalek	130,06	11.871	11.954	12.060	12.289	12.528
5	Woyla	249,04	13.576	13.677	13.811	14.192	14.482
6	Woyla Barat	123,00	7.837	7.908	7.981	8.047	8.186
7	Woyla Timur	132,60	5.144	5.233	5.277	5.374	5.510
8	Kaway XVI	510,18	21.216	21.387	21.590	21.802	22.286
9	Meureubo	112,87	30.066	30.315	30.700	31.308	32.460
10	Pante Ceureumen	490,25	11.133	11.246	11.339	11.876	12.214
11	Panton Reu	83,04	6.586	6.656	6.713	6.855	7.022
12	Sungai Mas	781,73	4.188	4.257	4.295	4.499	4.738
Total		**2.927,95**	**198.736**	**200.579**	**202.858**	**204.475**	**209.220**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Aceh Barat menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk secara konsisten, dari 198.736 jiwa pada tahun 2020 menjadi 209.220 jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan ini dapat mencerminkan migrasi internal menuju wilayah yang lebih berkembang serta perbedaan angka kelahiran dan daya tarik ekonomi antar kecamatan.

7.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat menggambarkan perubahan komponen kependudukan seperti kelahiran, kematian dan migrasi menurut jenis kelamin dengan perhitungan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah pada waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Selain itu rasio jenis kelamin juga dipengaruhi oleh pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan dan pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Terutama yang berkaitan dengan pertimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel 2.30 Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

No.	Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Johan Pahlawan	33.083	33.030	66.113	100,16
2	Samatiga	8.360	8.165	16.525	102,39

No.	Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
3	Bubon	3.585	3.571	7.156	100,39
4	Arongan Lambalek	6.337	6.191	12.528	102,36
5	Woyla	7.238	7.244	14.482	99,92
6	Woyla Barat	4.143	4.043	8.186	102,47
7	Woyla Timur	2.754	2.756	5.510	99,93
8	Kaway XVI	11.190	11.096	22.286	100,85
9	Meureubo	16.623	15.837	32.460	104,96
10	Pante Ceureumen	6.154	6.060	12.214	101,55
11	Panton Reu	3.573	3.449	7.022	103,6
12	Sungai Mas	2.430	2.308	4.738	105,29
Total		**105.470**	**103.750**	**209.220**	**101,60**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat 2025

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa secara demografis, tahun 2024 proporsi penduduk menurut jenis kelamin, dari total penduduk sebesar 209.220 jiwa, dengan proporsi penduduk laki-laki adalah sebesar 105.470 jiwa dan perempuan sebesar 103.750 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin pada tahun 2024 di kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa dalam 100 orang perempuan, terdapat 101.60 (101) orang penduduk laki-laki. Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk per kecamatan terbanyak tahun 2024 terdapat di Kecamatan Meureubo (104.96); Kecamatan Sungai Mas (105.29) dan Kecamatann Panton Reu (103.6).

7.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia memberikan gambaran struktur umur penduduk, yang penting untuk merencanakan kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta ketenagakerjaan. Berikut data mengenai Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024:

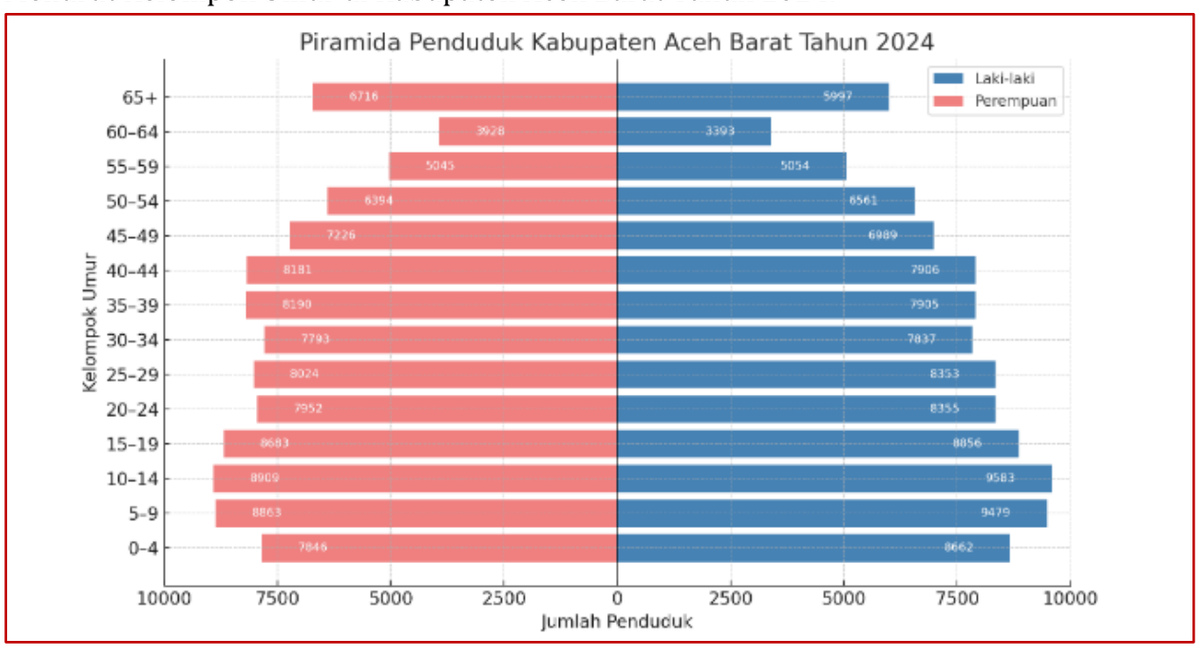

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat 2025

Gambar 2.10
Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Aceh Barat, struktur usia penduduk memperlihatkan karakteristik piramida penduduk yang perlahan berubah.

Kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi komposisi penduduk, dengan tren yang relatif stabil dan cenderung meningkat pada beberapa rentang usia seperti 45–59 tahun dan 60–64 tahun. Sebaliknya, kelompok usia muda (0–14 tahun) menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, mengindikasikan penurunan angka kelahiran atau transisi demografi menuju struktur penduduk yang menua. Kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 10.865 jiwa pada tahun 2020 menjadi 12.713 jiwa pada tahun 2024, memperlihatkan tanda-tanda awal penuaan penduduk (aging population). Tren ini perlu diantisipasi dengan kebijakan yang adaptif, termasuk perencanaan perlindungan sosial, pelayanan lansia, serta program peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif.

7.5. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu terhadap jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk menggambarkan peningkatan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alami maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Johan Pahlawan	1,39	0,98	1,42	1,41	0,18
Samatiga	1,57	1,16	1,05	0,98	0,18
Bubon	0,39	0,78	0,78	0,79	0,45
Arongan Lambalek	1,09	0,69	0,89	0,85	0,3
Woyla	1,14	0,74	0,98	0,91	0,3
Woyla Barat	1,3	0,9	0,92	0,84	0,49
Woyla Timur	2,13	1,7	0,84	0,81	0,36
Kaway XVI	1,2	0,8	0,95	0,96	0,28
Meureubo	1,23	0,82	1,27	1,24	0,74
Pante Ceureumen	1,41	1	0,83	0,82	0,49
Panton Reu	1,46	1,05	0,86	0,79	0,44
Sungai Mas	2,06	1,62	0,89	0,79	1,13
Total	**1,32**	**0,92**	**1,14**	**1,11**	**0,37**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Barat tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tahun 2024 yaitu Kecamatan Sungai Mas sebesar 1,13 persen, sedangkan kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah yaitu Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Samatiga masing-masing sebesar 0,18 persen. Pertumbuhan penduduk dalam konteks peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang konstruktif di mana sumber daya manusia dipandang sebagai modal kekuatan. Namun di sisi lain merupakan hambatan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dilihat dari segi pembangunan ekonomi sebagai modal atau potensi, apabila lapangan pekerjaan tersedia cukup. Kenyataannya lapangan pekerjaan tidak

tersedia dengan cukup sehingga mengakibatkan pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup penduduk.

7.6. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045

Proyeksi penduduk dibutuhkan untuk melihat gambaran kependudukan di Kabupaten Aceh Barat pada masa yang akan datang. Data proyeksi penduduk tersebut digunakan pemerintah untuk memahami dan merencanakan/perkiraan jumlah penduduk di masa depan sehingga proyeksi ini menjadi acuan untuk merencanakan pertumbuhan dan pengembangan di Kabupaten Aceh Barat.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat periode 2025-2045 dengan metode eksponensial didasarkan pada pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2023. Diasumsikan bahwa tren laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 hingga 2045 konsisten dengan tren laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Barat. Hasil proyeksi tahun 2025 hingga tahun 2045 jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 30,75%. Hasil tersebut dianggap dapat berdampak negatif di masa mendatang, karena dapat menyebabkan masalah kesehatan, lingkungan, kebutuhan pangan, banyak pengangguran, serta tingkat kualitas SDM yang rendah. Secara lebih detail hasil proyeksi disajikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Proyeksi Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
202.858	215.446	230.328	246.278	263.375	281.702

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

7.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.34 menunjukkan hasil proyeksi rasio jenis kelamin penduduk Aceh Barat menurun pada tahun 2025-2045. Pada tahun 2025 rasio jenis kelamin sebesar 102, yang artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio jenis kelamin relatif sama sepanjang 2025–2035 menuju angka 100 dan tahun 2040–2045 di bawah angka 100. Hal tersebut menunjukkan bahwa tahun 2025-2035 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan sedangkan pada tahun 2040-2045 jumlah penduduk laki-laki lebih rendah dibanding jumlah penduduk perempuan. Proyeksi rasio jenis kelamin penting karena dapat memberikan informasi tentang struktur demografis populasi di masa depan. Hal ini dapat berimplikasi penting untuk perencanaan kebijakan sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta dapat membantu dalam pengembangan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.33 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	102.613	108.846	115.932	123.350	131.123	139.284
Perempuan	100.245	106.600	114.396	122.928	132.252	142.418
Rasio	103	102	101	100	99	98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

7.8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk tahun 2010-2022 diketahui bahwa pada tahun 2045 kelompok umur usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 204.227 Jiwa. Secara rinci proyeksi

penduduk menurut kelompok usia Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.34 dan Gambar 2.11 berikut.

Tabel 2.34 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 tahun	50.824	54.194	53.413	51.990	49.928	47.271
15-64 tahun	140.115	149.138	161.393	174.645	188.918	204.227
> 65 tahun	11.919	12.114	15.522	19.642	24.529	30.204
Angka Ketergantungan	44,78	44,46	42,71	41,02	39,41	37,94

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

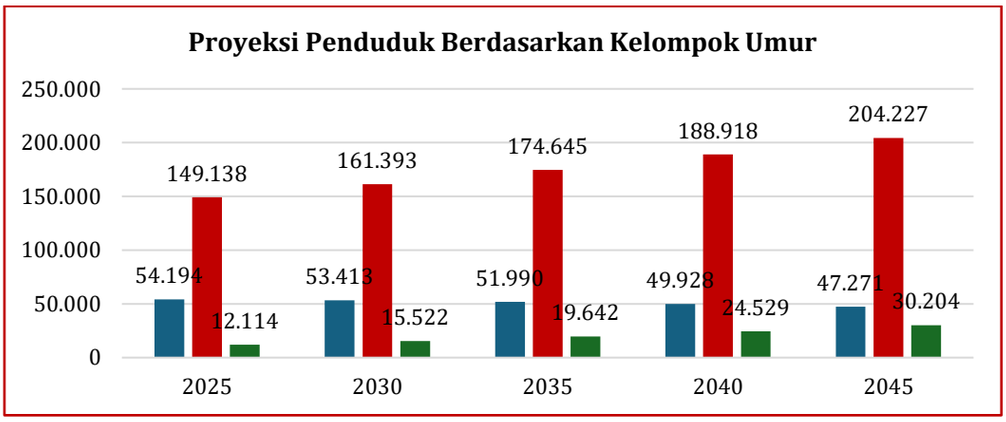

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Gambar 2.11
Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Usia
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2045

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, tenaga kerja, pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Selain itu juga sangat berguna dalam perencanaan pengendalian lonjakan jumlah penduduk yang dibutuhkan dalam program keluarga berencana untuk mengelola pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan. Hal ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sektor ekonomi, dan pengaturan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan perubahan demografi di Kabupaten Aceh Barat. Hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2025 hingga 2045 disajikan pada Gambar 2.11. Proyeksi ini didasarkan pada data jumlah penduduk setiap kelompok umur pada tahun 2010 hingga 2022 dan mengasumsikan laju pertumbuhan yang sama pada tahun 2025 hingga 2045.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga. Pada bab ini, akan dipaparkan kondisi kesejahteraan ekonomi yang meliputi indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia. Selain itu, aspek kesejahteraan sosial mencakup kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat saat ini dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan serta program pembangunan yang lebih efektif di masa mendatang.

1. Kesejahteraan Ekonomi

Aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam penyusunan RPJMD teknokratik Kabupaten Aceh Barat sangat penting untuk diperhatikan demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya tercermin dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari distribusi ekonomi yang adil, akses terhadap layanan dasar, dan peluang kerja yang merata. Pada bab ini, indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi akan diuraikan secara rinci untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi saat ini. Indikator-indikator tersebut meliputi:

1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan kegiatan ekonomi. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produktif, kesempatan kerja, daya beli masyarakat, serta peran pemerintah dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan yang inklusif, di mana manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (*sustainable economic growth*) perlu diperhatikan melalui penggunaan sumber daya yang bijaksana dan berkelanjutan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi serta potensi untuk terus berkembang ke depannya.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat telah menjadi perhatian utama dalam analisis pembangunan ekonomi regional. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah ini menggambarkan tren yang fluktuatif, yang mencerminkan berbagai faktor dan dinamika yang memengaruhi aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Dalam grafik berikut, akan dipresentasikan secara visual tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat selama beberapa tahun terakhir, memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai kondisi ekonomi di wilayah tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

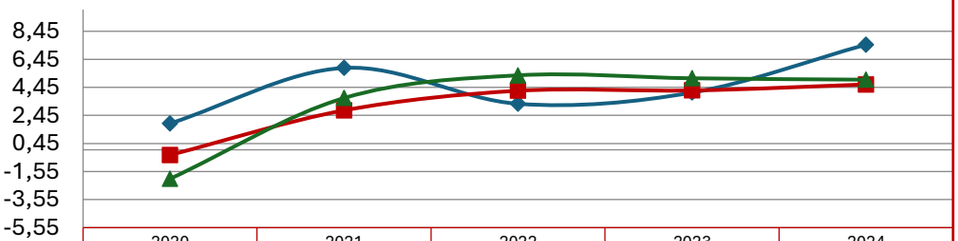

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Aceh Barat	1,88	5,84	3,28	4,08	7,5
Provinsi Aceh	-0,37	2,81	4,21	4,23	4,66
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,1	5

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.12
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 mencapai 1.88 persen lebih besar dari Provinsi Aceh yang hanya -0.37 persen dan Nasional yaitu -2.07 persen. Rendahnya tingkat pertumbuhan

ekonomi di semua wilayah disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global, termasuk terganggunya aktivitas ekonomi, penurunan konsumsi masyarakat, serta hambatan dalam rantai pasok dan distribusi barang dan jasa.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat untuk ketiga wilayah yakni Kabupaten Aceh Barat memperoleh 5.84 persen, Provinsi Aceh meningkat 2.81 persen dan Nasional memperoleh 3.69 persen. hal ini disebabkan oleh adanya pemulihan ekonomi yang diikuti dengan berbagai stimulus dan kebijakan pemulihan pasca pandemi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Sayangnya pertumbuhan ekonomi ini tidak dapat di pertahankan oleh Kabupaten Aceh Barat dan harus kembali menurun di tahun 2022 menjadi 3.28 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh ketergantungan pada stimulus covid-19 yang di berikan oleh pemerintah pusat sebelumnya, sehingga ketika bantuan covid-19 dihentikan menyebabkan penurunan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan sementara di tingkat Nasional mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 5.0 persen.

1.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Secara teoritis, kemiskinan dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk perspektif ekonomi, sosial, dan multidimensional. Perspektif ekonomi memandang kemiskinan sebagai kekurangan pendapatan atau konsumsi di bawah garis kemiskinan tertentu. Perspektif sosial menekankan pada ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat karena kekurangan sumber daya. Perspektif multidimensional mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, serta akses terhadap layanan dasar dan keamanan sosial.

Hal penting dari kemiskinan adalah dampaknya yang luas dan mendalam pada individu dan masyarakat. Kemiskinan dapat menyebabkan keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia dan menghambat potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, kemiskinan juga sering kali terkait dengan ketidakselarasan sosial, marginalisasi, dan ketidakstabilan politik. Individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung mengalami keterbatasan dalam kesempatan kerja, rendahnya daya beli, dan ketidakmampuan untuk mengakses layanan dasar, yang semuanya memperparah kondisi kemiskinan mereka. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, termasuk peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang layak, perlindungan sosial, serta kebijakan ekonomi yang inklusif dan pro-rakyat. Perkembangan tren tingkat kemiskinan baik di tingkat daerah, Provinsi dan Nasional telah mengalami kemajuan walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 antara lain:

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

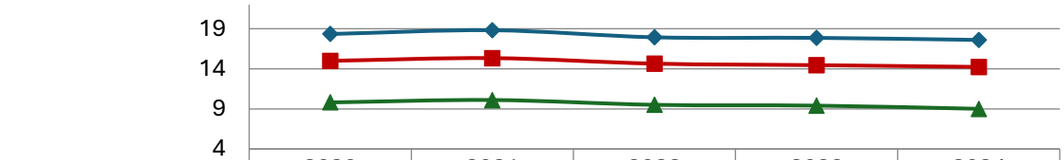

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Aceh Barat	18,34	18,81	17,93	17,86	17,6
Provinsi Aceh	14,99	15,33	14,64	14,45	14,23
Nasional	9,8	10,1	9,5	9,4	9

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.13
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan tingkat nasional pada periode 2020–2024 menunjukkan variasi yang menarik. Pada 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat tercatat sebesar 18,34%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh yang sebesar 14,99% dan tingkat nasional yang mencapai 984%. Pada 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh mengalami sedikit peningkatan menjadi 18,81% dan 15,33%, sementara di tingkat nasional naik menjadi 10,1%. Peningkatan ini disebabkan oleh dampak berkepanjangan pandemi yang masih mempengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pada 2022, persentase penduduk miskin kembali menurun menjadi 17,93% di Kabupaten Aceh Barat, 14,64% di Provinsi Aceh, dan 9,5% di tingkat Nasional. Penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi serta efektivitas program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah.

Tahun 2023, angka kemiskinan terus menurun menjadi 17,86% di Kabupaten Aceh Barat, 14,45% di Provinsi Aceh, dan 9,4% di tingkat nasional. Tren penurunan ini berlanjut pada 2024, dengan angka kemiskinan turun menjadi 17,6%, 14,23%, dan 9%. Penurunan ini menunjukkan keberlanjutan pemulihan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.Secara keseluruhan, variasi tahunan dalam persentase penduduk miskin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika ekonomi, kebijakan pemerintah, serta kondisi sosial dan kesehatan. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja menjadi kunci utama dalam mengurangi kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan.

1.3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan produktivitas ekonomi suatu daerah. Secara teoritis, PDRB per kapita didefinisikan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu di wilayah tersebut, meskipun tidak menggambarkan distribusi pendapatan secara rinci. Dalam ruang lingkupnya, PDRB per kapita digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah, mengidentifikasi potensi pertumbuhan ekonomi, serta menentukan kebijakan

pembangunan regional yang lebih efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.14 di bawah ini:

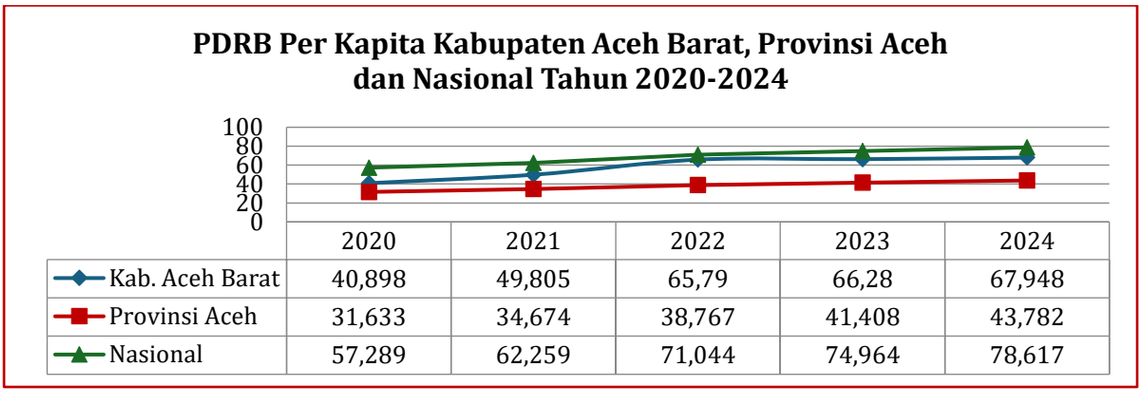

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Aceh Barat	40,898	49,805	65,79	66,28	67,948
Provinsi Aceh	31,633	34,674	38,767	41,408	43,782
Nasional	57,289	62,259	71,044	74,964	78,617

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.14
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan Data PDRB ADHB per kapita tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan secara nasional, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Kabupaten Aceh Barat mencatat kenaikan dari Rp.40,898,000 pada tahun 2020 menjadi Rp.67,948,000 pada tahun 2024, dengan lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 yakni Rp.65,790,000. Peningkatan drastis ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang mulai terasa pada tahun 2022, seiring dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi, meningkatnya harga komoditas unggulan seperti sawit dan perikanan, serta percepatan realisasi belanja pemerintah daerah. Di tingkat Provinsi Aceh, pertumbuhan yang lebih lambat dari Rp.31,633,000 menjadi Rp.43,782,000 menunjukkan masih terbatasnya sektor produktif dan investasi di wilayah provinsi secara umum, yang dapat disebabkan oleh ketergantungan pada dana transfer pusat dan minimnya diversifikasi ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan nasional yang stabil dan konsisten dari Rp.57,289,000 menjadi Rp.78,617,000 mengindikasikan pemulihan ekonomi nasional yang lebih merata dan kuat, ditopang oleh sektor industri, ekspor, serta kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif. Meskipun Aceh Barat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan Provinsi Aceh, kesenjangan dengan rata-rata nasional masih nyata, menandakan perlunya intervensi kebijakan yang mendorong hilirisasi sumber daya lokal, peningkatan SDM, dan penguatan infrastruktur ekonomi.

1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator ekonomi yang mengukur persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan dalam periode tertentu. TPT mencerminkan keseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja di pasar. Beberapa penyebab utama pengangguran terbuka termasuk ketidakseimbangan keterampilan (*skill mismatch*) di mana keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri, perubahan struktural dalam ekonomi seperti otomatisasi dan digitalisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu, serta kondisi ekonomi makro seperti resesi yang mengurangi permintaan akan tenaga kerja. Selain itu, faktor-faktor seperti kebijakan tenaga kerja yang tidak fleksibel dan rendahnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga dapat memperburuk tingkat pengangguran.

Dampak dari tingkat pengangguran terbuka yang tinggi cukup signifikan bagi perekonomian dan masyarakat. Secara ekonomi, pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan hilangnya potensi output nasional dan penurunan produktivitas, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Bagi individu, pengangguran menyebabkan kehilangan pendapatan, yang dapat menurunkan standar hidup dan meningkatkan kemiskinan. Selain itu, pengangguran jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan keterampilan dan motivasi kerja, yang lebih lanjut mengurangi peluang mendapatkan pekerjaan di masa depan. Dari sisi sosial, tingginya pengangguran dapat meningkatkan ketidakselarasan, memperburuk kesehatan mental, dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi TPT memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja baru, dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Perkembangan tren Tingkat pengangguran terbuka (TPT) baik di tingkat daerah, Provinsi dan Nasional telah mengalami kemajuan walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 antara lain:

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

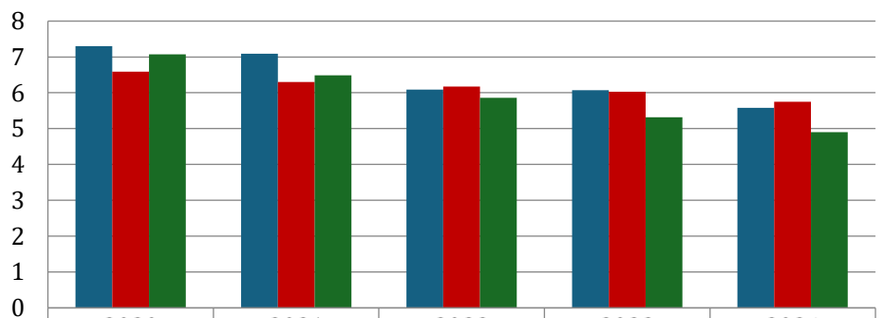

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Aceh Barat	7,3	7,09	6,09	6,07	5,58
Provinsi Aceh	6,59	6,3	6,17	6,03	5,75
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,9

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional untuk periode 2020–2024 memperlihatkan variasi yang cukup signifikan antara ketiga wilayah tersebut. Pada tahun 2020, TPT di Kabupaten Aceh Barat mencapai 7,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh sebesar 6,59% dan nasional sebesar 7,07%. Tren ini berlanjut pada tahun 2021, di mana TPT di Kabupaten Aceh Barat menurun sedikit menjadi 7,09%, sementara Provinsi Aceh meningkat menjadi 6,3% dan nasional menjadi 7,49%.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan TPT di semua wilayah, dengan Kabupaten Aceh Barat turun menjadi 6,09%, Provinsi Aceh 6,17%, dan nasional 5,86%. Penurunan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya peluang kerja pascapandemi COVID-19. Selanjutnya pada tahun 2024, TPT di Kabupaten Aceh Barat

turun signifikan menjadi 5,58%, sedikit lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Aceh sebesar 5,75% dan nasional sebesar 4,9%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja di daerah.

Ke depan, tren positif ini perlu dipertahankan dan diperkuat melalui arah kebijakan pembangunan sebagaimana diatur dalam RPJMN 2025–2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025, Lampiran IV). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diharapkan memperluas upaya pengurangan pengangguran terbuka dengan mengembangkan program pelatihan vokasi berbasis industri yang disesuaikan dengan potensi ekonomi unggulan daerah. Pelatihan tersebut dapat diarahkan pada beberapa sektor strategis, antara lain:

1. Sektor perikanan dan kelautan, melalui penguatan kompetensi tenaga kerja di bidang budidaya perikanan, pengolahan hasil laut, serta teknologi rantai dingin (cold chain) untuk mendukung industri berbasis hasil tangkapan dan olahan;
2. Sektor pariwisata pesisir, melalui pelatihan keterampilan perhotelan, pemandu wisata, kuliner lokal, dan pengelolaan desa wisata yang berorientasi pada pariwisata berkelanjutan;
3. Sektor perkebunan kelapa sawit, melalui pelatihan teknis pengolahan hasil sawit, manajemen kebun berkelanjutan, dan pemanfaatan produk turunan sawit yang bernilai tambah.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan pelaku industri perlu diperkuat agar pelatihan vokasi yang diberikan selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja secara langsung di sektor-sektor produktif tersebut. Dengan demikian, program pelatihan vokasi berbasis industri dapat menjadi instrumen kunci dalam menjaga tren penurunan TPT dan memperkuat struktur ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing .

1.5. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu indeks yang digunakan dalam analisis Susenas oleh BPS sebagai proksi pendapatan yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran dalam suatu populasi. Dalam konsep teoritisnya, nilai Gini ratio mengindikasikan seberapa besar ketimpangan pendapatan antar individu atau kelompok dalam masyarakat, dengan rentang nilai antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati 1, nilai Gini ratio menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi, sementara mendekati 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Perkembangan tren indeks gini baik di tingkat daerah, Provinsi dan Nasional telah mengalami banyak kemajuan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan penurunan indeks gini dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 antara lain:

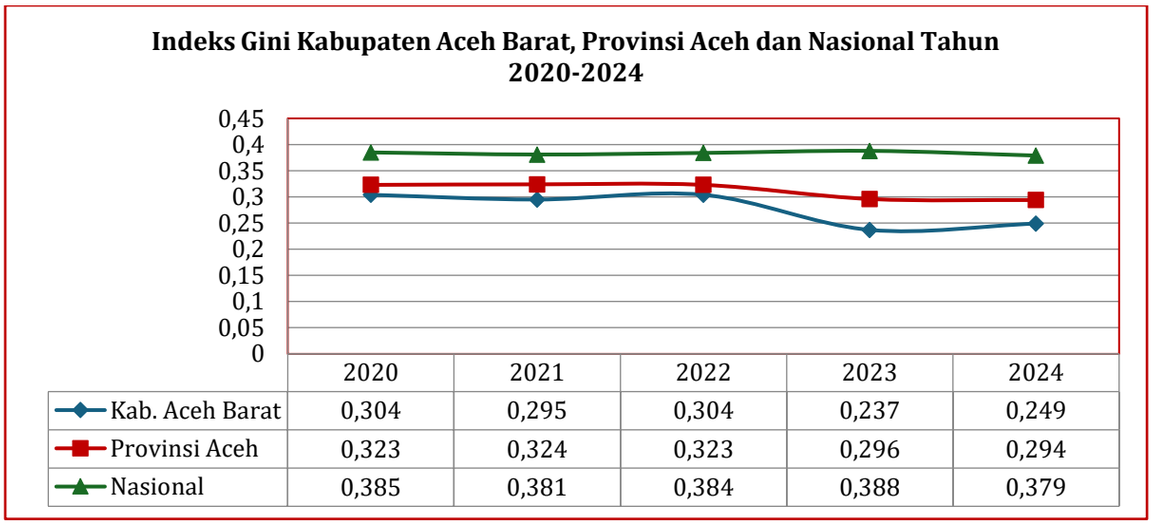

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Aceh Barat	0,304	0,295	0,304	0,237	0,249
Provinsi Aceh	0,323	0,324	0,323	0,296	0,294
Nasional	0,385	0,381	0,384	0,388	0,379

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.16
Indeks Gini Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa Indeks Gini di Kabupaten Aceh Barat relatif mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,249. Sedangkan untuk Provinsi Aceh dan Nasional indeks gini mengalami tren yang fluktuatif meskipun angkanya tidak terlalu mencolok. Selama 5 tahun terakhir, Provinsi Aceh mencatat indeks Gini tertinggi pada tahun 2021, yakni sebesar 0,324 dan indeks gini terendah terjadi di tahun 2024 sebesar 0,294. Sedangkan di tingkat Nasional, Indeks Gini mencapai angka yang relatif stabil dengan nilai 0,385 pada tahun 2020, yang kemudian menurun menjadi 0.379 pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, pelaksanaan program-program sosial ekonomi yang merata, serta pertumbuhan ekonomi yang memberikan kesempatan kepada lebih banyak individu atau kelompok untuk meraih pendapatan yang lebih baik. Selain itu, upaya-upaya peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga turut berkontribusi dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam Indeks Gini.

1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar yang mempengaruhi kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi fundamental yang mencakup aspek-aspek kunci dari kualitas hidup. Pertama adalah dimensi umur panjang dan kesehatan yang tercermin dalam angka harapan hidup saat lahir. Dimensi kedua adalah pengetahuan, yang diukur melalui indikator gabungan antara Harapan lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Terakhir, dimensi hidup yang layak dinilai melalui indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, yang tercermin dalam rata-rata pengeluaran per kapita. Semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kualitas hidup manusia di wilayah tersebut. Sebaliknya, nilai IPM yang rendah mengindikasikan kualitas hidup yang lebih rendah bagi manusia di wilayah tersebut. IPM menjadi instrumen yang sangat penting dalam menganalisis dan memonitor kemajuan pembangunan manusia serta memberikan arahan bagi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menurut data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan tingkat Nasional menunjukkan tren

fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan. Hal ini akan lebih jelas dipaparkan melalui grafik di bawah ini:

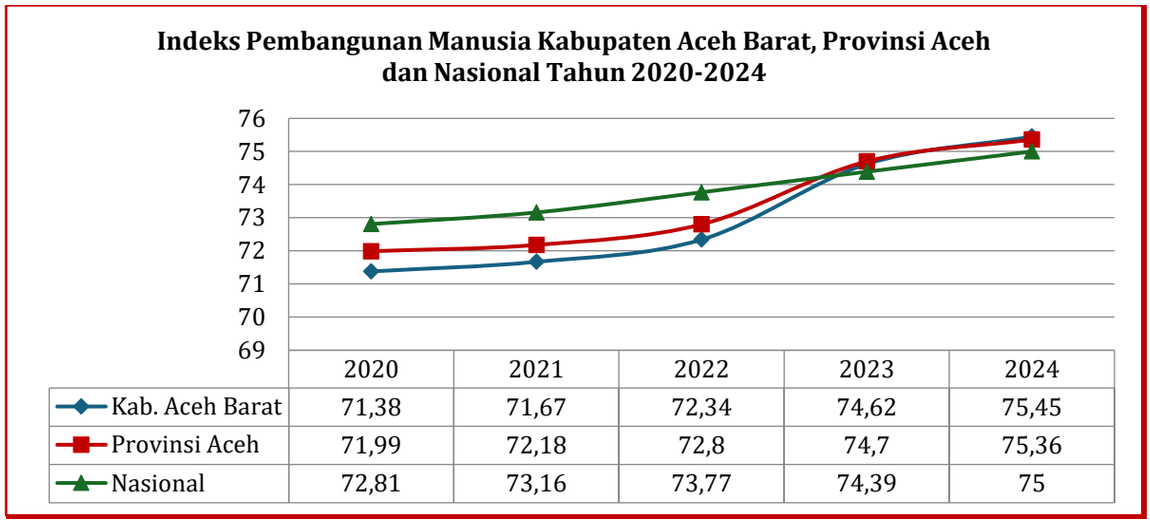

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Aceh Barat	71,38	71,67	72,34	74,62	75,45
Provinsi Aceh	71,99	72,18	72,8	74,7	75,36
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan tingkat Nasional selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan secara konsisten dalam periode 2020-2024. Peningkatan ini disebabkan oleh banyak faktor yaitu Pertama, adanya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan masyarakat di semua tingkatan, seperti fasilitas kesehatan yang lebih mudah dijangkau, program imunisasi yang lebih luas, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Kedua, peningkatan akses dan kualitas pendidikan juga berkontribusi signifikan. Program pendidikan yang lebih inklusif, peningkatan infrastruktur pendidikan, dan inisiatif untuk meningkatkan tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah menjadi faktor penting dalam meningkatkan IPM. Dan Ketiga, adanya kebijakan ekonomi yang mendorong inklusi dan kesetaraan juga turut berperan. Peningkatan lapangan kerja, program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang rentan, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi memberikan dampak positif terhadap IPM baik di tingkat daerah, Provinsi maupun Nasional.

2. Kesehatan untuk Semua

2.1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan suatu populasi. Secara teoritis, usia harapan hidup mencerminkan tingkat perkembangan sosial, ekonomi, dan kesehatan suatu masyarakat. Faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang memadai, infrastruktur yang mendukung, dan stabilitas ekonomi dapat berdampak langsung pada usia harapan hidup. Ketentuan nilai Usia Harapan Hidup (UHH) berada dalam rentang 20 hingga 85 tahun, sesuai dengan standar UNDP. Nilai UHH yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang lebih baik, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kekurangan dalam kesehatan dan kesejahteraan. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional selama lima tahun terakhir tersaji dalam gambar di bawah ini:

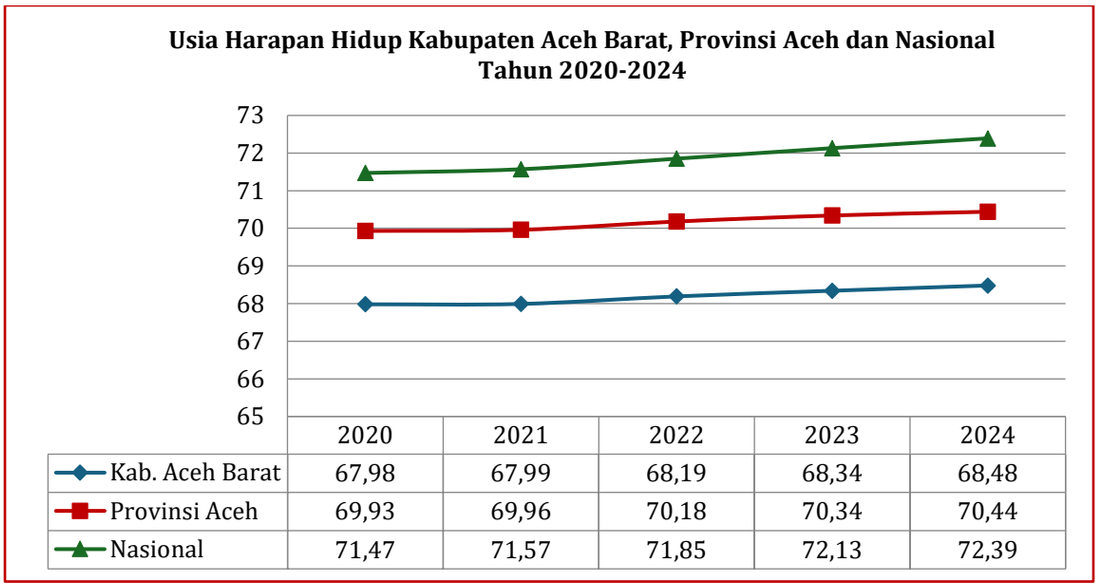

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Aceh Barat	67,98	67,99	68,19	68,34	68,48
Provinsi Aceh	69,93	69,96	70,18	70,34	70,44
Nasional	71,47	71,57	71,85	72,13	72,39

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.18
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa usia harapan hidup baik di tingkat Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh maupun Nasional mengalami tren peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat di lihat dari Kabupaten Aceh Barat di mana pada tahun 2020 usia harapan hidupnya 67.98 mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 68.48. Provinsi Aceh usia harapan hidupnya di tahun 2020 hanya sebesar 69.93 meningkat pada tahun 2024 menjadi 70.44. Selanjutnya di tingkat Nasional usia harapan hidup pada tahun 2019 hanya 71.34 meningkat menjadi 71.47 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam kesehatan dan kualitas hidup masyarakat baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional.

2.2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator komposit yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengukur derajat kesehatan keluarga secara menyeluruh melalui 12 indikator esensial. Indeks ini mencakup aspek perilaku hidup bersih dan sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, lingkungan rumah yang layak, serta status kesehatan anggota keluarga seperti ibu hamil, balita, penderita hipertensi, dan tuberkulosis. Secara ilmiah, IKS merupakan representasi dari pendekatan promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan masyarakat, bukan hanya mengandalkan kuratif. Penilaian IKS bertujuan untuk melihat efektivitas intervensi di tingkat keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, sehingga sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sektor kesehatan. Semakin tinggi IKS, semakin tinggi pula ketahanan keluarga terhadap berbagai risiko kesehatan, yang pada gilirannya mendorong pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan.

Tantangan ini telah diakomodir dengan adanya program **Pendampingan Ibu Hamil dan 1000 HPK** yang merupakan salah satu program paling relevan dan strategis dalam mendukung peningkatan Indeks Keluarga Sehat. Program ini secara langsung menyasar salah satu indikator utama IKS, yaitu pemantauan kehamilan, kelahiran, dan pemenuhan gizi anak pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat menentukan

kualitas kesehatan anak di masa depan. Pendampingan intensif kepada ibu hamil dan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan pelayanan kesehatan selama masa kehamilan dan kelahiran dapat mencegah stunting, komplikasi persalinan, serta meningkatkan kesadaran keluarga dalam mengakses layanan kesehatan. Program ini juga memiliki efek berantai terhadap indikator lainnya dalam IKS, seperti kepemilikan jaminan kesehatan, imunisasi anak, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Dengan pendekatan intervensi berbasis keluarga dan berorientasi pada masa krusial kehidupan, PEDULI 1000 HPK menjadi pilar penting dalam transformasi layanan kesehatan yang berbasis keluarga dan komunitas.

2.3. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Anak yang mengalami stunting umumnya memiliki tinggi badan lebih pendek dibandingkan anak seusianya, dan kondisi ini bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, daya tahan tubuh, serta produktivitas di masa depan. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, melainkan juga mencerminkan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks terkait dengan kemiskinan, pola asuh, ketahanan pangan keluarga, sanitasi, serta akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, penanganan stunting membutuhkan pendekatan menyeluruh dari berbagai sektor, tidak hanya dari bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, penurunan stunting menjadi indikator penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

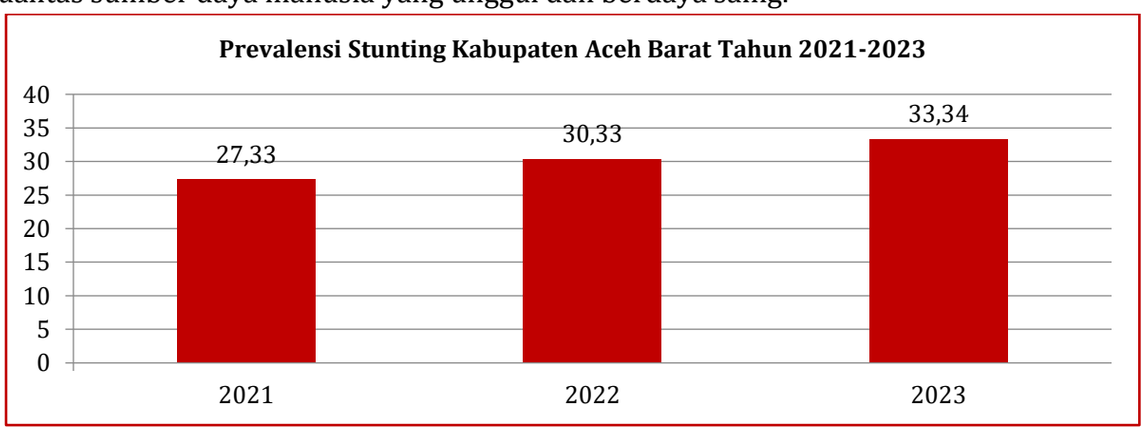

Gambar 2.19
Prevalensi Stunting Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2023

Data prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar **27,33%**, kemudian meningkat menjadi **30,33%** pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi **33,34%** pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa masalah stunting di Aceh Barat masih cukup serius dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Meningkatnya jumlah anak yang mengalami stunting dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti rendahnya asupan gizi ibu hamil dan balita, kurangnya pemahaman orang tua tentang pola makan sehat, sanitasi lingkungan yang tidak memadai, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerja sama dari semua pihak—baik pemerintah, tenaga kesehatan, pendidik, maupun masyarakat—untuk memastikan setiap anak mendapatkan gizi yang cukup, perawatan yang baik, dan lingkungan yang sehat sejak dini.

2.4. *Universal Health Coverage* (UHC)

Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial. Tujuan utama dari UHC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan layanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan UHC meliputi cakupan pelayanan kesehatan esensial, perlindungan risiko finansial, dan akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Implementasi UHC melibatkan beberapa langkah, termasuk pengembangan kebijakan kesehatan yang inklusif, penyediaan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan pengawasan serta evaluasi berkala. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk memastikan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Berikut perkembangan UHC di Kabupaten Aceh Barat tahun 2021-2024:

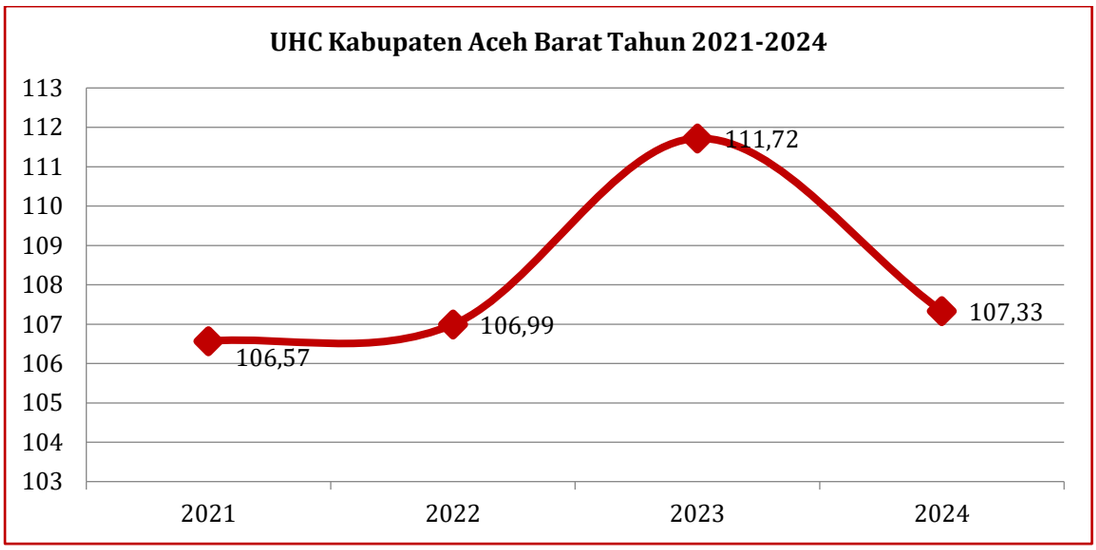

Sumber: BPJS Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.20
Perkembangan UHC Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2024

Grafik yang ditampilkan menunjukkan tren fluktuatif indeks *Universal Health Coverage* (UHC) dari tahun 2021 hingga 2024 di Kabupaten Aceh Barat. Pada tahun 2021, indeks UHC sebesar 106.57% mengindikasikan bahwa sebagian besar populasi sudah memiliki akses ke layanan kesehatan esensial. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang relative kecil dengan indeks UHC mencapai 106.99%. dan pada tahun 2023, Kabupaten Aceh Barat mencapai indeks UHC 111.72%, yang berarti seluruh populasi telah mendapatkan akses penuh ke layanan kesehatan yang diperlukan tanpa hambatan finansial atau geografis.Namun di tahun 2024 UHC kabupaten aceh barat mengalami penurunan menjadi 107.33 %. Hal ini mengindikasikan perlunya dukungan pemerintah meliputi penguatan sistem rujukan, peningkatan kualitas layanan kesehatan primer, serta edukasi kesehatan yang lebih luas di masyarakat.

2.5. Profil Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan sebuah daerah. Fasilitas Kesehatan menjadi faktor penting dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan fasilitas dilihat dari nilai rasio puskesmas, rumah sakit, dan poliklinik.

Perkembangan jumlah fasilitas, rasio fasilitas kesehatan per satuan penduduk, dan informasi kesehatan lainnya dari tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut:

Tabel 2.35 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio posyandu per satuan balita	Persen	28,88	28,88	29,88	29,88	31.62
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,675	0,680	0,685	0,690	0.69
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,025	0,025	0,025	0,025	0.025
Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,62	0,65	0,68	0,70	0.74
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Persen	56	56,51	57,02	57,53	58.45

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Semester 2

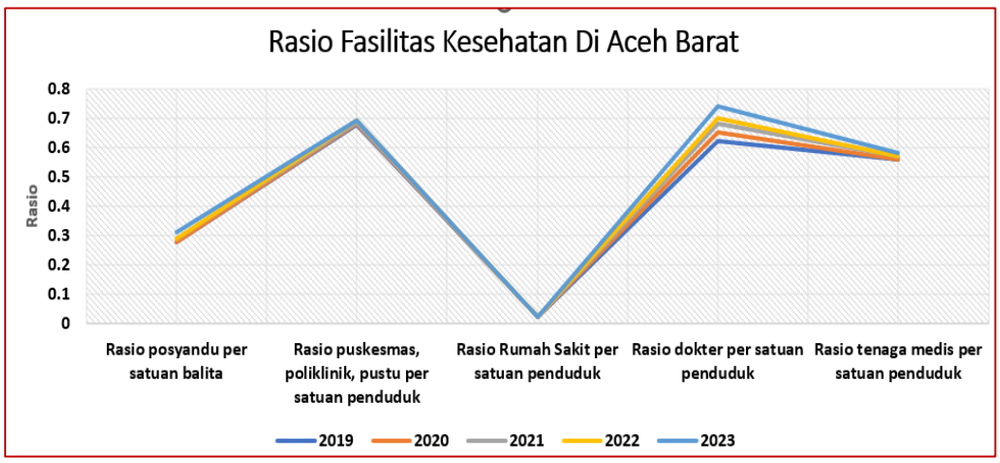

Gambar 2.21
Rasio Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat

Tabel 2.36 Jumlah Kasus Bidang Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Persen	17	15	14	13	10.1
Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	983	984	985	986	986.6*
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	17	14	13	12	11
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	10	9	9	8	7.5
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	246/8 Kasus	102/4 Kasus	99/4 Kasus	96/3 Kasus	84.1/3 kasus*
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	65,30	67,40	70	75	96.75*
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	72	75	80	85	88.6*
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*	Persen	22	35	80	85	85.6*
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	35,9	45,9	80	85	96.35*
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	31,3	38,80	46,30	53,80	55.0
Non-Polio AFP rata per 100,000 penduduk	Persen	100	100	100	100	100*
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	11,7	20	20	25	22.4*
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	28	30	35	35	38.6*

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	Persen	<5	< 5	< 5	< 5	< 5
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	Persen	20,10	34.00	20.70	23.40	23.70*
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	Persen	85.00	94.50	76.00	79.35	74.85*
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100
Angka kejadian Malaria	Persen	<1	<1	<1	<1	<1
Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0	0	0	0	0
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0	0	0	0
Insidensi HIV/AIDS (Per 1000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV/AIDS	Persen			0,04	0,00	0,00
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	80	80	85	90	98.8*
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	63,7	64,25	64,15	63,50	63.88

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Semester 2
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

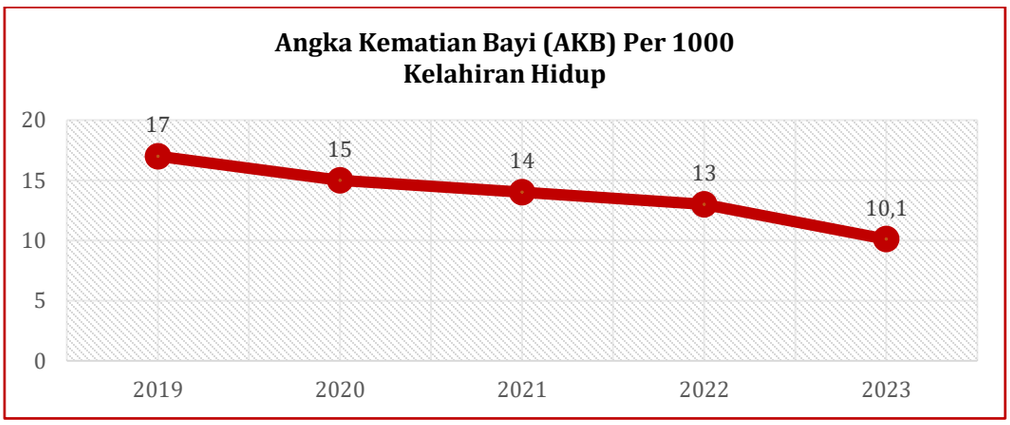

Gambar 2.22
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

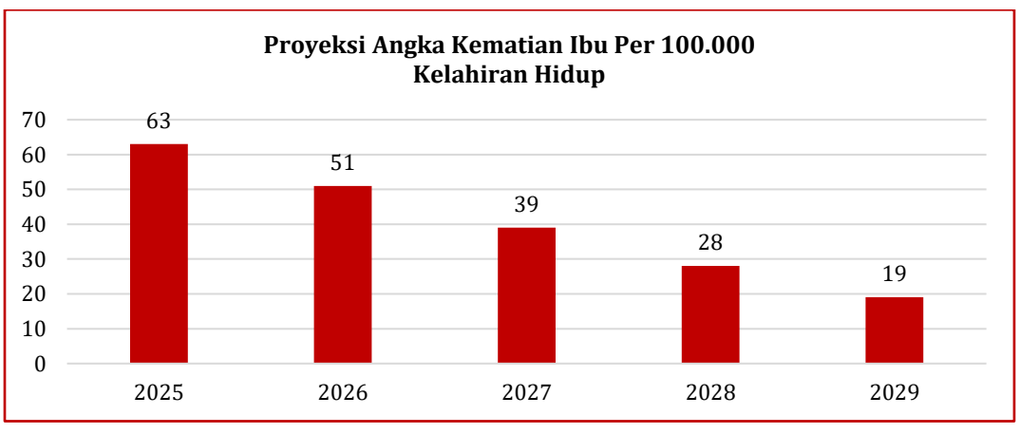

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Gambar 2.23
Proyeksi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2025-2029

Berdasarkan tren data angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2023, analisis proyeksi dilakukan untuk mengetahui besaran angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup selama 5 tahun ke depan yang disajikan pada gambar di atas. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Aceh Barat diprediksi terus menurun hingga tahun 2029 di mana mencapai 19. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tersebut menggambarkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.37 Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan kunjungan bayi	Persen	16,26	30	40	50	47.6*
Cakupan puskesmas	Persen	108	108	108	108	108*
Cakupan pembantu puskesmas	Persen	15,8	16	16,5	17	17.5*
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	33,61	40	50	60	49.2*
Cakupan pelayanan nifas	Persen	28,77	70	80	90	90.5*
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	27,7	60	65	70	88.2*
Cakupan pelayanan anak balita	Persen	16,98	80	85	90	93.3*
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	113,2	100	100	100	100*
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	51,37	52,37	53,37	54,37	76.7*
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	30	35	40	45	48.0*

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Semester 2
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

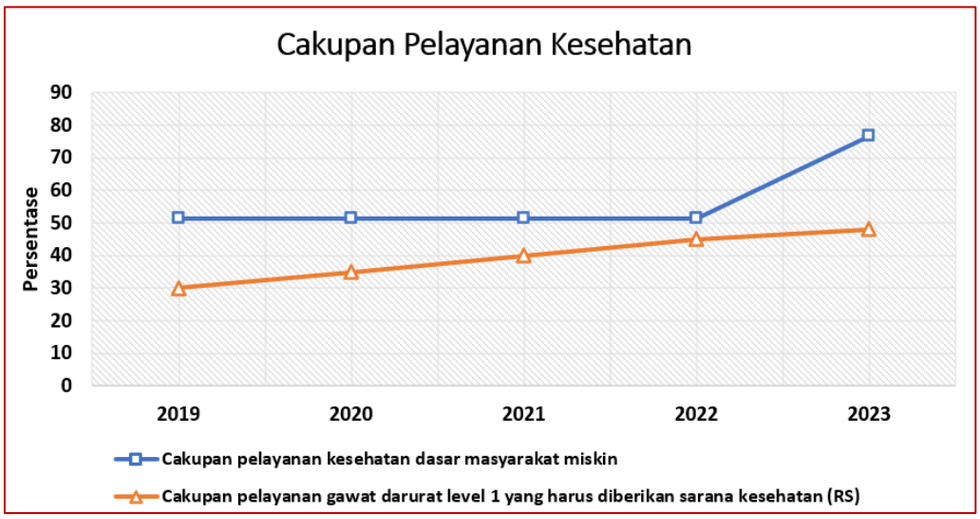

Gambar 2.24
Cakupan Layanan Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat

Selain itu, Hasil pencapaian SPM Bidang Kesehatan memperlihatkan masih terdapat indikator yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup sehat dan penyesuaian anggaran JKN, dimana terkendala dengan pemerintah pusat terkait aturan yang mengikuti jumlah kapitasi dan non kapitasi yang perhitungannya sesuai dengan jumlah layanan kesehatan di puskesmas.

Tabel 2.38 Capaian SPM di Bidang Kesehatan

No	Indikator	Sasaran Program	Capaian	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.110	3.789	92,19%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.923	3.889	99,13%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.182	4.182	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	14.848	14.848	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	36.739	33.448	91,04%
6	Pelayanan Kesahatan Pada Usia Produktif	36.108	36.108	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	19.500	19.500	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38.965	38.965	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	4.325	4.325	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	727	727	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuber Kulosis	3.410	2.685	78,74%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	4.998	3.601	72,05%

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Aceh Barat 2023

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM untuk mencapai suatu keberhasilan pembangunan. Mutu pendidikan juga harus terus ditingkatkan baik dari kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Banyaknya penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Hal tersebut diketahui melalui tiga indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2023.

3.1. Rata-Rata lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di suatu wilayah. Dalam konteks ilmiah, RLS mencerminkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh populasi dewasa dan dapat digunakan untuk menilai kualitas pendidikan historis serta kebijakan pendidikan di masa lalu. Definisi RLS adalah rata-rata jumlah tahun sekolah yang dihabiskan oleh orang dewasa, yang mencakup pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Manfaat dari RLS meliputi penilaian terhadap kualitas sumber daya manusia, perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi, serta identifikasi kesenjangan pendidikan antar wilayah. RLS biasanya diukur dalam skala dari 0 hingga 12 tahun atau lebih, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional selama lima tahun terakhir tersaji dalam gambar di bawah ini:

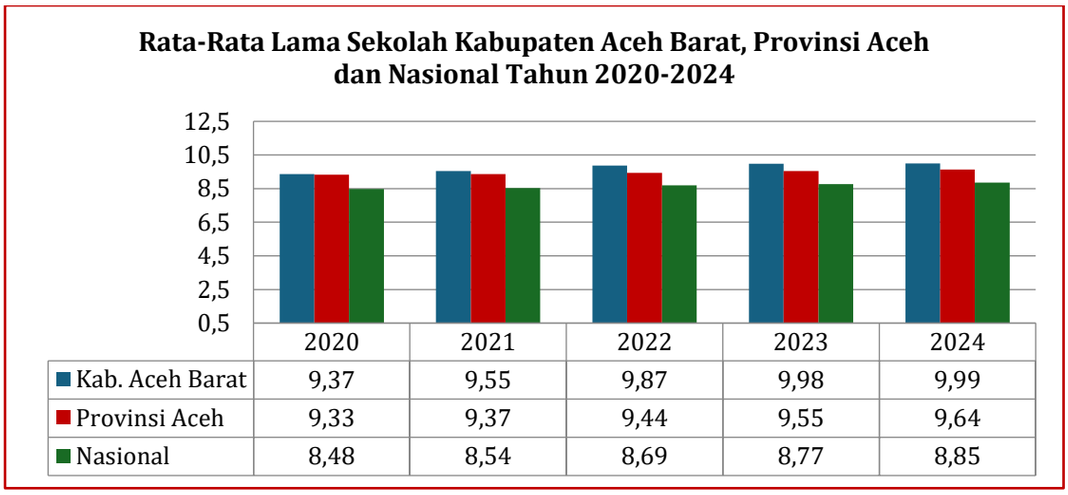

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Aceh Barat	9,37	9,55	9,87	9,98	9,99
Provinsi Aceh	9,33	9,37	9,44	9,55	9,64
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.25
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah baik di tingkat daerah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh maupun di tingkat Nasional mengalami tren peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini dapat di lihat pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah yang di capai Kabupaten Aceh Barat sebesar 9.37 dan meningkat terus hingga mencapai 9.99 di tahun 2024. Selanjutnya untuk Provinsi Aceh diperoleh nilai rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 9.33 dan meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 9.64 pada tahun 2024. Hal ini berarti rata-rata penduduk dewasa di Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau setara. Sementara untuk di tingkat Nasional, capaian rata-rata lama sekolah hanya sebesar 8.85 pada tahun 2024 yang berarti penduduk dewasa di Indonesia telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) atau setara.

Perkembangan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang memiliki perbedaan antar daerah maupun Nasional ini disebabkan oleh ukuran dan variasi wilayah yang dapat mempengaruhi nilai statistik. Di tingkat Nasional, data mencakup banyak wilayah dengan kondisi pendidikan yang sangat bervariasi, dari daerah yang sangat maju hingga daerah yang sangat tertinggal, yang dapat menurunkan rata-rata Nasional. Di tingkat Provinsi, meskipun lebih kecil dari Nasional, variasi antar kabupaten/kota juga masih cukup besar. Namun, di tingkat kabupaten seperti Kabupaten Aceh Barat, data lebih terfokus dan mencerminkan situasi yang lebih homogen, sehingga HLS dan RLS bisa lebih tinggi.

3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat dijalani oleh seorang anak pada usia tertentu, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dalam konteks ilmiah, HLS mencerminkan aksesibilitas dan kualitas sistem pendidikan di suatu negara atau daerah. Definisi dari HLS adalah proyeksi jumlah tahun pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. Manfaat dari HLS meliputi penilaian terhadap efektivitas kebijakan pendidikan, perencanaan pembangunan sumber daya manusia, serta identifikasi ketimpangan dalam akses pendidikan. HLS biasanya diukur

dalam rentang skala dari 0 hingga 18 tahun atau lebih, dengan interpretasi nilai yang lebih tinggi menunjukkan harapan akan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Perkembangan harapan lama sekolah di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional selama lima tahun terakhir tersaji dalam gambar di bawah ini:

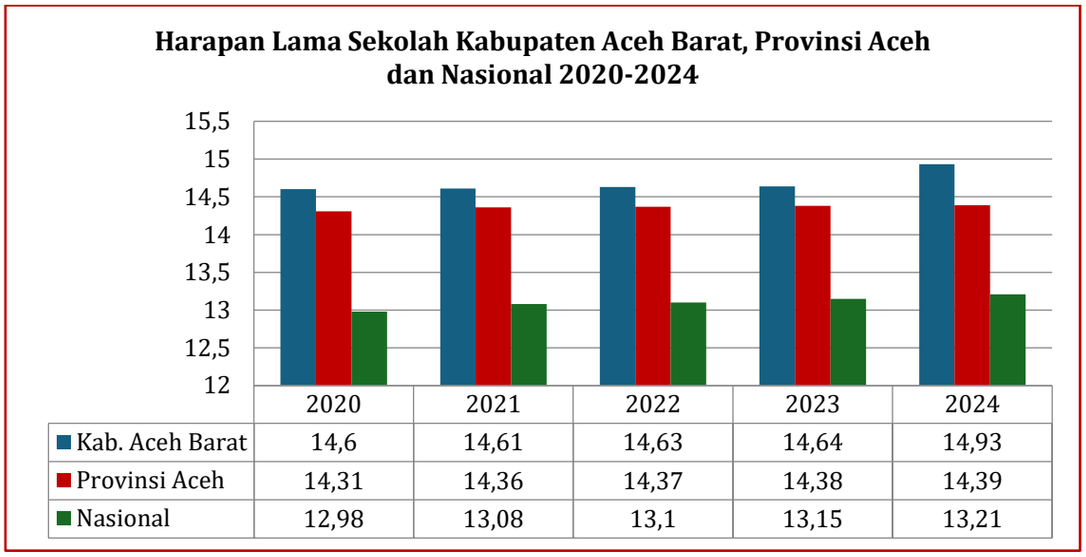

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Aceh Barat	14,6	14,61	14,63	14,64	14,93
Provinsi Aceh	14,31	14,36	14,37	14,38	14,39
Nasional	12,98	13,08	13,1	13,15	13,21

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.26
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional selama periode 2020–2024, terlihat bahwa capaian HLS di Kabupaten Aceh Barat secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional. Pada tahun 2020, HLS Aceh Barat tercatat sebesar 14,6 tahun dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 14,93 tahun pada tahun 2024. Di sisi lain, Provinsi Aceh mencatat peningkatan dari 14,31 menjadi 14,39 tahun, sedangkan tingkat nasional meningkat dari 12,98 menjadi 13,21 tahun pada periode yang sama. Kinerja positif Aceh Barat ini menunjukkan bahwa anak-anak di wilayah tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk mengenyam pendidikan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan wilayah lain. Hal ini dapat mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan daerah dalam memperluas akses, meningkatkan mutu layanan pendidikan, serta mendorong partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal. Pencapaian ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di tingkat lokal.

3.3. Angka Literasi/Numerasi

Secara konseptual, **literasi** merujuk pada kemampuan individu dalam memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan merefleksikan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Sementara itu, **numerasi** adalah kemampuan menggunakan konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menafsirkan informasi kuantitatif. Kedua kompetensi ini merupakan fondasi penting dalam pendidikan abad ke-21, karena keterampilan literasi dan numerasi yang baik meningkatkan kapasitas individu dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, serta meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan global.

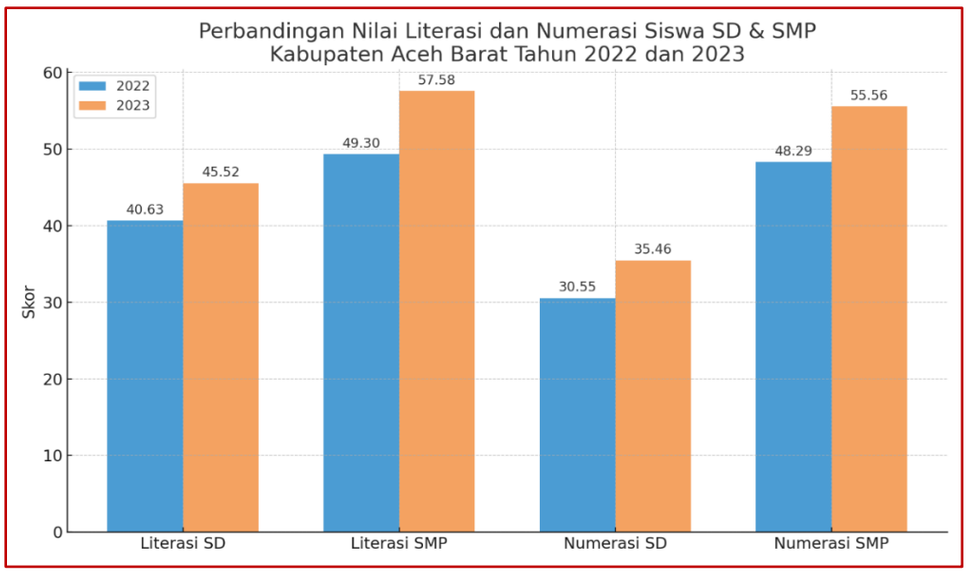

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025

Gambar 2.27
Perbandingan Nilai Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan grafik, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam skor literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2022 ke 2023. Literasi SD naik dari 40,63 menjadi 45,52, dan literasi SMP naik lebih tinggi dari 49,3 ke 57,58. Peningkatan juga terlihat pada numerasi SD dari 30,55 ke 35,46, serta numerasi SMP dari 48,29 ke 55,56. Meskipun demikian, angka numerasi SD masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan tantangan mendasar dalam penguasaan konsep dasar matematika pada usia dini. Secara ilmiah, pencapaian rendah ini dapat disebabkan oleh kurangnya pendekatan pembelajaran kontekstual, keterbatasan media ajar numerik, dan kemampuan pedagogis guru yang belum optimal, terutama di daerah rural Aceh Barat yang masih menghadapi kendala akses pendidikan berkualitas.

Rendahnya angka literasi dan numerasi secara langsung mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kualitas proses pembelajaran di kelas. Salah satu program paling relevan untuk menjawab tantangan ini adalah PINTAR (Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Guru). Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan pedagogis, penerapan model pembelajaran aktif, serta pemanfaatan alat ajar yang mendorong literasi dan numerasi siswa. Di Aceh Barat, pelaksanaan program PINTAR menjadi strategi strategis karena guru adalah agen perubahan utama dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dengan memperkuat keterampilan guru, terutama dalam menyampaikan materi literasi dan numerasi secara interaktif dan kontekstual, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dan berkelanjutan dalam capaian kompetensi dasar siswa di seluruh jenjang pendidikan.

3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah instrumen terstandarisasi yang berfokus pada pengukuran tingkat literasi individu dalam hubungannya dengan ketersediaan sumber literasi (pemerataan layanan perpustakaan, koleksi, tenaga dan kunjungan) dan dukungan lingkungan sosial (partisipasi keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan literasi). Tujuan utama dari IPLM adalah menyediakan basis data kuantitatif dan objektif guna menilai efektivitas program literasi, serta merancang

strategi peningkatan literasi yang berbasis bukti. Kegunaan IPLM meliputi fungsi evaluatif, diagnostik, dan perencanaan, terutama untuk mendukung integrasi literasi dalam agenda pembangunan sumber daya manusia. Rentang persentase IPLM berkisar dari 0% hingga 100%, dengan interpretasi bahwa semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi literasi masyarakat di wilayah tersebut dalam hal kecakapan literasi, akses, serta keberdayaan ekosistem literasi. Berikut data mengenai IPLM tersaji dalam grafik di bawah ini:

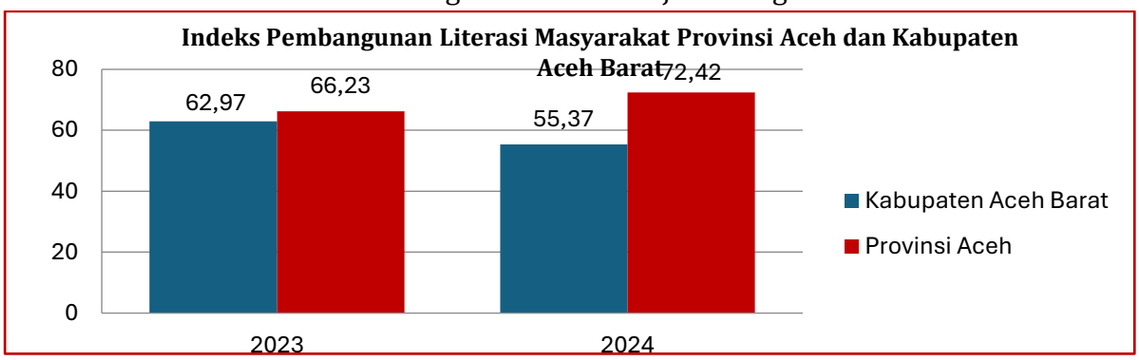

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.28
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2023 dan 2024, terdapat dinamika yang kontras antara Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh secara keseluruhan. Pada tingkat kabupaten, IPLM menunjukkan penurunan signifikan dari 62,97 pada tahun 2023 menjadi 55,37 pada tahun 2024, yang mengindikasikan kemunduran dalam kapasitas literasi masyarakat, baik dari sisi kecakapan individu maupun dari akses terhadap sumber-sumber literasi. Sebaliknya, di tingkat provinsi, terjadi peningkatan indeks dari 66,23 menjadi 72,42 pada periode yang sama, menandakan perbaikan kualitas ekosistem literasi di sebagian besar wilayah Aceh. Fenomena ini mencerminkan adanya disparitas intra-provinsi, di mana sebagian kabupaten, termasuk Aceh Barat, mengalami tantangan struktural seperti keterbatasan fasilitas literasi, rendahnya partisipasi program literasi, atau lemahnya dukungan kebijakan lokal. Secara sistematis, kondisi ini menuntut adanya pendekatan intervensi yang lebih terfokus dan berbasis pada diagnosis kebutuhan spesifik di tingkat kabupaten untuk memastikan pembangunan literasi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

3.5. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat kecakapan individu atau kelompok dalam memahami, mengakses, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara kritis dan etis. Literasi digital tidak sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat elektronik, tetapi mencakup keterampilan berpikir kritis terhadap informasi digital, komunikasi melalui platform daring, pemahaman terhadap keamanan siber, serta partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Indeks ini umumnya disusun berdasarkan dimensi seperti keterampilan teknis, pemahaman informasi digital, etika digital, dan kecakapan dalam menggunakan teknologi untuk belajar atau bekerja. Dalam konteks pembangunan manusia, indeks literasi digital menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan sumber daya manusia menghadapi era transformasi digital.

Secara sistematis, penguatan indeks literasi digital memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Masyarakat dengan literasi

digital tinggi cenderung lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, lebih terlindungi dari disinformasi, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk produktivitas dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, literasi digital memungkinkan siswa dan guru memanfaatkan sumber belajar terbuka, platform pembelajaran daring, dan teknologi pembelajaran interaktif. Sementara dalam konteks ekonomi, masyarakat yang melek digital mampu memanfaatkan e-commerce, platform kerja digital, dan inovasi teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, peningkatan indeks literasi digital perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses informasi seperti Aceh Barat.

3.6. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat diartikan sebagai persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Secara keseluruhan, nilai APK Kabupaten Aceh Barat mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Sebagai contoh nilai APK untuk jenjang pendidikan SD tahun 2019 yaitu 108,28% dan meningkat menjadi 108,84 pada tahun 2023. Pada Jenjang SLTP nilai APK mengalami penurunan dari tahun 2020-2021 dan kembali meningkat di tahun 2022-2023. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Barat

APK	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	Persen	108.28	106.43	105.31	105.31	108.84
SLTP	Persen	92.46	109.21	88.17	92.18	95.04
SLTA	Persen	81.21	82.9	86.48	86.48	87.4
PT	Persen	-	32.82	29.43	29.43	46.93

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

3.7. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Tingginya persentase APS suatu wilayah menandakan semakin banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah di wilayah tersebut. APS Kabupaten Aceh Barat menunjukkan persentase yang mendekati angka 100% untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 hingga 2023. Untuk jenjang pendidikan SMA (Usia 16-18 tahun), APS-nya belum mencapai angka 90% dari tahun 2019-2023, namun trennya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rendahnya APS dengan semakin tinggi jenjang pendidikannya disebabkan oleh faktor ekonomi dan aksesibilitas terutama di daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau. Secara rinci Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Usia 7-12 Tahun	persen	99.41	97.34	99.25	99.25	99.55
Usia 13-15 Tahun	persen	97.89	98.84	98.26	98.26	98.35
Usia 16-18 Tahun	persen	84.56	81.65	87.87	87.87	87.96
Usia 19-24 Tahun	persen	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

3.8. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator kedua terkait pendidikan yang menggambarkan tentang proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Selama periode 2019-2023, APM Kabupaten Aceh Barat cenderung mengalami fluktuatif baik pada jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA/SMK. Berfluktuasinya APS di Aceh Barat dari tahun 2019-2023 dapat disebabkan oleh faktor perubahan ekonomi dan faktor kesehatan yang disebabkan oleh pandemik Covid-19. Kondisi APM selengkapnya di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.41 berikut ini.

Tabel 2.41 Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

APM	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	Persen	99.58	99.59	99.56	99.52	99.47
SLTP	Persen	87.96	89.01	88.17	87.4	79.58
SLTA	Persen	71.15	71.08	71.89	71.15	60.61
PT	Persen	-	-	24.38	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat

3.9. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan memperlihatkan indikator Pendidikan Kesetaraan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan layanan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Aceh Barat sebagian besar berumur diatas 21 tahun sedangkan dalam perhitungan pelayanan pendidikan kesetaraan dihitung peserta didik yang dilayani hanya sampai usia 7-18 tahun.

Tabel 2.42 Hasil Capaian SPM di Bidang Pendidikan

No	Indikator	Sasaran Program	Capaian	Capaian (%)
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	5576	5397	96.79 %
2	Pendidikan Dasar	15544	14520	93.41 %
2	Pendidikan Kesetaraan	2454	2058	83.86 %

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

3.10. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menggambarkan persentase atau jumlah individu yang meninggalkan pendidikan formal sebelum menyelesaikan tingkat pendidikan yang diharapkan, Kabupaten Aceh Barat memiliki nilai persentase angka putus sekolah tingkat SD dan SMP yang cenderung menurun dari tahun 2019–2023. Hal ini mengindikasikan adanya perkembangan positif bagi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Secara rinci Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.43 di bawah ini.

Tabel 2.43 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Angka Putus Sekolah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,03	0,02	0,01	0	0
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,22	0,15	0,08	0,01	0
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat

3.11. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah merupakan persentase atau jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu, seperti lulus dari sekolah dasar, sekolah menengah, ataupun perguruan tinggi. Angka kelulusan tersebut menjadi indikator penting dalam sistem pendidikan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan program pendidikan. Tingkat pendidikan SD, SMP, maupun SMA di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan nilai angka kelulusan sekolah yang hampir sempurna.

Pada tahun 2019 sampai 2023, angka kelulusan masing-masing tingkat pendidikan mendekati 100%. Secara rinci Angka Kelulusan di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.44 di bawah ini.

Tabel 2.44 Angka Kelulusan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Angka Kelulusan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	99,33	99,50	99,75	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat

3.12. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan yaitu nilai murid yang melanjutkan sekolah dari jenjang sebelumnya, nilai angka melanjutkan di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2019–2023 memiliki nilai yang baik di atas 99%, Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh murid melanjutkan sekolah hingga jenjang selanjutnya. Berikut nilai Angka Melanjutkan di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.45 di bawah ini.

Tabel 2.45 Angka Melanjutkan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019–2023

Angka Melanjutkan (AM)	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	106,32	106,86	107,19	107,49	108.11*
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99,90	99,90	99,92	99,92	99.93*

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2019-2022*

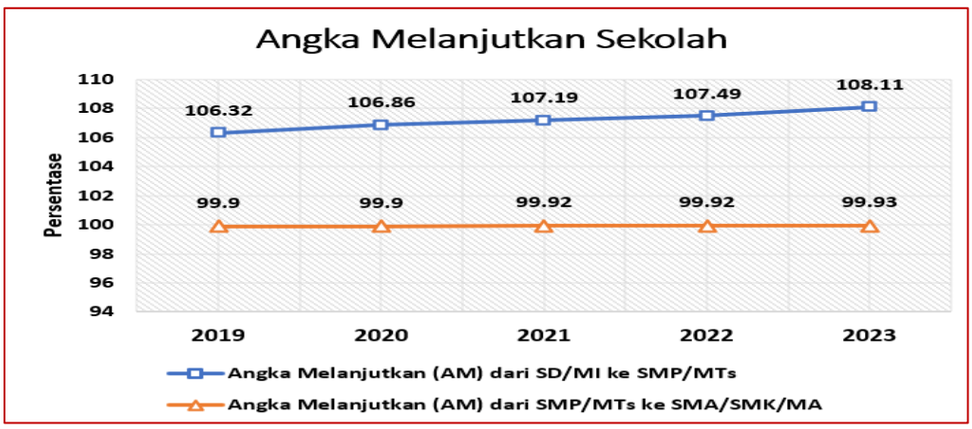

Gambar 2.29
Grafik Angka Melanjutkan Sekolah di Aceh Barat

3.13 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan sangat penting untuk memaksimalkan pembelajaran dan kenyamanan belajar. Fasilitas pendidikan merujuk pada infrastruktur fisik dan sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran di berbagai lembaga pendidikan. Selain itu, indikator rasio jumlah murid dan sekolah merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan dalam hal fasilitas pendidikan. Rasio jumlah murid dan sekolah menggambarkan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Beberapa indikator fasilitas pendidikan belum tersedia datanya hingga tahun 2023, maka besarnya angka capaian tahun 2023 diprediksi dengan analisis data proyeksi tahun 2018-2022. Data mengenai fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46 Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2023

Fasilitas Pendidikan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	77,89	79,15	81,93	84,80	86.61*
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	90,43	92,42	94,31	96,20	99.29*
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	81,37	85,12	90,50	N/A	N/A
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Persen	9	9	9	10	10
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Persen	16	16	15	15	18
Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Persen	3,95	3,96	3,97	3,99	4.00
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	97,49	97,71	98,02	100	100
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki	Persen	100	100	100	100	100
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	98,81	98,96	99,04	100	100
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	71,11	72,65	74,87	77,09	88.31

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

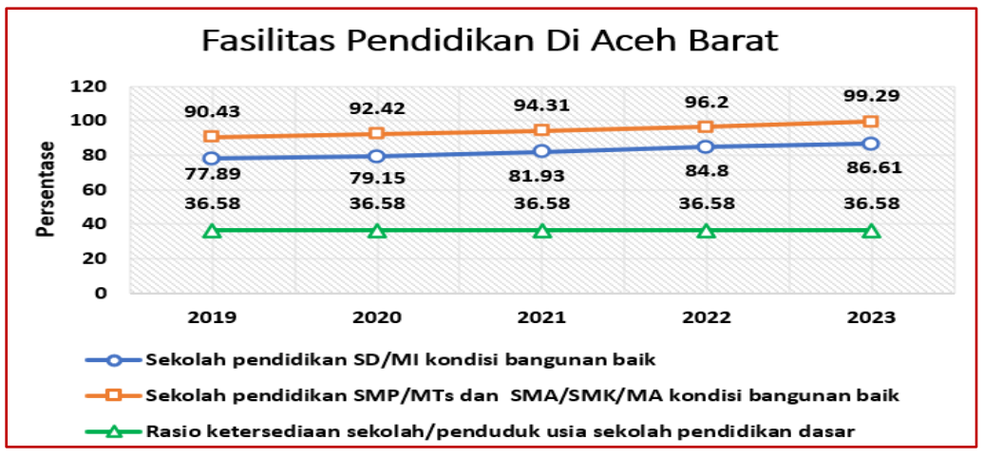

Gambar 2.30
Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat

Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun dari tahun 2019-2023 memiliki nilai yang tinggi yaitu di atas 100%. Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Pada tahun 2019, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) tercatat hanya 71,11 % dan meningkat di tahun 2023 menjadi 88,31%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kabupaten Aceh Barat akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

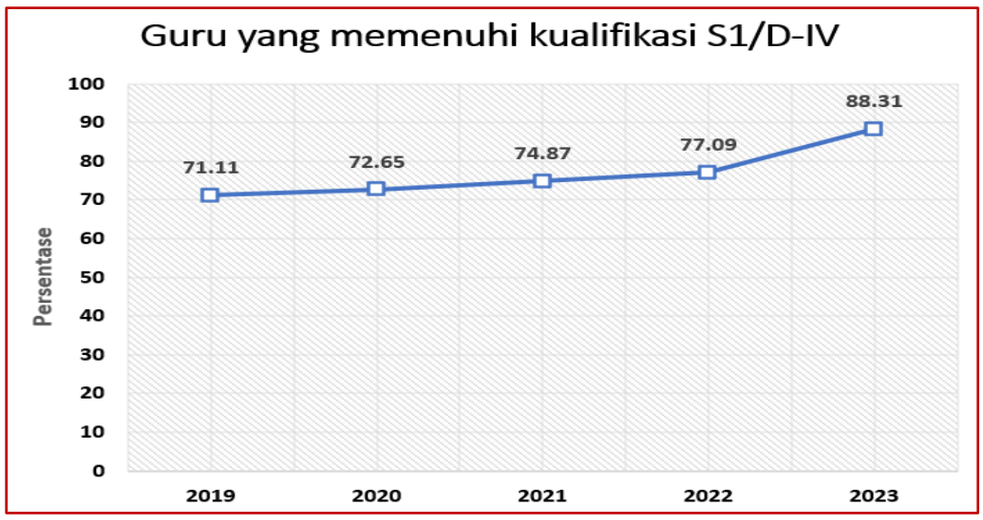

Gambar 2.31
Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1/D4 di Kabupaten Aceh Barat

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam mencerminkan tingkat perlindungan sosial di sektor ketenagakerjaan. Program ini bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan, terutama bagi kelompok pekerja yang aktif secara ekonomi. Partisipasi tenaga kerja dalam skema jaminan sosial juga menunjukkan sejauh mana sistem ketenagakerjaan suatu daerah telah menjangkau baik sektor formal maupun informal. Di tengah dinamika sosial ekonomi dan kerentanan kelompok pekerja tertentu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial agar sejalan dengan prinsip perlindungan dan keadilan sosial. Berikut data mengenai cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024.

Tabel 2.47 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

Jenis Pekerja	Potensi Peserta	Peserta Aktif	Persentase Peserta Aktif (%)
Penerima Upah	32.490	21.431	66%
Bukan Penerima Upah	32.584	3.033	9%
Total	**65.074**	**24.464**	**38%**

Berdasarkan data yang tersedia, dari total potensi peserta sebanyak **65.074 orang**, tercatat **24.464 pekerja aktif** yang telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2024, atau setara dengan **38%** dari total potensi. Jika dilihat secara rinci, kelompok **penerima upah** yang mencakup tenaga kerja formal seperti pegawai swasta, ASN, dan karyawan tetap memiliki cakupan kepesertaan yang jauh lebih tinggi, yaitu mencapai **66%** (21.431 dari 32.490 orang). Sementara itu, kelompok **bukan penerima upah**, yang mencakup **pekerja rentan** seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja informal lainnya, hanya memiliki tingkat kepesertaan sebesar **9%** (3.033 dari 32.584 orang). Kesenjangan ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran atau akses pekerja di sektor informal terhadap program jaminan sosial, padahal mereka justru merupakan kelompok yang paling rentan terhadap risiko kerja dan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya edukasi, subsidi iuran, serta integrasi perlindungan sosial ke dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi strategi penting untuk memperluas cakupan jaminan sosial tenaga kerja di daerah.

4.2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang memberikan kerangka hukum dan pedoman operasional untuk pelaksanaannya. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diakses oleh mereka yang berhak, melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan sosial tunai lainnya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.05/2012 Bantuan sosial didefinisikan sebagai transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin dan rentan untuk melindungi mereka dari kemungkinan risiko sosial dan ekonomi. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran bantuan sosial, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

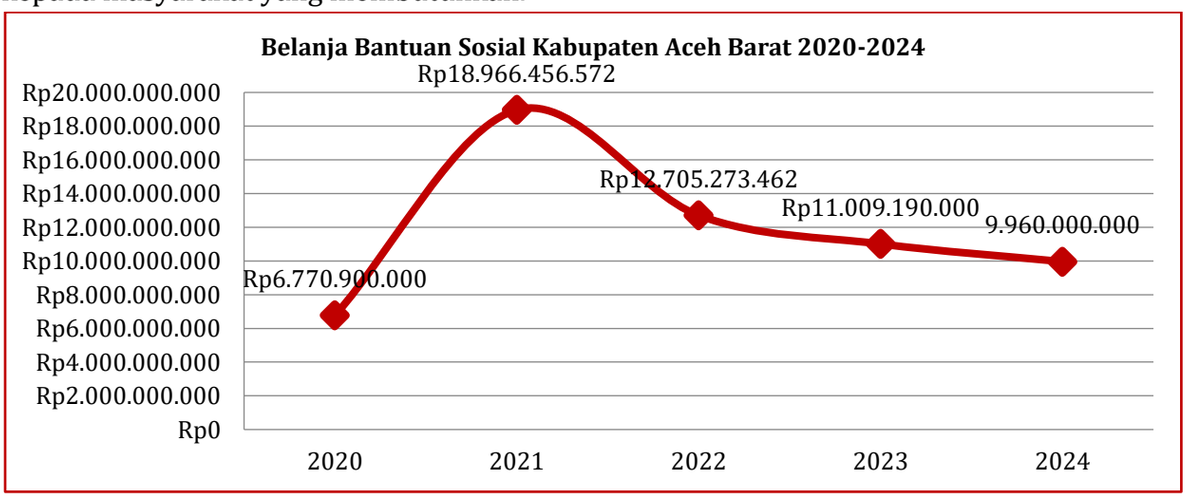

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.32
Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020-2024 di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial Kabupaten Aceh Barat untuk periode 2020-2024 mengalami tren fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, belanja bantuan sosial tercatat sebesar Rp6.770.900.000. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2021, di mana belanja bantuan sosial melonjak hingga mencapai Rp18.966.456.572. Peningkatan ini disebabkan oleh kebutuhan mendesak akibat pandemi COVID-19, di mana banyak daerah, termasuk Kabupaten Aceh Barat, meningkatkan alokasi dana bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Namun, pada tahun 2022, jumlah belanja kembali turun menjadi Rp12.705.273.462, dan melanjutkan tren penurunan hingga mencapai Rp 9.960.000.000 pada tahun 2024. Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 sampai 2024 bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya tekanan pandemi sehingga kebutuhan akan bantuan sosial menurun. Selain itu, pengurangan ini juga mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi secara umum, sehingga kebutuhan untuk bantuan sosial berkurang.

4.3. Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. PMKS mencakup berbagai kategori seperti fakir miskin, anak yatim piatu, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, serta kelompok rentan sosial lainnya. Dalam konteks pembangunan sosial yang adaptif, keberadaan PMKS menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dan efektivitas intervensi pemerintah dalam melindungi kelompok rentan dari risiko sosial dan ekonomi.

Upaya perlindungan sosial yang adaptif menuntut kemampuan pemerintah daerah untuk merespons perubahan sosial secara dinamis, terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan keterlantaran. Pendekatan ini tidak hanya bersifat kuratif melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga preventif dan promotif dengan mendorong kemandirian sosial melalui berbagai program pemberdayaan. Oleh karena itu, analisis terhadap data PMKS menjadi landasan penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Aceh Barat, berikut disajikan data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024, yang menggambarkan kondisi terkini kelompok masyarakat rentan di setiap kecamatan.

Tabel 2.48 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kecamatan	Fakir-miskin (Poor)	Yatim Piatu *(Orphaned)*	Lanjut Usia *(Old)*	Gelandangan *(Homeless)*	Jumlah
Johan Pahlawan	20,785	691	43	0	21,519
Samatiga	8,473	160	5	0	8,638
Bubon	5,211	62	7	0	5,280
Arongan Lambalek	9,210	167	7	0	9,384
Woyla	10,447	139	8	0	10,594
Woyla Barat	5,904	83	5	0	5,592
Woyla Timur	4,105	40	6	0	4,151
Kaway XVI	14,760	129	25	0	14,914
Meureubo	14,992	299	24	0	15,315
Pante Ceureumen	9,098	92	7	0	9,197
Panton Reu	5,486	66	8	0	5,560
Sungai Mas	2,790	67	6	0	2,863
Jumlah	111,261	1,995	151	4	113,407

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Secara umum, data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 mencapai 113.407 jiwa, dengan kelompok fakir miskin menjadi kategori dominan sebanyak 111.261 jiwa atau sekitar 98,1 persen dari total PMKS. Kecamatan dengan jumlah PMKS tertinggi adalah Johan Pahlawan (21.519 jiwa) dan Meureubo (15.315 jiwa), yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang beragam. Sebaliknya, Sungai Mas mencatat jumlah PMKS terendah yaitu 2.863 jiwa, mencerminkan perbedaan karakteristik sosial ekonomi antar wilayah di Aceh Barat.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan sosial di Aceh Barat masih didominasi oleh aspek kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Meskipun jumlah gelandangan relatif kecil, keberadaan kelompok rentan seperti lanjut usia dan anak yatim piatu tetap memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, strategi perlindungan sosial yang adaptif perlu difokuskan pada penguatan program rehabilitasi sosial, pemberdayaan keluarga miskin, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat dari berbagai latar belakang agama mampu hidup berdampingan secara damai, toleran, dan saling menghormati. IKUB disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi antar umat beragama, kesetaraan hak dalam menjalankan ibadah dan keyakinan, serta kerja sama antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pemerintahan dan pembangunan, IKUB memiliki peran strategis sebagai prasyarat bagi stabilitas sosial dan integrasi nasional, terutama di daerah yang memiliki dinamika keberagaman keagamaan yang tinggi.

Di Aceh Barat, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, dinamika kehidupan keberagamaan tetap membutuhkan perhatian khusus mengingat daerah ini memiliki sejarah panjang terkait nilai-nilai syariat Islam yang khas dan penerapannya dalam kehidupan publik. Kerukunan umat beragama menjadi sangat penting dalam menciptakan suasana yang inklusif dan harmonis, terlebih dalam menghadapi tantangan globalisasi dan arus informasi yang dapat memicu konflik identitas. Oleh karena itu, penguatan IKUB di Aceh Barat perlu dilakukan melalui pendekatan kultural dan edukatif, seperti penguatan peran tokoh agama dalam membina toleransi, peningkatan literasi keagamaan lintas iman, serta pengembangan forum komunikasi antar umat beragama sebagai ruang dialog konstruktif.

5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah ukuran yang dikembangkan untuk menilai kemajuan pembangunan suatu daerah dalam bidang kebudayaan secara komprehensif dan terstruktur. IPK mengacu pada enam dimensi utama, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, serta ekosistem budaya. Tujuan utama dari IPK adalah untuk memastikan bahwa pembangunan budaya tidak terpinggirkan dalam arus pembangunan fisik dan ekonomi, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Kebudayaan dalam konteks ini dipahami tidak hanya sebagai warisan tradisional, tetapi juga sebagai potensi daya saing bangsa di era globalisasi dan digitalisasi.

Pentingnya IPK terletak pada kemampuannya dalam menunjukkan ketahanan identitas lokal, penguatan karakter masyarakat, serta mendorong inovasi berbasis nilai-nilai budaya. Dalam konteks sistemik, budaya yang kuat akan memperkuat kohesi sosial, menumbuhkan kreativitas masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan yang menghargai nilai-nilai lokal. IPK menjadi alat penting dalam menyusun kebijakan kebudayaan yang berbasis data, serta dalam mengevaluasi capaian pembangunan budaya di daerah. Pembangunan kebudayaan yang berbasis indeks ini juga dapat mendukung sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pendidikan karakter di tingkat lokal.

Dalam konteks Aceh Barat, peningkatan **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** paling relevan dilakukan melalui program **SEULANGA (Sanggar Seni Lestarikan Adat dan Budaya Aceh)**. Pendirian sanggar seni yang representatif merupakan langkah strategis dalam mengembangkan ekspresi budaya, membina generasi muda dalam seni tradisional, serta menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal. Sanggar seni dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan, pertunjukan, dan interaksi budaya yang hidup, sekaligus memperkuat ekosistem budaya daerah. Dengan fasilitas dan dukungan yang memadai, sanggar seni akan menjadi tempat pengembangan kreativitas masyarakat serta ruang pelestarian budaya yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, sejalan dengan indikator utama dalam IPK seperti ekspresi budaya dan ketahanan sosial budaya.

5.3. Penduduk Menurut Agama Yang Dianut dan Jumlah Tempat Ibadah

Salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah yang inklusif adalah aspek kehidupan beragama, yang tidak hanya mencerminkan keragaman masyarakat tetapi juga menjadi indikator harmoni sosial dan kualitas tata kelola pelayanan publik di bidang keagamaan. Dalam konteks ini, pengukuran kehidupan keagamaan dapat dilakukan melalui dua dimensi utama, yaitu jumlah penduduk menurut agama yang dianut, serta ketersediaan dan sebaran tempat ibadah di suatu wilayah. Melalui data ini pemerintah daerah dapat memahami kebutuhan riil masyarakat lintas agama sekaligus merancang kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pelayanan, penguatan nilai kebhinekaan, dan peningkatan kualitas kehidupan beragama sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya.

Tabel 2.49 Jumlah Penduduk dan Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Budha	Masjid	Mushola
Johan Pahlawan	64.847	323	64	641	33	61
Samatiga	16.461	4	-	-	32	19
Bubon	7.092	-	-	-	16	7
Arongan Lambalek	12.452	1	-	-	30	9
Woyla	14.392	4	-	-	32	9
Woyla Barat	8.104	2	-	-	23	3
Woyla Timur	5.470	-	-	-	17	3
Kaway XVI	22.155	6	-	-	44	4
Meureubo	31.876	72	5	31	30	14
Pante Ceureumen	12.095	-	-	-	7	5
Panton Reu	6.961	-	-	-	19	5
Sungai Mas	4.632	-	-	-	10	9
Total	**206.537**	**412**	**69**	**672**	**313**	**188**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2024 didominasi oleh pemeluk agama Islam, dengan jumlah total mencapai 206.537 Jiwa. Kecamatan dengan jumlah pemeluk Islam tertinggi adalah Johan Pahlawan (64.847 jiwa), diikuti oleh Kaway XVI (22.155 jiwa) dan Meureubo (31.876 jiwa). Sementara itu, jumlah pemeluk agama Protestan tercatat sebanyak 412 jiwa, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Johan Pahlawan (323 jiwa) dan Meureubo (72 jiwa). Untuk agama Katolik terdapat 69 jiwa, dengan jumlah tertinggi juga berada di Johan Pahlawan. Agama Budha, meskipun minoritas, memiliki jumlah relatif signifikan di Johan Pahlawan (641 jiwa) dan Meureubo (31 jiwa), dengan total 672 jiwa di seluruh kabupaten.

Dalam hal sarana ibadah, Kabupaten Aceh Barat memiliki 313 masjid dan 188 mushola, menunjukkan perhatian besar terhadap fasilitas ibadah umat Islam yang memang menjadi mayoritas. Jumlah masjid tertinggi terdapat di Kecamatan Kaway XVI (44 masjid), disusul oleh Samatiga (32), dan Woyla (32). Johan Pahlawan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, memiliki jumlah mushola terbanyak yaitu 61 unit, mendukung kebutuhan masyarakat urban yang lebih padat.

Distribusi pemeluk agama non-Islam yang tersebar di beberapa kecamatan, meskipun dalam jumlah kecil, mencerminkan adanya keberagaman dan pluralitas di wilayah ini. Kehadiran pemeluk Protestan, Katolik, dan Budha yang tersebar di beberapa titik juga menunjukkan pentingnya penyediaan sarana ibadah yang inklusif untuk menjamin hak-hak keagamaan seluruh warga. Dalam konteks *beragama maslahat*, data ini menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan toleransi dan kebutuhan lintas agama, termasuk dalam penyusunan kebijakan penyediaan dan pemerataan fasilitas keagamaan.

5.4. Indeks Pembangunan Syariah (IPS)

Indeks Pembangunan Syariah (IPS) adalah alat ukur untuk menilai penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam pembangunan wilayah, khususnya di Provinsi Aceh yang memiliki otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. IPS berfungsi mengevaluasi dampak kebijakan syariat terhadap kesejahteraan masyarakat melalui dimensi-dimensi utama seperti akidah, akhlak, hukum jinayat, zakat, manajemen masjid, melek Al-Quran, dan lembaga keuangan syariah (LKS), menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran holistik. Sebagai alat evaluasi dan perencanaan strategis, IPS membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi syariat serta menentukan prioritas pembangunan, sambil memastikan nilai-nilai Islam terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, IPS berfungsi sebagai media edukasi dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan berbasis syariat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan syariat Islam yang inklusif dan adaptif, dengan Aceh diharapkan menjadi model integrasi syariat dalam pembangunan daerah. Berikut data mengenai IPS di Kabupaten Aceh Barat:

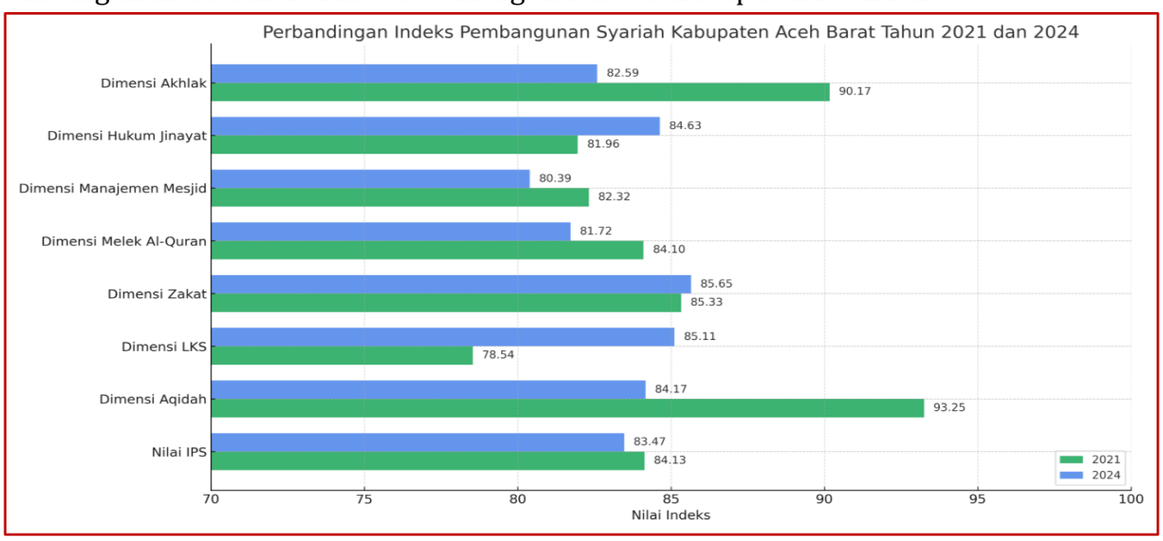

Sumber: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Gambar 2.33
Indeks Pembangunan Syariah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 dan 2024

Berdasarkan data perbandingan Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Kabupaten Aceh Barat antara tahun 2021 dan 2024, terlihat adanya dinamika pada beberapa dimensi utama yang menjadi komponen penyusun IPS. Secara umum, nilai IPS mengalami sedikit penurunan dari 84,13 pada tahun 2021 menjadi 83,47 pada tahun 2024, yang mencerminkan stagnasi dalam capaian pembangunan berbasis syariah di daerah ini. Penurunan signifikan terlihat pada dimensi Aqidah, dari 93,25 menjadi 84,17**,** serta pada dimensi Akhlak, dari 90,17 menjadi 82,59**,** yang menunjukkan penurunan kualitas dalam aspek nilai-nilai dasar keislaman yang menjadi fondasi masyarakat. Sementara itu, dimensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menunjukkan peningkatan dari 78,54 menjadi 85,11, mengindikasikan adanya kemajuan dalam ekosistem ekonomi syariah di tingkat lokal. Peningkatan juga terjadi pada dimensi Hukum Jinayat dan dimensi Zakat**,** meskipun bersifat moderat. Namun demikian, dimensi Melek Al-Qur'an dan Manajemen Masjid mengalami penurunan, yang dapat menjadi perhatian dalam penguatan program literasi keagamaan dan kelembagaan masjid di tingkat masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan di beberapa aspek, hasil ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan konsolidasi lintas sektor untuk mengembalikan tren positif capaian IPS agar selaras dengan visi pembangunan daerah berbasis syariah.

5.5. Pelanggaran Syariat Islam

Syariat Islam merupakan landasan hukum yang dijalankan di Provinsi Aceh sebagai bentuk kekhususan daerah dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Penegakan syariat ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk akidah, ibadah, akhlak, serta interaksi antarindividu dalam masyarakat. Di Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaan Syariat Islam diawasi secara intensif oleh instansi terkait guna menjaga ketertiban umum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan syariat ini adalah jumlah pelanggaran yang tercatat setiap tahunnya, yang mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan keagamaan yang berlaku.

Tabel 2.50 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Syair/Busana (Qanun No 11)	Minuman Keras (Qanun No 12)	Judi/Maisir (Qanun No 13)	Khalwat/Mesum (Qanun No 14)	Jumlah Total
2020	406	-	-	49	456
2021	270	-	-	29	299
2022	184	-	-	20	204
2023	634	-	-	48	682
2024	662	16	-	76	754
Total	**2.156**	**16**	**0**	**222**	**2.394**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Berdasarkan data pelanggaran Syariat Islam di Aceh Barat dari tahun 2020 hingga 2024, tercatat adanya fluktuasi jumlah pelanggaran yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 456 kasus pelanggaran, yang kemudian menurun drastis pada tahun 2021 menjadi 299 kasus, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 dengan 204 kasus. Namun, tren ini berubah pada tahun 2023, di mana terjadi lonjakan tajam menjadi 682 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2024 dengan jumlah 754 kasus. Jenis pelanggaran yang paling sering terjadi mencakup khamar (minuman keras), maisir (perjudian), khalwat (berdua-duaan yang bukan mahram), ikhtilat (bercampur-baur tanpa batasan syar'i), pelecehan seksual, serta pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah. Lonjakan pelanggaran pada tahun-tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam

pengawasan dan pembinaan masyarakat, serta pentingnya penguatan peran institusi syariat dalam memberikan edukasi dan tindakan preventif secara lebih masif dan sistematis.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

6.1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran penting yang mencerminkan sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. IPA mencakup berbagai indikator yang menggambarkan efektivitas kebijakan, program, serta kapasitas kelembagaan dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Indeks ini menjadi salah satu alat ukur penting dalam upaya pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, khususnya dalam dimensi perlindungan yang sering kali menjadi aspek paling rawan dalam pembangunan sosial. Pemerintah daerah dapat menggunakan IPA sebagai dasar untuk mengidentifikasi kekurangan dan merancang intervensi yang lebih responsif terhadap kerentanan anak. Berikut perkembangan data mengenai Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Barat:

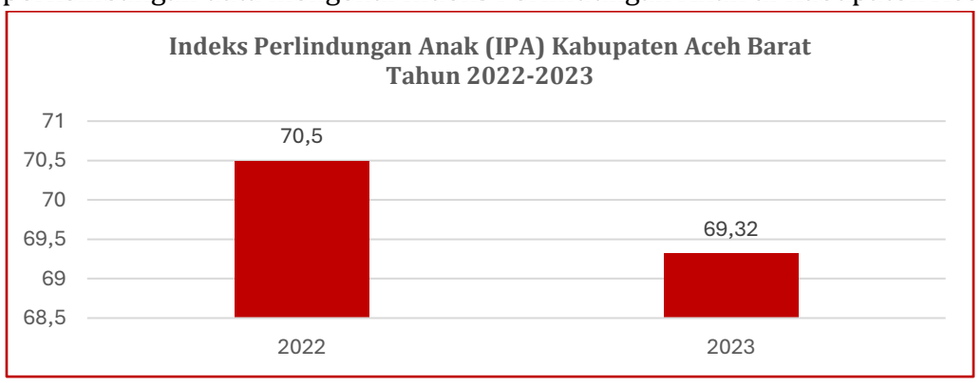

Gambar 2.34
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Aceh Barat (2022-2023)

Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2023, nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan dari 70,50 pada tahun 2022 menjadi 69,32 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya sedikit kemunduran dalam upaya perlindungan anak secara menyeluruh di wilayah tersebut. Meskipun angka penurunannya tidak terlalu besar, yakni sekitar 1,18 poin, hal ini tetap perlu menjadi perhatian serius, terutama bila dikaitkan dengan potensi risiko sosial yang dihadapi anak-anak, seperti kekerasan domestik, perundungan, dan eksploitasi ekonomi. Indeks yang menurun dapat mengindikasikan lemahnya pelaksanaan kebijakan atau berkurangnya efektivitas program yang sudah berjalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap peran lembaga perlindungan anak, efektivitas program intervensi, serta alokasi anggaran yang diarahkan pada upaya perlindungan. Dukungan lintas sektor, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan, juga harus diperkuat agar perlindungan anak dapat dijamin secara sistematis dan berkelanjutan.

6.2. Indeks Pemenuhan Hak Anak

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana hak-hak dasar anak dipenuhi oleh negara dan pemerintah daerah, meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, partisipasi, dan kesejahteraan secara umum. IPHA berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai efektivitas pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta implementasi kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada anak. Pemenuhan hak-hak anak bukan hanya mencerminkan

komitmen negara dalam memberikan layanan dasar, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemantauan dan peningkatan IPHA secara berkala menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan inklusif dan berkeadilan. Berikut disajikan data mengenai Indeks Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Aceh Barat:

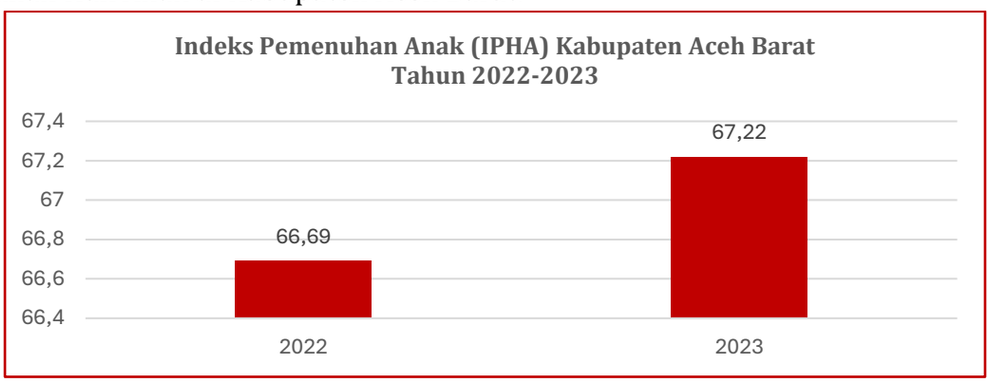

Gambar 2.35
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kabupaten Aceh Barat (2022-2023)

Data Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan tren yang positif pada periode 2022–2023. Nilai IPHA meningkat dari 66,69 pada tahun 2022 menjadi 67,22 pada tahun 2023, mencerminkan adanya perbaikan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, meskipun peningkatannya masih relatif kecil (0,53 poin). Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan perbaikan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pencatatan sipil bagi anak-anak. Meski demikian, angka IPHA yang masih berada di bawah 70 menunjukkan bahwa terdapat ruang besar untuk perbaikan. Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menjangkau kelompok anak-anak rentan, termasuk anak dari keluarga miskin, anak disabilitas, serta anak-anak di wilayah terpencil. Selain itu, kualitas layanan publik yang ramah anak juga perlu terus ditingkatkan, termasuk kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Dengan intervensi yang tepat dan komitmen berkelanjutan, IPHA di Aceh Barat berpotensi mengalami peningkatan yang lebih signifikan di masa mendatang.

6.3. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah indikator komposit yang dirancang untuk mengukur dan menggambarkan kondisi serta capaian pembangunan keluarga dalam berbagai aspek penting yang memengaruhi ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indeks ini umumnya disusun berdasarkan sejumlah dimensi utama, seperti kesehatan keluarga, pendidikan anggota keluarga, ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, partisipasi sosial, serta keutuhan dan ketahanan keluarga. Tujuan utama IPKK adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana keluarga telah berkembang secara menyeluruh sebagai unit sosial terkecil yang menjadi dasar pembangunan nasional.

Pentingnya IPKK terletak pada perannya dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis keluarga yang holistik dan berkelanjutan. Pembangunan kualitas keluarga tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup individu, tetapi juga berkaitan erat dengan isu-isu struktural seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan anak, hingga kesiapan generasi muda dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, IPKK menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam merancang intervensi sosial, perlindungan keluarga, serta penguatan nilai-nilai budaya dan moral dalam keluarga.

Di Aceh Barat, tantangan dalam pembangunan kualitas keluarga masih cukup kompleks, terutama terkait dengan tingginya angka kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta masih adanya pernikahan usia dini dan ketimpangan peran gender dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan kualitas keluarga di Aceh Barat perlu diarahkan melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, dengan memperkuat peran BKKBN, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan lembaga adat dalam membina keluarga yang sehat, produktif, dan berdaya.

6.4. Pengarusutamaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index atau GDI)* adalah alat yang mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. GDI membandingkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (HDI) antara laki-laki dan perempuan, menggunakan indikator seperti harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah, serta Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita. Kesetaraan di setiap dimensi ini menunjukkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya ekonomi. Nilai GDI berada dalam rentang 0 hingga 100, dengan 100 sebagai standar sempurna untuk kesetaraan gender. Semakin dekat nilai IPG dengan 100, semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, semakin jauh nilai IPG dari 100, semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Perkembangan Indeks pembangunan gender untuk Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional dalam lima tahun terakhir tersaji dalam gambar di bawah ini:

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

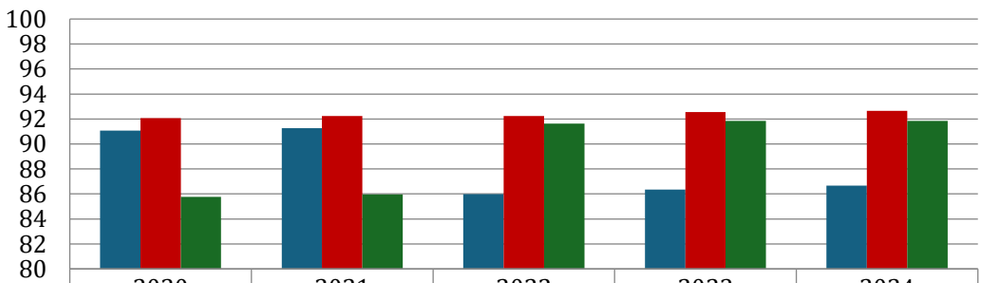

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Aceh Barat	91,06	91,27	85,98	86,36	86,67
Provinsi Aceh	92,07	92,23	92,24	92,55	92,64
Nasional	85,76	85,97	91,63	91,85	91,85

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.36
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa Perkembangan Indeks Pembangunan Gender baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional mengalami tren peningkatan di setiap tahunnya. Nilai yang di capai pada tahun 2024 untuk Kabupaten Aceh Barat sebesar 86.67, Provinsi Aceh sebesar 92.64 dan Nasional 91.85. Menurut Kemen PPPA (2020), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah jika nilai IPG kurang dari 90,00 dan kategori tinggi jika nilai IPG lebih besar sama dengan 90,00. Untuk itu, Provinsi Aceh dan Nasional masuk ke dalam kategori tinggi, artinya adanya kesetaraan gender yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan antara

laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Aceh Barat, Nilai pembangunan gender mengalami tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Di mana pada tahun 2019 nilai GDI mencapai 91.07 namun di tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 85.98 dan di tahun 2023 dan 2024 meningkat sedikit menjadi 86.36 dan 86.67. Hal ini disebabkan oleh disebabkan oleh akses pendidikan yang bervariasi terutama di daerah terpencil, ketersediaan layanan kesehatan yang tidak merata, dampak dari bencana alam yang sering terjadi, implementasi kebijakan gender yang tidak konsisten, dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi peran perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender *(Gender Empowerment Measure* atau GEM) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemberdayaan gender dalam suatu masyarakat atau negara. GEM mengukur tiga aspek utama dari pemberdayaan gender, yaitu partisipasi politik dan ekonomi perempuan dalam pengambilan keputusan, akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi, serta peran dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan data mengenai partisipasi perempuan dalam politik dan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan formal, serta peran tradisional perempuan dalam rumah tangga, GEM memberikan gambaran yang holistik tentang sejauh mana perempuan diberdayakan dalam suatu masyarakat atau negara. Penilaian GEM menjadi penting dalam menilai kemajuan dan kesetaraan gender serta merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index* atau GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender *(Gender Empowerment Measure* atau GEM) adalah dua alat pengukuran yang berbeda namun saling terkait dalam konteks kesetaraan gender. GDI mengukur kesetaraan gender dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Di sisi lain, GEM lebih fokus pada pemberdayaan perempuan dalam aspek politik dan ekonomi, seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan politik, partisipasi dalam kegiatan ekonomi formal, dan peran dalam rumah tangga. Perbedaan utama antara keduanya adalah fokus GDI pada aspek pembangunan manusia secara keseluruhan, sementara GEM menyoroti aspek pemberdayaan gender yang lebih spesifik. Meskipun berbeda dalam fokusnya, kedua indeks ini penting untuk mengevaluasi kemajuan kesetaraan gender dan merancang kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan nilai indeks pemberdayaan gender Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional selama lima tahun terakhir tersaji dalam gambar di bawah ini:

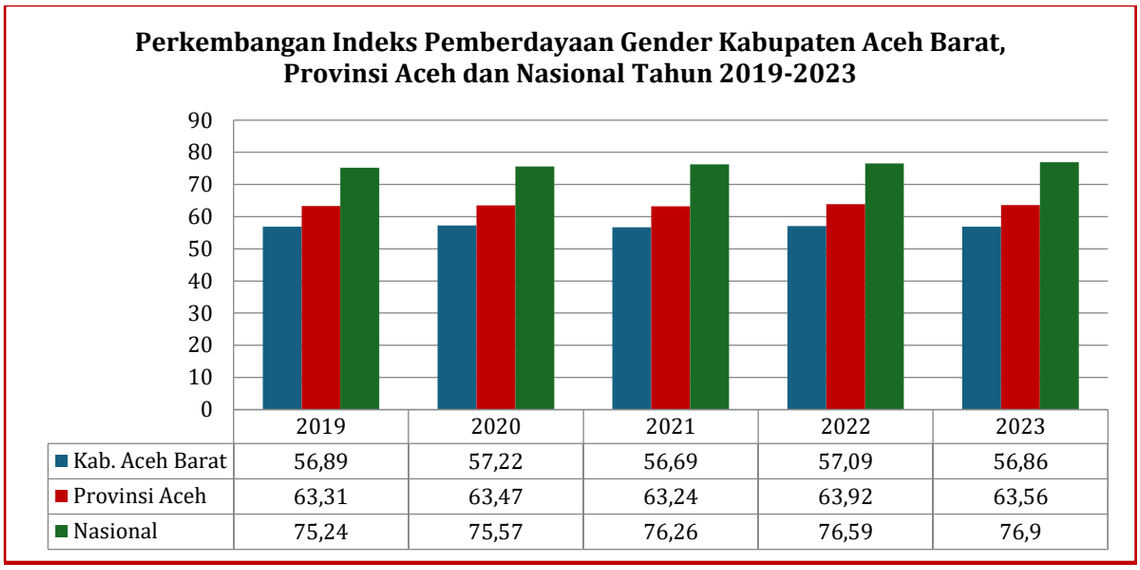

	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Aceh Barat	56,89	57,22	56,69	57,09	56,86
Provinsi Aceh	63,31	63,47	63,24	63,92	63,56
Nasional	75,24	75,57	76,26	76,59	76,9

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

Gambar 2.37
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan nilai indeks pemberdayaan gender di tingkat Nasional mengalami tren peningkatan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh, nilai indeks pemberdayaan gender mengalami tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 nilai indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Aceh Barat sebesar 56.89, namun di tahun 2023 menurun menjadi 56.86. Hal serupa juga dialami oleh Provinsi Aceh, di mana pada tahun 2022 nilai pemberdayaan gender sudah mencapai 63.92 dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 63.56.

Tren fluktuatif dalam nilai indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perubahan kondisi ekonomi lokal yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan akses terhadap pekerjaan formal. Kedua, adanya ketimpangan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang dapat memengaruhi kemampuan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan politik. Ketiga, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan mengatasi hambatan struktural yang menghambat partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Faktor-faktor ini, bersama dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks di wilayah Aceh, dapat menjadi penyebab fluktuasi dalam nilai indeks pemberdayaan gender selama periode waktu tersebut.

6.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Peran perempuan dilihat dari persentase partisipasi perempuan yang semakin meningkat, yang semula 69,85% pada tahun 2019 menjadi 69,89% pada tahun 2023. Hal ini juga

sejalan dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR yang meningkat dari tahun 2019-2023. Adapun peran sistem dan regulasi pemerintah dalam hal penanganan dan pencegahan terkait perlindungan perempuan dan anak sudah sangat baik berdasarkan kinerja dari tahun 2019–2023 yang mencapai 100%. Informasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.51 di bawah ini.

Tabel 2.51 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	69,85	69,85	69,7	69,5	69.89
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	8,00	12,00	12,00	12,00	12
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	30,15	30,15	30,30	30,50	30.59*
Rasio KDRT	Rasio	0,072	0,031	0,031	0,025	0.14
Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	Persen	2,70	2,65	2,60	2,60	2.54*
Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	16,4	17,3	18,2	19,1	19.1
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100*
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu,	Persen	100	100	100	100	100*
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100*
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100*
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100*
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah SKPK dan Desa yang melaksanakan PPRG	SKPK	369	369	369	369	369*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

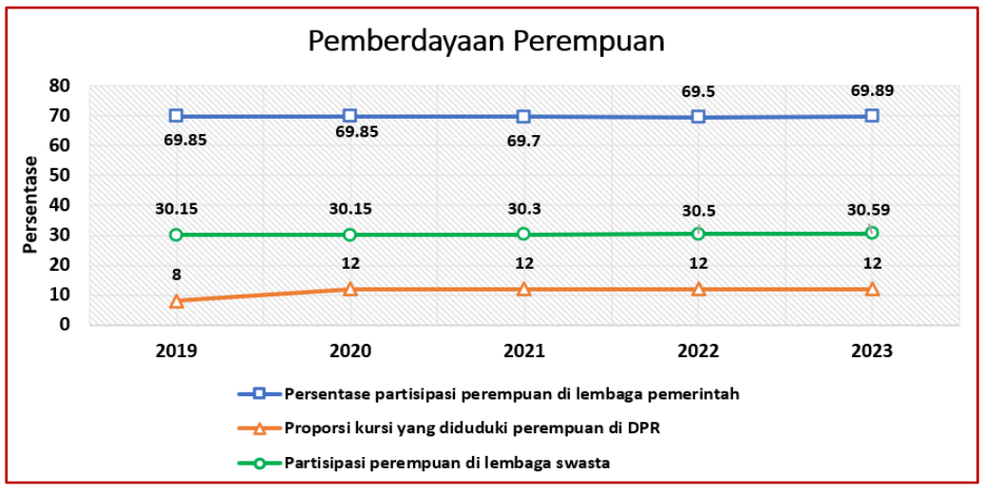

Gambar 2.38
Capaian Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Aceh Barat

6.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) adalah serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mengatur pertumbuhan penduduk dengan cara yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tujuan utama dari pengendalian penduduk dan KB adalah untuk memastikan bahwa jumlah penduduk tidak melebihi kapasitas ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu negara atau wilayah. Dalam hal perencanaan, beberapa indikator yang menggambarkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Barat disajikan pada Tabel 2.52 di bawah ini.

Tabel 2.52 Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,05	2,02	2,02	1,14	1,11
Total Fertility Rate (TFR)	2,87	2,84	2,84	2,77	3.38
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	70,45	70,45	70,45	72,73	75.0
Persentase Perangkat Daerah /(Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	50,00	50,00	50,00	52,23	51.8*
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	2	2
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	13	13	14	15	15.1*
Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	4	4	4	4	4*
Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,14	3,15	3,05	2,97	2.9*
Ratio Akseptor KB	63,00	63,00	63,00	70,40	61.28
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	77,99	81,11	87,11	91,99	93.2*
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	5,95	5,90	5,90	5,80	5.8*
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	17,45	17,40	17,40	17,35	17.3*
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,31	8,43	8,43	8,67	7.5*
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	41,75	43,05	43,05	46,15	46.5*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

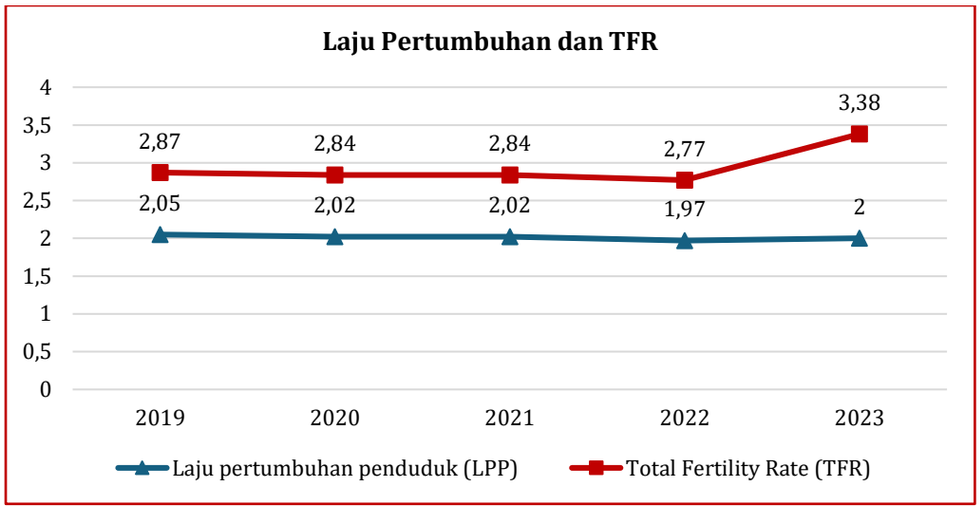

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat

Gambar 2.39
Laju Pertumbuhan dan TFR Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Dari sejumlah indikator yang menggambarkan pengendalian penduduk di Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 2,0%, sementara angka *Total Fertility Rate* (TFR) berada pada level 2,26. Kedua indikator ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara dinamika kelahiran dengan pertambahan jumlah penduduk. TFR sebesar 2,26 berarti rata-rata seorang perempuan usia reproduktif melahirkan sekitar 2–3 anak sepanjang hidupnya. Angka ini masih sedikit lebih tinggi dari tingkat penggantian (replacement level fertility) sesuai dengan target nasional di angka 2,1. Pencapaian tahun 2023 ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan penurunan TFR dalam beberapa tahun terakhir, angka kelahiran yang masih berada sedikit di atas replacement level menjelaskan mengapa laju pertumbuhan penduduk tetap berada di kisaran 2,0%. Jika penurunan TFR berlanjut hingga stabil di atau di bawah 2,1, maka dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk akan melambat menuju titik keseimbangan. Berdasarkan kondisi ini, dilakukan proyeksi TFR Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 hingga tahun 2029 dapat dilihat pada grafik dibawah ini

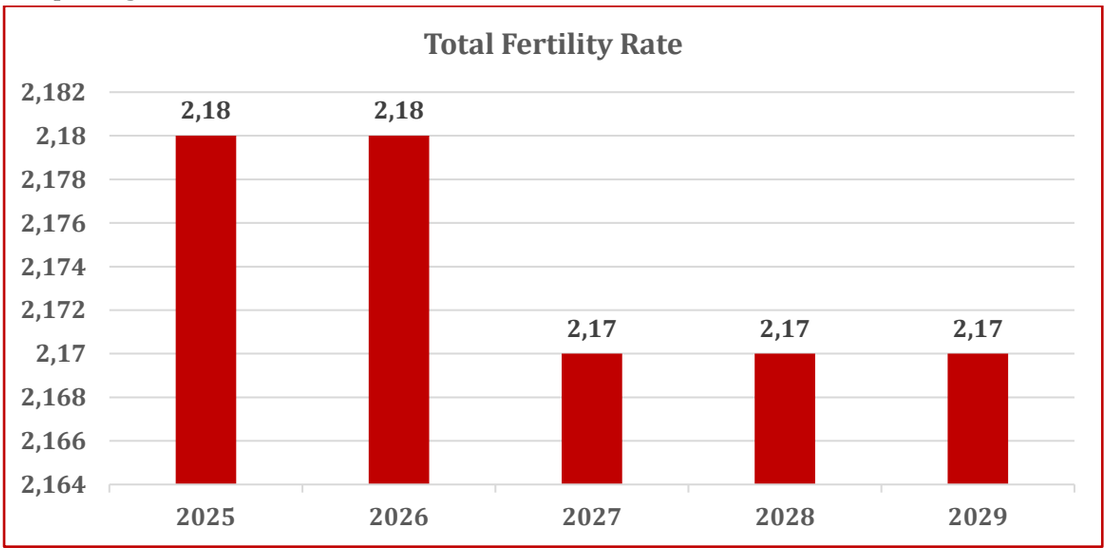

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Gambar 2.40
Proyeksi *Total Fertility Rate* Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan tren data TFR di atas, target untuk tahun 2025 dan 2026 menunjukkan konsistensi pada angka 2,18. Mulai tahun 2027 hingga tahun 2029 pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penurunan TFR sebesar 0,01 poin menjadi 2,17 yang dipertahankan hingga akhir periode perencanaan. Penurunan TFR ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk agar tetap berada dalam kondisi yang terkendali, dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan serta kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.53 Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	100	100	100	100	100*
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	85,25	85,60	85,60	86,00	86.2*
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	97,60	97,60	97,60	97,75	97.8*
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	16,67	16,67	16,67	25,00	23.3*
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/mahasiswa	34,00	36,00	36,00	36,00	37.8*
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	11,11	16,67	16,67	16,67	19.5*
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100	100	100	100	100*
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100*
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100*
Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	63,63	66,07	66,07	69,70	70.2*
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100*
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	71,88	72,93	72,93	73,91	74.4*
Rata-rata usia kawin pertama wanita	26	27	27	27	27.9*
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	11,00	12,00	12,00	14,00	14.5*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

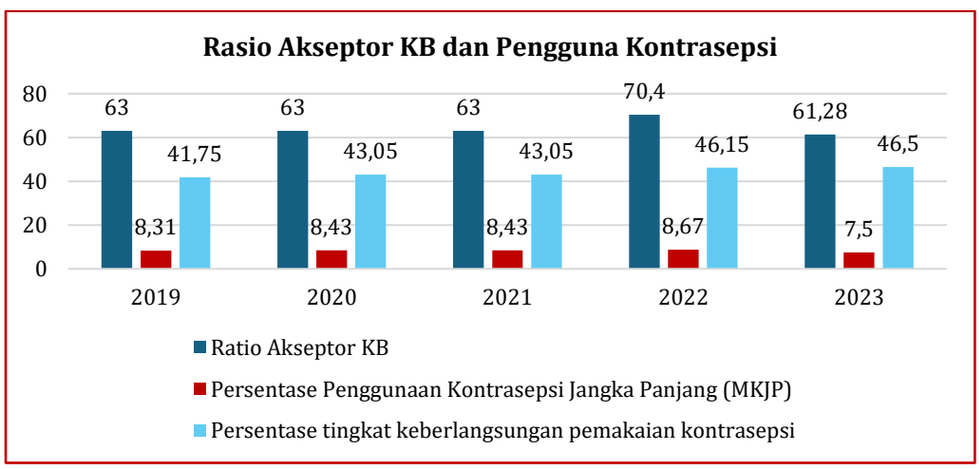

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat

Gambar 2.41
Rasio Akseptor KB dan Penggunaan Kontrasepsi
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

6.7. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang dikembangkan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan pemuda dalam berbagai dimensi kehidupan yang strategis, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesempatan ekonomi, partisipasi dan kepemimpinan, serta akses terhadap teknologi dan informasi. IPP memberikan gambaran sejauh mana negara atau daerah telah menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pemuda untuk berkembang menjadi individu yang produktif, sehat secara fisik dan mental, serta aktif dalam kehidupan sosial dan politik. IPP tidak hanya menjadi indikator statistik, tetapi juga instrumen kebijakan untuk mengarahkan investasi pembangunan yang berorientasi pada generasi muda.

Pembangunan pemuda merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah. Pemuda sebagai kelompok usia produktif memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi, kewirausahaan, dan perubahan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data guna meningkatkan IPP. Ini mencakup akses pendidikan tinggi, peningkatan skill dan literasi digital, penciptaan lapangan kerja yang sesuai, dan pelibatan pemuda dalam perencanaan pembangunan. Peningkatan IPP secara langsung berkorelasi dengan pencapaian bonus demografi dan penguatan ketahanan sosial.

Di Kabupaten Aceh Barat, tantangan pembangunan pemuda masih mencakup minimnya partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan, tingginya pengangguran terbuka pada usia muda, serta terbatasnya akses pemuda terhadap pelatihan, kewirausahaan, dan forum ekspresi aspiratif. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan muda dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan partisipasi pemuda menjadi prioritas yang perlu diintegrasikan dalam berbagai program lintas sektor.

Salah satu program yang sangat relevan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda adalah RAJA DESA (Gerakan Sarjana Membangun Desa). Program ini sejalan dengan dimensi utama IPP, khususnya dalam aspek partisipasi pemuda, pembangunan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya manusia berpendidikan tinggi untuk memajukan desa. Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, RAJA DESA mendorong keterlibatan aktif pemuda, khususnya lulusan sarjana, dalam pengembangan inovasi, kewirausahaan sosial, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas pemuda secara individu, tetapi juga memberikan kontribusi konkret terhadap pembangunan wilayah berbasis potensi lokal, yang sangat dibutuhkan di daerah seperti Aceh Barat.

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Data Saing Sumber Daya Manusia

Aspek daya saing daerah terkait perlunya mengembangkan potensi ekonomi yang berbasis pada kekuatan SDM yang didukung oleh keberadaan infrastruktur dan iklim investasi yang kondisif. Upaya mengembangkan daya saing daerah, Provinsi Aceh telah mengembangkan pemetaan dan analisis daya saing investasi relatif diantara 22 Kabupaten/Kota. Daya saing ekonomi daerah ini menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Daya saing SDM menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor peggerak perekonomian daerah. Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah menjelaskan kondisi fasilitas/ infrastruktur di daerah, baik yang sudah tersedia, maupun yang akan dibangun sesuai pembangunan dengan

nasional/sektoral dokumen lainnya. Daya saing investasi daerah menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

1.1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur hubungan antara jumlah orang yang berada dalam kelompok usia produktif dan kelompok usia tidak produktif. Angka ini berguna dalam konteks perencanaan ekonomi dan sosial karena dapat memberikan gambaran tentang beban yang ditanggung oleh populasi usia produktif dalam mendukung populasi yang tidak produktif. Analisis angka ketergantungan menjadi penting dalam sebuah perencanaan pembangunan ekonomi, terutama ketika menghadapi perubahan demografis seperti peningkatan jumlah penduduk usia lanjut atau penurunan laju kelahiran. Data angka ketergantungan dapat membantu pemerintah dan organisasi lainnya merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan populasi yang berubah. Semakin tinggi angka ketergantungan maka akan semakin tinggi beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif. Data angka ketergantungan Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54 Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah penduduk usia <15 tahun	Jumlah penduduk usia >64 tahun	Jumlah penduduk usia tidak produktif	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun (produktif)	Rasio Ketergantungan
2020	51175	10865	62040	136696	45,39
2021	50936	11368	62304	138275	45,06
2022	50824	11919	62743	140115	44,78
2023	50723	12495	63218	141890	44,55
2024	53342	12713	66055	143165	46,13

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Berdasarkan data pada menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Aceh cenderung menurun, yaitu dari angka 45,39 pada tahun 2020 menjadi 44,55 pada tahun 2023. Namun kondisi tersebut mengaami peningkatan yaitu 46,13 pada tahun 2024. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2024, setiap 100 orang penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) di Kabupaten Aceh Barat menanggung 46 orang penduduk usia non-produktif (berusia di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun).

1.2. Pemuda dan Olahraga

2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas

Berdasarkan Peringkat Daya Saing Investasi Aceh Barat relatif terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 berada pada peringkat 5 dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Namun bila dilihat dari Indeks Daya Saing Investasi sebelumnya, terdapat 3 (tiga) lingkup yang mengalami peningkatan nilai terstandar pada Tahun 2023, antara lain lingkup stabilitas ekonomi makro, kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja, serta kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.55 Peringkat Daya Saing Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
	Sebelum		Menjadi		
Peringkat	5		3		
Nilai Terstandar	0,495		1,147		
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	10	8	Peringkat	12	5
Nilai Terstandar	0,049	0,571	Nilai Terstandar	-0,087	0,979
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	5	2	Peringkat	4	2
Nilai Terstandar	0,796	1,101	Nilai Terstandar	1,224	1,937

Sumber: Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Kondisi Stabilitas Ekonomi Makro Dilihat dari lingkup stabilitas ekonomi makro, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar sebesar 0,049 atau meningkat 0,054 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi meningkatnya indikator realisasi penanaman modal. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah pengendalian Inflasi, jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi stabilitas ekonomi makro Kabupaten Aceh Barat dapat meningkat drastis sampai pada peringkat 8 dengan nilai terstandar 0,571.

Kondisi Pemerintahan dan Institusi Publik Dilihat dari lingkup pemerintahan dan institusi, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 berada pada peringkat 12 dengan nilai terstandar sebesar -0,087 atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya pada peringkat 3 (nilai terstandar 1,060). Indikator yang mempengaruhi adalah tingkat penyelesaian kriminalitas. Jika indikator ini diperbaiki akan diikuti peningkatan peringkat menjadi 5 dengan nilai terstandar sebesar 0,979.

Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Dilihat dari lingkup keuangan, bisnis dan tenaga kerja, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat berada pada urutan ke 5 dengan nilai terstandar sebesar 0,796 atau meningkat 0,202 poin dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan nilai terstandar pada lingkup ini dipengaruhi indikator menurunnya jumlah kredit bermasalah dan tingkat pengangguran. Selain itu, indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah jumlah kredit bermasalah per total pinjaman bank, jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan jumlah penduduk bekerja. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka nilai terstandar lingkup keuangan, bisnis dan tenaga kerja Kabupaten Aceh Barat dapat meningkat menjadi sebesar 1,101.

Kondisi Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Dilihat dari lingkup kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur, peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat berada pada urutan ke 4 dengan nilai terstandar sebesar 1,224 atau meningkat 1,037 dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain infrastruktur fisik (jumlah ketersediaan bandara, jumlah rumah tangga dengan jaringan pipa air, penggunaan sambungan telepon, akses internet di sekolah), dan rasio guru (SMA). Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka kondisi kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur Kabupaten Aceh Barat dapat meningkat menjadi peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,937.

Daya saing ekonomi daerah dalam aspek daya saing daerah mencerminkan kapasitas dan potensi daerah tersebut dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Analisis kinerja atas daya saing ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator PDRB, PDRB per kapita, dan produktivitas total daerah.

2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB bertujuan menggambarkan kondisi kinerja perekonomian suatu daerah dan membantu pengambil kebijakan daerah, perencana pembangunan dan untuk mengevaluasi dan memonitoring hasil pembangunan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010 pertumbuhan ekonomi Aceh Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 7,5 persen. Angka tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 4,5 persen. Peningkatan tersebut terjadi akibat pertumbuhan beberapa kategori lapangan usaha. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional pada Gambar 2.42, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat meningkat lebih besar.

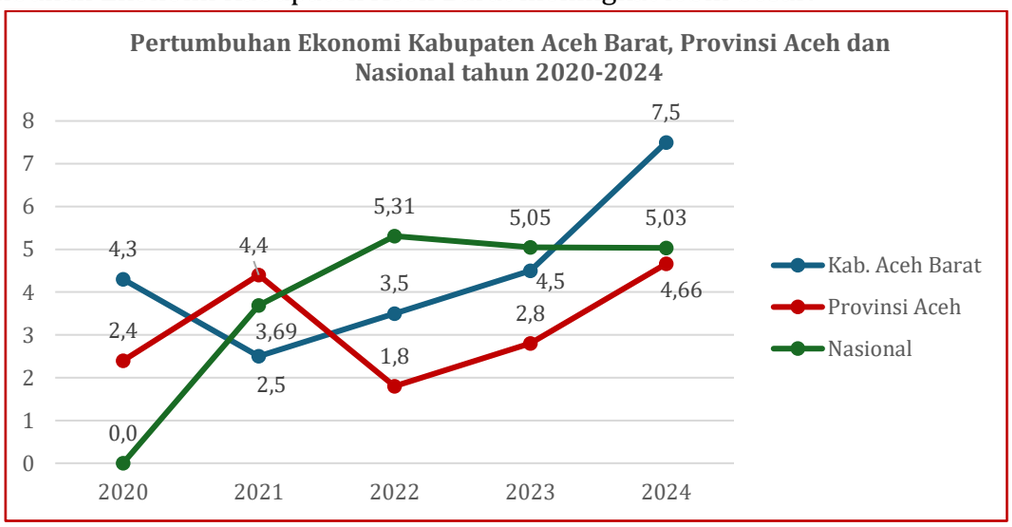

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.42
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Perekonomian Aceh Barat dapat dijelaskan dengan Kinerja PDRB. Nilai PDRB meningkat sebagai indikator peningkatan kinerja perekonomian. Nilai tambah PDRB ADHK yang terbentuk pada Tahun 2024 sebesar Rp. 8.664,92 Triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 8.060,20 Triliun seperti telihat pada Gambar 2.46 Total PDRB ADHB dan ADHK 2020–2024.

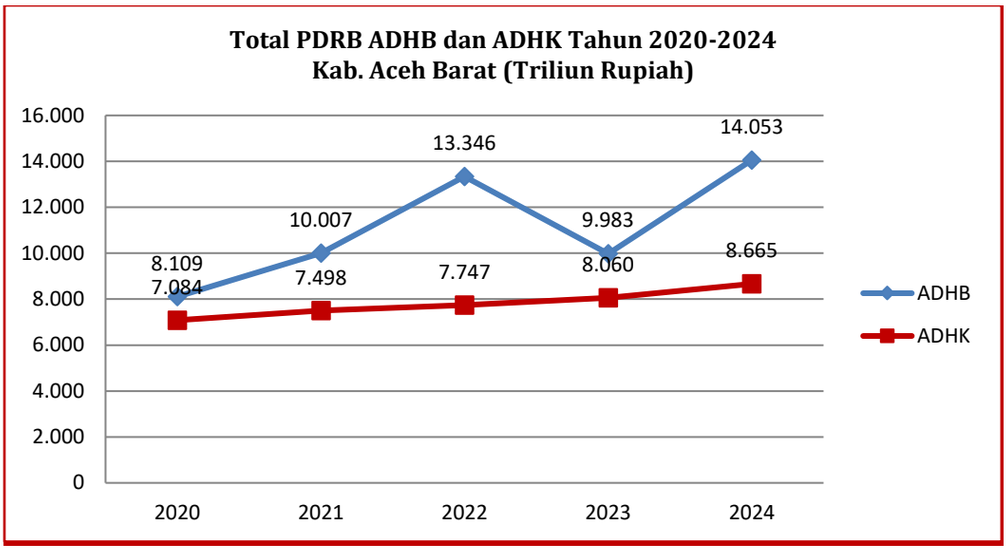

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.43
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Tabel 2.56 Produk Domestik Regional Bruto Aceh Barat ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha ADHB (Milyar Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2650,82	2923,02	3476,24	3845,72	4.046, 16
Pertambangan dan Penggalian	662,3	1892,88	4106,3	3486,0	3419,90
Industri Pengolahan	143,06	201,81	245,9	251,8	265,73
Pengadaan Listrik dan Gas	10,76	10,94	11,35	12,04	12,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,64	2,6	2,61	2,65	1,85
Konstruksi	983,61	1038,69	1098,3	1167,45	1225,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor	1309,8	1401,55	1600,24	1787,83	1850,47
Transportasi dan Pergudangan	315,76	363,67	463,65	521,86	577,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101,16	103,8	136,41	148,41	153,85
Informasi dan Komunikasi	225,95	243,04	274,69	288,80	291,06
Jasa Keuangan dan Asuransi	186,1	182,16	193,05	176,98	217,09
Real Estate	246,71	263,36	278,71	288,59	295,78
Jasa Perusahaan	32,86	33,67	39,8	40,70	42,50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	757,2	828,99	831,91	937,08	1009,61
Jasa Pendidikan	193,76	203,07	213,69	224,21	241,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	237,96	262,75	316,13	328,55	336,40
Jasa lainnya	48,76	51,12	57,5	63,11	62,57
Produk Domestik Regional Bruto	8109,23	10007,11	13346,48	13571,8	14053,24

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2024*

Tabel 2.57 Produk Domestik Regional Bruto Aceh Barat ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha ADHK (Milyar Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1974,84	1932,99	2043,07	2133,53	2087,36
Pertambangan dan Penggalian	1539	1844,38	1790,15	1898,51	2407,72

Sektor PDRB Lapangan Usaha ADHK (Milyar Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024*
Industri Pengolahan	102,52	108,71	116,75	116,12	118,12
Pengadaan Listrik dan Gas	9,94	10,05	10,25	10,67	10,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,15	1,12	1,12	1,13	1,9
Konstruksi	762,15	771,18	767,63	795,46	830,98
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor	934,81	974,91	1050,15	1093,83	1097,05
Transportasi dan Pergudangan	281,08	309,77	333,91	326,66	358,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	67,66	68,64	88,73	92,93	94.46
Informasi dan Komunikasi	215,05	230,71	260,31	258,44	272,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	132,23	126,2	121,75	110,35	135,11
Real Estate	204,06	212,72	222,89	226,31	232,20
Jasa Perusahaan	27,73	27,84	30,88	30,35	31,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	487,49	513,73	512,64	553,88	578,72
Jasa Pendidikan	135,01	138,48	145,15	148,46	151,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167,61	183,83	203,74	204,28	206,04
Jasa lainnya	41,79	42,92	47,88	49,32	51,13
Produk Domestik Regional Bruto	7084,15	7498,18	7747	8050,23	8664,92

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2024*

2.2. Struktur Perekonomian

Pada tahun 2024, terjadi pergeseran peranan kategori terbesar dalam pembentukan PDRB Aceh Barat, dari semulanya adalah kategori pertambangan dan penggalian menjadi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya harga komoditas pertambangan terbesar yaitu batubara yang menurunkan nilai harga berlaku kategori ini. Selain itu, terjadi peningkatan produksi dan harga pada kategori pertanian, perikanan. Peranan kehutanan, dan terbesar dalam pembentukan PDRB Aceh Barat pada tahun 2024 dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Share kategori ini mencapai 28,79 persen (turun dari 32,69 persen pada tahun 2020). Selanjutnya, yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian mencapai 24,34 persen (naik dari 8,17 persen pada tahun 2020). Terbesar ketiga adalah kategori Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor sebesar 13,17 persen (turun dari 16,06 persen pada tahun 2020). Disusul oleh kategori konstruksi sebesar 8,60 persen (turun dari 8,72 persen di tahun 2020) dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,18 persen (turun dari 9,34 persen di tahun 2019). Selengkapnya pada Tabel 2.58 dan Tabel 2.59.

Tabel 2.58 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Aceh Barat Menurut ADHB Tahun 2020-2024 (Persen)

Sektor PDRB Lapangan Usaha ADHB (Milyar Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,69	28,78	26,86	28,34	28,79
Pertambangan dan Penggalian	8,17	19,56	28,07	25,69	24,34
Industri Pengolahan	1,76	2,02	1,93	1,86	1,89
Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,11	0,09	0,09	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,13	10,30	8,56	8,60	0,02

Sektor PDRB Lapangan Usaha ADHB (Milyar Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024*
Konstruksi	12,13	10,30	8,56	8,60	8,72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,15	13,79	12,41	13,17	13,17
Transportasi dan Pergudangan	3,89	3,64	3,64	3,85	4,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,25	1,04	1,07	1,09	1,09
Informasi dan Komunikasi	2,79	2,43	2,16	2,13	2,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	1,82	1,52	1,30	1,54
Real Estate	3,04	2,64	2,19	2,13	2,10
Jasa Perusahaan	0,41	0,34	0,31	0,30	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,34	8,31	6,55	6,90	7,18
Jasa Pendidikan	2,39	2,03	1,68	1,65	1,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,93	2,63	2,48	2,42	2,39
Jasa lainnya	0,60	0,51	0,45	0,47	0,46
Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2024*

Tabel 2.59 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Aceh Barat Menurut ADHK Tahun 2020-2024 (Persen)

Sektor PDRB Lapangan Usaha ADHK (Milyar Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,88	25,66	26,37	26,47	
Pertambangan dan Penggalian	21,72	24,64	23,11	23,55	
Industri Pengolahan	1,45	1,45	1,51	1,44	
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,13	0,13	0,13	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,76	10,30	9,91	9,87	
Konstruksi	10,76	10,30	9,91	9,87	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,20	13,02	13,56	13,57	
Transportasi dan Pergudangan	3,97	4,14	4,31	4,05	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96	0,92	1,15	1,15	
Informasi dan Komunikasi	3,04	3,08	3,36	3,33	
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,87	1,69	1,57	1,37	
Real Estate	2,88	2,84	2,88	2,81	
Jasa Perusahaan	0,39	0,37	0,40	0,38	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,88	6,86	6,62	6,87	
Jasa Pendidikan	1,91	1,85	1,87	1,84	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,37	2,46	2,63	2,53	
Jasa lainnya	0,59	0,57	0,62	0,61	
Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2024*

2.3. PDRB Per Kapita

Salah kemakmuran satu suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Aceh Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tercatat sebesar 38,56 juta rupiah. Angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 66,28 juta rupiah. Setiap tahunnya PDRB perkapita mengalami kenaikan. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Perkembangan PDRB per kapita selengkapnya disajikan pada Gambar 2.47.

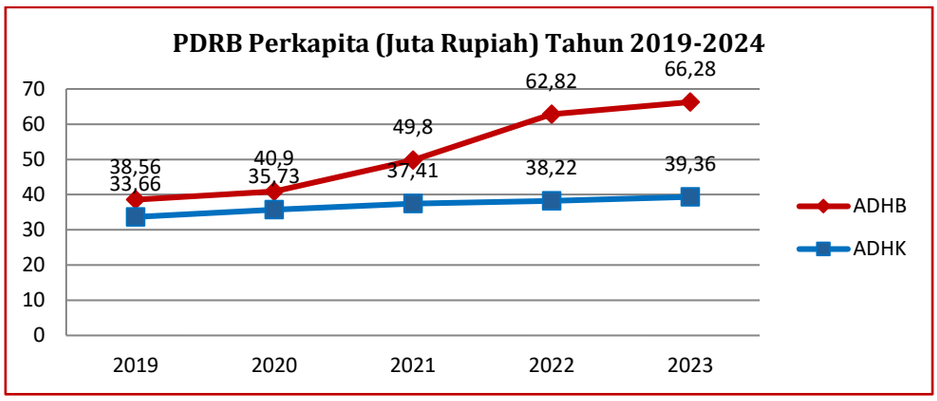

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

Gambar 2.44
PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023

2.4. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri pengolahan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi dari industri pengolahan terhadap produk Domestik Bruto (PDRB) suatu wilayah secara total. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan maupun kekuatan sektor industri pengolahan dalam perekonomian suatu wilayah. Melalui penghitungan medalam dari rasio ini dapat mendorong ekspor dan inverstasi sehingga dapat meningkatka daya saing daerah. Rasio PDRB Industri pengolahan kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa kontribusi industri pengolahan masih sangat rendah yaitu kurang dari 2% dari Jumlah PDRB baik menurut ADHB maupun ADHK. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomia Aceh Barat masih bergantung pada sektor lainnya.

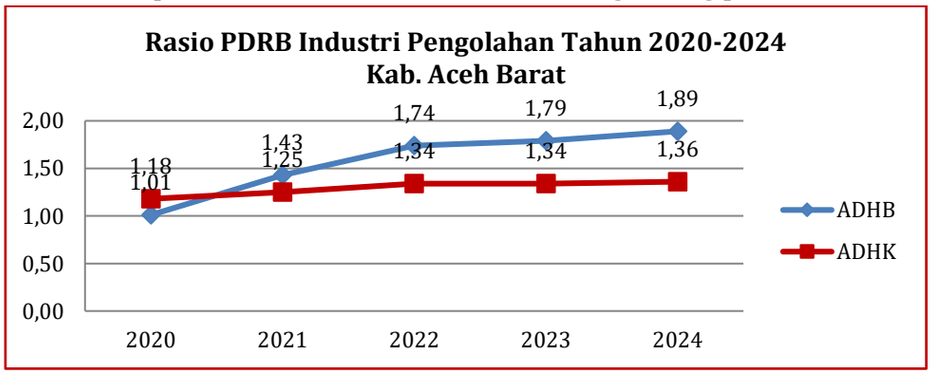

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

Gambar 2.45
Rasio PDRB Industri Pengolahan Aceh Barat Tahun 2020-2024

2.5. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan minum merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi dari Akomodasi Makan dan minum seperti penginapan, restoran, kafe, rumah makan dan usaha sejenisnya terhadap produk Domestik Bruto (PDRB) suatu wilayah secara total. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan maupun kekuatan sektor akomodasi makan dan minum dalam perekonomian suatu wilayah. Melalui penghitungan mendalam dari rasio ini dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata dan eknomi kreatif sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dalam sektor pariwisata dan jasa. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa kontribusi Akomodasi Makan dan Minum masih sangat rendah yaitu kurang dari 1% dari Jumlah PDRB baik menurut ADHB maupun ADHK. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Aceh Barat masih bergantung pada sektor lainnya.

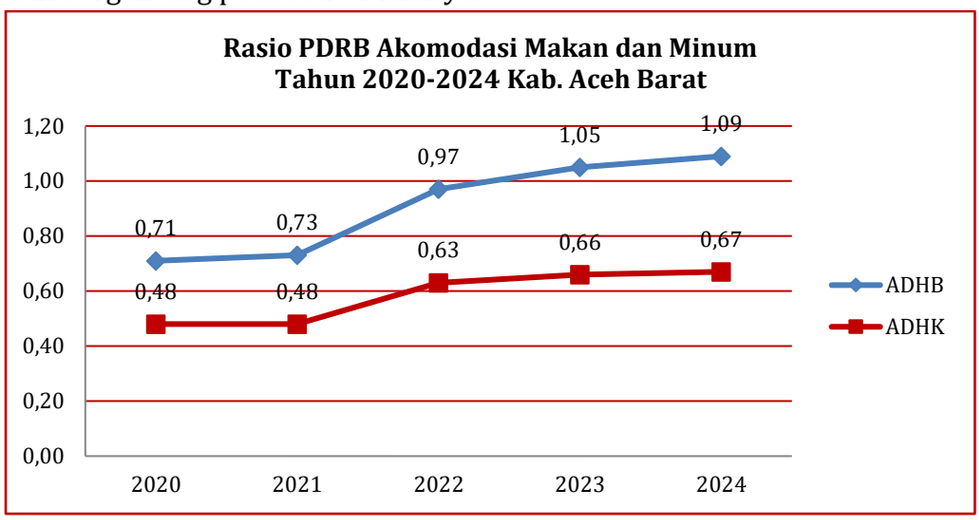

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

Gambar 2.46
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Aceh Barat Tahun 2020-2024

2.6. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif merupakan suatu ukuran yang menunjukkan persentase kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Proporsi ini menunjukkan seberapa besar peran ekonomi kreatif dalam keseluruhan perekonomian daerah. Jika berdasarkan pembagian sektor Ekonomi Kreatif menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif. Tujuan dari mlihat proporsi ekonomi kreatif ini untuk mengukur potensi ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi baru, menilai efektivitas kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, membantu perencanaan pembangunan berbasis budaya, inovasi, dan kreativitas dan memetakan Subsektor ekonomi kreatif unggulan di daerah Aceh Barat seperti makanan, kuliner, kerajinan, Fashion, dan pertunjukan seni.

2.7. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan penduduk suatu wilayah dalam aktivitas kewirausahaan. Rasio ini untuk melihat kekuatan ekonomi berbasis usaha mandiri, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja pada suatu wilayah.

2.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat menurun pada tahun 2019–2020. Namun tren meningkat tipis pada periode 2020–2023. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.47.

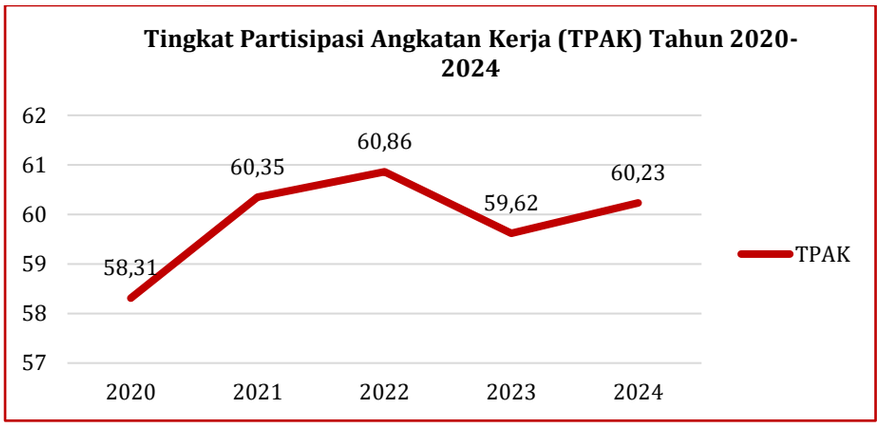

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Tenaga kerja dapat digambarkan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Pelatihan berbasis kompetensi merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dari para pekerja. Pada tahun 2020-2024 tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan cenderung menurun dan puncaknya terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 574, selanjutnya pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Meningkatnya pelatihan berbasis kompetensi akibat adanya program pelatihan *online* pada masa pandemi Covid-19. Secara lengkap data Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.60 di bawah ini.

Tabel 2.60 Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Besaran pencari kerja yang terdaftar	orang	11	N/A	1720	288	1333
Besaran pencari kerja yang yang ditempatkan	Orang	59	N/A	20	73	179
Keselamatan dan perlindungan	Persen	41,67	0	N/A	6	-
Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	60	65	40	4	-
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	100	0	0	32	-
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	16	0	0	0	-
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	0	0	0	0	-
Rasio lulusan S1/S2/S3	Persen	151	150	148	177	-

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat; BPS Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka proyeksi Data Tahun 2018-2022*

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dapat dilihat pada Gambar 2.48 berikut:

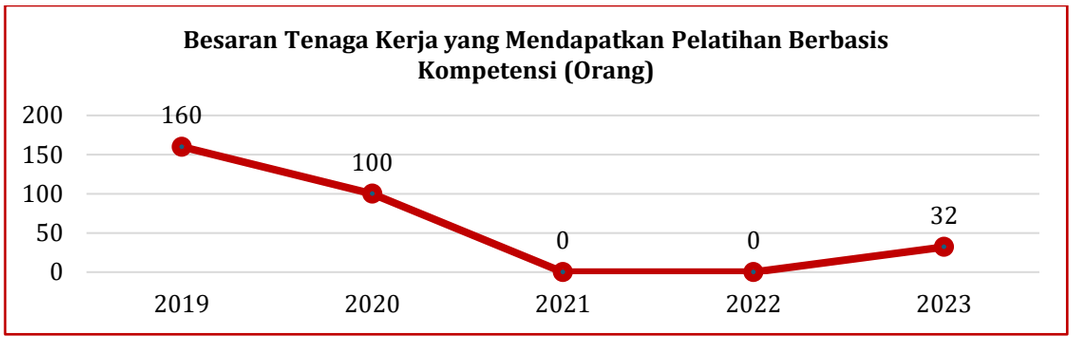

Gambar 2.48
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi

2.9. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat diartikan sebagai instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global (BRIN 2023). IDSD dirancang berdasarkan 12 aspek utama dalam daya saing wilayah yang diturunkan dari Indeks Daya Saing Global. Setiap aspek tersebut kemudian diukur melalui berbagai indikator, seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, akses pasar, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Perhitungan skor IDSD dilakukan dengan standarisasi data dari seluruh Indikator ini, yang kemudian di satukan menggunakan rata-rata aritmetika.

Berikut ini disajikan nilai IDSD Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional dalam Tabel 2.61. Nilai IDSD Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023 yaitu 3,04. Sementara untuk Provinsi Aceh nilainya lebih tinggi dari Kabupaten Aceh Barat sebesar 3,49. Namun nilainya masih lebih rendah dibandingkan IDSD Nasional yaitu 3,44. Semakin tinggi nilai indeks daya saing sebuah daerah, semakin baik kemampuan daerah tersebut untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, nilai rendah dalam indeks daya saing bisa menunjukkan adanya hambatan atau kelemahan yang perlu diperbaiki.

Tabel 2.61 IDSD Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar			Ekosistem Inovasi			Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Provinsi Aceh	4,18	2,78	2,93	3,45	3,77	4,13	4,44	3,51	2,27	4,33	2,97	3,16	3,49
Aceh Barat	4,16	1,64	3,66	3,16	3,7	3,68	2,24	2,95	0,82	3,99	4,6	1,88	3,04

Keterangan: Pilar 1: Institusi, Pilar 2: Infrastruktur, Pilar 3: Adopsi TIK, Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro, Pilar 5: Kesehatan, Pilar 6: Keterampilan, Pilar 7: Pasar produk, Pilar 8: Pasar tenaga kerja, Pilar 9: Sistem keuangan, Pilar 10: Ukuran pasar, Pilar 11: Dinamisme bisnis, Pilar 12: Kapabilitas inovasi

2.10. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi *What-If* Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota Se Aceh 2023 (Metode Asia *Competitive* Index NUS), jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Barat dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat yang pada Tahun 2023 berada pada posisi 5 akan meningkat menjadi peringkat 3 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 1,147.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- Mengendalikan inflasi dan dampak peningkatan inflasi bagi perekonomian dengan upaya, sebagai berikut: melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor, kerja sama dengan antar daerah, gerakan menanam, merealisasikan Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD;
- Meningkatkan standar regulasi dan penegakan hukum, salah satunya dengan penyelesaian kasus kriminalitas, sosialisasi dan mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas;
- Meningkatkan infrastruktur teknologi akses internet dengan upaya membangun jaringan internet yang merata bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kemenkominfo) untuk peningkatan jaringan perluasan cakupan jaringan fiber optik.

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

3.1. Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara adil dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan untuk dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan seperti ekonomi rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inkludisifitas sosial. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Kabupaten Aceh Barat merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi cukup siginifikan di tahun 2024 dengan pesentase 7,50% dengan distribusi Persentase PDRB tertinggi ialah pada pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,79% sedangkan yang kedua adalah pertambangan dan penggalian sebesar 24,4%. Tentunya hasil tersebut menjadi potensi dan tantangan terwujudnya ekonomi hijau di Aceh Barat.

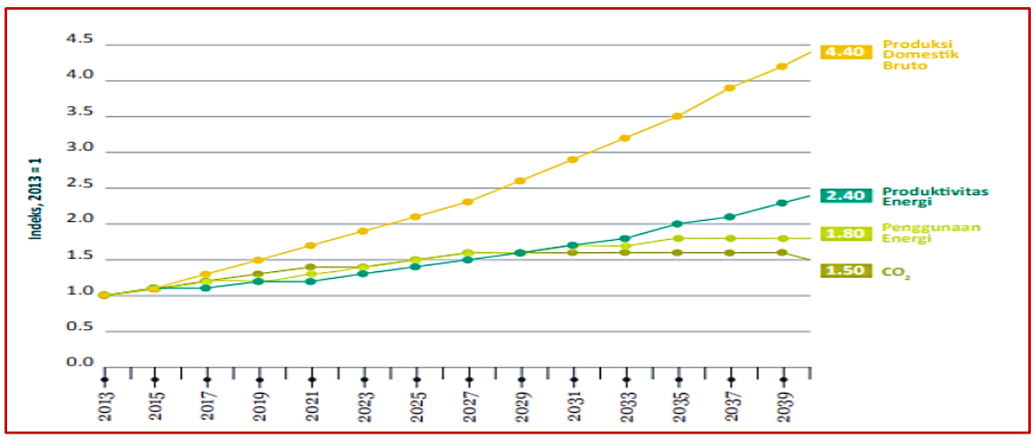

Sumber: Bappenas, 2015

Gambar 2.49
Indeks Ekonomi Hijau Indonesia

Kementrian PPN/Bappenas telah menentukan 16 indikator ekonomi hijau untuk dapat menjadi capaian pemerintah daerah dalam mewujudkan ekonomi hijau yang terbagai dalam 3 pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan . Adapun capaian Ekonomi Aceh Barat Tahun 2024 terdata pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62 Capaian Ekonomi Hijau Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

Pilar	No.	Indikator	2022	2023	2024
Lingkungan	1	Presentase luas tutupan hutan dari luas daratan	116260	115703	115030
	2	Bauran Energi Baru Terbarukan dari sumber energi primer	-	-	-
	3	Kualitas Air Permukaan (Konsentrasi BOD)	70	62,5	82,47
	4	Kualitas Udara (Konsentrasi NO2)	89,7	90,66	103,95
	5	Presentase penurunan emisi kumulatif dari baseline	-	-	-
	6	Penurunan Tutupan Lahan Gambut	-	-	-
Ekonomi	7	Intensitas emisi	-	-	-
	8	Intensitas energi final	-	-	-
	9	PDRB Per Kapita	65,79	66,28	67,94
	10	Indeks Produktivitas Pertanian (padi, kelapa sawit, perikanan budidaya)			
		a. Produktivitas Padi		6,31	6,3
		b. Produktivitas Kelapa Sawit		17.103	16.518
		c. Produktivitas perikanan budidaya		783	802,39
	11	Produktivitas tenaga kerja sektor industri	6574	6472	6700
	12	Produktivitas Tenaga kerja sektor jasa	-	-	-
Sosial	13	Rata rata lama sekolah	9,87	9,89	9,99
	14	Angka Harapan Hidup	71,76	71,89	72,03
	15	Tingkat Kemiskinan	17,93	17,86	17,6
	16	Tingkat Pengangguran	6,09	6,07	5,58

3.2. Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah pendekatan ekonomi untuk meningkatkan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi laut, sumber daya pesisir dan ekosistemnya dalam untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda. Pengembangan Ekonomi Biru juga mengaitkan integrasi antara sumber daya yang berasal dari danau dan Sungai yang terhubung dengan wilayah pesisir dan lautan. Hasil tangkap Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 mencapai 20.837,92 ton dengan jumlah uang lebih dari 510 milyar sedangkan pada tahun 2024 produksi hasil tangkapan Aceh Barat mengalami sedikit penurunan yaitu 20.105, 201 ton lebih dengan jumlah uang lebih dari 292 milyar.

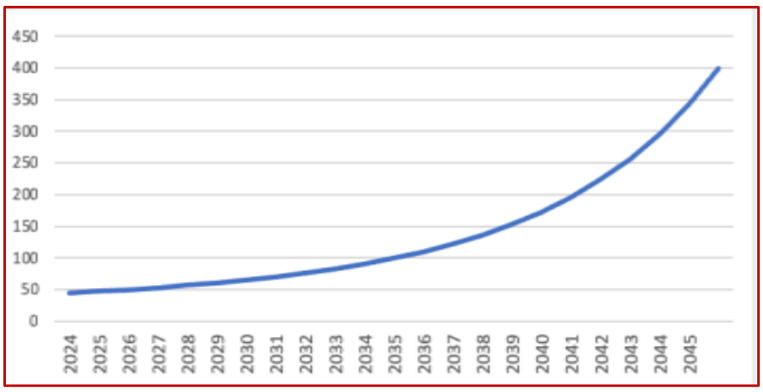

Sumber: Bappenas, 2024

Gambar 2.50
Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)

4. Transformasi Digital

Pengurusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.

4.1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu pemerintahan, karena dengan adanya keahlian para pegawai dan kualitas sumber daya dapat menggerakan suatu pemerintahan dengan baik dan benar. Di era globalisasi seperti ini peranan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat penting dan berpengaruh salah satunya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dengan berkembang pesatnya dunia teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu dan memudahkan dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pemerintahan. Adanya teknologi informasi dan komunikasi ini juga akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesalahan di dalam manajemen sumber daya manusia yang sebelumnya dilakukan tanpa dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan semakin meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Kemudian data penduduk yang menggunakan telephon/hp, akses internet, dan komputer pribadi meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Barat semakin berkembang dalam hal komunikasi dan informatika. Cakupan layanan telekomunikasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021, namun sejak tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan jaringan infrastruktur karena bencana alam (banjir) dan hal lain karena beban jaringan yang semakin meningkat menyebabkan turunnya cakupan layanan. Informasi detail terkait komunikasi dan informatika disajikan pada Tabel 2.63 di bawah ini.

Tabel 2.63 Indikator Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Orang	12	12	12	12	12	12*
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di gampong	Kelompok	25	50	0	0	12	14.6*
Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	80,00	82,00	84,00	90,00	88	74
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	90	90	90	90.3	90.7	90.7*
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	90	90	90	90	90.7	90.7*
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	89.5	89.5	89.5	90	90.3	90.4*
Persentase cakupan Jangkauan TIK	Persen	60,00	65,00	65,00	90,00	90,00	99.5*
Cakupan Pengembangan *E- Government*	Persen	-	-	0,00	70,00	75,00	86*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

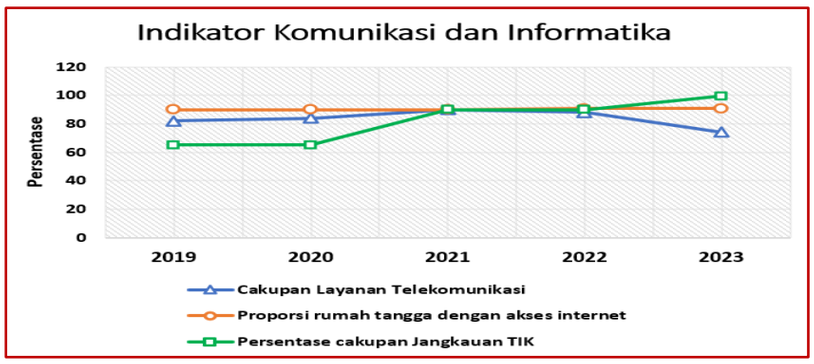

Gambar 2.51
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Aceh Barat

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengukur sejauh mana suatu pemerintahan telah mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini dapat memberikan gambaran tentang efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam lingkungan pemerintahan yang berbasis elektronik. Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2022 bernilai 2.63. Nilai ini lebih tinggi sedikit dari standar nasional yaitu 2.6. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks SPBE di Kabupaten Aceh Barat sudah cukup baik. Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 belum muncul dan belum dapat diproyeksikan berdasarkan data sebelumnya. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 2.64 di bawah ini.

Tabel 2.64 Indeks SPBE Kabupaten Aceh Barat

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	N/A	N/A	N/A	2.63	

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

4.2. Platform Aplikasi Pelayanan Publik

Platform aplikasi pelayanan publik adalah sistem digital yang dibangun dan dikelola untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Aplikasi ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital pemerintahan atau (e-government). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memudahkan akses layanan bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan endukung reformasi birokrasi dan efisiensi kerja Aparatur Sipil Negara. Platform yang telah tersedian merupakan aplikasi pada layanan administrasi kependudukan, perizinan dan non-perizinan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, layanan pengaduan masyarakat, Pajak dan Retribusi daerah, dan Bantuan sosial. Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 bahwa 85 % Organisasi Pemerintah Daerah Aceh Barat telah menerapkan e-government melalui aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing OPD.

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalah indikator ekonomi makro yang menunjukkan nilai investasi barang modal tetap yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. PMTB merupakan bagian penting dari komponen PDRB

menurut pengeluaran, yang mencerminkan aktivitas pembangunan fisik dan infrastruktur di daerah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Aceh Barat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Barat tahu 2022 pembentukan modal tetap mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 4,26 Milyar dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 3,9 Milyar. Sedangkan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 pembentukan modal tetap mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 2,98 Milyar dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 3 Milyar.

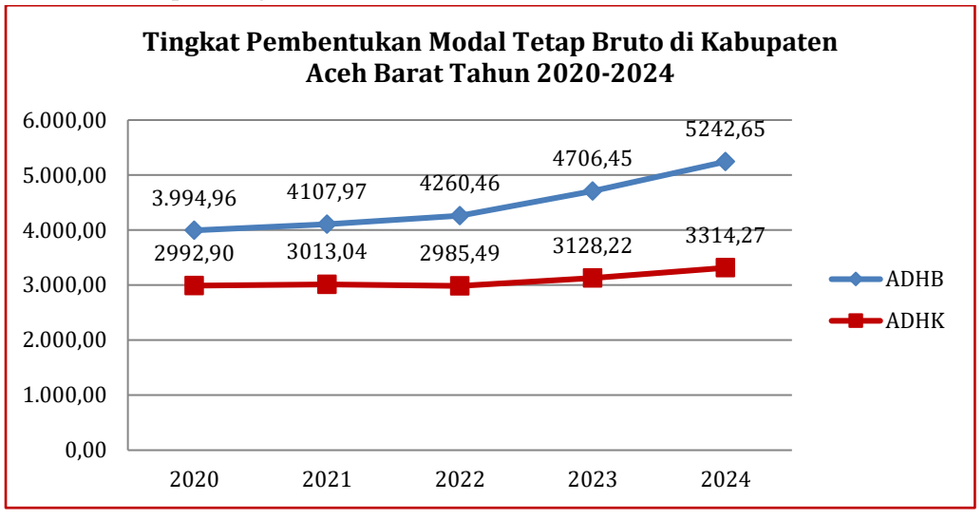

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

Gambar 2.52
Tingkat Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024**

5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa adalah kegiatan mengeluarkan produk (barang maupun jasa) dari suatu wilayah (negara atau daerah) untuk dijual atau digunakan oleh pihak luar wilayah tersebut, baik luar negeri maupun luar daerah. Dalam konteks PDRB daerah, ekspor bisa berarti pengiriman ke luar provinsi atau luar negeri. Berdasarkan data ekspor resmi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2024, kopi tetap menjadi komoditas unggulan Provinsi Aceh, dengan kontribusi devisa mencapai sekitar 22% dari total nilai ekspor barang nonmigas provinsi Aceh. abupaten Aceh Barat, sebagai bagian integral dari Provinsi Aceh, memiliki karakteristik geografis, agroklimat, dan sosial ekonomi yang serupa dengan wilayah-wilayah penghasil komoditas unggulan ekspor tersebut. Beberapa wilayah di Aceh Barat seperti Kecamatan Samatiga, Meureubo, dan Pante Ceureumen memiliki konsentrasi lahan dan aktivitas produksi yang cukup tinggi terhadap komoditas kopi, kelapa, dan kelapa sawit, sementara Kecamatan Sungai Mas dan Woyla dikenal sebagai sentra tanaman karet. Potensi komoditas-komoditas ini tidak hanya memiliki prospek pengembangan untuk ekspor, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam pembentukan struktur ekonomi daerah. Aktivitas produksi dan distribusi dari sektor-sektor tersebut menjadi penggerak utama perekonomian lokal, yang tercermin dalam besarnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Barat. Sementara Ekspor jasa meliputi kegiatan memberikan layanan kepada konsumen luar negeri seperti transportasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, teknologi dan lainnya.

6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan sekaligus menjadi kota yang iklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan pedesaan mandiri yang berkelanjutan. Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, seperti fasilitas jalan, drainase, ketersediaan air bersih dan air minum, areal kawasan kumuh, dan rasio tempat pemakaman umum. Fasilitas jalan merupakan infrastruktur fisik yang digunakan untuk mendukung transportasi darat, memungkinkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan adanya peningkatan persentase, yaitu pada tahun 2023 nilainya mencapai 0,57. Hal ini bersinergi dengan indikator persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar memiliki nilai yang cenderung menurun, dari 0,40 pada tahun 2019 menjadi 0,32 pada tahun 2023 (dengan angka proyeksi). Hal ini menjadi acuan bagi para *stakeholder* untuk meningkatkan aspek pengendalian dalam hal pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Barat. Data mengenai indikator fasilitas jalan lainnya disajikan pada Tabel 2.65 di bawah ini.

Tabel 2.65 Fasilitas Jalan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,51	0,51	0,52	0,53	0,57
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,009	0,009	0,009	0,008	0.009*
Persentase Kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	1,00	1,00	0,50	0,31	0.6*
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	50,81	51,25	52,31	53,24	54.8*
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	17,4	17,87	17,95	18,50	18.6*
Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,40	0,38	0,36	0,34	0.32*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 Semester 2
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

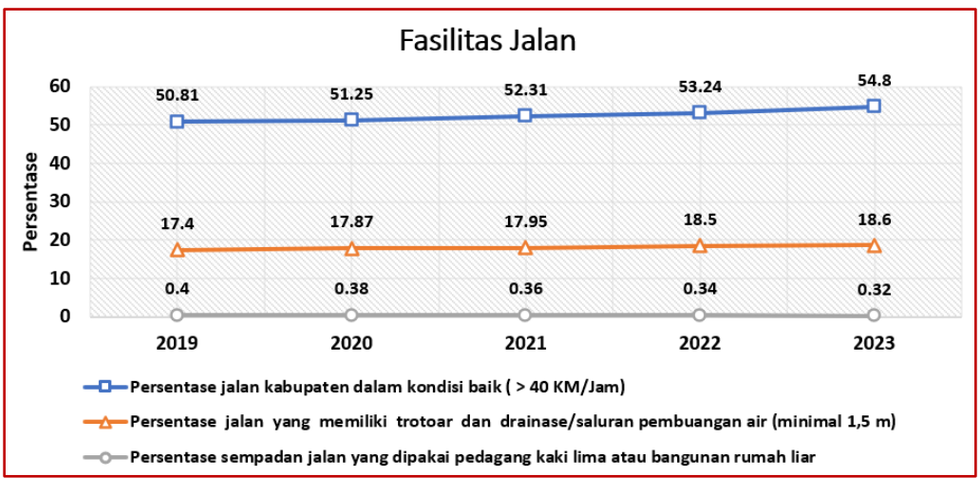

Gambar 2.53
Fasilitas Jalan di Kabupaten Aceh Barat

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang juga mencakup rasio TPU (Tempat Pemakaman Umum) dan tempat ibadah. Rasio TPU per satuan penduduk di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan adanya tren peningkatan selama kurun waktu 5 tahun sejak 2019. Peningkatan rasio tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah tempat pemakaman umum yang juga meningkat. Sementara untuk tempat ibadah per satuan penduduk, nilainya cenderung stabil yaitu 3,06. Data Rasio TPU dan tempat ibadah di Kabupaten Aceh Barat disajikan pada Tabel 2.66 di bawah ini.

Tabel 2.66 Rasio TPU dan Tempat Ibadah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	375,15	375,23	375,46	374,99	375.26*
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	3,06	3,06	3,06	3,06	3.06*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 Semester 2
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

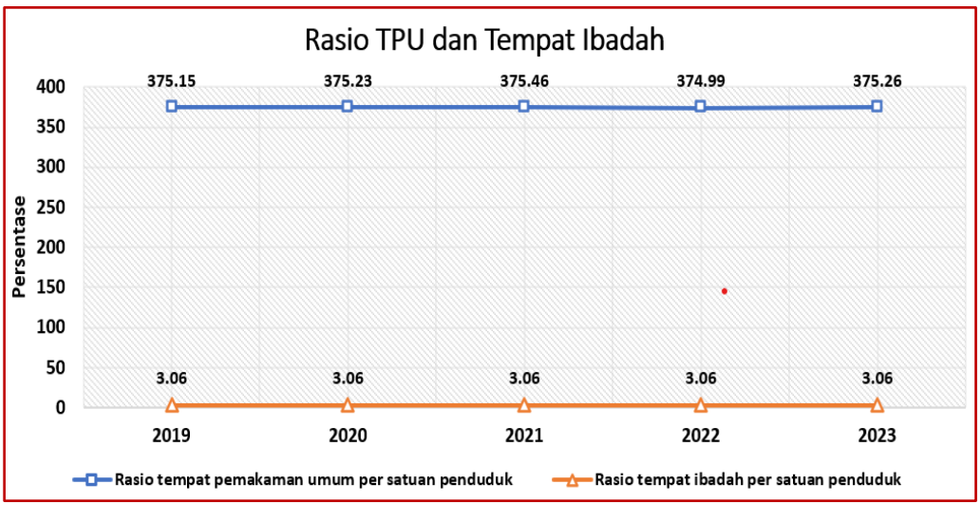

Gambar 2.54
Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Ibadah

Selain itu, Hasil pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum memperlihatkan masih terdapat indikator yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan keterbatasan kualifikasi SDM dengan latar belakang pendidikan Teknik, keterbatasan alokasi dana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perencanaan dan metode yang dilakukan dalam pengumpulan data ditiap SKPK masih belum sama, sehingga data dukung yang diperlukan dalam perhitungan persentase capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) ditiap SKPK masih berbeda.

Tabel 2.67 Capaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator	Sasaran Program	Capaian	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	522	522	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	2750	2750	100%

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

Hasil pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Tantribmas) yang belum optimal dalam pelaksanaan disebabkan minimnya ketersediaann sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan terbatasnya anggaran dan Tenaga PPNS.

Tabel 2.68 Capaian SPM di Bidang Tantribmas

No	Indikator	Sasaran Program	Capaian	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	340	340	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	150	150	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)	150	150	100 %
4	.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)	150	150	100 %
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	150	150	100 %

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

Hasil pencapaian SPM Bidang Sosial memperlihatkan masih terdapat indikator yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2.69 Capaian SPM di Bidang Sosial

No	Indikator	Sasaran Program	Capaian	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	358	331	93,25%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	170	138	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	214	179	82,84 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti dan	117	106	91,77 %
5	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana	1660	1660	100%

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

6.1. Indeks Infrastruktur

Perkembangan daya saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah Kabupaten Aceh Barat menggunakan beberapa ukuran kinerja, yaitu Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Kinerja terhadap perkembangan fasilitas wilayah dan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat menggunakan indikator-indikator, yaitu:

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan;
2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum;
3. Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun;
4. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih;
5. Rasio ketersediaan daya listrik;
6. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik; dan
7. Persentase penduduk yang menggunakan Hp/ telepon.

6.2. Perhubungan

Untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan sarana transportasi yang aman dan nyaman. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Salah satu indikator terkait perhubungan yaitu pemasangan rambu-rambu yang semakin meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2020 yang mencapai 81,67%. Namun dampak dari covid-19 yang terjadi di tahun 2020 menyebabkan beberapa nilai indikator mengalami penurunan di antaranya Pemasangan Rambu-rambu, Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum dan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum. Kemudian pasca pandemik tahun 2022 meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya. Informasi

detail mengenai perhubungan di Kabupaten Aceh Barat disajikan pada Tabel 2.70 di bawah ini.

Tabel 2.70 Indikator Perhubungan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	119.255	121.640	124.073	126.554	128.526*
Rasio ijin trayek	Rasio	0,00003	0,00004	0,00005	0,00005	0.00005*
Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	3.976	4.056	4.137	4.22	4.41*
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	9	9	10	11	12*
Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,003	0,0031	0,0032	0,003	0.003*
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	60,21	61,96	61,96	65.67	66.54*
Pemasangan Rambu-rambu	Persen	79,29	81,67	60	60,00	51.03*
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,088	0,267	0,267	0,260	0.257*
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	176.749	86.385	18.075	77.927	48.342*
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	119.255	68.144	34.788	36.071	21.926*
Persentase sarana dan prasarana Transportasi	Persen	38,34	25,00	56,00	56,00	59,00

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

6.3. Transportasi

Jenis transportasi dibedakan menjadi transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat merupakan salah satu sistem transportasi yang melibatkan pergerakan orang dan barang melalui jaringan jalan dan rel. Transportasi darat di Indonesia memiliki kontribusi penting dalam hal perekonomian negara.

Adapun transportasi laut merupakan jenis transportasi yang menggunakan perairan, seperti laut, sungai, dan danau, untuk mengangkut orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Jenis transportasi laut menjadi bagian penting dari sistem transportasi global untuk mendukung perdagangan internasional, perjalanan, dan industri perikanan. Sehubungan dengan letaknya yang berbatasan langsung dengan laut, transportasi laut di Kabupaten Aceh Barat memiliki peran penting dalam hal mobilitas masyarakat maupun sektor barang dan jasa.

Jenis transportasi ketiga yaitu transportasi udara yang menggunakan pesawat terbang untuk mengangkut penumpang dan kargo dari satu lokasi ke lokasi lain melalui udara. Masyarakat yang akan berkunjung ke Kabupaten Aceh Barat dapat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda yang terletak di Banda Aceh untuk kemudian melanjutkan perjalanan via transportasi darat menuju Aceh Barat.

Kondisi transportasi di Kabupaten Aceh Barat digambarkan dalam beberapa indikator, yaitu panjang jalan, jumlah kendaraan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlah orang/barang yang melalui dermaga/terminal per tahun. Indikator-indikator tersebut secara rinci dijelaskan pada sub-bab berikut.

6.4. Jumlah Kendaraan

Kendaraan menjadi sarana penting bagi transportasi darat. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pencatatan jumlah kendaraan bermotor menjadi hal penting dalam memperhitungkan kapasitas antara sarana dan prasarana dalam konteks transportasi darat. Kendaraan motor berdasarkan jenisnya terdiri atas lima jenis yaitu: (1) mobil sedan dan *jeep*, (2) minibus dan *microbus*, (3) bus, *pick up*, dan truk, (4) alat berat dan khusus, (5) sepeda motor. Namun kategori jenis kendaraan bermotor Sedan dan Jeep dan Alat Berat dan Khusus tidak tercantum pencatatan Statistik Aceh 2024. Selengkapnya perkembangan jumlah kendaraan tahun 2019 dan 2023 terdapat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71 Jenis dan Jumlah Kendaraan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan (Unit)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sedan dan Jeep	1.819	1.900	1.994	9.859	-
2	Minibus dan Microbus	6.130	6.563	7.159	53	52
3	Bus, Pick Up, dan Truk	3.933	4.066	4.255	4.499	4.715
4	Alat Berat dan Khusus	116	112	71	-	-
5	Sepeda Motor	106.062	110.097	116.804	121.487	128.133
Jumlah		**118.060**	**122.738**	**130.283**	**135.898**	**132.900**

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2024

Data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan sepeda motor mendominasi di Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2019 hingga 2023.

6.5. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menggambarkan panjang jalan yang tersedia di dalam suatu wilayah dengan jumlah kendaraan yang beroperasi. Hal ini dapat digunakan sebagai perhitungan kapasitas kendaraan di jalan tersebut, dan mengukur tingkat kemacetan dan efisiensi jaringan transportasi di wilayah tersebut. Data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan	**878,95**	**878,95**	**878,95**	**879,31**	**879,21**
Jumlah kendaraan	118.060	122.738	130.283	135.898	132.900
Rasio	134,32	139,64	148,23	154,55	151,16

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, BPS Provinsi Aceh, dan Hasil Analisis, 2024

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Aceh Barat meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 besarnya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yaitu 134,32. Nilai tersebut berarti 1 km jalan di Kabupaten Aceh Barat melayani 134 kendaraan bermotor. Empat tahun berikutnya yaitu pada tahun 2023, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan meningkat menjadi 151,16. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Barat.

6.6. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kapasitas atau muatan angkutan umum di Kabupaten Aceh Barat digambarkan dengan indikator jumlah orang yang terangkut angkutan umum. Berdasarkan Gambar 2.55, pada tahun 2019 – 2022, jumlah orang/barang yang terangkut memiliki tren menurun, yaitu

mulai dari 176.749 unit menjadi 18.075 unit. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 dan 2021 hingga nilainya kurang dari 20.000 unit. Hal ini disebabkan oleh dampak dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) akibat dari dampak pandemi Covid-19. Namun pada tahun berikutnya, jumlah orang/barang yang terangkut berangsur meningkat kembali hingga mencapai 77.927 unit.

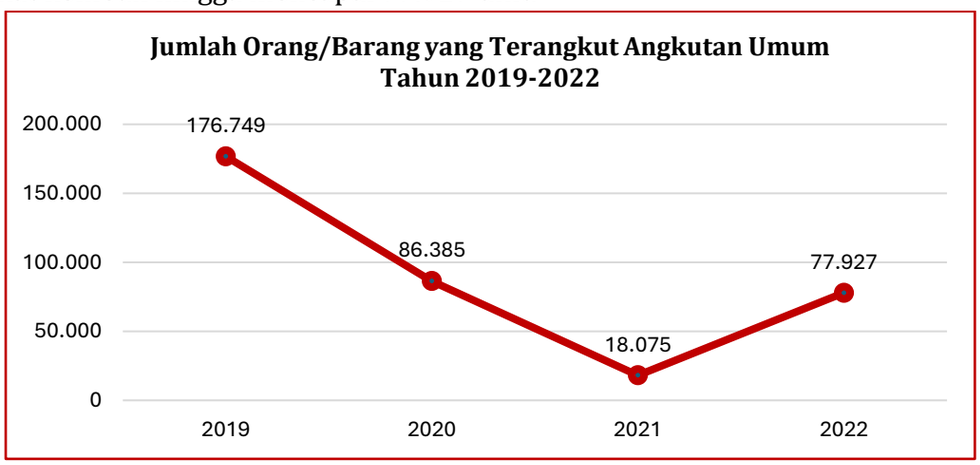

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat

Gambar 2.55
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022

6.7. Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal per Tahun

Selain diukur dengan indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, indikator lainnya yang menggambarkan fasilitas wilayah dan infrastruktur khususnya dalam aspek transportasi adalah indikator jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. Pada periode tahun 2019-2023, jumlah orang/barang yang melalui dermaga, bandara, maupun terminal menurun secara drastis hingga mencapai 34.788 unit. Penurunan tersebut terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022, jumlah orang yang melalui prasarana transportasi di Kabupaten Aceh Barat mulai meningkat secara perlahan. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.56.

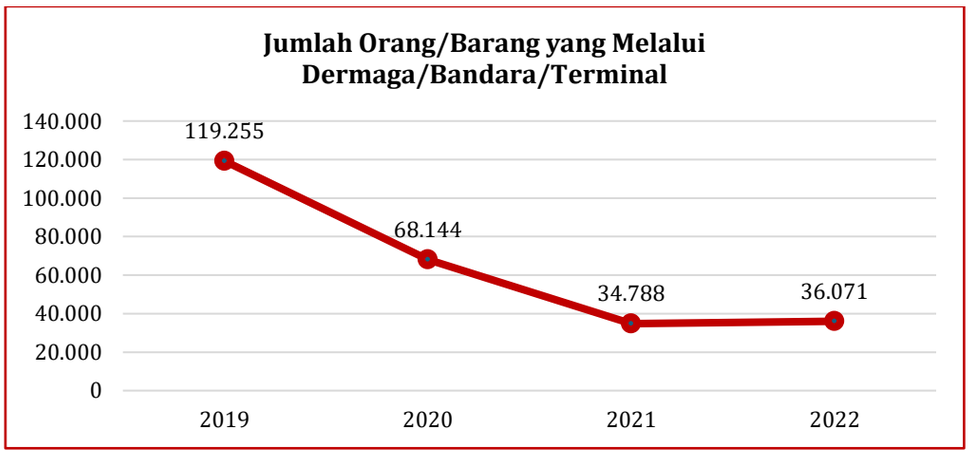

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2023

Gambar 2.56
Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

6.8. Ketaatan RTRW

Saat ini dokumen RTRW yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat berlaku mulai dari tahun 2012 hingga 2032. Data kepatuhan terhadap RTRW menunjukkan peningkatan persentase ketaatan terhadap RTRW. Persentase ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2019 yaitu 70% yang kemudian menjadi 90% pada tahun 2023.

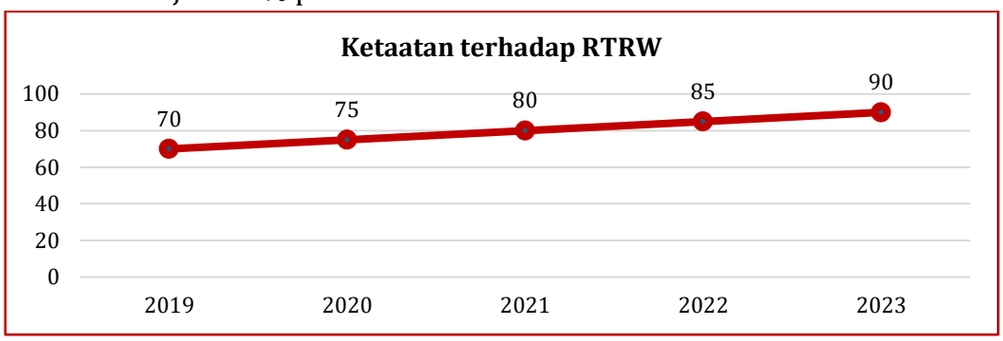

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

Gambar 2.57
Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

6.10. Air dan Sanitasi

Adapun jumlah pelanggan perusahaan air minum di Kabupaten Aceh Barat jumlahnya berfluktuatif sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu sebanyak 4.508 pelanggan pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2023 menurun berjumlah 3.599 pelanggan. Apabila dilihat dari jenis pelanggan PDAM, jumlah terbanyak yaitu dari pelanggan PDAM rumah tangga pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73 Jumlah Pelanggan Perusahaan Air Minum di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Jumlah Pelanggan	2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	14	14	15	11	7
Rumah Tangga	4.188	4.453	4.967	3.226	3.347
Instansi Pemerintah	47	45	42	36	31
Niaga	258	256	274	195	21
Industri	1	1	1	1	3
Khusus	-	-	-	-	-
Jumlah	**4.508**	**4.769**	**5.299**	**3.470**	**3.599**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

6.11. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi ketersediaan dan keandalan pasokan listrik dalam suatu wilayah atau sistem. Nilai rasio ketersediaan daya listrik diperoleh dari total waktu ketersediaan listrik dibagi dengan total waktu dalam satu tahun. Dalam hal perencanaan, indikator ketersediaan daya listrik menjadi penting untuk pengoperasian infrastruktur listrik. Data menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023, Kabupaten Aceh Barat memiliki nilai rasio ketersediaan listrik yang semakin meningkat dari 75,4% menjadi 78,09% yang disajikan pada Gambar 2.58.

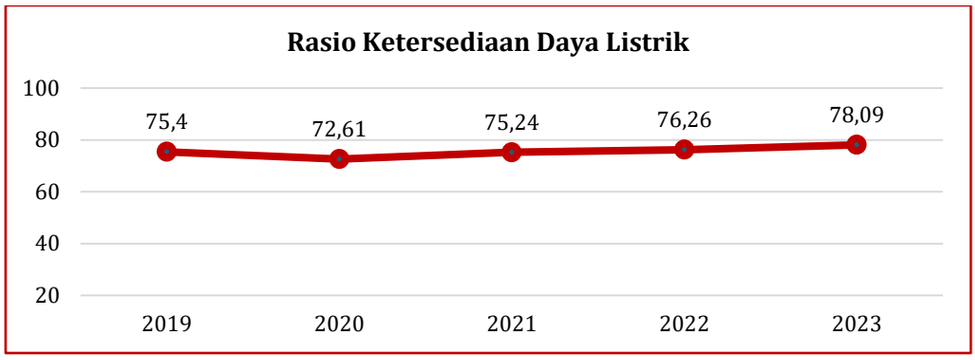

Sumber: RPJMD Kabupaten Aceh Barat

Gambar 2.58
Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

6.12. Jumlah Desa Berlistrik

Seluruh desa di Kabupaten Aceh Barat sudah memiliki akses listrik. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74 Jumlah Desa Berlistrik di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Kecamatan	Total Jumlah Desa	Jumlah Desa Berlistrik				
		2019	2020	2021	2022	2023
Johan Pahlawan	21	21	21	21	21	21
Samatiga	32	32	32	32	32	32
Bubon	17	17	17	17	17	17
Arongan Lambalek	27	27	27	27	27	27
Woyla	43	43	43	43	43	43
Woyla Barat	24	24	24	24	24	24
Woyla Timur	26	26	26	26	26	26
Kaway XVI	43	43	43	43	43	43
Meureubo	26	26	26	26	26	26
Pante Ceureumen	25	25	25	25	25	25
Panton Reu	19	19	19	19	19	19
Sungai Mas	18	18	18	18	18	18
Total	**321**	**321**	**321**	**321**	**321**	**321**
Persentase Desa Berlistrik		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

6.13. Rumah Tangga dengan Hunian Layak

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan komponen penting dalam perencanaan perkotaan dan perkampungan yang berkelanjutan. Perencanaan perumahan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi warga. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Aceh Barat ditunjukkan dalam beberapa indikator seperti rumah layak huni, permukiman yang tertata, permukiman kumuh, dan desa terpencil.

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2019-2023, di mana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021-2023 yaitu mencapai 0,80. Dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023 persentase permukiman yang tertata terus meningkat, yaitu pada tahun 2023 mencapai 81% dibanding tahun 2019 yang hanya 78%. Adapun persentase lingkungan pemukiman kumuh menunjukkan penurunan yang bertahap mulai dari tahun 2019 sebesar 0,04% menjadi 0,02% pada tahun 2023. Data mengenai indikator perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Aceh Barat secara rinci disajikan pada Tabel 2.75 di bawah ini.

Tabel 2.75 Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio rumah layak huni	Rasio	0,78	0,79	0,80	0,80	0.80
Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,28	0,29	0,30	0,31	0.32
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	78	79	79	80	81
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	63,00	62,00	64,00	65,00	65
Persentase pemukiman yang tertata	Persen	70	72	75	78	78
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,04	0,04	0,03	0,03	0.02*
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	0,03	0,02	0,01	0,00	0.002*
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	5,02	4,29	3,20	2,94	2*
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100	100	100	100	100*
Jumlah Desa Terpencil	Desa	N/A	15	7	0	4*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

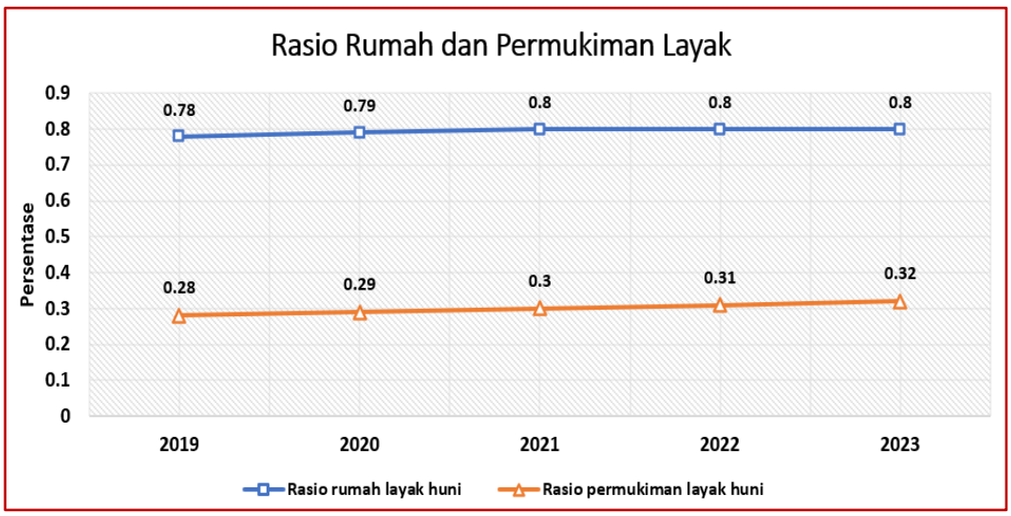

Gambar 2.59
Rasio Rumah dan Permukiman Layak di Kabupaten Aceh Barat

Selain itu, pelayanan bidang Perumahan Rakyat tidak mencapai target (target 0%). Hal ini terjadi karena ketersediaan anggaran untuk tahun 2023 tidak tersedia.

Tabel 2.76 Capaian SPM di Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator	Sasaran Program	Capaian	Capaian (%)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	0	0	0%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0%

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

Akses air minum di Kabupaten Aceh Barat digambarkan dalam dua indikator yaitu, persentase penduduk berakses air minum dan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu yang semula 63%

menjadi 67% (2023). Meningkatnya akses air minum di Aceh Barat disebabkan oleh faktor pembangunan dan pemeliharaan yang semakin baik. Sementara indikator proporsi rumah tangga terhadap air minum layak mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh mutu pelayanan yang semakin baik. Secara detail data Akses air minum di Kabupaten Aceh Barat disajikan pada Tabel 2.77 di bawah ini.

Tabel 2.77 Akses Air Minum di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk berakses air minum	Persen	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 Semester 2

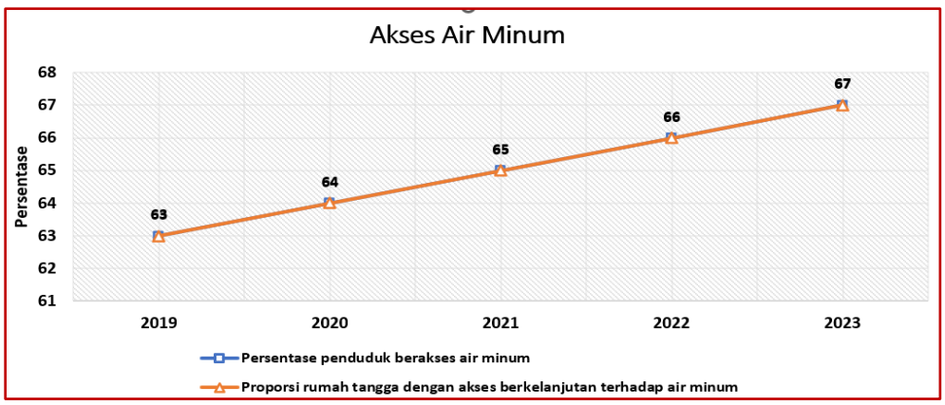

Gambar 2.60
Akses Air Minum di Aceh Barat

Persentase rumah tinggal bersanitasi layak di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan sejak tahun 2019 yang hanya 80,15%, menjadi 89,75% pada tahun 2023. Adapun pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor juga mengalami peningkatan persentase. Pada tahun 2023, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor mencapai 20,2%. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.78 di bawah ini.

Tabel 2.78 Sanitasi, Drainase, dan Irigasi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Persen	80,15	85,33	86,80	87,10	89.75
Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen	1,0	0,88	0,65	0,40	0.3*
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	42,00	44,00	46,00	47,20	49.4*
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	15,80	16,70	18,00	19,30	20.2*
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	19,91	20,32	20,73	21,13	21.7*
Rasio Jaringan Irigasi dengan luas areal sawah terairi	Rasio	0,20	0,203	0,207	0,211	0.22*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat dan Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 Semester 2
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

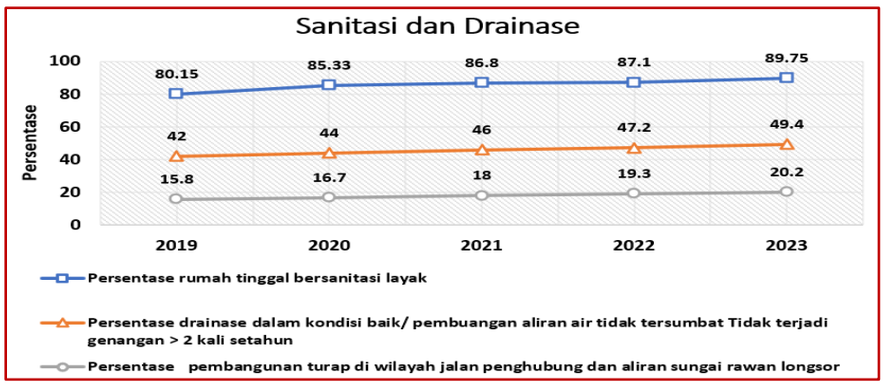

Gambar 2.61
Sanitasi dan Drainase di Kabupaten Aceh Barat

Sehubungan dengan kawasan kumuh, Kabupaten Aceh Barat memiliki luas kawasan kumuh dengan persentase dari 0,04% sejak tahun 2019. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa luas kawasan kumuh di Kabupaten Aceh Barat menurun menjadi 0,03%. Sementara itu, fasilitas pengurangan sampah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2019. Tahun 2023 Kabupaten Aceh Barat memiliki 6% fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.79 Kawasan Kumuh di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kawasan kumuh	Persen	0,04	0,04	0,03	0,03	0.03*
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

6.14. Persentase Desa Mandiri

Desa berstatus mandiri atau swasembada dapat diartikan sebagai desa atau wilayah yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya secara mandiri, termasuk dalam hal produksi pangan, air, energi, dan sumber daya lainnya tanpa harus bergantung pada suplai dari luar wilayah tersebut. Kabupaten Aceh Barat memiliki angka persentase desa berstatus swasembada dengan tren meningkat dari tahun 2020–2024, yaitu 15% menjadi 21%. Selengkapnya disajikan pada Gambar 2.62 berikut.

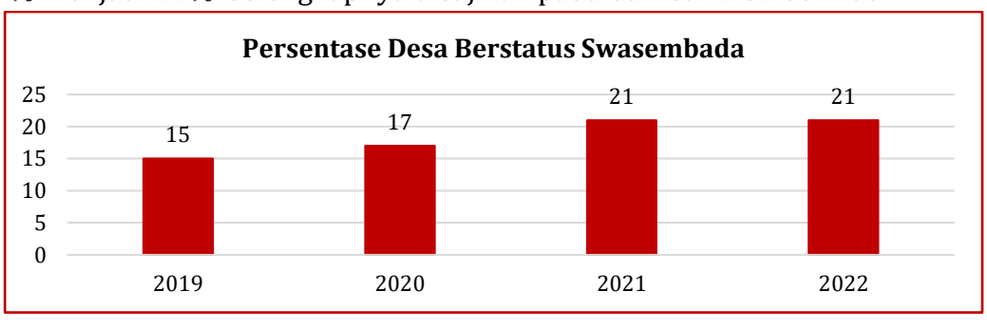

Sumber: Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Barat

Gambar 2.62
Persentase Desa Berstatus Swasembada di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indek Desa, dijelaskan mengenai tingkatan desa. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. Desa Tertinggal adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan

yang masih terbatas. Desa Berkembang adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. Kemudian Desa Maju adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Sedangkan, Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. IDM merupakan indikator utama untuk mengukur capaian pembangunan pemberdayaan masyarakat dan gampong

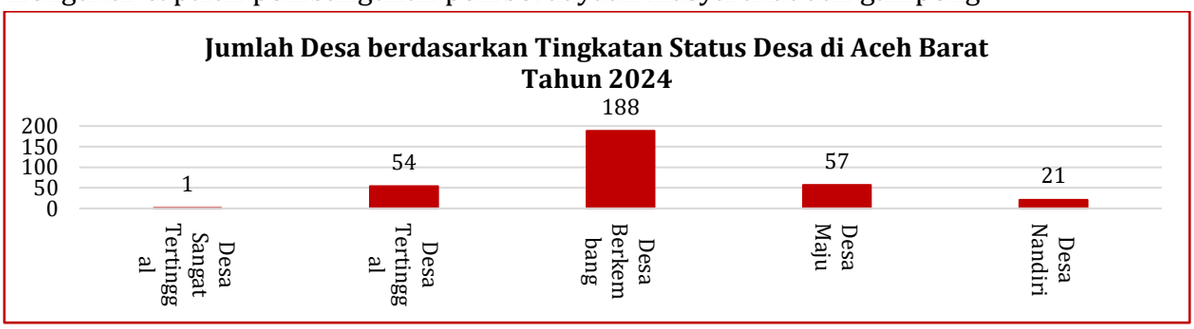

Gambar 2.63
Jumlah Desa Berdasarkan Tingkatan Status Desa di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

6.15. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara keseluruhan, indikator-indikator yang menggambarkan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Aceh Barat sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan persentase yang terjadi di hampir seluruh indikatornya. Sebagai contoh, indikator cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik memiliki persentase sebesar 90,06% pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2022 mencapai 100%. Data Indikator pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Aceh Barat ditunjukkan pada Tabel 2.80 di bawah ini.

Tabel 2.80 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	90,06	96,27	99,68	100	100*
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	13,84	14,12	14,40	15,00	15.1*
Persentase PKK aktif	Persen	100	100	95	85	85.5*
Persentase Posyandu aktif	Persen	95	100	95	95	96*
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	38	25	60	62	66.4*
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	68	60	63	90	82.7*
Jumlah BUMG yang aktif	Unit	100	60	59	93	65.9*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

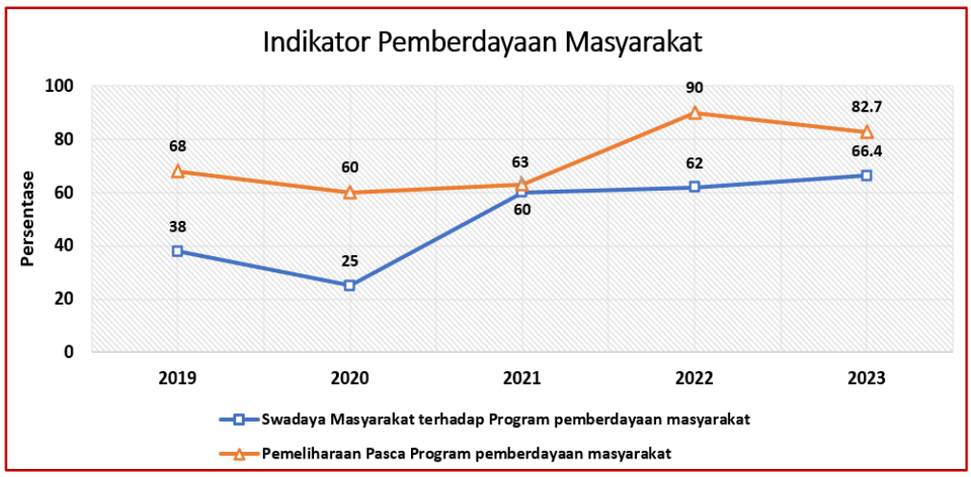

Gambar 2.64
Indikator Pemberdayaan Masyarakat di Aceh Barat

7. Stabilitas Ekonomi Makro

Kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, setta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam membangun kebijakan pro stabilitas, pro pertumbuhan dan pro pemerataan.

7.1. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mengurangi daya beli uang, artinya setiap unit mata uang akan membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Penyebab inflasi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu inflasi permintaan *(demand-pull inflation)* dan inflasi biaya *(cost-push inflation*). Inflasi permintaan terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian melebihi penawaran agregat, biasanya akibat pertumbuhan ekonomi yang cepat, peningkatan belanja konsumen, atau kebijakan moneter ekspansif. Di sisi lain, inflasi biaya disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja, yang kemudian diteruskan ke harga konsumen.

Dampak inflasi terhadap perekonomian dapat bervariasi. Pada tingkat moderat, inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan insentif bagi produsen untuk meningkatkan output. Namun, inflasi yang terlalu tinggi atau hiperinflasi dapat merusak ekonomi, menyebabkan ketidakpastian yang tinggi, menurunkan investasi, dan mengikis tabungan masyarakat. Bank sentral biasanya menggunakan kebijakan moneter, seperti mengatur suku bunga dan mengendalikan jumlah uang beredar, untuk mengelola tingkat inflasi agar tetap dalam kisaran yang stabil dan dapat diterima. Stabilitas inflasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Peraturan ini menetapkan target inflasi tahunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun tersebut. Berdasarkan peraturan ini, target inflasi untuk tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 3%, sementara untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,5%, dengan deviasi sebesar 1%. Sementara Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

Berdasarkan peraturan ini, target inflasi untuk tahun 2025 dan 2026 adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen), sedangkan untuk tahun 2027 ditargetkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dengan deviasi sebesar 1,0% (satu koma nol persen). Peraturan ini diundangkan untuk memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan dan pelaku pasar dalam menjaga tingkat inflasi yang stabil dan rendah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Berdasarkan literature ilmiah, tingkat inflasi yang ideal berada dalam kisaran 2 sampai 3 persen per tahun. Inflasi dalam kisaran ini dianggap dapat menciptakan kestabilan harga karena dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa tidak berfluktuasi secara drastic, masyarakat lebih cenderung untuk berbelanja dan berinvestasi. Selain itu, stabilitas harga memudahkan perencanaan bisnis dan investasi jangka panjang, karena perusahaan dapat memperkirakan biaya dan pendapatan dengan lebih akurat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perkembangan tren inflasi baik di tingkat daerah, Provinsi dan Nasional telah mengalami kemajuan walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.65 di bawah ini yang menunjukkan penurunan inflasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 antara lain:

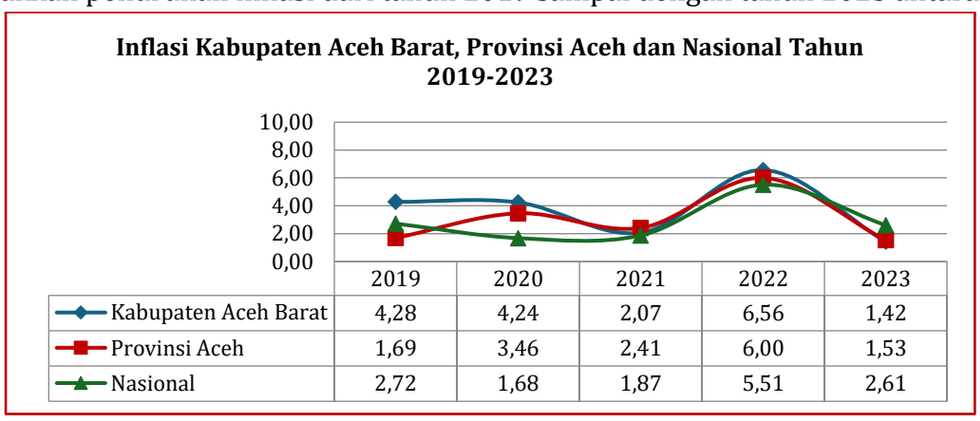

	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Aceh Barat	4,28	4,24	2,07	6,56	1,42
Provinsi Aceh	1,69	3,46	2,41	6,00	1,53
Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024

Gambar 2.65
Inflasi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar di atas grafik inflasi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan nasional untuk periode 2019-2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan di antara ketiga wilayah tersebut. Pada tahun 2019, inflasi di Kabupaten Aceh Barat tercatat sebesar 4.28%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh yang sebesar 1.69% dan nasional sebesar 2.72%. Pada tahun 2020, inflasi di Kabupaten Aceh Barat sedikit menurun menjadi 4.24%, sementara Provinsi Aceh dan nasional mengalami peningkatan menjadi 3.46% dan 1.68% masing-masing. Peningkatan inflasi di tingkat provinsi dan nasional bisa disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas dan dampak awal pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, inflasi di Kabupaten Aceh Barat turun drastis menjadi 2.07%, sementara inflasi di Provinsi Aceh juga menurun menjadi 2.41% dan nasional sedikit meningkat menjadi 1.87%. Penurunan inflasi ini disebabkan oleh penurunan permintaan agregat akibat pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi. Namun, pada tahun 2022, inflasi mengalami lonjakan signifikan di semua wilayah, dengan Kabupaten Aceh Barat mencapai 6.56%, Provinsi Aceh 6.00%, dan nasional 5.51%. Lonjakan ini dapat distribusikan pada kenaikan harga energi dan bahan makanan, serta gangguan rantai pasokan global yang memperburuk situasi pasca-pandemi. Pada tahun 2023, inflasi di Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh turun tajam menjadi 1.42% dan 1.53% masing-masing, sedangkan nasional turun menjadi 2.61%. Penurunan ini mencerminkan upaya pemulihan ekonomi

yang lebih stabil, perbaikan rantai pasokan, serta langkah-langkah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Secara keseluruhan, variasi inflasi per tahunnya dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk dinamika harga energi, perubahan dalam permintaan dan penawaran agregat, serta kebijakan ekonomi dan moneter yang diterapkan di masing-masing wilayah.

D. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, aspek pelayanan umum terdiri dari empat bagian yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pelayanan pilihan, dan urusan penunjang. Indikator dari seluruh aspek pelayanan umum akan dijelaskan pada sub-bab berikut ini.

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan, pengelolaan sektor publik yg efisien, efektif, akuntable didasarkan pada pertukaran informasi yg terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum:

1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi hukum oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembaruan hukum dilakukan secara terukur, sistematis, transparan, dan berorientasi pada hasil. Indeks Reformasi Hukum bukan sekadar angka, tapi menjadi cerminan kualitas tata kelola hukum dalam birokrasi. Melalui IRH, pemerintah pusat maupun daerah bisa memperbaiki proses hukum agar lebih sederhana, akuntable, terintegrasi dan partisipatif. Reformasi hukum menjadi area perubahan utama dalam Reformasi Birokrasi. IRH dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, Menjadi dasar alokasi anggaran bidang hukum, Evaluasi keberhasilan tata kelola pemerintahan berbasis hukum dan Bahan evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP seperti penyusuna naskah akademik, peneraan sistem jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum maupun adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat

Penilaian Kabupaten Aceh Barat terkait indeks Reformasi Hukum baru dilakukan pada tahun 2023. nilai capaian indeks yg diperoleh meningkat secara signifikan pada tahun 2024 nilai indeks Reformasi Hukum di Aceh Barat mendapatkan kategori BB (Baik) seperti pada tabel 2.81 dibawah ini

Tabel 2.81 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2024

Uraian	Satuan	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	Indeks	55	76,48

1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan alat ukur kinerja digitalisasi pemerintahan. Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah mengembangkan dan menerapkan sistem digital dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan administrasi internal secara efektif, efisien, dan

terintegrasi. Berdasarkan PermenPANRB No. 59 tahun 2020 Tentang Struktur dan Penialain SPBE, bahwa penilaian SPBE terdiri dari 4 domain utama yaitu kebijakan internal SPBE, Tata kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE yang dibagi menjadi 8 aspek, dan selanjutnya menjadi 47 indikator penilaian. SPBE ini bukan hanya sekedar kebijakan namin terdapat perencanaan, kelembagaan, Manajemen Resiko, SDM, Anggaran, Pengelolaan layanan dan penyelenggaraan layanan berbasis elektronik yang diterapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Indeks SPBE adalah kunci menuju pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan responsif. Sehingga indikator yang ada ialah sebagai panduan transformasi kelembagaan berbasis digital. Kabupaten Aceh Barat melalui 100 program Bupati Aceh Barat Tahun 2025-2029 telah merencanakan program PESAT (Pemerataan Sistem Akses Internet) untuk medukung Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 2.82 Indeks SPBE Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	N/A	N/A	2,00	N/A	2,63

1.3. Indeks Pelayanan Publik

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Tabel 2.83 Target Indeks Pelayanan Publik Kab. Aceh Barat Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	N/A	B	B	B

1.4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa mayoritas penduduk sudah memiliki KTP. Hal tersebut dilihat dari rasio penduduk ber-KTP yang mencapai 0,98 pada tahun 2023. Peningkatan kinerja cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Aceh Barat juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan persentase indikator tersebut yang mencapai 95% pada tahun 2022 dan diprediksi terus meningkat pada tahun 2023 mencapai 97,3%. Data Indikator administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.84 di bawah ini.

Tabel 2.84 Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,86	0,97	0,97	0,97	0.98
Rasio bayi berakta kelahiran	Rasio	0,65	0,7	0,9	0,97	0.96
Rasio pasangan berakta nikah	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A	
Ketersediaan *database* kependudukan skala provinsi	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada*
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah*
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	93,65	93,65	93,85	94,05	94.1*
Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	87,00	90,00	92,00	95,00	97.3*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

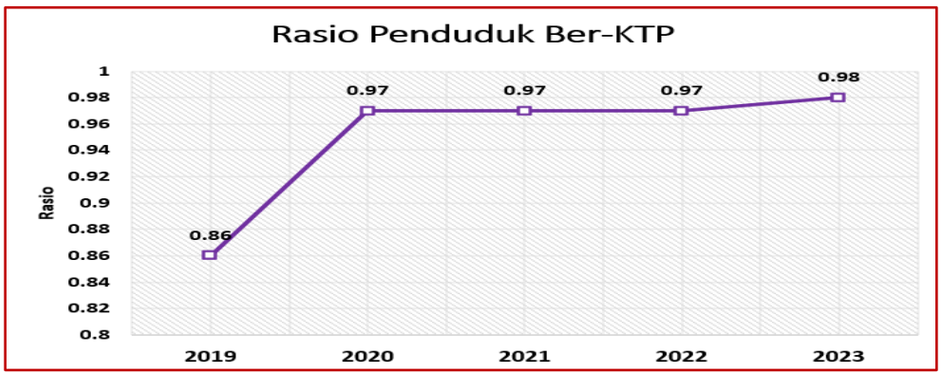

Gambar 2.66
Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Aceh Barat

1.5. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah alat ukur untuk menilai tingkat integritas lembaga pemerintahan dan aktor kunci di Indonesia, yang mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuanya ialah untuk mengukur risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintah, mendorong budaya integritas dan antikorupsi, dan menjadi dasar rekomendasi perbaikan tata kelola dan layanan publik, serta memperkuat akuntabilitas dan pengawasan internal. Penyediaan layanan yang transparan dan mudah diakses, berkeadilan, pungutan liar, adanya akntabilitas. Setiap pejabat publik wajb untuk melaporkan harta kekayaan atau LHKPN, dan setiap OPD dialukan audit secara berkala oleh lembaga berwenang, serta melakukan penilaian msyarakat melalui survei berkala. Dalam hal ini Pemerinta Aceh barat pada tahun 2025 melakukan program PELITA yaitu Pemerintah yang Melayani, Akuntabel, dan Transparan) untuk mendukung integritas nasional.

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi subtansial yang mengeban amanat rakyat. Tujuannya ialah untuk Mengukur risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintah, Mendorong budaya integritas dan antikorupsi

2.1. Persentase Penegakan Perda

Proses pelaksanaan, pengawasan, dan penerapan sanksi atas ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan kepatuhan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terhadap norma hukum di daerah. PERDA adalah produk hukum daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, dibentuk oleh DPRD bersama Kepala Daerah yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam wilayah hukum daerah tersebut. Tujuan penegakan PERDA ini ialah untuk menjamin ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan otoritas hukum daerah, memberikan efek jera terhadap pelanggaran, menumbuhkan budaya taat hukum dan juga mendukung implementasi kebijakan publik daerah. Pada penegakan Perda ini diperlukan tindakan pencegahan melalui sosialisasi maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat, hal tersebut searah dengan program AKUA (Advokasi Hukum untuk nelayan).

Adapun tindakan respresif yaitu penindakan seperti yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban, juga berkoordinasi dengan kepolisian serta kejaksaaan.

2.2. Persentase pencapaian Aksi HAM

Persentase Pencapaian Aksi HAM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sesuai target dan waktu yang ditentukan. Indikator ini menjadi salah satu alat evaluasi implementasi HAM oleh pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang RANHAM Tahun 2021–2025. Aksi HAM merupakan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, melaksanakan RANHAM yang ditetapkan pemerintah pusat dan melakukan pelaporan capaian pelaksanaan ke Kementerian Hukum dan HAM secara berkala . Adapun 4 kelompok sasaran utama pada RANHAM yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Presentasae pencapaian aksi HAM ini menjadi bahan pelaporan capaian RANHAM untuk menjadi komponen penilaian bagi daerah dalam meraih penghargaan kapupaten/kota peduli HAM.

Aksi HAM yang dilaukan ditiingkat pmerintah daerah seperti pembentukan regulasi ramah HAM, sosialisasi dan edukasi HAM, peningkatan akses layanan publik, ataupun penanganan kasus HAM di daerah. Proses aksi HAM didaerah disusun dengan diawali oleh perencanaan, pelaksanaan oleh OPD teknis, pelaporan pada aplikasi e-RANHAM, lalu pihak kemenkumham melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan yang diberikan, kemudian hasil laporan dipublikasikan melalui portal resmi RANHAM https://ranham.kemenkumham.go.id.

2.3. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Dalam Negeri, untuk menggambarkan tingkat perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia. Meskipun tidak terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang IDI, namun pelaksanaannya mengacu pada kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menetapkan IDI sebagai indikator pembangunan politik nasional. IDI dihitung dan dipublikasikan setiap tahun berdasarkan data dari tahun sebelumnya. IDI mencerminkan kondisi demokrasi di tingkat provinsi, bukan di tingkat kabupaten/kota, namun pemerintah kabupaten/kota dapat menjadikan angka IDI sebagai rujukan dan acuan dalam memperbaiki kualitas demokrasi di wilayahnya. Tujuan IDI ialah untuk mengukur kemajuan demokrasi secara objektif di tingkat daerah, menjadi rujukan evaluatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat demokratisasi, menjadi alat perbandingan antarprovinsi untuk mendorong perbaikan kebijakan, dan memberi masukan dalam penyusunan program prioritas di bidang politik dan HAM. Terdapat 3 aspek utama dalam IDI yaitu Aspek kebebasan sipil, Aspek Hak-Hak Politik, dan Aspek lembaga demokrasi. Setiap aspek memiliki variabel dan indikator masing, seperi yang terurai dalam tabel berikut:

Tabel 2.85 Tabel Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh Tahun 2019-2023

No.	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia	Tahun		Aspek Indeks Demokrasi Indonesia	Tahun		
		2019	2020		2021	2022	2023
1.	Aspek Kebebasan Sipil	93,28	84,49	Aspek Kebebasan	85,5	84,66	77,48
2.	Aspek Hak-hak Politik	65,22	64,94	Aspek Kesetaraan	81,41	80,18	83,74
3	Aspek Lembaga Demokrasi	79,08	74,91	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,82	77,9	76,46
	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	78	73,93	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	80,92	80,82	77,53

2.4. Indeks Rasa Aman

Indikator yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mengukur tingkat persepsi masyarakat terhadap rasa aman dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keamanan yang dirasakan oleh warga, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik yang responsif dan tepat sasaran. Indeks Rasa Aman biasanya mencakup beberapa dimensi utama yang mencerminkan berbagai aspek keamanan dalam kehidupan masyarakat, seperti : Keamanan dari Kekerasan dan Kriminalitas, Keamanan dari Bencana Alam, keamanan dalam kebhinekaan seperti budaya maupun agama.

2.5. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (K3P) merupakan konsep yang sering digunakan dalam hukum dan pemerintahan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Konsep tersebut mencakup berbagai aspek yang berfungsi untuk melindungi warga negara, mencegah kerusuhan dan kejahatan, serta menjaga ketenangan dan kesejahteraan sosial. Beberapa indikator yang menunjukkan tren meningkat dari tahun 2019-2023 yaitu Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan), Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Persentase Penegakan PERDA, Rasio Sekolah Siaga Bencana, Jumlah Desa Tangguh dan Jumlah Relawan Bersertifikasi. Gambaran umum mengenai K3P di Kabupaten Aceh Barat ditunjukkan oleh indikator-indikator yang disajikan dalam Tabel 2.86 di bawah ini.

Tabel 2.86 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	0,0016	0,0026	0,0036	0,0046	0.007*
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	91	92	93	94	95*
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	50	70	80	100	100*
Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	90	92	93	94	99*
Persentase Penegakan PERDA	Persen	91	92	93	94	95*
Rasio Sekolah Siaga Bencana	Persen	85	87	89	90	92*
Jumlah Desa Tangguh	Desa	193	203	213	223	8
Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	2,1	2,15	2,2	2,25	2.3*

Sumber: RKPD Kabupaten Aceh Barat
*Keterangan: *Angka Proyeksi Data Tahun 2018-2022*

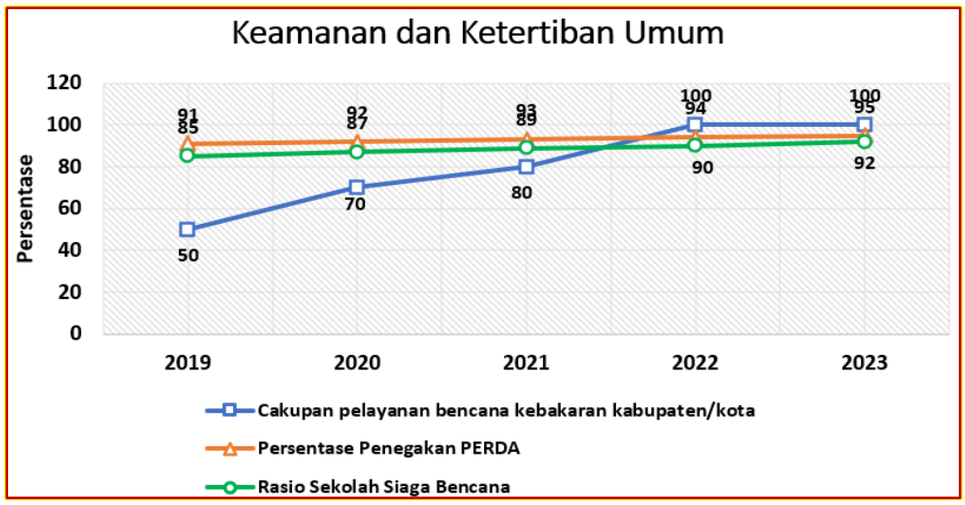

Gambar 2.67
Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Aceh Barat

2.6. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas mengacu pada statistik yang mengukur jumlah kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu. Angka kriminalitas digunakan untuk merancang strategi penanggulangan kejahatan yang ada pada suatu wilayah. Perhitungan angka kriminalitas berikut ini diperoleh dari rasio antara jumlah tindak pidana menurut kepolisian di Kabupaten Aceh Barat dengan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan BPS Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 hingga 2024, total jumlah tindak pidana menurut sektor kepolisian memiliki pola yang berfluktuatif. Jumlah tindak pidana tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah 306 tindak pidana. Sementara angka terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 145 kasus. Jumlah tindak pidana yang ada di Kabupaten Aceh Barat berbanding lurus dengan angka kriminalitasnya. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.87 berikut.

Tabel 2.87 Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Kepolisian Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Johan Pahlawan	163	145	156	179	240
Samatiga	10	7	14	11	11
Bubon	2	0	0	0	0
Arongan Lambalek	8	0	0	0	0
Woyla	10	2	8	2	17
Woyla Barat	3	0	2	5	7
Woyla Timur	0	0	1	0	1
Kaway XVI	12	1	8	9	17
Meureubo	18	11	20	11	10
Pante Ceureumen	0	2	0	0	2
Panton Reu	0	0	0	1	0
Sungai Mas	1	0	1	2	1
Total	227	168	210	220	306
Jumlah penduduk	198736	200579	202858	205108	209220
Angka Kriminalitas	**11,42**	**8,38**	**10,35**	**10,7**	**14,6**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertanahan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan.

3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat diartikan sebagai instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global (BRIN 2023). IDSD dirancang berdasarkan 12 aspek utama dalam daya saing wilayah yang diturunkan dari Indeks Daya Saing Global. Setiap aspek tersebut kemudian diukur melalui berbagai indikator, seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, akses pasar, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Perhitungan skor IDSD dilakukan dengan standarisasi data dari seluruh Indikator ini, yang kemudian di satukan menggunakan rata-rata aritmetika.

Berikut ini disajikan nilai IDSD Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional dalam Tabel 2.88. Nilai IDSD Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023 yaitu 3,04. Sementara untuk Provinsi Aceh nilainya lebih tinggi dari Kabupaten Aceh Barat sebesar 3,49. Namun nilainya masih lebih rendah dibandingkan IDSD Nasional yaitu 3,44. Semakin tinggi nilai indeks daya saing sebuah daerah, semakin baik kemampuan daerah tersebut untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, nilai rendah dalam indeks daya saing bisa menunjukkan adanya hambatan atau kelemahan yang perlu diperbaiki.

Tabel 2.88 IDSD Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar			Ekosistem Inovasi			Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Provinsi Aceh	4,18	2,78	2,93	3,45	3,77	4,13	4,44	3,51	2,27	4,33	2,97	3,16	3,49
Aceh Barat	4,16	1,64	3,66	3,16	3,7	3,68	2,24	2,95	0,82	3,99	4,6	1,88	3,04

Keterangan: Pilar 1: Institusi, Pilar 2: Infrastruktur, Pilar 3: Adopsi TIK, Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro, Pilar 5: Kesehatan, Pilar 6: Keterampilan, Pilar 7: Pasar produk, Pilar 8: Pasar tenaga kerja, Pilar 9: Sistem keuangan, Pilar 10: Ukuran pasar, Pilar 11: Dinamisme bisnis, Pilar 12: Kapabilitas inovasi

3.2. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi *What-If* Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Kota Se Aceh 2023 (Metode Asia *Competitive* Index NUS), jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Barat dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kabupaten Aceh Barat yang pada Tahun 2023 berada pada posisi 5 akan meningkat menjadi peringkat 3 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 1,147.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- Mengendalikan inflasi dan dampak peningkatan inflasi bagi perekonomian dengan upaya, sebagai berikut: melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor, kerja sama dengan antar daerah, gerakan menanam, merealisasikan Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD;

- Meningkatkan standar regulasi dan penegakan hukum, salah satunya dengan penyelesaian kasus kriminalitas, sosialisasi dan mengikutsertakan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas;
- Meningkatkan infrastruktur teknologi akses internet dengan upaya membangun jaringan internet yang merata bekerja sama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kemenkominfo) untuk peningkatan jaringan perluasan cakupan jaringan fiber optik.

4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintah daerah berupa Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 tahun terakhir.

Tabel 2.89 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	1,87	5,67	3,32
2	Pengendalian Laju Inflasi	Persen	4,24	2,08	6,56
3	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	18,34	18,81	17,93
4	Persentase balita gizi buruk (Stunting)	Persen	0,02	0,38	30,4
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,3	7,09	6,09
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,17	86,21	80,24
7	Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP/ WTP	WTP	WTP	WTP
8	Angka melek huruf	Persen	100	97,71	98,69
9	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,1	9,55	9,87
10	Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi / nasional/ Internasional	Atlet	10	25	77
11	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	67,98	67,98	68,19
12	Persentase Dayah yang Berkualitas	Persen	19,4	19,4	100
13	Angka Kematian bayi	/1000 kelahiran hidup	12	27	19
14	Angka Kematian Ibu	/100.000 kelahiran hidup	214/ 7 kasus	125/5 Kasus	236/8 Kasus
15	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	51,25	52,31	56,74
16	Persentase penduduk berakses air minum layak	Persen	64,09	64,2	65,32
17	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Persen	86,3	87	87,83
18	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	Persen	92	105	100
19	Rasio Linmas Persatuan Penduduk	Rasio	0,0026	0,0036	0,0049
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	59,41	59,41	57,4
21	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	81,85	54,74	70
22	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	87,61	88,98	89,7
23	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	3,39	5,95	5,95
24	Indeks Risiko Bencana	Indeks	142	179,15	179,15
25	Jumlah Destinasi Wisata Spiritual yang dikembangkan	lokasi	2	2	2
26	Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	60	80,5	100
27	Produksi Komoditi Unggulan	Ton	36.223,73	112.915,54	61.039

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
28	Produkvitas Padi atau bahan utama lainnya	Ton/Ha	4,71	25,49	6,89
29	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	Persen	63,75	9	92
30	Produksi perikanan	Ton	20.488	20.300	21.595
31	Produksi Daging Pertahun	Kg	501.970	1.018.512	960.535
32	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	19	19	22
33	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	18	14	8
34	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	12,17	12,11	8,5
35	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi
36	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	79,99	B	B
37	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,03	58,47	59,34
38	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	Inovasi	6,67	6,67	17
39	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman	Nilai	95,95	95,95	84,92
40	Nilai Tukar Petani	Persen	46,98	0	110,18
41	Desa Swasembada Pangan	Persen	17	21	21
42	Pengembangan Kapasitas SDM Korban Konflik/Mantan Kombatan	Orang	291	0	0
43	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Persen	66,67	58,97	90

Tabel 2.90 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun	
			2023	2024
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	159,02	74,24
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,93	94,72
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	37,29	105,35
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,09	99,16
5	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	indeks	Tinggi	100,00
6	Cakupan Wilayah Pelaksanaan Pemilihan yang Aman dan Lancar	Persen	0	100,00
7	Indeks Pembangunan Syariah (IPS)	Indeks	84,13	101,79
8	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,95	98,83
9	Persentase tenaga pendidik SD bersertifikasi	Persen	18,87	110,29
10	Persentase tenaga pendidik SMP bersertifikasi	Persen	17,56	70,61
11	Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	Persen	99,46	99,00
12	Jumlah SD yang memiliki minimal 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	Persen	76,00	98,55
13	Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	Persen	74,15	84,00
14	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	Persen	75,57	95,00
15	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1	Persen	75,57	95,00

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun	
			2023	2024
	atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris			
16	Rata-rata jumlah jam mengajar	Persen	81,38	96,67
17	Jumlah SD yang memenuhi standar sarana prasarana pembelajaran	Persen	81,93	93,75
18	Jumlah SMP yang memenuhi standar sarana prasarana pembelajaran	Persen	92,42	90,00
19	Jumlah SMP yang memiliki ruang laboratorium IPA dan peralatannya sesuai standar	Persen	85,00	93,85
20	Rasio dokter umum per satuan penduduk (50 per 100.000 penduduk)	Rasio	1,06	153,57
21	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk (12 per 100.000 penduduk)	Rasio	1,58	24,06
22	Rasio bidan per satuan penduduk (130 per 100.000 penduduk)	Rasio	3,40	328,79
23	Rasio petugas penyuluh kesehatan per satuan penduduk (18 per 100.000 penduduk)	Rasio	1,14	86,36
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78,43	116,60
25	Jumlah tenaga kesehatan bersertifikasi	Persen	86,00	103,52
26	Jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	Persen	15,38	190,64
27	Jumlah rumah sakit yang terakreditasi madya	Persen	100,00	100,00
28	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,25	56,82
29	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	Persen	30,77	3,06
30	Persentase masyarakat miskin pada kuintil 1-3	Persen	N/A	N/A
31	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	114,34	122,81
32	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	111,01	100,00
33	Jumlah kelompok masyarakat siaga bencana	Kelompok	10	0,00
34	Cakupan sarana prasarana kebakaran	Persen	58,00	111,11
35	Cakupan sarana prasarana bencana banjir dan tsunami	Persen	42,0	96,15
36	Jumlah satgas kebencanaan	Petugas	1	300,00
37	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,66	103,95
38	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	62,5	82,47
39	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan	Perusahaan	9	257,14
40	Persentase penurunan luas areal lahan yang terbakar setiap tahun	Persen	N/A	N/A
41	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan yang dibentuk	Kelompok	3	200,00
42	Jumlah Konsumsi/Pengeluaran Makanan	Rupiah	847.242	108,52
43	Jumlah Konsumsi/Pengeluaran Non-Makanan	Rupiah	677.221	82,64
44	Jumlah proporsi belanja di sektor riil	Rupiah (Milyar)	80,77	298,01
45	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi	Persen	102,72	478,52
46	Jumlah IKM di kategori hilir	IKM	62	1.020,00
47	Persentase peningkatan cakupan pelayanan dasar	Persen	78,35	100,00
48	Persentase peningkatan cakupan sumber daya air pertanian	Persen	33,05	100,00
49	Jumlah trayek angkutan penumpang antar kecamatan	Trayek	0	0,00
50	Persentase usulan masyarakat yang tertampung dalam perencanaan dan penganggaran	Persen	71,61	198,37
51	Jumlah MoU TJSLP antara pemerintah daerah dan perusahaan	MoU	12	85,71

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun	
			2023	2024
52	Persentase tenaga kerja dilatih yang lulus uji kompetensi	Persen	0,00	200,60
53	Jumlah media penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan	Media	2	66,67
54	Jumlah UMKM/IKM	UMKM/IKM	5.332	174,71
55	Skor Kompetensi ASN	Persen	8,09	119,25
56	Jumlah peraih medali	Medali	0	1009,09
57	Jumlah pemuda/i yang berprestasi	Orang	19	100,00
58	Persentase unsur pemerintahan gampong yang mengikuti pembinaan nilai-nilai Pancasila	Persen	71,99	70,00
59	Indeks Inovasi Daerah (IID)	indeks	Inovatif	100,00
60	Indeks SPBE	Indeks	2,63	116,96
61	Opini BPK	WTP/WDP	WTP	N/A
62	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B-	100,00
63	Level Maturitas SPIP	Level	3	100,00
64	Indeks Kapabilitas APIP	Indeks	3	100,00
65	Jumlah koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif	Kali	6	100,00
66	Jumlah pelanggaran ringan selama pemilihan	Kasus	0	100,00
67	Jumlah kelompok sosial keagamaan	Kelompok	476	101,23
68	Jumlah pelanggaran syariat islam	Kasus	252	251,90
69	Jumlah dayah yang mendapat bantuan dana dari Provinsi	Dayah	30	105,26
70	Jumlah guru dayah mengajar di sekolah formal	Guru	52	85,19
71	Jumlah masjid yang melaksanakan fungsi idarah sesuai klasifikasinya	Masjid	238	97,63
72	Jumlah masjid yang melaksanakan fungsi imarah sesuai klasifikasinya	Masjid	200	100,00
73	Jumlah masjid yang melaksanakan fungsi ri'ayah sesuai klasifikasinya	Masjid	254	92,88
74	Ketersediaan pangan per kapita	kg/tahun/ kapita	191,30	74,98
75	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok	Persen	9,1	100,00
76	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	82,5	107,58

Tabel 2.91 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2022

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	PDRB per kapita	Persen	0	37,95	37,93	Seluruh OPD
2	Indeks Gini	Indeks	0,304	0,295	0,265	Seluruh OPD
3	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Persen	N/A	N/A	N/A	Seluruh OPD
4	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	0	39830	38.460	Seluruh OPD
5	Rasio kesenjangan kemiskinan	Rasio	0	0		Seluruh OPD
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,38	71,67	72,34	Seluruh OPD
1	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	4,6	1,35	1,28	Dinas Kesehatan
2	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	18,2	39,79	41,74	Dinas Kesehatan
3	Jumlah Pengangguran	Orang	6.777	6.777	5.706	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	92,7	92,91	N/A	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
5	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	89,11	92,18	97,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
6	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	9,4	8,39	13,02	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Ketersediaan cadangan pangan Daerah	Ton	102	106	4	Dinas Pangan
8	Penanganan daerah rawan pangan	Desa	15	25	12	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
9	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	0	0	26,05	Dinas Perkebunan dan Peternakan
10	Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	13.467	47.956	15.767	Dinas Perkebunan dan Peternakan
11	Produksi sektor perkebunan (Karet)	Ton	22.760	58.664	42.753	Dinas Perkebunan dan Peternakan
12	Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Ton	1.726	5.790	2.200	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13	Produksi sektor perkebunan (Pinang)	Ton	253	506	319	Dinas Perkebunan dan Peternakan
14	Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong)	Kg	0	7.089	8.779	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
15	Produksi Sektor Peternakan (Kerbau)	Kg	0	21.517	24.564	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
16	Produksi Sektor Peternakan (Kambing)	Kg	0	10.761	10.910	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
17	Produksi Sektor Peternakan (Domba)	Kg	0	821	879	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
18	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,3	13,56	11,99	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	2,13	0,4	1,84	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
20	Pertumbuhan Industri	Persen	3,5	4,36	1,68	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	N/A	N/A	N/A	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
22	Nilai Pencegahan Kasus Korupsi	Nilai	N/A	N/A	N/A	Inspektorat
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	0	0	N/A	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	0	7,54	43,85	Dinas Pangan

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
3	Produktivitas total daerah	Persen	0	0		Seluruh OPD
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0	0		Seluruh OPD
5	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	0	0		Seluruh OPD
6	Rasio ketergantungan	Persen	0	0		Seluruh OPD
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
3.1	**Layanan Urusan Wajib Dasar**					
3.1.1	**Pendidikan**					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK PAUD	Persen	54,47	54,47	54,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase PAUD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	Persen	43	43	92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Angka partisipasi kasar					
	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	Persen	111,43	105,31	105,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	109,21	88,17	92,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Angka pendidikan yang ditamatkan					
	Tamat SD dan SLTP	Persen	0	0	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	95,63	99,56	99,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	86,06	88,17	88,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Angka Partisipasi Sekolah					
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,94	99,56	99,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,84	98,26	98,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Angka Putus Sekolah:					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,06	0,06	0,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,02	0,02	2,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Angka Kelulusan:					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTsN	Persen	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Angka Melanjutkan (AM):					
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	106,75	106,75	54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	99,88	99,88	121,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat dan	Orang	0	0	465	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
	Tahunan bagi guru dan pengawas sekolah jenjang TK- SD-SMP					
	Fasilitas Pendidikan:					
10	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	81,93	81,93	81,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	92,42	92,42	92,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	46,7	46,7	46,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	0	0	7,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	0,06	0,06	15,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio	97,71	97,71	7,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	0	0	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki	Persen	100	97,71	98,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,02	99,02	98,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	0	0	39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Persentase sekolah yang terakreditasi A	Persen	16,3	3,85	3,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Kategori Nilai Ujian UAN tingkat SMA/SMK/MA Rata-rata (A,B,C dan D)	Kategori	0	0	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Persentase tingkat kelulusan UN tingkat nasional	Persen	99,1	99,1	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Persen	100	85	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Persentase Guru Bersertifikasi	Persen	51	51	53,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Jumlah sekolah ramah anak (SD)	Unit	15	15	33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Jumlah sekolah ramah anak (SMP)	Unit	16	16	29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.1.2	**Kesehatan**					
1	Penurunan Peringkat Daerah Bermasalah Kesehatan	Peringkat	0	0	N/A	Dinas kesehatan
2	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 kelahiran hidup	988	973	980,2	Dinas kesehatan
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	12	2	19,8	Dinas kesehatan

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 kelahiran hidup	9	14	13,3	Dinas kesehatan
5	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	61,56	20,17	21,51	Dinas kesehatan
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,32	0,65	0,69	Dinas kesehatan
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,72	0,03	Dinas kesehatan
8	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,36	0,78	0,8	Dinas kesehatan
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	10	11,17	11,3	Dinas kesehatan
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	33	78,02	100	Dinas kesehatan
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	75	78	100	Dinas kesehatan
12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	17	92,3	14,33	Dinas kesehatan
13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	Dinas kesehatan
14	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	32,8	30,5	72,91	Dinas kesehatan
15	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	30,2	30,2	N/A	Dinas kesehatan
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	50	100	100	Dinas kesehatan
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	45	3,13	100	Dinas kesehatan
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	34	20,7	33,85	Dinas kesehatan
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	2	1,9	2,38	Dinas kesehatan
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	Persen	34	20,7	23,4	Dinas kesehatan
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	94,5	76	79,35	Dinas kesehatan
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	Dinas kesehatan
23	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	Dinas kesehatan
24	Angka kejadian Malaria	Persen	0	0	0	Dinas kesehatan
25	Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0	0	0	Dinas kesehatan
26	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan	Persen	0	0	0	Dinas kesehatan

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
	obat anti malaria yang tepat					
27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	80,27	95,66	0	Dinas kesehatan
28	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	48,5	48,5	48,5	Dinas kesehatan
29	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	19,18	Dinas kesehatan
30	Cakupan kunjungan bayi	Persen	32,82	64,4	100	Dinas kesehatan
31	Cakupan puskesmas	Persen	108	108	108,33	Dinas kesehatan
32	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	15,8	0,02	14,5	Dinas kesehatan
33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	70	74	85,33	Dinas kesehatan
34	Cakupan pelayanan nifas	Persen	63	63	100	Dinas kesehatan
35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	38,41	64	100	Dinas kesehatan
36	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	76,74	94,92	51,59	Dinas kesehatan
37	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	64,09	85	78,5	Dinas kesehatan
38	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	Dinas kesehatan
39	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	35	100	100	Dinas kesehatan
40	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Persen	100	100	100	Dinas kesehatan
41	Cakupan tempat pengelolaan makanan sesuai dengan standar kesehatan	Persen	138	75	100	Dinas kesehatan
42	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	80,1	100	130,35	Dinas kesehatan
43	Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas	Persen	100	100	100	Dinas kesehatan
44	cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional	Persen	100	100	100	Dinas kesehatan
45	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persen	100	0	80	RSUD Cut Nyak Dien
46	Peningkatan kelas Rumah Sakit menjadi Kelas B Pendidikan	kategori	B Pendidikan	B Pendidikan	B	RSUD Cut Nyak Dien
47	Akreditasi pelayanan rumah sakit	kategori	Dasar Terverifikasi	Bintang Dua	Bintang Dua	RSUD Cut Nyak Dien
3.1.3	**Pekerjaan Umum**					

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,53	0,52	0,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,009	0,009	0,008	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	1	0,65	0,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air(minimal 1,5m)	Persen	17,87	17,9	17,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,38	0,37	0,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen	0,88	0,65	0,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	44,2	45,5	47,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	16,8	17,5	18,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	20,32	17,5	28,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Rasio Jaringan Irigasi dengan luas area sawah terairi	Rasio	0,203	0,2	0,211	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	1295	1295	1847	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	64,09	64,09	65,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Unit	2	3	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Rasio Pelaku Jasa Konsruksi bersertifikasi	Rasio	0,33	0,295	0,295	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.4	**Penataan Ruang**					
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,49	0,49	0,285	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	0,021	0,0211	0,0215	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
4	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,67	0,67	0,615	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	75	80	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.5	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**					
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,74	0,74	0,76	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,27	0,27	0,31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	79	79	73,51	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	62	64	59,43	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	0	75,36	73,05	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0	0,03	0,03	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	0	0,01	0,01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	0	1,7	2,81	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	0	108,33	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	0	0	N/A	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	0	0	N/A	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Jumlah Desa Terpencil	Desa	0	0	N/A	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0	0	N/A	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.1.6	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	60	53,33	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	92	62	40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
3	Persentase Penegakan PERDA	Persen	92	93	95	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
4	Jumlah Satuan Linmas setiap Gampong	Orang	532	963	963	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
5	Rasio Sekolah Siaga Bencana	Persen	0	0	15	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Jumlah Desa Tangguh	Desa	10	10	10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	0	0	4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Jumlah Kasus Kebakaran Lahan	Kasus	8	0	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali Patroli dalam sehari	3	3	3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
10	Jumlah poskamling aktif	Unit	321	321	321	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
11	Cakupan razia penegakan syariat islam (maksiat dan pelanggaran etika dalam masyarakat)	Persen	92,78	100	98	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
12	Kasus pelanggaran syariat	Kasus	18	14	8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
13	Persentase penegakan qanun syariat islam	Persen	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
3.1.7	**Sosial**					
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	66,02	30,6	33	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	73,81	65	85	Dinas Sosial
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	1,47	31	33	Dinas Sosial
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	50	80,01	80	Dinas Sosial
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	70	70,48	95	Dinas Sosial
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	70,16	69,19	100	Dinas Sosial
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	Persen	63,59	49,98	55	Dinas Sosial

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
	yang telah menerima jaminan sosial					
3.2	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**					
3.2.1	**Tenaga Kerja**					
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	60	26,6	50	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	11	0	1.720	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	Keselamatan dan perlindungan	Persen	41,67	0	N/A	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	0	0	N/A	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	100	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	16	0	N/A	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	0	0	N/A	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8	Besaran pencari kerja yang ditempatkan	Orang	59	0	20	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9	Jumlah Perusahaan yang menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	Perusahaan	0	0	2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
10	Rasio Penduduk yang bekerja	persen	0	0	N/A	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
11	Jumlah Lembaga Penyalur Tenaga Kerja yang Professional	Perusahaan	4	0	N/A	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
12	Adanya dokumen perencanaan tenaga kerja makro	Dokumen	0	0	N/A	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
13	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi	Orang	1	1	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
14	Besaran lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Unit	0	1	10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
15	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi	Orang	1	1	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	66,28	69,7	69,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	33,72	30,3	30,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
4	Rasio KDRT	Rasio	0,015	0,226	0,011	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	2,6	3,44	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	69,85	49,85	40,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	108,6	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	108,6	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	108,6	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	108,6	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	108,6	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	108,6	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	108,6	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
14	Jumlah OPD dan Desa yang melaksanakan PPRG	OPD/Desa	369	369	369	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	85,76	85,76	85,97	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	57,22	57,22	56,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
3.2.3	**Pangan**					
1	Ketersediaan pangan utama	Ton	138.032	21.300	23.967	Dinas Pangan
2	Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	0	2.150	4.961	Dinas Pangan
3	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	0	57	170	Dinas Pangan
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	68,75	68,75	67	Dinas Pangan
5	Penganekaragaman pangan	Jenis	1	5	5	Dinas Pangan
6	Distribusi dan akses pangan	Persen	100	100	100	Dinas Pangan
7	Jumlah lumbung pangan	unit	0	6	0	Dinas Pangan
8	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	2	1	0	Dinas Pangan
9	Ketersediaan cadangan pangan Daerah	Ton	102	106	4	Dinas Pangan
10	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	15	25	12	Dinas Pangan
11	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	0	7,54	43,85	Dinas Pangan
3.2.4	**Pertanahan**					
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	50	76,5	100	Dinas Pertanahan
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	75	90	90	Dinas Pertanahan
3	Penyelesaian izin lokasi	Persen	0	0	0	Dinas Pertanahan
4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Lahan untuk Kepentingan Publik	Persen	0	85	90	Dinas Pertanahan
5	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Kasus	0	10	1	Dinas Pertanahan
6	Terkelolanya Aplikasi SIMTANAH	Aplikasi	0	0	0	Dinas Pertanahan
3.2.5	**Lingkungan Hidup**					
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kabupaten	ada/tidak	ada	ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	Persen	17,85	23	105	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
5	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) (orang)	Orang	0	0	2	Dinas Lingkungan Hidup
6	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Orang	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	3	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten	Kasus	4	2	7	Dinas Lingkungan Hidup
9	Total Timbulan sampah perkotaan yang ditangani	m3	150,8	102,5	226	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase cakupan area pelayanan sampah perkotaan	Persen	42	206,41	63	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase Penanganan Sampah	Persen	80	82,5	71	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pengawasan Perusahaan terhadap AMDAL	Persen	17,85	177,16	57,14	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase kepatuhan terhadap AMDAL	Persen	10,7	92,83	39,29	Dinas Lingkungan Hidup
14	Persentase Penanganan lahan kritis	Persen	0	0,01	0,01	Dinas Lingkungan Hidup
15	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,49	0,49	0,29	Dinas Lingkungan Hidup
16	Persentase penerimaan panghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persen	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
17	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	10,06	33,33	0	Dinas Lingkungan Hidup
3.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
1	Rasio penduduk ber e-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,97	0,97	0,97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rasio bayi berakte kelahiran (usia 0-1 tahun)	Rasio	0,9	0,9	0,97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Tidak	Tidak	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	97,74	97,74	98,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0-18 tahun)	Persen	93,98	93,98	95,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Rasio kepemilikan akta kematian	Rasio	0,1	0,1	0,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	94	93	93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	11,21	14	17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
3	Persentase PKK aktif	Persen	100	95	85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
4	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	95	95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	25	60	62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
6	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	60	63	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
7	BUMG yang aktif	Persen	60	59,16	92,8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
8	Jumlah kelompok binaan LPM	LPM	7	23	15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
9	Persentase gampong yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	Persen	100	100	95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
3.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	5,4	1,99	1,97	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,84	2,21	2,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	70,45	70,45	47,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	50	50	46,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	1	1	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	13	14	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	4	4	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	3,04	4	4,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
9	Ratio Akseptor KB	Persen	62,36	124,34	63,12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	80,09	85,51	38,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	4,25	5,82	5,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	19,54	17,72	17,79	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	6,79	7,85	9,21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	45,6	40,36	61,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	100	100	87,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	25	16,67	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	360	38	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan	Persen	48	48	52	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
	pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk					
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	60	66,07	72,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
27	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	25	0	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
28	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	10,17	12	0,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
3.2.9	**Perhubungan**					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	68.144	34.788	36.071	Dinas Perhubungan
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,00003	0,00003	0,00003	Dinas Perhubungan
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	2.159	239	905	Dinas Perhubungan
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Penyeberangan /Terminal Bis dan Barang	Buah	8	8	8	Dinas Perhubungan
5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,0003	0,0042	0,0042	Dinas Perhubungan
6	Persentase Uji KIR angkutan umum	Persen	61,96	61,96	61,9	Dinas Perhubungan
7	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	81,67	60	60	Dinas Perhubungan
8	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	-	86.385	18.075	77.927	Dinas Perhubungan
9	Rasio panjang jalan per	Rasio	0,267	0,267	0,26	Dinas Perhubungan

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
	jumlah kendaraan					
10	Persentase sarana dan prasarana Transportasi	Persen	25	56	56	Dinas Perhubungan
3.2.10	**Komunikasi dan Informatika**					
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	0	12	12	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di gampong	Kelompok	0	0	12	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	84	90	85	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	90	90	90	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
5	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	90	90	90	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
6	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	89,5	90	90	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
7	Persentase cakupan Jangkauan TIK	Persen	65	90	90	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
8	Cakupan Pengembangan E-Government	Persen	0	70	75	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
9	Persentase Data Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Persen	50	75	75	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
10	Jumlah Aparatur Persandian yang disertifikasi oleh BSSN	Orang	1	1	1	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
3.2.11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**					
1	Persentase koperasi aktif	Persen	66,77	25,71	64,57	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	4,59	0	59,25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	0	0	26,39	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4	Jumlah Usaha Skala Mikro (Investasi < 50 jt)	Unit	25.000	0	835	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
5	Jumlah Usaha Skala Kecil (Investasi 50 - 500 Jt)	Unit	1.832	0	5.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6	Jumlah Usaha Skala Menengah (Investasi > 500 Jt - 10 Milyar)	Unit	1.149	0	790	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7	Jumlah Produk Unggulan UKM	Jumlah produk	25	0	20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8	Jumlah Koperasi yang SHU nya diatas 200 Jt	Unit	0	2	2	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
9	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	Orang	25	35	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10	Jumlah koperasi yang sehat (KSP/USP)	Unit	15	0	20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11	Cakupan Pengawasan Koperasi KSP/USP	Persen	25	13,5	48,44	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.2.12	**Penanaman Modal**					
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	Rupiah (Milyar)	1.347	241	508	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Persen	24,06	25,7	248,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Jumlah Perusahaan dalam forum TJSLP	Perusahaan	17	11	11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Jumlah MoU Dana CSR	Milyar Rupiah	21,11	0	11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Persentase Realisasi Dana CSR	Persen	83	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Persentase izin yang diproses sesuai dengan SOP	Persen	61,76	90,72	99,93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,17	86,21	91,06	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B	B	B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Kemudahan mengakses data dan informasi penanaman	Persen	N/A	71,4	85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
	modal oleh masyarakat					Satu Pintu
3.2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**					
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	0	9,45	29,2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	Persentase wirausaha muda	Persen	0	17,5	23,5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	12	20	64,71	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	0	80,4	84,55	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
5	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	20	25,54	37,04	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
6	Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	4	1	1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
7	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	0	100	100	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.2.14	**Statistik**					
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
3	Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
3.2.15	**Persandian**					
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	2	18,75	77,55	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2	persentase Persandian terhadap infromasi yang harus di amankan	Persen	100	100	100	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
3	Rasio Dokumen Yang diamankan	Rasio	0,43	0,64	0,998	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
3.2.16	**Kebudayaan**					
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	0	0	1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	0	12,5	59	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	0	0	13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.2.17	**Perpustakaan**					
1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,17	0,56	0,56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun (orang)	Orang	3.248	7.627	17.116	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah koleksi judul buku	judul buku	16.625	56.865	57.245	Dinas Perpustakaan dan

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
	perpustakaan					Kearsipan
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	7	14	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Layanan Pustaka Digital	Sistem	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.2.18	**Kearsipan**					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	15	15	18,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pengelolaan arsip secara baku	OPD	5	22	29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah dokumen arsip yang dilestarikan	Dokumen	3.180	3.460	5.033	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Jumlah arsip yang di pelihara	box	10.500	10.633	12.206	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.3	**Layanan Urusan Pilihan**					
3.3.1	**Pariwisata**					
1	Kunjungan wisata	Orang	42.122	34.449	1.698	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	PAD sektor pariwisata	Persen	0,000036	0,02739	0,000141	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	Lama kunjungan wisata	Hari	2	12	4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
4	Presentase budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	Persen	0	0	17,65	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.3.2	**Pertanian**					
1	Cakupan Bina Kelompok Tani (Pertanian)	Persen	9	27	68,71	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Indek Penanaman (IP)	indeks	0	1,049	1,641	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :					
	Produksi Padi	Ton	138.032	103.316	98.094	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi Palawija (Jagung, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu)	Ton	1.238	1.196	1.283	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi Tanaman Sayur-sayuran (Cabai)	Ton	736	567	663	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Produksi buah-buahan (Mangga, Durian, Jeruk)	Ton	10.784	2.062	1.011	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
4	Jumlah komoditas yang bersertifikat	jenis komoditi	2	1	1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
5	Persentase kasus hama dan penyakit tanaman pertanian	Persen	0	15	12	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
	yang ditangani					Hortikultura
6	Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	Rasio	0,048	0	N/A	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
7	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	32,69	29,21	26,05	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
8	Jumlah bangunan konservasi air untuk Pertanian (Embung/Dam/Long Storage)	Unit	0	2	0	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
9	Jumlah populasi ternak sapi	Ekor	7.697	7.089	8.779	Dinas Perkebunan dan Peternakan
10	Jumlah populasi ternak kerbau	Ekor	25.345	21.517	24.564	Dinas Perkebunan dan Peternakan
11	Produksi Daging	Kg	695.803	1.018.512	960.535	Dinas Perkebunan dan Peternakan
12	Jumlah populasi ternak Kambing	Ekor	17.588	10.761	10.910	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13	Jumlah populasi ternak Domba	Ekor	931	821	879	Dinas Perkebunan dan Peternakan
14	Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	256.280	349.741	379.686	Dinas Perkebunan dan Peternakan
15	Persentase daging yang ASUH untuk di konsumsi masyarakat	persen	100	100	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
16	Jumlah Lahan penggembalaan umum	Hektar	90	17	0	Dinas Perkebunan dan Peternakan
17	Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	13.467	47.956	15.767	Dinas Perkebunan dan Peternakan
18	Produksi sektor perkebunan (Karet)	Ton	22.760	58.664	42.753	Dinas Perkebunan dan Peternakan
19	Produksi sektor perkebunan (Kelapa Dalam)	Ton	1.726	5.790	2.200	Dinas Perkebunan dan Peternakan
20	Produksi sektor perkebunan (Pinang)	Ton	253	506	319	Dinas Perkebunan dan Peternakan
21	Angka Kematian ternak	Ekor	40	1.767	6.844	Dinas Perkebunan dan Peternakan
22	Persentase kasus penyakit ternak yang ditangani	persen	100	100	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
23	Jumlah populasi ternak yang di vaksinasi	Ekor	0	6.345	16.881	Dinas Perkebunan dan Peternakan
24	Jumlah kasus penyakit ternak	Kasus	6.089	10.042	4.509	Dinas Perkebunan dan Peternakan
25	Cakupan Pembinaaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Persen	100	100	86	Dinas Perkebunan dan Peternakan
26	Cakupan Pembinaaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Persen	100	100	86	Dinas Perkebunan dan Peternakan
27	Cakupan Bina Kelompok Tani (Perkebunan)	Persen	0	3,11	25	Dinas Perkebunan dan Peternakan
28	Produktivitas Kelapa Sawit	Ton/Ha	1,28	4,8	1,29	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
29	Produktivitas Kelapa Dalam	Ton/Ha	6,59	1,16	1,03	Dinas Perkebunan dan Peternakan
30	Produktivitas Karet	Ton/Ha	0,08	3,68	0,96	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.3.3	**Kehutanan**					
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	0	0,01	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	0,02	0	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
3.3.4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**					
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	96,04	99,83	107,63	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Rasio ketersediaan daya listrik	Persen	72,61	75,24	76,26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Persentase subsidi listrik masyarakat miskin	Persen	88,53	88,53	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.3.5	**Perdagangan**					
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	persen	15	18,38	83,33	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,3	13,56	11,99	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3	Nilai Inflasi	Persen	4,24	0,48	6,56	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal	Persen	0	0	29,41	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5	Jumlah Produk Dalam Negeri	Produk	0	0	40	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.3.6	**Perindustrian**					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	8,92	11,52	1,32	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	Pertumbuhan Industri	Persen	3,5	4,36	1,68	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,13	0,4	1,84	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
4	Jumlah IKM yang di bina	IKM	20	20	242	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	8,92	11,52	1,32	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6	Jumlah Industri yang hasil Produksinya dapat dijual Keluar Kabupaten Aceh Barat	Unit	20	20	9	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7	Tersedianya Data Informasi Industri	Persen	0	0	35	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.3.7	**Transmigrasi**					
1	Persentase transmigran swakarsa	Persen	0	13,5	13,45	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	Jumlah kawasan transmigrasi berpotensi yang teridentifikasi	Kawasan	0	1	1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	Jumlah transmigran yang telah dilatih	Orang	0	50	100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	Jumlah Kawasan transmigrasi yang aktif	Kawasan	3	4	4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5	Jumlah Satuan Permukiman Mandiri pada Kawasan Transmigrasi	Satuan Permukiman	0	0	N/A	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.3.8	**Kelautan dan Perikanan**					
1	Nilai Konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	53,1	53,1	53,6	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	52,06	33,96	57,08	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	Persen	30,1	122	46,88	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	19.826	19.850	20.822	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	662	288	773	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Ikan	Persen	52,06	0	21,43	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Jumlah Petani Pembudidaya yang dilatih	Orang	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Jumlah nelayan yang dilatih	orang	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Wilayah Perikanan Budidaya Terawasi	Kecamatan	0	4	4	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi	Kecamatan	0	4	4	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan	Kawasan	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4	**Penunjang Urusan**					
3.4.1	**Perencanaan Pembangunan**					

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Persentase usulan masyarakat yang tertampung didalam dokumen perencanaan	persen	69,06	70	75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Persentase Hasil Penelitian yang menjadi Acuan dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	0	0	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.4.2	**Keuangan**					
1	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	7,84	5,43	7,82	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	3,85	0	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	22,85	22,66	21,35	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	22,42	17,96	15,42	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	1,749	0	N/A	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	10	10	10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Persentase Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	75	85	100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Persentase Tertibnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	80	67,1	82,94	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.4.3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**					

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	0	0	PIM II 101 Hari PIM III 91 Hari PIM IV 96 Hari	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	7,77	4,96	13,67	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	orang	39	156	30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	611	2.551	2.421	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	2.488	10.112	2.635	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
6	Persentase Penanganan Proses Pensiun	persen	100	0	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.4.4	**Penelitian dan pengembangan**					
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	50	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penerapan SIDa:					
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	21,28	80,36	11,29	Sekretariat Daerah
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.4.5	**Pengawasan**					
1	Jumlah tindak lanjut temuan APIP yang ditindaklanjuti	temuan	421	164	152	Inspektorat
2	Jumlah rekomendasi temuan BPK yang di tindaklanjuti	rekomendasi	202	81	763	Inspektorat
3	Indek Kapabilitas APIP Kab. Aceh Barat	Indeks	Lv.3	Lv.3	N/A	Inspektorat
4	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,1	0,06	0,04	Inspektorat
5	Jumlah SKPK yang Nilai Maturitas SPI nya minimal level 2	OPD	9	10	20	Inspektorat
6	Tingkat Maturitas SPIP	Indeks	3,038	3	4	Inspektorat
7	Jumlah Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pengaduan	pengaduan	26	28	27	Inspektorat
8	Jumlah SKPK yang nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B	OPD	41	26	38	Inspektorat
9	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Aceh Barat	Indeks	0	0	N/A	Inspektorat
3.4.6	**Sekretariat Dewan**					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRK

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
	alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota					
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRK
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRK
4	Persentase serapan aspirasi masyarakat melalui reses	Persen	80	91,6	100	Sekretariat DPRK
5	Tersedianya Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRK
3.5	**Kekhususan Aceh**					
3.5.1	**Pendidikan**					
1	Jumlah dayah yang teregistrasi	Dayah	20	48	88	Dinas Pendidikan Dayah
2	Jumlah dayah dengan Program Tahfiz Al Qur'an	Dayah	4	5	6	Dinas Pendidikan Dayah
3	Jumlah tenaga pengajar / guru dayah yang dilatih	orang	0	345	165	Dinas Pendidikan Dayah
4	Jumlah Hafiz Alquran	orang	20	50	50	Dinas Pendidikan Dayah
5	Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Persen	19	68	100	Dinas Pendidikan Dayah
6	Jumlah Sosialisasi Pendidikan	kali	1	1	5	Sekretariat MPD
7	Jumlah seminar Pendidikan	Kali	0	2	10	Sekretariat MPD
8	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh pendidikan	orang	0	250	78	Sekretariat MPD
9	Jumlah komite sekolah yang dibina	komite	0	294	15	Sekretariat MPD
3.5.2	**Keagamaan**					
1	Persentase masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Persen	85	80	85	Dinas Syariat Islam
2	Jumlah Kegiatan Perayaan hari besar Islam	Persen	85	90	95	Dinas Syariat Islam
3	Cakupan dakwah Agama bagi Masyarakat	Persen	80	80	90	Dinas Syariat Islam

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun			Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	
4	Persentase gampong muslimin yang melaksanakan hukum syariat	Persen	70	75	85	Dinas Syariat Islam
5	Persentase Qari dan Qariah	Persen	75	80	85	Dinas Syariat Islam
6	Terwujudnya Syiar di Kabupaten Aceh Barat	persen	65	69,96	75	Dinas Syariat Islam dan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
3.5.3	**Kebudayaan**					
1	Persentase Gampong yang telah menerapkan hukum adat	Persen	55	77,88	100	Sekretariat MAA
3.5.4	**Kesatuan dan Perdamaian**					
1	Persentase penurunan jumlah konflik sosial dan gangguan keamanan	Persen	8	2	35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase penurunan jumlah konflik berlatar belakang SARA	Persen	7	5	30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Jumlah deteksi dini mengenai situasi yang dapat mengancam ketentraman masyarakat	kali	3	10	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.5.5	**Kesatuan Bangsa dan Politik**					
1	Frekuensi Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP (Angkatan)	Kali	1	1	11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Frekuensi Sosialisasi Pembinaan Politik Daerah	Kali	0	1	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Jumlah LSM terdaftar	LSM	0	11	10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Atau Pemilukada	Persen	0	0	N/A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Persentase Pelanggaran Pemilu	Persen	0	0	N/A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Frekuensi pembinaan masyarakat tentang ideologi pancasila	Kali	2	1	9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.92 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2024

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Prevalensi stunting	Persen	10,02	33,3	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan PAD	Persen	-4,45	2,92	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Angka kelulusan SD	Persen	100	100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4	Angka kelulusan SMP	Persen	100	100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan	Persen	6,51	-2,16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertambangan	Persen	2,34	26,82	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Persen	-0,63	1,81	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Konstruksi	Persen	4,72	4,46	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	6,18	0,29	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Ketersediaan pangan utama	Ton	46.712	71.920	Dinas Pangan
2	Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/kapita/tahun	2.042	2.079	Dinas Pangan
3	Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kapita/tahun	61	63,7	Dinas Pangan
III	**Aspek Pelayanan Umum**				
3.1	**Layanan Urusan Wajib Dasar**				
3.1.1	**Pendidikan**				
1	Persentase guru SD yang memenuhi jumlah jam mengajar	Persen	80	67,7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Persentase guru SMP yang memenuhi jumlah jam mengajar	Persen	75	72,3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Persentase SD yang terakreditasi A	Persen	9,81	3,1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4	Persentase SMP yang terakreditasi A	Persen	6,25	6,4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
5	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	63,21	59,9	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6	Angka Partisipasi Murni PAUD	Angka	55,65	59,4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
7	Angka Partisipasi Kasar SD	Angka	108,84	71,09	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8	Angka Partisipasi Murni SD	Angka	99,64	64,9	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9	Angka Partisipasi Kasar SMP	Angka	95,04	59,4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10	Angka Partisipasi Murni SMP	Angka	79,58	50,5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11	Rata-rata nilai rapor muatan lokal	Nilai	85	80	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
12	Rasio guru SD terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	0,082	1,7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
13	Rasio guru SMP terhadap siswa per kelas rata-rata	Rasio	0,365	1,9	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
14	Cakupan Dayah Terakreditasi	Persen	50	56	Dinas Pendidikan Dayah
3.1.2	**Kesehatan**				
1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	103	142	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,5	9,92	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka	10,1	10,98	Dinas Kesehatan
4	Cakupan pasien tertangani di	Persen	90	90	Dinas Kesehatan

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
	RSUD				
5	Cakupan pasien tertangani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Persen	83,78	90	Dinas Kesehatan
6	Penurunan kunjungan pasien ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Persen	-19,3	30	Dinas Kesehatan
7	Persentase pelaku usaha makanan minuman yang memiliki izin	Persen	70	70	Dinas Kesehatan
8	Cakupan Rumah Tangga Sehat	Persen	49	69,68	Dinas Kesehatan
3.1.3	**Pekerjaan Umum**				
1	Indeks Luas Areal (lA)	Indeks	0,29	0,29	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Persentase rumah dengan akses air minum layak	Persen	67	68,14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Persentase rumah dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Persen	64,19	65,19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Persentase rumah dengan akses sanitasi layak	Persen	89,75	90,36	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Persentase wilayah perkotaan yang bebas genangan air kurang dari 2 jam	Persen	86	87	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Persentase gedung pemerintah laik fungsi	Persen	95	96	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Persentase bangunan dan lingkungan di kawasan strategis kondisi baik	Persen	61	62	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap/baik	Persen	57,28	60,19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Persentase wilayah permukiman yang bebas genangan air kurang dari 2 jam	Persen	61	62	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
10	Persentase panjang jalan lingkungan	Persen	55,1	53,24	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
11	Persentase kawasan permukiman dengan ketersediaan sarana prasarana baik	Persen	39	40	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
3.1.4	**Penataan Ruang**				
1	Persentase penggunaan ruang sesuai RTRW	Persen	82	83,5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3.1.5	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman**				
1	Persentase rumah tidak layak huni	Persen	16,33	3,2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
2	Persentase kawasan permukiman kumuh	Persen	31	40	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
3	Persentase permukiman dengan PSU baik	Persen	45	46	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
3.1.6	**Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat**				
1	Persentase penegakan qanun syariat islam	persen	95	90	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
2	Penurunan jumlah korban jiwa	Jiwa	0	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Penurunan jumlah kerugian harta	Rupiah	2.094.200	N/A	Badan Penanggulangan

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
	benda				Bencana Daerah
4	Persentase Bencana Alam Yang Dapat Ditanggulangi	Persen	50	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Rasio Sekolah Siaga Bencana	Persen	3,12	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Jumlah Desa Tangguh	Desa	8	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Jumlah Relawan Bersertifikasi	Orang	0	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jumlah SOP kebencanaan	SOP	1	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Persentase petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	70	85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	70	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.1.7	**Sosial**				
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat kesejahteraannya	Persen	60	45	Dinas Sosial
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persen	60	50	Dinas Sosial
3	Penurunan desil 1 dan 2	Persen	3	8,7	Dinas Sosial
4	Persentase penanganan bencana oleh Taruna Siaga Bencana	Persen	100	100	Dinas Sosial
5	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi terawat	Persen	100	100	Dinas Sosial
3.2	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**				
3.2.1	**Tenaga Kerja**				
1	Persentase tenaga kerja terlatih yang memperoleh pekerjaan	Persen	44	37,04	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
2	Besaran pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	Persen	11	8,33	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	Persen	80	76,92	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3.2.2	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,98	89,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Rasio	0,14	0,333	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3	Persentase Keluarga Berkualitas	Persen	73,6	77,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
4	Jumlah kebijakan pengarusutamaan gender dan anak yang dihasilkan	kebijakan	0	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
5	Persentase anak yang telah terpenuhi hak nya	Persen	55	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
6	Persentase kasus anak yang diselesaikan	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3.2.3	**Pangan**				
1	Persentase kebijakan pangan yang diimplementasikan	Persen	0	0	Dinas Pangan
2	Tingkat inflasi komoditas pangan pokok	Tingkat Inflasi	1,14	2,58	Dinas Pangan
3	Persentase daerah rawan pangan	Persen	5	21,74	Dinas Pangan
4	Persentase keamanan pangan segar yang beredar	Persen	100	100	Dinas Pangan
3.2.4	**Pertanahan**				
1	Cakupan informasi nilai tanah yang dapat diakses masyarakat	Persen	20	61,25	Dinas Pertanahan
2	Cakupan tanah milik pemerintah yang memiliki hak atas tanah	Persen	73	94,44	Dinas Pertanahan
3	Tingkat akurasi aset tanah milik pemerintah	Persen	100	18,78	Dinas Pertanahan
4	Cakupan informasi data tanah milik pemerintah dalam SIMTANAH	Persen	100	61,25	Dinas Pertanahan
5	Persentase kasus tanah yang diselesaikan	Persen	11	35	Dinas Pertanahan
3.2.5	**Lingkungan Hidup**				
1	Persentase implementasi kebijakan lingkungan hidup	Persen	17	62,5	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase penanganan pencemaran lingkungan	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
3	Kawasan Konservasi Air dan Tanah di Perkotaan	Kawasan	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase pemegang izin usaha yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup	Persen	23	28,13	Dinas Lingkungan Hidup
5	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok	1	2	Dinas Lingkungan Hidup
6	Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kepedulian lingkungan hidup	Orang/Sekolah	0	22-Dec	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase kasus yang diselesaikan	Persen	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Total Timbulan Sampah Perkotaan Yang Ditangani	m3	144	197	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase Cakupan Area Pelayanan Sampah Perkotaan	Persen	42	49,21	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
10	Persentase Penanganan Sampah	Persen	83	86,42	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R	Persen	77	4,42	Dinas Lingkungan Hidup
3.2.6	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**				
1	Rasio Penduduk ber E-KTP Per Satuan Penduduk	Rasio	0,98	1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	Persen	96,92	97,68	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3	Cakupan penerbitan Akta Kematian	Persen	40	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	Cakupan informasi administrasi kependudukan yang ter-update	Persen	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5	Pemanfaatan profil data kependudukan untuk pembangunan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**				
1	Tingkat akurasi atribut desa	Persen	70	60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
2	Persentase APBG tepat waktu	Persen	100	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
3	Persentase profil gampong yang ter-update	Persen	64	10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
4	Cakupan masyarakat yang mengaplikasikan TTG	TTG	2	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
3.2.8	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**				
1	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	75	79,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2	Persentase gampong KB yang memanfaatkan data kependudukan dalam penyusunan APBG	Persen	69,16	84,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3	Rasio akseptor KB	Rasio	61,28	56,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
4	Rasio petugas pembina KB desa	Rasio	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
5	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai TFR	3,38	3,26	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
6	Persentase keluarga yang berkualitas mendapatkan pembinaan kesejahteraan keluarga	Persen	66,84	84,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3.2.9	**Perhubungan**				
1	Cakupan trayek angkutan	Persen	0	0	Dinas Perhubungan
2	Cakupan kegiatan DLKR atau DLKP	Persen	0	0	Dinas Perhubungan
3.2.10	**Komunikasi Dan Informatika**				

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
1	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	74	94	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian
2	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE	Persen	18,37	22,45	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian
3.2.11	**Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**				
1	Cakupan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP)	Persen	45,31	64,06	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
2	Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) sehat	Persen	39,06	57,81	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
3	Persentase yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu	Persen	9,33	9,41	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
4	Persentase rumah tangga miskin yang bergabung dalam koperasi	Persen	2,09	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
5	Persentase peningkatan pendapatan UMKM	Persen	23,34	34,88	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
6	Persentase peningkatan pekerja UMKM/IKM	Persen	39,81	2,32	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
7	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah	Persen	7,01	5,98	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
3.2.12	**Penanaman Modal**				
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah (Milyar)	640	1.616,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	2	4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Persentase izin yang diterbitkan	persen	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	indeks	96,77	94,96	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang ter-update	Persen	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.2.13	**Kepemudaan Dan Olah Raga**				
1	Persentase pemuda berprestasi di tingkat Aceh/Nasional	Persen	0,03	0,01	Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga
2	Persentase peningkatan prestasi	Persen	8,57	15,92	Dinas Pariwisata, Pemuda,

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
	atlit				Dan Olahraga
3	Jumlah cabang olah raga yang diikuti	Cabang	20	22	Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga
4	Persentase Penggalang kategori Rakit	Persen	80	33,33	Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga
3.2.14	**Statistik**				
1	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	Persen	100	100	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian
3.2.15	**Persandian**				
1	Persentase persandian terhadap informasi yang harus diamankan	Persen	100	100	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian
2	Jumlah aparatur persandian yang disertifikasi oleh BSSN	Orang	1	1	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian
3.2.16	**Kebudayaan**				
1	Persentase objek budaya yang terlestarikan	Persen	55	17,64	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Jumlah pelaku seni yang aktif	Sanggar	30	30	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Tingkat pemahaman nilai sejarah lokal di kalangan siswa SD/SMP	Persen	30	40	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3.2.17	**Perpustakaan**				
1	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam wilayah Aceh Barat pertahun	Orang	12.788	14.960	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	Persentase naskah kuno yang terawat	Persen	10	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3.2.18	**Kearsipan**				
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	30,61	25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	Persentase arsip yang dapat digunakan	Persen	100	35	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3.3	**Layanan Urusan Pilihan**				
3.3.1	**Pariwisata**				
1	Kontribusi pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	13,8	0,74	Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	63.159	144.902	Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga
3	Persentase peningkatan usaha ekonomi kreatif	Persen	20	28,99	Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga
3.3.2	**Pertanian**				
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	Ton/Ha	6,31	6,3	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
2	Produksi Padi	Ton	71.263	87.411	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
3	Produksi Palawija (Jagung, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu)	Ton	1141	572	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
4	Produksi Tanaman Sayur-sayuran (Cabai)	Ton	800	537	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
5	Produksi Padi	ton	71.263	87.411	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
6	Produktivitas Padi	ton/Ha	6,31	6,3	Dinas Pertanian Tanaman

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
					Pangan Dan Hortikultura
7	Indek Penanaman (IP)	indeks	1,05	1,3	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
8	Luas panen pertanian	Ha	12.142	14.026	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
9	Cakupan Bina Kelompok Tani (Pertanian)	Persen	27	98	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
10	Jumlah populasi ternak sapi	Ekor	9.232	9.611	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
11	Jumlah populasi ternak kerbau	Ekor	25.924	27.463	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
12	Produksi Daging	Kg	961.142	1.106.857	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
13	Jumlah populasi ternak Kambing	Ekor	22.256	10.225	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
14	Jumlah populasi ternak Domba	Ekor	2.078	855	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
15	Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	740.353	299.445	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
16	Produksi kelapa sawit	Ton	17.103	16.518	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
17	Produksi kelapa dalam	Ton	3.338	3.158	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
18	Produksi pinang	Ton	251	251	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
19	Angka Kematian ternak	Ekor	2.979	9.244	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
20	Persentase kasus penyakit ternak yang ditangani	persen	100	100	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
21	Jumlah populasi ternak yang di vaksinasi	Ekor	10.396	32.025	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
22	Cakupan Pembinaaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan besar	Persen	64,29	87,5	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
23	Cakupan Bina Kelompok Tani (Perkebunan)	Persen	77,5	80	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
3.3.3	**Perdagangan**				
1	Jumlah pasar lelang komoditi pertanian	Pasar lelang	0	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
2	Jumlah gudang komoditi pertanian	Gudang	0	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
3	Tingkat Inflasi	Persen	1,42	3,29	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
4	Persentase akurasi kemetrologian	Persen	100	100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
5	Jumlah UMKM yang memiliki kerja sama pemasaran	Jumlah UMKM	0	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
6	Jumlah UMKM komoditi pertanian yang memliki akses *e-commerce*	Jumlah UMKM	0	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
3.3.4	**Perindustrian**				
1	Rata-rata peningkatan pendapatan IKM Hilir	Persen	22,08	5	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
2	Persentase IKM yang dibantu tepat sasaran	Persen	100	100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
3.3.5	**Transmigrasi**				
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang aktif	Kawasan	2	1	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
2	Jumlah satuan Permukiman Mandiri pada Kawasan Transmigrasi	Satuan Permukiman	0	1	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3.3.6	**Kelautan Dan Perikanan**				
1	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	20.837	20.105	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	Ton	783	802,39	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	Wilayah perikanan tangkap terawasi	Kecamatan	12	4	Dinas Kelautan Dan Perikanan
4	Rata-rata peningkatan pendapatan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	Persen	5,2	5,5	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.4	**Penunjang Urusan**				
3.4.1	**Perencanaan Pembangunan**				
1	Konsistensi strategi pembangunan RPD dengan RKPD	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Konsistensi strategi pembangunan RPD dengan RKPD	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Persentasi hasil evaluasi yang digunakan pada tahun perencanaan n+1	Persen	100	55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.4.2	**Keuangan**				
1	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah secara tertib	Persen	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.4.3	**Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan**				
1	Cakupan layanan kepegawaian yang tersedia	Persen	80	90	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persentase ASN struktural yang telah mengikuti diklat	Persen	14	86,13	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
	kepemimpinan				Daya Manusia
3.4.4	**Penelitian Dan Pengembangan**				
1	Persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	Persen	0	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penerapan SIDa:				
1	Jumlah penghargaan inovasi	penghargaan	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.4.5	**Pengawasan**				
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	Persen	22	32,43	Inspektorat
2	Persentase Penyelesaian Temuan di Perangkat Daerah	Persen	60	64,88	Inspektorat
3	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3,99	4	Inspektorat
3.4.6	**Sekretariat Dewan**				
1	Persentase Serapan Aspirasi Masyarakat melalui Reses	Persen	95	100	Sekretariat DPRK
2	Tingkat Kerjasama dengan Eksekutif yang lancar dan tepat waktu	Persen	80	85	Sekretariat DPRK
3.4.7	**Sekretariat Daerah**				
1	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan SOP Pelayanan Publik	Persen	47	67,74	Sekretariat Daerah
2	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	N/A	B	Sekretariat Daerah
3	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
4	Kategori hasil Evaluasi LPPD	Kategori	Sedang	N/A	Sekretariat Daerah
5	Persentase Kasus Hukum yang didampingi (litigasi)	Persen	100	98,75	Sekretariat Daerah
6	Persentase Kasus Hukum yang didampingi (Non litigasi)	Persen	N/A	98,75	Sekretariat Daerah
7	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat	Persen	93,35	91,4	Sekretariat Daerah
8	Peningkatan Kapasitas Usaha BUMD	Persen	100	100	Sekretariat Daerah
3.5	**Kekhususan Aceh**				
3.5.1	**Pendidikan**				
1	Persentase SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat yang menerapkan muatan lokal (Pendidikan Pancasila)	Persen	5	18,52	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
2	Persentase SD yang menerapkan muatan lokal (Fiqih, Aqidah, Akhlak dan Tauhid)	Persen	29	50,36	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
3	Persentase SMP yang menerapkan muatan lokal (Fiqih, Aqidah, Akhlak dan Tauhid)	Persen	20	44,37	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
3.5.2	**Keagamaan**				
1	Jumlah kader ulama yang dilatih	orang	40	160	Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama

No	Bidang urusan/ Indikator	Satuan	Tahun		Perangkat Daerah
			2023	2024	
2	Persentase peningkatan ZISWAF	Persen	0	2,35	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
3	Cakupan tenaga keagamaan	Persen	80	80	Dinas Syariat Islam
4	Penurunan pelanggaran Syariat Islam	Persen	10	59,64	Dinas Syariat Islam
5	persentase takmir masjid yang memahami fungsi masjid	Persen	67,8	75	Dinas Syariat Islam
3.5.3	**Kebudayaan**				
1	Persentase pembinaan adat istiadat	Persen	75	90	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2	Persentase gampong yang telah menerapkan hukum adat	Persen	88,16	88,16	Sekretariat Majelis Adat Aceh
3.5.4	**Kesatuan Dan Perdamaian**				
1	Hilangnya kelompok separatis di masyarakat	Kelompok	0	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Persentase permasalahan umat beragama yang terselesaikan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persen	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3	Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen	100	60	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3.5.5	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**				
1	Jumlah instruktur Pancasila kategori madya	Orang	0	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Persentase pemilih yang menggunakan haknya	Persen	N/A	85	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3	Persentase peningkatan kapasitas ormas	Persen	100	60	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, merujuk pada keseluruhan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan, yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, serta mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan dapat menciptakan stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi sumber daya yang tepat dan pengendalian belanja yang efisien.

Struktur APBK Aceh Barat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaan urusan pemerintahan di Aceh dilengkapi dengan alokasi sumber pendanaan yang pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, taat asas, proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, dan kewajaran juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Mengacu pada Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan landasan utama dalam pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran. APBD disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keuangan daerah, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. APBD terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait dan berfungsi untuk mendukung seluruh kegiatan pemerintahan daerah. Komponen pertama adalah pendapatan daerah, yang meliputi semua penerimaan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan dana transfer dari pemerintah pusat. Komponen kedua adalah belanja daerah, yang mencakup semua pengeluaran untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan serta operasional pemerintah daerah. Komponen ketiga adalah pembiayaan daerah, yang mencakup sumber-sumber dana lain yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau untuk mengelola surplus anggaran. Pengelolaan yang efektif dan efisien dari ketiga komponen ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah dan memastikan bahwa seluruh sumber daya keuangan digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan tolok ukur penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Data pendukung yang relevan termasuk realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi pembiayaan. Realisasi pendapatan mencerminkan seberapa baik pemerintah daerah mampu mengumpulkan sumber daya keuangan, sementara realisasi belanja menggambarkan bagaimana alokasi dana untuk program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan. Selain itu, realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengelola defisit anggaran atau surplus anggaran. data mengenai kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Barat tahun 2020-2024 tersaji dalam gambar di bawah ini:

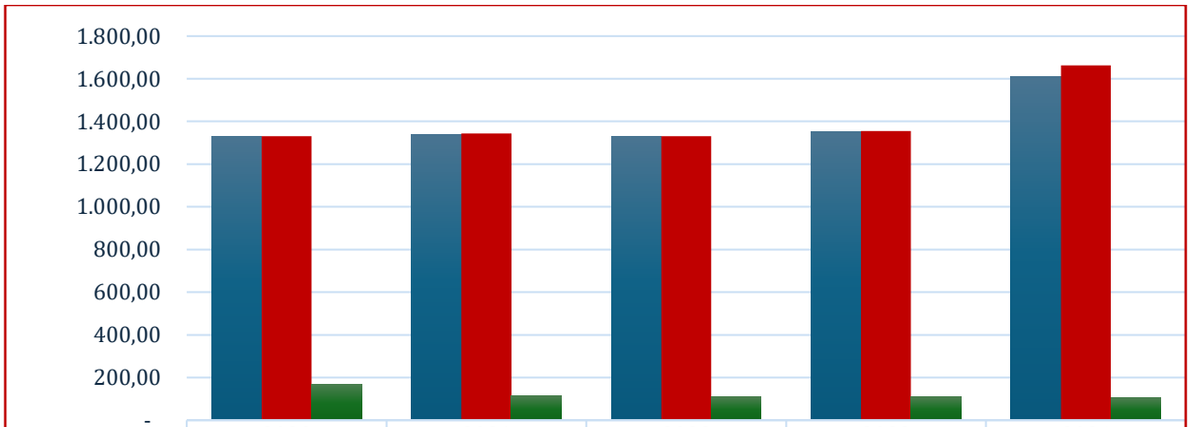

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	1.327,55	1.340,51	1.329,78	1.352,29	1.611,11
Belanja	1.330,25	1.343,67	1.330,74	1.355,68	1.662,23
Pembiayaan	169,14	113,14	108,97	108,01	104,12

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, BPKD 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Gambar 2.68
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)

Berdasarkan gambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pendapatan Kabupaten Aceh Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahun meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1,329 Trilyun kemudian meningkat kembali di tahun 2023 sebesar Rp1,351 Trilyun serta Rp. 1,611 Trilyun di tahun 2024. Sementara untuk belanja daerah juga menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. 1,575 Trilyun. Sementara untuk Pembiayaan daerah mengalami penurunan drastis dari tahun 2020 dari Rp. 169,13 Milyar menjadi Rp. 104, 104,12 Milyar pada tahun 2024. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Barat secara konsisten berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya meskipun tantangan dalam pengelolaan pembiayaan terlihat cukup signifikan. Peningkatan belanja pada tahun 2024 bisa mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan investasi publik meskipun perlu terus memantau dan mengelola pembiayaan dengan baik

1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Sementara itu, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup hibah, dana darurat, dan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Penggunaan pendapatan daerah diatur secara ketat untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi salah satu sumber utama yang menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah. Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir, sementara retribusi daerah berasal dari layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti pelayanan kesehatan dan izin mendirikan bangunan. Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH, diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung program-program prioritas nasional di daerah. Pengelolaan yang baik dan akuntabel terhadap semua jenis pendapatan daerah ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diterima memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Tabel 2.93 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
4	**PENDAPATAN**	**1.327.545.973.659**	**1.340.508.333.454**	**1.329.776.515.551**	**1.351.975.407.387,00**	**1.611.114.272.815,88**	**5,25**
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149.925.456.947	134.641.234.284	143.495.607.689	166.697.390.224,00	174.005.516.290,88	4,23
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	21.169.676.519	24.546.367.307	29.502.893.790	26.358.265.478,79	27.925.022.173,35	7,86
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	6.526.045.050	5.892.710.632	6.767.402.444	7.618.415.157,74	8.309.996.736,66	6,7
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.982.629.917	4.794.752.298	4.718.030.043	4.996.756.426,00	3.749.184.366,00	-6,11
	Zakat	11.963.100.904	12.378.417.365	11.919.311.228	10.506.547.026,49	10.753.399.568,65	-2,44
04.01.04	Lain-lain PAD Yang	105.284.004.557	87.028.986.682	90.587.970.184	117.217.406.135,48	123.267.913.446,22	5,33

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	Sah						
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.151.144.316.712	1.177.998.271.745	1.180.357.907.862	1.184.390.509.510,00	1.408.162.625.746,00	5,44
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.103.806.325.958	1.144.244.382.414	1.056.051.584.830	1.108.197.252.350,00	1.366.432.316.388,00	6,05
	Dana Perimbangan	740.735.684.638	809.336.134.657	782.532.000.830	840.011.565.350,00	1.073.142.742.535,00	10,26
	Dana Insentif Daerah (DID)	38.820.701.000	7.148.713.000	39.111.201.000	-	-	66,38
	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	74.324.170.320	77.718.790.757	-	-	37.714.798.853,00	-23,86
	Dana Desa	249.925.770.000	250.040.744.000	234.408.383.000	231.144.301.000,00	236.111.096.000,00	-1,36
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.337.990.754	33.753.889.331	124.306.323.032	76.193.257.160,00	41.730.309.358,00	38,91
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.337.990.754	33.753.889.331	36.449.450.025	41.456.690.182,00	41.210.559.952,00	2,88
	Bantuan Keuangan	10.000.000.000	-	87.856.873.007	34.736.566.978,00	519.749.406,00	-64,74
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.476.200.000	27.868.827.425	5.923.000.000	887.507.653,00	28.946.130.779,00	750,75
04.03.01	Pendapatan Hibah	-	5.347.049.425	5.923.000.000	887.507.653,00	16.352.190.000,00	417,06
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.476.200.000	22.521.778.000	-	-	12.593.940.779,00	-28,73

Sumber: BPKD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi pendapatan Kabupaten Aceh Barat sepanjang periode tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan dinamika yang cukup berfluktuasi, meskipun secara keseluruhan tetap mencatat tren pertumbuhan positif pada tahun terakhir. Total pendapatan daerah meningkat dari Rp 1.327.545.973.659 pada tahun 2020 menjadi Rp 1.611.114.272.815,88 pada tahun 2024. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2024 dengan tambahan lebih dari Rp 259 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, setelah sebelumnya cenderung stagnan di kisaran Rp 1,32 hingga Rp 1,35 triliun pada periode tahun 2020 hingga tahun 2023.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi cukup stabil terhadap APBK. Pada tahun 2020, realisasi PAD tercatat sebesar Rp 149.925.456.947, sempat turun menjadi Rp 134.641.234.284 pada tahun 2021, namun kemudian kembali meningkat hingga mencapai Rp 174.005.516.290,88 pada tahun 2024. Peningkatan PAD terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan pajak daerah yang naik dari Rp 21.169.676.519 pada tahun 2020 menjadi Rp 27.925.022.173,35 pada tahun 2024, serta kontribusi dari retribusi daerah yang meningkat dari Rp 6.526.045.050 pada tahun 2020 menjadi Rp 8.309.996.736,66 pada tahun 2024. Sebaliknya, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru menurun dari Rp 4.982.629.917 pada tahun 2020 menjadi hanya Rp 3.749.184.366 pada tahun 2024. Komponen zakat juga mengalami penurunan dari Rp 11.963.100.904 pada tahun 2020 menjadi Rp 10.753.399.568,65 pada tahun 2024. Namun, “lain-lain PAD yang sah” menunjukkan tren positif dengan kontribusi yang terus meningkat, dari Rp 105.284.004.557 pada tahun 2020 menjadi Rp 123.267.913.446,22 pada tahun 2024.

Komponen terbesar pendapatan daerah tetap berasal dari Pendapatan Transfer. Pada tahun 2020, nilainya mencapai Rp 1.151.144.316.712, dan terus bertambah hingga mencapai Rp 1.408.162.625.746 pada tahun 2024. Porsi terbesar datang dari transfer pemerintah pusat

yang meningkat dari Rp 1.103.806.325.958 pada tahun 2020 menjadi Rp 1.366.432.316.388 pada tahun 2024. Dari kelompok ini, Dana Perimbangan mencatat kenaikan yang paling signifikan, dari Rp 740.735.684.638 pada tahun 2020 menjadi Rp 1.073.142.742.535 pada tahun 2024. Sementara itu, Dana Insentif Daerah (DID) yang sempat mencapai Rp 38.820.701.000 pada tahun 2020, tidak lagi terealisasi setelah tahun 2022. Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur juga menunjukkan pola fluktuatif, dari Rp 74.324.170.320 pada tahun 2020, tidak terealisasi pada tahun 2022 dan tahun 2023, lalu kembali terealisasi sebesar Rp 37.714.798.853 pada tahun 2024. Dana Desa relatif stabil meskipun sedikit menurun, dari Rp 249.925.770.000 pada tahun 2020 menjadi Rp 236.111.096.000 pada tahun 2024.

Pada Pendapatan Transfer Antar Daerah, terlihat pola yang lebih bergejolak. Pada tahun 2020, realisasinya mencapai Rp 47.337.990.754, kemudian menurun menjadi Rp 33.753.889.331 pada tahun 2021, melonjak tajam menjadi Rp 124.306.323.032 pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi Rp 41.730.309.358 pada tahun 2024. Dari sisi komponennya, pendapatan bagi hasil pajak relatif stabil dengan kisaran Rp 33–41 miliar, sedangkan Bantuan Keuangan menunjukkan perubahan yang tajam, dari Rp 10 miliar pada tahun 2020, naik drastis menjadi Rp 87.856.873.007 pada tahun 2022, namun kemudian anjlok hingga hanya Rp 519.749.406 pada tahun 2024.

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menunjukkan pola yang cukup ekstrem. Pada tahun 2020 realisasinya mencapai Rp 26.476.200.000, meningkat menjadi Rp 27.868.827.425 pada tahun 2021, lalu turun drastis menjadi Rp 5.923.000.000 pada tahun 2022, bahkan hanya Rp 887.507.653 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali melonjak tajam hingga mencapai Rp 28.946.130.779. Jika dirinci, pendapatan hibah yang semula nihil pada tahun 2020 mulai terealisasi sebesar Rp 5.347.049.425 pada tahun 2021, Rp 5.923.000.000 pada tahun 2022, dan melonjak signifikan menjadi Rp 16.352.190.000 pada tahun 2024. Sebaliknya, komponen “lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan” justru menurun dari Rp 26.476.200.000 pada tahun 2020 menjadi Rp 12.593.940.779 pada tahun 2024.

Secara umum, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 5,25 persen. Kinerja ini terutama ditopang oleh meningkatnya transfer pusat, pertumbuhan Dana Perimbangan, serta penguatan PAD melalui pajak daerah, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah. Meski demikian, beberapa komponen seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah, zakat, dan bantuan keuangan antar daerah justru mengalami tren penurunan yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.

1.2. Belanja Daerah

Keuangan Daerah di Indonesia merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja Operasional meliputi pengeluaran rutin yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan operasional pemerintah daerah sehari-hari, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja barang dan jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja ini berfungsi memastikan kelangsungan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian tanah, gedung, dan peralatan. Belanja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi publik. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan diperlukan untuk menangani keadaan darurat atau bencana, seperti bencana alam, bencana sosial, dan kejadian lainnya yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah.

Belanja transfer adalah pengeluaran uang oleh pemerintah daerah yang dialokasikan untuk memberikan dana kepada pihak ketiga, termasuk pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD), dan pihak swasta. Transfer ini biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Tujuan utamanya adalah redistribusi pendapatan, peningkatan pelayanan publik, serta mendorong sinergi antar daerah.

Setiap jenis belanja tersebut harus direncanakan, dianggarkan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Pemerintah daerah diharapkan melakukan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran guna memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan. Gambaran Perkembangan belanja Kabupaten Aceh Barat selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.94 di bawah ini

Tabel 2.94 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020–2024

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
5	**BELANJA**	**1.330.251.976.332**	**1.343.673.324.472**	**1.330.736.825.406**	**1.355.619.103.189**	**1.575.087.638.450,00**	**4,53**
05.01	BELANJA OPERASI	720.662.431.926	724.386.795.876	770.786.439.678	830.599.987.687,63	950.902.973.471,00	7,29
05.01.01	Belanja Pegawai	520.124.330.390	463.071.892.678	491.142.213.419	515.827.796.498,10	559.245.775.855,40	2,13
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	186.269.721.536	213.975.311.350	226.271.340.738	249.787.837.226,53	301.776.720.472,31	12,96
	Belanja Bunga	200.000.000	11.322.997	-	--		-48,58
05.01.04	Belanja Subsidi	-	191.276.000	1.383.996.000	2.274.949.200,00	3.099.491.142,00	181,04
05.01.05	Belanja Hibah	7.297.480.000	28.170.536.278	39.283.616.059	51.700.214.763,00	76.770.497.072,00	101,39
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	6.770.900.000	18.966.456.572	12.705.273.462	11.009.190.000,00	9.877.200.000,00	30,87
01.02	BELANJA MODAL	271.982.384.493	289.191.622.680	251.666.614.320	212.637.551.226,00	298.623.438.703,00	4,57
05.02.01	Belanja Modal Tanah	2.096.986.100	293.151.000	2.835.847.450	2.027.975.844,00	-	163,21
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.432.359.200	31.003.773.310	42.439.343.867	35.027.840.042,80	41.124.926.997,00	-2,75
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.546.641.265	89.910.092.355	37.824.360.485	25.117.520.213,00	46.275.977.219,00	0,41
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.221.032.586	163.732.226.138	165.009.709.410	146.620.906.038,00	207.026.881.118,37	15,93
05.02.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.685.365.342	4.252.379.877	3.557.353.108	3.843.309.088,00	4.195.653.369,00	-2,09
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	823.704.866	475.925.000	3.421.493.608	600.000.000,00	-	98,56
05.03.01	Belanja Tak Terduga	823.704.866	-	3.421.493.608	600.000.000,00	-	-70,62
05.04	BELANJA TRANSFER	336.783.455.046	329.618.980.917	304.862.277.800	311.781.564.275,00	325.561.226.276,00	-0,74
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.599.439.612	3.047.959.162	3.327.568.700	3.712.949.200,00	3.656.299.476,00	9,12
5.4.1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	2.288.729.876	2.577.008.000	2.577.622.175,00	2.615.949.276,00	3,53
5.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah	-	759.229.286	750.560.700	1.135.327.025,00	1.040.350.200,00	10,44

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa						
05.04.01	Belanja Bantuan Keuangan	334.184.015.434	326.571.021.755	301.534.709.100	308.068.615.075,00	321.904.926.800,00	-0,82
5.4.2.1	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	326.571.021.755	301.534.709.100	308.068.615.075,00	321.904.926.800,00	-0,25
	SURPLUS / (DEFISIT)	-2.706.002.673	-3.164.991.018	-960.309.856	-3.643.695.802	36.000.182.156	

Sumber: BPKD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi belanja Kabupaten Aceh Barat sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren meningkat dengan pola fluktuatif pada beberapa komponen. Total belanja pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 1.330.251.976.332, kemudian naik menjadi Rp 1.343.673.324.472 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 belanja sedikit menurun ke Rp 1.330.736.825.406, namun kembali meningkat menjadi Rp 1.355.619.103.189 pada tahun 2023 dan melonjak signifikan hingga mencapai Rp 1.575.087.638.450 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja selama periode ini adalah 4,53 persen. Komponen terbesar adalah Belanja Operasi, yang mengalami peningkatan dari Rp 720.662.431.926 pada tahun 2020 menjadi Rp 950.902.973.471 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 7,29 persen. Dalam komponen ini, belanja pegawai tetap mendominasi, meskipun pertumbuhannya relatif kecil, yaitu dari Rp 520.124.330.390 pada tahun 2020 menjadi Rp 559.245.775.855,40 pada tahun 2024. Belanja barang dan jasa justru tumbuh cukup signifikan, dari Rp 186.269.721.536 pada tahun 2020 menjadi Rp 301.776.720.472,31 pada tahun 2024. Sementara itu, belanja hibah juga mengalami peningkatan tajam, dari Rp 7.297.480.000 pada tahun 2020 menjadi Rp 76.770.497.072 pada tahun 2024. Belanja bantuan sosial berfluktuasi, sempat mencapai Rp 18.966.456.572 pada tahun 2021, lalu turun hingga Rp 9.877.200.000 pada tahun 2024.

Belanja Modal menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terealisasi Rp 271.982.384.493, meningkat menjadi Rp 289.191.622.680 pada tahun 2021, namun turun pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing Rp 251.666.614.320 dan Rp 212.637.551.226. Pada tahun 2024 belanja modal kembali meningkat signifikan menjadi Rp 298.623.438.703. Dalam rincian belanja modal, yang paling menonjol adalah belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang terus tumbuh dari Rp 123.221.032.586 pada tahun 2020 menjadi Rp 207.026.881.118,37 pada tahun 2024. Sebaliknya, belanja gedung dan bangunan menurun drastis dari Rp 82.546.641.265 pada tahun 2020 menjadi hanya Rp 46.275.977.219 pada tahun 2024. Untuk Belanja Tak Terduga, jumlahnya relatif kecil dan tidak konsisten. Pada tahun 2020 realisasinya Rp 823.704.866, turun menjadi Rp 475.925.000 pada tahun 2021, kemudian melonjak tajam pada tahun 2022 menjadi Rp 3.421.493.608, namun turun lagi menjadi Rp 600.000.000 pada tahun 2023 dan tidak terealisasi pada tahun 2024.

Sementara itu, Belanja Transfer cukup besar, meskipun cenderung mengalami penurunan tipis dari Rp 336.783.455.046 pada tahun 2020 menjadi Rp 325.561.226.276 pada tahun 2024. Komponen belanja bagi hasil naik dari Rp 2.599.439.612 pada tahun 2020 menjadi Rp 3.656.299.476 pada tahun 2024. Sedangkan belanja bantuan keuangan masih menjadi porsi terbesar dalam transfer, meskipun nilainya relatif stagnan, dari Rp 334.184.015.434 pada tahun 2020 menjadi Rp 321.904.926.800 pada tahun 2024. Secara umum, pola belanja Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa kenaikan paling signifikan berada pada

belanja operasi, khususnya belanja barang dan jasa serta hibah. Sementara belanja modal sempat menurun namun kembali meningkat pada tahun 2024, didorong terutama oleh pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja tak terduga semakin mengecil perannya, sedangkan belanja transfer relatif stabil meski sedikit menurun. Dengan kondisi ini, pada tahun 2024 APBK Aceh Barat mencatatkan surplus sebesar Rp 36.000.182.156, setelah pada tahun-tahun sebelumnya sempat mengalami defisit, seperti Rp 2.706.002.673 pada tahun 2020 dan Rp 3.643.695.802 pada tahun 2023.

2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuiditas dana yang tersedia. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Aset mencakup semua sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah daerah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kewajiban mencakup semua utang dan kewajiban lainnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yang diperoleh dari selisih antara aset dan kewajiban.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. Laporan ini memiliki peran vital bagi manajemen pemerintah daerah, bukan hanya untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang terarah guna mengelola sumber daya ekonomi daerah dengan efisien dan efektif. Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama periode 2015-2020, yang telah diaudit, dapat dilihat pada Tabel 2.94. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan pemerintah daerah, sehingga menjadi alat penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.95 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1.1.	**ASET LANCAR**	**158.305.365.277,24**	**146.217.224.246,51**	**161.647.448.628,30**	**157.048.857.922,66**	**202.733.560.141,33**	**7,29**
1.1.1.	Kas di daerah	109.504.235.370,55	93.522.949.763,00	96.135.335.090,90	91.094.446.367,91	125.207.659.434,16	5,1
1.1.2	Kas di bendahara pengeluaran	1.145.474,00	500.000,00	85.000.000,00	36.468.236,00	-	4196,64
1.1.3	Kas di bendahara penerimaan	596.202.078,61	272.292.806,04	287.228.044,00	2.254.105.848,50	1.523.088.842,00	150,88
	Kas di BLUD		15.166.393.810,37	11.471.954.047,44	8.757.594.455,23	11.548.335.526,84	-4,04
	Kas Dana BOS		-	6.498.584,00	8.633.032,00	3.396.259,00	-6,95
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		7.523.126,00	23.203.203,03	3.532.657,80	1.674.269,24	17,76
	Kas Dana BOK pada Puskesmas				1.942.742.571,00	1.831.550.993,00	-1,43
1.1.4	Kas lainnya	3.900.004.919,15	366.131.547,98	171.404.375,28	20.320.355,20	2.456.420.028,52	2939,13
1.1.5	Piutang Pajak	10.892.643.532,16	8.986.002.606,10	7.656.971.621,33	19.917.105.578,43	20.587.984.717,43	32,8
1.1.8	Piutang Retribusi	323.283.510,74	3.582.000,00	17.125.900,20	931.219.175,00	938.729.175,00	1404,38
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	-	6.911.747.087,58	12.936.036.221,09	18.052.187.610,38	7.616.759.053,00	17,23
	Piutang Transfer Antar Daerah	-	6.757.678.568,00	9.419.285.018,00	9.374.023.541,00	9.911.971.718,00	11,16
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	177.027.178,08	130.083.333,33	136.243.835,62	139.298.630,14	197.884.794,52	5,63
1.1.12	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-			0
1.1.13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-			0
1.1.16	Piutang Lainnya	13.823.093.930,89	-	-		188.897.825,00	0

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1.1.19	Persediaan	19.087.729.283,06	14.092.339.598,11	23.301.162.687,41	18.942.317.880,23	36.739.835.903,21	28,61
							0
1.2	INVENTANSI JANGKA PANJANG	42.284.033.835,00	41.535.635.091,00	40.666.154.937,00	36.988.332.699,00	32.549.119.089,00	-6,23
1.2.1	INVENTASI NON PERMANEN	-	-	-			0
1.2.1.1	Pinjaman kepada perusahaan Daerah	-	-	-			0
1.2.1.2	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-			0
1.2.1.3	Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-			0
1.2.2	INVENTASI PERMANEN	42.284.033.835,00	41.535.635.091,00	40.666.154.937,00	36.988.332.699,00	32.549.119.089,00	-6,23
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	42.284.033.835,00	41.535.635.091,00	40.666.154.937,00	36.988.332.699,00	32.549.119.089,00	-6,23
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-			0
1.3	ASET TETAP	3.192.064.064.350,21	3.337.412.691.624,21	3.468.375.634.537,96	3.469.745.173.969,97	3.579.693.852.163,98	2,92
1.3.1	Tanah	1.033.174.264.023,00	1.034.152.483.773,00	1.069.542.891.773,00	1.003.890.829.117,00	999.584.630.617,00	-0,76
1.3.2	Peralatan dan mesin	462.345.748.721,17	489.646.849.702,07	564.579.677.505,07	588.651.072.435,17	631.999.368.044,17	8,21
1.3.3	Gedung dan bangunan	838.975.941.054,00	924.786.747.644,00	977.825.187.815,00	998.519.159.616,00	1.027.056.597.014,00	5,23
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	3.322.746.714.213,00	3.456.606.862.697,00	3.764.566.879.516,00	3.934.125.732.364,00	4.152.230.687.609,00	5,75
1.3.5	Aset tetap lainnya	49.180.686.758,36	60.188.155.807,36	65.064.503.440,36	69.945.631.672,94	76.316.224.185,94	11,77
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	34.434.456.791,00	75.709.516.251,00	59.551.507.000,00	53.593.031,.612,00	22.416.090.730,00	24,63
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-2.548.793.747.210,32	-2.703.677.924.250,22	-3.032.755.012.511,47	-3.178.980.282.847,14	-3.329.123.371.036,13	6,95
1.4	ASET LAINNYA	2.576.629.951,75	2.774.306.576,93	8.088.022.552,75	158.985.799.595,86	8.288.377.229,55	492,53
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0
1.4.2	Tuntutan Perbendaharaan	-					0
1.4.3	Tuntutan Ganti rugi	-	-	5.119.095.629,00	1.447.240.505,00	1.424.240.505,00	-18,33
1.4.4	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	157.183.800.383,00		-25
1.4.5	Aset tak berwujud	23.920.000,00	242.925.200,00	521.731.980,00	1.057.659.570,00	1.621.054.988,80	296,58
	Aset yang dibatasi penggunaannya	1.658.377.746,00			1.513.517.218,00	1.518.713.173,00	-24,91
1.4.6	Aset Lain lain	871.932.205,75	2.508.981.376,93	2.424.794.943,75	233.269.192,86	2.913.189.790,75	310,72
							0
2.	KEWAJIBAN	51.675.758.020,02	60.324.020.511,06	56.671.035.056,07	62.462.509.583,70	61.171.644.787,94	4,71
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	51.675.758.020,02	60.324.020.511,06	56.671.035.056,07	62.462.509.583,70	61.171.644.787,94	4,71
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	267.053.936,79	365.169.375,69	171.404.375,28	37.186.430,20	1.065.116.349,36	667,41
2.1.2	Pendapatan diterima dimuka	892.276.512,60	828.139.742,37	729.794.086,00	403.058.840,34	437.732.550,30	-13,81
2.1.3	Utang belanja	44.732.824.060,63	58.985.358.157,00	55.769.176.594,79	62.021.604.313,16	59.668.135.888,28	8,46
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.783.603.510,00	145.353.236,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	-49,26
3.	EKUITAS DANA	3.343.554.335.394,18	3.467.615.837.028,09	3.622.106.225.599,94	3.760.274.423.435,79	3.779.116.298.272,92	3,12

Data yang ditampilkan pada tabel neraca daerah ini mencakup informasi keuangan dari tahun 2020 hingga 2024, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Untuk aset lancar menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang periode 2020-2024, di mana nilai tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp 202,733 Milyar dan terendah pada tahun 2021 yakni sebesar 146,217 Milyar. Pada tahun 2024, tingginya nilai aset lancar disebabkan oleh beberapa faktor seperti penerimaan kas yang signifikan dari pendapatan daerah, seperti retribusi daerah, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang menghasilkan surplus kas yang besar. Kemudian untuk Investasi jangka panjang nilainya mengalami fluktuasi selama lima terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -6,23%. Selanjutnya untuk aset tetap nilainya mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar. Aset tetap ini mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan aset lainnya nilainya mengalami tren yang fluktuatif dengan rata-rata nilai pertumbuhan sebesar 492,53%. Hal yang sama juga terjadi pada kewajiban yang mengalami tren fluktuatif selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,71%. Selanjutnya ekuitas dana yang nilainya mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,12%.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perkembangan positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan peningkatan aset dan pengurangan kewajiban. Peningkatan pada aset tetap dan aset lancar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan kekayaan daerah, sementara pengelolaan utang yang baik menunjukkan upaya untuk menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Namun, perhatian terhadap investasi jangka panjang dan pengelolaan piutang tetap penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya pada suatu periode tertentu, diperlukan analisis terhadap rasio keuangan. Rasio keuangan diperoleh dari angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Secara umum, rasio yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah meliputi rasio likuiditas *(liquidity ratio)* dan rasio solvabilitas *(solvability ratio).*

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendek tepat waktu dikategorikan sebagai pemerintah daerah yang likuid. Beberapa ukuran yang digunakan dalam rasio likuiditas antara lain:

- ***Current Ratio*** **(Rasio Lancar)**

Rasio ini mengukur kemampuan aset lancar dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Current ratio diperoleh dengan membandingkan total aset lancar terhadap total kewajiban lancar. Semakin besar rasio ini, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

- ***Quick Ratio*** **(Rasio Cepat)**

Rasio ini menunjukkan kemampuan aset lancar yang paling likuid, yaitu aset lancar dikurangi persediaan, dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Quick ratio yang lebih tinggi mencerminkan kondisi likuiditas keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

- ***Cash Ratio*** **(Rasio Kas)**

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas yang dimiliki. Semakin tinggi cash ratio, semakin kuat posisi keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban segera yang jatuh tempo.

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah daerah dikategorikan solvabel apabila memiliki total aset yang cukup untuk menutupi seluruh kewajibannya. Rasio solvabilitas umumnya diukur melalui:

- ***Debt to Equity Ratio*** **(Rasio Utang terhadap Ekuitas)**

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total kewajiban (utang) dengan total ekuitas yang dimiliki. Semakin rendah rasio ini, semakin baik struktur permodalan pemerintah daerah karena menunjukkan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap sumber pendanaan eksternal.

- ***Debt to Total Asset Ratio*** **(Rasio Utang terhadap Total Aset)**

Rasio ini menggambarkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Nilai rasio yang lebih rendah menunjukkan tingkat risiko keuangan yang lebih kecil dan kemampuan yang lebih tinggi dalam memenuhi seluruh kewajiban.

Perkembangan *balance sheet ratio* Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.96 *Balance Sheet Ratio* Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Balance Sheet Ratio		*Years*				
		2020	*2021*	2022	2023	2024
Liquidity Ratio	*Current Ratio*	3.06	2.42	2.85	2.51	3.31
	Quick Ratio	2.69	2.19	2.44	2.21	2.71
	Cash Ratio	2.21	1.81	1.91	1.67	2.33
Solvability Ratio	*Debt To Total Asset Ratio*	1.52	1.71	1.54	1.63	1.60
	Debt To Equity Ratio	1.55	1.74	1.56	1.66	1.62

Berdasarkan hasil analisis terhadap tabel rasio keuangan di atas, diketahui bahwa current ratio, quick ratio, dan cash ratio Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama periode Tahun 2020–2024 berada di atas angka 1 atau 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki kemampuan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Tingginya rasio likuiditas ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset lancar telah dilakukan secara optimal sehingga dapat menjaga kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban tepat waktu tanpa mengalami tekanan keuangan

Dari sisi solvabilitas, yang diukur melalui Debt to Total Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio, hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2020–2024, nilai kedua rasio tersebut berada di atas 1. Kondisi ini mengindikasikan bahwa total kewajiban (utang) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat lebih besar dibandingkan dengan total aset atau ekuitas yang dimiliki. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap sumber pendanaan eksternal dalam pembiayaan aset daerah. Meskipun demikian, kondisi ini juga perlu dicermati secara hati-hati untuk memastikan bahwa struktur pembiayaan daerah tetap berada dalam batas kemampuan fiskal dan tidak menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan keuangan daerah di masa mendatang.

Sedangkan untuk mengukur tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik dilakukan analisis rasio aktivitas. Rasio ini memberikan gambaran mengenai seberapa optimal aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau output layanan. Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 97 Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Rasio Aktivitas	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Umur Piutang	3.08	6.17	8.24	13.03	8.85
Rata-rata Umur Persediaan	5.25	3.84	6.40	5.11	8.32

Berdasarkan data Hasil analisis rasio aktivitas menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebesar 7,63 hari, sedangkan rata-rata umur persediaan sebesar 5,15 hari. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dan mengubahnya menjadi kas adalah sekitar delapan hari, sementara waktu yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan persediaan adalah sekitar lima hari.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan piutang dan persediaan pemerintah daerah berjalan secara efisien. Rata-rata umur piutang yang relatif rendah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mempercepat penerimaan kas daerah, sehingga memperkuat likuiditas dan stabilitas keuangan. Di sisi lain, rata-rata umur persediaan yang lebih singkat menunjukkan bahwa pengelolaan stok barang dilakukan secara optimal, tanpa menimbulkan penumpukan atau pemborosan sumber daya.

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa pengelolaan aset lancar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berada dalam kondisi sehat dan efektif, dengan tingkat perputaran piutang dan persediaan yang cepat. Hal ini mendukung kinerja keuangan daerah yang baik serta meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pelayanan publik secara tepat waktu.

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar anggaran belanja yang telah direalisasikan atau digunakan dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Proporsi ini diukur dalam persentase dan digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Proporsi realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menggunakan anggarannya secara efektif dan efisien, sedangkan proporsi yang rendah dapat mengindikasikan masalah dalam perencanaan atau pelaksanaan anggaran, seperti hambatan birokrasi, keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi penggunaan anggaran. Gambaran mengenai hal ini tersaji dalam data Tabel 2.98 di bawah ini:

Tabel 2.98 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 2020-2024 (Persen)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**BELANJA**	**92,22**	**94,55**	**96,32**	**98,27**	**94,76**
1.1	**BELANJA OPERASI**	**88,95**	**93,35**	**97,08**	**98,04**	**94,03**
1.1.1	Belanja Pegawai	89,77	95,09	97,7	93,43	94,12
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90,22	88,78	94,54	99,69	92,19
1.1.3	Belanja Bunga	0	16,18	0	0	0,00
1.1.4	Belanja Subsidi	100	95,64	100	103,96	60,78
1.1.5	Belanja Hibah	64,67	98,38	104,03	165,58	103,36
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	52,75	99,35	99,11	99,39	96,97
1.2	**BELANJA MODAL**	**93,27**	**92,67**	**96,89**	**104,88**	**97,98**
1.2.1	Belanja Modal Tanah	83,88	99,88	99,99	39,15	0,00
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93,86	91,75	97,59	105,56	97,12
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94,71	97,11	96,32	90,35	97,17
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	92,02	90,53	96,73	110,12	98,28
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99,02	93,94	99,78	111,79	100,58
1.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**27,46**	**16,81**	**16,39**	**2,41**	**0,00**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.1	Belanja Tak Terduga	27,46	16,81	16,39	2,41	0,00
1.4	**BELANJA TRANSFER**	**99,73**	**99,8**	**99,32**	**102,32**	**100,00**
1.4.1	BELANJA BAGI HASIL	99,96	100	93,37	99,86	100,00
1.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	99,95	100	91,63	0	100,00
1.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	100	100	99,9	0	100,00
1.4.2	**BELANJA BANTUAN KEUANGAN**	**99,73**	**99,8**	**99,39**	**102,35**	**0,00**
1.4.2.5	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	99,73	0	0	0	0,00
1.4.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	99,73	0	0	0	0,00
1.4.2.6	**Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**	**100**	**99,8**	**99,39**	**0**	**100,00**
1.4.2.6.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100	99,8	99,39	0	100,00

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, realisasi belanja daerah menunjukkan tren peningkatan dari 92,2% pada tahun 2020 menjadi 94,76% pada tahun 2024. Peningkatan persentase ini mengindikasikan peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Persentase realisasi belanja pegawai cukup fluktuatif sebesar 89,77% pada tahun 2020, mengalami peningkatan signigikan pada tahun 2022 sebesar 97,7% dan menurun di tahun menjadi 94,12% pada tahun 2024. Adanya upaya pemenuhan gaji dan tunjangan terhadap pegawai mempertahankan realisasi belanja diatas 90% setiap tahunnya. Realisasi belanja barang dan jasa mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dari 90,22% pada tahun 2020 menjadi 92,19% pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa yang mendukung operasional pemerintahan. Belanja subsidi meningkat signifikan, terutama pada tahun 2023 (103,96%), dan belanja hibah menunjukkan peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2023 (165,58%). Hal ini dapat mengindikasikan peningkatan program dukungan sosial dan bantuan kepada masyarakat serta organisasi. Realisasi belanja modal menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari 93,27% pada tahun 2020 menjadi 97,98% pada tahun 2024. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam investasi infrastruktur dan aset jangka panjang. Belanja tak terduga menunjukkan variabilitas yang tinggi dengan peningkatan tajam pada tahun 2020 (27,46%) namun menurun dan fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan respons terhadap kejadian darurat atau bencana yang tidak terduga. Belanja transfer secara konsisten tinggi, terutama pada tahun 2023 (102,32%) serta tahun 2024 (100%). Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendistribusikan dana kepada pemerintah desa dan daerah lainnya.

Peningkatan persentase realisasi belanja menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran dengan lebih baik. Peningkatan signifikan dalam belanja modal dan belanja subsidi serta hibah menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur serta dukungan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Ini mencerminkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Fluktuasi dalam belanja tak terduga mencerminkan fleksibilitas dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam merespons kejadian-kejadian darurat yang tidak terduga. Hal ini penting untuk memastikan bahwa daerah siap menghadapi situasi darurat tanpa mengorbankan alokasi

anggaran untuk program-program penting lainnya. Tingginya persentase realisasi belanja transfer menunjukkan komitmen yang kuat terhadap redistribusi dana ke pemerintah desa dan daerah lain. Ini penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat desa dan daerah lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dari tahun ke tahun. Fokus pada belanja modal dan dukungan sosial mencerminkan prioritas pembangunan jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesiapsiagaan dalam belanja tak terduga dan komitmen pada redistribusi dana melalui belanja transfer menunjukkan kemampuan adaptasi dan dukungan yang kuat terhadap pembangunan yang merata di seluruh wilayah.

2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua bagian yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan ini bisa berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan anggaran dan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pengelolaan pembiayaan daerah yang efektif dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kendala fiskal, mendukung pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel 2.99 di bawah ini:

Tabel 2.99 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	PEMBIAYAAN						
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	157.592.809.800	116.623.116.743	108.969.528.825	108.009.218.969	104.115.523.168	-9,26
06.02	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.477.637.100	113.134.519.843	108.969.528.825	108.009.218.969	104.115.523.168	-3,95
	Penerimaan Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank	35.115.172.700	3.488.596.900	-	-	-	-47,52
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.748.475.300	4.488.596.900	-	250.000.000	-	-72,31
	Penyertaan Modal Daerah	-	1.000.000.000	-	250.000.000	-	-50
	Pembayaran Cicilan Pokok Utanag yang Jatuh Tempo	41.748.475.300	3.488.596.900	-	-	-	-47,91
	PEMBIAYAAN NETTO	115.844.334.500	112.134.519.843	108.969.528.825	107.759.218.969	104.115.523.168	-2,63
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	113.138.331.827	108.969.528.825	108.009.218.969	104.112.393.332	1.611.087.820.606	1.447,45

Realisasi pembiayaan APBK Kabupaten Aceh Barat sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun pada sisi penerimaan pembiayaan, namun terdapat lonjakan besar pada sisi SILPA di tahun terakhir. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan, realisasi tahun 2020 tercatat sebesar Rp 157.592.809.800, kemudian menurun menjadi Rp 116.623.116.743 pada tahun 2021. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga mencapai Rp 108.969.528.825 pada tahun 2022, Rp 108.009.218.969 pada tahun 2023, dan semakin menurun lagi menjadi Rp 104.115.523.168 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan selama periode ini tercatat negatif sebesar -9,26 persen.

Komponen utama penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, realisasinya mencapai Rp 122.477.637.100, lalu menurun menjadi Rp 113.134.519.843 pada tahun 2021. Angka ini terus menurun hingga Rp 108.969.528.825 pada tahun 2022, Rp 108.009.218.969 pada tahun 2023, dan Rp 104.115.523.168 pada tahun 2024. Penurunan rata-rata tercatat sebesar -3,95 persen. Sementara itu, penerimaan dari pinjaman lembaga keuangan bank sempat terealisasi Rp 35.115.172.700 pada tahun 2020, turun drastis menjadi Rp 3.488.596.900 pada tahun 2021, dan tidak lagi terealisasi sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, realisasi tahun 2020 tercatat sebesar Rp 41.748.475.300, kemudian menurun menjadi Rp 4.488.596.900 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 tidak ada realisasi pengeluaran pembiayaan, sementara tahun 2023 kembali terealisasi sebesar Rp 250.000.000, dan pada tahun 2024 kembali tidak ada realisasi. Komponen pengeluaran terutama berasal dari pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo, yang pada tahun 2020 tercatat Rp 41.748.475.300, menurun menjadi Rp 3.488.596.900 pada tahun 2021, dan tidak ada realisasi pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Selain itu, penyertaan modal daerah sempat terealisasi sebesar Rp 1.000.000.000 pada tahun 2021 dan Rp 250.000.000 pada tahun 2023.

Dengan kondisi tersebut, Pembiayaan Netto Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 115.844.334.500, kemudian sedikit menurun menjadi Rp 112.134.519.843 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp 108.969.528.825, berlanjut ke Rp 107.759.218.969 pada tahun 2023, dan kembali menurun ke Rp 104.115.523.168 pada tahun 2024. Secara rata-rata, pembiayaan netto mengalami penurunan sebesar -2,63 persen per tahun.

Hal yang cukup menonjol terlihat pada komponen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pada tahun 2020, SILPA tercatat sebesar Rp 113.138.331.827, kemudian menurun menjadi Rp 108.969.528.825 pada tahun 2021, Rp 108.009.218.969 pada tahun 2022, dan Rp 104.112.393.332 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan sangat besar dengan realisasi SILPA mencapai Rp 1.611.087.820.606, meningkat lebih dari 15 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan SILPA selama periode ini tercatat sangat tinggi, yakni 1.447,45 persen, yang menunjukkan adanya akumulasi sisa anggaran yang signifikan pada tahun terakhir.

Secara keseluruhan, pola pembiayaan APBK Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 hingga tahun 2024 memperlihatkan kecenderungan menurunnya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dengan dominasi komponen dari SiLPA tahun sebelumnya. Namun demikian, lonjakan SILPA pada tahun 2024 menjadi catatan penting, yang

mengindikasikan adanya efisiensi belanja atau keterlambatan realisasi program sehingga menghasilkan sisa anggaran yang sangat besar di akhir periode.

C. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang dialokasikan untuk mendanai belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama dan berbagai program pembangunan selama 5 tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan daerah didasarkan pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan di daerah yang disusun berdasarkan asumsi dan selanjutnya ditetapkan sebagai proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, dan pengalokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan daerah dapat dikatakan sebagai penerimaan/hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan secara terukur dan rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun beberapa komponen pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Daerah selama 5 tahun ke depan diproyeksikan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan sepanjang tahun 2025-2029. Proyeksi tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah serta realisasi pendapatan selama 5 tahun terakhir.

Pada proyeksi pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang digunakan seperti pada Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya, Pajak Kafetaria dan Sejenisnya dan Pajak Warung dan Sejenisnya diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya. Kondisi ini diperhitungkan dengan mempertimbangkan realisasi beberapa tahun terakhir yang ikut mengalami pertumbuhan yang sama. Pertumbuhan pajak dari sektor ini dipengaruhi oleh trend pertumbuhan rumah makan, kafe dan sejenisnya yang terlihat cukup signifikan. Beberapa lokasi secara alamiah tumbuh menjadi kawasan kafe dan rumah makan yang dipadukan dengan konsep wisata alam dan pantai. Tingginya peminat lokal maupun luar daerah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor ini selama beberapa tahun terakhir.

Asumsi peningkatan lainnya adalah pada pajak pagelaran kesenian/musik/taribusana, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, panti pijat, relfeksi, spa dan pusat kebugara serta pertandingan olahraga. Kontribusi beberapa kelompok pajak tersebut hanya sebesar 0,21 persen terhadap total Pendapatan Asli Daerah, berbeda signifikan terhadap beberapa pajak sebelumnya yang memberikan kontribusi hingga 2,66%. Walaupun demikian, pertumbuhan sektor ini diperkirakan cukup siginifikan, mencapai 10% setiap tahunnya. Proyeksi tersebut dilakukan berdasarkan trend penerimaan sejak 5 tahun terakhir serta adanya optimisme kenaikan aktivitas keramaian selama 5 tahun ke depan. Berbagai event, pagelaran seni dan budaya menjadi salah satu daya tarik dan pendorong peningkatan aktivitas masyarakat. Kondisi ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada beberapa sektor tersebut yang diharapkan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak selama 5 tahun yang akan datang.

Asumsi peningkatan sumber pendapatan lainnya adalah dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain. Pertumbuhan antar wilayah yang cukup pesat, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, pertumbuhan perumahan dan permukiman yang di beberapa wilayah diperkirakan akan mempengaruhi terhadap kebutuhan sumber daya listrik untuk penerangan, termasuk penerangan jalan akses menuju ke berbagai lokasi. Peningkatan kebutuhan sumber daya listrik sebagai penerangan jalan diperkirakan akan tumbuh sebesar 10% setiap tahunnya, trend ini diperkirakan berdasarkan kondisi yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan kenaikan penerimaan pajak dari sumber tersebut sebanyak 10% setiap tahunnya, sehingga penerimaan pajak dari sumber penerangan jalan pada akhir 2029 diproyeksikan akan mencapai Rp.19,79 Milyar, meningkat signifikan dibandingkan target 2025 yang sebesar Rp.13,52 Milyar.

Pertumbuhan pajak lainnya berasal dari Opsen PKB dan BBNKB. Peningkatan tersebut salah satunya diperkirakan dari meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemampuan daya beli, belum optimalnya layanan kendaraan pengangkutan publik antar wilayah Gampong, Kecamatan, dan Kabupaten, serta perubahan model kendaraan setiap tahunnya akan memicu minat konsumtif masyarakat terhadap kendaraan baru semakin meningkat setiap tahunnya. Penjualan kendaraan bermotor setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh kebutuhan maupun keinginan terhadap jenis dan model kendaraan baru akan mempengaruhi terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini diproyeksikan akan meningkatkan pendapatan dari kedua objek tersebut antara 5 – 10% setiap tahunnya.

Asumsi peningkatan pendapatan lainnya adalah berasal dari sektor kesehatan. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit akan memicu pertumbuhan sektor ini meningkat signifikan dengan rata-rata proyeksi peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya. Proyeksi tersebut diasumsikan berdasarkan trend pertumbuhan sejak 5 tahun terakhir. Pemerintah Daerah terus mendorong terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat, hal ini juga terlihat dari berbagai program prioritas Bupati Aceh Barat Tahun 2025-2029 yang memiliki fokus khusus terhadap sektor kesehatan. Kondisi ini tentunya akan memberikan dampak terhadap meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor tersebut.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Asumsi belanja daerah mengikuti terhadap target dan proyeksi pendapatan daerah dari tahun 2025 - 2030. Belanja tersebut telah mengakomodir kebutuhan belanja wajib dan mengikat, belanja pemenuhan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2025-2029 serta belanja Non Prioritas untuk mendukungan layanan Pemerintahan di

Daerah selama 5 tahun ke depan. Proyeksi belanja daerah ditargetkan terus mengalmi peningkatan mengikuti pertumbuhan pendapatan dari sebesar Rp. 1,398 Milyar pada tahun 2026 meningkat hingga Rp. 1,484 Milyar di tahun 2030. Kemudian pada 2 (dua) tahun mendatang dialokasikan juga Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2 Milyar pada tahun 2026 dan Rp. 700 Juta di tahun 2027. Rencana investasi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah Perumda Tirta Meulaboh. Kondisi ini sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada beberapa tahun terakhir untuk dilakukan berbagai upaya perbaikan baik dari sisi manajerial maupun perbaikan sarana dan prasarana penyediaan air minum pada BUMD tersebut.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 hingga 2030 dapat dilihat pada tabel 2.100 berikut:

Tabel 2.100 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030

No	Uraian	Baseline	Target	Proyeksi				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	**PENDAPATAN**	**1.611.087.820.605,88**	**1.381.559.406.162,00**	**1.355.296.379.768,47**	**1.384.020.982.548,26**	**1.370.895.666.955,02**	**1.403.369.649.483,86**	**1.437.966.574.077,91**
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	173.979.064.080,88	190.694.318.723,00	200.052.331.131,15	215.550.998.075,76	232.555.892.016,10	251.215.463.108,02	271.692.898.131,80
4.1.01	Pajak Daerah	27.763.847.765,35	49.712.540.645	53.103.072.131	56.791.851.626	60.806.670.540	65.177.997.928	69.939.243.181
4.1.02	Retribusi Daerah	8.317.068.836,66	14.712.302.000	15.249.259.000	15.839.146.450	16.487.221.476	17.199.265.180	17.981.634.951
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.875.307.093,27	4.000.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	134.022.840.385,60	122.269.476.078	127.950.000.000	139.170.000.000	151.512.000.000	165.088.200.000	180.022.020.000
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.408.162.625.746,00	1.173.164.068.183	1.139.252.836.381	1.152.478.772.217	1.122.348.562.683	1.136.162.974.120	1.150.282.463.690
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.366.432.316.388,00	1.144.512.922.000	1.112.269.546.300	1.124.406.755.086	1.093.139.870.048	1.105.767.422.069	1.118.647.525.130
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.730.309.358,00	30.360.953.183,00	26.983.290.081,32	28.072.017.130,50	29.208.692.635,20	30.395.552.051,17	31.634.938.560,06
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.210.559.952,00	30.360.953.183,00	26.983.290.081,32	28.072.017.130,50	29.208.692.635,20	30.395.552.051,17	31.634.938.560,06
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.946.130.779,00	15.991.212.256,00	15.991.212.256,00	15.991.212.256,00	15.991.212.256,00	15.991.212.256,00	15.991.212.256,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.352.190.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.593.940.779,00	15.991.212.256	15.991.212.256	15.991.212.256	15.991.212.256	15.991.212.256	15.991.212.256
1	**BELANJA**	**1.575.087.638.450,08**	**1.481.404.524.680**	**1.398.698.808.491**	**1.428.385.685.464**	**1.414.820.671.798**	**1.448.382.532.742**	**1.484.138.454.310**
1.1	**BELANJA OPERASI**	**950.902.973.470,71**	**959.420.315.388**	**907.358.541.012**	**927.206.745.546**	**942.891.530.615**	**966.552.974.629**	**989.085.445.656**
1.1.1	Belanja Pegawai	559.211.693.355,40	618.256.279.541	586.993.873.658,79	595.251.728.682,39	603.674.740.806,46	612.266.213.173,01	621.029.514.986,89
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	301.776.689.797,31	305.601.707.583	297.944.667.353	310.668.596.864	319.137.985.407	333.518.148.391	349.239.914.970
1.1.3	Belanja Bunga	0	0					
1.1.4	Belanja Subsidi	3.099.491.142,00	1.666.032.043	2.120.000.000	2.130.600.000	2.130.114.930	2.142.204.654	
1.1.5	Belanja Hibah	76.937.899.176,00	22.377.990.521	7.350.000.000	7.505.820.000	6.998.689.471	7.676.408.411	7.866.015.699
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.877.200.000,00	11.518.305.700	12.950.000.000	12.950.000.000	12.950.000.000	12.950.000.000	12.950.000.000
1.2	**BELANJA MODAL**	**298.623.438.703,37**	**217.141.967.741**	**157.398.823.436**	**165.595.908.301**	**134.641.824.877**	**142.771.149.495**	**154.152.228.227**

No	Uraian	Baseline	Target	Proyeksi				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-					
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.275.977.219,00	50.943.288.287	27.800.000.000	27.906.000.000	24.957.624.654	25.944.683.034	26.151.031.088
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.275.977.219,00	59.076.718.182	5.000.000.000	5.106.000.000	5.101.149.300	5.222.046.538	5.351.031.088
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	207.026.881.118,37	106.222.361.272	123.715.056.396	131.681.405.400	103.681.405.400	110.681.405.400	121.704.353.070
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.195.653.369,00	899.600.000	883.767.040	902.502.901	901.645.523	923.014.522	945.812.981
1.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**0**	**13.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**
1.3.1	Belanja Tak Terduga	0	13.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
1.4	**BELANJA TRANSFER**	**325.561.226.276,00**	**317.411.358.376**	**318.941.444.043**	**320.583.031.616**	**322.287.316.306**	**324.058.408.618**	**325.900.780.426**
1.4.1	**Belanja Bagi Hasil**	**3.656.299.476,00**	**6.442.484.265**	**6.835.233.113**	**7.263.099.808**	**7.729.389.202**	**8.237.726.311**	**8.792.087.813**
1.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.615.949.276,00	4.971.254.065	5.310.307.213	5.679.185.163	6.080.667.054	6.517.799.793	6.993.924.318
1.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.040.350.200,00	1.471.230.200	1.524.925.900	1.583.914.645	1.648.722.148	1.719.926.518	1.798.163.495
1.4.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**321.904.926.800,00**	**310.968.874.111**	**312.106.210.930**	**313.319.931.809**	**314.557.927.105**	**315.820.682.307**	**317.108.692.613**
1.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	321.904.926.800,00	69.630.833.111	70.768.169.930	71.981.890.809	73.219.886.105	74.482.641.307	75.770.651.613
1.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		226.338.041.000	226.338.041.000	226.338.041.000	226.338.041.000	226.338.041.000	226.338.041.000
1.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	**36.000.182.155,80**	**-125.414.235.343,00**	**-43.402.428.722,24**	**-44.364.702.915,36**	**-43.925.004.842,99**	**-45.012.883.257,71**	**-46.171.880.231,61**
1.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**104.115.523.168,44**	**125.414.263.143,00**	**45.402.428.722,24**	**46.364.702.915,37**	**45.925.004.842,99**	**47.012.883.257,71**	**48.171.880.231,61**
1.1.1	Penggunaan SiLPA	104.115.523.168,44	125.414.263.143,00	45.402.428.722,24	46.364.702.915,37	45.925.004.842,99	47.012.883.257,71	48.171.880.231,61

No	Uraian	Baseline	Target	Proyeksi				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya			0	0	0	0	0
1.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	0	2.000.000.000,00	700.000.000,00	-	-	-
1.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**PEMBIAYAAN NETTO**	**104.115.523.168,44**	**125.414.263.143,00**	**45.402.428.722,24**	**46.364.702.915,37**	**45.925.004.842,99**	**47.012.883.257,71**	**48.171.880.231,61**
1.4	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN**	**140.275.446.463,24**	**27.800,00**	0	0	0	0	0
	ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	**1.611.087.820.605,88**	**1.506.973.669.305,00**	**1.400.698.808.491**	**1.430.385.685.464**	**1.416.820.671.798**	**1.450.382.532.742**	**1.486.138.454.310**

Sumber: Proyeksi BPKD Kabupaten Aceh Barat 2025

2. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta belanja tidak langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2025- 2030 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil analisis, total penerimaan diproyeksikan mengalami fluktuasi karena ketidakpastian terhadap beberapa sumber penerimaan tertentu seperti Dana Alokasi Khusus FIsik. Pada tahun 2024, total penerimaan sebesar Rp 1.611.087.820.605,88, mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi Rp 1.506.973.669.305,00 dan tahun 2026 sebesar Rp. 1.400.698.808.491, selanjutnya diproyeksikan mengalami peningkatan hingga Tahun 2030 menjadi sebesar Rp. 1.486.138.454.310. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja tidak langsung, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat sampai dengan Tahun 2030 disajikan pada Tabel 2.101 berikut:

Tabel 2.101 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025–2030

No	Uraian	Realisasi	Target	Proyeksi				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	**1.611.087.820.605,88**	1.381.559.406.162,00	1.355.296.379.768,47	1.384.020.982.548,26	1.370.895.666.955,02	1.403.369.649.483,86	1.437.966.574.077,91
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	104.115.523.168,44	125.414.263.143,00					
	Total penerimaan	**1.715.229.795.984,32**	**1.506.973.669.305,00**	**1.355.296.379.768,47**	**1.384.020.982.548,26**	**1.370.895.666.955,02**	**1.403.369.649.483,86**	**1.437.966.574.077,91**
	Dikurangi:							
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	919.727.339.724,00	935.667.637.916,50	907.935.317.701,91	917.834.760.298,57	927.962.057.112,84	938.324.621.790,68	948.930.295.413,07
5	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah	**795.502.456.260,32**	**571.306.031.388,50**	**445.361.062.066,56**	**464.186.222.249,70**	**440.933.609.842,18**	**463.045.027.693,19**	**487.036.278.664,84**

3. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow programme) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 2.96. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok

Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun prioritas anggaran untuk pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2030, sebagai berikut:

a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan wakil Bupati juga termasuk hal tersebut.
c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 2.102 berikut:

Tabel 2.102 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan**	**580.566.163.763,38**	**445.361.062.066,56**	**464.186.222.249,70**	**440.933.609.842,18**	**463.045.027.693,19**	**487.036.278.664,84**
2	Prioritas I	256.089.925.315,20	256.089.925.315,20	265.197.195.422,93	235.283.945.930,88	249.261.524.151,52	264.606.756.827,68
3	Prioritas II	184.689.270.507	116.103.100.000,00	111.308.100.000,00	110.913.100.000,00	113.868.100.000,00	113.368.100.000,00
4	Prioritas III	139.786.967.941,68	73.168.036.751,36	87.680.926.826,77	94.736.563.911,31	99.915.403.541,66	109.061.421.837,16

D. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya finansialnya secara efektif. Ini mencakup pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Daerah (misal: pajak daerah), dana transfer dari pemerintah pusat, serta berbagai pengeluaran untuk membiayai berbagai program dan layanan. Untuk mengukur tingkat Kapasitas Fiskal Daerah dihitung dengan formula tertentu sehingga dihasilkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD). Rasio Kapasitas Fiskal Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kemampuan keuangan mereka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, pemanfaatan terhadap penilaian kapasitas fiskal daerah antara lain sebagai berikut :

1. Pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari :
   - Penerimaan dalam negeri; dan/atau
   - Pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal;
2. Penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, dalam hal dipersyaratkan;
3. Pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah;
4. Pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat;
5. Pertimbangan dalam pemberian persetujuan pembentukan dana abadi daerah;
6. Pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan;

7. Pertimbangan dalam penyelerasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur; dan
8. Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah sangat ditentukan oleh beberapa komponen perhitungan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPS), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Dana Otonomi Khusus (OTSUS), Dana Tambahan Infrastrukur (DTI), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Pegawai (BP), Belanja Bagi Hasil (BBH), Belanja Bunga (BB) Dan Pembiayaan Utang Daerah (PUD). Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Keuangan, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun terakhir berkisar pada kategori sangat rendah dan rendah, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 103 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Aceh Barat	0,944	0,465	1,294	0,872	0,936

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

Rendahnya kapasitas fiskal Kabupaten Aceh Barat sangat dipengaruhi oleh ketergantungan pendapatan daerah kepada TKD, PTAD, LLPS, dan OTSUS. Sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih rendah yang terlihat dari proporsinya hanya sebesar 10-12 persen dari total pendapatan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum optimal dalam pengelolaan berbagai sumber pendapatan asli daerah baik yang berasal dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membutuhkan berbagai strategi untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan lainnya yang berasal dari dana TKD. Upaya ini diharapkan akan mampu untuk meningkatkan rasio kapasitas fiskal daerah sekaligus mengakselerasi pencapaian target Pembangunan daerah secara lebih cepat.

2.3. Perumusan Kajian Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Barat

Pada kajian ini dilakukan beberapa analisis menggunakan berbagai metode (*tools*), di mana analisis tersebut sebagian di level kabupaten/kota untuk melihat positioning dan performa/kinerja pembangunan dari Kabupaten Aceh Barat dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Provinsi Aceh. Sementara itu, ada juga analisis yang dilakukan di level kecamatan untuk lebih memahami fenomena yang terjadi pada lingkup wilayah yang lebih mikro. Adapun hasil analisis yang dilakukan dalam rangka mengkaji potensi dan permasalahan terkait pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Barat disajikan sebagai berikut.

A. Analisis Indeks Diversitas Entropy *(Shannon Index)*

Dalam kajian ini dilakukan analisis indeks *diversitas entropy* untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah. Nilai indeks diversitas *entropy* ditujukan untuk menghitung tingkat keberagaman dan keberimbangan aktivitas/sektor ekonomi di suatu wilayah. Semakin bertambah jumlah jenis aktivitas/sektor ekonomi maka nilai indeks diversitas entropi akan semakin besar. Semakin berimbang komposisi berbagai aktivitas/sektor ekonomi tersebut, nilai indeks diversitas entropi juga menjadi semakin besar. Karena itu

secara sederhana dapat dinyatakan bahwa semakin besar nilai indeks diversitas *entropy* maka suatu wilayah dapat dianggap semakin berkembang/maju.

Dalam konteks wilayah, persamaan umum dari perhitungan nilai *entropy* adalah

$$S = -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} P_i \ln P_i$$

Keterangan
S : nilai entropy
P_i : nilai rasio frekuensi kejadian pada kategori aktivitas ekonomi ke terhadap total kejadian di total kategori *n*
I : kategori aktivitas ekonomi ke-*i*
n : total kategori

Tabel 2.104 Nilai Indeks Diversitas Entropy Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Barat

No.	Kab/Kota	2019	2023	No.	Kab/Kota	2019	2023
1	Simeulue	0,0797	0,0797	13	Gayo Lues	0,0916	0,0914
2	Aceh Singkil	0,0872	0,0870	14	Aceh Tamiang	0,2359	0,2328
3	Aceh Selatan	0,1840	0,1824	15	Nagan Raya	0,2445	0,2532
4	Aceh Tenggara	0,1486	0,1461	16	Aceh Jaya	0,0966	0,0958
5	Aceh Timur	0,3007	0,3036	17	Bener Meriah	0,1485	0,1485
6	Aceh Tengah	0,2259	0,2278	18	Pidie Jaya	0,1167	0,1151
7	Aceh Barat	0,2702	0,2783	19	Kota Banda Aceh	0,5185	0,5215
8	Aceh Besar	0,3688	0,3691	20	Kota Sabang	0,0602	0,0590
9	Pidie	0,2920	0,2925	21	Kota Langsa	0,1726	0,1741
10	Bireuen	0,3544	0,3579	22	Kota Lhokseumawe	0,2809	0,2803
11	Aceh Utara	0,5298	0,5239	23	Kota Subulussalam	0,0704	0,0722
12	Aceh Barat Daya	0,1366	0,1360		**Jumlah**	**5,0142**	**5,0284**

Sumber: Hasil Analisis Indeks Diversitas Entropy Tahun 2019 dan 2023

Hasil analisis indeks diversitas entropy disajikan pada Tabel 2.101. Pada Tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai Entropy Total (S_{tot}) pada tahun 2019 dan 2023 masing-masing adalah 5,0142 dan 5,0284. Nilai indeks entropy total mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2023 yang menunjukkan bahwa perkembangan wilayah semakin meningkat, serta semakin bertambah jumlah jenis aktivitas/sektor ekonomi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Besarnya nilai indeks entropy di masing-masing kabupaten/kota menunjukkan besarnya indeks yang dikontribusikan oleh setiap wilayah terhadap tingkat perkembangan wilayah secara agregat di Provinsi Aceh. Wilayah kabupaten/kota dengan nilai entropy yang tinggi menggambarkan bahwa kabupaten/kota tersebut mempunyai nilai PDRB yang tinggi dan tingkat keberagaman sektor nya tinggi (jumlah jenis aktivitas/sektor ekonomi yang berkembang lebih beragam). Nilai entropy total Kabupaten Aceh Barat juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2023, yaitu dari angka 0,2702 (2019) menjadi 0,2783 (tahun 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan.

Tabel 2.105 Nilai Entropy Total, Entropy Maksimum, dan Entropy Relatif Provinsi Aceh Tahun 2019 dan 2023

Nilai	2019	2023
Entropy total (S_{tot})	5,0142	5,0284
Entropy maks (S_{max})	5,6664	5,6664
Entropy relatif ($S_{relatif}$)	0,8849	0,8874
Entropy relatif (%)	88,49	88,74

Sumber: Hasil analisis indeks diversitas entropy tahun 2019 dan 2023

Sementara itu, Tabel 2.102 menyajikan perbandingan antara nilai entropy total, entropy maksimal dan entropy relatif. Nilai Entropy relatif diperoleh dari perbandingan antara nilai entropy total dengan entropy maksimum. Nilai entropy maksimum diperoleh ketika nilai PDRB seluruh sektor di seluruh wilayah berimbang. Artinya, seluruh sektor atau aktivitas ekonomi di suatu wilayah berkembang secara merata dan berimbang. Jika persentase nilai entropy relatif semakin mendekati angka 100%, maka hal tersebut menandakan bahwa Tingkat perkembangan di suatu wilayah sudah mendekati optimum. Namun sebaliknya, jika persentase nilai entropy relatif masih jauh dari angka 100%, hal tersebut menandakan bahwa tingkat perkembangan suatu wilayah masih belum optimal dan masih berpeluang untuk terus ditingkatkan/dioptimalkan di waktu yang akan datang. Jika ditinjau dari hasil perhitungan persentase nilai entropy relatif Provinsi Aceh, dapat diketahui bahwa di tahun 2019 maupun 2023 nilainya adalah sebesar 88%. Angka persentase tersebut tergolong cukup tinggi dan mendekati angka 100%. Meskipun belum sepenuhnya optimal, namun jika dilihat dari tren angkanya, terjadi peningkatan nilai persentase dari 88,49% di tahun 2019 menjadi 88,74% di tahun 2023. Peningkatan nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkembangan wilayah di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2023 ke arah yang lebih baik, yang ditandai dengan peningkatan nilai PDRB dan semakin meningkatnya jumlah aktivitas ekonomi (perkembangan sektor-sektor).

B. Analisis Keunggulan Komparatif (*Location Quotient*/LQ)

Keunggulan komparatif merupakan dasar perekonomian yang perlu dioptimalkan melalui pembangunan ekonomi, sehingga dapat menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*) bagi pembangunan suatu daerah. Untuk meningkatkan daya saing daerah, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong dan mengolah pengembangan potensi pasar regional menjadi bentuk nyata. Dengan potensi tersebut, suatu daerah akan dapat membangun kompetensi inti dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal.

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk melihat sektor basis atau non basis pada suatu wilayah perencanaan dan dapat mengidentifikasi sektor basis atau keunggulan komparatif suatu wilayah (Rustiadi *et al*. 2011). *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah ke-*i* terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. Persamaan dari LQ adalah:

$$LQij = \frac{Xij}{X.j} / \frac{Xi.}{X..}$$

di mana:

Xij : Nilai PDRB sektor j di wilayah i *Xj* : Nilai PDRB sektor j total seluruh wilayah
Xi. : Nilai PDRB total wilayah i *X..* : Nilai PDRB total seluruh wilayah

Cara menginterpretasikan hasil analisis LQ adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai *LQi* > 1, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktivitas di sub wilayah ke-*i* secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktivitas di sub wilayah ke-*i*.
b. Jika nilai *LQi* = 1, maka sub wilayah ke-*i* tersebut mempunyai pangsa aktivitas setara dengan pangsa total.
c. Jika *LQi* < 1, maka sub wilayah ke-*i* tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan di seluruh wilayah.

Dalam kajian ini, analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif di masing-masing wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per sektor (17 sektor) untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh, pada dua titik waktu, yaitu tahun 2019 dan 2023. Data PDRB yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari BPS Provinsi Aceh dan SIMREG Bappenas. Berdasarkan hasil analisis LQ untuk seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, maka nilai LQ untuk masing-masing sektor di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.106 Nilai LQ untuk Masing-Masing Sektor di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 dan 2023

No.	Sektor	LQ 2019	LQ 2023
1	Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,802	0,761
2	Sektor Industri Pengolahan	0,321	0,325
3	Sektor Informasi dan komunikasi	0,803	0,795
4	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,798	0,771
5	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	1,084	1,019
6	Sektor Jasa Lainnya	0,431	0,410
7	Sektor Jasa Pendidikan	0,740	0,706
8	Sektor Jasa Perusahaan	0,654	0,622
9	Sektor Jasa Konstruksi	1,078	0,999
10	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,413	0,419
11	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,785	0,779
12	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,870	0,869
13	Sektor Pertambangan dan Penggalian	2,753	3,016
14	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,986	0,964
15	Sektor Real Estate	0,731	0,719
16	Sektor Transportasi dan Pergudangan	0,733	0,668
17	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	0,861	0,832

Sumber: Hasil Analisis LQ Tahun 2019 dan 2023

Ditinjau dari besarnya nilai indeks LQ pada masing-masing sektor di Kabupaten Aceh Barat, dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki keunggulan komparatif (LQ>1) dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh pada tahun 2019 adalah: (1) Sektor Pertambangan dan Penggalian; (2) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; dan (3) Sektor Jasa

Konstruksi. Namun, jika ditinjau dari besarnya nilai indeks LQ untuk ketiga sektor tersebut dari tahun 2019 dan 2023, terjadi penurunan nilai indeks LQ untuk Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi serta Sektor Jasa Konstruksi. Nilai indeks LQ untuk Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami penurunan dari 1,084 (tahun 2019) menjadi 1,019 (tahun 2023). Bahkan nilai indeks LQ untuk Sektor Jasa Konstruksi mengalami penurunan dari 1,078 (tahun 2019) menjadi 0,999 (tahun 2023), sehingga pada tahun 2023 sektor ini tidak lagi menjadi sektor yang memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Aceh Barat. Namun demikian, Sektor Pertambangan dan Penggalian nilai indeks LQ nya justru mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2023, yaitu meningkat dari 2,753 menjadi 3,016. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi pemusatan aktivitas untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Aceh Barat bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Provinsi Aceh.

C. Analisis Keunggulan Kompetitif (*Shift Share Analysis*/SSA)

Teknik *Shift Share Analysis* (SSA) bertujuan untuk menganalisis keunggulan kompetitif suatu sektor atau aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Teknik analisis SSA biasanya dikombinasikan dengan analisis indeks LQ untuk mengidentifikasi sektor basis atau sektor unggulan di suatu wilayah. Selain itu, teknik analisis SSA juga dapat digunakan untuk mengetahui pergeseran kinerja suatu sektor di suatu wilayah untuk dipilah berdasarkan sumber-sumber penyebab pergeseran. Ada tiga sumber penyebab pergeseran yaitu:

1. Komponen *Regional Share* (RS), menunjukkan kontribusi pergeseran total seluruh sektor di total wilayah agregat yang lebih luas;
2. Komponen *Proportional Shift* (PS), menunjukkan pergeseran total sektor tertentu di wilayah agregat yang lebih luas; dan
3. Komponen *Differential Shift* (DS), menunjukkan pergeseran suatu sektor tertentu di suatu wilayah tertentu.

Apabila komponen *differential shift* bernilai positif maka suatu wilayah dianggap memiliki keunggulan kompetitif karena secara fundamental masih memiliki potensi untuk terus tumbuh meskipun faktor-faktor eksternal (komponen *share* dan *proportional shift*) tidak mendukung. Karena berbicara tentang pergeseran, maka komponen waktu dipertimbangkan dalam analisis ini. SSA dilakukan dengan menggunakan data dari dua titik waktu untuk menganalisis pergeseran. Karena hanya menggunakan 2 titik waktu maka sebisa mungkin dicari rentang waktu yang menunjukkan nilai pergeseran yang relatif stabil. Sebab, apabila rentang waktu yang dipilih terlalu pendek, maka pergeseran bisa saja terjadi karena perubahan-perubahan yang sesaat. Namun apabila terlalu panjang, dinamika kinerja sektor dalam jangka pendek tidak dapat dilihat.

Teknik SSA ini dapat digunakan untuk memotret tingkat keunggulan kompetitif wilayah secara cepat. Selain itu juga dapat memetakan sejauh mana pengaruh pertumbuhan total sektor di total wilayah agregat dan pergeseran sektor tertentu di wilayah agregat terhadap kinerja sektor tertentu di wilayah tertentu. Dengan demikian, maka kebijakan pembangunan wilayah dapat dengan segera memetakan program-program unggulan wilayah berdasarkan jenis dan tingkat kompetitif suatu sektor di suatu wilayah.

Data yang digunakan dalam analisis ini berupa data PDRB per sektor. Pergeseran PDRB per sektor menggambarkan pergeseran dari sisi nilai tambah perekonomian yang dihasilkan

oleh tiap sektor. Sementara pergeseran jumlah tenaga kerja per sektor menggambarkan pergeseran daya tarik suatu sektor dalam meningkatkan produksi sekaligus untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. Rumus umum dari persamaan SSA adalah sebagai berikut:

$$\frac{X_{ij(t1)}}{X_{ij(t0)}} - 1 = \left(\frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} - 1 \right) + \left(\frac{X_{i.(t1)}}{X_{i.(t0)}} - \frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} \right) + \left(\frac{X_{ij(t1)}}{X_{ij(t0)}} - \frac{X_{i.(t1)}}{X_{i.(t0)}} \right)$$

a b c

Keterangan

a : komponen *Regional Share* (RS)
b : komponen *Proportional Shift* (PS)
c : komponen *Differential Shift* (DS)
X.. : Nilai total PDRB seluruh sektor di Provinsi Aceh
$X_{i.}$: Nilai total PDRB seluruh sektor di kabupaten/kota ke-*i*
X_{ij} : Nilai aktivitas/sektor ke-*j* dalam unit wilayah kabupaten/kota ke-*i*
t_1 : titik tahun akhir (2023)
t_0 : titik tahun awal (2019)

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa pergeseran nilai aktivitas ke-*i* dan wilayah ke-*j* dapat didekomposisi menjadi kontribusi dari komponen *share* + komponen *proportional shift* + komponen *differential shift*. Harapannya komponen *differential shift* memiliki nilai positif yang berarti bahwa kinerja aktivitas/sektor di level lokal memiliki potensi yang masih bisa dikembangkan, terlepas dari kontribusi yang disumbangkan oleh faktor-faktor eksternal (komponen *share* dan *proportional shift*). Ilustrasinya, apabila wilayah tersebut seolah-olah berdiri sendiri, tanpa komponen *share* dan *proportional shift*-pun, pertumbuhan masih bisa terjadi. Apabila komponen *differential shift* memiliki nilai negatif maka dinamika pertumbuhan aktivitas/sektor yang terjadi bersifat semu karena lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal (komponen *share* dan *proportional shift*). Ilustrasinya, apabila wilayah tersebut seolah-olah berdiri sendiri, tanpa komponen *share* dan *proportional shift*, wilayah tersebut akan mengalami kemunduran.

Dalam kajian ini analisis SSA yang dilakukan hanya pada komponen *Differential Shift* (DS), sebab dari ketiga komponen SSA, komponen DS lah yang mencerminkan adanya keunggulan kompetitif suatu sektor di suatu wilayah. Pada kajian ini analisis SSA dilakukan dengan data PDRB per sektor tahun 2019 dan 2023, sehingga dapat dilihat pergeseran struktur ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh serta dapat melihat tingkat competitiveness dari masing-masing sektor di seluruh wilayah. Berdasarkan hasil analisis SSA, khususnya komponen DS untuk seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, maka nilai DS untuk masing-masing sektor di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut (Tabel 2.104). Adapun nilai seluruh DS hasil analisis SSA untuk masing-masing sektor di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107 Nilai DS (SSA) untuk Masing-Masing Sektor di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023

No	Sektor	DS 2019-2023
1	Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,012
2	Sektor Industri Pengolahan	0,056

No	Sektor	DS 2019-2023
3	Sektor Informasi dan komunikasi	0,041
4	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,009
5	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,019
6	Sektor Jasa Lainnya	-0,011
7	Sektor Jasa Pendidikan	-0,007
8	Sektor Jasa Perusahaan	-0,008
9	Sektor Jasa Konstruksi	-0,037
10	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,057
11	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,039
12	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,043
13	Sektor Pertambangan dan Penggalian	0,157
14	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,020
15	Sektor Real Estate	0,026
16	Sektor Transportasi dan Pergudangan	-0,048
17	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	0,007

Sumber: Hasil Analisis DS SSA Tahun 2019-2023

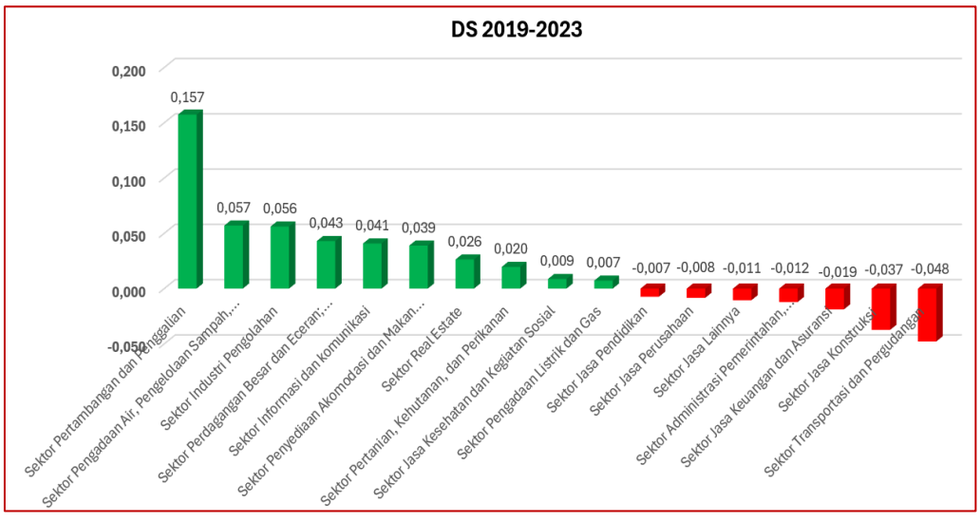

Sumber: Hasil analisis DS SSA tahun 2019-2023 (diolah)

Gambar 2.69
Nilai *Differential Shift* Seluruh Sektor di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2023 Diurutkan Dari Nilai Tertinggi Hingga Terendah

Tabel 2.107 menyajikan nilai komponen DS untuk masing-masing sektor di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2019-2023, di mana urutan nilai DS untuk setiap sektor dari yang nilainya tertinggi hingga terendah dapat dilihat pada grafik yang disajikan pada Gambar 2.73. Dari analisis DS SSA yang disajikan pada Tabel 2.104 dan Gambar 2.73 dapat diketahui bahwa sektor-sektor di Kabupaten Aceh Barat yang memiliki keunggulan kompetitif (yang nilai DS nya positif), diurutkan dari nilai tertinggi hingga terendah adalah: 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian (0,157); 2) Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,057); 3) Sektor Industri Pengolahan (0,056); 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,043); 5) Sektor Informasi dan komunikasi (0,041); 6) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,039); 7) Sektor Real Estate (0,026); 8) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,020); 9) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,009); 10) Sektor Pengadaan

Listrik dan Gas (0,007). Sementara itu, tujuh (7) sektor lainnya memiliki nilai DS yang negatif, di mana sektor yang nilai DS nya paling rendah yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan (-0,048).

D. Sektor Basis atau Sektor Unggulan di Kabupaten Aceh Barat

Penentuan sektor basis atau sektor unggulan di suatu wilayah dapat dilakukan dengan mengombinasikan hasil analisis LQ dengan SSA, terutama dilihat dari komponen *Differential Shift* (DS) nya. Adapun penyandingan nilai indeks LQ dan DS untuk seluruh sektor yang ada di Kabupaten Aceh Barat disajikan pada Tabel 2.108 berikut ini.

Tabel 2.108 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Seluruh Sektor yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 dan 2023

No	Sektor	LQ 2019	LQ 2023	DS 2019-2023
1	Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,802	0,761	-0,012
2	Sektor Industri Pengolahan	0,321	0,325	**0,056**
3	Sektor Informasi dan komunikasi	0,803	0,795	**0,041**
4	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,798	0,771	**0,009**
5	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	**1,084**	**1,019**	-0,019
6	Sektor Jasa Lainnya	0,431	0,410	-0,011
7	Sektor Jasa Pendidikan	0,740	0,706	-0,007
8	Sektor Jasa Perusahaan	0,654	0,622	-0,008
9	Sektor Jasa Konstruksi	**1,078**	0,999	-0,037
10	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,413	0,419	**0,057**
11	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,785	0,779	**0,039**
12	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,870	0,869	**0,043**
13	Sektor Pertambangan dan Penggalian	**2,753**	**3,016**	**0,157**
14	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,986	0,964	**0,020**
15	Sektor Real Estate	0,731	0,719	**0,026**
16	Sektor Transportasi dan Pergudangan	0,733	0,668	-0,048
17	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	0,861	0,832	**0,007**

Sumber: Hasil Analisis LQ dan SSA (2024)

Keterangan: Nilai LQ yang dicetak tebal adalah yang memiliki keunggulan komparatif (LQ>1) Nilai DS yang dicetak tebal adalah yang memiliki keunggulan kompetitif (DS+/positif)

Berdasarkan nilai indeks LQ dan DS untuk seluruh sektor yang ada di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.105, dapat diketahui bahwa sektor basis atau sektor unggulan di Kabupaten Aceh Barat adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian. Hal tersebut disebabkan karena hanya Sektor Pertambangan dan Penggalian yang memenuhi 2 kriteria persyaratan sebagai suatu sektor basis atau sektor unggulan, yaitu: (1) nilai LQ>1 dan (2) nilai DS nya positif. Dengan demikian Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki keunggulan secara komparatif dan kompetitif, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis atau sektor unggulan di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 2.109 Nilai Indeks Diversitas Entropy Kab/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2019

Kab/Kota	Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Sektor Industri Pengolahan	Sektor Informasi dan komunikasi	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Jasa Lainnya	Sektor Jasa Pendidikan	Sektor Jasa Perusahaan	Sektor Jasa Konstruksi	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sektor Pertambangan dan Penggalian	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sektor Real Estate	Sektor Transportasi dan Pergudangan	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	Jumlah
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Simeulue	0,0126	0,0015	0,0039	0,0043	0,0019	0,0011	0,0033	0,0002	0,0077	0,0000	0,0017	0,0104	0,0018	0,0226	0,0034	0,0030	0,0003	**0,0797**
Aceh Singkil	0,0123	0,0045	0,0043	0,0044	0,0025	0,0014	0,0033	0,0008	0,0091	0,0001	0,0014	0,0109	0,0015	0,0207	0,0036	0,0061	0,0003	**0,0872**
Aceh Selatan	0,0242	0,0072	0,0106	0,0045	0,0048	0,0037	0,0071	0,0018	0,0275	0,0001	0,0013	0,0256	0,0079	0,0383	0,0080	0,0110	0,0003	**0,1840**
Aceh Tenggara	0,0190	0,0029	0,0040	0,0073	0,0053	0,0037	0,0055	0,0010	0,0105	0,0001	0,0016	0,0209	0,0023	0,0486	0,0069	0,0085	0,0004	**0,1486**
Aceh Timur	0,0267	0,0126	0,0108	0,0115	0,0072	0,0061	0,0077	0,0015	0,0256	0,0002	0,0047	0,0311	0,0226	0,0965	0,0152	0,0199	0,0009	**0,3007**
Aceh Tengah	0,0228	0,0049	0,0082	0,0078	0,0060	0,0045	0,0057	0,0019	0,0316	0,0002	0,0049	0,0288	0,0036	0,0751	0,0083	0,0113	0,0005	**0,2259**
Aceh Barat	0,0215	0,0058	0,0097	0,0082	0,0069	0,0025	0,0070	0,0019	0,0289	0,0001	0,0042	0,0359	0,0488	0,0614	0,0101	0,0166	0,0007	**0,2702**
Aceh Besar	0,0254	0,0110	0,0196	0,0100	0,0067	0,0068	0,0082	0,0022	0,0528	0,0003	0,0079	0,0589	0,0231	0,0674	0,0251	0,0426	0,0007	**0,3688**
Pidie	0,0287	0,0110	0,0096	0,0113	0,0065	0,0074	0,0092	0,0026	0,0230	0,0001	0,0050	0,0433	0,0119	0,0868	0,0133	0,0215	0,0008	**0,2920**
Bireuen	0,0309	0,0079	0,0128	0,0113	0,0058	0,0068	0,0090	0,0019	0,0345	0,0004	0,0060	0,0783	0,0108	0,0874	0,0145	0,0355	0,0007	**0,3544**
Aceh Utara	0,0210	0,0565	0,0131	0,0174	0,0108	0,0089	0,0129	0,0030	0,0322	0,0003	0,0043	0,0626	0,1095	0,1229	0,0192	0,0342	0,0012	**0,5298**
Aceh Barat Daya	0,0138	0,0044	0,0044	0,0060	0,0035	0,0052	0,0044	0,0007	0,0192	0,0000	0,0015	0,0224	0,0025	0,0330	0,0050	0,0104	0,0003	**0,1366**
Gayo Lues	0,0099	0,0102	0,0018	0,0045	0,0015	0,0007	0,0035	0,0003	0,0081	0,0001	0,0014	0,0115	0,0019	0,0296	0,0036	0,0028	0,0002	**0,0916**
Aceh Tamiang	0,0113	0,0157	0,0104	0,0082	0,0039	0,0055	0,0060	0,0014	0,0158	0,0002	0,0039	0,0254	0,0313	0,0734	0,0118	0,0111	0,0005	**0,2359**
Nagan Raya	0,0142	0,0104	0,0071	0,0060	0,0043	0,0019	0,0061	0,0011	0,0242	0,0001	0,0015	0,0270	0,0406	0,0816	0,0072	0,0108	0,0005	**0,2445**
Aceh Jaya	0,0117	0,0040	0,0036	0,0028	0,0007	0,0007	0,0036	0,0002	0,0145	0,0000	0,0011	0,0107	0,0039	0,0244	0,0045	0,0099	0,0003	**0,0966**
Bener Meriah	0,0135	0,0046	0,0031	0,0046	0,0045	0,0026	0,0040	0,0006	0,0227	0,0001	0,0010	0,0119	0,0017	0,0594	0,0042	0,0097	0,0003	**0,1485**
Pidie Jaya	0,0133	0,0045	0,0045	0,0036	0,0014	0,0011	0,0052	0,0006	0,0101	0,0000	0,0017	0,0135	0,0024	0,0421	0,0057	0,0066	0,0003	**0,1167**
Kota Banda Aceh	0,0919	0,0148	0,0412	0,0246	0,0179	0,0143	0,0368	0,0162	0,0362	0,0012	0,0222	0,0886	0,0000	0,0083	0,0411	0,0592	0,0038	**0,5185**
Kota Sabang	0,0091	0,0017	0,0016	0,0041	0,0017	0,0014	0,0029	0,0002	0,0163	0,0002	0,0023	0,0086	0,0007	0,0043	0,0026	0,0024	0,0002	**0,0602**
Kota Langsa	0,0139	0,0151	0,0113	0,0107	0,0059	0,0053	0,0044	0,0023	0,0165	0,0002	0,0064	0,0412	0,0011	0,0147	0,0085	0,0148	0,0004	**0,1726**
Kota Lhokseumawe	0,0137	0,0462	0,0126	0,0119	0,0089	0,0052	0,0053	0,0041	0,0374	0,0001	0,0061	0,0534	0,0018	0,0247	0,0148	0,0337	0,0010	**0,2809**
Kota Subulussalam	0,0051	0,0092	0,0026	0,0016	0,0018	0,0006	0,0020	0,0004	0,0101	0,0000	0,0009	0,0122	0,0021	0,0143	0,0029	0,0045	0,0001	**0,0704**
Jumlah	**0,4664**	**0,2667**	**0,2109**	**0,1866**	**0,1202**	**0,0976**	**0,1632**	**0,0468**	**0,5145**	**0,0039**	**0,0931**	**0,7331**	**0,3337**	**1,1374**	**0,2395**	**0,3861**	**0,0145**	**5,0142**

Tabel 2.110 Nilai Indeks Diversitas Entropy Kab/Kota Se-Provinsi Aceh tahun 2023

Kab/Kota	Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Sektor Industri Pengolahan	Sektor Informasi dan komunikasi	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Jasa Lainnya	Sektor Jasa Pendidikan	Sektor Jasa Perusahaan	Sektor Jasa Konstruksi	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sektor Pertambangan dan Penggalian	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sektor Real Estate	Sektor Transportasi dan Pergudangan	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	Jumlah
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Simeulue	0,0121	0,0014	0,0047	0,0049	0,0017	0,0012	0,0033	0,0002	0,0079	0,0000	0,0016	0,0102	0,0017	0,0224	0,0035	0,0025	0,0003	**0,0797**
Aceh Singkil	0,0120	0,0045	0,0050	0,0051	0,0021	0,0015	0,0034	0,0008	0,0089	0,0001	0,0013	0,0111	0,0015	0,0206	0,0035	0,0052	0,0003	**0,0870**
Aceh Selatan	0,0230	0,0065	0,0121	0,0052	0,0044	0,0041	0,0074	0,0018	0,0270	0,0001	0,0014	0,0255	0,0078	0,0382	0,0080	0,0097	0,0003	**0,1824**
Aceh Tenggara	0,0184	0,0029	0,0048	0,0083	0,0046	0,0040	0,0056	0,0010	0,0108	0,0000	0,0015	0,0207	0,0023	0,0465	0,0068	0,0075	0,0004	**0,1461**
Aceh Timur	0,0264	0,0132	0,0121	0,0132	0,0066	0,0067	0,0081	0,0016	0,0257	0,0002	0,0051	0,0316	0,0221	0,0951	0,0156	0,0194	0,0008	**0,3036**
Aceh Tengah	0,0225	0,0054	0,0100	0,0090	0,0053	0,0049	0,0056	0,0019	0,0309	0,0002	0,0056	0,0295	0,0037	0,0734	0,0084	0,0111	0,0005	**0,2278**
Aceh Barat	0,0205	0,0059	0,0117	0,0095	0,0061	0,0027	0,0071	0,0019	0,0286	0,0001	0,0047	0,0367	0,0558	0,0617	0,0103	0,0144	0,0007	**0,2783**
Aceh Besar	0,0249	0,0106	0,0250	0,0117	0,0058	0,0077	0,0089	0,0022	0,0606	0,0003	0,0092	0,0573	0,0246	0,0670	0,0252	0,0274	0,0007	**0,3691**
Pidie	0,0273	0,0105	0,0110	0,0130	0,0057	0,0078	0,0093	0,0027	0,0246	0,0001	0,0058	0,0428	0,0125	0,0857	0,0126	0,0206	0,0007	**0,2925**
Bireuen	0,0304	0,0076	0,0154	0,0131	0,0055	0,0073	0,0090	0,0020	0,0348	0,0004	0,0069	0,0772	0,0112	0,0873	0,0144	0,0347	0,0008	**0,3579**
Aceh Utara	0,0203	0,0516	0,0144	0,0201	0,0096	0,0096	0,0135	0,0029	0,0313	0,0003	0,0047	0,0621	0,1085	0,1219	0,0194	0,0326	0,0012	**0,5239**
Aceh Barat Daya	0,0129	0,0043	0,0050	0,0068	0,0032	0,0056	0,0046	0,0007	0,0189	0,0000	0,0015	0,0228	0,0024	0,0327	0,0049	0,0095	0,0003	**0,1360**
Gayo Lues	0,0095	0,0101	0,0022	0,0052	0,0013	0,0007	0,0035	0,0003	0,0078	0,0000	0,0013	0,0114	0,0018	0,0300	0,0034	0,0026	0,0002	**0,0914**
Aceh Tamiang	0,0107	0,0171	0,0115	0,0094	0,0036	0,0059	0,0060	0,0014	0,0154	0,0002	0,0042	0,0233	0,0308	0,0714	0,0117	0,0098	0,0005	**0,2328**
Nagan Raya	0,0136	0,0106	0,0083	0,0068	0,0038	0,0021	0,0067	0,0012	0,0249	0,0000	0,0016	0,0270	0,0449	0,0827	0,0074	0,0110	0,0005	**0,2532**
Aceh Jaya	0,0112	0,0041	0,0042	0,0032	0,0006	0,0008	0,0037	0,0002	0,0145	0,0000	0,0011	0,0106	0,0040	0,0245	0,0044	0,0082	0,0003	**0,0958**
Bener Meriah	0,0132	0,0045	0,0033	0,0053	0,0043	0,0027	0,0041	0,0006	0,0228	0,0001	0,0010	0,0117	0,0018	0,0599	0,0041	0,0087	0,0003	**0,1485**
Pidie Jaya	0,0125	0,0043	0,0054	0,0042	0,0012	0,0012	0,0052	0,0006	0,0094	0,0000	0,0018	0,0133	0,0024	0,0414	0,0057	0,0061	0,0003	**0,1151**
Kota Banda Aceh	0,0892	0,0140	0,0480	0,0277	0,0166	0,0151	0,0382	0,0159	0,0359	0,0011	0,0228	0,0878	0,0000	0,0085	0,0404	0,0565	0,0038	**0,5215**
Kota Sabang	0,0083	0,0017	0,0019	0,0048	0,0015	0,0014	0,0029	0,0002	0,0153	0,0001	0,0025	0,0085	0,0006	0,0042	0,0025	0,0024	0,0002	**0,0590**
Kota Langsa	0,0135	0,0142	0,0133	0,0119	0,0052	0,0060	0,0045	0,0023	0,0170	0,0001	0,0070	0,0402	0,0011	0,0147	0,0086	0,0143	0,0004	**0,1741**
Kota Lhokseumawe	0,0134	0,0453	0,0151	0,0135	0,0079	0,0057	0,0054	0,0043	0,0363	0,0001	0,0068	0,0531	0,0018	0,0235	0,0152	0,0321	0,0010	**0,2803**
Kota Subulussalam	0,0052	0,0099	0,0030	0,0019	0,0016	0,0007	0,0021	0,0004	0,0107	0,0000	0,0009	0,0123	0,0018	0,0145	0,0028	0,0043	0,0001	**0,0722**
Jumlah	**0,4512**	**0,2602**	**0,2476**	**0,2141**	**0,1080**	**0,1054**	**0,1678**	**0,0470**	**0,5201**	**0,0037**	**0,1002**	**0,7267**	**0,3451**	**1,1277**	**0,2386**	**0,3506**	**0,0144**	**5,0284**

Tabel 2.111 Nilai Indeks Location Quotient (LQ) Kab/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2019

Kab/Kota	Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Sektor Industri Pengolahan	Sektor Informasi dan komunikasi	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Jasa Lainnya	Sektor Jasa Pendidikan	Sektor Jasa Perusahaan	Sektor Jasa Konstruksi	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sektor Pertambangan dan Penggalian	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sektor Real Estate	Sektor Transportasi dan Pergudangan	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Simeulue	1,84	0,29	1,22	1,62	1,04	0,73	1,38	0,26	0,95	0,26	1,20	0,84	0,24	1,22	0,91	0,43	1,24
Aceh Singkil	1,65	0,94	1,26	1,55	1,32	0,88	1,24	1,07	1,07	1,21	0,91	0,82	0,17	1,01	0,88	0,90	1,57

Kab/Kota	Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Sektor Industri Pengolahan	Sektor Informasi dan komunikasi	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Jasa Lainnya	Sektor Jasa Pendidikan	Sektor Jasa Perusahaan	Sektor Jasa Konstruksi	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sektor Pertambangan dan Penggalian	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sektor Real Estate	Sektor Transportasi dan Pergudangan	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Aceh Selatan	1,52	0,67	1,47	0,65	1,15	1,10	1,24	1,00	1,66	0,52	0,34	0,94	0,49	0,88	0,91	0,74	0,62
Aceh Tenggara	1,40	0,29	0,59	1,40	1,58	1,34	1,14	0,67	0,64	0,42	0,51	0,90	0,14	1,47	0,95	0,67	0,92
Aceh Timur	0,90	0,68	0,78	1,01	0,96	1,01	0,71	0,44	0,79	0,84	0,76	0,62	0,90	1,54	1,02	0,78	0,96
Aceh Tengah	1,03	0,31	0,79	0,89	1,09	0,97	0,70	0,79	1,43	0,94	1,12	0,79	0,14	1,53	0,69	0,55	0,70
Aceh Barat	0,80	0,32	0,80	0,80	1,08	0,43	0,74	0,65	1,08	0,41	0,79	0,87	2,75	0,99	0,73	0,73	0,86
Aceh Besar	0,69	0,47	1,31	0,70	0,72	0,94	0,62	0,54	1,60	1,15	1,14	1,14	0,75	0,78	1,53	1,63	0,60
Pidie	1,02	0,60	0,71	1,03	0,90	1,32	0,92	0,87	0,73	0,30	0,86	0,98	0,44	1,40	0,90	0,90	0,86
Bireuen	0,87	0,32	0,77	0,80	0,61	0,93	0,69	0,45	0,93	1,33	0,82	1,65	0,30	1,09	0,78	1,29	0,59
Aceh Utara	0,32	2,10	0,47	0,80	0,75	0,76	0,64	0,46	0,51	0,52	0,33	0,73	3,35	1,05	0,65	0,73	0,64
Aceh Barat Daya	1,09	0,54	0,74	1,27	1,15	2,25	1,00	0,50	1,51	0,17	0,57	1,12	0,18	1,03	0,74	0,97	0,83
Gayo Lues	1,15	2,23	0,42	1,44	0,68	0,34	1,22	0,29	0,85	0,72	0,82	0,79	0,21	1,41	0,79	0,34	0,64
Aceh Tamiang	0,43	1,20	1,02	0,92	0,64	1,22	0,73	0,54	0,60	0,99	0,85	0,66	1,83	1,45	1,02	0,53	0,68
Nagan Raya	0,52	0,67	0,59	0,58	0,67	0,33	0,67	0,38	0,92	0,21	0,25	0,65	2,32	1,53	0,52	0,47	0,61
Aceh Jaya	1,35	0,72	0,88	0,79	0,28	0,38	1,22	0,20	1,61	0,38	0,58	0,70	0,47	1,07	0,99	1,38	1,02
Bener Meriah	0,88	0,47	0,41	0,78	1,26	0,83	0,75	0,35	1,53	0,55	0,29	0,43	0,10	1,81	0,51	0,74	0,66
Pidie Jaya	1,20	0,64	0,88	0,83	0,46	0,45	1,40	0,48	0,81	0,42	0,72	0,70	0,20	1,62	1,01	0,66	0,85
Kota Banda Aceh	2,37	0,44	2,16	1,36	1,54	1,48	2,53	3,71	0,65	3,15	2,58	1,29	0,00	0,04	1,86	1,64	2,67
Kota Sabang	1,76	0,49	0,60	2,19	1,29	1,30	1,66	0,40	3,26	4,32	2,40	0,94	0,11	0,24	0,91	0,46	1,29
Kota Langsa	0,85	1,78	1,74	1,95	1,62	1,81	0,79	1,47	0,98	1,27	2,29	1,86	0,06	0,30	1,08	1,15	0,74
Kota Lhokseumawe	0,45	3,84	1,08	1,20	1,42	0,96	0,53	1,58	1,45	0,32	1,19	1,41	0,05	0,30	1,12	1,71	1,24
Kota Subulussalam	0,75	2,78	0,88	0,64	1,14	0,47	0,93	0,55	1,55	0,44	0,65	1,19	0,34	0,82	0,88	0,80	0,67

Tabel 2.112 Nilai Indeks Location Quotient (LQ) Kab/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2023

Kab/Kota	Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Sektor Industri Pengolahan	Sektor Informasi dan komunikasi	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Jasa Lainnya	Sektor Jasa Pendidikan	Sektor Jasa Perusahaan	Sektor Jasa Konstruksi	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sektor Pertambangan dan Penggalian	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sektor Real Estate	Sektor Transportasi dan Pergudangan	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Simeulue	1,82	0,29	1,25	1,62	1,08	0,74	1,33	0,25	0,96	0,26	1,05	0,83	0,22	1,22	0,92	0,40	1,25
Aceh Singkil	1,68	0,99	1,24	1,55	1,25	0,89	1,24	1,08	1,03	1,19	0,79	0,85	0,17	1,02	0,86	0,85	1,58
Aceh Selatan	1,51	0,63	1,43	0,66	1,19	1,11	1,28	1,03	1,61	0,55	0,33	0,95	0,47	0,90	0,92	0,72	0,61
Aceh Tenggara	1,44	0,31	0,61	1,43	1,56	1,36	1,15	0,69	0,67	0,42	0,44	0,92	0,14	1,45	0,96	0,66	0,97
Aceh Timur	0,92	0,74	0,74	1,01	0,99	1,03	0,72	0,46	0,78	0,87	0,76	0,64	0,84	1,52	1,05	0,85	0,91
Aceh Tengah	1,05	0,36	0,82	0,89	1,07	0,99	0,67	0,80	1,37	0,93	1,20	0,82	0,14	1,50	0,70	0,61	0,70
Aceh Barat	0,76	0,32	0,80	0,77	1,02	0,41	0,71	0,62	1,00	0,42	0,78	0,87	3,02	0,96	0,72	0,67	0,83
Aceh Besar	0,70	0,47	1,45	0,72	0,70	0,99	0,67	0,54	1,89	1,13	1,25	1,12	0,78	0,78	1,54	1,06	0,58
Pidie	1,01	0,60	0,69	1,04	0,87	1,28	0,90	0,89	0,78	0,31	0,93	0,98	0,44	1,39	0,85	0,96	0,79
Bireuen	0,88	0,31	0,79	0,81	0,64	0,91	0,67	0,49	0,91	1,35	0,88	1,63	0,30	1,10	0,77	1,40	0,66
Aceh Utara	0,33	1,97	0,45	0,83	0,75	0,77	0,66	0,45	0,49	0,53	0,34	0,75	3,23	1,07	0,67	0,79	0,66
Aceh Barat Daya	1,06	0,54	0,71	1,25	1,18	2,27	1,02	0,52	1,46	0,18	0,51	1,17	0,17	1,04	0,73	0,99	0,79
Gayo Lues	1,14	2,29	0,44	1,45	0,64	0,33	1,17	0,26	0,80	0,74	0,70	0,79	0,19	1,46	0,76	0,34	0,66
Aceh Tamiang	0,43	1,41	0,96	0,94	0,67	1,24	0,71	0,55	0,58	1,03	0,86	0,61	1,76	1,45	1,04	0,52	0,67
Nagan Raya	0,49	0,69	0,56	0,56	0,63	0,33	0,69	0,39	0,90	0,21	0,24	0,63	2,43	1,51	0,52	0,52	0,57
Aceh Jaya	1,35	0,79	0,89	0,81	0,27	0,38	1,20	0,20	1,61	0,38	0,55	0,70	0,46	1,10	0,99	1,26	1,07
Bener Meriah	0,89	0,47	0,37	0,78	1,37	0,82	0,74	0,34	1,51	0,56	0,27	0,43	0,10	1,85	0,50	0,74	0,64
Pidie Jaya	1,18	0,64	0,92	0,84	0,44	0,46	1,37	0,49	0,75	0,40	0,75	0,72	0,20	1,64	1,03	0,68	0,88
Kota Banda Aceh	2,36	0,43	2,15	1,33	1,58	1,44	2,55	3,61	0,63	3,10	2,43	1,29	0,00	0,04	1,82	1,74	2,72
Kota Sabang	1,70	0,50	0,62	2,25	1,30	1,27	1,66	0,41	3,05	4,23	2,44	,97	0,10	0,25	0,93	0,53	1,29
Kota Langsa	0,86	1,71	1,73	1,88	1,57	1,88	0,77	1,47	0,99	1,27	2,33	1,82	0,05	0,30	1,09	1,23	0,74
Kota Lhokseumawe	0,47	3,91	1,11	1,20	1,40	0,98	0,52	1,66	1,38	0,33	1,23	1,43	0,05	0,29	1,18	1,82	1,24
Kota Subulussalam	0,78	3,07	0,84	0,63	1,10	0,44	0,89	0,54	1,58	0,45	0,64	1,19	0,26	0,82	0,81	0,83	0,66

Tabel 2.113 Nilai Indeks *Differential Shift* (DS) Hasil Analisis SSA (*Shift Share Analysis*) Kab/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun 2023

Kab/Kota	Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Sektor Industri Pengolahan	Sektor Informasi dan komunikasi	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Jasa Lainnya	Sektor Jasa Pendidikan	Sektor Jasa Perusahaan	Sektor Jasa Konstruksi	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sektor Pertambangan dan Penggalian	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sektor Real Estate	Sektor Transportasi dan Pergudangan	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Simeulue	-0,01	0,02	0,03	0,00	0,04	0,02	-0,04	-0,02	0,01	0,01	-0,14	-0,01	-0,10	0,00	0,01	-0,06	0,00
Aceh Singkil	0,02	0,05	-0,03	0,00	-0,06	0,01	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-0,16	0,04	-0,03	0,01	-0,03	-0,06	0,00
Aceh Selatan	-0,02	-0,08	-0,05	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,04	-0,07	0,01	-0,07	0,01	0,00	-0,03	-0,03
Aceh Tenggara	0,00	0,02	0,02	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,02	-0,18	0,00	-0,03	-0,05	-0,02	-0,03	0,03
Aceh Timur	0,03	0,10	-0,06	0,01	0,03	0,02	0,02	0,05	-0,01	0,04	0,00	0,03	-0,07	-0,01	0,04	0,09	-0,05
Aceh Tengah	0,02	0,15	0,05	0,01	-0,02	0,02	-0,06	0,02	-0,05	-0,01	0,09	0,05	0,00	-0,02	0,02	0,10	0,00
Aceh Barat	-0,01	0,06	0,04	0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,06	0,04	0,04	0,16	0,02	0,03	-0,05	0,01
Aceh Besar	0,02	-0,02	0,14	0,02	-0,03	0,06	0,07	0,01	0,19	-0,02	0,11	-0,03	0,04	0,00	0,01	-0,33	-0,03
Pidie	-0,02	-0,02	-0,05	0,01	-0,03	-0,03	-0,03	0,03	0,07	0,03	0,09	0,00	0,02	-0,01	-0,06	0,07	-0,09
Bireuen	0,02	-0,02	0,04	0,02	0,05	-0,01	-0,03	0,10	-0,01	0,02	0,10	-0,01	0,01	0,01	0,00	0,09	0,12
Aceh Utara	0,00	-0,08	-0,10	0,02	-0,01	0,00	0,01	-0,02	-0,06	0,00	0,02	0,00	-0,06	0,00	0,02	0,06	0,00
Aceh Barat Daya	-0,04	0,00	-0,06	-0,02	0,02	0,00	0,02	0,03	-0,04	0,06	-0,13	0,03	-0,05	0,00	-0,02	0,02	-0,05
Gayo Lues	-0,01	0,03	0,05	0,01	-0,05	-0,02	-0,05	-0,12	-0,07	0,03	-0,17	0,00	-0,10	0,03	-0,05	0,02	0,04
Aceh Tamiang	-0,02	0,15	-0,10	0,00	0,03	0,00	-0,05	-0,01	-0,06	0,02	0,00	-0,09	-0,07	-0,03	0,00	-0,03	-0,04
Nagan Raya	-0,01	0,07	-0,01	-0,01	-0,03	0,07	0,08	0,08	0,02	0,01	0,01	0,01	0,10	0,03	0,05	0,14	-0,03
Aceh Jaya	-0,01	0,08	0,00	0,01	-0,04	0,01	-0,03	-0,05	-0,01	-0,02	-0,07	0,00	-0,03	0,02	-0,02	-0,09	0,03
Bener Meriah	0,01	0,00	-0,14	0,00	0,08	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,11	-0,01	-0,02	0,02	-0,02	0,00	-0,02
Pidie Jaya	-0,03	-0,01	0,03	0,00	-0,06	0,01	-0,04	0,01	-0,10	-0,06	0,02	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,02	0,02
Kota Banda Aceh	0,00	-0,03	0,00	-0,02	0,03	-0,03	0,01	-0,03	-0,03	-0,01	-0,06	0,00	0,00	0,04	-0,02	0,06	0,02
Kota Sabang	-0,07	0,00	-0,01	0,00	-0,03	-0,06	-0,03	-0,02	-0,10	-0,05	-0,01	0,00	-0,10	-0,01	-0,01	0,12	-0,03
Kota Langsa	0,01	-0,03	0,00	-0,04	-0,02	0,05	-0,03	0,01	0,02	0,01	0,03	-0,02	-0,12	0,01	0,01	0,07	0,00
Kota Lhokseumawe	0,02	0,01	0,02	-0,01	-0,02	0,01	-0,03	0,05	-0,06	0,03	0,03	0,00	-0,01	-0,05	0,04	0,06	-0,01
Kota Subulussalam	0,07	0,14	-0,02	0,02	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,06	0,06	0,02	0,03	-0,22	0,02	-0,04	0,07	0,02

E. Analisis Tipologi Wilayah (*Cluster Analysis*)

Secara definisi analisis *cluster* bertujuan untuk melakukan pengelompokan obyek, sedemikian rupa sehingga obyek dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang lebih mirip dibandingkan dengan obyek dalam kelompok lain. Menurut Saeful hakim (2008) tingkat kemiripan antar obyek dapat digambarkan melalui nilai keragaman dan/atau jarak. Semakin kecil nilai keragaman antara obyek yang satu dengan obyek yang lain maka karakteristiknya akan semakin mirip. Semakin dekat jarak antara obyek yang satu dengan obyek yang lain maka karakteristiknya juga akan semakin mirip.

Analisis *cluster* ini pertama kali dikemukakan oleh Tryon, 1939 yang menjelaskan tentang algoritma dan metode untuk mengelompokkan obyek yang memiliki kemiripan berdasarkan pertimbangan kategori tertentu (Statsoft, 1984). Dari perbedaan tingkat kemiripan antar obyek, dapat diperoleh struktur pengelompokan yang mencakup pola dan hierarki pembentukan kelompok, sehingga teknik analisis *cluster* ini juga sering digunakan oleh para ilmuwan untuk memetakan dan mengembangkan ilmu taksonomi.

Dalam kaitannya dengan analisis tipologi wilayah, secara prinsip analisis *cluster* dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu :

1. Identifikasi tingkat kemiripan antar individu wilayah berdasarkan karakteristik atau kategori tertentu.
2. Pembentukan kelompok wilayah berdasarkan aturan atau definisi pengelompokan tertentu yang digunakan.

Pada poin 1, tingkat kemiripan antar individu wilayah dapat diukur melalui pendekatan perhitungan jarak atau nilai keragaman. Pendekatan perhitungan jarak dilakukan melalui pemetaan posisi relatif suatu wilayah terhadap wilayah lainnya dalam suatu ruang yang dimensinya ditentukan oleh jumlah karakteristik/kategori/penciri utama. Sebagai ilustrasi jika jumlah penciri utama sama dengan 2 maka posisi dari setiap wilayah akan berada dalam ruang 2 dimensi (catatan: dimensi hanya bisa terjadi pada saat karakteristik/ kategori/penciri utama yang satu dengan lainnya bersifat saling tegak lurus). Sementara apabila jumlah karakteristik/kategori/penciri utama sama dengan 3 maka posisi dari setiap wilayah akan berada dalam ruang 3 dimensi, dan demikian seterusnya. Hanya untuk jumlah karakteristik/kategori/penciri utama lebih dari 3, sulit digambarkan dalam bentuk grafis/geometrik. Hal ini karena secara grafis/geometrik, maksimal kita hanya dapat menggambarkan ruang 3 dimensi atau volume. Selanjutnya pendekatan keragaman dilakukan melalui perhitungan nilai keragaman bersama antar obyek. Semakin rendah nilai keragaman maka akan semakin seragam/mirip, sementara semakin tinggi nilai keragaman akan semakin beragam/tidak mirip.

Pada poin 2, pengelompokan unit-unit wilayah pada dasarnya dilakukan berdasarkan pada aturan atau definisi tertentu yang dalam istilah teknis disebut sebagai *linkage rules* atau *amalgamation rules*. Setiap aturan atau definisi akan menghasilkan pola pengelompokan yang berbeda. Karena itu pertimbangan dalam menentukan aturan atau definisi yang akan dipakai menjadi penting dan seharusnya juga disesuaikan dengan logika dan teori dari setiap bidang ilmu yang akan menggunakan analisis *cluster* ini. Metode cluster ada 2 macam, yaitu:

1. Metode Cluster Berhirarki

Metode ini memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga cluster akan membentuk semacam "pohon", di mana ada hierarki (tingkatan) yang jelas antar objek, dari yang paling mirip sampai paling tidak mirip. Secara logika semua objek pada akhirnya akan membentuk sebuah cluster. *Dendogram* biasanya digunakan untuk membantu memperjelas proses hierarki tersebut.

Dendogram adalah diagram bercabang yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis di antara objek-objek dalam suatu kumpulan data. Biasanya digunakan dalam analisis klastering hierarkis di bidang statistik dan pembelajaran mesin. Dalam dendogram, setiap cabang mewakili satu klaster, dan panjang cabang menggambarkan tingkat kesamaan atau jarak antara klaster yang digabungkan. Objek-objek yang lebih mirip satu sama lain akan digabungkan pada tingkat yang lebih rendah (dekat akar pohon), sedangkan objek yang kurang mirip akan digabungkan pada tingkat yang lebih tinggi (dekat ujung pohon).

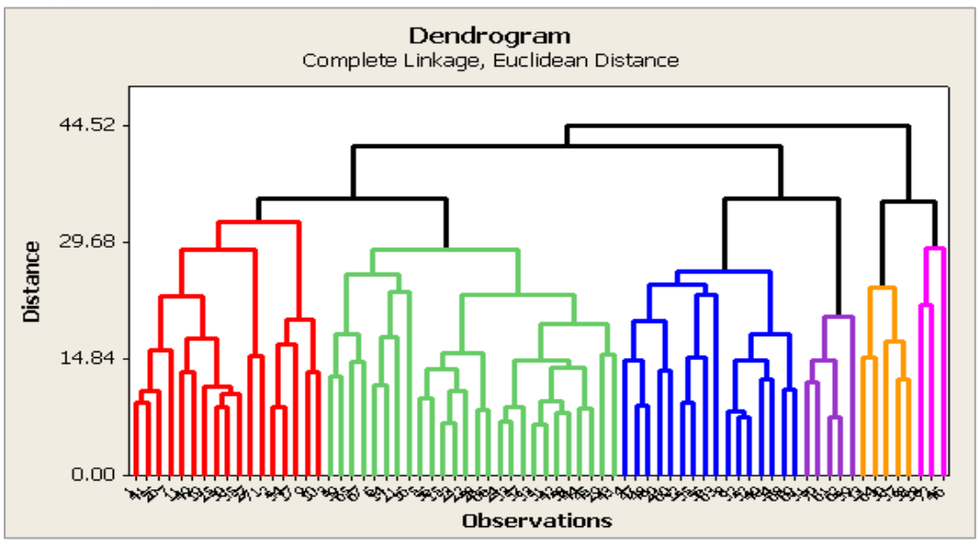

Gambar 2.70
Contoh Bentuk Dendogram Hasil Analisis Cluster Berhierarki

Beberapa metode yang digunakan dalam analisis cluster berhierarki, antara lain:

- *Single Linkage*, prosedur ini didasarkan pada jarak terkecil. Jika dua obyek terpisah oleh jarak yang pendek maka kedua obyek tersebut akan digabung menjadi satu cluster dan demikian seterusnya.
- *Complete Linkage*, berlawanan dengan *Single Linkage* prosedur ini pengelompokannya berdasarkan jarak terjauh.
- *Average Linkage*, prosedur ini hampir sama dengan Single Linkage maupun *Complete Linkage*, namun kriteria yang digunakan adalah rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu cluster dengan jarak seluruh individu dalam cluster yang lain.
- *Ward's Method*, jarak antara dua cluster dalam metode ini berdasarkan *total sum of square* dua cluster pada masing-masing variabel.
- *Centroid Method*, jarak antara dua cluster dalam metode ini berdasarkan jarak *centroid* dua cluster yang bersangkutan.

2. Metode Cluster Tidak Berhirarki

Berbeda dengan metode hierarki, metode ini justru dimulai dengan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan (dua cluster, tiga cluster atau yang lain). Setelah jumlah cluster diketahui, baru proses cluster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini biasa disebut dengan ***K-Means Cluster***. Adapun contoh hasil analisis cluster dengan metode K-Means cluster disajikan pada Gambar 2.71 berikut ini.

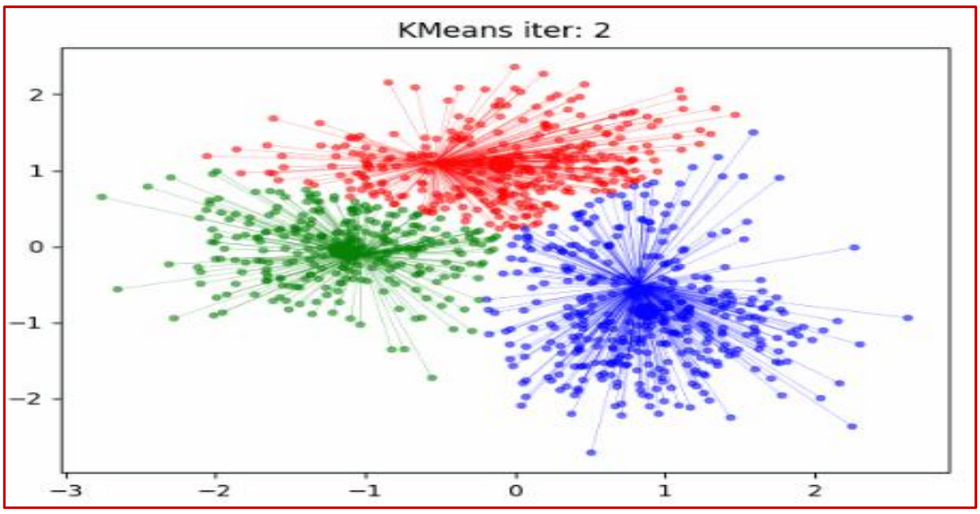

Gambar 2.71
Contoh Tampilan Hasil Analisis Cluster Menggunakan Metode *K-Maens Clustering*

Dalam analisis *cluster* langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa karakteristik atau kategori yang akan digunakan dalam analisis *cluster* bersifat saling bebas (saling tegak lurus). Karena itu sebelum dilakukan analisis *cluster* biasanya dilakukan analisis PCA terlebih dahulu. Namun pada kasus-kasus tertentu analisis *cluster* dapat dilakukan tanpa melalui analisis PCA, yaitu apabila peneliti tersebut yakin bahwa karakteristik atau kategori yang digunakan untuk pengelompokan secara logis dan teoritis memang bersifat saling bebas. Apabila karakteristik atau kategori yang digunakan tidak saling bebas maka hasil pengelompokan yang diperoleh akan mengandung bias.

Selanjutnya karena dalam proses peng-*cluster*-an, tingkat kemiripan menjadi penting maka perlu dilakukan standarisasi data untuk setiap karakteristik/kategori/penciri utama yang berbeda. Hal ini penting karena akan mempengaruhi nilai jarak dan/atau keragaman antar individu wilayah. Untuk data yang telah dianalisis dengan menggunakan PCA, maka otomatis data baru (*factor score*) yang dihasilkan sudah terstandarisasi. Namun untuk data yang tidak melalui analisis PCA, maka standarisasi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan:

$$z_{i,j} = \frac{x_{i,j} - \bar{x}_{.j}}{stdev\ x_{.j}}$$

Keterangan

z_{ij} = data terstandarisasi untuk wilayah ke-*i* dan karakteristik/kategori/penciri utama ke-*j*

x_{ijv} = data asal untuk wilayah ke-i dan karakteristik/kategori/penciri utama ke-*j*

$\bar{x}_{.j}$ = nilai rata-rata wilayah ke-i untuk setiap karakteristik/kategori/penciri utama ke-*j*

stdev x_j = nilai simpangan baku (standar deviasi) wilayah ke-i untuk setiap karakteristik/ kategori/penciri utama ke-*j*

Di dalam kajian ini, analisis cluster dilakukan dengan menggunakan Ward's *method* menggunakan konsep jarak *eucledian distance,* di mana variabel-variabel yang digunakan dalam analisis tipologi wilayah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.114 Variabel-Variabel yang Digunakan dalam Analisis Tipologi Wilayah (*Cluster Analysis*)

No.	Kode	Keterangan Variabel
1	pddk	Jumlah penduduk
2	kpdtn	Kepadatan penduduk
3	IPM	Indeks Pembangunan Manusia
4	RLS	Rata-rata Lama Sekolah
5	HLS	Harapan Lama Sekolah
6	AHH	Angka Harapan Hidup
7	PPP	Puchasing Power Parity
8	p_misk	% Penduduk miskin
9	g_misk	Garis Kemiskinan
10	polindes	Polindes
11	pustu	Puskesmas Pembantu
12	puskes	Puskesmas
13	p_sanits	% sanitasi layak
14	p_airmnm	% air minum layak
15	p_tpt	% Tingkat Pengangguran Terbuka
16	p_tpak	% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
17	j_industbsr	Jumlah industri besar
18	j_tngkrj_ind	Jumlah tenaga kerja industri besar
19	pdrb	PDRB
20	pdrb_kap	PDRB perkapita
21	longs	Longsor
22	kbkrn	Kebakaran
23	banjir	Banjir
24	putbeliung	Putting Beliung
25	gelombpsg	Gelombang pasang
26	gempa	Gempa
27	kkring	Kekeringan
28	IKA	Indeks Kualitas Air
29	IKU	Indeks Kualitas Udara
30	IKL	Indeks Kualitas Lahan
31	IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3. Hasil Analisis Tipologi Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Cluster analysis adalah metode statistik yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki karakteristik serupa ke dalam kelompok-kelompok (*cluster*). Tujuan utama dari cluster analysis adalah untuk memaksimalkan kesamaan antar objek dalam satu kelompok (*intra-cluster similarity*) dan meminimalkan kesamaan antar objek dari kelompok yang berbeda (*inter-cluster similarity*). Dalam kajian ini *cluster analysis* digunakan untuk menganalisis tipologi wilayah, yaitu mengelompokkan unit-unit wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik untuk mempermudah pengelolaan wilayah dan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan/strategi pembangunan. Adapun hasil analisis cluster seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh menggunakan metode *joining (tree clustering)* disajikan pada gambar dendogram berikut.

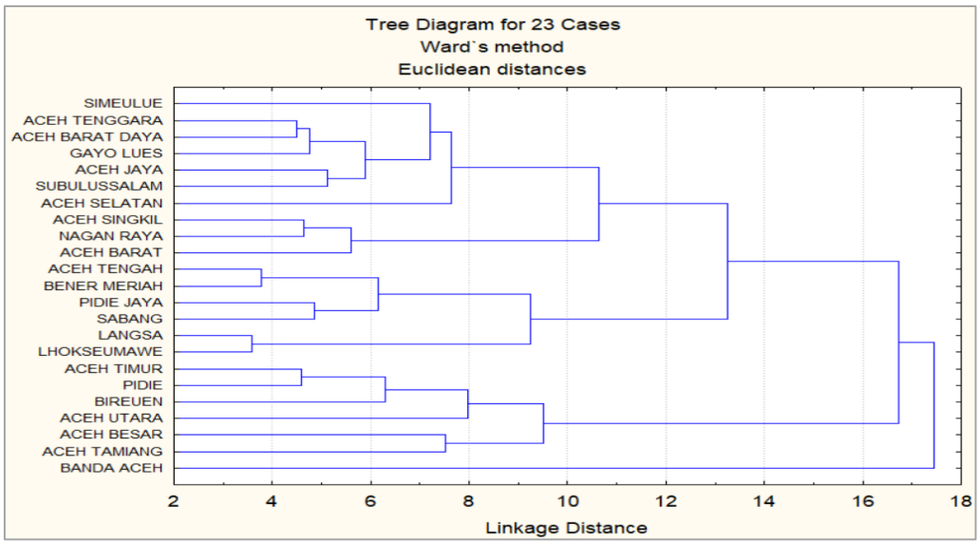

Gambar 2.72
Dendogram Hasil Analisis Cluster Dengan Metode *Joining Tree Clustering*

Berdasarkan dendogram yang dihasilkan dari analisis cluster dapat diketahui bahwa secara umum kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat dibagi ke dalam 3 tipologi atau cluster, yaitu cluster 1, yang beranggotakan Kota Banda Aceh; cluster 2 yang beranggotakan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan sisanya, masuk dalam kategori cluster 3, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hasil analisis cluster dengan metode K-means, dapat diketahui bahwa ada sedikit perbedaan pada anggota cluster 1, di mana anggota cluster 1 nya terdiri dari Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kabupaten Lhoksumawe. Anggota cluster 3 tetap, sedangkan sisanya masuk dalam kategori cluster 2. Dari *scatterplot graph of means for each cluster* sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 2.72 dapat diketahui bahwa karakteristik wilayah pada kabupaten/kota yang masuk dalam kategori cluster 1 (Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kabupaten Lhoksumawe) antara lain adalah: memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, memiliki nilai IPM serta komponen-komponennya (RLS, HLS, AHH dan PPP) yang juga tinggi; memiliki persentase sanitasi yang layak dan air minum yang layak tinggi, namun persentase Tingkat pengangguranya juga tinggi, meskipun persentase penduduk miskinnya rendah. Namun di sisi lain, nilai indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas lingkungan hidup nya rendah, meskipun secara umum frekuensi kejadian longsor, banjir dan gempa nya rendah. Sementara itu, karakteristik cluster 2 di mana Kabupaten Aceh Barat termasuk di dalamnya, antara lain adalah: jumlah penduduk rendah, AHH rendah, persentase penduduk miskin tinggi, namun kualitas lingkungannya relatif masih dalam kondisi baik yang dicerminkan dari nilai IKA, IKU, IKL dan IKLH yang tinggi dibandingkan cluster lain.

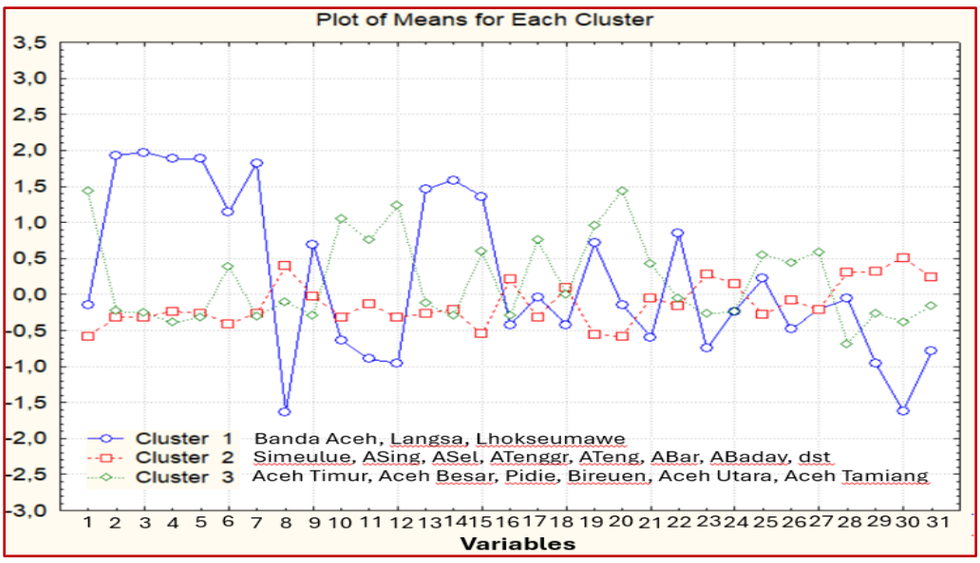

Gambar 2.73
Plot of Mean for Each Cluster

F. Interpretasi Analisis Tipologi Klassen untuk Menentukan Masalah dan Isu Strategis

Dalam upaya memahami dan mengidentifikasi berbagai masalah serta isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Barat, penerapan analisis tipologi Klassen menjadi sangat relevan. Analisis ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengelompokkan berbagai indikator pembangunan dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

1. Kedudukan Aceh Barat dalam Konsistensi Provinsi Aceh

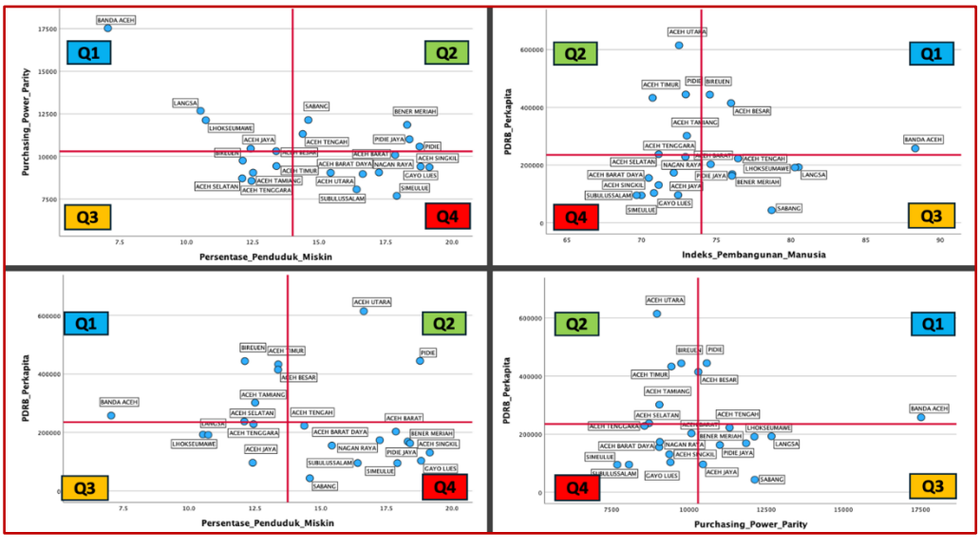

Gambar 2.74
Tipologi Klassen Persentase Penduduk Miskin dengan Indikator Ekonomi

Terdapat beberapa permasalahan ekonomi yang saling berkaitan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat secara keseluruhan. Salah satu ciri utama yang terlihat adalah daya beli masyarakat yang rendah. Kondisi ini berkaitan erat dengan tingginya persentase penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga berada pada tingkat yang rendah, yang mencerminkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk yang tidak memadai. Meskipun demikian, Aceh Barat memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif tinggi. IPM yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan,

dan harapan hidup masyarakat. Namun, paradoksnya, kemajuan dalam aspek-aspek ini tidak cukup untuk mendorong peningkatan ekonomi yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat memiliki akses yang baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, mereka tidak memiliki peluang ekonomi yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Rendahnya PDRB per kapita yang disertai dengan persentase penduduk miskin yang tinggi menandakan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah ini tidak cukup untuk mengangkat sebagian besar penduduknya dari kemiskinan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya investasi dalam sektor-sektor produktif (sektor sekunder dan tersier), rendahnya tingkat keterampilan dan pendidikan yang relevan dengan pasar kerja, serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Akibatnya, penduduk tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan memiliki daya beli yang rendah. Daya beli masyarakat yang rendah adalah konsekuensi langsung dari rendahnya PDRB per kapita. Pendapatan yang rendah berarti masyarakat memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketika sebagian besar pendapatan digunakan untuk kebutuhan dasar, sangat sedikit yang tersisa untuk konsumsi atau investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas.

Penjelasan Logis dari Permasalahan di Aceh Barat adalah (1) Kesenjangan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan, Rendahnya PDRB per kapita menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Aceh Barat tidak menghasilkan cukup pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Selain itu, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat memperburuk situasi, di mana sebagian kecil penduduk mungkin menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara sebagian besar penduduk lainnya tetap dalam kemiskinan. (2) Kurangnya Peluang Ekonomi. Meskipun IPM tinggi menunjukkan adanya kemajuan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, peluang ekonomi yang terbatas membatasi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki. Tanpa peluang kerja yang memadai dan sektor ekonomi yang berkembang, pendapatan masyarakat tetap stagnan. (3) Investasi yang Tidak Memadai dalam Sektor Produktif, kurangnya investasi dalam sektor-sektor produktif seperti industri, pertanian, dan jasa yang berdaya saing rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kurangnya investasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan yang tidak mendukung, infrastruktur yang buruk, dan kurangnya akses terhadap modal dan teknologi. (4) Keterampilan dan Pendidikan yang Tidak Relevan, meskipun pendidikan dan layanan kesehatan tersedia, kurikulum dan pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar sulit mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga pendapatan mereka tetap rendah.

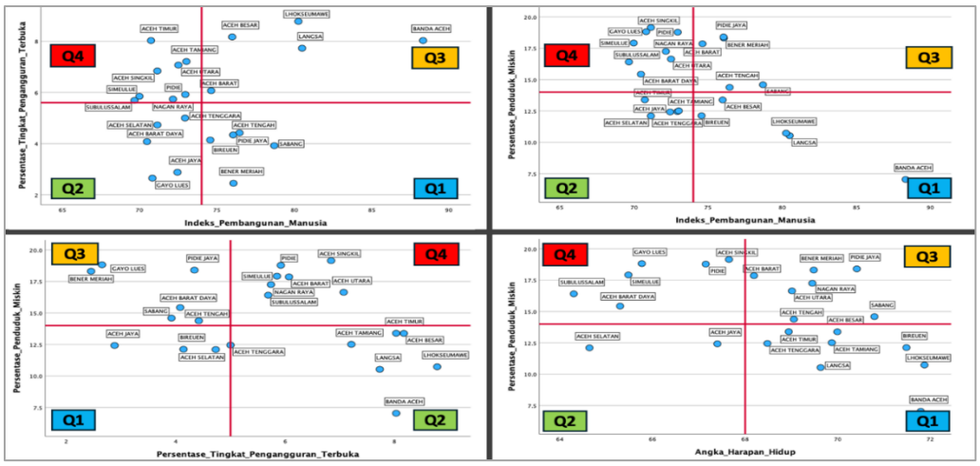

Gambar 2.75
Tipologi Klassen Indeks Pembangunan Manusia dengan Indikator Sosial-Ekonomi

Di Aceh Barat, terdapat beberapa masalah ekonomi dan sosial yang mencolok. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif tinggi yang menunjukkan kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup tinggi, namun persentase tingkat pengangguran terbuka tetap tinggi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki masyarakat dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Selain itu, wilayah ini juga menghadapi paradoks di mana IPM yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi. Persentase penduduk miskin tetap tinggi, menandakan bahwa meskipun masyarakat memiliki akses yang baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka karena kurangnya peluang ekonomi yang memadai. Kondisi ini diperburuk dengan tingginya persentase tingkat pengangguran terbuka di antara penduduk miskin. Lingkaran kemiskinan dan pengangguran saling memperkuat satu sama lain, menciptakan hambatan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya pendapatan dan kesempatan kerja yang terbatas membuat banyak penduduk terjebak dalam kemiskinan, meskipun mereka memiliki pendidikan yang mayoritas baik setara SMA. Yang lebih ironis lagi, angka harapan hidup di wilayah ini juga tinggi, menunjukkan bahwa layanan kesehatan cukup baik dan masyarakat hidup lebih lama. Namun, lama hidup yang lebih panjang ini tidak disertai dengan peningkatan kualitas hidup yang sepadan, karena persentase penduduk miskin tetap tinggi. Banyak penduduk yang hidup lebih lama tetapi dalam kondisi ekonomi yang sulit, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pembangunan wilayah ini.

Penjelasan Logis dari Permasalahan di Aceh Barat yaitu (1) Ketidaksesuaian antara Pendidikan dan Kebutuhan Pasar Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka Tinggi dengan IPM Tinggi: Meski pendidikan dan kesehatan baik, masyarakat mungkin tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum pendidikan yang tidak relevan atau kurangnya pelatihan vokasional dapat menyebabkan lulusan tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. (2) Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata, Penduduk Miskin Tinggi dengan IPM Tinggi: Meskipun aspek-aspek pembangunan manusia seperti pendidikan dan kesehatan baik, pendapatan yang tidak merata membuat banyak penduduk tetap miskin. Beberapa individu mungkin mendapatkan penghasilan yang baik, sementara sebagian besar tetap dalam kemiskinan. (3) Lingkaran Kemiskinan dan Pengangguran: Penduduk Miskin Tinggi dengan Pengangguran Tinggi: Kemiskinan dan pengangguran saling memperkuat satu sama lain. Masyarakat miskin mungkin tidak

memiliki akses ke pendidikan yang lebih tinggi atau pelatihan kerja, membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang baik. Pengangguran yang tinggi, pada gilirannya, memperburuk kondisi kemiskinan karena tidak ada sumber pendapatan yang memadai. (4) Layanan Kesehatan yang Baik tetapi Ekonomi Lemah, Angka Harapan Hidup Tinggi dengan Penduduk Miskin Tinggi: Tingginya angka harapan hidup menunjukkan bahwa layanan kesehatan di wilayah tersebut baik. Namun, layanan kesehatan yang baik tidak selalu disertai dengan ekonomi yang kuat. Banyak penduduk mungkin hidup lebih lama tetapi dalam kondisi ekonomi yang miskin.

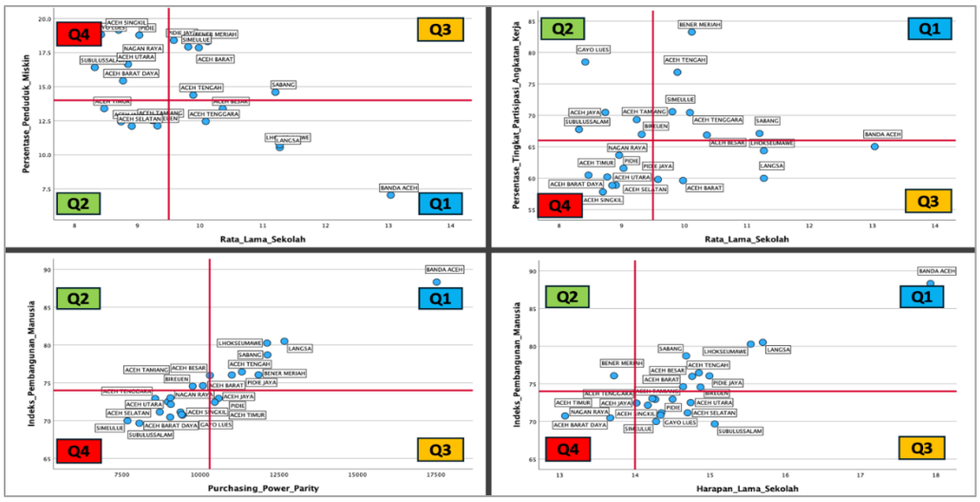

Gambar 2.76
Tipologi Klassen komponen IPM dengan Indikator Sosial-Ekonomi

Di Aceh Barat, terdapat beberapa paradoks yang mencolok dalam aspek sosial dan ekonomi. Meskipun persentase penduduk miskin tinggi, rata-rata lama sekolah juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki akses dan kesempatan untuk menempuh pendidikan, kondisi ekonomi mereka tetap sulit. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan yang mereka peroleh tidak cukup untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan, mungkin karena kurangnya lapangan kerja yang memadai atau ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi juga menjadi masalah signifikan. Meskipun banyak penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan mereka, rendahnya partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa mereka tidak mampu atau tidak tertarik untuk bergabung dengan pasar kerja. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja yang sesuai, kondisi kerja yang kurang menarik, atau ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan pasar kerja.

Daya beli masyarakat yang rendah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembangunan manusia dan kesejahteraan ekonomi. Meskipun masyarakat memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya, pendapatan mereka tetap rendah, mengakibatkan daya beli yang rendah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, Aceh Barat memiliki IPM yang relatif tinggi dengan harapan lama sekolah yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa penduduk memiliki akses yang baik terhadap pendidikan sepanjang hidup mereka dan berpotensi untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengonversi potensi pendidikan ini menjadi keuntungan ekonomi nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penjelasan Logis dari Permasalahan di Aceh Barat yaitu (1) Persentase Penduduk Miskin Tinggi dengan Rata-rata Lama Sekolah Tinggi, ketidaksesuaian peluang ekonomi: meskipun penduduk memiliki pendidikan yang baik, kurangnya lapangan kerja atau peluang ekonomi yang memadai menyebabkan banyak penduduk tetap miskin. Pendidikan yang baik belum tentu menghasilkan pekerjaan yang baik jika tidak ada sektor ekonomi yang berkembang. (2) Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Rendah dengan Rata-rata Lama Sekolah Tinggi, ketidaksesuaian Keterampilan dengan Pasar Kerja: Pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat menyebabkan rendahnya partisipasi angkatan kerja meski sekalipun rata-rata lama sekolah tinggi. Banyak lulusan mungkin tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri lokal. (3) Kurangnya Peluang Kerja: Rendahnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia atau kurangnya peluang yang layak dapat menyebabkan partisipasi angkatan kerja yang rendah. Bahkan jika ada pendidikan yang baik, jika tidak ada pekerjaan yang layak, orang-orang tidak akan bergabung dengan angkatan kerja. (4) Daya Beli Masyarakat Rendah dengan IPM Tinggi, Ketidakseimbangan Antara Pendidikan dan Ekonomi: meskipun masyarakat memiliki akses yang baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, mereka tetap memiliki pendapatan yang rendah, yang mengakibatkan daya beli yang rendah. Pembangunan manusia yang baik tidak selalu berarti bahwa pendapatan masyarakat juga tinggi. Kurangnya Peluang Ekonomi: Pendidikan yang baik tidak selalu diiringi dengan peluang ekonomi yang memadai, sehingga pendapatan tetap rendah dan daya beli masyarakat rendah. Tanpa investasi dalam sektor ekonomi yang produktif, masyarakat tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka. Analisis Skalogram (Perkembangan Antarwilayah)

Analisis Skalogram mempunyai kegunaan untuk mengindikasikan tingkat perkembangan wilayah. Dalam analisis sub-wilayah dibagi ke dalam 3 peringkat, yaitu hierarki 1, 2, dan 3. Hierarki 1 merupakan suatu sub-wilayah yang memiliki nilai indeks tertinggi, adapun hierarki 3 sebaliknya. Perkembangan sub-wilayah ini dinilai dari sisi jumlah dan layanan fasilitas terhadap penduduk di setiap sub-wilayah, atau dalam hal ini adalah kecamatan.

2. Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.115, dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, kecamatan dengan indeks fasilitas pendidikan tertinggi adalah 1) Kecamatan Johan Pahlawan dengan indeks sebesar 19,47 yang termasuk hierarki 1; 2) Kecamatan Meureubo dengan indeks sebesar 11,21 yang termasuk hierarki 2; dan 3) Kecamatan Kaway XVI dengan indeks sebesar 9,44 yang termasuk hierarki 2.

Tabel 2.115 Indeks Fasilitas Pendidikan dan Hierarki Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah TK	Jumlah SD	Jumlah SMP	Jumlah SMA	Jumlah SMK	Jumlah Pesantren	Indeks Fasilitas Pendidikan	Jumlah jenis Fasilitas	Hierarki
1	Johan Pahlawan	67954	3,79	4,42	2,76	3,22	2,63	2,65	19,47	6	Hierarki 1
2	Samatiga	16103	2,32	1,74	0,92	0,00	0,00	0,88	5,86	4	Hierarki 3
3	Bubon	7786	1,37	0,63	0,31	0,00	-0,88	0,88	2,31	4	Hierarki 3
4	Arongan Lambalek	12658	1,16	1,74	0,31	0,00	0,00	1,77	4,97	4	Hierarki 3
5	Woyla	14399	1,05	1,74	1,23	0,00	0,88	1,99	6,88	5	Hierarki 2
6	Woyla Barat	8224	0,21	1,26	0,92	0,00	-0,88	0,44	1,96	4	Hierarki 3
7	Woyla Timur	4920	0,32	1,26	0,92	0,00	-0,88	0,88	2,50	4	Hierarki 3

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah TK	Jumlah SD	Jumlah SMP	Jumlah SMA	Jumlah SMK	Jumlah Pesantren	Indeks Fasilitas Pendidikan	Jumlah jenis Fasilitas	Hierarki
8	Kaway XVI	22977	2,11	2,53	1,84	0,54	0,00	2,43	9,44	5	Hierarki 2
9	Meureubo	32122	2,11	2,84	2,76	1,07	0,00	2,43	11,21	5	Hierarki 2
10	Pante Ceureumen	12187	0,74	1,74	1,23	0,00	0,00	0,44	4,14	4	Hierarki 3
11	Panton Reu	6760	0,95	1,11	0,31	0,00	-0,88	0,00	1,48	3	Hierarki 3
12	Sungai Mas	4023	0,32	1,26	0,00	0,00	-0,88	0,22	0,92	3	Hierarki 3

Sumber: Hasil Analisis Skalogram Tahun 2023

3. Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan Tabel 2.116, dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, kecamatan dengan indeks fasilitas kesehatan tertinggi adalah 1) Kecamatan Johan Pahlawan dengan indeks sebesar 10,60 yang termasuk hierarki 1; 2) Kecamatan Kaway XVI dengan indeks sebesar 10,29 yang termasuk hierarki 1; dan 3) Kecamatan Meureubo dengan indeks sebesar 9,75 yang termasuk hierarki 1.

Tabel 2.116 Indeks Fasilitas Kesehatan dan Hierarki Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jml puskesmas	Jml puskesmas pbt	Jml posyandu	Jml polindes	Indeks Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis fasilitas	Hierarki
1	Johan Pahlawan	67148	3,54	1,50	4,05	1,51	10,60	4	Hierarki 1
2	Samatiga	21797	0,00	3,00	3,16	1,13	7,29	3	Hierarki 2
3	Bubon	31081	0,00	0,50	1,68	1,13	3,31	3	Hierarki 3
4	Arongan Lambalek	16163	0,00	1,00	3,06	2,27	6,33	3	Hierarki 3
5	Woyla	11432	0,00	1,00	4,45	1,89	7,33	3	Hierarki 2
6	Woyla Barat	13937	0,00	1,00	2,27	2,64	5,92	3	Hierarki 3
7	Woyla Timur	12658	0,00	2,00	3,66	0,38	6,03	3	Hierarki 3
8	Kaway XVI	4920	0,00	3,50	4,15	2,64	10,29	3	Hierarki 1
9	Meureubo	8048	0,00	2,50	3,85	3,40	9,75	3	Hierarki 1
10	Pante Ceureumen	6766	0,00	1,00	2,37	3,78	7,15	3	Hierarki 2
11	Panton Reu	7786	0,00	0,50	2,07	1,51	4,08	3	Hierarki 3
12	Sungai Mas	4329	0,00	0,50	1,68	0,76	2,93	3	Hierarki 3

Sumber: Hasil Analisis Skalogram Tahun 2023

4. Fasilitas Ekonomi

Berdasarkan Tabel 2.117, dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, kecamatan dengan indeks fasilitas ekonomi tertinggi adalah 1) Kecamatan Johan Pahlawan dengan indeks sebesar 22,13 yang termasuk hierarki 1; 2) Kecamatan Meureubo dengan indeks sebesar 9,46 yang termasuk hierarki 2; dan 3) Kecamatan Samatiga dengan indeks sebesar 7,18 yang termasuk hierarki 2.

Tabel 2.117 Indeks Fasilitas Ekonomi dan Hierarki Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jml industri trad	Jml industri mak-min	Jml industri jasa	Jml industri kontruksi	Jml pelanggan listrik	Jml koperasi	Indeks Fasilitas Ekonomi	Jumlah jenis fasilitas	Hierarki
1	Johan Pahlawan	67148	3,02	3,85	4,47	3,89	3,00	3,90	22,13	6	Hierarki 1

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jml industri trad	Jml industri mak-min	Jml industri jasa	Jml industri kontruksi	Jml pelanggan listrik	Jml koperasi	Indeks Fasilitas Ekonomi	Jumlah jenis fasilitas	Hierarki
2	Samatiga	21797	3,02	1,13	0,92	0,95	0,06	1,10	7,18	6	Hierarki 2
3	Bubon	31081	0,52	0,17	0,11	0,39	0,06	0,60	1,86	6	Hierarki 3
4	Arongan Lambalek	16163	0,90	0,50	0,29	0,39	0,03	0,55	2,66	6	Hierarki 3
5	Woyla	11432	0,71	0,26	0,14	0,36	0,23	0,64	2,34	6	Hierarki 3
6	Woyla Barat	13937	0,24	0,06	0,01	0,00	0,06	0,37	0,74	5	Hierarki 3
7	Woyla Timur	12658	0,14	0,00	0,04	0,03	0,04	0,05	0,30	5	Hierarki 3
8	Kaway XVI	4920	0,74	0,38	0,31	2,45	0,94	1,19	6,02	6	Hierarki 2
9	Meureubo	8048	2,76	2,05	0,81	1,40	1,28	1,15	9,46	6	Hierarki 2
10	Pante Ceureumen	6766	0,16	0,06	0,10	0,16	0,35	0,50	1,34	6	Hierarki 3
11	Panton Reu	7786	0,01	0,01	0,01	0,03	0,27	0,05	0,38	6	Hierarki 3
12	Sungai Mas	4329	0,48	0,06	0,08	0,26	0,16	0,37	1,41	6	Hierarki 3

Sumber: Hasil Analisis Skalogram Tahun 2023

5. Agregat

Jika menggabungkan semua indeks (Tabel 2.118), dapat dilihat bahwa Kecamatan Johan Pahlawan memiliki indeks perkembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tertinggi. Secara otomatis, kecamatan ini mempunyai indeks perkembangan kecamatan (IPK) tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Ada kecenderungan bahwa kecamatan dengan tingkat perkembangan kecamatan tinggi juga memiliki indeks per fasilitas yang sama tingginya.

Tabel 2.118 Nilai Indeks per Fasilitas dan Indeks Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 dan 2019

No	Kecamatan	Indeks Fasilitas Pendidikan		Indeks Fasilitas Kesehatan		Indeks Fasilitas Ekonomi		IPK	
		2023	2019	2023	2019	2023	2019	2023	2019
1	Johan Pahlawan	20,29	19,47	11,29	10,60	17,21	22,13	48,79	48,30
2	Samatiga	5,97	5,86	7,67	7,29	6,80	7,18	20,44	19,23
3	Bubon	2,22	2,31	3,31	3,31	1,91	1,86	7,44	6,88
4	Arongan Lambalek	4,64	4,97	6,33	6,33	2,98	2,66	13,94	13,40
5	Woyla	7,01	6,88	7,33	7,33	2,32	2,34	16,67	15,91
6	Woyla Barat	2,56	1,96	5,92	5,92	0,89	0,74	9,36	8,24
7	Woyla Timur	2,28	2,50	4,85	6,03	0,50	0,30	7,63	8,79
8	Kaway XVI	11,24	9,44	10,29	10,29	6,49	6,02	28,02	24,55
9	Meureubo	12,16	11,21	9,06	9,75	6,97	9,46	28,18	29,27
10	Pante Ceureumen	4,19	4,14	7,34	7,15	0,99	1,34	12,53	12,13
11	Panton Reu	1,92	1,48	3,99	4,08	0,49	0,38	6,39	5,90
12	Sungai Mas	1,58	0,92	3,31	2,93	1,33	1,41	6,22	4,90

Sumber: Hasil Analisis Skalogram Tahun 2023

Jika melihat perkembangan yang ada selama 2019-2023, ada 2 kecamatan yang mengalami peningkatan hierarki (dari 3 ke 2), yaitu Samatiga dan Woyla (Gambar 2.81 dan 2.82). Hal ini mengindikasikan adanya perkembangan yang cukup signifikan di 2 kecamatan tersebut selama 5 tahun terakhir. Secara umum Kecamatan Johan Pahlawan masih berada di hierarki 1, adapun Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI tetap menduduki hierarki 2.

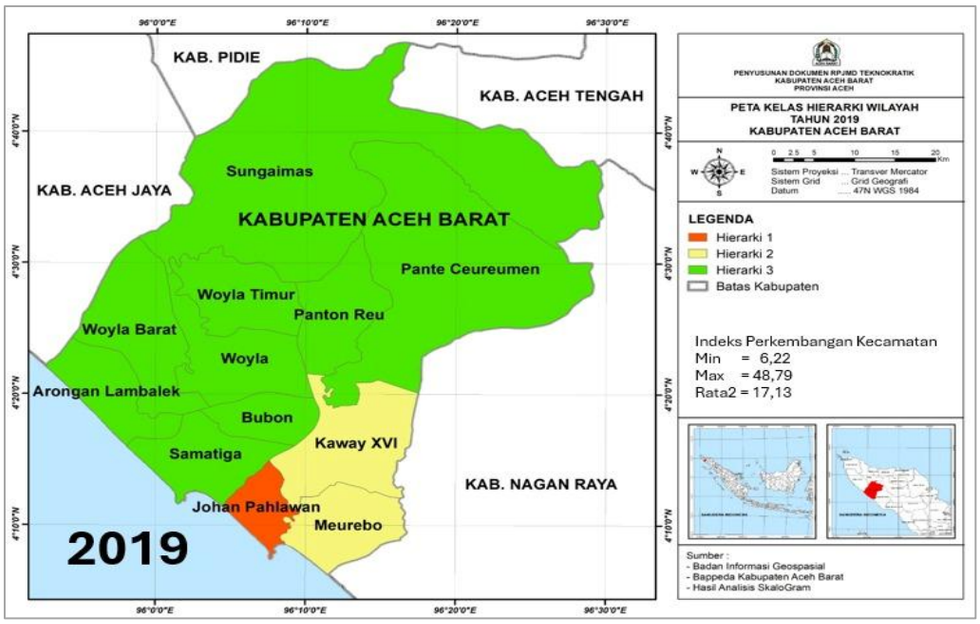

Gambar 2.77
Peta Kelas Hierarki IPK Tahun 2019

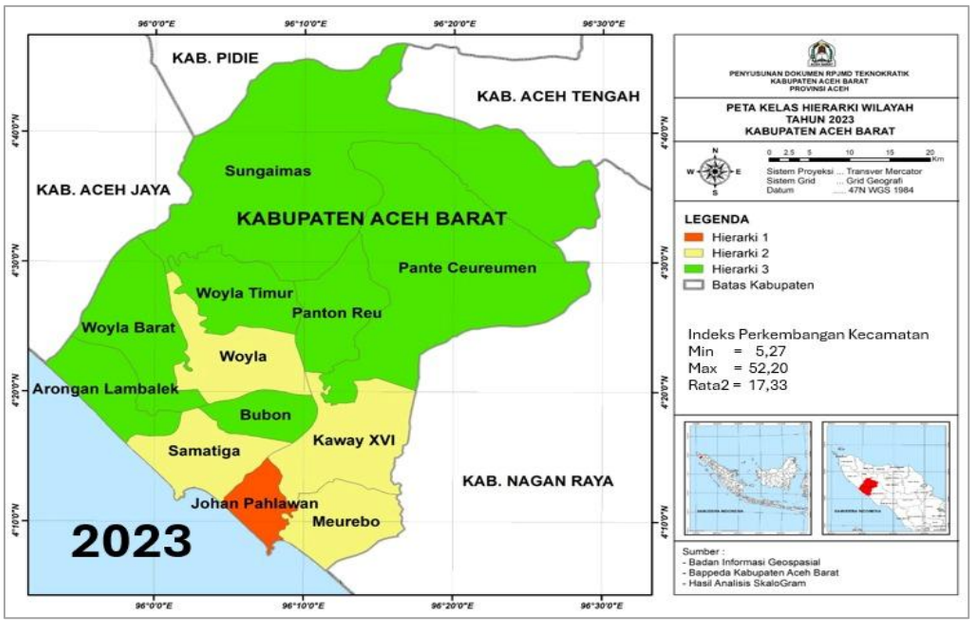

Gambar 2.78
Peta Kelas Hierarki IPK Tahun 2023

G. Analisis Lokasi Komoditas Pertanian Unggulan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya pertanian tidak terlepas dari adanya subsektor pertanian basis yang dimiliki Kabupaten Aceh Barat. Semakin besar pula sumbangan atau peran suatu sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah dibagi dua sektor utama, yaitu sektor unggulan dan non unggulan. Sektor unggulan merupakan sektor utama yang menjadi acuan perekonomian daerah karena memiliki keunggulan kompetitif tinggi, sedang sektor non unggulan adalah sektor kurang potensial namun tetap berfungsi sebagai penunjang sektor unggulan.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat dalam pelaksanaan strategi pembangunan berbasis pada komoditas unggulan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan

efisiensi semua sub sektor pertanian dalam menghasilkan berbagai komoditas pertanian agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah dan mampu meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi yang berbeda-beda dalam sektor pertanian, namun hingga saat ini belum diketahui wilayah basis komoditas unggulan yang dihasilkan oleh setiap kecamatan, sehingga diperlukan suatu kajian tentang potensi wilayah basis untuk dapat mengetahui wilayah mana saja yang menyumbang paling besar dan memiliki peranan penting dalam menentukan komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Subsektor tanaman pangan, palawija, perkebunan dan hortikultura merupakan subsektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis komoditas unggulan adalah dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) untuk mengetahui komoditas unggulan sektor pertanian dan analisis *Shift Share* untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pertanian. Pembangunan pertanian ke depan akan berkonsentrasi pada potensi daerah dan keunggulan komoditasnya maupun daya saing baik dalam maupun luar negeri.

1. Location Quontient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA)

Penentuan sektor basis atau sektor unggulan di suatu wilayah dapat dilakukan dengan mengombinasikan hasil analisis LQ dengan SSA, terutama dilihat dari komponen *Differential Shift* (DS) nya. Adapun penyandingan nilai indeks LQ dan DS untuk seluruh sektor yang ada di Kabupaten Aceh Barat disajikan pada Tabel 2.119 berikut ini.

Tabel 2.119 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Komoditas Perkebunan yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kelapa sawit		Kelapa		Karet		Kopi		Coklat	
		LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS
1	Johan Pahlawan	**1,68**	-0,142	**2,36**	-0,009	0,37	-0,029	0,30	**0,273**	0,46	**0,065**
2	Samatiga	0,40	**0,148**	**2,42**	**0,024**	**1,15**	-0,103	**1,00**	**0,273**	0,63	-0,005
3	Bubon	**1,27**	-0,016	**1,24**	-0,009	0,78	-0,082	**1,31**	**0,273**	**1,22**	-0,059
4	Arongan Lambalek	0,89	-0,111	**2,32**	-0,009	0,84	-0,067	0,33	-0,172	**1,46**	**0,065**
5	Woyla	0,97	-0,138	0,35	-0,009	**1,12**	-0,055	**1,05**	-0,201	**1,34**	-0,003
6	Woyla Barat	0,38	-0,136	0,15	-0,134	**1,54**	-0,029	0,94	-0,049	0,83	-0,040
7	Woyla Timur	0,91	-0,073	0,23	-0,009	**1,21**	-0,071	**1,21**	-0,182	0,23	**0,065**
8	Kaway XVI	**1,54**	-0,125	0,62	-0,009	0,73	-0,087	**1,20**	**0,273**	0,69	**0,032**
9	Meureubo	**1,16**	-0,058	**1,36**	**0,011**	0,83	-0,031	0,71	-0,054	**1,47**	-0,033
10	Pante Ceureumen	**1,11**	**0,204**	**1,18**	-0,009	0,90	-0,101	**1,72**	**0,087**	0,61	-0,220
11	Panton Reu	**1,47**	-0,002	0,37	-0,009	0,79	-0,029	0,75	**0,059**	**1,78**	**0,065**
12	Sungai Mas	**1,00**	**0,056**	0,36	**0,229**	**1,10**	-0,044	**1,54**	-0,093	**1,19**	**0,041**

Sumber: Hasil Analisis LQ dan SSA Tahun 2023
Keterangan: Nilai LQ yang dicetak tebal adalah yang memiliki keunggulan komparatif (LQ>1)
Nilai DS yang dicetak tebal adalah yang memiliki keunggulan kompetitif (DS+/positif)

Berdasarkan nilai indeks LQ dan DS untuk komoditas perkebunan per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.116, dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki jenis tanaman unggulan adalah Kecamatan Samatiga (kelapa, kopi), Pante Ceureuman (kelapa sawit, kopi), dan Sungai Mas (kelapa sawit, coklat)

dengan masing-masing 2 jenis tanaman; Kecamatan Bubon (kopi), Arongan Lambelek (coklat), Kaway XVI (kopi), Meureubo (kelapa), dan Panton Reu (coklat) dengan 1 jenis tanaman. Kecamatan yang memiliki jenis tanaman unggulan tersebut disebabkan karena memenuhi 2 kriteria persyaratan sebagai suatu jenis tanaman unggulan, yaitu: (1) nilai LQ>1 dan (2) nilai DS nya positif.

Tabel 2.120 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Komoditas Buah-Buahan yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Mangga		Durian		Jeruk		Pisang		Pepaya		Rambutan		Langsat		J. Biji		J. Air		Manggis		Nangka		Sawo	
		LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS
1	Johan Pahlawan	0,46	-0,41	0,61	-0,03	0,00	-0,69	0,68	-0,83	0,60	-0,14	0,99	-0,40	**1,24**	-0,43	0,31	-1,14	**3,19**	-0,20	**9,49**	0,03	**1,56**	-0,61	**6,27**	0,29
2	Samatiga	**6,40**	**1,28**	**1,13**	0,19	0,00	-0,69	0,28	-0,90	**3,28**	0,74	0,32	-0,40	**1,11**	-0,28	**1,05**	-0,89	**6,54**	**1,30**	**1,27**	-0,12	**1,48**	-1,30	**4,42**	0,52
3	Bubon	**3,04**	-0,45	**2,50**	-0,72	0,00	0,00	0,67	-0,99	**1,06**	-0,34	0,22	-1,38	**1,01**	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,44	-1,23	**1,61**	-0,58
4	Arongan Lambalek	**1,30**	0,43	0,38	-0,06	**7,92**	0,25	0,75	-0,01	0,78	**1,11**	0,82	-0,45	0,59	-0,37	0,34	-1,14	0,25	-0,20	**1,06**	0,04	0,37	-0,51	0,00	0,00
5	Woyla	0,57	0,26	0,34	-0,56	**1,26**	0,19	0,62	-0,54	0,97	0,44	**1,52**	-0,53	0,17	-0,42	0,28	-1,14	**1,95**	-0,32	0,88	-0,13	0,37	-0,61	0,52	0,05
6	Woyla Barat	0,38	-0,42	**1,46**	0,61	0,42	-0,51	**3,13**	**1,54**	**1,66**	-0,34	0,35	-0,40	**1,83**	**1,47**	**5,97**	**11,13**	0,00	-1,20	**1,45**	0,75	**4,23**	**4,20**	**2,80**	0,44
7	Woyla Timur	0,22	0,38	0,72	-0,02	0,00	0,00	**1,01**	-0,14	0,00	-0,53	**1,44**	**7,70**	0,71	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,20	0,48	0,04	0,65	0,25	0,16	0,00
8	Kaway XVI	**3,88**	-0,35	**1,03**	-0,04	**3,40**	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,53	0,43	-0,41	**3,50**	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Meureubo	**1,41**	0,30	**2,11**	**1,36**	**1,58**	0,11	0,33	0,48	**3,30**	0,42	0,22	-0,57	**1,96**	-0,42	**1,46**	-1,14	**2,55**	**2,52**	0,04	0,04	0,23	-0,60	**1,16**	0,35
10	Pante Ceureumen	**1,06**	0,41	**1,32**	0,00	0,25	-0,05	**1,03**	**3,81**	**2,24**	0,80	0,88	-0,40	**1,14**	-0,32	**1,25**	-1,35	**1,01**	**1,93**	0,03	0,54	0,27	**2,38**	0,78	-0,49
11	Panton Reu	**3,14**	0,11	**1,33**	-0,01	0,19	0,23	**1,56**	0,93	**2,12**	**2,47**	0,30	-0,65	**1,83**	-0,69	**1,08**	-1,38	**2,01**	0,46	**4,76**	-0,17	**3,71**	0,00	**1,04**	0,73
12	Sungai Mas	0,47	0,33	**1,73**	-0,01	0,38	0,19	0,10	**1,13**	0,12	0,47	0,99	-0,40	0,49	-0,31	0,23	-1,14	0,40	-0,20	0,11	0,38	0,21	-0,51	0,32	0,00

Sumber: Hasil Analisis LQ dan SSA Tahun 2023
Keterangan: Nilai LQ yang dicetak tebal adalah yang memiliki keunggulan komparatif (LQ>1)
Nilai DS yang dicetak tebal adalah yang memiliki keunggulan kompetitif (DS+/positif)

Berdasarkan nilai indeks LQ dan DS untuk komoditas buah-buahan per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.121, dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki jenis tanaman unggulan adalah Kecamatan Woyla Barat dengan 4 jenis tanaman (pisang, langsat, jambu biji, Nangka); Kecamatan Samatiga (mangga, jambu air), Meureubo (durian, jambu air) dan Panteu Ceureuman (pisang, jambu air) dengan masing-masing dengan 2 jenis tanaman; Kecamatan Woyla Timur (rambutan) dan Panton Reu (pepaya) dengan 1 jenis tanaman. Kecamatan yang memiliki jenis tanaman unggulan tersebut disebabkan karena memenuhi 2 kriteria persyaratan sebagai suatu jenis tanaman unggulan, yaitu: (1) nilai LQ>1 dan (2) nilai DS nya positif.

Tabel 2.121 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Komoditas Palawija yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jagung		Kedelai		K. Tanah		K. Hijau		U. Kayu		U. Jalar	
		LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS
1	Johan Pahlawan	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,19**	**0,20**	0,00	0,00	**2,61**	**0,23**	0,00	0,00
2	Samatiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	**2,11**	0,00	0,00	**3,48**	**0,23**	**3,33**	**0,17**
3	Bubon	**1,25**	**1,20**	0,00	0,00	0,73	**0,23**	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,90**	-0,17
4	Arongan	**1,87**	-0,36	0,00	0,00	0,44	-0,63	0,00	0,00	**3,09**	**0,39**	0,00	0,00

No.	Kecamatan	Jagung		Kedelai		K. Tanah		K. Hijau		U. Kayu		U. Jalar	
		LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS
	Lambalek												
5	Woyla	0,75	-0,27	0,00	0,00	0,93	**1,11**	0,00	0,00	0,74	-0,27	**2,67**	**0,83**
6	Woyla Barat	**1,17**	-0,47	0,00	0,00	0,73	-0,26	0,00	0,00	**2,03**	**0,13**	**1,25**	**0,17**
7	Woyla Timur	**1,17**	**2,37**	0,00	0,00	**1,24**	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kaway XVI	0,65	**1,87**	0,00	0,00	**1,38**	**0,77**	0,00	0,00	0,26	-0,52	0,00	0,00
9	Meureubo	**1,56**	**0,67**	0,00	0,00	0,60	**2,61**	0,00	0,00	**1,90**	-0,27	**1,37**	-0,17
10	Pante Ceureumen	**1,10**	**0,32**	0,00	0,00	**1,23**	-0,04	0,00	0,00	0,20	-0,27	0,00	0,00
11	Panton Reu	**1,87**	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,73	0,00	0,00	**1,86**	0,00	**2,67**	**0,17**
12	Sungai Mas	0,89	0,00	0,00	0,00	**1,11**	-0,64	0,00	0,00	0,88	-0,27	0,63	0,00

Sumber: Hasil Analisis LQ dan SSA Tahun 2023
Keterangan: Nilai LQ yang dicetak tebal adalah yang memiliki keunggulan komparatif (LQ>1)
Nilai DS yang dicetak tebal adalah yang memiliki keunggulan kompetitif (DS+/positif)

Berdasarkan nilai indeks LQ dan DS untuk komoditas palawija per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.122, dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki jenis tanaman unggulan adalah Kecamatan Johan Pahlawan (kacang tanah, ubi kayu), Samatiga (ubi kayu, ubi jalar), Woyla Barat (ubi kayu, ubi jalar) dengan masing-masing 2 jenis tanaman; Kecamatan Bubon (jagung), Arongan Lambelek (ubi kayu), Woyla (ubi jalar), Kaway XVI (kacang tanah), Meureubo (jagung), dan Panton Ceureuman (jagung) dengan 1 jenis tanaman. Kecamatan yang memiliki jenis tanaman unggulan tersebut disebabkan karena memenuhi 2 kriteria persyaratan sebagai suatu jenis tanaman unggulan, yaitu: (1) nilai LQ>1 dan (2) nilai DS nya positif.

Tabel 2.122 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Peternakan yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Sapi Perah		Sapi Potong		Kerbau		Kuda		Kambing		Domba		Babi	
		LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS
1	Johan Pahlawan	0,00	0,00	0,83	-0,12	0,87	**0,05**	0,00	0,00	**1,47**	**0,23**	0,25	0,00	0,00	0,00
2	Samatiga	0,00	0,00	0,61	-0,34	**1,24**	-0,17	0,00	0,00	0,86	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bubon	0,00	0,00	0,71	**0,57**	**1,31**	**0,04**	0,00	0,00	0,63	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Arongan Lambalek	0,00	0,00	**3,26**	-0,05	0,21	-0,35	0,00	0,00	0,85	**0,03**	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Woyla	0,00	0,00	0,60	**0,03**	0,87	**0,07**	0,00	0,00	**1,59**	-0,14	**1,46**	0,00	0,00	0,00
6	Woyla Barat	0,00	0,00	**1,05**	-0,02	0,57	-0,33	0,00	0,00	**1,89**	-0,18	0,84	0,00	0,00	0,00
7	Woyla Timur	0,00	0,00	0,93	-0,03	**1,22**	**0,18**	0,00	0,00	0,59	**0,58**	**1,15**	0,00	0,00	0,00
8	Kaway XVI	0,00	0,00	0,87	**0,11**	**1,03**	-0,10	0,00	0,00	**1,00**	**0,37**	**1,85**	0,00	0,00	0,00
9	Meureubo	0,00	0,00	1,00	-0,08	0,92	-0,04	0,00	0,00	**1,07**	**0,04**	**3,18**	0,00	0,00	0,00
10	Pante Ceureumen	0,00	0,00	0,78	**0,18**	**1,23**	**0,12**	0,00	0,00	0,72	**0,91**	0,26	0,00	0,00	0,00
11	Panton Reu	0,00	0,00	0,22	**3,03**	**1,55**	**0,25**	0,00	0,00	0,51	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sungai Mas	0,00	0,00	0,16	-0,51	**1,24**	-0,14	0,00	0,00	**1,18**	-0,51	**1,05**	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil analisis LQ dan SSA Tahun 2023
Keterangan: Nilai LQ yang dicetak tebal adalah yang memiliki keunggulan komparatif (LQ>1)

Nilai DS yang dicetak tebal adalah yang memiliki keunggulan kompetitif (DS+/positif) Berdasarkan nilai indeks LQ dan DS untuk peternakan per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.119, dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki jenis hewan ternak unggulan adalah Kecamatan Woyla

Timur dengan 2 jenis hewan ternak (kerbau, kambing); Kecamatan Johan Pahlawan (kambing), Bubon (kerbau), Meureubo (kambing), Pante Ceureuman (kerbau), Panton Reu (kerbau) dengan 1 jenis hewan ternak. Kecamatan yang memiliki jenis tanaman unggulan tersebut disebabkan karena memenuhi 2 kriteria persyaratan sebagai suatu jenis tanaman unggulan, yaitu: (1) nilai LQ>1 dan (2) nilai DS nya positif.

H. Evaluasi Kesesuaian Lahan

Pengembangan komoditas unggulan diarahkan berdasarkan alokasi peruntukan ruang pertanian RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2032. Alokasi ruang pertanian yang sudah diatur pola ruangnya yaitu 1) pertanian lahan basah seluas 21.563,94 Ha; 2) pertanian lahan kering seluas 12.713,87 Ha; 3) perkebunan seluas 55.778,34 Ha dan 4) kebun campuran seluas 60.912,19 Ha. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan yang telah dilakukan terhadap beberapa komoditas potensial di Kabupaten Aceh Barat diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.123 Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Hortikultura Buah

Komoditas	Kelas Kesesuaian (Ha)				Faktor Pembatas
	S1	S2	S3	N	
Mangga	1,515		34,984	24,386	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Manggis	1,515		34,984	24,386	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Nenas	1,515		34,984	24,386	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Jeruk		1,515	31,345	28,024	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Pepaya			35,894	24,991	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Pisang			35,894	24,991	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah

Sumber: Hasil Analisis Evaluasi Kesesuaian Lahan

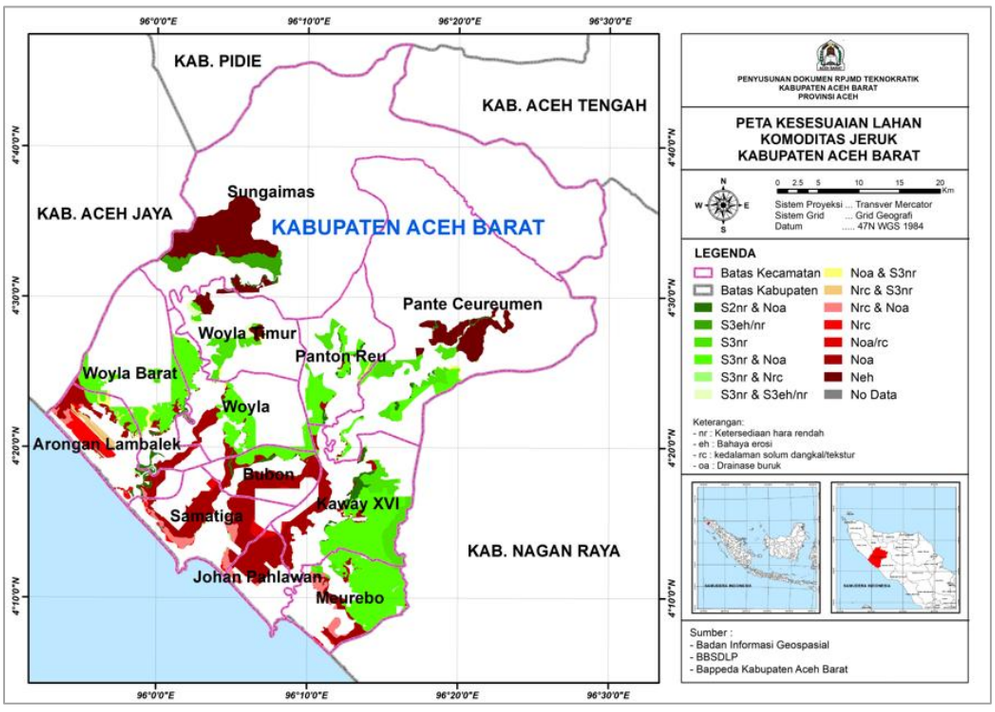

Gambar 2.79
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Jeruk

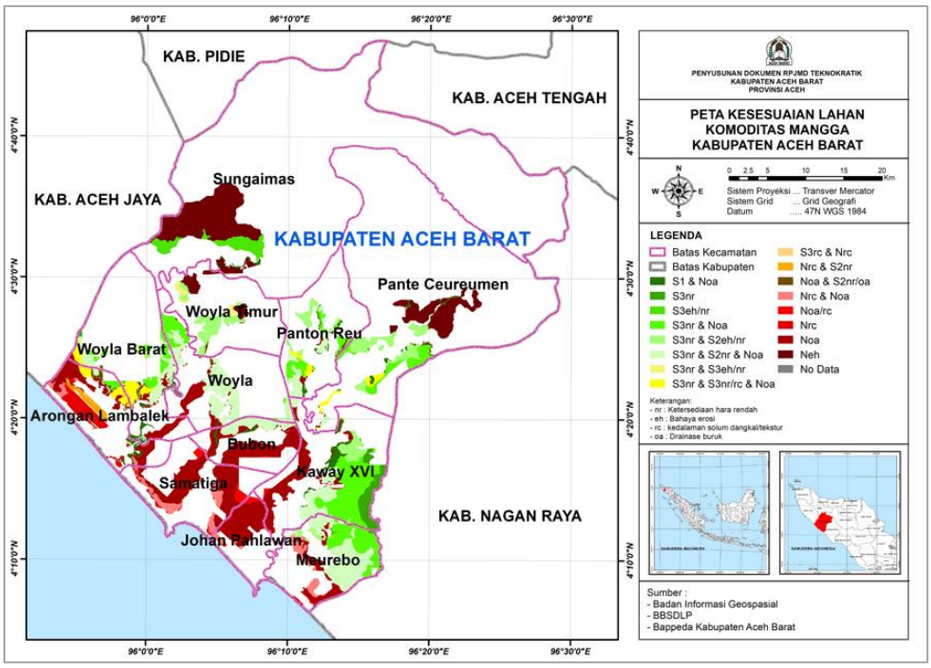

Gambar 2.80
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Mangga

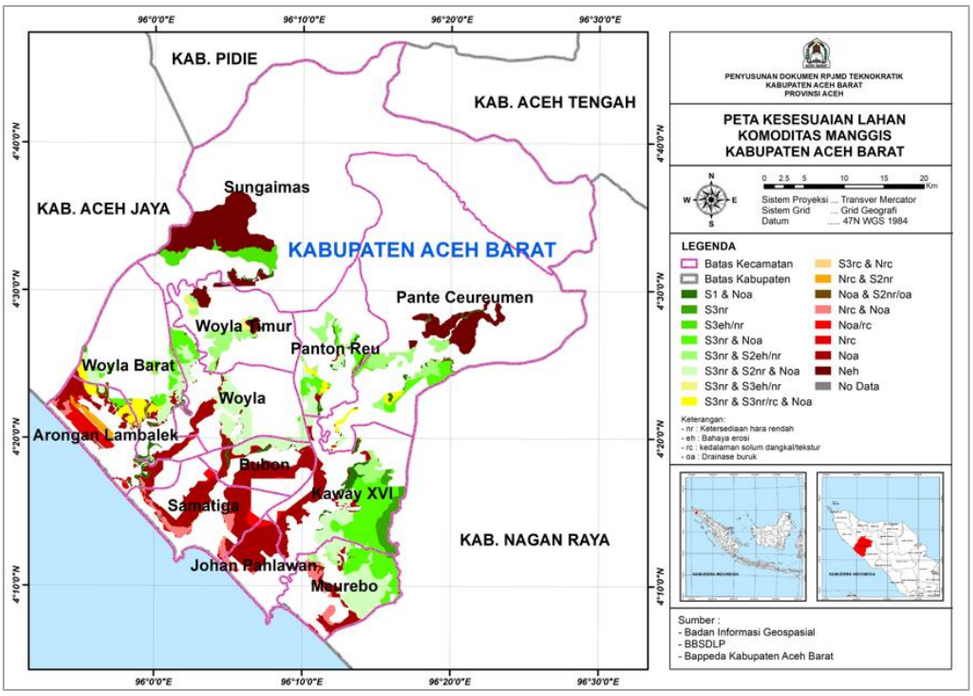

Gambar 2.81
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Manggis

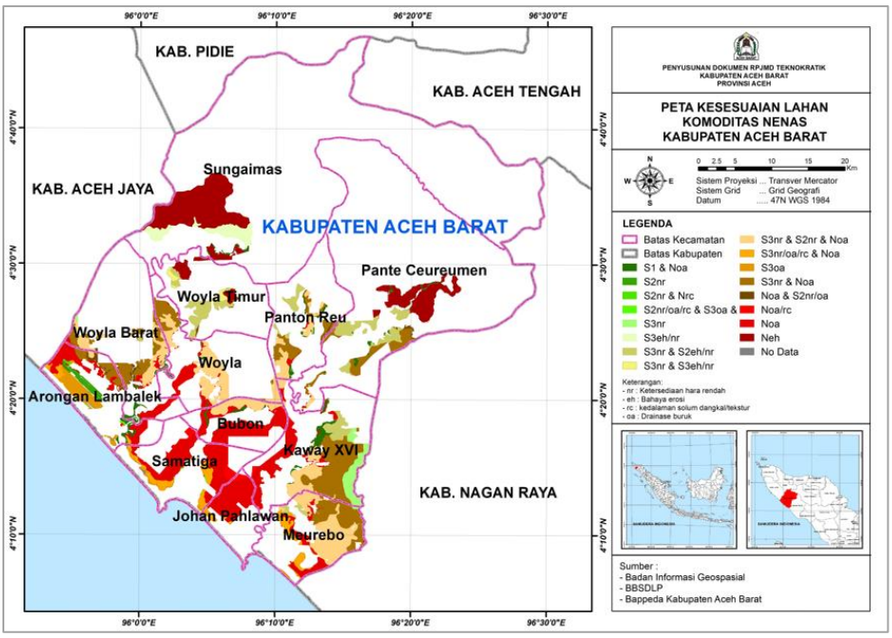

Gambar 2.82
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Nenas

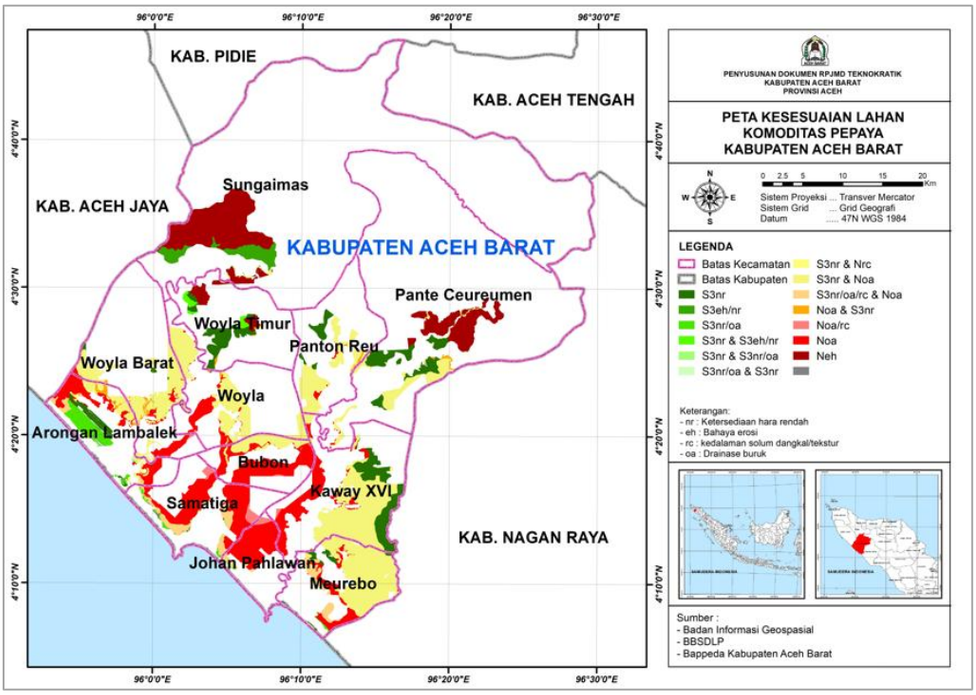

Gambar 2.83
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Pepaya

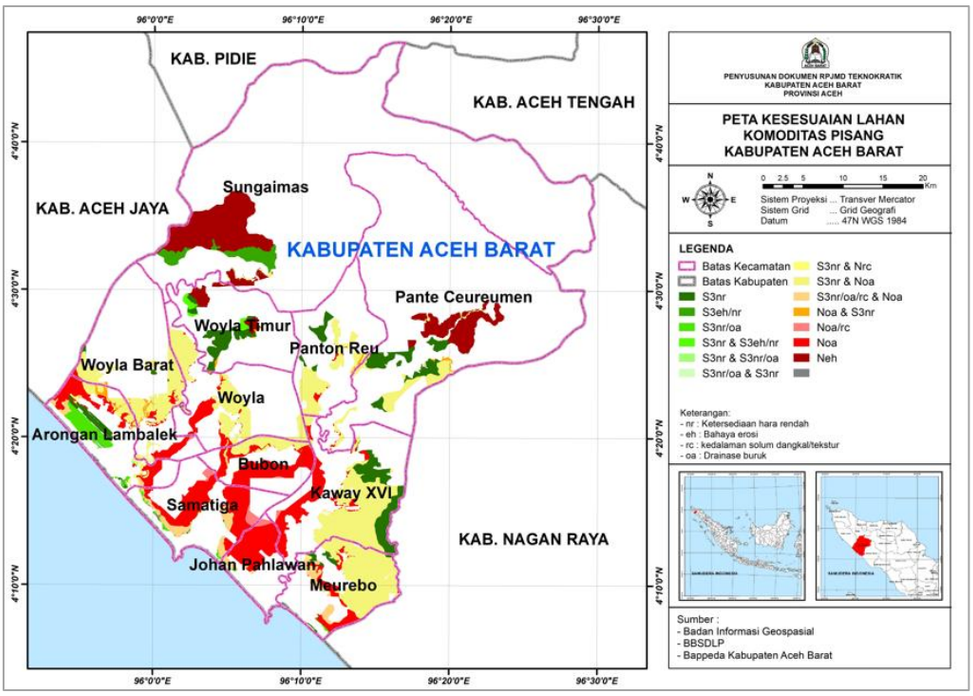

Gambar 2.84
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Pisang

Tabel 2.124 Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Hortikultura Sayuran

Komoditas	Kelas Kesesuaian (Ha)				Faktor Pembatas
	S1	S2	S3	N	
Cabe Merah			35,892	24,992	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Bawang Merah			35,892	24,992	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Sawi			35,892	24,992	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Terong			35,892	24,992	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah

Sumber: Hasil Analisis Evaluasi Kesesuaian Lahan

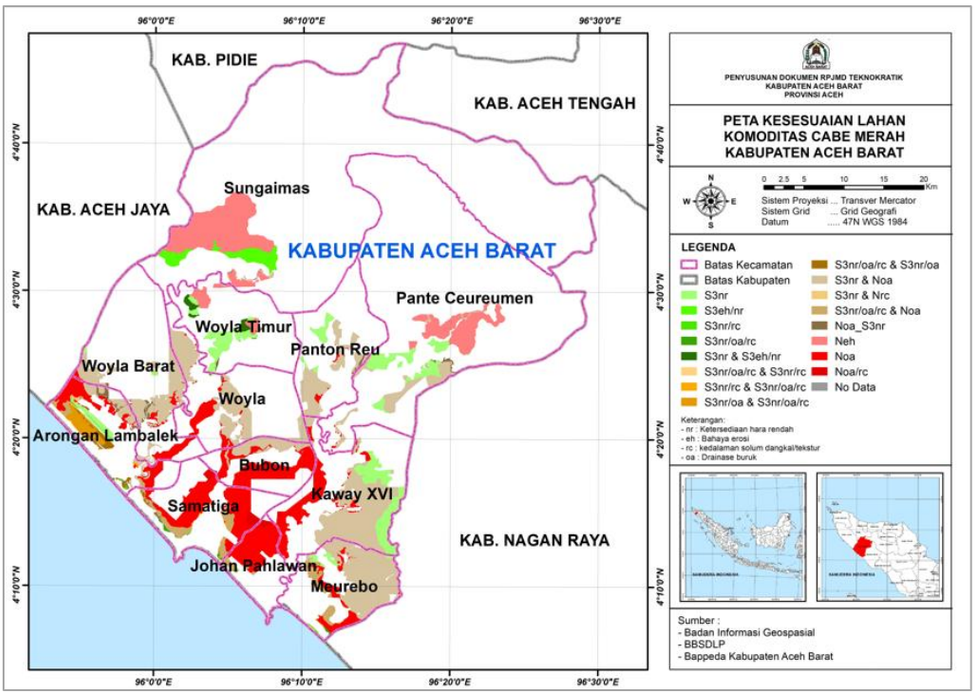

Gambar 2.85
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Cabe Merah

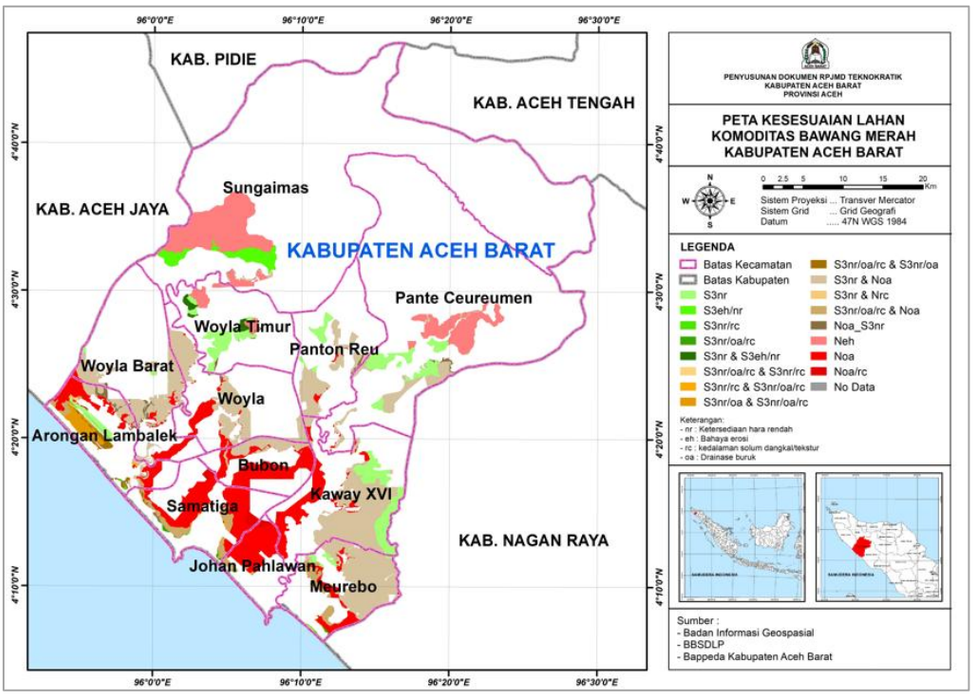

Gambar 2.86
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Bawang Merah

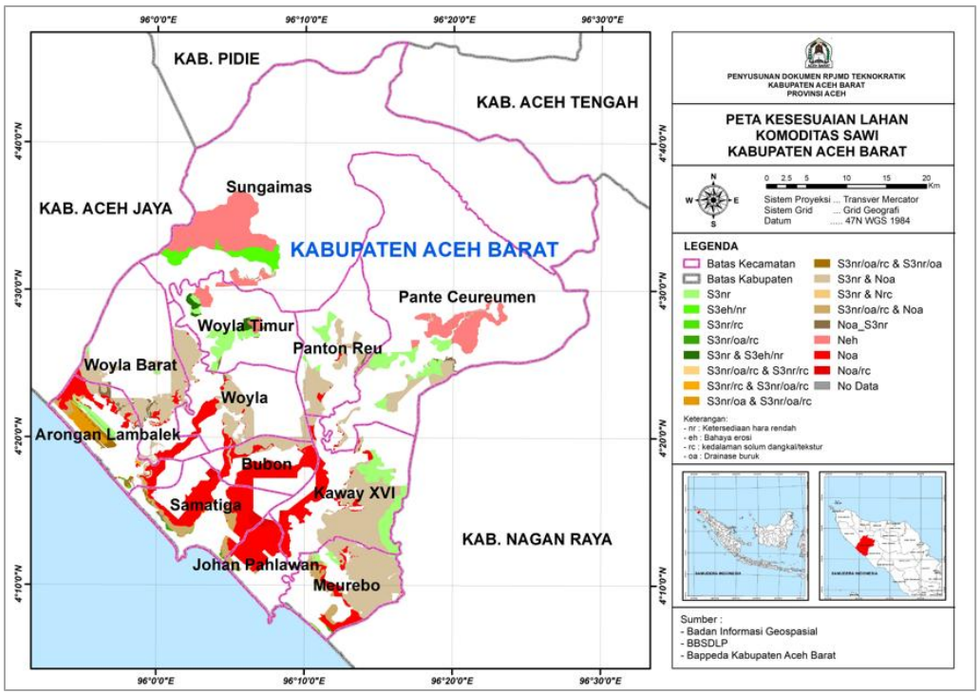

Gambar 2.87
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Sawi

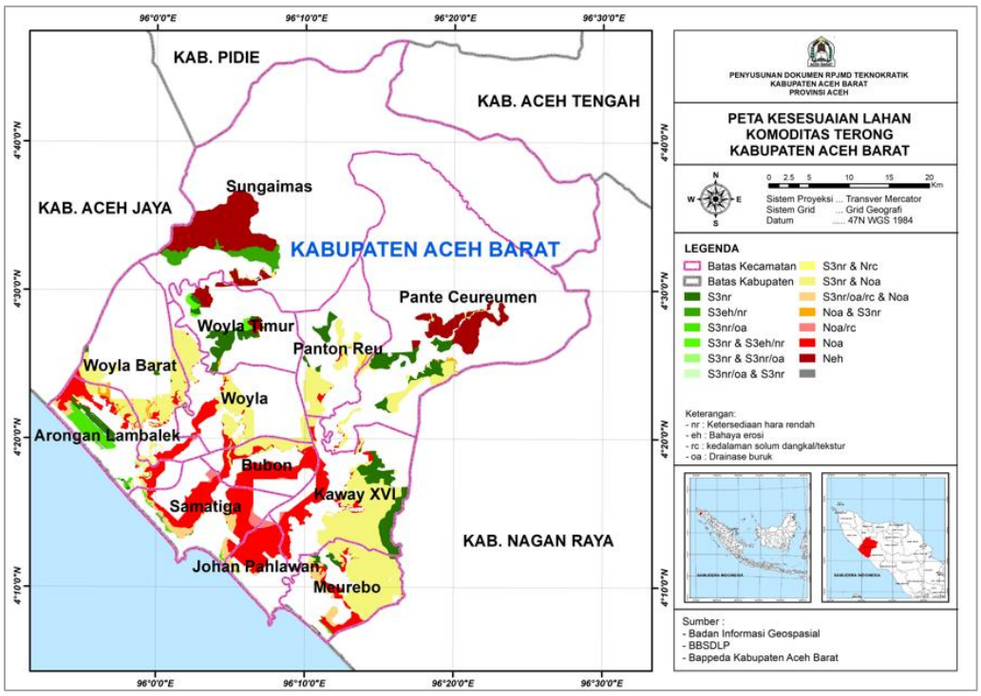

Gambar 2.88
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Terong

Tabel 2.125 Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Perkebunan

Komoditas	Kelas Kesesuaian (Ha)				Faktor Pembatas
	S1	S2	S3	N	
Cengkeh	65		34,240	21,472	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Duku	65		21,537	21,472	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Durian	65		21,537	21,472	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah

Komoditas	Kelas Kesesuaian (Ha)				Faktor Pembatas
	S1	S2	S3	N	
Gambir	65		21,537	21,472	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Kakao	65		21,537	21,472	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Karet	65		21,537	21,472	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Kelapa Sawit	65		21,537	21,472	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Kelapa Sawit	65		21,537	21,472	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah

Sumber: Hasil Analisis Evaluasi Kesesuaian Lahan

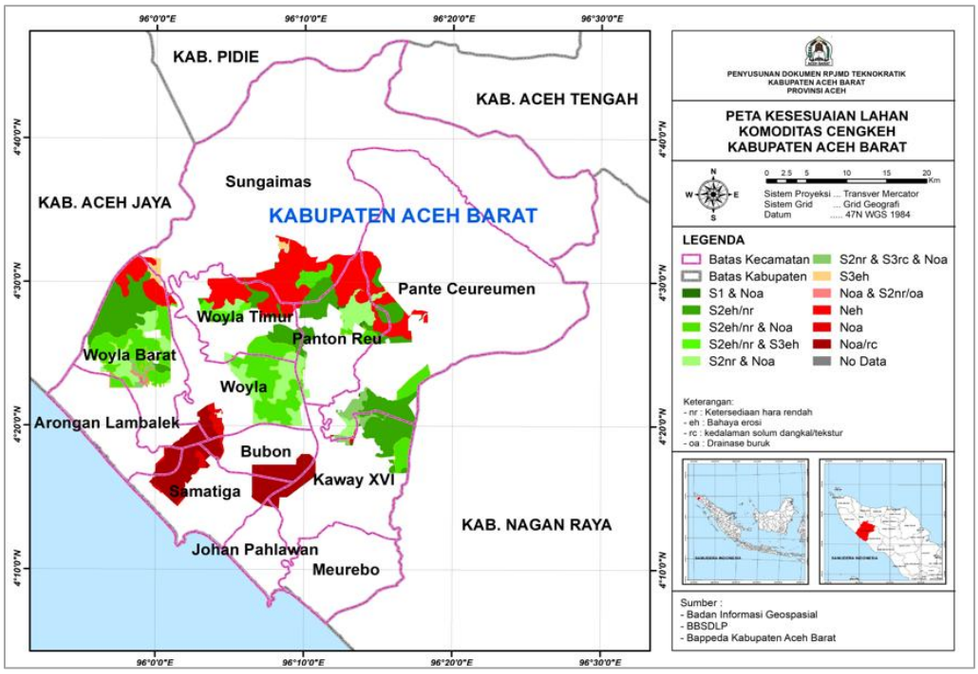

Gambar 2.89
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Cengkeh

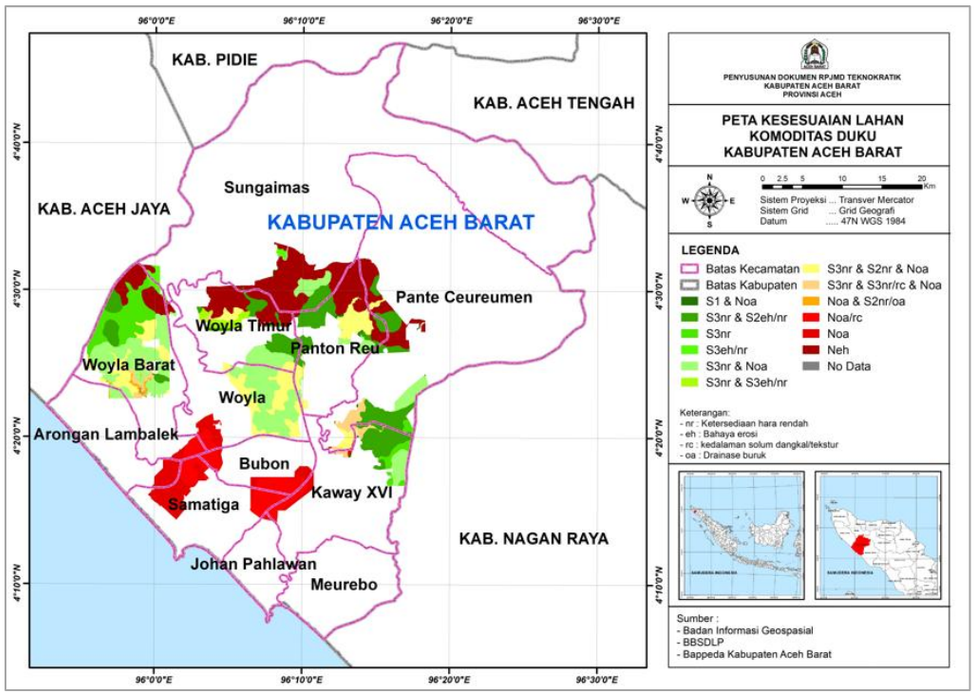

Gambar 2.90
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Duku

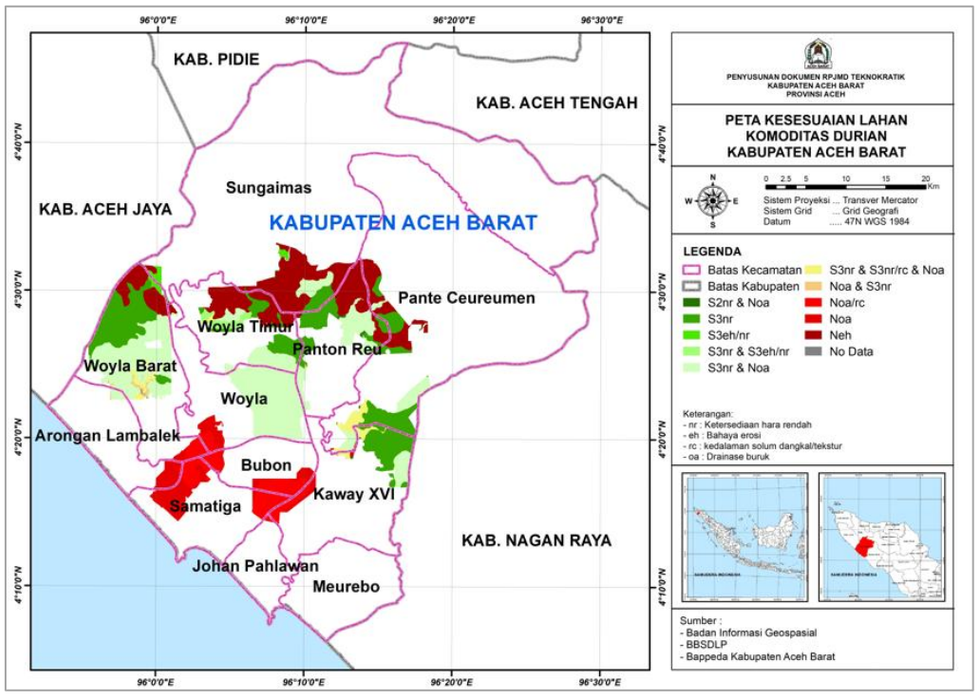

Gambar 2.91
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Durian

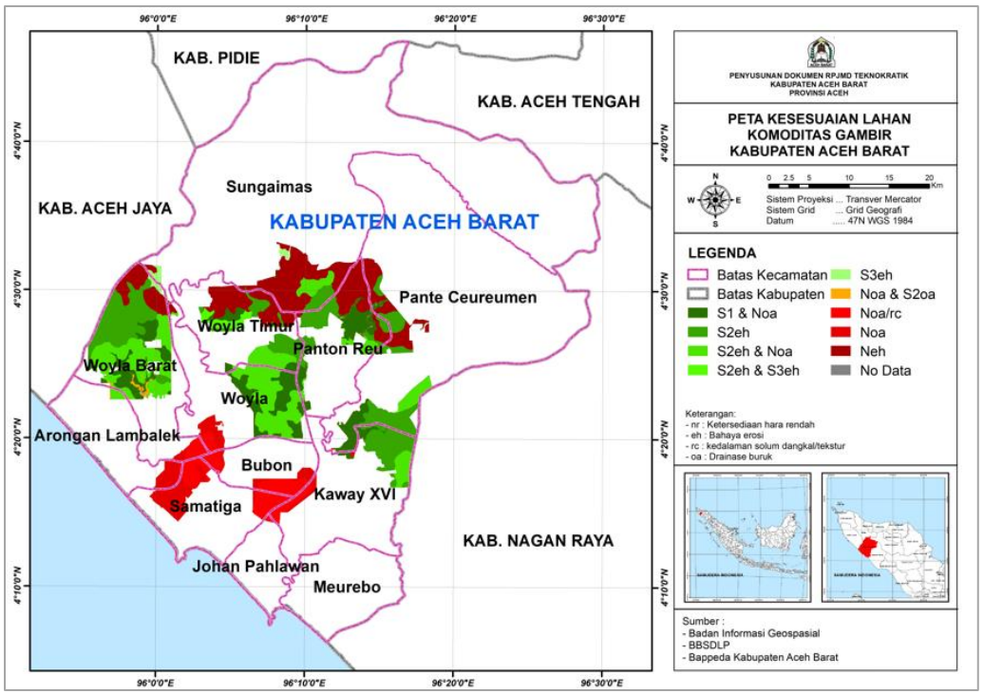

Gambar 2.92
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Gambir

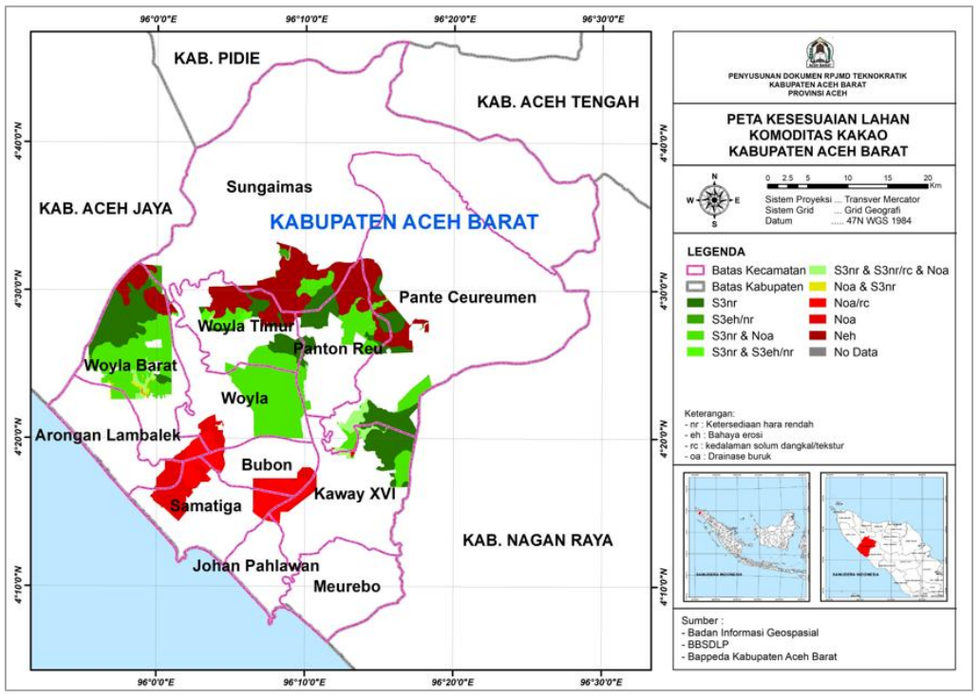

Gambar 2.93
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Kakao

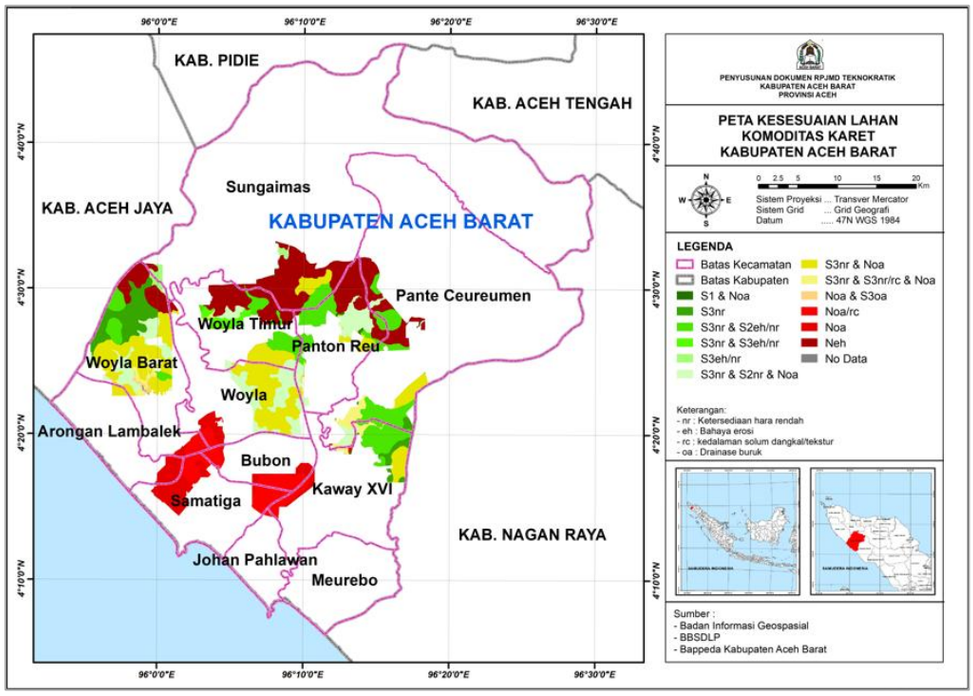

Gambar 2.94
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Karet

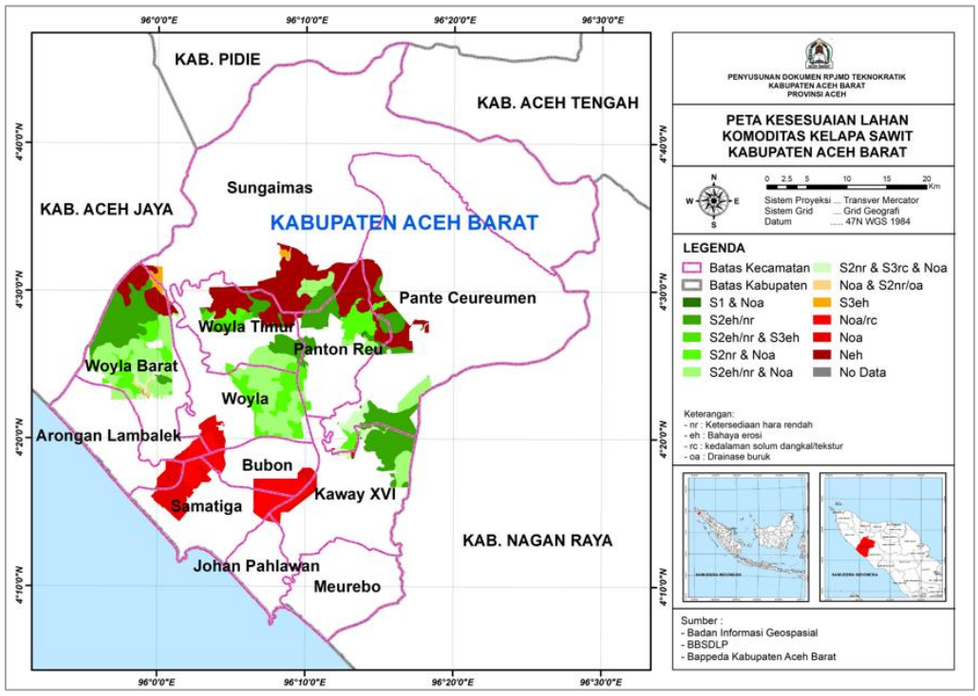

Gambar 2.95
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Kelapa Sawit

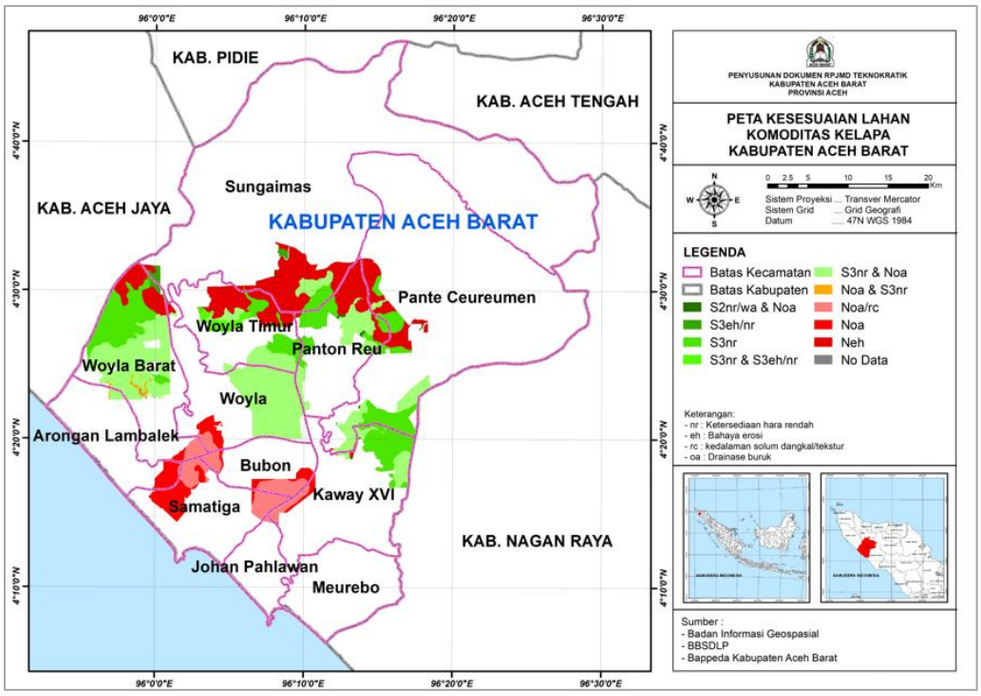

Gambar 2. 96
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Kelapa

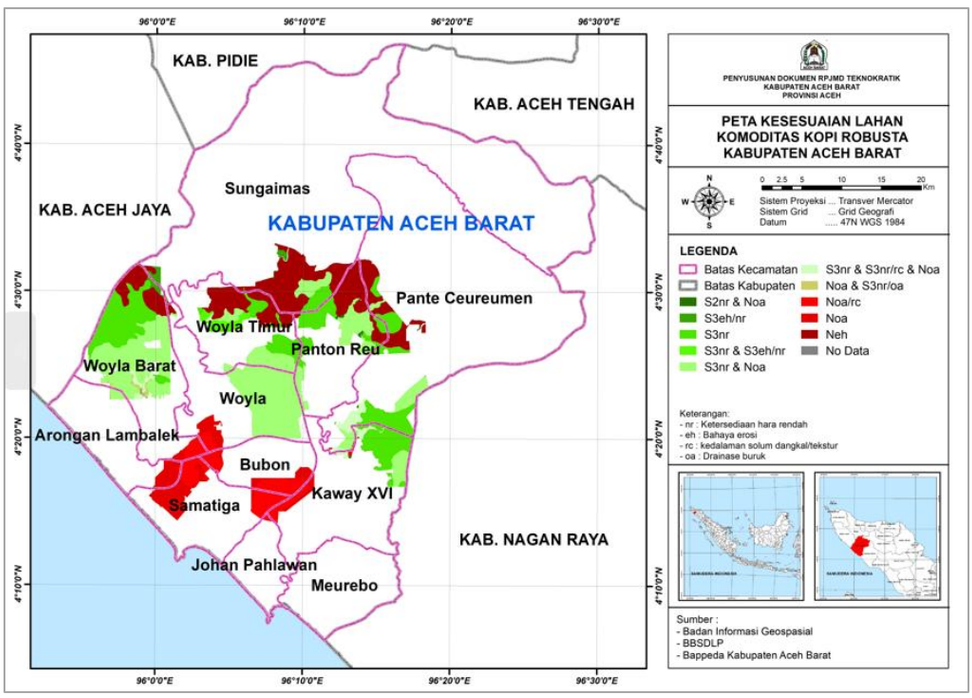

Gambar 2.97
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Kopi Robusta

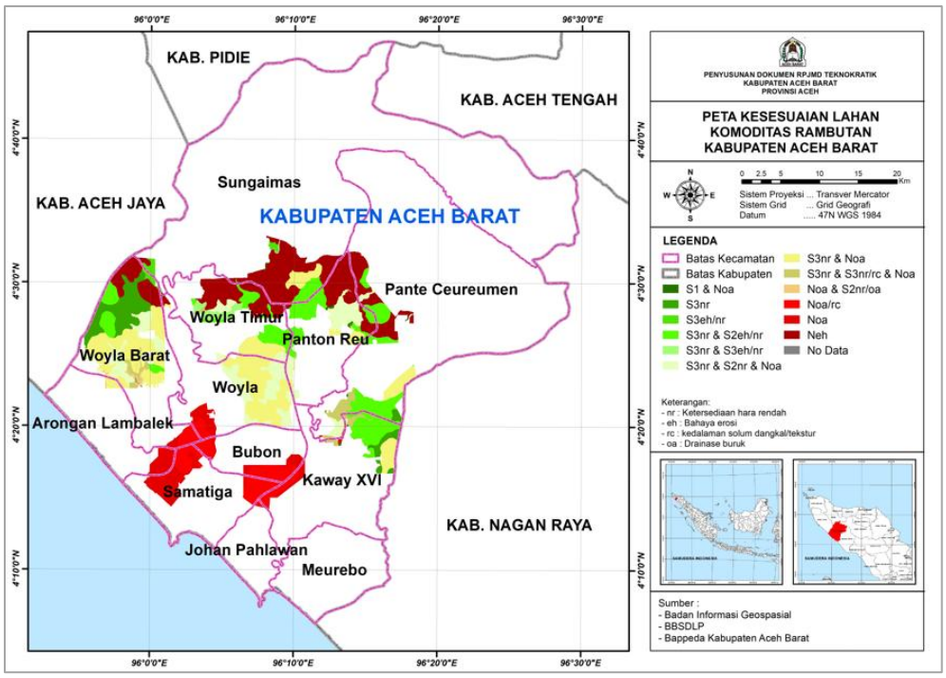

Gambar 2.98
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Rambutan

Tabel 2.126 Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Tanaman Pangan Selain Padi

Komoditas	Kelas Kesesuaian (Ha)				Faktor Pembatas
	S1	S2	S3	N	
Jagung			10,540	2,123	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Ubi kayu			10,540	2,123	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Ubi jalar			10,540	2,123	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah
Kedelai			10,540	2,123	Kedalaman solum dangkal, drainase buruk, bahaya erosi, hara rendah

Sumber: Hasil Analisis Evaluasi Kesesuaian Lahan

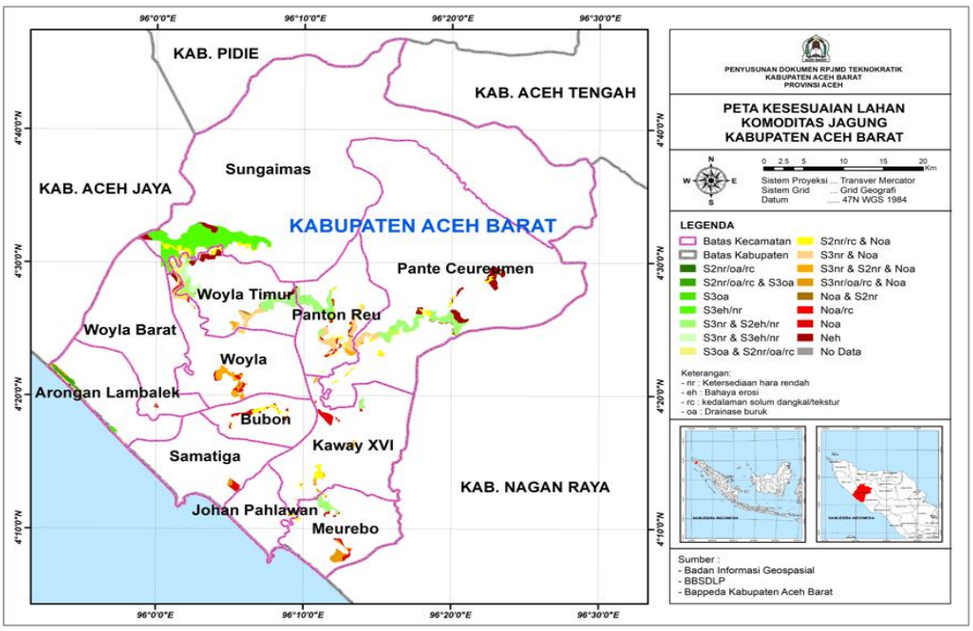

Gambar 2. 99
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Jagung

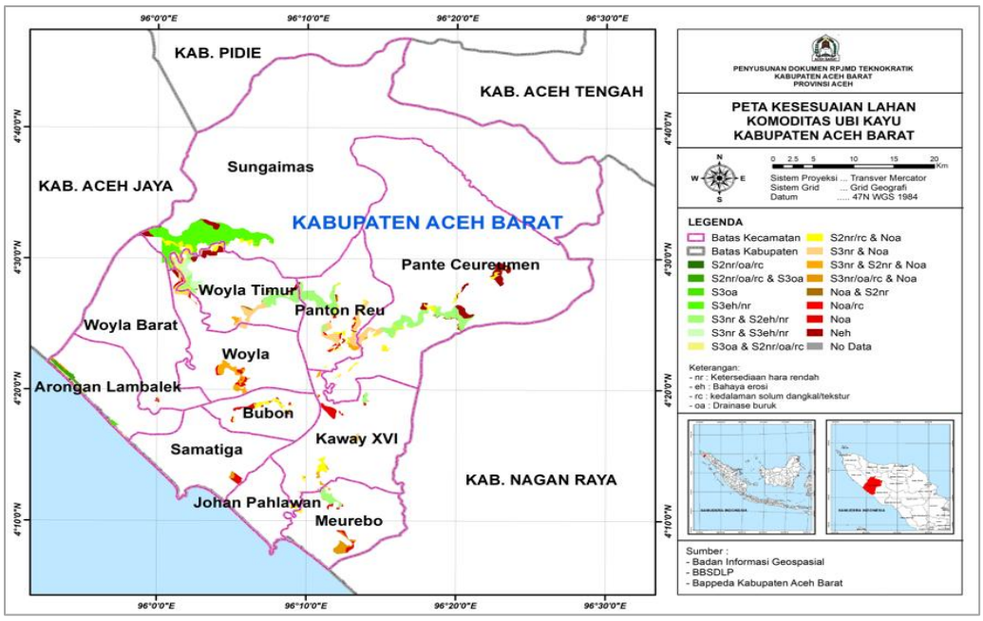

Gambar 2.100
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Ubi Kayu

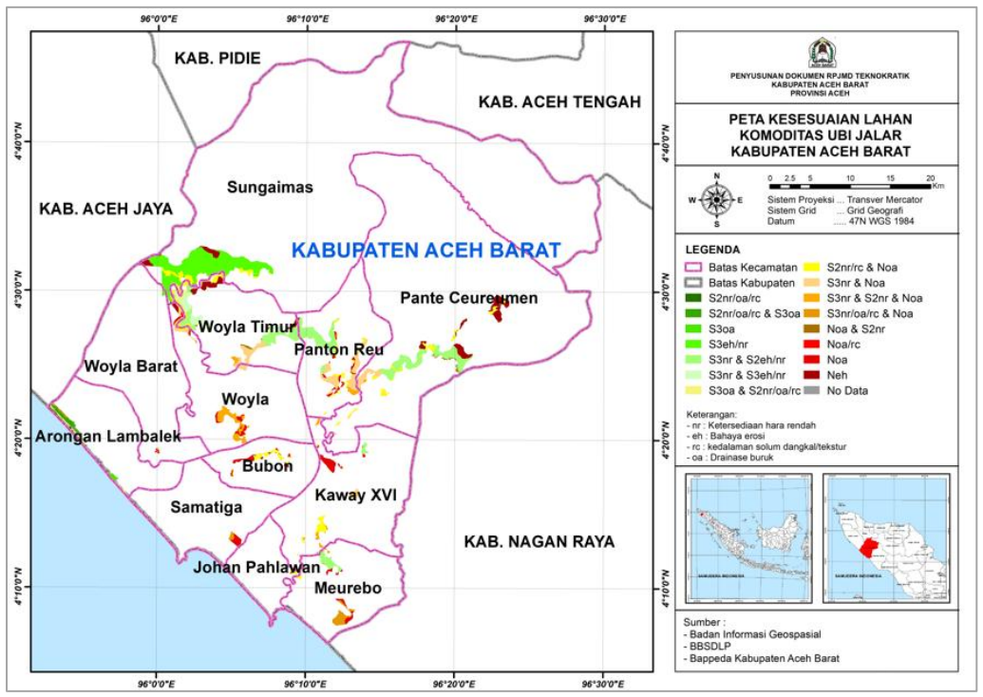

Gambar 2.101
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Ubi Jalar

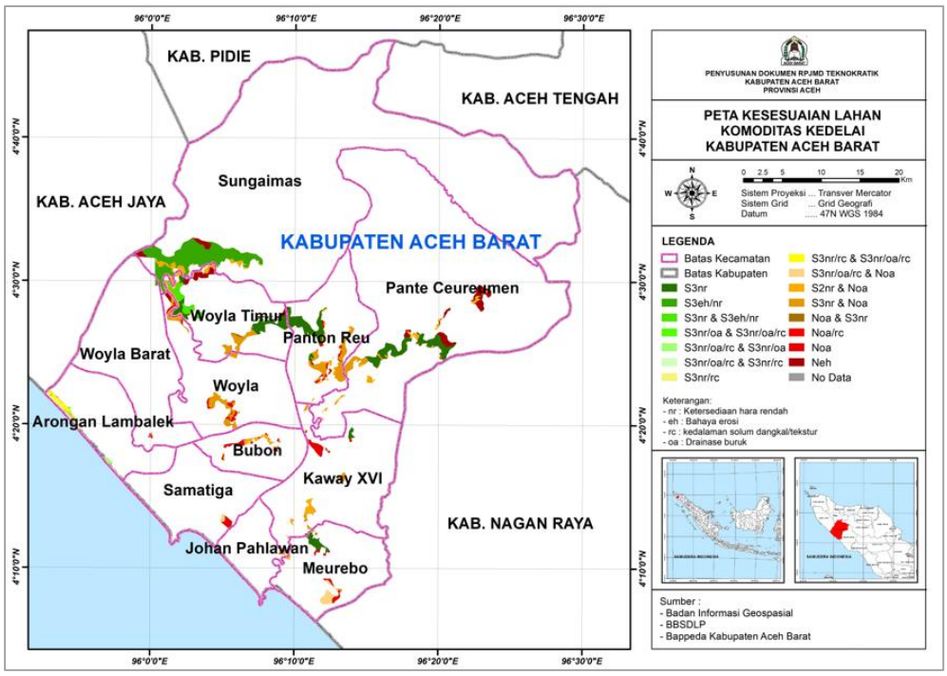

Gambar 2.102
Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Kedelai

Untuk memperoleh lokasi spesifik komoditas unggulan berbasis kecamatan, maka dilakukan pemetaan terhadap hasil analisis LQ dan *Shif Share* pada tiap kecamatan yang diintegrasikan dalam wilayah pola ruang pertanian pada setiap kelompok komoditas. Hasil analisis unggulan berbasis pola ruang tiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat tersaji pada Tabel 2.127 dan Gambar 2.107 bawah ini.

Tabel 2.127 Luas Komoditas Unggulan Hasil Optimasi Pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat

Komoditas Unggulan	Arongan Lambalek	Bubon	Johan Pahlawan	Kaway XVI	Meurebo	Pante Ceureumen	Panton Reu	Samatiga	Sungaimas	Woyla	Woyla Barat	Woyla Timur	Total
Coklat	5,960.34						6,048.31						12,008.65
Coklat/Pepaya									3,672.73				3,672.73
Durian/Jambu Air						5,882.64							5,882.64
Jagung		3,856.95			603.45	2,186.13						2,090.10	8,736.63
Kacang Tanah				573.32									573.32
Kelapa					7,239.56								7,239.56
Kelapa Sawit/Coklat									5,963.21				5,963.21
Kelapa Sawit/Kopi						6,216.95							6,216.95
Kopi		1,970.44		14,175.01									16,145.45
Langsat											12,885.11		12,885.11
Mangga								3,468.75					3,468.75
Padi Sawah	3,255.47	1,411.42	458.73	3,316.61	834.95	2,920.40	1,572.22	2,444.38	186.12	2,939.79	1,578.91	1,785.19	22,704.18
Pepaya									7,701.70				7,701.70
Pisang/Jambu Air							2,735.58						2,735.58
Pisang/Jambu Air/Nangka											4,119.81		4,119.81
Rambutan												8,994.40	8,994.40
Ubi Jalar							1,753.56			11,760.16			13,513.72
Ubi Kayu	453.08		2,708.45					5,190.87					8,352.40
Ubi Kayu/ Ubi Jalar											53.56		53.56
Jumlah	**9,668.89**	**7,238.81**	**3,167.18**	**18,064.94**	**8,677.96**	**17,206.13**	**12,109.67**	**11,104.00**	**17,523.75**	**14,699.95**	**18,637.39**	**12,869.69**	**150,968.35**

Sumber: Hasil Analisis

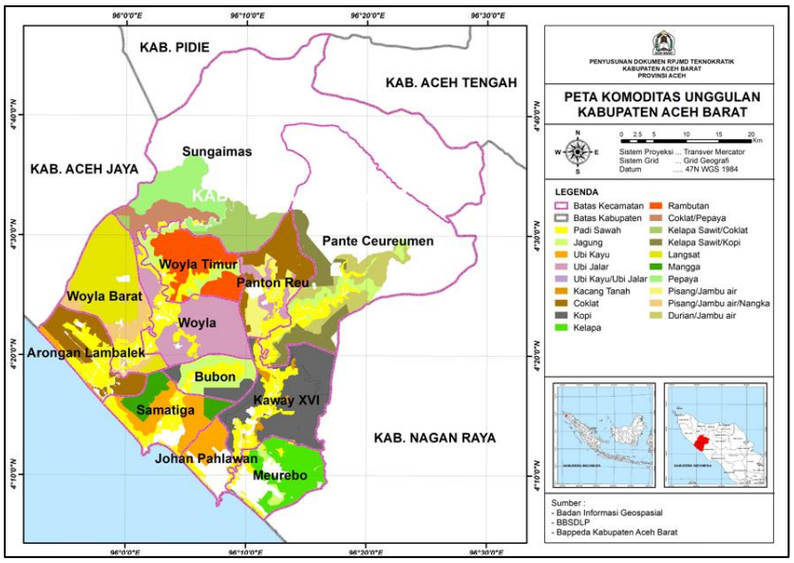

Gambar 2.103
Peta Komoditas Unggulan Tiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat

I. Analisis Klassen Typology (Sosial Ekonomi)

Metode analisis Klassen Typology (Tipologi Klassen) pada awalnya digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Dalam hal ini, analisis ini membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah (dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan analisis). Berlandaskan 2 indikator yang dipersilangkan ini, analisis ini membagi daerah ke dalam 4 karakteristik/tipologi daerah yang berbeda.

Untuk keperluan Rencana Teknokratik Kabupaten Aceh Barat, titik berangkat untuk membuat tipologi berdasarkan isu strategis yang dianggap paling krusial untuk diselesaikan di Kabupaten Aceh Barat, yaitu kemiskinan. Indikator kemiskinan (sumbu X) ini kemudian dipersilangkan dengan indikator sosial dan ekonomi lainnya (sumbu Y) yang relevan dan dapat menjadi *proxy* untuk melihat pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Ada 8 indikator yang dianalis, yaitu: rasio penyedia pangan, lulusan SMA/Sederajat, akses listrik PLN, rasio fasilitas ekonomi, rasio fasilitas kesehatan, rasio fasilitas pendidikan, prevalensi penyakit, kriminalitas.

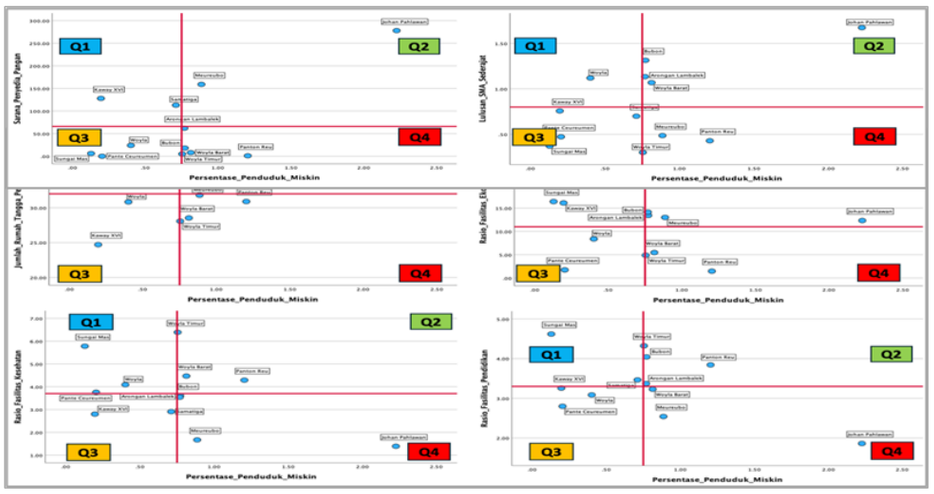

Gambar 2.104
Tipologi Klassen Persentase Penduduk Miskin dengan Indikator Sosial-Ekonomi Per Kecamatan

Tabel 2.128 Sintesa Hasil Status Persentase Penduduk Miskin Terhadap Indikator Sosial-Ekonomi Per Kecamatan

Kecamatan	Rasio Fasilitas Ekonomi	Lulusan SMA Sederajat	Rumah Tangga PLN	Rasio Fasilitas Pendidikan	Rasio Fasilitas Kesehatan	Sarana Penyedia Pangan
Samatiga	1	3	1	1	3	1
Sungai Mas	1	3	1	1	1	3
Woyla	3	1	3	3	1	3
Kaway XVI	1	1	3	3	3	1
Pante Ceureumen	3	3	1	3	1	3
Arongan Lambalek	2	2	2	2	4	4
Bubon	2	2	2	2	4	4
Johan Pahlawan	2	2	2	4	4	2
Woyla Timur	4	4	4	2	2	4
Panton Reu	4	4	4	2	2	4
Meureubo	2	4	4	4	4	2
Woyla Barat	4	2	4	4	2	4

Rendah VS Tinggi
Rendah VS Rendah
Tinggi VS Tinggi
Tinggi VS Rendah

1. Persentase Penduduk Miskin dengan Rasio Penyedia Pangan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat sering kali berkaitan erat dengan ketersediaan dan aksesibilitas sarana prasarana penyedia pangan seperti warung, toko, dan kedai makanan. Ketersediaan sarana prasarana ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan penduduk, terutama yang miskin, untuk mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi dengan harga terjangkau. Pertama, keberadaan warung, toko, dan kedai makanan yang tersebar merata di suatu wilayah memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan bahan pangan. Jika sarana ini tidak tersedia atau jaraknya terlalu jauh, penduduk miskin akan kesulitan memperoleh makanan sehari-hari. Mereka mungkin harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan atau menghabiskan waktu yang lebih lama untuk membeli pangan, yang bisa menambah beban ekonomi mereka. Kedua, warung dan toko kecil sering kali menjual pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan supermarket besar. Ini karena warung dan toko kecil biasanya membeli langsung dari petani lokal atau distributor kecil, sehingga rantai distribusinya lebih pendek dan biaya operasionalnya lebih rendah. Hal ini sangat penting bagi penduduk miskin yang memiliki daya beli rendah. Jika sarana ini tidak tersedia, mereka mungkin harus membeli dari tempat yang lebih mahal, sehingga pengeluaran mereka untuk pangan meningkat dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya menurun. Ketiga, keberadaan kedai makanan dan warung makan juga memberikan alternatif bagi penduduk miskin untuk mendapatkan makanan siap saji dengan harga terjangkau. Ini sangat penting bagi mereka yang mungkin tidak memiliki fasilitas memasak yang memadai di rumah atau waktu untuk memasak. Kedai makanan yang terjangkau memungkinkan penduduk miskin untuk tetap mendapatkan makanan yang bergizi tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Keempat, sarana prasarana penyedia pangan juga berperan dalam mendukung ekonomi lokal. Warung, toko, dan kedai makanan yang dikelola oleh penduduk setempat menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan peluang ekonomi yang langsung dapat diakses oleh penduduk miskin. Selain itu, keberadaan sarana ini juga mendukung petani dan

produsen lokal dengan menyediakan saluran distribusi yang lebih dekat dan lebih mudah diakses.

2. Persentase Penduduk Miskin dengan Lulusan SMA/Sederajat

Tingkat pendidikan, khususnya lulusan SMA/sederajat, memiliki hubungan erat dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan keterampilan individu, yang pada gilirannya mempengaruhi peluang ekonomi dan kesejahteraan. Pertama, lulusan SMA/sederajat umumnya memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Pendidikan menengah menyediakan pengetahuan dasar dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki pasar kerja. Misalnya, banyak pekerjaan di sektor jasa, manufaktur, dan administrasi yang mensyaratkan minimal pendidikan SMA/sederajat. Dengan demikian, lulusan SMA memiliki akses yang lebih baik ke lapangan pekerjaan, yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Kedua, pendidikan menengah juga membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi atau pelatihan kejuruan. Peluang ini memungkinkan individu untuk mendapatkan keterampilan yang lebih spesifik dan berdaya saing tinggi, yang dapat meningkatkan potensi pendapatan mereka. Tanpa pendidikan menengah, peluang untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut sangat terbatas, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Ketiga, lulusan SMA/sederajat cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kesehatan, perencanaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya. Pengetahuan ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan. Misalnya, mereka mungkin lebih sadar akan pentingnya asuransi kesehatan atau investasi dalam pendidikan anak-anak mereka. Keempat, tingkat pendidikan juga mempengaruhi partisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal. Lulusan SMA/sederajat lebih mungkin terlibat dalam kegiatan kewirausahaan atau usaha kecil-menengah, karena mereka memiliki keterampilan dasar dalam manajemen dan administrasi. Kegiatan ekonomi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pribadi tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Namun, meskipun lulusan SMA/sederajat memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, beberapa faktor eksternal tetap mempengaruhi kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Misalnya, kekurangan peluang kerja yang memadai, infrastruktur yang buruk, atau lingkungan ekonomi yang tidak mendukung, lulusan SMA mungkin tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, selain meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, diperlukan juga kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.

3. Persentase Penduduk Miskin dengan Akses Listrik PLN

Akses listrik dari PLN meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Rumah tangga yang memiliki akses listrik dapat memanfaatkan peralatan listrik seperti lampu, kipas angin, kulkas, dan alat masak listrik. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan hidup, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas produktif setelah gelap, seperti belajar atau bekerja dari rumah. Tanpa listrik, rumah tangga miskin mungkin harus bergantung pada sumber penerangan alternatif yang kurang efisien dan lebih mahal, seperti lampu minyak atau lilin. Akses listrik memungkinkan anak-anak dari rumah tangga miskin untuk belajar dengan lebih baik. Cahaya yang memadai di malam hari memungkinkan mereka

untuk mengerjakan tugas sekolah dan belajar dengan lebih efektif. Ini berkontribusi pada peningkatan hasil pendidikan dan memberikan peluang lebih besar bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan di masa depan. Listrik juga mendukung kegiatan ekonomi lokal dan usaha kecil. Rumah tangga yang memiliki akses listrik dapat menjalankan usaha kecil seperti menjahit, membuat kue, atau menjalankan toko kelontong dengan lebih efisien. Usaha kecil ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, listrik memungkinkan penggunaan teknologi seperti komputer dan internet, yang membuka peluang baru dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Akses listrik juga berperan penting dalam meningkatkan layanan kesehatan. Rumah tangga yang memiliki akses listrik dapat menyimpan obat-obatan yang membutuhkan pendinginan, dan fasilitas kesehatan setempat dapat memberikan layanan yang lebih baik dengan adanya peralatan medis yang membutuhkan listrik. Kesehatan yang lebih baik berkontribusi pada produktivitas kerja dan pengurangan beban ekonomi akibat biaya pengobatan. Listrik memungkinkan akses informasi yang lebih baik melalui televisi, radio, dan internet. Akses informasi ini membantu rumah tangga miskin untuk mengetahui peluang kerja, program bantuan pemerintah, serta pengetahuan tentang kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, meskipun akses listrik memiliki banyak manfaat, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Biaya sambungan listrik dan tarif bulanan mungkin masih menjadi hambatan bagi rumah tangga miskin. Oleh karena itu, kebijakan subsidi listrik dan program bantuan pemasangan listrik dapat sangat membantu dalam meningkatkan akses listrik bagi penduduk miskin.

4. Persentase Penduduk Miskin dengan Rasio Fasilitas Ekonomi

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat berkaitan erat dengan rasio fasilitas ekonomi yang tersedia. Fasilitas ekonomi mencakup berbagai infrastruktur dan layanan yang mendukung aktivitas ekonomi, seperti pasar, pusat perbelanjaan, bank, koperasi, dan fasilitas usaha kecil. Rasio fasilitas ekonomi yang memadai memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Rasio fasilitas ekonomi yang tinggi mencerminkan adanya akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi. Fasilitas seperti pasar dan pusat perbelanjaan menyediakan tempat bagi penduduk untuk membeli dan menjual barang serta jasa. Pasar yang aktif memungkinkan petani, nelayan, dan pengusaha kecil untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Tanpa fasilitas ekonomi yang memadai, penduduk miskin mungkin kesulitan menemukan tempat untuk menjual produk mereka atau membeli barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Akses ke layanan keuangan seperti bank dan koperasi sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Fasilitas keuangan ini menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi yang dapat membantu penduduk miskin mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Misalnya, dengan akses ke pinjaman mikro, penduduk miskin dapat memulai atau mengembangkan usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Tanpa akses ke layanan keuangan, penduduk miskin mungkin harus bergantung pada rentenir dengan bunga tinggi, yang justru memperburuk kondisi ekonomi mereka. Fasilitas ekonomi yang memadai juga mencakup infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, dan komunikasi. Infrastruktur ini memungkinkan arus barang dan jasa yang efisien serta menghubungkan produsen dengan pasar yang lebih luas. Jalan yang baik dan transportasi yang terjangkau memungkinkan petani dan pengusaha kecil untuk menjangkau pasar yang

lebih jauh dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk mereka. Tanpa infrastruktur yang memadai, biaya transportasi yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Fasilitas ekonomi juga mencakup pusat pelatihan dan pendidikan yang menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Pelatihan keterampilan, misalnya dalam bidang teknologi informasi, kerajinan, atau pertanian modern, dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan membuka peluang kerja yang lebih baik. Tanpa akses ke pelatihan dan pendidikan yang relevan, penduduk miskin mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak atau mengembangkan usaha yang sukses. Rasio fasilitas ekonomi yang memadai juga mencakup keberadaan toko, warung, dan kedai yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Akses mudah ke barang-barang pokok ini membantu penduduk miskin mengurangi biaya hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Tanpa fasilitas ekonomi yang memadai, penduduk miskin mungkin harus mengeluarkan lebih banyak waktu dan uang untuk mendapatkan barang-barang dasar, yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan mereka.

5. Persentase Penduduk Miskin dengan Rasio Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang mencukupi dan mudah diakses memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memiliki dampak langsung terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai membantu mencegah dan mengobati penyakit, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas individu. Ketika penduduk miskin memiliki akses yang mudah ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit, mereka dapat mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan untuk tetap sehat dan produktif. Kesehatan yang baik memungkinkan mereka untuk bekerja secara efektif dan tidak kehilangan pendapatan karena sakit. Sebaliknya, tanpa akses yang memadai ke fasilitas kesehatan, penyakit yang tidak diobati dapat mengurangi produktivitas dan meningkatkan biaya pengobatan, yang memperburuk kondisi kemiskinan. Fasilitas kesehatan yang memadai berperan dalam mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh penduduk miskin. Banyak keluarga miskin tidak mampu membayar biaya pengobatan yang mahal di rumah sakit swasta. Dengan adanya fasilitas kesehatan publik yang terjangkau, seperti puskesmas dan klinik pemerintah, mereka dapat mengakses layanan kesehatan dasar tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Program kesehatan seperti BPJS di Indonesia juga membantu mengurangi beban biaya pengobatan bagi keluarga miskin, sehingga mereka dapat menggunakan penghasilan mereka untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Fasilitas kesehatan yang baik juga menyediakan layanan pencegahan dan pendidikan kesehatan. Layanan imunisasi, program gizi, dan edukasi tentang kebersihan serta kesehatan reproduksi membantu mencegah penyakit dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Penduduk yang sehat dan teredukasi tentang kesehatan cenderung memiliki anak-anak yang lebih sehat dan lebih mampu mengejar pendidikan, yang pada akhirnya dapat memutus lingkaran kemiskinan antar generasi. Rasio fasilitas kesehatan yang tinggi juga mencakup akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu yang baik selama kehamilan dan persalinan, serta perawatan yang memadai untuk bayi dan anak-anak, berperan penting dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kesehatan jangka panjang anak-anak. Anak-anak yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mencapai pendidikan yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di masa depan.

6. Persentase Penduduk Miskin dengan Rasio Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang memadai dan mudah diakses memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta memiliki dampak langsung terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Fasilitas pendidikan yang memadai meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah yang tersebar merata dan mudah dijangkau memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh dan berbiaya tinggi. Ketika anak-anak memiliki akses yang mudah ke pendidikan dasar dan menengah, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kualitas fasilitas pendidikan berpengaruh langsung terhadap hasil belajar siswa. Sekolah dengan fasilitas yang baik, seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendidikan, mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Siswa yang belajar di lingkungan yang mendukung cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Rasio fasilitas pendidikan yang memadai juga mencakup ketersediaan guru yang berkualitas. Guru yang terlatih dan berkompeten mampu memberikan pendidikan yang lebih efektif dan relevan. Mereka dapat menginspirasi dan membimbing siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Tanpa fasilitas pendidikan yang memadai, sekolah mungkin kekurangan guru berkualitas, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa dari keluarga miskin. Fasilitas pendidikan yang baik juga mendukung program pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan. Program-program ini sangat penting bagi remaja dan dewasa muda yang mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Pelatihan keterampilan, kursus kejuruan, dan program pemberdayaan ekonomi membantu mereka memperoleh keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha sendiri. Dengan demikian, fasilitas pendidikan yang memadai dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan di kalangan penduduk miskin. Pendidikan yang berkualitas juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, gizi, dan perencanaan keluarga. Pendidikan yang baik membantu individu membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko kemiskinan. Misalnya, pendidikan tentang kesehatan reproduksi dapat membantu mengurangi angka kelahiran yang tidak direncanakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Fasilitas pendidikan yang memadai juga mencakup akses ke program beasiswa dan bantuan pendidikan. Program ini sangat penting bagi keluarga miskin yang mungkin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Beasiswa dan bantuan pendidikan memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi. Dengan adanya dukungan finansial, mereka dapat fokus pada belajar dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik.

7. Persentase Penduduk Miskin dengan Prevalensi Penyakit dan Tingkat Kriminalitas

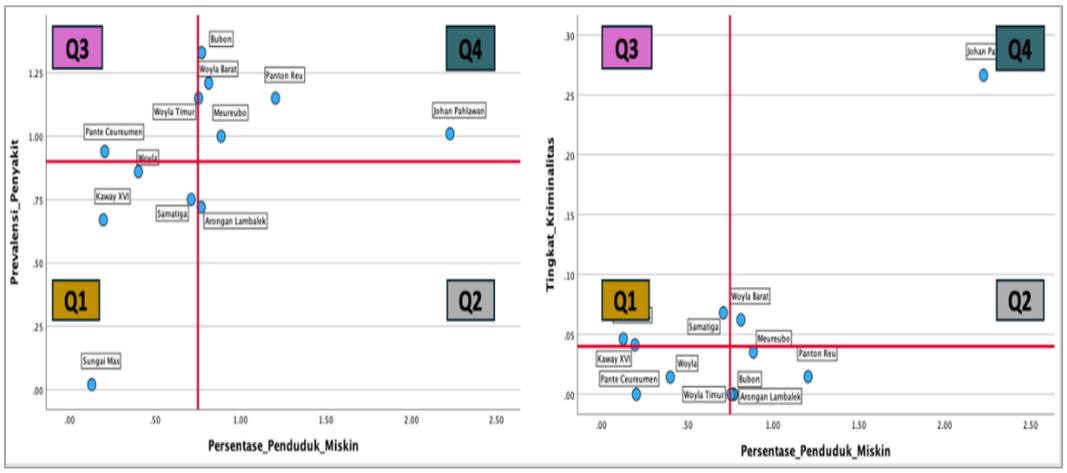

Gambar 2.105
Tipologi Klassen Persentase Penduduk Miskin dengan Indikator Sosial-Ekonomi Per Kecamatan

Tabel 2.129 Sintesa Hasil Status Persentase Penduduk Miskin Terhadap Indikator Sosial Per Kecamatan

Kecamatan	Tingkat Kriminalitas	Tingkat Prevalensi Penyakit
Samatiga	3	1
Sungai Mas	3	1
Woyla	1	1
Kaway XVI	3	1
Pante Ceureumen	1	3
Arongan Lambalek	2	2
Bubon	2	4
Johan Pahlawan	4	4
Woyla Timur	1	4
Panton Reu	2	4
Meureubo	2	4
Woyla Barat	4	4

Rendah VS Rendah
Rendah VS Rendah
Tinggi VS Tinggi
Tinggi VS Tinggi

Kondisi kesehatan yang buruk sering kali mengakibatkan biaya pengobatan yang tinggi, yang dapat menjadi beban besar bagi penduduk miskin. Ketika seseorang sakit, biaya untuk perawatan medis, obat-obatan, dan kunjungan ke fasilitas kesehatan dapat menguras sumber daya keuangan. Bagi keluarga miskin, biaya ini dapat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar lainnya, seperti makanan dan pendidikan. Keterbatasan finansial sering kali membuat mereka sulit untuk mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan berkualitas, sehingga penyakit dapat berkembang lebih parah dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja. Prevalensi penyakit menular cenderung lebih tinggi di kalangan populasi miskin karena kondisi lingkungan yang tidak sehat. Penduduk miskin sering kali tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, akses terbatas ke air bersih, dan tempat tinggal yang padat. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular seperti diare, tuberkulosis, dan penyakit pernapasan. Tingginya prevalensi penyakit menular ini dapat memperburuk kondisi kemiskinan dengan mengurangi

produktivitas kerja dan meningkatkan biaya pengobatan. Kesehatan yang buruk berdampak pada kemampuan kerja dan pendapatan. Individu yang sering sakit atau memiliki kondisi kesehatan kronis cenderung mengalami penurunan kemampuan untuk bekerja secara produktif. Ketidakmampuan untuk bekerja secara penuh atau seringnya absen dari pekerjaan dapat mengurangi pendapatan mereka, memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan. Selain itu, penyakit kronis dapat membatasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan, sering kali mengarah pada pekerjaan dengan upah rendah. Keterbatasan akses ke fasilitas Kesehatan di daerah miskin juga berkontribusi pada tingginya prevalensi penyakit. Rumah tangga miskin mungkin tidak memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan, seperti klinik atau rumah sakit, atau mungkin mengalami keterbatasan dalam mendapatkan layanan medis berkualitas. Keterbatasan ini mengakibatkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan prevalensi penyakit di kalangan penduduk miskin. Ketidakmampuan untuk membeli makanan bergizi** juga berperan dalam memperburuk kesehatan. Diet yang buruk, sering kali disebabkan oleh keterbatasan keuangan, dapat menyebabkan malnutrisi dan penyakit terkait gizi. Malnutrisi dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, dan memperburuk kondisi kesehatan umum. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan di mana kesehatan yang buruk mengarah pada pengeluaran yang lebih besar dan pendapatan yang lebih rendah, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kemiskinan. Kesehatan ibu dan anak juga sangat penting dalam konteks kemiskinan. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi kesehatan yang buruk, termasuk malnutrisi dan penyakit, cenderung mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan kognitif, yang dapat mempengaruhi pencapaian pendidikan dan peluang ekonomi di masa depan. Kesehatan ibu yang buruk selama kehamilan dan persalinan dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, serta mengurangi kualitas hidup keluarga. Prevalensi penyakit yang tinggi berkontribusi secara signifikan terhadap tingginya persentase penduduk miskin, dan sebaliknya, kemiskinan dapat memperburuk kesehatan dengan membatasi akses ke perawatan medis dan makanan bergizi. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, penting untuk memperbaiki kondisi kesehatan dengan meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, menyediakan layanan pencegahan, dan mengatasi masalah sanitasi dan nutrisi. Pendekatan ini dapat membantu memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kriminalitas menjadi salah satu isu sosial yang terjadi di masyarakat dan perlu di atas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif berperan penting dalam mendukung kehidupan yang nyaman serta mendorong pembangunan daerah yang lebih produktif. Kriminalitas tidak berdiri sendiri dan mempunyai relasi yang kuat dengan kemiskinan. Di sisi tertentu, kemiskinan dapat memicu kriminalitas. Kurangnya akses terhadap hak dasar hidup, termasuk akses ekonomi, dapat mendorong orang untuk mengambil langkah singkat dalam mendapatkan uang, salah satunya melalui perbuatan kriminal.

8. Sintesis Tipologi Klassen per Kecamatan

Tabel 2.130 Sintesa Hasil (Simpulan) Pemetaan Tipologi Klassen di Masing-Masing Kecamatan

Kecamatan	Simpulan
Samatiga	Kondisi di mana banyak indikator fasilitas berada pada tingkat tinggi. Namun, rasio fasilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang rendah mengindikasikan bahwa meskipun akses atau ketersediaan tinggi, kualitas atau efektivitas layanan mungkin tidak optimal. Ini menyebabkan kriminalitas sedang dan prevalensi penyakit rendah, menunjukkan akses yang baik tetapi tidak merata.
Sungai Mas	Indikator kecuali sarana penyedia pangan dalam kondisi rendah. Ini bisa menandakan bahwa meskipun akses terhadap fasilitas ada, efektivitas atau kualitas layanan perlu ditingkatkan. Tingginya fasilitas pendidikan tidak tercermin dalam tingkat kriminalitas yang sedang, mengindikasikan potensi ketidaksesuaian antara ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas.
Woyla	Memiliki tingkat kriminalitas rendah dengan banyak indikator dalam kondisi rendah. Rendahnya kriminalitas dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang baik, namun rasio fasilitas ekonomi, pendidikan, dan rumah tangga PLN rendah menunjukkan area yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup penduduk.
Kaway XVI	Menunjukkan banyak indikator dalam kondisi baik dan kriminalitas rendah. Namun tingginya fasilitas ekonomi dan pendidikan tidak diimbangi dengan fasilitas Kesehatan. Hal ini menandakan potensi masalah dalam distribusi dan kualitas layanan fasilitas yang belum merata.
Pante Ceureumen	Menunjukkan angka kemiskinan yang rendah namun berbanding terbalik dengan sarana penyedia pangan, fasilitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang rendah dan beberapa indikator seperti lulusan SMA yang rendah dan prevalensi penyakit yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa penekanan harus diberikan pada peningkatan ketersediaan pangan dan pemenuhan fasilitas penduduk untuk lebih mendukung kualitas hidup masyarakatnya.
Arongan Lambalek	Menunjukkan kondisi dengan indikator ekonomi, pendidikan, dan listrik tinggi namun kemiskinan tetap tinggi, hal ini yang mengindikasikan bahwa meskipun ada fasilitas, ada masalah dalam distribusi atau aksesibilitas. Rendahnya fasilitas kesehatan dan sarana pangan perlu ditingkatkan untuk mengurangi prevalensi penyakit dan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakatnya.
Bubon	Memiliki Tingkat kemiskinan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan peningkatan indikator ekonomi, pendidikan, dan listrik, prevalensi penyakit tinggi dan sarana pangan rendah. Ini menunjukkan adanya masalah distribusi atau aksesibilitas layanan, serta perlunya peningkatan dalam fasilitas kesehatan, ekonomi, dan pendidikan dan penyediaan pangan.
Johan Pahlawan	Menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan, sebab walaupun fasilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya dan jumlah penduduk tinggi, namun Tingkat kemiskinan di Kec. Johan Pahlawan juga cenderung tinggi. Tingginya angka kemiskinan, tingkat kriminalitas dan prevalensi penyakit menandakan perlunya intervensi besar dalam peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, apakah peningkatan jumlah penduduk akibat pertumbuhan alami dan pendatang berbanding lurus dengan peningkatan fasilitas, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Woyla Timur	Memiliki Tingkat kemiskinan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan peningkatan indikator ekonomi, pendidikan, dan listrik, prevalensi penyakit tinggi dan sarana pangan rendah. Ini menunjukkan adanya masalah distribusi atau aksesibilitas layanan, serta perlunya peningkatan dalam fasilitas kesehatan, ekonomi, dan pendidikan dan penyediaan pangan.
Panton Reu	Menunjukkan masalah serius dengan sebagian besar indikator dalam kondisi rendah baik fasilitas, kualitas pendidikan, kriminalitas, dan kemiskinan yang tinggi.

Kecamatan	Simpulan
	Tingginya kriminalitas dan prevalensi penyakit menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan listrik.
Meureubo	Menunjukkan masalah serius dengan sebagian besar indikator dalam kondisi rendah baik fasilitas, kualitas pendidikan, kriminalitas, dan kemiskinan yang tinggi. Tingginya kriminalitas dan prevalensi penyakit menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan Listrik. Fokus utama harus pada peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk menurunkan prevalensi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.
Woyla Barat	Menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan dengan sebagian besar indikator dalam kondisi rendah. Tingginya kriminalitas dan prevalensi penyakit menunjukkan perlunya peningkatan signifikan dalam fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kriminalitas serta penyakit.

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dibandingkan secara komparatif dengan wilayah secara lebih luas (dalam hal ini Provinsi Aceh) maupun dengan yang direncanakan/menjadi target atau standar minimal yang secara umum dipakai.

1. Aspek Geografi dan Demografi

Jika merujuk dari posisi geografis, Kabupaten Aceh Barat memiliki posisi yang cukup strategis karena berada pada jalur lalu lintas yang menghubungkan timur dan barat melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia. Selain itu, sisi topografi yang didominasi oleh kemiringan lereng <8% memberikan potensi dalam pengembangan wilayah. Namun, potensi ini bersama dengan sumber daya alam yang dimiliki (termasuk kelautan) belum memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi pengembangan wilayah. Hambatan pengembangan ini disebabkan tidak optimalnya kinerja sumber daya lainnya, seperti infrastruktur, kapital/investasi, dan sumber daya manusia. Kondisi topografis ini turut andil dalam menyebabkan tingkat penyebaran permukiman di Aceh Barat cukup terfragmentasi dan tersebar pada beberapa lokasi. Sebagai konsekuensinya, pembangunan infrastruktur fisik dasar membutuhkan banyak anggaran dan tidak efisien. Pembahasan permasalahan sumber daya manusia disampaikan pada paragraf di bawah ini, adapun sumber daya lainnya di bagian lain.

Dari sisi demografi, penduduk Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun terakhir didominasi oleh kelompok usia produktif yang merupakan indikasi potensi dalam pembangunan, meski dari sisi kualitas sumber daya manusia masih memerlukan beragam upaya peningkatan. Dari sisi laju pertumbuhan, Kabupaten Aceh Barat memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan tidak terkendali disertai dengan persebaran penduduk yang tidak merata. Kecamatan Johan Pahlawan dalam hal ini mempunyai jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi, diikuti oleh Kecamatan Meureubo. Dua kecamatan ini juga yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat berdampak pada berkembangnya aktivitas sosial dan ekonomi yang berimplikasi terhadap konversi penggunaan lahan (terutama sawah). Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat tetapi

tidak diiringi dengan pengembangan sistem permukiman dan pelayanan akan menimbulkan permasalahan pengembangan wilayah.

Meskipun Kabupaten Aceh Barat memiliki proporsi penduduk usia produktif yang besar, angka pengangguran terbukanya tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain sisi penawaran atau *supply* (yaitu kualitas sumber daya manusia), sisi permintaan (penyediaan lapangan pekerjaan) tampak masih belum optimal. Dari sisi penawaran dapat dilihat bahwa secara IPM, meskipun mengalami tren peningkatan, Kabupaten Aceh Barat masih relatif lebih rendah daripada Provinsi Aceh Barat. Hal krusial lainnya adalah adanya disparitas pencapaian IPM antar kecamatan yang masih cukup tinggi.

Adapun dari sisi permintaan, yaitu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada beberapa tahun terakhir terpusat pada sektor pertanian dan pertambangan. Ada kecenderungan peningkatan pekerja pertambangan seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan.

Rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu akar permasalahan yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil, telah mengakibatkan rendahnya angka partisipasi sekolah dan minimnya kemampuan literasi. Sebagaimana diketahui bahwa nilai indeks literasi di kabupaten aceh barat pada tahun 2023 adalah 45,52 termasuk kategori rendah. Situasi ini tidak hanya membatasi peluang kerja yang layak bagi penduduk, tetapi juga menurunkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, masalah rendahnya kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat mencerminkan kurangnya pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan teknis dan keahlian khusus, sehingga sulit bersaing di pasar kerja yang semakin kompleks. Ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyerapan tenaga kerja dan menurunkan produktivitas ekonomi daerah. Meningkatkan program pelatihan vokasional dan akses terhadap pendidikan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

Masalah kurangnya informasi tentang peluang kerja dari luar daerah membuat masyarakat Aceh Barat terisolasi dari peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Banyak warga yang tidak mengetahui adanya pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka di daerah lain, baik di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Hal ini mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan setengah menganggur di wilayah ini. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dikembangkan sistem informasi pasar kerja yang efektif dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.

Selanjutnya, masalah rendahnya jiwa *entrepreneurship* di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Barat juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru. Masyarakat cenderung mengandalkan sektor-sektor tradisional dan kurang tertarik atau tidak memiliki akses terhadap modal dan pelatihan yang diperlukan untuk memulai usaha sendiri. Ini menyebabkan kurangnya diversifikasi ekonomi dan membuat daerah ini

rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Program pengembangan kewirausahaan yang komprehensif dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi sangat penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun dari sisi permintaan, yaitu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada beberapa tahun terakhir terpusat pada sektor pertanian dan pertambangan. Ada kecenderungan peningkatan pekerja pertambangan seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan. Namun, penyerapan tenaga kerja ini dalam jangka menengah tidak bisa dilihat dari sisi sektor eksisting semata, tetapi juga faktor lainnya seperti investasi dan peran sektor swasta.

2. Aspek Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Salah satu indikasi penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Barat adalah terkonversinya lahan sawah dan hutan. Selain disebabkan oleh perkembangan lahan terbangun seperti permukiman, fasilitas publik, dan perdagangan, sebagian besar areal sawah produktif di Kabupaten Aceh Barat mengalami alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya. Perkebunan secara khusus merupakan guna lahan yang mengalami kenaikan luas paling signifikan selama 10 tahun terakhir.

Konversi lahan juga sering berdampak buruk terhadap kawasan-kawasan tangkapan air dan kelestarian sumber daya air, termasuk dalam hal ini hutan sekunder, yaitu guna lahan yang juga mengalami penurunan luas dalam 1 dekade terakhir. Ketersediaan air yang terganggu akan turut mengganggu proses produksi tanaman pangan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketika kondisi seperti ini terus terjadi, maka keberlanjutan ketahanan pangan akan terancam. Dengan kondisi yang ada, tentu hal ini membuat program ‘GAMPANG’ (Gerakan Mandiri Pangan) menjadi lebih sulit untuk tercapai.

Aspek ketahanan pangan mengalami tekanan tidak hanya karena konversi penggunaan lahan, tetapi juga belum berfungsinya irigasi akibat proses pembangunan yang belum rampung, seperti yang terjadi di areal sawah di Lhok Guci. Pendanaan Lhok Guci dilanjutkan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dikerjakan tahap I pada 2015-2018. Setelah itu masuk tahap II 2017-2020, namun pada 2020 ada Pandemi Covid-19 dan terkena *refocusing* anggaran sehingga target penyelesaian mundur ke tahun 2022 hingga sekarang.

Seperti telah disampaikan, perkembangan sektor pertambangan, khususnya batu bara, di Kabupaten Aceh Barat telah mendongkrak kinerja PDRB dalam 5 tahun terakhir. Jenis pertambangan ini banyak yang diusahakan secara bebas, tanpa melalui perizinan atau disebut dengan PETI (Pertambangan Tanpa Izin). PETI perlu untuk terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Barat, mengingat angka pertumbuhannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Selain mendorong terjadinya konversi lahan, aktivitas penambangan batu bara, khususnya PETI, secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batu bara tersebut, yang memisahkan batu bara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai, sehingga warna air menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batu bara tersebut. Dampak yang ditimbulkannya antara lain kematian beberapa spesies ikan yang ada di sungai dan matinya

tanaman padi petani yang terendam banjir di kawasan konsesi tambang, seperti di Desa Balee Kecamatan Meureubo. Jenis kerusakan lingkungan hidup lainnya yang ditimbulkan adalah polusi udara, yaitu berupa debu, yang menerpa rumah-rumah warga setempat. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan akibat debu pada masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Kerusakan lingkungan PETI perlu lebih diperhatikan karena pengelolaan tambangnya dilakukan secara acak dan tidak terukur serta tidak ada tanggung jawab terhadap pengelolaan limbahnya.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga ditambah dengan angka persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tambang dalam bentuk izin lingkungan di Aceh Barat masih tergolong rendah (di bawah 50%). Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kondisi/kualitas lingkungan hidup juga masih rendah, hal ini dapat terlihat dari kasus pengaduan masyarakat terkait usaha tambang yang tidak memiliki izin masih sedikit (<10 pengaduan dalam setahun). Angka pengaduan ini berimplikasi terhadap banyaknya angka penindakan/penegakan hukum yang dilakukan. Bersamaan dengan hal tersebut, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Barat belum optimal; bahkan cenderung banyak masyarakat yang mengabaikannya. Hal ini dapat terjelaskan dari data di atas, yaitu peningkatan persentase PETI dari tahun ke tahun dan sedikitnya jumlah aduan masyarakat terhadap kasus usaha penambangan tanpa izin.

Relasi aspek lingkungan hidup dan manusia juga memunculkan ancaman terhadap bencana. Banjir periodik sering terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Aceh Barat dikarenakan badan sungai atau saluran drainase sudah tidak mampu menampung volume air yang jatuh di permukaan tanah. Selain itu, ulah manusia seperti alih fungsi lahan, pembuangan sampah di sungai, penggundulan hutan pada daerah hulu secara berlebihan, dan pemanfaatan lahan pada daerah hulu yang tidak sesuai kaidah konservasi lahan telah mendorong menurunnya fungsi alam dalam menangkap dan menyimpan air.

Beberapa wilayah yang menjadi langganan banjir meliputi Kecamatan Woyla Timur meliputi Desa Blang Dalam, Desa Alue Kuyun, Desa Blang Makmu, Desa Alue Meganda, Desa Blang Luah, Desa Rambong Pinto. Kecamatan Woyla Barat meliputi Desa Napai, Desa Cot lLgan LM, Desa Cot Rambong, Desa Alue Leuhob, Desa Blang Cot Mameh, Desa Blang Cot Rubeh, Desa Leubok Pasi Ara, Desa Lhok Malee, Desa Ulee Pasi Ara, Desa Blang Luah, Desa Peulekung. Kecamatan Arongan Lambalek meliputi Desa Gunung Pulo, Desa Peuribu, Desa ataupun Peuraho, Desa Keub, jalan menuju Desa Karang Hampa dan Desa Cot Kumbang. Selain itu, terdapat Desa Cot Amun di Kecamatan Samatiga, Desa Mugo di Kecamatan Panton Reue, Desa Seumantok dan Desa Keutambang di Kecamatan Pante Ceureumen, Desa Layung di Kecamatan Bubon, Desa Pasi Masjid di Kecamatan Meureubo dan Desa Leuhan dan Blang Beurandang di Kecamatan Johan Pahlawan.

Selain banjir, potensi bencana geologi berupa gempa bumi merupakan potensi kebencanaan yang relatif sama tingginya dengan daerah lain di sepanjang Patahan Semangko yang membentang di seluruh wilayah pantai barat Aceh. Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat. Potensi bencana lain yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat yaitu potensi bencana tsunami, umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai barat yang berjarak 1 km dari bibir pantai. Daerah yang memiliki risiko dampak parah yaitu pada

perkotaan Meulaboh, yang 20 tahun lalu pernah mempunyai pengalaman nyata terkait. Potensi bencana alam yang lain adalah abrasi pantai dan longsor.

Aspek kebijakan penting terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup adalah terkait rencana tata ruang, khususnya belum optimalnya implementasi RTRW dan RDTR di Kabupaten Aceh Barat. Belum optimalnya implementasi ini didominasi oleh pemanfaatan ruang dan alokasi ruang permukiman di luar peruntukannya. Terdapat indikasi ruang dengan fungsi lindung dimanfaatkan untuk kawasan terbangun dalam RTRW Kabupaten Aceh Barat, termasuk bangunan liar di sempadan sungai.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sisi ekonomi dan sosial budaya. Salah satu indikator penting terkait kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi adalah kemiskinan. Meskipun mengalami tren menurun secara perlahan, tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Barat tetap berkisar di angka 17-18%, jauh lebih tinggi dari provinsi (14-15%) dan nasional (9%). Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh barat disebabkan oleh beragam sumber, termasuk struktural, seperti kesenjangan tingkat pendidikan dan kualitas SDM, kesenjangan ekonomi dan upah minimum yang belum memadai, banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, kurangnya bantuan modal dan stimulus usaha bagi masyarakat miskin, kurangnya pelatihan untuk pengembangan keterampilan, motivasi pribadi yang masih rendah, ketidakstabilan politik, dan faktor-faktor struktural lainnya.

Sebagai sektor di mana banyak penduduk Kabupaten Aceh Barat bekerja, sektor pertanian juga belum mampu memberikan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana NTP cenderung fluktuatif jika dibandingkan dengan tren provinsi dan nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor alam (seperti cuaca dan perubahan iklim) maupun non-alam (seperti keterbatasan infrastruktur, peningkatan harga komoditas, efisiensi dalam produksi, dan lainnya).

Selain itu, masalah rendahnya penguasaan lahan oleh masyarakat di Aceh Barat berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan sosial. Banyaknya lahan yang dikuasai oleh perusahaan besar dan individu dengan modal besar menyebabkan masyarakat lokal kesulitan mendapatkan lahan untuk pertanian dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan terbatasnya sumber daya bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka, yang pada gilirannya memperparah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Upaya redistribusi lahan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola lahan secara produktif harus menjadi fokus kebijakan daerah.

Kesejahteraan tentu perlu dilihat juga dari sisi pemerataannya. Dari sisi ini, terutama jika merujuk pada indeks Gini, tren nilai di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan, artinya semakin merata. Namun, perlu dicatat bahwa pemerataan dalam hal ini berada pada level kesejahteraan agregat yang masih rendah. Secara umum jika dilihat dari sisi pengeluaran riil per kapita, nilai Kabupaten Aceh Barat hampir sama dengan Provinsi Aceh, namun masih jauh dibawah level nasional. Hal ini semakin mengindikasikan aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat secara agregat yang masih rendah.

Aspek kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat sejauh mana kesempatan kerja dapat menampung masyarakat usia produktif. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Barat cenderung mempunyai tren yang menurun selama 5 tahun terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, nilainya relatif masih lebih tinggi. Tentu hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten ini masih belum secara optimal menciptakan kesempatan pekerjaan untuk semua penduduk usia produktifnya.

Dari sisi kesejahteraan sosial budaya, aspek pembangunan berbasis gender di Aceh Barat masih belum menunjukkan nilai yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan gender yang terus menurun selama 5 tahun terakhir serta nilai indeks pemberdayaan gender yang relatif jauh di bawah provinsi dan nasional. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagaimana pembangunan ke depan dapat memberikan peluang yang sama bagi semua penduduk untuk terlibat di dalamnya.

Dari akses terhadap kesehatan dan pendidikan, Kabupaten Aceh Barat sesungguhnya menunjukkan tren yang positif. Sebagai contoh, meski usia harapan hidupnya masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional, namun menunjukkan tren yang positif. Adapun dari sisi pendidikan, Kabupaten Aceh Barat memiliki nilai rata-rata lama sekolah di atas provinsi dan nasional dengan tren yang selalu meningkat.

Namun, kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat masih belum merata, dengan perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di beberapa daerah terpencil, masyarakat sulit mengakses layanan kesehatan yang memadai, baik karena jarak yang jauh maupun keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan yang setara.

Selanjutnya, sarana dan prasarana kesehatan di Aceh Barat belum optimal, dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang masih kekurangan peralatan medis dan infrastruktur yang memadai. Beberapa puskesmas dan rumah sakit mengalami keterbatasan alat-alat diagnostik dan perawatan, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Selain itu, keterbatasan transportasi dan infrastruktur jalan menuju fasilitas kesehatan menambah kesulitan akses, terutama di daerah pedalaman. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan perlu menjadi prioritas untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Selain itu, Aceh Barat menghadapi tantangan besar dalam hal terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga medis serta tenaga kesehatan. Banyak fasilitas kesehatan di daerah ini yang kekurangan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, terutama di wilayah terpencil. Hal ini mengakibatkan pelayanan kesehatan yang diberikan tidak optimal dan sering kali menimbulkan penundaan dalam penanganan kasus-kasus darurat. Perlu adanya kebijakan yang lebih proaktif dalam menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan yang kompeten di wilayah ini, termasuk dengan memberikan insentif yang sesuai.

Masalah terbatasnya jumlah guru berkualitas di Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu hambatan utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan, yang tidak memiliki guru dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pengajaran dan hasil belajar

siswa, sehingga memperburuk kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Upaya peningkatan kualifikasi dan pelatihan bagi guru serta distribusi guru yang lebih merata sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Aceh Barat.

Selanjutnya, sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Aceh Barat yang belum optimal, dengan banyak sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Beberapa sekolah bahkan tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, sehingga menghambat proses belajar mengajar. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pendidikan tetapi juga motivasi belajar siswa. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan perlu diprioritaskan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung peningkatan prestasi siswa.

Selain itu, lingkungan masyarakat di beberapa bagian Aceh Barat belum sepenuhnya mendukung tumbuhnya iklim pendidikan yang kompetitif. Faktor budaya, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan keterbatasan akses informasi menghambat upaya untuk mendorong anak-anak melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, termasuk melalui program penyuluhan dan pemberdayaan komunitas.

Masalah tingginya biaya untuk mengakses pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu penghalang utama bagi banyak keluarga di Aceh Barat. Biaya yang tinggi, baik untuk uang sekolah, buku, seragam, maupun transportasi, membuat banyak keluarga miskin tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang lebih baik. Akibatnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali harus puas dengan pendidikan yang berkualitas rendah, yang pada gilirannya memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan. Kebijakan subsidi pendidikan dan peningkatan akses terhadap beasiswa perlu ditingkatkan untuk memastikan semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Selain itu, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah di Aceh Barat belum memberikan hasil yang optimal, terlihat dari tingginya angka kemiskinan yang masih jauh di atas rata-rata provinsi dan nasional. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya koordinasi antarinstansi dan tidak tepatnya sasaran program yang dijalankan. Banyak program yang berjalan secara parsial tanpa memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga tidak mampu mengatasi akar permasalahan kemiskinan secara menyeluruh. Diperlukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap pendekatan yang digunakan, dengan fokus pada integrasi program dan pemetaan kebutuhan yang lebih akurat.

Selanjutnya masalah miskonsepsi tentang kemiskinan di kalangan masyarakat Aceh Barat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Banyak masyarakat yang memandang kemiskinan sebagai nasib atau bagian dari budaya, sehingga kurang memiliki inisiatif untuk keluar dari kondisi tersebut. Selain itu, persepsi yang salah mengenai bantuan sosial sebagai hak tetap, tanpa usaha untuk mandiri, memperburuk keadaan. Penting untuk mengubah mindset masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan, serta

mendorong semangat kemandirian dan kerja keras untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Salah satu pilar yang menentukan keberhasilan proses pembangunan kesejahteraan sosial budaya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat di Aceh Barat masih tergolong rendah terutama pada nilai indikator indeks kesetaraan gender yang masih jauh dibawah rata-rata nasional dan Provinsi Aceh. Tren fluktuatif dalam nilai indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perubahan kondisi ekonomi lokal yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan akses terhadap pekerjaan formal. Kedua, adanya ketimpangan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang dapat mempengaruhi kemampuan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan politik. Ketiga, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan mengatasi hambatan struktural yang menghambat partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah lebih melihat aspek ekonomi secara agregat kewilayahan. Aspek ini sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait dengan sejauh mana peningkatan daya saing daerah dapat mendorong kesejahteraan masyarakat (daya saing yang inklusif).

Selama 5 tahun terakhir, ekonomi Kabupaten Aceh Barat mengalami pertumbuhan. Namun pertumbuhan ekonomi ini selama 5 tahun terakhir cenderung lebih rendah dari provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat terutama didorong oleh sektor pertambangan. Pada tahun 2023, sektor pertambangan ini merupakan sektor unggulan di Kabupaten Aceh Barat. Selain dari kontribusi PDRB-nya yang terbesar, sektor pertambangan Kabupaten Aceh Barat juga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di level provinsi. Namun, dalam konteks kewenangan, pemerintah kabupaten tidak mempunyai kuasa penuh akan pengelolaan sektor ini. Seperti telah disampaikan sebelumnya, implikasi lingkungan hidup dari sektor ini juga memerlukan perhatian.

Pertanian secara tradisional menjadi sektor ekonomi penting di Kabupaten Aceh Barat, baik dari sisi kontribusi dalam PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Namun, pada skala provinsi, sektor ini bukan merupakan unggulan. Ini menunjukkan perlu pembenahan di berbagai aspek untuk menjadikan pertanian Kabupaten Aceh Barat lebih mempunyai daya saing dan mampu memberikan nilai tambah lebih.

Selain sisi fundamental, sektor pertanian yang belum terintegrasi pada industri pengolahan menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan SDA dan lahan serta tidak berkembangnya hilirisasi pertanian. Hal ini disebabkan kebijakan dan program pemanfaatan SDA belum menjadi prioritas pembangunan. Selain itu, belum optimalnya penerapan inovasi dan teknologi pengolahan disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sumber daya alam di kalangan petani/peternak/nelayan.

Satu hal penting terkait dengan potensi pertanian adalah luas lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat yang mencapai 50.262 Ha. Lahan gambut ini utamanya tersebar di wilayah

pesisir pantai. Namun, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian membutuhkan syarat pengelolaan lahan yang tidak sederhana. Tipikal gambut di wilayah pesisir dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lahan tersebut berpotensi terdapat lapisan pirit yang bila teroksidasi ber-pH sangat masam (< 3) yang bersifat *toxic* bagi tanaman budidaya. Untuk menjaga agar lapisan pirit tersebut tidak teroksidasi, maka dibutuhkan sistem pengelolaan tata air melalui sistem irigasi teknis. Pembangunan infrastruktur pengairan dan drainase pada lahan gambut membutuhkan teknologi dan investasi yang tinggi.

Secara produktivitas ekonomi, yaitu efisiensi penggunaan semua input produksi dalam suatu daerah, Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan gradual sejak tahun 2020 setelah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 karena hantaman pandemi COVID-19. Namun kondisi produktivitas ini belum sepenuhnya pulih di tingkat sebelum pandemi.

Salah sumber daya utama yang mendorong peningkatan daya saing daerah adalah keberadaan dan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi ini, ada beberapa gambaran positif yang dapat menjadi potensi. Kabupaten Aceh Barat sedang dan akan mengalami bonus demografi untuk 5 tahun ke depan dengan rasio ketergantungan yang semakin menurun. Seperti telah disampaikan sebelumnya, rata-rata lama sekolah Kabupaten Aceh Barat cukup baik, dan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi. Dari sisi kualitas PNS, dapat dilihat juga bahwa rasio lulus S1/S2/S3 cenderung berada di angka 120, antara cenderung dominan.

Namun, dukungan kualitas sumber daya buatan (yaitu infrastruktur dan teknologi) tampak masih menjadi faktor penghambat bagi peningkatan daya saing daerah. Misal, kondisi jalan rusak masih cukup tinggi, sekitar 40% dari panjang jalan total. Dari sisi mobilitas, dampak pandemi COVID-19 masih terasa hingga saat ini. Hal ini bisa diamati dari jumlah orang dan barang yang melalui dermaga/bandara/terminal yang belum mencapai level sebelum pandemi.

Selain itu, infrastruktur yang mendukung perekonomian di Kabupaten Aceh Barat masih belum optimal, yang menghambat perkembangan ekonomi daerah. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas logistik menyebabkan distribusi barang dan jasa menjadi tidak efisien, sehingga meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha. Selain itu, minimnya infrastruktur teknologi informasi menghambat akses ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kemitraan antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat masih rendah. Kolaborasi yang kurang optimal ini berdampak pada efektivitas program pembangunan yang dijalankan. Banyak program yang tidak mencapai sasaran secara maksimal karena kurangnya koordinasi dan sinergi antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan, diperlukan upaya untuk memperkuat kemitraan dengan seluruh pihak, termasuk dengan lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, guna memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Selanjutnya partisipasi perusahaan swasta dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat masih rendah. Peran serta sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian, dan menyediakan layanan publik yang berkualitas. Namun, minimnya keterlibatan perusahaan dalam program-program pembangunan daerah menyebabkan stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran. Diperlukan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif perusahaan swasta, termasuk melalui insentif investasi dan penciptaan iklim bisnis yang kondusif.

Selanjutnya, masalah rendahnya tingkat investasi di Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu penghalang utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai faktor seperti kurangnya infrastruktur, birokrasi yang kompleks, serta persepsi risiko yang tinggi membuat investor enggan menanamkan modalnya di daerah ini. Akibatnya, potensi ekonomi yang dimiliki oleh Aceh Barat, terutama di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan tidak dapat dioptimalkan. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang lebih menarik dan memberikan kepastian hukum bagi investor, serta memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik untuk meningkatkan daya tarik investasi di Aceh Barat.

5. Aspek Pelayanan Umum

1) Capaian Layanan

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah pemberian beragam layanan kepada publik. Dalam hal ini, terdapat tantangan yang dihadapi dalam menangani dan mengantisipasi permasalahan eksisting dan kemungkinan terjadi, terkait urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pelayanan pilihan dan urusan penunjang.

Tantangan yang dihadapi dalam menangani dan mengantisipasi permasalahan yang eksis dan kemungkinan terjadi, terkait urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pelayanan pilihan dan urusan penunjang.

Pemerintah (pusat, provinsi dan daerah) telah meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Aceh Barat. Namun masih perlu peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik, menurunkan prevalansi *stunting*, peningkatan mutu pendidikan dan kualitas SDM, dan kompetensi tenaga kerja. Sehingga perlu meningkatkan dan menciptakan kesempatan kerja, penumbuhan ekonomi alternatif, dan perbaikan lingkungan hidup secara umum dan khusus (sanitasi, pemukiman dan persampahan). Urusan wajib yang masih perlu dioptimalkan dan memiliki keterkaitan dan dampak lebih luas di antara penataan kawasan rawan bencana, perencanaan dan penggunaan lahan yang perlu memenuhi semua kriteria, baik sosial, ekonomi dan lingkungan, dan pencapaian RTH yang masih di bawah standar.

Pelayanan non dasar yang menjadi perhatian khusus terkait ketersediaan pangan yang semakin menurun bersamaan dengan tingginya alih fungsi lahan dan masih rendahnya diversifikasi pangan sehingga berdampak pada risiko tingginya inflasi dan akses pada pangan dengan harga terjangkau. Sementara itu tantangan persampahan masih perlu dimaksimalkan pada aspek ketersediaan sarana prasarana penanganan di tingkat rumah

tangga dan pemukiman dan aspek kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendorong pembinaan Koperasi dan UMKM dengan dukungan pihak perbankan, perusahaan, perguruan tinggi dan pendanaan alternatif, sehingga mengatasi permasalahan secara paralel pada aspek pengembangan potensi desa, kesempatan kerja alternatif, penumbuhan wirausaha pemuda dan perempuan, optimalisasi sumber daya pangan dan industri pengolahan, pengembangan pasar luar daerah, akses pada kemitraan dan permodalan alternatif dan penanaman modal daerah. Pengembangan wisata syariah perlu dikaji mendalam yang berbasis pada aset *tangible* dan *intangible* keislaman dan keistimewaan Aceh dan diarahkan pada orientasi pengembangan ekonomi kreatif.

Pemerintah (pusat, provinsi dan daerah) perlu mengatasi permasalahan terkait belum optimalnya pengelolaan sumber daya pertanian dan perikanan kelautan serta aspek lingkungan terkait, pengembangan industri pengolahan dan perluasan akses pasar dan kelembagaan pemasaran produk olahan dan kreatif asal Kabupaten Aceh Barat. Permasalahan yang ada diharapkan dapat mengatasi risiko inflasi daerah dan salah satu solusi menurunkan angka kemiskinan daerah. Pengelolaan sumber daya bagi produksi pangan dan industri pengolahan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan industri pengolahan yang berorientasi nilai tambah dan berbasis klasterisasi. Pengembangan pasar dan kelembagaan pemasaran melibatkan pendampingan (Koperasi dan UMKM, dan pasar tradisional) dan akses pada pembiayaan dan pada pasar ekspor.

Pemerintah daerah masih perlu memperhatikan kinerja pelayanan umum di tingkat kecamatan dan gampong dengan memperhatikan kapabilitas aparat pemerintah dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah melalui mekanisme keterlibatan yang proaktif dan penggunaan teknologi informasi yang *reliable access.*

2) Tata Kelola

Belum optimalnya layanan yang diberikan seperti yang diulas di atas, sangat erat kaitannya dengan kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat. Ada sejumlah tantangan tata kelola yang menghambat efektivitas pembangunan daerah. Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, berbagai permasalahan struktural dan manajerial masih belum sepenuhnya teratasi. Salah satu indikatornya adalah rendahnya tingkat pencapaian target pembangunan, yang mencerminkan belum optimalnya koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan di daerah tersebut.

Inovasi daerah telah diidentifikasi sebagai solusi utama untuk mengatasi kendala ini, namun implementasinya masih jauh dari memadai. Kabupaten Aceh Barat menekankan pentingnya inovasi untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap teknologi, dan minimnya kolaborasi antar pihak terkait menjadi penghambat utama dalam penerapan inovasi tersebut.

Selain itu, birokrasi yang masih bersifat kaku dan kurang responsif terhadap perubahan juga menjadi salah satu faktor penghambat. Proses pengambilan keputusan yang lambat serta kurangnya adaptasi terhadap teknologi modern sering kali menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Akibatnya, masyarakat belum

sepenuhnya merasakan manfaat dari berbagai kebijakan dan program yang telah direncanakan.

Di sisi lain, kurangnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan kebijakan juga berkontribusi terhadap rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan. Partisipasi publik yang minim membuat kebijakan yang diambil kurang mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini mengakibatkan berbagai program pembangunan tidak berjalan sesuai dengan harapan dan sering kali tidak tepat sasaran. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak terkait, terutama dalam mendorong inovasi dan kolaborasi. Dengan memanfaatkan teknologi dan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kabupaten Aceh Barat dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

6. Aspek Keuangan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah terkait aspek keuangan di Kabupaten Aceh Barat menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih jauh di bawah rata-rata provinsi Aceh dan standar minimal yang diharapkan. Berdasarkan data APBD Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 sampai dengan 2023, Rata-rata PAD hanya sebesar Rp.149.774.200.253,54 atau sekitar 11,09% dari total pendapatan. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pusat. Berdasarkan data APBD Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 sampai dengan 2023, Rata-rata pendapatan transfer mencapai Rp.1.181.375.919.287,40 atau sekitar 87,48% dari total pendapatan. Berdasarkan peraturan menteri keuangan tentang peta kapasitas fiskal daerah, Pada tahun 2022, Kabupaten Aceh Barat berada dalam kategori kemandirian fiskal yang rendah dengan nilai rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebesar 1.294. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kebutuhan fiskalnya masih sangat terbatas, sehingga masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2023, di mana nilai rasio KFD menurun drastis menjadi 0.872, yang masuk dalam kategori sangat rendah. Penurunan ini mencerminkan peningkatan ketergantungan fiskal Kabupaten Aceh Barat terhadap bantuan eksternal, dan menandakan bahwa upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah belum optimal.

Beberapa penyebab utama rendahnya PAD di Aceh Barat antara lain adalah kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi lokal. Sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perikanan, dan perkebunan belum tergarap optimal untuk mendongkrak PAD. Sebagai contoh, rata-rata pendapatan dari retribusi daerah selama lima tahun terakhir hanya menyumbang Rp.6.829.056.091,97, yang menunjukkan lemahnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal. Selain itu, sistem administrasi pajak dan retribusi yang belum efektif serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi faktor penyebab rendahnya PAD. Infrastruktur yang masih terbatas dan kurangnya investasi di sektor-sektor strategis turut menghambat peningkatan PAD. Rendahnya PAD ini mengakibatkan keterbatasan dalam pembiayaan program-program pembangunan daerah, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas layanan publik dan infrastruktur, serta menghambat upaya untuk mencapai target pembangunan yang lebih tinggi dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat.

7. Aspek Kekhususan Aceh

Isu kekhususan Aceh merujuk kepada keistimewaan Provinsi Aceh (UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bahwa Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa lndonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual. moral, dan kemanusiaan. Penyelenggaraan keistimewaan meliputi (1) penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) penyelenggaraan kehidupan adat, (3) penyelenggaraan pendidikan, dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Keistimewaan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat dan Provinsi Aceh dapat mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Sebagai tambahan, Provinsi Aceh dapat menetapkan berbagai kebijakan dalarn upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam, dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman, dan kelurahan/desa atau gampong.

Provinsi Aceh menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional, mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam, dan mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Provinsi Aceh dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama, dimana badan tersebut bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Namun, selama 25 tahun sejak diberlakukannya keistimewaan Aceh masih belum optimal. Pemerintah Aceh mengidentifikasi beberapa faktor ketidakoptimalan tersebut, antara lain, belum optimalnya kesepakatan politik yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh. Ketidaksepakatan politik atau konflik kepentingan antara kedua belah pihak dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan stagnasi, sumber daya manusia yang memadai, keuangan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kurangnya sumber daya dan kapasitas di tingkat pemerintah daerah Aceh dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keistimewaan. Ketidakjelasan dalam regulasi dan kebijakan terkait dengan keistimewaan Aceh dapat mempersulit implementasi. Kurangnya panduan yang jelas dan konsisten dari pemerintah pusat mengenai otonomi khusus Aceh dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat lokal. Implementasi Keistimewaan Aceh mungkin menghadapi resistensi atau penolakan dari pihak-pihak eksternal, termasuk kelompok-kelompok kepentingan di luar Aceh. Faktor-faktor ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan tertentu yang diusulkan atau dijalankan oleh pemerintah Aceh. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk di tingkat lokal dapat menghambat implementasi kebijakan dan program-program yang terkait dengan keistimewaan Aceh. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemborosan anggaran. Beberapa kebijakan atau program yang terkait dengan

keistimewaan Aceh mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Ketidaksesuaian ini dapat mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi, sehingga menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan (Rancangan Akhir RPJP Aceh 2025 – 2045).

Pelaksanaan kekhususan Aceh belum berjalan optimal di level Kabupaten Aceh Barat. Hal ini terkait masih adanya masalah di level pelaksana seperti peran tokoh agama dan masyarakat serta sistem dan tata kelola, seperti dalam pengelolaan ZIS maupun upaya untuk mendorong perkembangan nilai dan budaya lokal seperti melalui *event*. Di level masyarakat sendiri, menurunnya minat generasi muda terhadap budaya Aceh dan masuknya pengaruh budaya luar turut serta dalam mempengaruhi implementasi dari kekhususan Aceh.

2. Isu Strategis Daerah

Isu dapat diartikan sebagai pertanyaan yang belum terselesaikan dan membutuhkan keputusan atau klarifikasi di masa depan. Adapun strategis dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki dampak besar. Dengan demikian, isu strategis dalam konteks Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Aceh Barat 2025-2029 adalah keadaan atau kondisi yang perlu mendapatkan perhatian secara fundamental atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah, khususnya di jangka menengah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Aceh Barat dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah seperti yang telah dibahas di bagian atas, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan, yang meliputi aspek fisik dan lingkungan, sosial dan budaya, ekonomi dan keuangan, serta kelembagaan dan legal. Isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Aceh Barat 2025-2029 menjadi landasan awal dalam rangka pencapaian bagi visi dan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang telah tersusun dalam RPJPD Kabupaten Aceh Barat 2025-2045.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber di level yang berbeda, antara lain: (1) isu strategis dinamika global, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Aceh Barat, (2) Isu strategis dari Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, (3) Isu strategis dari Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Aceh 2025-2029, (4) Isu strategis dari Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Aceh Barat 2025-2045, (5) isu strategis dari KLHS RPJMD Kabupaten Aceh Barat, serta (6) Isu strategis yang bersumber dari analisis fisik dan lingkungan, sosial dan budaya, ekonomi dan keuangan, serta kelembagaan dan legal saat ini serta kemungkinan di masa mendatang yang disintesiskan di Bab 2 dokumen ini. Proses sintesis isu strategis ditampilkan pada Gambar 2.110 berikut ini.

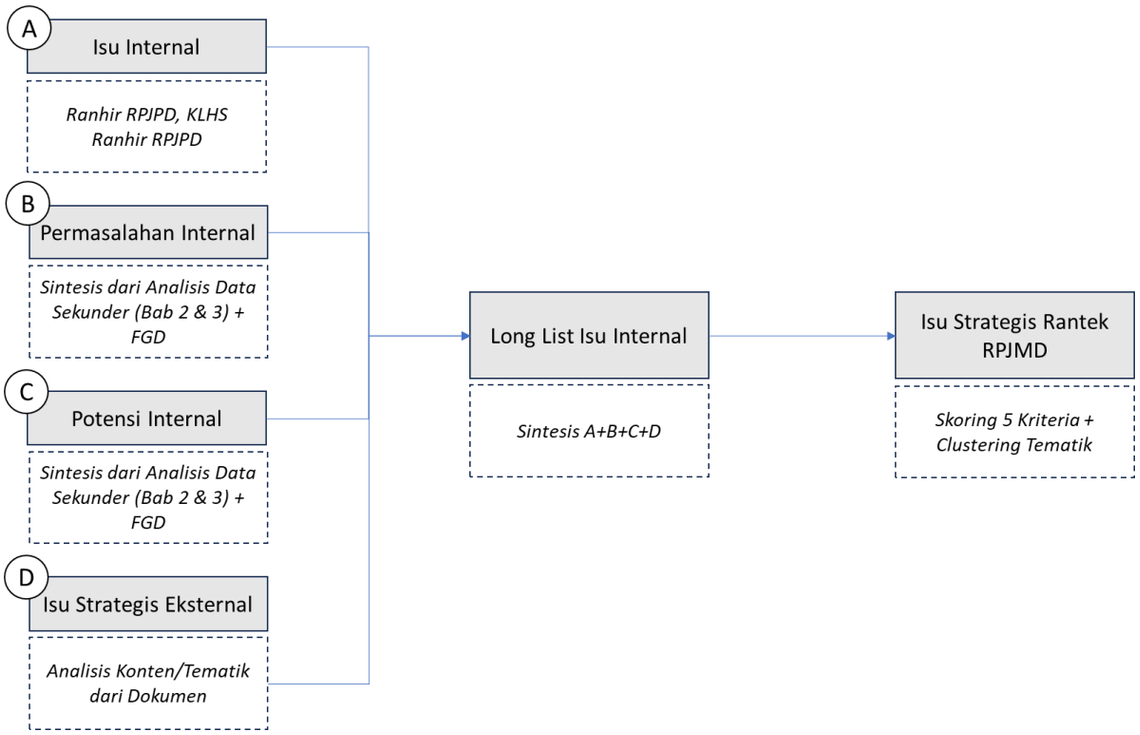

Gambar 2.106
Proses Sintesis Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihasilkan dari analisis skoring ini akan menjadi titik berangkat perumusan arah kebijakan prioritas. Skoring ini dilakukan berdasarkan 5 kriteria, yaitu :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki keterkaitan lintas sektor
5. Memiliki keterkaitan lintas wilayah (antar kecamatan)

Skoring ini mempunyai nilai dari 1 (terendah) hingga 5 (tertinggi). Isu-isu yang diidentifikasi sebagai strategis adalah yang memiliki nilai total minimal 20. Perhitungan nilai (oleh 5 kelompok penilai terpilih) dan analisis secara keseluruhan dari isu-isu yang telah diidentifikasi ditampilkan pada Tabel 2.131 berikut ini.

Tabel 2.131 *Long List* dan Skoring Isu Internal

No	Potensi	*Long List* Isu/ Permasalahan/ Potensi	Sumber Referensi					Keterkaitan dengan isu global/ nasional/	Kriteria Penilaian (Rata-rata Nilai)					Nilai Total
			Telaah Dokumen (RPJP, RPJM, KLHS, dst)	Data Sekunder (bab 2 dan 3)	Hasil Kajian	FGD	Lainnya		Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	Memiliki keterkaitan lintas sektor	Memiliki keterkaitan lintas wilayah (antar kecamatan)	
A.	**Aspek Ekonomi**													
1	Potensi pengeboran minyak lepas Pantai	Pertumbuhan sektor *rill* belum optimal	√	√	√			Global: Disrupsi rantai pasok global dan tren global economic decoupling Nasional: - Provinsi: -	4	4	4	4	3	**19**
2		Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB semakin menurun	√	√	√			Global: - Nasional: - Provinsi -	5	5	5	4	4	**23**
3		Belum optimalnya hilirisasi/agroindustri pertanian	√	√		√		Global: - Nasional: Deindustrialisasi dan daya saing industri di tingkat global yang rendah (teknologi, tenaga kerja) Provinsi: Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah	4.8	4.8	4.8	3.8	3	**21.2**
4		Belum adanya pusat/kawasan pembangunan yang berbasis potensi unggulan	√	√	√	√		Global: - Nasional: Deindustrialisasi dan daya saing industri di tingkat global yang rendah (teknologi, tenaga kerja) Provinsi: Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan	4	4	4	4	3	**19**

No	Potensi	*Long List* Isu/ Permasalahan/ Potensi	Sumber Referensi					Keterkaitan dengan isu global/ nasional/	Kriteria Penilaian (Rata-rata Nilai)					Nilai Total
			Telaah Dokumen (RPJP, RPJM, KLHS, dst)	Data Sekunder (bab 2 dan 3)	Hasil Kajian	FGD	Lainnya		Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	Memiliki keterkaitan lintas sektor	Memiliki keterkaitan lintas wilayah (antar kecamatan)	
								daerah						
5		Masih tingginya lahan terlantar	√	√	√			Global: - Nasional: Rendahnya daya saing pertanian (nilai tambah, produktivitas, teknologi, aging farmer, degradasi kualitas lahan) Provinsi: -	5	5	4	4	4	**22**
6		Masih rendahnya capaian pembangunan irigasi Lhok Guci	√	√	√	√		Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	4	4	3	3	**18**
7		Produktivitas padi masih di bawah rata-rata nasional	√	√	√			Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	5	5	4	4	**23**
8		Belum optimalnya pemenuhan kebun plasma (capaian 7,08%)	√		√	√		Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	4	4	3	3	**18**
9		Belum optimalnya penggunaan teknologi digital penangkapan ikan (capaian 31,2%)	√	√	√	√		Global: - Nasional: Belum optimalnya pengembangan ekonomi biru dan pekerjaan hijau Provinsi: -	3	4	3	3	3	**16**
10		Belum optimalnya dampak kemanfaatan kegiatan	√	√	√	√	√	Global: - Nasional: -	4	3	4	3	3	**17**

No	Potensi	*Long List* Isu/ Permasalahan/ Potensi	Sumber Referensi					Keterkaitan dengan isu global/ nasional/	Kriteria Penilaian (Rata-rata Nilai)					Nilai Total
			Telaah Dokumen (RPJP, RPJM, KLHS, dst)	Data Sekunder (bab 2 dan 3)	Hasil Kajian	FGD	Lainnya		Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	Memiliki keterkaitan lintas sektor	Memiliki keterkaitan lintas wilayah (antar kecamatan)	
		pertambangan bagi masyarakat						Provinsi: -						
11		Rendahnya inovasi daerah	√	√		√		Global: - Nasional: Rendahnya kemampuan inovasi Provinsi: -	4	4	5	5	4	**22**
12		Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (10,86 %)	√	√				Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	5	4	5	4	**22**
13		Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM	√	√		√		Global: - Nasional: Terbatas pengembangan UMKM (kontribusi di sektor riil, pemanfaatan riset dan teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran, kewirausahaan) Provinsi: -	4	4	4	3	3	**18**
14		Terbatasnya kemampuan keuangan daerah (nilai IKF sebesar 0,936)	√	√	√			Global: - Nasional: Kekurangan pembiayaan, terutama di daerah dengan sumber daya keuangan terbatas Provinsi: -	4	4	4	3	3	**18**
15		Belum optimalnya alokasi belanja modal pada kegiatan yang memberikan daya ungkit	√	√				Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	5	4	3	3	**19**

No	Potensi	*Long List* Isu/ Permasalahan/ Potensi	Sumber Referensi					Keterkaitan dengan isu global/ nasional/	Kriteria Penilaian (Rata-rata Nilai)					Nilai Total
			Telaah Dokumen (RPJP, RPJM, KLHS, dst)	Data Sekunder (bab 2 dan 3)	Hasil Kajian	FGD	Lainnya		Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	Memiliki keterkaitan lintas sektor	Memiliki keterkaitan lintas wilayah (antar kecamatan)	
		ekonomi secara langsung												
16		Tingginya tingkat kemiskinan mencapai 17, 60 %	√					Global: - Nasional: Kemiskinan dan ketimpangan di Perkotaan-Perdesaan Provinsi: -	4	5	4	5	3	**21**
17		Investasi masih belum optimal	√			√		Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	5	5	4	3	**22**
18		Tingginya tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,58%	√	√	√			Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	5	5	5	5	**25**
19		Aktivitas perekonomian belum memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat	√	√	√			Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	5	5	5	4	**24**
20		Daya beli masyarakat rendah	√	√	√			Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	4	4	3	3	**18**
B	**Aspek Sosial**													
21		Belum optimalnya pelayanan kesehatan (Distribusi dokter yang tidak merata, masih	√	√	√			Global: - Nasional: -	5	5	5	3	3	**21**

No	Potensi	*Long List* Isu/ Permasalahan/ Potensi	Sumber Referensi					Keterkaitan dengan isu global/ nasional/	Kriteria Penilaian (Rata-rata Nilai)					Nilai Total
			Telaah Dokumen (RPJP, RPJM, KLHS, dst)	Data Sekunder (bab 2 dan 3)	Hasil Kajian	FGD	Lainnya		Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	Memiliki keterkaitan lintas sektor	Memiliki keterkaitan lintas wilayah (antar kecamatan)	
		banyak ambulan yang tidak layak, Alkes yang belum tersedia sesuai ketentuan)						Provinsi: Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar, terutama pendidikan dan Kesehatan						
22		Tingginya prevalensi stunting (20,5%)						Global: - Nasional: - Provinsi: -	1	1	1	0.6	0.6	**4.2**
23		Rapor pendidikan masih rendah (60,21)						Global: - Nasional: - Provinsi: -	1	1	1	0.8	0.6	**4.4**
24		Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah	√	√	√	√		Global: - Nasional: Dominasi angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah. Provinsi: Belum optimalnya kualitas SDM dengan tingkat pendidikan tenaga kerja didominasi pendidikan menengah ke bawah	5	5	5	4	3	**22**
25		Terbatasnya lapangan pekerjaan	√	√				Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	5	5	4	3	**22**
26		Rendahnya kompetensi tenaga	√	√				Global: -	5	5	5	4	3	**22**

No	Potensi	*Long List* Isu/ Permasalahan/ Potensi	Sumber Referensi					Keterkaitan dengan isu global/ nasional/	Kriteria Penilaian (Rata-rata Nilai)					Nilai Total
			Telaah Dokumen (RPJP, RPJM, KLHS, dst)	Data Sekunder (bab 2 dan 3)	Hasil Kajian	FGD	Lainnya		Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	Memiliki keterkaitan lintas sektor	Memiliki keterkaitan lintas wilayah (antar kecamatan)	
		kerja						Nasional: Ketidaksesuaian keahlian di pasar tenaga kerja Provinsi:						
27		Belum optimalnya budaya Aceh dan nilai-nilai Syariat Islam dalam transformasi sosial	√			√		Global: - Nasional: Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama Provinsi: -	4	5	4	4	4	**21**
C	**Aspek Ekologi**													
28		Menurunnya kualitas lingkungan hidup (Nilai IKLH 76,72)	√	√			√	Global: - Nasional: Tingginya tingkat deforestasi Provinsi: Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan	4	4	5	4	4	**21**
29		Indeks Resiko Bencana masih tinggi (Indeks Resiko Bencana 173,76)				√		Global: - Nasional: - Provinsi: -	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	**4**
30		Banjir wilayah perkotaan	√	√		√		Global: Perubahan iklim Nasional: Ancaman bencana dan	3	4	3	3	3	**21**

No	Potensi	*Long List* Isu/ Permasalahan/ Potensi	Sumber Referensi					Keterkaitan dengan isu global/ nasional/	Kriteria Penilaian (Rata-rata Nilai)					Nilai Total
			Telaah Dokumen (RPJP, RPJM, KLHS, dst)	Data Sekunder (bab 2 dan 3)	Hasil Kajian	FGD	Lainnya		Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	Memiliki keterkaitan lintas sektor	Memiliki keterkaitan lintas wilayah (antar kecamatan)	
								dampak perubahan iklim Provinsi: Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatera Provinsi: -						
31		Ketersediaan pangan lokal yang tidak stabil	√	√		√		Global: - Nasional: Belum idealnya kualitas, keragaman, dan keamanan pangan Provinsi: -	4	4	4	3	3	**18**
D	**Aspek Infrastruktur**													
32		Konektivitas antarwilayah belum 100 persen	√			√		Global: - Nasional: - Provinsi: Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah	5	4	5	4	5	**23**
33		Belum tersedianya transportasi publik yang memadai (kawasan perkotaan)	√	√				Global: - Nasional: - Provinsi: -	3	3	3	3	3	**15**
34		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan saluran drainase pembuangan air masih di bawah 50%	√	√				Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	4	4	4	5	**21**

No	Potensi	*Long List* Isu/ Permasalahan/ Potensi	Sumber Referensi					Keterkaitan dengan isu global/ nasional/	Kriteria Penilaian (Rata-rata Nilai)					Nilai Total
			Telaah Dokumen (RPJP, RPJM, KLHS, dst)	Data Sekunder (bab 2 dan 3)	Hasil Kajian	FGD	Lainnya		Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	Memiliki keterkaitan lintas sektor	Memiliki keterkaitan lintas wilayah (antar kecamatan)	
35		Capaian terhadap air minum layak masih di bawah 70%	√	√				Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	5	5	4	3	**22**
36		Masalah air bersih dan buruknya sanitasi lingkungan	√	√		√		Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	5	5	4	3	**22**
37		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat masih di bawah 50%	√	√				Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	4	5	4	4	**21**
38		Masih terdapat kawasan permukiman kumuh	√	√				Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	4	4	3	3	**18**
39		Pelayanan Persampahan belum optimal (Junlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 52,37%)	√	√		√		Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	4	4	4	4	**20**
40		Kondisi jalan rusak masih cukup tinggi (42,07% dari panjang jalan Kabupaten)	√	√				Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	4	5	5	5	**24**
41		Konektivitas antar wilayah belum optimal	√	√		√		Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	4	5	3	5	**21**

No	Potensi	*Long List* Isu/ Permasalahan/ Potensi	Sumber Referensi					Keterkaitan dengan isu global/ nasional/	Kriteria Penilaian (Rata-rata Nilai)					Nilai Total
			Telaah Dokumen (RPJP, RPJM, KLHS, dst)	Data Sekunder (bab 2 dan 3)	Hasil Kajian	FGD	Lainnya		Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	Memiliki keterkaitan lintas sektor	Memiliki keterkaitan lintas wilayah (antar kecamatan)	
42		Prasarana dan sarana utilitas (PSU) masih terbatas	√					Global: - Nasional: - Provinsi: -	4	4	4	3	3	**18**
43		Belum meratanya pembangunan berdasarkan kewilayahan	√		√			Global: - Nasional: Kemiskinan dan ketimpangan di Perkotaan-Perdesaan Provinsi: -	4	4	4	3	3	**18**
E	**Aspek Tata Kelola Hukum dan Kelembagaan**													
44		Reformasi birokrasi belum optimal (capaian B)	√			√		Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	5	5	4	3	**22**
45		Belum digunakannya penelitian dan pengembangan dalam (kebijakan) pembangunan	√			√		Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	5	5	4	3	**22**
46		Belum optimalnya pemanfaatan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	√			√		Global: - Nasional: - Provinsi: -	5	5	5	4	3	**22**

1. Deskripsi Isu Strategis Kabupaten Aceh Barat

Isu-isu strategis menjadi titik berangkat prioritas dalam menjawab tantangan pembangunan Kabupaten Aceh Barat khususnya dalam jangka menengah. Selain itu, sangat penting untuk melakukan telaah mendalam terhadap permasalahan yang melandasi isu-isu strategis di Kabupaten Aceh Barat. Dengan memahami Permasalahan ini, solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat dirumuskan serta langkah-langkah yang diambil dapat lebih mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dalam mendukung visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Barat.

Adapun deskripsi isu strategis beserta hasil telaah permasalahan dari masing-masing isu strategis di Kabupaten Aceh Barat dijabarkan berikut ini.

1. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir, namun kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Barat masih belum optimal. Rapor Pendidikan sangat rendah, dimana posisi rapor Pendidikan Aceh Barat Tahun 2025 sebesar 60,21% yang turun dari tahun 2024 sebesar 62,80%. Rapor Pendidikan Kabupaten Aceh Barat ini menduduki urutan terendah dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Masalah terbatasnya jumlah guru berkualitas di Kabupaten Aceh Barat juga merupakan salah satu hambatan utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) dalam kurun waktu tahun 2020-2022 menunjukkan penurunan dari 100% menjadi 60%. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan, yang tidak memiliki guru dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa, sehingga memperburuk kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Upaya peningkatan kualifikasi dan pelatihan bagi guru serta distribusi guru yang lebih merata sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat.

2. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan

Meskipun terjadi peningkatan akses terhadap layanan Kesehatan Masyarakat di semua tingkatan seperti kemudahan akses terhadap fasilitas Kesehatan, program imunisasi yang lebih luas dan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, namun di sisi lain masih ada permasalah Kesehatan yang menjadi penghambat Pembangunan.

Meningkatnya prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat selama tahun 2021 hingga 2023 dari 27,33% menjadi 33,34% di Tahun 2023, distribusi dokter tidak merata dan sarana dan prasarana Kesehatan belum memadai menjadi tugas besar dalam Pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat ke depan.

3. Eksploitasi Sektor Pertambangan Belum Optimal

Sektor pertambangan di Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, pada tahun 2024, kategori pertambangan dan penggalian hanya menempati peringkat kedua dalam kontribusi terhadap PDRB, yakni sebesar 24,34%, di bawah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencatat kontribusi sebesar 28,79%.

Saat ini, tercatat terdapat 18 usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Barat. Dari jumlah tersebut, 13 perusahaan telah memiliki Izin Usaha Produksi (IUP), sementara 5 perusahaan lainnya masih dalam tahap Izin Eksplorasi (IUP). Dominasi produksi pada usaha pertambangan dan galian ini adalah untuk sektor pertambangan batubara dan sektor pertambangan emas. saat ini hanya 3 perusahaan yang telah melakukan proses produksi yaitu : PT. Mifa Bersaudara, PT Indonesia Pasific Energy (IPE) dan PT. Agrabudi Jasa Bersama (AJB) sedangkan untuk sektor pertambangan emas yaitu PT Magellanic Garuda Kencana dan Koperasi Putra Putri Aceh.

Belum optimalnya ekspor disektor pertambangan batubara menjadi sebuah kendala dalam eskplotasi dan peningkatan produksi. Pemenuhan produksi perusahaan batubara yang telah beroperasi yaitu PT. IPE dan PT AJB hanya untuk pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) pada kebutuhan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 Nagan Raya. Penyediaan sarana prasarana terutama pelabuhan khusus pengangkutan batubara perlu didorong agar dapat mengoptimalkan produksi terutama di sektor pertambangan batubara mengingat sektor pertambangan Batubara di Aceh Barat tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga memiliki potensi besar untuk didorong sebagai sektor unggulan yang mampu mempercepat pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

4. Potensi Gas Alam di Lepas Pantai Aceh Barat

Eksplorasi pengeboran minyak di Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Aceh (ONWA-Meulaboh) merupakan salah satu isu strategis yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat. Potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja lokal, dan bertambahnya sumber penerimaan daerah. Selain itu, kehadiran investasi di sektor migas juga diproyeksikan mampu mendorong pembangunan infrastruktur dasar, baik jalan, listrik, maupun fasilitas pendukung lainnya, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing daerah dan mendukung berkembangnya sektor-sektor ekonomi lain seperti perdagangan, jasa, dan transportasi.

Bagi masyarakat, eksplorasi Blok Meulaboh diharapkan dapat memberikan manfaat langsung berupa penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kesempatan usaha, serta alih teknologi dan keterampilan di bidang industri energi. Kehadiran sektor migas juga berpotensi memperkuat perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri, mulai dari penyediaan barang, jasa, hingga kebutuhan logistik. Di samping itu, pendapatan daerah yang meningkat dari aktivitas ini akan membuka ruang lebih luas bagi pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, potensi Blok Meulaboh dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mensejahterakan masyarakat sekaligus memperkokoh posisi Aceh Barat sebagai daerah yang maju dan berdaya saing

.

5. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan lahan serta belum berkembangnya agroindustri pertanian

Keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu potensi utama dari Kabupaten Aceh Barat, baik yang berada di daratan dan lautan. Namun, komoditas pertanian (termasuk perkebunan dan peternakan) dan perikanan ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk dapat meningkatkan ekonomi wilayah maupun memberikan manfaat yang lebih besar kepada penduduknya. Sebelum upaya hilirisasi (*off-farm*) dikembangkan dalam rangka menciptakan nilai tambah, perlu upaya untuk mengatasi persoalan fundamental di level *on-farm*.

Jika melihat dari akar masalah terkait isu strategis ini, salah satu yang paling fundamental adalah pemanfaatan sumber daya alam yang belum menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal ini tentu berimplikasi terhadap belum terwujudnya upaya-upaya yang tepat dan terukur untuk menggali potensi yang ada. Salah satu potensi yang paling mencolok dan belum teroptimalkan adalah pertanian tanaman pangan, khususnya padi/beras. Selain belum termanfaatkannya lahan sawah yang ada, pengembangan irigasi yang masih terbatas juga menjadi masalah. Dalam hal ini, sebagian besar lahan sawah masih tadah hujan. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah juga masih terhambat oleh terbatasnya pengetahuan dan pemanfaatan teknologi dalam pertanian dan perikanan.

6. Tingginya kemiskinan dan pengangguran

Pembangunan seyogyanya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Salah satu manfaat tersebut dapat dilihat dari indikator kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Aceh Barat tergolong relatif tinggi. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa potensi yang ada belum secara optimal dimanfaatkan; hal yang sudah dijelaskan pada isu strategis sebelumnya.

Selain potensi ini, ada aspek lainnya yang perlu mendapatkan perhatian sebagai penyebab permasalahan ini muncul. Salah satu aspek penting adalah terkait ketenagakerjaan. Pertama, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas. Potensi sumber daya alam yang belum teroptimalkan juga mempunyai implikasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Kedua, kompetensi tenaga kerja yang cenderung masih rendah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tidak terserapnya tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi tertentu yang sedang tumbuh. Ketiga, rendahnya jiwa *entrepreneurship* atau kewirausahaan. Aspek ini menjadi penting untuk menumbuhkan sektor swasta di masyarakat yang dikembangkan berdasarkan potensi dan sumber daya lokal.

Aspek penting lainnya terkait dengan kemiskinan itu sendiri. Pertama, program penanggulangan kemiskinan belum berjalan secara efektif. Kedua, ada miskonsepsi kemiskinan di masyarakat. Perlu ada upaya untuk memandang kemiskinan sebagai persoalan dan bukan bagian dari budaya. Tentu hal ini akan melibatkan perubahan pola pikir serta upaya pengentasan kemiskinan yang mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

7. Penurunan kualitas lingkungan hidup yang berimplikasi terhadap pembangunan berkelanjutan

Kondisi (kualitas) lingkungan hidup sangat penting dalam menopang berjalannya pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Kondisi lingkungan hidup yang terjaga tidak hanya

dapat memberikan dukungan kehidupan yang lebih nyaman bagi masyarakat (misal berkurangnya kejadian bencana dan manfaat dari jasa ekosistem), tetapi juga menjamin manfaat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Terlepas dari pentingnya upaya untuk menjaga kondisi lingkungan hidup, beberapa aktivitas ekonomi telah mengganggu kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini, kegiatan pertambangan dan perkebunan menjadi salah satu hal yang perlu sangat diperhatikan. Masalah utama dari isu strategis ini adalah belum berjalannya sistem dan mekanisme penegakan hukum. Masalah ini diakibatkan oleh masih lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan rendahnya SDM pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Tentu perlu upaya yang signifikan dalam lima tahun kedepan untuk memperbaiki ini. Sistem dan mekanisme penegakan hukum ini juga termasuk dalam konteks masih perlunya ketaatan implementasi pembangunan sesuai yang telah dituangkan dalam RTRW dan RDTR.

8. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar

Infrastruktur dalam arti luas menjadi salah satu tulang punggung utama yang dapat mendorong aktivitas sosial dan ekonomi yang lebih baik di Kabupaten Aceh Barat. Namun, ketersediaan dan layanan infrastruktur ini belum optimal jika melihat dari sisi pemerataan. Ada beberapa masalah utama terkait hal ini. Hal pertama terkait dengan sebaran permukiman masyarakat yang luas dengan kondisi geografis yang beragam. Dengan kondisi ini maka dibutuhkan anggaran yang besar. Namun, hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran pembangunan, terutama jika dikaitkan dengan besarnya pembiayaan pembangunan dan perawatan fisik. Selain aspek geografis dan fiskal, belum optimalnya fungsi infrastruktur dasar juga disebabkan belum berjalannya partisipasi masyarakat, khususnya terkait dengan sanitasi. Sebagai contoh adalah belum berjalannya penerapan perilaku sehat dengan tidak buang air besar secara sembarangan.

9. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan daya saing daerah

Sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk modal paling esensial dalam pembangunan daerah. Secara umum, kualitas sumber daya manusia (jika melihat pada nilai IPM) Kabupaten Aceh Barat sebenarnya sudah relatif baik di level provinsi. Namun, jika mengharapkan peningkatan daya saing daerah, upaya lebih besar perlu dilakukan.

Dari ketiga komponen IPM, intervensi yang paling membutuhkan perhatian adalah upaya peningkatan paritas daya beli masyarakat. Upaya ini (beserta akar masalah yang terkait) sudah dibahas di isu-isu strategis lainnya yang terkait dengan unsur ekonomi. Terkait aspek pendidikan dan kesehatan, ada beberapa akar masalah yang menjadi penyebab masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, antara lain kualitas kesehatan yang belum merata, terbatasnya tenaga medis dan kesehatan, terbatasnya guru berkualitas, lingkungan masyarakat yang belum mendukung terciptanya iklim pendidikan yang kompetitif, dan masih mahalnya akses pendidikan yang berkualitas.

10. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintahan memegang peran kunci dalam upaya perencanaan dan pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Dapat dikatakan bahwa isu strategis ini

menjadi fondasi dasar bagi isu-isu strategis lainnya. Namun, tata kelola saat ini dirasa belum optimal sehingga belum mampu mendorong potensi yang ada serta mengatasi berbagai persoalan pokok pembangunan yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat.

Ada dua penyebab belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Pertama terkait dengan sistem pemerintahan. Penyebab yang pertama lebih dikarenakan pembentukan perangkat daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta perjanjian kinerja yang belum mencerminkan target pembangunan dan pelayanan yang sepenuhnya. Kedua adalah kualitas aparatur pemerintah daerah. Terkait hal ini, setidaknya ada tiga akar masalah yang perlu ditindaklanjuti, yaitu rendahnya kualitas SDM ASN, belum berjalannya manajemen talenta, dan tidak adanya *reward* dan *punishment*.

11. Belum optimalnya pembangunan ekonomi

Seperti telah disampaikan pada dua isu strategis sebelumnya bahwa ada potensi sumber daya alam yang belum dioptimalkan sehingga pembangunan di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi. Secara umum, terlepas dari potensi sumber daya alam tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat belum optimal.

Ada beberapa penyebab yang perlu diurai untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Barat dalam lima tahun kedepan selain pemanfaatan potensi sumber daya alam. Hal pertama adalah upaya untuk menarik investasi. Tentu upaya ini tidak sekedar bertumpu pada potensi ekonomi yang ada di daerah tetapi juga perlu diiringi dengan perbaikan tata kelola investasi, kebijakan yang mendukung, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung. Hal berikutnya yang dapat dilakukan, terutama dikarenakan anggaran pemerintah yang terbatas, adalah dengan mendorong partisipasi swasta melalui kemitraan maupun peran swasta yang lebih besar untuk sektor tertentu maupun melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

12. Belum optimalnya implementasi kekhususan Aceh dalam mendorong transformasi sosial masyarakat

Kekhususan Aceh tentu turut mewarnai pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dapat menjadi karakteristik tersendiri maupun modal dasar bagi terciptanya pembangunan yang lebih berkualitas, baik dari sisi budaya, manusia, dan ekonomi. Namun, kekhususan ini belum dioptimalkan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk menguraikan akar masalah yang ada.

Budaya dan nilai-nilai luhur agama sejauh ini masih melekat di masyarakat, tetapi mulai mendapatkan tantangan khususnya terkait perkembangan arus global dan informasi dari luar serta peran riil yang diharapkan dengan adanya pelbagai persoalan pembangunan yang dihadapi sehari-hari. Terkait hal ini, masalah yang dihadapi adalah rendahnya minat generasi muda terhadap budaya Aceh, meningkatnya pengaruh budaya luar di kalangan masyarakat (terutama yang negatif), dan rendahnya kegiatan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya adat dan kebudayaan. Di sisi lainnya, peran tokoh agama dan masyarakat masih kurang dan sistem aktualisasi tenaga keagamaan dalam pranata sosial kemasyarakatan belum ada. Hal yang sama juga berlaku terkait potensi ZIS untuk

pembangunan. Potensi ZIS sejauh ini masih terhambat oleh modernisasi sistem pengelolaanya yang berjalan lambat.

13. Masih Terjadi Ketimpangan Gender dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan yang berkeadilan gender merupakan pilar penting untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan yang inklusif. Namun, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Aceh Barat masih tertinggal dibandingkan Provinsi Aceh dan nasional. Pada tahun 2024, nilai IPG Aceh Barat mencapai 86,67, lebih rendah dari Provinsi Aceh (92,64) dan nasional (91,85), yang menunjukkan masih adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kondisi tersebut sejalan dengan rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang pada tahun 2024 hanya mencapai 59,59, jauh di bawah Provinsi Aceh (631,78) dan nasional (77,62). Rendahnya IDG menunjukkan keterbatasan perempuan dalam mengakses dan berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, dan jabatan profesional. Hal ini diperburuk oleh belum optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di perangkat daerah serta minimnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan masih terjadinya ketimpangan gender di Aceh Barat antara lain: 1) Akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang masih rendah, sehingga berdampak pada terbatasnya peluang kerja dan daya saing ekonomi perempuan. 2) Minimnya representasi perempuan dalam jabatan struktural dan lembaga pengambilan keputusan, yang menyebabkan perspektif gender belum terintegrasi dalam kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah. 3) Belum optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di perangkat daerah, baik melalui analisis gender maupun penyusunan anggaran responsif gender. 4) Masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya patriarkis, yang membatasi ruang gerak perempuan untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, karena separuh potensi sumber daya manusia belum diberdayakan secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu memperkuat kebijakan afirmatif dan kelembagaan PUG, mendorong peningkatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan, serta memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, keterampilan, dan peluang ekonomi agar pembangunan daerah berlangsung lebih inklusif dan berkeadilan gender.

14. Belum Optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Aceh Barat

Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Namun, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Aceh Barat menunjukkan tren penurunan dari 70,5 pada tahun 2022 menjadi 69,32 pada tahun 2023, yang mengindikasikan belum optimalnya sistem perlindungan anak di daerah. Sementara itu, meskipun Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) meningkat dari 66,69 menjadi 67,22, kemajuan tersebut belum cukup untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak dasar anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman dari kekerasan dan eksploitasi.

Ketidakstabilan capaian IPA dan IPHA juga disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, terbatasnya partisipasi anak dalam forum perencanaan pembangunan, serta belum meratanya program Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan anak secara lintas sektor, peningkatan kualitas layanan pencegahan kekerasan dan pekerja anak, serta pengarusutamaan perspektif anak dalam kebijakan publik. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu memperluas peran masyarakat, sekolah, dan lembaga sosial dalam memastikan setiap anak tumbuh, berkembang, dan terlindungi secara optimal.

15. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, hingga saat ini, kebijakan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya inklusif. Keterbatasan data dan pemetaan jumlah serta jenis disabilitas menyebabkan kebijakan yang disusun masih bersifat umum dan belum berbasis kebutuhan spesifik. Kondisi ini mengakibatkan banyak penyandang disabilitas belum mendapatkan akses setara terhadap pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik, serta layanan sosial dasar.

Di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial. Fasilitas pendidikan inklusif masih terbatas, sementara peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor pemerintah maupun swasta belum berkembang secara signifikan. Infrastruktur publik seperti gedung pemerintahan, sarana transportasi, dan layanan kesehatan juga belum seluruhnya ramah disabilitas. Di sisi lain, masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparatur tentang pendekatan berbasis hak (rights-based approach) turut memperkuat stigma sosial terhadap kelompok disabilitas.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan daerah yang berorientasi pada pembangunan inklusif, melalui penyusunan data terpilah disabilitas, peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik, serta penyediaan fasilitas dan teknologi bantu di seluruh lini pelayanan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu mengintegrasikan isu disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah, memperluas kemitraan dengan lembaga sosial dan dunia usaha, serta memastikan hak-hak penyandang disabilitas terjamin dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial secara bermartabat.

16. Belum Optimalnya Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda serta Peningkatan Sarana Olahraga di Kabupaten Aceh Barat

Pemuda merupakan aset strategis pembangunan daerah karena memiliki potensi besar dalam inovasi, wirausaha, dan kepemimpinan sosial. Namun, capaian indikator kepemudaan di Kabupaten Aceh Barat masih menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan. Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada persentase organisasi pemuda yang aktif dari 0% pada tahun 2021 menjadi 29,2% pada tahun 2023, hal ini masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah organisasi yang terdaftar. Kondisi serupa juga terjadi pada wirausaha muda, yang meningkat dari 0% menjadi 23,5%, menunjukkan bahwa semangat kewirausahaan di kalangan pemuda mulai tumbuh.

Dalam bidang olahraga, Kabupaten Aceh Barat telah menunjukkan kemajuan dalam aspek pembinaan dan pelatihan, tetapi menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Cakupan pembinaan olahraga meningkat tajam dari 12% pada tahun 2021 menjadi 64,71% pada tahun 2023, disertai dengan peningkatan pelatih bersertifikasi dari 0% menjadi 84,55% serta pembinaan atlet muda dari 20% menjadi 37,04%. Meski demikian, jumlah gedung olahraga justru menurun dari 4 unit menjadi 1 unit, yang menunjukkan terbatasnya fasilitas pendukung kegiatan olahraga di tingkat kecamatan dan desa. Keterbatasan ini berpotensi menghambat regenerasi atlet dan pemerataan akses olahraga masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, dukungan terhadap organisasi kepramukaan sudah optimal dengan capaian 100% pada tahun 2022–2023, tetapi sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan belum sepenuhnya terbangun. Oleh karena itu, isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan ekosistem kewirausahaan pemuda, peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan, dan revitalisasi sarana olahraga yang merata dan berkelanjutan. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan dukungan pembiayaan inovatif sangat diperlukan agar pemuda Aceh Barat dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah serta berprestasi di bidang olahraga di tingkat regional maupun nasional.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Aceh Barat merupakan gambaran arah pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Aceh Barat dalam periode 2025-2029 yang merupakan Penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Periode 2025-2029. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029, yaitu :

"TERWUJUDNYA ACEH BARAT MAJU MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM"

Keterangan Visi :

Maju :

Aceh Barat yang maju dapat diartikan sebagai kondisi daerah yang unggul dari sektor Ekonomi, dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Kemajuan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya, yang ditunjukkan dengan peningkatan Kualitas SDM yang dapat bersaing. Keberadaan sumber daya manusa yang berkualitas menjadi dasar bagi keunggulan kompetitif.

Berkelanjutan :

Potensi Kabupaten Aceh Barat yang beragam harus diimbangi dengan pengelolaan yang berbasis ramah lingkungan, ini harus dilakukan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Kabupaten Aceh Barat menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan demi terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Syariat Islam :

Peningkatan Nilai-nilai syariat Islam didalam sendi-sendi masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan menerapkan hukum-hukum Islam, diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan harmonis. Hal ini mendorong pengelolaan sumber daya secara adil dan penerapan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Melalui penerapan syariat, masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan.

3.1.2. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam misi pembangunan. Misi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Adapun misi pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 yaitu :

1. **Mewujudkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Guna Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat**

   Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ekonomi lokal dengan infrastruktur yang lebih baik dan inovasi. terwujudnya hal ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, mengurangi

kesenjangan sosial, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada akhirnya, daya saing Kabupaten Aceh Barat akan meningkat dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Diwujudkan melalui Strategi menyediakan Bimbingan belajar gratis bagi siswa, menyediakan sarana prasarana sekolah, menyediakan dokter spesialis sesuai standar pelayanan, menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi sesuai peluang ketersediaan lapangan pekerjaan, Meningkatkan akses permodalan, cetak sawah baru, menyediakan sarana prasarana olah raga yang memadai dan lain sebagainya.

2. **Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Transparan**
   Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berfokus pada reformasi administrasi pemerintahan untuk meningkatkan integritas dan efisiensi. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, dapat dipercaya oleh publik, dan transparan dalam setiap aspek pengelolaan yang dilakukan dengan strategi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN secara profesional, Optimalisasi Sumber PAD, mengalokasikan Anggaran pembangunan berbasis kewilayahan dan lain sebagainya.
3. **Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat**
   Dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang mencakup pendidikan, ekonomi, hukum, dan kehidupan sosial, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bermoral berlandaskan syariat Islam, dilaksanakan melalui strategi memberi insentif bagi imum chik di seluruh gampong, membentuk satgas pencegahan penyakit masyarakat, menyelenggarakan gerakan 60 menit magrib mengaji, dan lain sebagainya.
4. **Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Aceh Barat**
   Pemanfaatan beragam potensi secara lebih merata, pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Barat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Dilakukan dengan strategi membentuk unit pengawasan khusus drainase kota meulaboh, menyediakan sarana prasarana jalan dan jembatan yang mantap, dan lain sebagainya.
5. **Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan Hidup**
   Pemanfaaatan potensi sumber daya alam secara optimal untuk pembangunan di berbagai sektor dengan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang diwujudkan dengan strategi mengembangkan hilirisasi komoditi pertanian, Perikanan, dan Peternakan, membangun jejaring pengelolaan sampah yang berorientasi ekonomi, menyediakan sarana dan prasarana penanganan bencana secara memadai, dan lain sebagainya.
6. **Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Aceh**
   Pelestarian Adat dan Budaya Aceh yang berlandaskan nilai-nilai Islami yang diwujudkan dengan menggalakkan berbagai kegiatan yang bertujuan melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya Aceh. Ini mencakup seluruh pelestarian seni, musik, tarian, dan tradisi adat lainnya, dilakukan dengan strategi menyenggarakan pameran Budaya Aceh secara berkala, membangun sanggar seni yang representatif, dan lain sebagainya.

7. **Meningkatkan Peran Pemuda dalam Upaya Mewujudkan Percepatan Pembangunan**

   Mengoptimalkan potensi pemuda dalam berbagai program pembangunan dengan disertai inovasi dan semangat baru dalam mencapai target pembangunan. Dilakukan dengan memberdayakan pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang diwujudkan melalui strategi kerjasama dengan perguruan tinggi untuk Gerakan Sarjana membangun gampong, memfasilitasi penyelenggaraan forum diskusi pembangunan secara berkala di kalangan pemuda, dan lain sebagainya.

3.1.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
VISI : TERWUJUDNYA ACEH BARAT MAJU MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM							
1	Mewujudkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Guna Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat	1.1	Terwujudnya Percepatan Transformasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat	1.1.1	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	a	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan
						b	Meningkatkan Upaya Promotif Preventif dan Perilaku Budaya Hidup Sehat
						c	Menyediakan Tenaga Medis yang Berkualitas dengan Jumlah yang Cukup
						d	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Mengakses Layanan Kesehatan
						e	Memperluas Jangkauan Layanan Kesehatan
						f	Meningkatkan Kesehatan Reproduksi pada remaja Putri
						g	Pemberian Makanan Tambahan Khusus bagi Balita Kurang Mampu
						h	Menciptakan Lingkungan Tempat Tinggal yang Bersih
						i	Menyediakan Sumber Air Minum yang Layak untuk Semua Permukiman
						j	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan
				1.1.2	Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif	a	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Guru
						b	Menyediakan Tenaga Pendamping Guru
						c	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah
						d	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Mengakses Layanan Pendidikan

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
						e	Menjamin Ketersediaan Guru di Setiap Sekolah sesuai Dengan SPM
						f	Meningkatkan kesejahteraan guru di daerah tempat terpencil
						g	Membangun dan Mengembangkan Sekolah Unggul yang Merata
						h	Menumbuhkembangkan Minat Baca bagi Masyarakat
				1.1.3	Memperluas Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	a	Mengeluarkan Regulasi/Kebijakan untuk Perlindungan Sosial
						b	Memastikan Seluruh Pekerja Sudah Menjadi Anggota Perlindungan Sosial
						c	Memberi Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin
				1.1.4	Meningkatkan Aksesibilitas dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	a	Meningkatkan Kelompok Usaha Perempuan
				1.1.5	Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak	a	Membentuk Gampong Ramah Anak
						b	Membentuk Sekolah Ramah Anak Jenjang SD/SMP
						c	Menyiapkan Regulasi tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak
						d	Menyiapkan Regulasi tentang Perkawinan Anak dibawah Usia
		1.2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkualitas	1.2.1	Meningkatkan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan	a	Menyediakan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha
						b	Menjalin Kerjasama untuk Penempatan Tenaga Kerja
						c	Meningkatkan investor dan Investasi
						d	Mengembangkan Ekonomi Desa
				1.2.2	Meningkatkan Produksi serta Nilai Tambah Produk/Komoditi	a	Menumbuhkembangkan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
						b	Memperluas Akses Pemasaran bagi pelaku Usaha
						c	Meningkatkan Skill Pelaku Usaha
						d	Mengoptimalkan Fungsi Koperasi
				1.2.3	Mewujudkan Stabilitas Ekonomi	a	Menjaga Ketersediaan Stok Barang Pokok dan Barang Penting

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
						b	Memberikan Subsidi Transportasi kepada Komoditi Tertentu
						c	Menggelar Pasar Murah dan Melaksanakan Operasi Pasar
						d	Menjalin Kerjasama Antar Daerah untuk Stabilitas Stok Barang Pokok dan Barang Penting
						e	Pengawasan terhadap Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
2	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Transparan	2.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Transparan	2.1.1	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Anggaran	a.	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik
						b	Meningkatkan Ketertiban Administrasi Keuangan
						c	Meningkatkan Akurasi Data Aset
				2.1.2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	a.	Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan
						b	Meningkatkan Edukasi kepada Masyarakat tentang Perencanaan Pembangunan
		2.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Melayani	2.2.1	Meningkatkan Kualitas ASN	a.	Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ASN
						b.	Menempatkan ASN sesuai pendidikan dan kompetensi
				2.2.2	Meningkatkan Kualitas Layanan Pemerintah	a	Menetapkan Indikator Kinerja yang Jelas dan terukur bagi Seluruh pejabat sesuai dengan Visi Misi Pembangunan
						b	Meningkatkan Akses Internet di seluruh wilayah Aceh Barat guna Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
						c	Meningkatkan Kesejahteraan ASN
						d	Menyediakan Layanan Pendampingan Hukum bagi Masyarakat
				2.2.3	Meningkatkan Inovasi Pelayanan bagi Masyarakat	a	Menetapkan Inovasi sebagai Indikator Kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah
						b	Memberikan Penghargaan kepada Inovator
		2.3	Terwujudnya Peran Serta Swasta dalam Pembangunan	2.3.1	Meningkatnya Anggaran Swasta dalam Pembangunan	a.	Meningkatkan Koordinasi dengan seluruh Perusahaan Swasta
						b.	Meningkatkan Transparansi Pelaksanaan CSR

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
		2.4	Terwujudnya Sinergitas Pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong	2.4.1	Meningkatkan Keselarasan RKPG dan RKPD	a	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Gampong
						b	Menetapkan Pakta Integritas Penngelolaan Dana Desa sesuai dengan visi misi pembangunan
						c	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Gampong
		2.5	Terwujudnya Kemandirian Fiskal	2.5.1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	a	Meningkatkan Jumlah Objek Sumber Pendapatan Asli Daerah
						b	Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah
						c	Mengkaji dan menetapkan kembali besaran nilai pajak dan retribusi daerah
3	Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Syariat Islam dalam Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat	3.1	Terwujudnya Kehidupan Sosial Keagamaan yang Islami	3.1.1	Meningkatkan Fungsi Masjid sebagai Tempat Ibadah dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	a	Pembinaan bagi Pengurus BKM Masjid
						b	Menetapkan Keaktifan Fungsi Masjid sebagai Indikator Kinerja Gampong
				3.1.2	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Nilai-nilai Syariat Islam	a	Menyelenggarakan Majelis Taklim di Setiap Gampong Minimal Satu Kali dalam Satu Minggu
						b	Menciptakan Kader Ulama
						c	Menyelenggarakan Muzakarah Ulama Dayah untuk memperoleh Rekomendasi Syariat Islam
		3.2	Terwujudnya Sistem Kehidupan yang Menjamin Tumbuh Kembang Generasi masa Depan yang Islami	3.2.1	Meningkatkan Kualitas dan Peran Dayah	a	Fasilitasi Pemenuhan Standardisasi Dayah
						b	Optimalisasi Dayah dalam Pembangunan Gampong
				3.2.2	Menciptakan Lingkungan Sosial Kehdupan Masyarakat yang Islami	a	Membentuk Satuan Tugas Pencegah Pelanggaran Syariat Islam/ Penyakit Masyarakat di Tingkat Gampong
						b	Menghidupkan Kegiatan Gerakan 60 Menit Maghrib Mengaji
				3.2.3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia di Bidang Keagamaan yang Berdaya Saing	a	Menyelenggarakan kegiatan MTQ secara Reguler
						b	Menyediakan Pelatih MTQ yang Berprestasi
4	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Aceh Barat	4.1	Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar	4.1.1	Mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh	a	Melaksanakan Bedah Rumah
						b	Melakukan Penataan Kawasan Permukiman
						c	Membangun dan merehabilitasi Sanitasi

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
						d	Meningkatkan akses air minum layak
				4.1.2	Meningkatkan kemitraan dalam Pemenuhan Layanan Dasar	a	Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Dasar
				4.1.3	Tersedianya Infrastruktur Layanan Perkotaan	a	Menyediakan Lampu Penerangan Jalan
						b	Membangun Pedestrian untuk Meningkatkan Kenyamanan Pejalan kaki
		4.2	Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian	4.2.1	Meningkatkan Jaringan irigasi untuk Sumber Daya Air Pertanian	a	Mendorong Percepatan Penyelesaian Irigasi Lhok Guci
						b	Membangun Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten
5	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan Hidup	5.1	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Optimal dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	5.1.1	Meningkatkan Pemanfaatan Lahan untuk Pengembangan Sumber Daya Alam yang Mendukung Perekonomian Masyarakat	a	Mengeluarkan Regulasi untuk Mengatur Pengelolaan Pemanfaatan Ruang
						b	Memberi Insentif bagi Pengelolaan Lahan yang Produktif
						c	Mengoptimalkan fungsi kelembagaan petani
				5.1.2	Meningkatkan Diversifikasi Produk Pertanian	a	Meningkatkan Kompetensi Penyuluh dan Petani untuk Pengembangan Komoditi Unggulan Pertanian
						b	Memberikan Insentif/bantuan Modal Usaha Bagi Petani
						c	Melakukan Kerjasama Pemasaran dari Komoditi Pertanian yang Dikembangkan
				5.1.3	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan serta Mendorong Hilirisasi Komoditi Pertanian	a	Memberikan Insentif/Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku Industri Hilir
						b	Meningkatkan Kompetensi Pelaku Usaha Industri Hilir Sektor Pertanian/ Perikanan/ Perkebunan/Peternakan
						c	Melakukan Kerjasama Pemasaran Produk Industri Hilir Pertanian
						d	Memfasilitasi Perizinan Pelaku Usaha Pertanian/ Perkebunan /Peternakan/Perikanan
				5.1.4	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	a	Menjaga Stabilitas dan Kelancaran Stok Bahan Pangan

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
						b	Meningkatkan Keamanan Pangan yang Dikonsumsi
						c	Meningkatkan Keseimbangan Gizi yang Dikonsumsi Masyarakat
						d	Menngkatkan Ketersediaan Pangan melalui Intentifikasi dan Ekstentifikasi
		5.2	Terwujudnya Kepastian Keleslestarian Lingkungan Hidup	5.2.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan terhadap Bencana	a	Meningkatkan Implementasikan Rencana dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
						b	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Resiko Bencana
						c	Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
						d	Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan melalui Pengolahan Sampah di Desa
						e	Menyediakan Sarana dan Prasarana Antisipasi Bencana
6	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Aceh	6.1	Terlestarikannya Budaya Aceh	6.1.1	Meningkatkan Keberdayaan Pelaku Seni dan Budaya	a	Menggelar Pertunjukan/ Pergelaran Seni setiap Akhir Bulan di Akhir Pekan
						b	Membangun Rumah Adat Aceh
						c	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelestarian Kebudayaan Daerah
						d	Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
				6.1.2	Mengoptimalkan Peran Kelembagaan dan Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Kebudayaan	a	Memperkuat Lembaga Adat, Tuha Peut serta Sanggar Seni/Budaya
						b	Meningkatkan Kerjasama dengan Stakeholder terkait Pelestarian Budaya
				6.1.3	Melindungi Adat Istiadat dan Cagar Budaya	a	Membangun Museum Daerah
						b	Pembenahan dan Peningkatan Kualitas Objek Wisata Spiritual
7	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Upaya Mewujudkan Percepatan Pembangunan	7.1	Terwujudnya Peningkatan Pembangunan di Bidang Kepemudaan	7.1.1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemuda	a	Melakukan Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan
						b	Memberikan ruang diskusi bagi Pemuda
				7.1.2	Memperkuat Partisipasi Pemuda dalam	a	Penyediaan Akses Permodalan dan Bimbingan Bisnis bagi Pemuda Kewirausahaan

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
					Pembangunan Sosial Ekonomi	b	Mendorong Keterlibatan Aktif Pemuda dalam Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif
						c	Melibatkan Pemuda dalam Menumbuhkembangkan Pertanian, Ekonomi Kreatif dan Kesehatan
		7.2	Terwujudnya Peningkatan Pembangunan di Bidang Olahraga	7.2.1	Meningkatkan Prestasi Pemuda	a	Menciptakan sistem Pemantauan Minat Bakat di Bidang Olahraga
						b	Menyediakan Pelatih yang Profesional dengan Kualifikasi Tingkat Nasional
						c	Menyediakan Sarana dan Prasarana Olahraga
						d	Menggelar Event Olahraga setiap Tahun

3.1.4. Penyelarasan Visi dan Misi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional

Tabel 3.2 Tabel Keselarasan Visi dan Misi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 dengan Provinsi Aceh dan Nasional

Aceh Barat		Aceh		Nasional	
Visi					
Terwujudnya Aceh Barat Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan yang Berlandaskan Syariat Islam		**Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan**		**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**	
Misi					
1	Mewujudkan Transformasi Sosial dan Ekonomi guna Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat	3	Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Transparan	6	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
3	Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Syariat Islam dalam Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat	1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah	1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
4	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Aceh Barat	4	Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan	6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
				3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Aceh Barat		Aceh		Nasional	
5	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan Hidup	7	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	5	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Aceh	2	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama
7	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Upaya Mewujudkan Percepatan Pembangunan	5	Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Tabel 3.3 Cascading RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
VISI : TERWUJUDNYA ACEH BARAT MAJU MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM															
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Guna Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat															
1.1	Terwujudnya Percepatan Transformasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat		**Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**17,60**	**15,50-16,50**	**15,00-16,00**	**14,50-15,50**	**14,00-15,00**	**13,50-14,50**	**13,00-14,00**	**13,00-14,00**		√	
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**Indeks**	**75,45**	**75,61**	**76,31**	**76,73**	**77,15**	**77,57**	**78,00**	**78,00**		√	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	42,90	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	49,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√	
1.1.1		Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	112	105	100	95	90	85	80	80	Dinas Kesehatan		√
			Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	25,6	20,00	18,50	16,50	15,20	14,50	13,20	13,20	Dinas Kesehatan		√
			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Kasus	N/A	563	483	417	369	333	305	305	Dinas Kesehatan		√
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan		√
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	14	12	10	8	6	4	3	3	Dinas Kesehatan		√
			Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,03	72,41	72,79	73,07	73,45	73,54	73,54	73,54	Dinas Kesehatan		√
1.1.2		Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif	Jumlah Lulusan SMP yang Memiliki Kemampuan Bahasa Inggris dengan Score TOEFL Minimal 350	Persen	N/A	25	35	45	55	65	67	67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√
			Rapor Mutu Pendidikan	Persen	62,80	64,23	66,09	67,96	70,21	72,55	74,52	74,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
			Skor literasi SD/ Skor Kemampuan Literasi SD	Skor	44,00	46,50	49,00	51,50	54,00	56,50	59,00	59,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√
			Skor Numerasi SD /Skor Kemampuan Numerasi SD	Skor	41,47	44,37	47,27	50,17	53,07	55,97	58,87	58,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√
			Skor literasi SMP/ Skor Kemampuan Literasi SMP	Skor	59,4	60,50	61,60	62,70	63,80	64,90	66,00	66,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√
			Skor Numerasi SMP/ Skor Kemampuan Numerasi SMP	Skor	55,72	57,22	58,72	60,22	61,72	63,22	64,72	64,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	55,37	58,57	61,57	64,57	67,57	70,57	73,57	73,57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		√
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) Diploma/Sarjana/Magister/Doktor	Persen	N/A	51,38	51,4	51,42	51,45	51,50	51,55	51,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√
			Persentase Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja	Persen	N/A	54,08	56,00	58,00	60,00	63,00	68,00	68,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		√
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,93	14,95	14,97	14,99	15,02	15,03	15,04	15,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√
			Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun	9,99	10,22	10,23	10,24	10,25	10,26	10,27	10,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√
1.1.3		Memperluas Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase Belanja Pemerintah untuk Perlindungan Sosial	Persen	N/A	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		√
			Persentase Belanja CSR untuk Perlindungan Sosial	Persen	0,35	0,51	0,60	0,70	0,80	0,90	0,93	0,93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1.1.4		Meningkatnya Aksesibilitas dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang Berhasil	Kelompok	50	55	60	63	65	67	70	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		√
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,231	0,231	0,231	0,230	0,229	0,228	0,227	0,227	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		√
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	47,23	48,28	49,33	50,38	51,43	52,48	53,53	53,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		√
1.1.5		Terpenuhinya Hak-hak Anak	Persentase Gampong Ramah Anak	Persen	1,55	2,18	3,12	4,67	6,23	7,79	8,00	8,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		√
			Jumlah Anak Terlantar dan Rentan Terlantar yang Terpenuhi Layanan Dasar	Orang	144	110	110	100	100	90	90	90	Dinas Sosial		√
			Persentase Sekolah Ramah Anak Jenjang SD/SMP	Persen	12,38	12,38	16,97	21,55	26,14	30,73	35,32	35,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	66,10	67,10	68,10	69,10	70,00	70,90	71,70	71,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		√
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,95	68,00	69,10	70,00	71,00	71,90	72,70	72,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		√
1.2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkualitas		**Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**7,50**	**4,80-5,70**	**5,10-6,00**	**5,30-6,20**	**5,50-6,40**	**5,70-6,60**	**5,90-6,80**	**5,90-6,80**		√	
			PDRB/kapita	**Juta Rupiah**	**67,94 (ADHB) 41,89 (ADHK)**	**70 (ADHB) 43 (ADHK)**	**73 (ADHB) 44 (ADHK)**	**76 (ADHB) 45 (ADHK)**	**79 (ADHB) 46 (ADHK)**	**81,34 (ADHB) 47 (ADHK)**	**81,50 (ADHB) 48 (ADHK)**	**81,50 (ADHB) 48 (ADHK)**		√	
			Indeks Gini	Indeks	0,237	0,270	0,260	0,250	0,250	0,240	0,220	0,220		√	
1.2.1		Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,58	5,40	5,30	5,20	5,10	5,00	4,90	4,90			√
			Pertumbuhan UMKM/IKM	Persen	2,17	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,35	3,35	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		√
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Pemerintahan dan BUMN	Persen	N/A	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		√
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Perusahaan Swasta	Persen	N/A	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada Level Kabupaten	Persen	N/A	89,05	89,10	89,14	89,19	89,24	89,29	89,29	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		√
			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kabupaten	Persen	N/A	1,67	1,70	1,78	1,80	1,82	1,85	1,85	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		√
1.2.2		Meningkatnya Produksi serta Nilai Tambah Produk/Komoditi	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	10	20	30	35	40	45	46	46	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√
			Rasio PDRB Transportasi dan Pergudangan	Persen	N/A	3,85	3,80	3,75	3,70	3,65	3,60	3,60	Dinas Perhubungan		√
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	N/A	1,69	1,72	1,74	1,83	1,84	1,94	1,94	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	1,81	2,10	2,40	2,70	3,00	3,20	3,20	3,20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		√
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	N/A	31,00	30,95	30,9	30,85	30,8	30,75	30,75	Provinsi di Bappeda		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	N/A	14,38	14,39	14,40	14,42	14,50	14,60	14,60	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		√
1.2.3		Terwujudnya Stabilitas Ekonomi	**Inflasi**	**Persen**	**3,29**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	**Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**		√
			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	N/A	18,90	20,00	23,40	25,00	27,00	28,00	28,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		√
			Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	28,87	29,40	29,60	30,01	32,30	35,00	35,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		√
Misi 2 : Transformasi Tata Kelola Pemerintahan guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Transparan															
2.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Transparan		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	85,00	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	
			Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	69,23	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	Inspektorat	√	
			Indeks Reformasi Hukum	Indeks	N/A	56,50	57,00	57,50	58,00	59,00	60,00	60,00	Bagian Hukum Setdakab	√	
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,09 (BB)	70,00-80,00 (BB)	70,00-80,00 (BB)	70,00-80,00 (BB)	70,00-80,00 (BB)	80,00-90,00 (A-)	80,00-90,00 (A-)	80,00-90,00 (A-)	Bagian Organisasi Setdakab	√	
2.1.1		Meningkatnya Tranparansi Pengelolaan Anggaran	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		√
			Indeks Pencegahan Korupsi MCP	Indeks	88,52	87,14	88,14	89,14	90,14	91,14	92,14	92,14	Inspektorat		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
2.1.2		Menngkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√
2.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Melayani		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	3,51-4,00 (B)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,51-5,00 (A)	4,51-5,00 (A)	Bagian Organisasi Setdakab	√	
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,04	3,14	3,24	3,34	3,44	3,54	3,64	3,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√	
2.2.1		Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71,93	72,13	72,33	72,55	72,75	72,95	73,10	73,10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		√
2.2.2		Meningkatnya Kualitas Layanan Pemeriintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	N/A	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	Bagian Organisasi Setdakab		√
			Indeks SPBE	Indeks	2,68	2,68	2,70	2,72	2,75	2,78	2,80	2,80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		√
2.2.3		Meningkatnya Inovasi Pelayanan bagi Masyarakat	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,19	60,20	60,40	60,60	60,80	70,00	71,00	71,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√
			Presentase Dana untuk Inovasi dari APBK	Persen	N/A	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√
2.3	Terwujudnya Peran Serta Swasta dalam Pembangunan		Jumlah Perusahaan Pelaksana CSR	Perusahaan	12	13	14	15	16	17	17	17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√	
2.3.1		Meningkatnya Anggaran Swasta	Proporsi Anggaran CSR yang Mendukung Pembangunan Daerah	Persen	N/A	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	50,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
		dalam Pembangunan													
2.4	Terwujudnya Sinergitas Pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong		Persentase APBG yang Selaras Vengan Visi Misi Bupati	Persen	N/A	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	√	
			Persentase Desa Mandiri	Persen	6,52	7,76	9,01	9,94	11,18	12,42	12,45	12,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	√	
			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,73	0,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	√	
			Indeks Desa	Indeks	N/A	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,73	0,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	√	
2.4.1		Meningkatnya Keselarasan RKPG dan RKPD	Persentase Keselarasan Prioritas Pembangunan di Gampong dan di Kabupaten	Persen	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		√
2.5	Terwujudnya Kemandirian Fiskal		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,936	0,936	0,976	0,996	1,016	1,036	1,050	1,050	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	
			Nilai PMA/ PMDN	Milyar Rupiah	N/A	475	560	570	580	600	620	620	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	N/A	3,15	3,19	3,22	3,26	3,29	3,31	3,31	Bagian Ekonomi Setdakab	√	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
2.5.1		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	10,85	13,57	14,76	15,57	16,96	17,90	17,92	17,92	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		√
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,38	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		√
Misi 3 : Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Syariat Islam dalam Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat															
3.1	Terwujudnya Kehidupan Sosial Keagamaan yang Islami		Indeks Pembangunan Syariah (IPS)	Indeks	83,47	85,94	86,35	86,76	87,17	87,58	88,00	88,00	Dinas Syariat Islam	√	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	N/A	72,30	75,92	79,71	83,70	87,88	92,28	92,28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	
3.1.1		Meningkatnya Fungsi Masjid sebagai Tempat Ibadah dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	Persentase Masjid yang Aktif sesuai dengan Fungsi Masjid	Persen	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	90,00	90,00	Dinas Syariat Islam		√
3.1.2		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Nilai-nilai Syariat Islam	Persentase Majelis Taklim Gampong yang Aktif	Persen	N/A	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Syariat Islam		√
3.2	Terwujudnya Sistem Kehidupan yang Menjamin Tumbuh		Jumlah Gampong yang Sesuai dengan Syariat Islam	Jumlah Gampong	48	53	58	63	68	73	75	75	Dinas Syariat Islam	√	
			Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	N/A	55,30	60,30	65,30	70,30	75,30	75,50	75,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
	Kembang Generasi Masa Depan yang Islami		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	N/A	60,00	62,00	65,00	68,00	70,00	75,00	75,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	√	
3.2.1		Meningkatnya Kualitas dan Peran Dayah	Jumlah Dayah yang Terakreditasi	Dayah	53	70	70	75	75	80	80	80	Dinas Pendidikan Dayah		√
			Jumlah Dayah yang Aktif dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	Dayah	N/A	5	10	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan Dayah		√
			Persentase Dayah Mandiri	Persen	25,00	31,00	31,25	31,50	31,75	32,00	32,25	32,25	Dinas Pendidikan Dayah		√
3.2.2		Terciptanya Lingkungan Sosial Kehdupan Masyarakat yang Islami	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	583	400	320	256	204	163	130	130	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah		√
			Jumlah Pelanggaran Qanun Ketentraman dan Ketertiban	Kasus	N/A	300	275	250	225	200	175	175	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah		√
3.2.3		Terwujudnya Sumber Daya Manusia di Bidang Keagamaan yang Berdaya Saing	Jumlah Qori Internasional	Orang	N/A	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Syariat Islam		√
Misi 4 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Aceh Barat															
4.1	Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar		Persentase Cakupan Pelayanan Dasar	Persen	66,23	66,34	66,43	66,52	66,61	66,70	66,75	66,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	
			Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	N/A	83,79	83,80	83,90	84,10	84,20	84,30	84,30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
4.1.1		Mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan	9	9	9	9	8	8	8	8	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman		√
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	13,01	14,31	15,61	16,91	17,21	18,51	18,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		√
4.1.2		Meningkatnya kemitraan dalam Pemenuhan Layanan Dasar	Jumlah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	KPBU	N/A	1	1	1	1	1	1	1	Bagian Pemerintahan Setdakab		√
4.1.3		Tersedianya Infrastruktur Layanan Perkotaan	Jumlah Panjang Ruas Jalan yang Memiliki Lampu Penerangan	KM	N/A	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√
			Jumlah Panjang Ruas Jalan yang Memiliki Pedestrian	KM	0,90	0,56	0,56	0,58	0,70	0,70	0,75	0,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		√
			Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh	N/A	1922	1925	1927	1929	1930	1931	1931	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√
			Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	0,91	1,65	1,77	1,94	2,20	2,45	2,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		√
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	68,48	69,49	70,5	71,51	72,52	73,53	73,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		√
			Persentase wilayah yang memiliki jaringan internet minimal 4G	Persen	N/A	74,00	74,00	75,00	75,00	76,00	76,00	76,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
4.2	Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian		Rasio Daerah Irigasi yang Terlayani oleh Jaringan irigasi	Rasio	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	
4.2.1		Meningkatnya Jaringan irigasi untuk Sumber Daya Air Pertanian	Luasan Daerah Irigasi yang Terlayani oleh Jaringan irigasi	Ha	1891	1941	1993	2103	2126	2226	2259	2259	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		√
Misi 5 : Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan Hidup															
5.1	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Optimal dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	63,58	64,76	65,94	67,12	68,3	69,48	69,48	69,48	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	√	
			Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI)	Indeks	54,00	76,10	98,20	120,30	142,40	164,50	164,50	164,50	Dinas Kelautan dan Perikanan	√	
			PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (ADHK)	Milyar Rupiah	2087,36	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2700	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	√	
5.1.1		Meningkatnya Pemanfaatan Lahan untuk Pengembangan Sumber Daya Alam yang Mendukung Perekonomian Masyarakat	Jumlah Lahan Baku Sawah	Ha	9821,81	9821,81	9901,81	9981,81	10061,81	10141,81	10221,81	10221,81	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		√
5.1.2		Meningkatnya Diversifikasi Produk Pertanian	Jumlah Variasi Komoditi Pertanian	Komoditi	19	20	21	22	23	24	25	25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
5.1.3		Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan serta Mendorong Hilirisasi Komoditi Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	119,25	120,00	121,00	122,00	123,00	124,00	125,00	125,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		√
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	104,75	105,00	105,50	106,00	106,50	107,12	107,15	107,15	Dinas Kelautan dan Perikanan		√
			Jumlah Produk Industri Hilir Komoditi Pertanian/ Perikanan/ Perkebunan/ Peternakan yang Dikembangkan	Produk	N/A	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		√
5.1.4		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,27	78,50	78,80	79,10	79,40	79,70	79,80	79,80	Dinas Pangan		√
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	N/A	5,81	5,75	5,50	5,25	5,10	4,45	4,45	Dinas Pangan		√
5.2	Terwujudnya Kepastian Keleslestarian Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,72	77,00	77,20	77,40	77,60	77,80	77,82	77,82	Dinas Lingkungan Hidup	√	
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,592	0,590	0,600	0,610	0,620	0,630	0,640	0,640	Dinas Lingkungan Hidup	√	
			Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	N/A	29,56	33,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00	Dinas Lingkungan Hidup	√	
			Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persen	N/A	18,54	19,02	20,50	22,00	24,00	25,00	25,00	Dinas Lingkungan Hidup	√	
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	N/A	19,55	20,30	22,00	24,00	26,00	28,00	28,00	Dinas Lingkungan Hidup	√	
5.2.1		Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Ketahanan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	62,69	62,79	62,89	62,99	63,09	63,19	63,29	63,29	Dinas Lingkungan Hidup		√
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	173,76	134,60	133,10	131,60	130,10	128,60	128,00	128,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
		terhadap Bencana	Jumlah Desa yang Melakukan Pengolahan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, Recycle, Refused, dan Rot (5R)	Desa	N/A	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup		√
			Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,45	0,46	0,47	0,51	0,56	0,59	0,60	0,60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		√
			Persentase sampah yang tertangani	Persen	N/A	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	79,50	Dinas Lingkungan Hidup		√
			Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	Persen	N/A	29,07	30,10	30,35	35,00	40,00	50,00	50,00	Dinas Lingkungan Hidup		√
Misi 6 : Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Aceh															
6.1	Terlestarikannya Budaya Aceh		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	52,91	55,30	60,30	65,30	70,30	75,30	75,50	75,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	
6.1.1		Meningkatnya Keberdayaan Pelaku Seni dan Budaya	Jumlah Event yang Diikuti Pelaku Seni dan Budaya	Jumlah Event	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√
			Jumlah Sanggar Seni yang Representatif dan Aktif	Sanggar	25	26	27	28	29	30	31	31	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√
6.1.2		Optimalnya Peran Kelembagaan dan Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Lembaga yang Bekerjasama dalam Pengembangan Kebudayaan	Lembaga	N/A	4	5	6	7	8	9	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		√
6.1.3		Lestarinya Adat Istiadat dan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar	Cagar Budaya	5	7	9	11	13	15	15	15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
			Jumlah Tamu Wisatawan	Ribu Orang	N/A	179	180	181	182	183	184	184	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√
Misi 7 : Meningkatkan Peran Pemuda dalam Upaya Mewujudkan Percepatan Pembangunan															
7.1	Terwujudnya Peningkatan Pembangunan di Bidang Kepemudaan		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	56,33	56,35	56,37	56,39	56,41	56,43	56,50	56,50	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	√	
7.1.1		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda	Jumlah Pemuda yang Dibina	OKP	N/A	15	17	19	21	23	23	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√
7.1.2		Memperkuat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Sosial Ekonomi	Persentase Wirausaha Muda	Persen	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	71,00	71,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√
			Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio	N/A	3,33	3,40	3,50	3,60	3,80	3,90	3,90	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√
7.2	Terwujudnya Peningkatan Pembangunan di Bidang Olahraga		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,327	0,330	0,340	0,340	0,350	0,350	0,360	0,360	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	√	
7.2.1		Meningkatnya Prestasi Pemuda	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Bidang Olahraga di tingkat Nasional	Orang	9	11	14	18	23	28	30	30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√
			Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Bidang Non Olahraga di tingkat Nasional	Orang	15	17	20	24	29	35	40	40	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		√

3.2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mengukur pencapaian visi dan misi di atas, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan utama selama periode RPJM Kabupaten Aceh Barat 2025-2029, antara lain:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan/ Fokus Pembangunan				
Tahap I	**Tahap II**	**Tahap III**	**Tahap IV**	**Tahap V**
2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Penguatan Pondasi Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Keberdayaan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan dan Pendidikan serta mewujudkan Swasembada Pangan	Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Daya Saing Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Merata di berbagai Sektor Pembangunan	Mewujudkan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Sejahtera dan berdaya Saing	Mewujudkan Aceh Barat yang Mandiri dan Unggul, Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Politik untuk Menjaga Kesinambungan Pembangunan

Tabel 3.5 Cascading Program Prioritas RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
VISI : TERWUJUDNYA ACEH BARAT MAJU MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM																				
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Guna Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat																				
1.1	Terwujudnya Percepatan Transformasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan			Persen	17,63	17,3		17		16,7		16,4		16,1		15,8		
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	75,45	75,61		76,31		77,02		77,72		77,92		78		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Usia Harapan Hidup (UHH)			Tahun	72,03	72,41		72,79		73,07		73,45		73,54		73,6		Dinas Kesehatan
			Harapan Lama Sekolah			Tahun	14,93	14,95		14,97		14,99		15,02		15,03		15,04		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun			Tahun	9,99	10,22		10,23		10,24		10,25		10,26		10,27		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan			Persen	42,9	44		45		46		47		48		49		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan			Persen	17,37	18,5		19,5		20,5		21,5		22,5		23,5		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.1.1		Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)			Angka	112	105		100		95		90		85		80		Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting pada balita			Persen	27,65	26,55		25,45		24,35		23,45		23,24		22,01		Dinas Kesehatan
			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Kasus	128	120		115		110		105		100		90		Dinas Kesehatan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
			Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)			Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			Angka	14	12		10		8		6		4		3		Dinas Kesehatan
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persen	32,66			30,97	306.712.221.755,00	30	311.214.214.109,22	30	304.714.515.045,30	30	309.745.026.329,76	30	314.897.713.776,43	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persen	20,2			16	45.904.076.286,00	14	47.908.376.186,00	12	45.255.119.105,00	10	47.166.493.211,00	10	49.944.787.955,00	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persen	50			60	219.733.000,00	70	315.733.000,00	75	179.720.000,00	77	290.733.000,00	80	325.733.000,00	Dinas Kesehatan
				Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	NA			94	1.353.899.541,00	96	1.398.377.615,00	98	1.295.518.400,00	100	1.350.583.984,00	100	1.412.106.657,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Meningkatnya Pengembamnga n Kompetensi ASN															Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN															Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
					Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN															Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.1.2		Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif	Jumlah Lulusan SMP yang Memiliki Kemampuan Bahasa Inggris dengan Score TOEFL Minimal 350			Persen	N/A	25		35		45		55		65		67		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rapor Mutu Pendidikan			Persen		65,05		67,25		69,45		71,25		73,15		75,2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Skor literasi SD			Persen	46,34	47		47,34		48		48,34		46,34		48,36		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Skor Numerasi SD			Persen	35,35	37,66		38,66		39,66		40,66		41,66		42,66		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Skor literasi SMP			Persen	50,74	56,52		57,22		57,52		58,25		58,52		58,65		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Skor Numerasi SMP			Persen	49,85	56,05		56,25		56,45		57,05		57,15		57,2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			Indeks	55,37	65		67		70		72		72,5		73		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persen	98,64			99	36.581.260.810,00	99,20	41.086.588.148,00	99,40	34.760.734.420,00	99,60	39.596.217.010,00	99,80	44.633.054.054,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks	N/A			60	10.317.300,00	62	10.317.300,00	65	10.317.300,00	67	10.317.300,00	70	10.317.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persen	2			3	1.300.846.267,85	3	1.405.259.181,38	3	1.256.800.276,83	3	1.366.915.335,91	3	1.479.692.622,07	Dinas Perhubungan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
1.1.3		Memperluas Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase Belanja Pemerintah untuk Perlindungan Sosial			Persen	N/A	0,012		0,02		0,03		0,04		0,05		0,06		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Belanja CSR untuk Perlindungan Sosial			Persen	0,35	0,51		0,6		0,7		0,8		0,9		0,93		Bappeda
				Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terindungi	Persen	76,92			100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	Dinas Transnaker dan Tenaga Kerja
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	10,79254373			83	107.558.000,00	86	127.558.000,00	89	100.558.000,00	90	123.558.000,00	92	143.558.000,00	Dinas Sosial
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persen	45			46	13.353.176.082,30	47	13.641.359.273,19	48	13.258.660.792,65	49	13.416.195.511,18	50	13.679.751.675,42	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
1.1.4		Meningkatkan Aksesibilitas dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Persen	86,7					87,2		87,3		87,45		87,48		DP3AKB
			Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang Berhasil			Kelompok	50					63		65		67		70		DP3AKB
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Ton/Ha	6,3			6,5	1.000.000.000,00	6,7	1.102.000.000,00	6,9	945.416.356,25	7,1	1.103.000.000,00	7,3	1.202.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
							9611			9899	1.000.000.000,00	10196	1.084.000.000,00	10502	1.020.000.000,00	10817	1.126.000.000,00	11142	1.180.000.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	802,39			810	4.000.000.000,00	820	4.100.000.000,00	830	3.950.000.000,00	840	4.050.000.000,00	850	4.080.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	unit usaha	N/A			3	220.000.000,00	4	230.000.000,00	5	210.000.000,00	6	215.000.000,00	7	220.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ton	71920			34923,074	500.000.000,00	34950	508.000.000,00	35000	500.000.000,00	35050	510.000.000,00	35100	500.000.000,00	Dinas Pangan
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persen	5			6-6,5	230.000.000,00	6,5-7	231.000.000,00	7-7,5	212.367.101,28	7,5-8	213.000.000,00	7,5-8	215.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persen	5,98			5	349.377.551,93	5	350.000.000,00	5	320.000.000,00	5	330.000.000,00	5	335.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	10,79254373			83	107.558.000,00	86	127.558.000,00	89	100.558.000,00	90	123.558.000,00	92	143.558.000,00	Dinas Sosial
1.1.5		Mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak	Persentase Gampong Ramah Anak			Persen	1,55	2,18		3,12		4,67		6,23		7,79		8		DP3AKB
			Jumlah Anak Terlantar dan Rentan Terlantar yang Terpenuhi Layanan Dasar			Orang	113	110		110		100		100		90		90		Dinas Sosial

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
			Persentase Sekolah Ramah Anak Jenjang SD/SMP			Persen	N/A	7,38		9,23		11,07		12,92		14,76		7,85		DP3AKB
1.2			Pertumbuhan Ekonomi			Persen	7,5	4,8-5,7		5,1-6,0		5,3-6,2		5,5-6,4		5,7-6,6		5,9-6,8		Bappeda
			PDRB/kapita			Juta Rupiah	67,94 (ADHB)	70 (ADHB)		73 (ADHB)		76 (ADHB)		79 (ADHB)		81,34 (ADHB)		81,50 (ADHB)		Bappeda
							41,89 (ADHK)	43 (ADHK)		44 (ADHK)		45 (ADHK)		46 (ADHK)		47 (ADHK)		48 (ADHK)		
1.2.1		Meningkatkan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka			Persen	5,58	5,4		5,3		5,2		5,1		5		4,9		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Pertumbuhan UMKM/IKM			Persen	2,17	2,4		2,6		2,8		3		3,2		3,35		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkualitas			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	802,39			810	4.000.000.000,00	820	4.100.000.000,00	830	3.950.000.000,00	840	4.050.000.000,00	850	4.080.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20105201			20150	1.121.647.950,00	20250	1.142.130.314,24	20350	1.124.452.926,30	20450	1.153.442.321,65	20550	1.256.469.224,12	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	unit usaha	N/A			3	220.000.000,00	4	230.000.000,00	5	210.000.000,00	6	215.000.000,00	7	220.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persen	5,98			5	349.377.551,93	5	350.000.000,00	5	320.000.000,00	5	330.000.000,00	5	335.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Ton/Ha	6,3			6,5	1.000.000.000,00	6,7	1.102.000.000,00	6,9	945.416.356,25	7,1	1.103.000.000,00	7,3	1.202.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Dinas Perkebunan Dan Peternakan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Ha	82298,22			82500	900.000.000,00	82600	1.000.000.000,00	82700	900.000.000,00	82800	1.100.000.000,00	82900	1.151.502.743,70	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
							16518,16			17013,705	2.934.927.245,98	17524,116	2.980.000.000,00	18049,839	2.850.000.000,00	18591,335	2.900.000.000,00	19149,075	3.000.000.000,00	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Ha	14026,16			14500	100.000.000,00	15000	120.000.000,00	15500	80.000.000,00	16000	90.000.000,00	16500	117.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Ton/Ha	6,3			6,5	1.000.000.000,00	6,7	1.102.000.000,00	6,9	945.416.356,25	7,1	1.103.000.000,00	7,3	1.202.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
							9611			9899	1.000.000.000,00	10196	1.084.000.000,00	10502	1.020.000.000,00	10817	1.126.000.000,00	11142	1.180.000.000,00	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	37,04			40	1.221.184.290,00	45	1.207.476.608,00	50	1.159.717.512,00	55	1.217.517.511,00	60	1.274.616.300,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio	N/A			60	455.000.000,00	65	480.000.000,00	70	475.000.000,00	75	486.874.514,00	80	506.874.514,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persen	18,4			20	80.000.000,00	23	80.000.000,00	25	80.000.000,00	27	80.000.000,00	30	80.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Pekerja	Persen	76,92			100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Rupiah (Milyar)	1616			500	50.000.000,00	510	52.000.000,00	520	49.000.000,00	530	51.000.000,00	540	55.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Perusahaan	4			1	150.000.000,00	1	152.330.217,75	1	140.000.000,00	1	170.000.000,00	1	188.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	N/A			20	322.699.719,46	30	392.306.789,14	40	294.572.682,80	50	369.280.633,69	60	447.099.500,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
1.2.2		Meningkatkan Produksi serta Nilai Tambah Produk/Komoditi	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif			Orang	10	20		30		35		40		45		46		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan			Persen	1,81	2,1		2,4		2,7		3		3,2		3,2		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif															
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam															

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persen	9,41			100	90.000.000,00	100	95.000.000,00	100	80.000.000,00	100	85.000.000,00	100	87.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persen	0			2	50.000.000,00	2	65.000.000,00	2	68.000.000,00	2	68.500.000,00	2	70.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.2.3		Mewujudkan Stabilitas Ekonomi	Inflasi			Persen	3,29	2,5- 3,5		2,5- 3,5		2,5- 3,5		2,5- 3,5		2,5- 3,5		2,5- 3,5		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Misi 2 : Transformasi Tata Kelola Pemerintahan guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Transparan																				
2.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Transparan		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			Indeks	83,3	85		86		87		88		89		90		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)			Indeks	69,23	71		72		73		74		75		75		Inspektorat
			Indeks Reformasi Hukum			Indeks	55,99	55,99		56,99		57,49		57,99		58,48		58,5		Bagian Hukum Setdakab
			Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	B	B		BB		BB		A		A		A		Bagian Organisasi Setdakab
2.1.1		Meningkatnya Tranparansi Pengelolaan Anggaran	Opini BPK			Opini	N/A	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Indeks Pencegahan Korupsi MCP			Indeks	88,52	89		89,25		89,5		89,75		90		91		Inspektorat
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			B			B	23.360.164.792,00	B	23.360.164.792,00	B	23.360.164.792,00	B	23.360.164.792,00	B	23.360.164.792,00	Bagian Organisasi Setdakab

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks	N/A			2,5	150.000.000,00	2,7	150.000.000,00	2,9	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3,2	150.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.1.2		Menngkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			Persen	100	100		100		100		100		100		100		Bappeda
2.2			Indeks Pelayanan Publik			Indeks	4,14	4,14		4,2		4,26		4,32		4,36		4,36		Bagian Organisasi Setdakab
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)			Indeks	3,04	3,14		3,24		3,34		3,44		3,54		3,64		Bappeda
2.2.1		Meningkatkan Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN			Indeks	71,93	72,13		72,33		72,55		72,75		72,95		73,1		BKPSDM
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Melayani			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persen	N/A			25	1.000.000.000,00	25	1.100.000.000,00	25	1.000.000.000,00	25	1.100.000.000,00	25	1.200.000.000,00	BKPSDM
				Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	N/A			94	1.353.899.541,00	96	1.398.377.615,00	98	1.295.518.400,00	100	1.350.583.984,00	100	1.412.106.657,00	BKPSDM
					Meningkatnya Pengembamngan Kompetensi ASN															BKPSDM
					Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN															BKPSDM
					Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN															BKPSDM

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
2.2.2		Meningkatkan Kualitas Layanan Pemeriintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Indeks	91,81	91,83		91,85		91,87		91,89		91,91		91,95		Bagian Organisasi Setdakab
			Indeks SPBE			Indeks	2,68	2,74		2,93		2,96		2,99		3		3,01		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai	B			B	23.360.164.792,00	B	23.360.164.792,00	B	23.360.164.792,00	B	23.360.164.792,00	B	23.360.164.792,00	Bagian Organisasi Setdakab
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	N/A			90	1.250.000.000,00	91	1.250.000.000,00	92	1.200.000.000,00	93	1.250.000.000,00	94	1.250.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persen	32,66			30,97	306.712.221.755,00	30	311.214.214.109,22	30	304.714.515.045,30	30	309.745.026.329,76	30	314.897.713.776,43	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Kategori	2,66			2,8	2.350.000.000,00	2,9	2.350.000.000,00	3,1	2.350.000.000,00	3,3	2.350.000.000,00	3,5	2.350.000.000,00	Bagiah Hukum Setdakab
2.2.3		Meningkatkan Inovasi Pelayanan bagi Masyarakat	Indeks Inovasi Daerah			Indeks	59,19	60,2		60,4		60,6		60,8		70		71		Bappeda
2.3	Terwujudnya Peran Serta Swasta dalam		Jumlah Perusahaan Pelaksana CSR			Perusahaan	12	13		14		15		16		17		17		Bappeda

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
2.3.1	Pembangunan	Meningkatnya Anggaran Swasta dalam Pembangunan	Jumlah Anggaran CSR			Milyar Rupiah	55,33	50,91		51,5		52		52,5		53		55		Bappeda
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100			100	635.000.000,00	100	685.000.000,00	100	626.000.000,00	100	650.000.000,00	100	660.000.000,00	Bappeda
					Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Insfratruktur dan Kewilayahan															Bappeda
					Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA															Bappeda
2.4	Terwujudnya Sinergitas Pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dan		Persentase APBG yang Selaras Vengan Visi Misi Bupati			Persen	N/A	60		65		70		75		80		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
			Persentase Desa Mandiri			Persen	6,521739	7,764		9,006		9,938		11,18		12,42		12,45		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
2.4.1	Pemerintah Gampong	Meningkatkan Kesetaraan RKPG dan RKPD	Persentase Keselarasan Prioritas Pembangunan di Gampong dan di Kabupaten			Persen	N/A	50		60		70		80		85		86		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa															Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	N/A			20	322.699.719,46	30	392.306.789,14	40	294.572.682,80	50	369.280.633,69	60	447.099.500,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persen	32,66			30,97	306.712.221.755,00	30	311.214.214.109,22	30	304.714.515.045,30	30	309.745.026.329,76	30	314.897.713.776,43	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Persen	N/A			20	500.000.000,00	30	500.000.000,00	40	500.000.000,00	50	500.000.000,00	60	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2.5	Terwujudnya Kemandirian Fiskal		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah			Indeks	0,936	0,936		0,976		0,996		1,016		1,036		1,05		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.5.1		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan			10,85	Persen	13,57		14,76		15,57		16,96		17,9		17,92		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persen	10,8			11,5	1.421.449.770,00	12	1.800.000.000,00	12,5	1.450.000.000,00	13	1.700.000.000,00	13,5	2.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
					Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan															Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
					Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital															Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Misi 3 : Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Syariat Islam dalam Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat																				
3.1	Terwujudnya Kehidupan Sosial Keagamaan yang Islami		Indeks Pembangunan Syariah (IPS)			Indeks	83,47	85,94		86,44		86,94		87,44		87,94		88		Dinas Syariat Islam
3.1.1		Meningkatkan Fungsi Masjid sebagai Tempat Ibadah dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	Persentase Masjid yang Aktif sesuai dengan Fungsi Masjid			Persen	75	77		79		81		83		85		90		Dinas Syariat Islam
				Program Syariat Islam Aceh	Meningkatkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan, Dakwah, dan Pembinaan Syariat Islam	Persen	65			70	4.489.076.429,00	72	4.604.068.082,00	74	4.442.610.250,00	76	4.566.028.616,00	78	4.694.586.250,00	Dinas Syariat Islam
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	N/A			20	322.699.719,46	30	392.306.789,14	40	294.572.682,80	50	369.280.633,69	60	447.099.500,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
				Program Pendidikan Dayah	Peningkatan Manajemen dan Tata Kelola Dayah	Persen	56			67,021277	4.307.707.869,00	71,276596	4.411.740.963,00	76,595745	4.305.912.448,00	81,914894	4.418.196.985,00	87,234043	4.535.157.164,00	Dinas Pendidikan Dayah
3.1.2		Meningkatkan Pemahaman Masyarakat	Persentase Majelis Taklim Gampong yang Aktif			Persen	N/A	78		81		84		87		90		90		Dinas Syariat Islam

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
		tentang Nilai-nilai Syariat Islam																		
				Program Syariat Islam Aceh	Meningkatkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan, Dakwah, dan Pembinaan Syariat Islam	Persen	65			70	4.489.076.429,00	72	4.604.068.082,00	74	4.442.610.250,00	76	4.566.028.616,00	78	4.694.586.250,00	Dinas Syariat Islam
3.2	Terwujudnya Sistem Kehidupan yang Menjamin Tumbuh Kembang Generasi masa Depan yang Islami		Jumlah Gampong yang Sesuai dengan Syariat Islam			Jumlah Gampong	48	53		58		63		68		73		75		Dinas Syariat Islam
3.2.1		Meningkatkan Kualitas dan Peran Dayah	Jumlah Dayah yang Terakreditasi			Unit	53	58		63		68		72		77		79		Dinas Pendidikan Dayah
			Jumlah Dayah yang Aktif dalam Kehidupan Sosial Masyarakat			Dayah	N/A	5		10		10		10		10		10		Dinas Pendidikan Dayah
				Program Pendidikan Dayah	Peningkatan Manajemen dan Tata Kelola Dayah	Persen	56			67,021277	4.307.707.869,00	71,276596	4.411.740.963,00	76,595745	4.305.912.448,00	81,914894	4.418.196.985,00	87,234043	4.535.157.164,00	Dinas Pendidikan Dayah
3.2.2		Menciptakan Lingkungan Sosial Kehdupan Masyarakat yang Islami	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam			Kasus	79	74		69		64		59		54		50		Satpol PP dan WH
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Persen	N/A			20	500.000.000,00	30	500.000.000,00	40	500.000.000,00	50	500.000.000,00	60	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
3.2.3		Mewujudkan Sumber Daya	Jumlah Qori Internasional			Orang	N/A	1		1		1		1		1		1		Dinas Syariat Islam

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
		Manusia di Bidang Keagamaan yang Berdaya Saing																		
				Program Syariat Islam Aceh	Meningkatkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan, Dakwah, dan Pembinaan Syariat Islam	Persen	65			70	4.489.076.429,00	72	4.604.068.082,00	74	4.442.610.250,00	76	4.566.028.616,00	78	4.694.586.250,00	Dinas Syariat Islam
Misi 4 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Aceh Barat																				
4.1	Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar		Persentase Cakupan Pelayanan Dasar			Persen	66,23	66,34		66,43		66,52		66,61		66,7		68,75		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.1		Mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh			Kawasan	9	9		9		9		8		8		8		Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
				Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Persen	57,83			58	49.884.575.550,00	58,3	50.936.010.948,37	58,6	47.128.104.854,05	59	48.070.666.951,13	59,3	48.846.087.854,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persen	68,14			70	7.350.622.000,00	71	7.425.111.377,32	72	7.524.423.416,65	73	7.674.911.884,98	74	7.798.714.766,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persen	90,36			91	5.327.222.000,00	92	5.381.206.744,37	93	5.453.181.235,89	94	5.562.244.860,60	95	5.651.968.619,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persen	87			88	5.595.750.000,00	89	5.652.455.940,42	90	5.728.058.432,84	91	5.842.619.601,50	92	5.936.866.044,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Hektar	0			0	38.291.568.634,23	0	38.679.605.879,46	0	39.349.137.351,90	0	39.795.400.059,51	0	40.620.874.404,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.2		Meningkatkan kemitraan dalam Pemenuhan Layanan Dasar	Jumlah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)			KPBU	N/A	1		1		1		1		1		1		Bagian Pemerintahan Setdakab
4.1.3		Tersedianya Infrastruktur Layanan Perkotaan	Jumlah Panjang Ruas Jalan yang Memiliki Lampu Penerangan			KM	N/A	3		3		3		3		3		3		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Panjang Ruas Jalan yang Memiliki Pedestrian			KM	0,9	0,56		0,56		0,58		0,7		0,7		0,75		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persen	68,14			70	7.350.622.000,00	71	7.425.111.377,32	72	7.524.423.416,65	73	7.674.911.884,98	74	7.798.714.766,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persen	45			46	13.353.176.082,30	47	13.641.359.273,19	48	13.258.660.792,65	49	13.416.195.511,18	50	13.679.751.675,42	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
4.2	Terwujudnya Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian		Persentase Cakupan Pelayanan Irigasi Lhok Guci			Persen	14	14,2		14,4		14,6		14,8		15		15,3		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.2.1		Meningkatkan Jaringan irigasi untuk Sumber Daya Air Pertanian	Indeks Luas Areal (IA)			Indeks	0,291	0,295		0,296		0,297		0,298		0,299		0,3		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Hektar	0			0	38.291.568.634,23	0	38.679.605.879,46	0	39.349.137.351,90	0	39.795.400.059,51	0	40.620.874.404,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 5 : Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan Hidup																				
5.1	Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Optimal dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Ekonomi Hijau Daerah			Indeks	63,58	64,76		65,94		67,12		68,3		69,48		69,48		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI)			Indeks	54	76,1		98,2		120,3		142,4		164,5		164,5		Dinas Kelautan dan Perikanan
			PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (ADHK)			Milyar Rupiah	2087,36	2200		2300		2400		2500		2600		2700		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
5.1.1		Meningkatkan Pemanfaatan Lahan untuk Pengembangan Sumber Daya Alam yang Mendukung Perekonomian Masyarakat	Jumlah Lahan yang Dimanfaatkan untuk Persawahan/ Perkebunan/ Pengembalaan/ Budidaya Perairan			Ha	82298,22	82400		82500		82600		82700		82800		82900		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Komoditi	19			20	983.284.939,11	21	1.150.000.000,00	22	900.000.000,00	23	952.500.000,00	24	1.200.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
							100			100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	100	71.000.000,00	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
5.1.2		Meningkatkan Diversifikasi Produk Pertanian	Jumlah Variasi Komoditi Pertanian			Komoditi	19	20		21		22		23		24		24		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Komoditi	19			20	983.284.939,11	21	1.150.000.000,00	22	900.000.000,00	23	952.500.000,00	24	1.200.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
							100			100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	100	71.000.000,00	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
5.1.3		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan serta Mendorong Hilirisasi Komoditi Pertanian	NTP			Indeks	119,25	120		121		122		123		124		125		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			NTN			Indeks	104,75	105		105,5		106		106,5		107,1		107,2		Dinas Kelautan dan Perikanan
			Jumlah Produk Industri Hilir Komoditi Pertanian/ Perikanan/ Perkebunan/ Peternakan yang Dikembangkan			Produk	N/A	2		2		2		2		2		2		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	unit usaha	N/A			3	220.000.000,00	4	230.000.000,00	5	210.000.000,00	6	215.000.000,00	7	220.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Perencanaan dan	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persen	5			6-6,5	230.000.000,00	6,5-7	231.000.000,00	7-7,5	212.367.101,28	7,5-8	213.000.000,00	7,5-8	215.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Pembangunan Industri																Usaha Kecil Menengah
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20105201			20150	1.121.647.950,00	20250	1.142.130.314,24	20350	1.124.452.926,30	20450	1.153.442.321,65	20550	1.256.469.224,12	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.4		Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)			Indeks	78,27	78,5		78,8		79,1		79,4		79,7		79,8		Dinas Pangan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Ton/Ha	6,3			6,5	1.000.000.000,00	6,7	1.102.000.000,00	6,9	945.416.356,25	7,1	1.103.000.000,00	7,3	1.202.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
							9611			9899	1.000.000.000,00	10196	1.084.000.000,00	10502	1.020.000.000,00	10817	1.126.000.000,00	11142	1.180.000.000,00	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Ha	82298,22			82500	900.000.000,00	82600	1.000.000.000,00	82700	900.000.000,00	82800	1.100.000.000,00	82900	1.151.502.743,70	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
							16518,16			17013,705	2.934.927.245,98	17524,116	2.980.000.000,00	18049,839	2.850.000.000,00	18591,335	2.900.000.000,00	19149,075	3.000.000.000,00	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Ha	14026,16			14500	100.000.000,00	15000	120.000.000,00	15500	80.000.000,00	16000	90.000.000,00	16500	117.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20105201			20150	1.121.647.950,00	20250	1.142.130.314,24	20350	1.124.452.926,30	20450	1.153.442.321,65	20550	1.256.469.224,12	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Konsusmi Ikan oleh Masyarakat	unit usaha	N/A			3	220.000.000,00	4	230.000.000,00	5	210.000.000,00	6	215.000.000,00	7	220.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persen	5			6-6,5	230.000.000,00	6,5-7	231.000.000,00	7-7,5	212.367.101,28	7,5-8	213.000.000,00	7,5-8	215.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persen	5,98			5	349.377.551,93	5	350.000.000,00	5	320.000.000,00	5	330.000.000,00	5	335.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam															Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persen	9,41			100	90.000.000,00	100	95.000.000,00	100	80.000.000,00	100	85.000.000,00	100	87.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persen	0			2	50.000.000,00	2	65.000.000,00	2	68.000.000,00	2	68.500.000,00	2	70.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5.2	Terwujudnya Kepastian Keleslestaria		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	76,72	77		77,2		77,4		77,6		77,8		77,82		Dinas Lingkungan Hidup

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
	n Lingkungan Hidup		Indeks Ketahanan Daerah			Indeks	0,45	0,46		0,47		0,51		0,56		0,59		0,6		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.2.1		Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lahan			Indeks	62,69	78,19		79,2		79,4		79,6		79,8		79.85		Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Risiko Bencana (IRB)			Indeks	173,76	134,6		133,1		131,6		130,1		128,6		128		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah Desa yang Melakukan Pengolahan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, Recycle, Refused, dan Rot (5R)			Desa	N/A	1		1		1		1		1		1		Dinas Lingkungan Hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Evektifitas Kajian Lingkungan Hdiup Memitigasi Dampak KRP	Persen	63			65	209.460.200,00	67	212.486.899,89	68	208.237.161,89	71	211.485.661,62	73	214.869.432,20	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	100			100	345.347.922,00	100	350.338.199,47	100	340.331.435,48	100	345.640.605,88	100	351.170.855,57	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kawasan	1			1	348.553.456,00	1	353.590.053,44	1	330.292.984,94	1	335.445.555,50	1	340.812.684,39	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan															Dinas Lingkungan Hidup

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Beracun (Limbah B3)	Beracun (Limbah B3)															
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Ditertibkan	Persen	28			30	202.646.883,60	35	205.575.131,07	40	201.463.628,45	45	204.606.461,05	50	207.880.164,43	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa dan/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100			100	67.426.300,00	100	68.400.610,04	100	67.032.597,83	100	68.078.306,36	100	69.167.559,26	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persen	86			90	5.327.982.380,00	95	5.404.971.725,39	100	5.296.872.290,88	100	5.379.503.498,62	100	5.518.256.540,89	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	N/A			20	322.699.719,46	30	392.306.789,14	40	294.572.682,80	50	369.280.633,69	60	447.099.500,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Desa	1			2		3	47.577.515,74	4		5	51.363.961,63	5	52.185.785,02	Dinas Lingkungan Hidup

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	85			85	1.236.118.471,91	85	1.342.498.815,67	90	1.274.282.542,27	90	1.346.161.349,93	100	1.397.699.931,53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saatn Tanggap Darurat															Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Bencana															Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persen	100			100	6.948.816.115,00	100	7.049.226.507,86	100	6.907.083.215,76	100	7.058.396.865,26	100	7.239.344.703,65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran															Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persen	87			88	5.595.750.000,00	89	5.652.455.940,42	90	5.728.058.432,84	91	5.842.619.601,50	92	5.936.866.044,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 6 : Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Aceh																				
6.1	Terlestarikannya Budaya Aceh		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)			Indeks	52,91	55,3		60,3		65,3		70,3		75,3		75,5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.1.1		Meningkatkan Keberdayaan Pelaku Seni dan Budaya	Jumlah Event yang Diikuti Pelaku Seni dan Budaya			Jumlah Event	4	4		4		4		4		4		4		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Jumlah Sanggar Seni yang Representatif dan Aktif			Sanggar	25	26		27		28		29		30		31		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Program Pengembangan Kebudayaan	Menngkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persen	N/A			50	557.729.950,00	60	557.729.950,00	65	557.729.950,00	70	557.729.950,00	75	557.729.950,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persen	N/A			50	173.204.150,00	60	173.204.150,00	65	173.204.150,00	70	173.204.150,00	75	173.204.150,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
6.1.2		Mengoptimalkan Peran Kelembagaan dan Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Lembaga yang Bekerjasama dalam Pengembangan Kebudayaan			Lembaga	28	29		30		31		32		33		3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kebudayaan	Menngkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persen	N/A			50	557.729.950,00	60	557.729.950,00	65	557.729.950,00	70	557.729.950,00	75	557.729.950,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.1.3		Melindungi Adat Istiadat dan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar			Cagar Budaya	5	7		9		11		13		15		15		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Tata Kelola Museum															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 7 : Meningkatkan Peran Pemuda dalam Upaya Mewujudkan Percepatan Pembangunan																				
7.1	Terwujudnya Peningkatan Pembangunan di Bidang Kepemudaan		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)			Indeks	56,33	56,35		56,37		56,39		56,41		56,43		56,5		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
7.1.1		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemuda	Jumlah Pemuda yang Dibina			OKP	N/A	15		17		20		24		29		29		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio	N/A			60	455.000.000,00	65	480.000.000,00	70	475.000.000,00	75	486.874.514,00	80	506.874.514,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	N/A			20	322.699.719,46	30	392.306.789,14	40	294.572.682,80	50	369.280.633,69	60	447.099.500,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
7.1.2		Memperkuat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Sosial Ekonomi	Persentase Wirausaha Muda			Persen	N/A	50		55		60		65		70		71		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persen	6,3			6,5	1.000.000.000,00	6,7	1.102.000.000,00	6,9	945.416.356,25	7,1	1.103.000.000,00	7,3	1.202.000.000,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
							9611			9899	1.000.000.000,00	10196	1.084.000.000,00	10502	1.020.000.000,00	10817	1.126.000.000,00	11142	1.180.000.000,00	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
7.2	Terwujudnya Peningkatan Pembangunan di Bidang Olahraga		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)			Indeks	0,327	0,332		0,337		0,342		0,347		0,352		0,36		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
7.2.1		Meningkatkan Prestasi Pemuda	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Bidang Olahraga di tingkat Nasional			Orang	9	11		14		18		23		28		30		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Bidang Non Olahraga di tingkat Nasional			Orang	15	17		20		24		29		35		40		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET												Perangkat Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persen	N/A			5	2.012.350.000,00	7	2.032.350.000,00	9	2.006.661.471,16	11	2.032.350.000,00	13	2.052.350.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tabel 3.6 Arah Kebijakan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

	Misi RPJM	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Guna Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat	Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan sarana prasarana kesehatan
		Penguatan edukasi kesehatan, promosi hidup bersih dan sehat, serta pelibatan masyarakat melalui gerakan masyarakat sehat (Germas)
		Penyediaan, pemerataan, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan
		Pemberdayaan kader dan masyarakat melalui Posyandu, Desa Siaga, dan akses layanan yang inklusif
		Penambahan Pelayanan Dokter masuk Rumah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan optimalisasi layanan kesehatan berbasis digital, serta Pelayanan Dokter masuk Rumah
		Edukasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja melalui UKS, Posyandu Remaja, dan klinik ramah remaja.
		Pelaksanaan program makanan tambahan balita berbasis gizi lokal dan monitoring status gizi.
		Mengoptimalkan Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga
		Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan pemantauan kualitas air secara rutin.
		Akreditasi layanan kesehatan, digitalisasi sistem informasi, dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan
		Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Guru melalui Pelatihan, sertifikasi profesi, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) untuk guru
		Rekrutmen dan penempatan tenaga pendamping guru mata pelajara
		Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta penyediaan media pembelajaran
		Menyediakan Bimbingan Belajar secara Gratis bagi Siswa SMP dan SMA Sederajat
		Penataan distribusi dan formasi guru berdasarkan kebutuhan riil dan standar pelayanan minimal (SPM)
		Memberikan Tunjangan Guru yang bertugas di Lokasi Jauh dari Kota Meulaboh
		Penetapan sekolah unggul di setiap kecamatan dengan sarana, guru, dan manajemen berkualitas
		Penguatan program literasi sekolah dan masyarakat, pengadaan perpustakaan desa dan pojok baca publik
		Menyusun dan mengimplementasikan regulasi daerah tentang perlindungan sosial dalam rangka Penyediaan Premi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan
		Mendorong kepesertaan aktif pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial nasional
		Pemberian Subsidi dan Santunan Sosial bagi Masyarakat Miskin
		Mendorong pembentukan Kelompok Usaha Ibu-ibu sesuai Potensi
		Mendorong penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tingkat gampong untuk mewujudkan lingkungan aman dan ramah anak
		Mendorong penerapan prinsip ramah anak dalam tata kelola dan proses pembelajaran sekolah dasar dan menengah.
		Penyusunan dan sosialisasi peraturan daerah/kabupaten terkait sistem perlindungan anak yang komprehensif.
		Merumuskan kebijakan pencegahan perkawinan usia dini melalui regulasi, edukasi masyarakat, dan advokasi sosial

	Misi RPJM	Arah Kebijakan
		Meningkatkan Akses Permodalan bagi Petani, Peternak, Nelayan dan Pelaku Usaha UKM / IKM
		Memperluas kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran
		Mendorong Investasi di Sektor Perikanan, Pertanian, Peternakan, Pariwisata, dan Pendidikan
		Mendorong pengembangan unit usaha produktif di desa dan penguatan kapasitas BUMG dalam membuka lapangan kerja di tingkat lokal
		Peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, dan kemitraan
		Fasilitasi keikutsertaan UMKM dalam pameran dagang dan expo tingkat daerah, nasional, dan internasional
		Penyediaan pelatihan teknis dan manajerial bagi UMKM
		Mengembangkan Koperasi Petani untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Menjalin Kerja sama dengan pelaku usaha dalam menjaga suplai dan harga yang stabil
		Penyediaan subsidi biaya transportasi untuk komoditas strategis
		Menyelenggarakan pasar murah secara berkala diseluruh kecamatan untuk menjaga daya beli
		Menjalin Kerjasama ke daerah penghasil
		Memperkuat pengawasan terhadap distribusi barang agar tepat sasaran
2	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Transparan	Mendorong keterbukaan informasi anggaran melalui media, papan informasi, dan forum Satu Data Indonesia
		Menyusun pedoman dan pengawasan rutin terhadap pengelolaan keuangan oleh SKPK
		Melakukan inventarisasi dan penilaian ulang aset daerah secara berkala
		Mendorong Peningkatan pertisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
		Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang proses musrenbang dan perencanaan partisipatif
		Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN Secara Profesional
		Menerapkan Sistim Merit secara Konsisten
		Mengembangkan sistem evaluasi berbasis kinerja dan sasaran RPJM
		Mewujudkan layanan digital lintas SKPK dalam satu platform SPBE kabupaten
		Memberikan insentif berbasis kinerja, pelatihan pengembangan karier, dan jaminan kerja yang layak
		Pendampingan Hukum bagi masyarakat miskin dan Nelayan yang Bermasalah Dalam Aktivitas Menangkap Ikan
		Menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik antar OPD
		Optimalisasi Pemanfaatan Dana CSR secara Transparan dan Berkeadilan
		Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur gampong dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
		Mendorong penandatanganan pakta integritas oleh seluruh aparatur gampong untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi
		Mendorong penggunaan Dana Gampong secara tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan dan potensi lokal masyarakat
		Membangun Kerjasama dengan Seluruh Stakeholder dalam Pengelolaan Penerimaan PAD
		Menerapkan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Penerimaan PAD

	Misi RPJM	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Syariat Islam dalam Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat	Penyusunan program pembinaan rutin dan pelatihan manajemen masjid berbasis fungsi sosial dan keagamaan
		Menetapkan indikator keberfungsian masjid sebagai bagian dari evaluasi kinerja desa/gampong
		Mendorong revitalisasi majelis taklim melalui jadwal rutin
		Meningkatkan Ketersediaan Tenaga Keagamaan seperti Imam, Guru Mengaji, Pemandi Mayat, Da'i dll
		Memfasilitasi forum rutin ulama untuk merumuskan fatwa/rekomendasi syariat sebagai referensi kebijakan
		Memberikan dukungan sarana, prasarana, dan akreditasi untuk peningkatan mutu kelembagaan dayah
		Mendorong kolaborasi dayah dan gampong dalam pembinaan moral, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat
		Membangun satuan tugas masyarakat berbasis adat dan agama dalam pencegahan pelanggaran syariat
		Menetapkan program Maghrib Mengaji sebagai gerakan kolektif keluarga di seluruh gampong
		Menjadikan MTQ sebagai agenda tahunan untuk pencarian dan pembinaan bakat qori di tingkat kecamatan dan kabupaten
		Menyediakan pelatihan intensif dan insentif bagi qori dan qoriah potensial ke tingkat provinsi/nasional
4	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Aceh Barat	Menyediakan Sarana Prasarana Layanan Dasar yang Mantap
		Menyusun rencana tata ruang dan melakukan penataan lingkungan padat permukiman kumuh
		Menyediakan akses sanitasi yang layak melalui pembangunan IPAL komunal, MCK, dan saluran pembuangan dan Drainase
		Menyediakan sambungan air bersih rumah tangga dan meningkatkan kapasitas jaringan air minum
		Mendorong skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Penyediaan Layanan Dasar
		Menambah titik penerangan jalan strategis untuk meningkatkan keselamatan dan aktivitas malam hari.
		Menyediakan jalur pedestrian yang terintegrasi dengan jalan utama dan ramah disabilitas
		Mendorong penyelesaian pembangunan irigasi utama Lhok Guci sebagai prioritas daerah untuk menunjang ketahanan pangan
		Mengembangkan jaringan irigasi tersier dan sekunder pada lahan pertanian potensial kabupaten
5	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Mengimolementasikan regulasi tata ruang pertanian dan budidaya berkelanjutan
		Memberikan subsidi pupuk, benih unggul, atau peralatan bagi petani
		Memperkuat kelompok tani dan gapoktan melalui pelatihan manajemen dan fasilitasi legalitas
		Menyediakan pelatihan teknis dan demoplot untuk varietas unggulan pertanian.
		Memberikan akses permodalan dan kredit usaha rakyat untuk petani dan nelayan kecil.
		Membangun kemitraan dengan BUMDes, koperasi, dan pelaku usaha besar dalam pemasaran hasil pertanian
		Mendorong akses permodalan dan peralatan pascapanen dan pengolahan sederhana (value added product)
		Pelatihan manajemen, desain produk, dan akses pasar digital bagi UMKM berbasis hasil pertanian/nelayan

	Misi RPJM	Arah Kebijakan
		Meningkatkan akses pasar dan jaringan kemitraan bagi produk industri hilir pertanian melalui kerjasama strategis dengan pelaku usaha, lembaga distribusi, dan platform digital
		Meningkatkan kemudahan dan efisiensi proses perizinan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui sistem layanan terpadu, pembinaan regulatif, dan pendampingan teknis
		Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan pengawasan distribusi bahan pokok
		Menggalakkan konsumsi pangan lokal dan gizi seimbang
		Pengembangan lahan sawah irigasi teknis dan pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman pangan strategis
		Pemetaan dan perlindungan kawasan rawan bencana, DAS, dan sumber air strategis daerah
		Sosialisasi kebencanaan, pelatihan simulasi tanggap bencana berbasis desa dan sekolah
		Memperkuat peran pengawasan terhadap limbah domestik dan industri
		Membangun Kemitraan dengan Perusahaan Swasta dalam Pengelolaan TPA Sampah
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penanggulangan bencana di wilayah rawan
6	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Aceh	Menyelenggarakan Pameran Budaya Aceh secara Berkala
		Menyediakan sarana representatif untuk aktivitas budaya, pelestarian nilai-nilai adat, dan ruang edukatif serta pertunjukan seni tradisional masyarakat Aceh Barat
		Memberikan dukungan kelembagaan dan legalitas kepada pegiat budaya di Aceh Barat untuk memperkuat peran dalam pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya
		Mendorong sinergi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam bentuk program bersama untuk pengembangan budaya, pelatihan, hingga promosi seni daerah
		Menyediakan fasilitas permanen untuk menyimpan, menampilkan, dan mengedukasi masyarakat tentang sejarah, warisan budaya, dan artefak lokal yang bernilai tinggi.
		Melestarikan situs-situs budaya dan religius yang memiliki nilai sejarah serta mengembangkan daya tariknya sebagai destinasi wisata edukatif dan spiritual
7	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Upaya Mewujudkan Percepatan Pembangunan	Mengembangkan kapasitas kelembagaan pemuda melalui pembinaan berkelanjutan agar organisasi kepemudaan dapat menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan kepemimpinan generasi muda
		Fasilitasi Forum Diskusi Pembangunan di Kalangan Pemuda
		Menyediakan skema dukungan finansial dan mentoring bisnis bagi wirausahawan muda untuk menumbuhkan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan dan berdaya saing
		menyediakan program pelatihan dan inkubasi yang menjangkau berbagai sektor ekonomi kreatif untuk menumbuhkan semangat inovasi dan produktivitas pemuda di bidang usaha
		Mendorong pemuda untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor strategis melalui pelatihan praktis dan proyek berbasis komunitas guna memperkuat kontribusi mereka terhadap ketahanan ekonomi dan sosial
		Membangun Jejaring Pemantauan Minat dan Bakat Olah Raga
		Meningkatkan kualitas pelatihan olahraga melalui pelatih bersertifikasi agar proses pembinaan prestasi pemuda lebih terukur dan sesuai standar nasional.

	Misi RPJM	Arah Kebijakan
		Memastikan ketersediaan fasilitas olahraga yang representatif, merata, dan mudah diakses untuk mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi pemuda.
		Menjadikan event olahraga sebagai sarana kompetisi, promosi minat, serta seleksi atlet berbakat sekaligus sebagai ajang kebangkitan olahraga lokal

Tabel 3.7 100 Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

No	Program Pembangunan	*Branding*	Perangkat Daerah
VISI : TERWUJUDNYA ACEH BARAT MAJU MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM			
MISI I : Mewujudkan Transformasi Sosial dan Ekonomi Guna Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Aceh Barat			
1	Menyediakan Bantuan Dana bagi Keluarga Pasien yang Dirujuk	KABS (Kartu Aceh Barat Sehat)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/RSUD Cut Nyak Dhien
2	Menyediakan Rumah Singgah	RUMOH LON (Rumah Orang Singgah untuk Layanan Pengobatan)	Dinas Kesehatan
3	Menyediakan Ambulan Gratis bagi Masyarakat	AGAM (Ambulan Gratis bagi Masyarakat)	Dinas Kesehatan
4	Menyediakan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	SATPAM (Sarana dan Prasarana dan Alat Penunjang Kesehatan Memadai	Dinas Kesehatan
5	Percepatan Pembangunan RS Regional	SIGAP RS Regional (Sinergi Gerak Cepat Pembangunan Rumah Sakit Regional)	Dinas Kesehatan
6	Promosi Kesehatan Berkualitas	PRO SEHAT KUAT	Dinas Kesehatan
7	Menyediakan Dokter Spesialis	DOSIS (Dokter Spesialis)	BKPSDM
8	Dokter Masuk Rumah	DOKMARU (Dokter Masuk Rumah)	Dinas Kesehatan
9	Pemeriksaan dan Perawatan Kesehatan Gratis bagi Pasien dengan Kondisi Tertentu di Rumah	SEHATI (Sehat di Rumah Anda Tanpa Biaya)	Dinas Kesehatan
10	Pendampingan Ibu Hamil dan 1000 HPK	PEDULI 1000 HPK (Pendampingan Ibu Hamil dan Kelahiran)	Dinas Kesehatan
11	Makanan Bergizi bagi Balita	BISKUIT (Bantuan Stimulus untuk Balita Kesulitan Gizi)	Dinas Kesehatan
12	Meningkatkan Kualitas Pelayanan BLUD RS Cut Nyak Dhien	KUACI (Kualitas Pelayanan Cut Nyak Dhien)	Dinas Kesehatan
13	Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Guru	PINTAR (Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Guru)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Pendamping Guru	TERAS (Teman Edukasi dan Belajar di Sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	SELARAS (Sediakan dan Lengkapi Sarana Prasarana Sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Bus Gratis	BUPENA (Bus Gratis Untuk Pendidikan)	Dinas Perhubungan

No	Program Pembangunan	*Branding*	Perangkat Daerah
17	Menyediakan Bimbingan Belajar Secara Gratis bagi Siswa SMP dan SMA Sederajat	BERKAT (Bimbel Edukasi Rakyat Tanpa Biaya)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Beasiswa bagi Siswa Keluarga Miskin Berprestasi	PRESTASI (Program Beasiswa untuk Siswa Miskin Berprestasi)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Bagian Kesra Setdakab
19	Pemerataan Guru	SETARA (Sebaran Tenaga Ajar Merata)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Bantuan Alat Perlengkapan Sekolah bagi Keluarga Miskin	BALSEM (Bantuan Alat Perlengkapan Sekolah bagi Keluarga Miskin)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Tunjangan Guru dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di Lokasi Jauh dari Kota Meulaboh	BAKTI (Bantuan Kesejahteraan untuk Tenaga Pendidikan dan Medis)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Sekolah Unggul dan Merata	SAINS (Sekolah Andal dan Inklusif bagi Seluruh Siswa)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Menyediakan Premi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	OPTIMIS (Optimalisasi Perlindungan Sosial Antisipasi Kemiskinan)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
24	Santunan Sosial bagi Masyarakat Miskin	SALAM (Santunan Sosial bagi Masyarakat Miskin)	Dinas Sosial
25	Subsidi Energi Terjangkau untuk Rakyat	SENTER (Subsidi Energi Terjangkau untuk Rakyat)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26	BBM Bersubsidi untuk Abang Becak	BEBAS (BBM Bersubsidi untuk Abang Becak Sejahtera)	Dinas Sosial
27	Membentuk Kelompok Usaha Ibu-ibu sesuai Potensi	KASIH IBU (Karya Sejahtera Ibu Mandiri dan Berjaya)	Dinas Sosial, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
28	Meningkatkan Akses Permodalan bagi Petani, Peternak, Nelayan dan Pelaku Usaha UKM / IKM	SEJAHTERA (Sinergi Ekonomi untuk Jaminan Akses Modal terhadap Rakyat)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
29	Bantuan Sarana Produksi Pertanian, Perikanan, Peternakan	BANNIER (Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian)	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan
30	Training Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Siap Pakai	TUNTAS (Training untuk Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Siap Pakai)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas

No	Program Pembangunan	*Branding*	Perangkat Daerah
			Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan
31	Kerja Sama dengan Dunia Usaha di Dalam maupun di Luar Kabupaten Aceh Barat untuk Penyerapan Tenaga Kerja	SINERJI (Kolaborasi Penyerapan Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha dan Bisnis)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32	Membangun Kemitraan Pemasaran Produk UKM, IKM, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	BERKAH (Bersama Kembangkan Akses dan Pemasaran UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
33	Mendorong Investasi di Sektor Perikanan, Pertanian, Peternakan, Pariwisata, dan Pendidikan	TABANGUN (Investasi untuk Membangun)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34	Proyek Pemerintah Menggunakan Tenaga Kerja Lokal Minimal 30%	KAWAL (Kebijakan Wajib Libatkan Tenaga Kerja Lokal)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	Penguatan BUMG sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam Pembangunan	BUNGA (Badan Usaha Milik Gampong untuk Pembangunan)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
36	Ekonomi Kreatif untuk Kesejahteraan	CERDAS (Cipta Ekonomi Rakyat dengan Seni dan Kreativitas)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
37	Mengembangkan Koperasi Petani untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani	KOPI SANGER (Koperasi Petani Sejahtera Membangun Negeri)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
38	Subsidi Transportasi bagi Komoditi Tertentu	DUIT (Dukungan Subsidi Transportasi untuk Komoditi Tertentu)	Dinas Pangan
39	Menggelar Pasar Murah dan Menyelenggarakan Operasi Pasar Murah	HARMONI (Harga Murah dan Operasi Pasar Terkendali)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
MISI II : Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Transparan			
40	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel Disertai Semangat Melayani	PELITA (Pemerintah yang Melayani, Akuntabel dan Transparan)	Bagian Organisasi Setdakab
41	Penguatan dan Pelaksanaan Satu Data Indonesia	SATURASI (Satu Data untuk Gerak Sinergi Membangun Negeri)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
42	Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN Secara Profesional	SIMPUL (Sistim Manajemen Pendidikan ASN Profesional Layanan Unggul)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
43	Menerapkan Sistim Merit Secara Konsisten	SISTER (Sistem Merit untuk Pengembangan dan Penempatan Karier)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
44	Menetapkan Indikator Kinerja secara Jelas dan Terukur bagi Pejabat Pemerintah	INKUBATOR (Indikator Kinerja Utama bagi Pejabat dan Organisasi)	Bagian Organisasi Setdakab

No	Program Pembangunan	*Branding*	Perangkat Daerah
45	Meningkatkan Akses Internet di seluruh wilayah Aceh Barat guna Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PESAT (Pemerataan Sistem Akses Internet)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
46	Meningkatkan Kesejahteraan ASN (Meningkatkan TPP)	PRO ASN (Program Kesejahteraan untuk ASN)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
47	Pendampingan Hukum bagi Nelayan yang Bermasalah Dalam Aktivitas Menangkap Ikan	AKUA (Advokasi Hukum untuk Nelayan)	Bagian Hukum Setdakab
48	Optimalisasi Pemanfaatan Dana CSR Secara Transparan dan Berkeadilan	CSR MANTAP (CSR untuk Masyarakat yang Akuntabel dan Transparan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
49	Penguatan Peran Pendamping Desa dan Petugas PKH untuk Akselarasi Pembangunan di Gampong	PERTADES (Penguatan Peran Pendamping Desa dan Petugas PKH untuk Pembangunan di Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
50	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	DANSA (Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
51	Memberi Insentif Kinerja bagi Gampong	SIGAP (Sistem Pemberian Insentif Kinerja bagi Gampong)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
52	Memenuhi Ketentuan Penghasilan Tetap (Siltap) Bagi Seluruh Aparatur Gampong sesuai dengan Regulasi	PRO AGAM (Program Kesejahteraan untuk Aparatur Gampong)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
53	Mengembangkan Produk Unggulan PKK (seperti Tanaman Obat-obatan untuk Industri)	CERMAT PKK (Ciptakan Ekonomi Keluarga bersama Tim PKK)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
54	Membangun Kerjasama dengan Seluruh Stakeholder dalam Pengelolaan Penerimaan PAD	PRAKARSA (Pajak dan Retribusi Meningkat Rakyat Sejahtera)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
55	Menerapkan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Penerimaan PAD		
56	Optimalisasi Sumber PAD		
MISI III : Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Syariat Islam dalam Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat			
57	Pelaksanaan Pelatihan Fungsi Kemesjidan bagi Pengurus Badan Kemakmuran Mesjid (BKM)	SUPERMI (Sumber Daya Manusia Pengurus Mesjid yang Melayani)	Dinas Syariat Islam
58	Menyelenggarakan Majelis Taklim di setiap Mesjid Gampong secara Berkala	MUTIARA (Majelis Taklim Islami dan Religius Aktif)	Dinas Syariat Islam
59	Memberi Insentif bagi Imum Chik dan Guru TPA	INTAN (Insentif untuk Imam dan Guru Mengaji)	Dinas Syariat Islam
60	Meningkatkan Ketersediaan Tenaga Keagamaan seperti Imam, Guru Mengaji, Pemandi Mayat, Da'i dll	SUKMA (Sumber Daya Keagamaan yang Unggul dan Berkualitas)	Dinas Syariat Islam
61	Menyelenggarakan Muzakarah Ulama Dayah	MUBAD (Mubahassah Ulama Dayah)	Dinas Syariat Islam

No	Program Pembangunan	*Branding*	Perangkat Daerah
62	Alumni Dayah Masuk Gampong	ADUN (Alumni Dayah Masuk Gampong)	Dinas Pendidikan Dayah
63	Satu Gampong Satu Da'i	SANTUN (Satu Gampong Satu Da'i untuk Kemajuan)	Dinas Syariat Islam
64	Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Penyakit Masyarakat seperti Judi Online, Narkoba, Minuman Keras, dll di tingkat Gampong	PARANG (Petugas Pencegah Penyakit Masyarakat di Gampong)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
65	Mencetak Qari Internasional	KONTER (Mencetak Qari Internasional)	Dinas Syariat Islam
66	Gerakan Maghrib Mengaji	GEMA (Gerakan Maghrib Mengaji)	Dinas Syariat Islam
MISI IV : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Aceh Barat			
67	Menyediakan Sarana Prasarana Layanan Dasar yang Mantap	SANTAP (Sarana dan Prasarana Layanan Dasar yang Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
68	Membangun dan Merehabilitasi Drainase di Seluruh Wilayah Perkotaan Meulaboh	SANIKU (Sanitasi untuk Kesehatan Lingkungan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
69	Menyediakan WC bagi Rumah Tangga Miskin		
70	Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Lhueng Aneuk Ayeu	NONA (Normalisasi dan Rehabilitasi Lhueng Aneuk Ayeu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
71	Membangun Kolam Retensi Antisipasi Banjir	KORAN (Kolam Retensi Antisipasi Banjir)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
72	Menyediakan Air Bersih di Seluruh Wilayah	TIRTA (Tingkatkan Ketersediaan Air Bersih)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
73	Menyediakan Lampu Penerangan Jalan di Seluruh Wilayah Perkotaan Meulaboh dan sekitarnya	LENTERA (Lampu Penerangan untuk Perkotaan dan Sekitarnya)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
74	Percepatan Penyelesaian Irigasi Lhok Guci	LACI (Layanan Lhok Guci untuk Pertanian)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MISI V : Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan Hidup			
75	Pemberdayaan Kajreun Blang	KAYA NIRA (Kajreun Blang Berdaya Petani Sejahtera)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
76	Memperkuat Penyuluhan Pertanian	HEPI (Hebat Penyuluhnya, Makmur Petaninya)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
77	Mengembangkan Hilirisasi Komoditi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan	HIKMAT (Hilirisasi Komoditi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan
78	Pemberdayaan Keluarga Nelayan (Ibu Rumah Tangga) melalui Pengembangan	PEKAN (Pemberdayaan Keluarga Nelayan)	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program Pembangunan	*Branding*	Perangkat Daerah
	Industri Rumah Tangga Hilirisasi Produk Perikanan		
79	Fasilitasi untuk Perizinan Nelayan	FAIZIN (Fasilitasi Perizinan bagi Nelayan)	Dinas Kelautan dan Perikanan
80	Membangun Kawasan Sentra Pertanian / Peternakan	SINTA (Sistem Integrasi Pertanian dan Peternakan)	Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
81	Cetak Sawah Baru	SAPA (Sawah Bertambah Pangan Berjaya)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
82	Mekanisasi dan Penerapan Teknologi di Sektor Pertanian	MESIN (Mekanisasi dan Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
83	Melakukan Pengawasan Lingkungan secara Profesional	SALING SALAM (Pengawasan Lingkungan untuk Menjaga Kelestarian Alam)	Dinas Lingkungan Hidup
84	Membangun Kemitraan dengan Perusahaan Swasta dalam Pengelolaan TPA Sampah	GEBRAK (Gerak Bersama untuk Kebersihan)	Dinas Lingkungan Hidup
85	Membentuk Unit Layanan Sampah di Seluruh Gampong Melalui BUMG	BURSA (BUMG Urusan Sampah)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
86	Meraih Penghargaan ADIPURA bagi Kota Meulaboh	KODIR (Kota Bersih Adipura Hadir)	Dinas Lingkungan Hidup
87	Membentuk Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Siaga Bencana	DIANA (Desa Siaga Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
88	Membuat Lubang Biopori di Seluruh Area Perkantoran, Permukiman, dan Fasilitas Umum di Kota Meulaboh	OBOR (Optimalisasi Biopori bagi Perkantoran dan Permukiman)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
89	Menyediakan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana secara Memadai	SAPA BADAI (Sarana Prasarana Bencana Memadai)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI VI : Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Aceh			
90	Menyelenggarakan Pameran Budaya Aceh Secara Berkala	RANUB (Rumah Nanggroe Untuk Budaya)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
91	Membangun Sanggar Seni yang Representatif	SEULANGA (Sanggar Seni Lestarikan Adat dan Budaya Aceh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
92	Menjalin Kerjasama dengan Seluruh Stakeholder untuk Kemajuan dan Perkembangan Adat dan Budaya Aceh	REBANA (Rintis Kerjasama Kembangkan Adat dan Budaya)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
93	Membangun Museum dan Galeri Seni Budaya Aceh Barat di Kota Meulaboh	Museum Kota Meulaboh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MISI VII : Meningkatkan Peran Pemuda dalam Upaya Mewujudkan Percepatan Pembangunan			
94	Fasilitasi Forum Diskusi Pembangunan di Kalangan Pemuda (Kritik Dibayar)	MIMBAR (Mikir Membangun Aceh Barat Bersama-sama)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Program Pembangunan	*Branding*	Perangkat Daerah
95	Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk Gerakan Sarjana Membangun Gampong	RAJA DESA (Gerakan Sarjana Membangun Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
96	Mencetak Petani-petani Baru (Petani Millenial)	ADAB (Aku Muda Aku Bertani)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
97	Membangun Jejaring Pemantauan Minat dan Bakat Olah Raga	JUARA (Jejaring Unggul Atlet Berbakat)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
98	Menyediakan Pelatih yang Profesional	PESONA (Pelatih Olahraga yang Profesional)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
99	Menyediakan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Rekreasi	SNEAKER (Sarana dan Prasarana Kuliner, Olahraga dan Rekreasi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
100	Menyelenggarakan Turnamen Piala Bupati secara Berkala	BUPATI CUP	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

3.3. Akselerasi Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat

3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui %tase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah atau Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dalam satu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika nilai PDRB meningkat, maka hal itu menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika menurun, berarti terjadi kontraksi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi investasi, tenaga kerja, infrastruktur, serta kebijakan pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan daerah seperti di Kabupaten Aceh Barat, laju pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Indonesia untuk periode 2020–2024 (Gambar 2.2.1), terlihat adanya tren pemulihan yang signifikan setelah dampak pandemi COVID-19. Kabupaten Aceh Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif, tetapi dengan kecenderungan meningkat dari 1,88% pada tahun 2020 hingga mencapai 7,50% pada tahun 2024. Meskipun sempat

turun ke 3,28% pada tahun 2022 (Ekonomi daerah Kembali menyesuaikan dengan kondisi strukturalnya, didukung adanya pengaruh eksternal seperti inflasi dan dinamika ekonomi global), pertumbuhan 66embali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Provinsi Aceh menunjukkan tren yang lebih stabil, dari -0,37% pada tahun 2020 hingga mencapai 4,66% pada tahun tahun 2024, mencerminkan pemulihan yang lebih terarah.

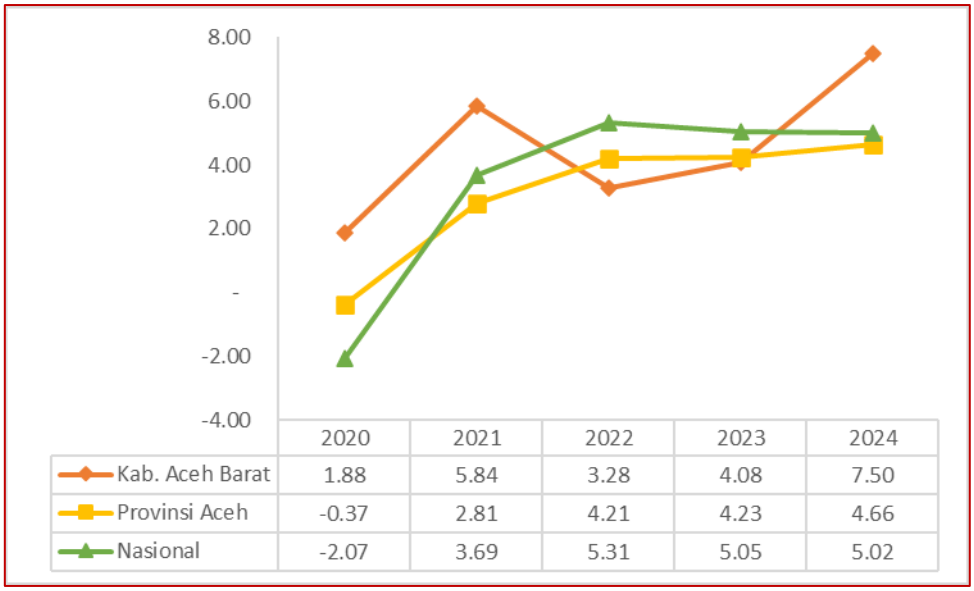

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Aceh Barat	1.88	5.84	3.28	4.08	7.50
Provinsi Aceh	-0.37	2.81	4.21	4.23	4.66
Nasional	-2.07	3.69	5.31	5.05	5.02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional (Indonesia) menunjukkan pola yang lebih stabil dibandingkan kedua wilayah tersebut. Setelah mengalami kontraksi sebesar -2,07% pada 2020, ekonomi Indonesia terus membaik hingga mencapai 5,02% pada 2024. Puncak pertumbuhan nasional terjadi pada 2022 dengan angka 5,31%, yang kemudian sedikit melandai tetapi tetap berada di atas 5% dalam dua tahun berikutnya. Jika dibandingkan, Aceh Barat cenderung lebih dinamis dalam pertumbuhannya, sedangkan Provinsi Aceh lebih stabil dan tidak mengalami fluktuasi sebesar Aceh Barat. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pascapandemi menunjukkan pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, mencerminkan efektivitas kebijakan ekonomi nasional.

Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2024

Kategori/ *Category*	Lapangan Usaha/ *Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan/Agriculture, Forestry &Fishing	8,26	8,38	19,01	12,47	5,21
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	-14,18	194,86	82,98	-2,44	-1,90
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-2,20	41,06	21,84	2,44	5,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	3,24	1,72	3,74	6,10	3,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply,	5,59	-1,43	0,19	1,88	7,34
F	Konstruksi/Construction	6,92	4,58	5,99	7,08	4,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles& Motorcycles	2,39	5,10	14,80	13,14	3,50
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	-23,77	15,17	27,55	12,51	10,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation & food Service Acti	-4,95	2,61	31,41	8,80	3,67
J	Informasi dan Komunikasi/Information &Communication	10,58	7,56	13,02	5,14	0,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	0,09	-2,12	5,98	-8,32	22,66
L	Real Estat/Real Estate Activities	1,00	6,75	5,83	3,55	2,49
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	-2,71	2,47	18,20	2,26	4,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Adı	1,27	9,61	0,41	12,44	7,74
P	Jasa Pendidikan/Education	3,82	4,80	5,23	4,92	7,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	10,33	10,42	20,32	3,93	2,39
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	4,77	4,82	12,48	9,77	3,41
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		1,82	23,11	27,52	6,61	3,55

* angka sementara

**angka sangat sementara

Berdasarkan data Tabel 3.8 mengenai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Barat atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha selama periode 2020–2024, menjelaskan bahwa perekonomian daerah mengalami pemulihan yang cepat pasca-pandemi COVID-19, terutama pada tahun 2021 dan 2022. Namun demikian, laju pertumbuhan mulai menunjukkan tren perlambatan pada tahun 2023 dan diperkirakan akan melambat lebih lanjut pada tahun 2024, yakni dari 27,52% pada tahun 2022 menjadi 3,55% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi strategis dari Pemerintah Daerah untuk menjaga momentum pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Dari berbagai sektor ekonomi yang dianalisis di Kabupaten Aceh Barat, terdapat beberapa sektor yang menunjukkan potensi pertumbuhan signifikan dan sangat layak menjadi prioritas intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, yang mencatat lonjakan luar biasa dari kontraksi -8,32% pada tahun 2023 menjadi pertumbuhan sebesar 22,66% pada 2024. Ini menunjukkan peluang besar bagi daerah untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan, khususnya dalam layanan berbasis digital dan keuangan syariah yang kini semakin relevan.

Di sisi lain, sektor pendidikan juga menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, meningkat dari 3,82% pada 2020 menjadi 7,58% di tahun 2024. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha lokal dan perkembangan teknologi.

Sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, dan daur ulang pun mulai menunjukkan geliatnya, tumbuh sebesar 7,34% pada 2024. Pertumbuhan ini mengisyaratkan bahwa kesadaran terhadap isu lingkungan semakin meningkat, dan ini bisa menjadi peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi sirkular serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tak kalah penting, sektor jasa perusahaan juga mencatat pertumbuhan positif dan stabil hingga 4,41% pada 2024. Sektor ini mencakup layanan seperti konsultasi bisnis, teknologi informasi, dan jasa profesional lainnya yang berperan besar dalam menopang ekosistem usaha modern, khususnya dalam mendukung penguatan UMKM di daerah.

Sementara itu, sektor konstruksi, meskipun tidak tumbuh secepat sebelumnya, tetap mencatat pertumbuhan yang sehat sebesar 5,86% pada 2024. Ini memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur strategis dan program padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Terakhir, sektor perdagangan dan reparasi juga menunjukkan performa yang cukup baik dengan pertumbuhan 13,14% di 2023 dan 3,50% di tahun berikutnya. Untuk menjaga daya saing sektor ini, intervensi melalui pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi UMKM menjadi sangat penting agar sektor ini lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Secara keseluruhan, keenam sektor ini bukan hanya menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas jika dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data pada Tabel 3.9 dan analisis potensi setiap sektor selain sektor pertambangan, sektor yang paling direkomendasikan untuk diintervensi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah sektor ***Jasa Keuangan dan Asuransi***. Pertumbuhan yang melonjak signifikan dan peran strategis sektor ini dalam mendorong inklusi keuangan dan akses modal menjadikannya kunci untuk mendorong aktivitas ekonomi lintas sektor. Intervensi bisa berupa penguatan kelembagaan keuangan lokal, digitalisasi layanan, kolaborasi dengan bank dan koperasi syariah, serta edukasi keuangan masyarakat.

Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2024

Kategori/ *Category*	Lapangan Usaha/ *Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan/Agriculture, Forestry &Fishing	4,06	-4,14	5,82	6,51	-2,16
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	9,20	24,26	-2,99	2,34	26,82
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-4,69	6,04	7,40	-0,63	1,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	3,48	1,04	2,05	4,15	2,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply,	4,38	-2,47	-0,15	0,83	-3,23
F	Konstruksi/Construction	4,41	0,14	-0,46	4,72	4,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles& Motorcycles	-2,13	2,15	7,88	6,18	0,29
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	-24,13	10,21	7,79	-2,17	9,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation & food Service Acti	-8,28	1,43	29,27	4,74	1,64
J	Informasi dan Komunikasi/Information &Communication	10,71	7,28	12,83	3,13	1,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	0,58	-4,56	-3,52	-9,36	22,43
L	Real Estat/Real Estate Activities	-0,13	4,24	4,78	1,54	2,60
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	-4,63	0,39	10,92	-1,69	4,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Adı	-3,53	5,38	-0,21	8,04	4,49
P	Jasa Pendidikan/Education	2,32	2,57	4,82	2,28	2,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	4,23	9,68	10,83	0,27	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	1,09	2,70	11,55	3,03	3,65
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		1,88	5,84	3,28	4,08	7,50

* angka sementara

**angka sangat sementara

Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Aceh Barat menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun sempat tertekan oleh pandemi pada 2020, beberapa sektor berhasil bangkit dan menunjukkan potensi luar biasa. Namun, tidak semua sektor tumbuh secara merata, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memperkuat sektor-sektor yang berdaya tahan tinggi dan berdampak luas pada masyarakat.

Salah satu sektor yang paling menonjol adalah jasa keuangan dan asuransi. Setelah sempat mengalami kontraksi tajam di tahun 2023 (-9,36%), sektor ini bangkit secara luar biasa pada tahun 2024 dengan pertumbuhan mencapai 22,43%. Ini merupakan sinyal kuat bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan semakin tinggi, dan sektor ini bisa menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi lokal. Pemerintah daerah dapat mendorong penguatan koperasi, memperluas akses pembiayaan mikro, serta mendorong inklusi keuangan digital di pedesaan.

Selain itu, sektor jasa lainnya, yang mencakup aktivitas komunitas, sosial, dan hiburan, menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil, terutama di 2024 yang mencapai 7,50%. Sektor ini berpotensi dikembangkan melalui ekonomi kreatif, pelatihan keterampilan lokal, serta dukungan terhadap UMKM berbasis budaya dan pariwisata. Sektor jasa

perusahaan juga patut diperhatikan. Meski sempat tertekan di awal pandemi, sektor ini bangkit pada 2022 dan tetap tumbuh positif hingga 2024. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi pelatihan teknis, pengembangan jasa profesional, dan pendampingan bisnis untuk anak muda dan pelaku usaha lokal.

Sektor pendidikan dan kesehatan tetap tumbuh stabil. Walau tidak melonjak tinggi, keduanya memiliki peran fundamental dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Intervensi di sini bisa berupa peningkatan pendidikan vokasional dan layanan kesehatan dasar yang terjangkau. Namun, ada sektor-sektor yang perlu lebih diperhatikan karena kinerjanya cenderung melambat, seperti perdagangan, transportasi, dan pengelolaan air dan limbah. Intervensi pada sektor-sektor ini tetap penting, tetapi mungkin membutuhkan strategi jangka panjang dan dukungan lintas sektor.

Berdasarkan data pertumbuhan riil 2024, sektor yang paling direkomendasikan untuk intervensi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah sektor *Jasa Keuangan dan Asuransi*. Pertumbuhan yang sangat tinggi menunjukkan potensi besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama melalui akses pembiayaan, pengembangan UMKM, dan inklusi keuangan berbasis teknologi. Dengan intervensi yang tepat, sektor ini tidak hanya bisa memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga memperluas kesejahteraan masyarakat Aceh Barat secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis atas dasar harga konstan, **sektor *Jasa Keuangan dan Asuransi*** paling direkomendasikan untuk diintervensi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Pertumbuhan luar biasa di 2024 (22,43%) mencerminkan tingginya permintaan serta kapasitas sektor ini dalam mendukung transformasi ekonomi lokal. Intervensi yang tepat seperti penguatan koperasi, literasi keuangan, dan perluasan layanan keuangan berbasis teknologi dapat memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.10 Analisis komparasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat

Aspek Sektor Usaha Berpotensi	Harga Berlaku (%)	Harga Konstan (%)	Analisis Komparatif
PDRB Total (2024)	3,55	4,08	Pertumbuhan riil (konstan) lebih tinggi, menunjukkan peningkatan produksi barang/jasa, bukan hanya karena kenaikan harga.
Sektor Jasa Keuangan & Asuransi	22,66	22,43	Keduanya tinggi, menandakan pertumbuhan kuat baik secara nominal maupun riil – sektor paling potensial dikembangkan.
Perdagangan Besar & Eceran	3,50	3,65	Konsisten tumbuh stabil dan menunjukkan daya beli dan konsumsi masyarakat masih kuat.
Jasa Lainnya	7,43	7,50	Kinerja sektor informal dan kreatif mulai menunjukkan kontribusi signifikan.

Aspek Sektor Usaha Berpotensi	Harga Berlaku (%)	Harga Konstan (%)	Analisis Komparatif
Industri Pengolahan	5,50	1,81	Selisih besar mengindikasikan inflasi tinggi atau harga produk meningkat, bukan peningkatan output fisik.
Transportasi & Pergudangan	3,50	1,18	Ada pertumbuhan harga yang cukup besar, sementara produksi atau jasa yang diberikan tumbuh lebih lambat.
Informasi & Komunikasi	3,60%	-5,52%	Secara nominal tumbuh, tapi secara riil justru menurun tajam – menandakan adanya stagnasi atau penurunan aktivitas nyata di sektor ini.
Pengadaan Air dan Limbah	7,34%	-3,23%	Perbedaan ekstrem – kemungkinan kenaikan tarif atau biaya, bukan pertumbuhan layanan. Ini sinyal peringatan bagi efektivitas pelayanan publik.

Tabel 3.10 memperlihatkan angka yang berbeda untuk setiap sektor yang berpotensi untuk mendukung kegiatan perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan. Komparasi ini dilakukan adalah untuk menyimpulkan rekomendasi intervensi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam menentukan sektor usaha yang trategis dan memiliki potensi keberlanjutan. Dari beragam sektor usaha yang dianalisis dalam struktur ekonomi Kabupaten Aceh Barat, terdapat tujuh sektor non-pertambangan yang menunjukkan potensi kuat dan konsisten dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ketujuh sektor ini tidak hanya tumbuh positif dari sisi nominal (harga berlaku), tetapi juga memperlihatkan daya tahan dan pertumbuhan riil (harga konstan 2010), menjadikannya sebagai fokus strategis intervensi kebijakan Pemerintah Daerah.

Hasil analisis menyimpulkan rekomendasi intervensi kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

1. Jasa Keuangan dan Asuransi

Sektor jasa keuangan dan asuransi menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, baik secara nominal sebesar 22,66% maupun riil sebesar 22,43%. Pertumbuhan yang hampir seimbang antara harga berlaku dan harga konstan ini mencerminkan adanya ekspansi nyata di sektor jasa keuangan, bukan semata karena kenaikan tarif atau biaya. Ini menandakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan semakin tinggi, serta peningkatan aktivitas ekonomi melalui transaksi keuangan, pembiayaan, dan asuransi yang lebih merata. Sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi kontributor paling dinamis terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat. Kinerja sektor ini bahkan melampaui laju PDRB total, menandakan perannya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan riil yang hampir setara dengan pertumbuhan nominal menunjukkan bahwa ekspansi sektor ini didorong oleh peningkatan volume dan kualitas layanan, bukan sekadar kenaikan tarif. Rekomendasi intervensi: Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dapat mengintegrasikan strategi

inklusi keuangan dalam RPJM dengan memperluas jangkauan lembaga keuangan ke desa-desa, mendorong pembentukan koperasi digital, serta memperkuat peran lembaga keuangan syariah dan asuransi mikro, terutama untuk sektor produktif seperti pertanian dan UMKM. Intervensi yang dapat dilakukan meliputi penguatan kelembagaan keuangan mikro, insentif digitalisasi koperasi, serta pelatihan literasi keuangan masyarakat.
Secara ringkas dalam bentuk kegiatan:

1. Mendorong pendirian dan penguatan koperasi simpan pinjam, BPR, serta unit mikro keuangan;
2. Program literasi dan inklusi keuangan di desa-desa.
3. Insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi fintech dan pelaku asuransi mikro

2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Sektor ini mencatat pertumbuhan harga berlaku sebesar 3,50% dan harga konstan sebesar 3,65%, menunjukkan kinerja yang relatif sejalan dengan PDRB total. Ini berarti konsumsi domestik masih menjadi penggerak penting dalam ekonomi lokal Aceh Barat. Pertumbuhan riil yang sedikit lebih tinggi daripada nominal mengindikasikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat yang cukup terjaga.

Rekomendasi intervensi: Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dapat memperkuat konektivitas pasar dengan membangun infrastruktur perdagangan lokal, memberdayakan pedagang tradisional melalui digitalisasi transaksi, serta memberikan pelatihan manajemen usaha untuk meningkatkan efisiensi dan skala usaha. Intervensi ini akan menopang sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB secara berkelanjutan.
Secara ringkas bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Revitalisasi pasar tradisional dan digitalisasi sistem transaksi.
2. Pelatihan manajemen usaha bagi pedagang kecil dan UMKM.
3. Pengembangan sistem logistik dan distribusi bahan pokok.

3. Sektor Jasa Lainnya

Sektor ini tumbuh 7,43% (nominal) dan 7,50% (riil), sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi karena lajunya sejajar dengan pertumbuhan PDRB total secara konstan. Ini menandakan bahwa aktivitas jasa nonformal, informal, dan ekonomi kreatif mulai menunjukkan bobot kontribusi yang semakin penting. Dengan pertumbuhan riil yang tinggi, sektor ini mencerminkan dinamika masyarakat dalam menciptakan layanan berbasis kebutuhan dan inovasi lokal.
Rekomendasi intervensi: Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu memperkuat kapasitas pelaku sektor ini melalui inkubasi bisnis kreatif, penguatan layanan publik yang ramah sektor jasa (seperti perizinan usaha mikro), serta membuka ruang ekonomi baru berbasis pariwisata lokal, seni budaya, dan jasa digital. Secara ringkas dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Dukungan inkubasi bisnis kreatif, pelatihan TIK, dan ekonomi digital.

2. Fasilitasi ruang-ruang kreatif (co-working space, studio seni).
3. Dukungan event lokal untuk mendorong jasa hiburan, kebudayaan, dan kuliner.

4. Sektor Industri Pengolahan

Meskipun mencatat pertumbuhan nominal 5,50%, pertumbuhan riil sektor ini hanya 1,81%, jauh di bawah laju PDRB konstan. Ini menandakan bahwa kenaikan PDRB di sektor ini sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga input/output, bukan oleh peningkatan output fisik atau produktivitas. Artinya, sektor ini belum menjadi penopang nyata pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Rekomendasi intervensi: Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu mendorong hilirisasi komoditas lokal (seperti sawit, karet, hasil laut) melalui pembangunan sentra IKM, peningkatan teknologi produksi, dan insentif investasi industri kecil-menengah. Integrasi dengan kawasan industri atau kerja sama antardaerah juga penting untuk memperkuat rantai nilai. Secara ringkas dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan sentra IKM berbasis potensi lokal (hasil pertanian, perikanan, kelapa sawit).
2. Insentif alat produksi dan pelatihan teknologi tepat guna.
3. Kemitraan dengan swasta untuk hilirisasi produk unggulan daerah.

5. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Pertumbuhan sektor ini tercatat 3,50% (harga berlaku) dan hanya 1,18% (harga konstan). Gap ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan nominal didorong oleh kenaikan tarif transportasi, bukan peningkatan nyata volume barang/jasa yang diangkut. Hal ini relatif tidak cukup mendukung struktur pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana tercermin dari PDRB konstan yang cukup tinggi (7,50%).

Rekomendasi intervensi: Pemerintah daerah perlu berinvestasi pada sistem logistik lokal, memperbaiki jalan produksi dan pelabuhan perintis, serta mendorong digitalisasi sektor transportasi untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi distribusi. Dukungan terhadap moda transportasi ramah lingkungan juga perlu diperhatikan dalam RPJM yang berpihak pada keberlanjutan. Secara ringkas dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan dan kawasan industri.
2. Modernisasi fasilitas logistik dan terminal barang.
3. Sistem informasi logistik daerah (SILD) untuk mendukung efisiensi distribusi.

6. Sektor Informasi dan Komunikasi

Sektor ini mengalami anomali: pertumbuhan nominal positif (3,60%), namun pertumbuhan riil negatif (-5,52%). Ini menunjukkan bahwa secara nilai ekonomi terlihat

tumbuh, namun secara fisik atau produktivitas justru menurun signifikan. Padahal sektor ini menjadi penopang penting transformasi digital dan inklusi informasi dalam perekonomian modern. Jika dibiarkan, ini dapat menghambat kesinambungan pertumbuhan jangka panjang, bahkan memperlebar kesenjangan digital.
Rekomendasi intervensi: Pemerintah harus mendorong penguatan infrastruktur digital (akses internet desa, BTS, WiFi publik), peningkatan literasi digital masyarakat, serta mendukung ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, hibah startup, dan transformasi pelayanan publik ke arah digitalisasi. Secara ringkas dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Ekspansi jaringan internet dan layanan seluler ke wilayah terpencil.
2. Program literasi digital untuk masyarakat dan pelaku usaha.
3. Pengembangan layanan publik berbasis aplikasi digital (e-government).

7. Sektor Pengadaan Air dan Limbah

Sektor ini menunjukkan pertumbuhan harga berlaku 7,34%, namun mengalami kontraksi riil -3,23%. Ini adalah sinyal merah bagi kualitas pelayanan dasar. Pertumbuhan nilai ekonomi yang tidak dibarengi peningkatan layanan fisik menunjukkan bahwa biaya atau tarif naik, namun akses atau kualitas layanan tidak membaik. Ini bertentangan dengan arah pembangunan yang menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas.

Rekomendasi intervensi: Pemerintah perlu memperkuat BUMD sektor air minum dan sanitasi, meningkatkan investasi pada infrastruktur air bersih dan pengelolaan limbah terpadu, serta memperluas cakupan layanan ke kawasan padat dan pedesaan. Pendekatan berbasis masyarakat dan teknologi rendah biaya sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan akses yang adil.
Secara ringkas dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Modernisasi sistem pengelolaan air bersih dan jaringan perpipaan.
2. Dukungan pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle).
3. Kemitraan dengan swasta untuk pengelolaan limbah domestik dan industri.

Hasil analisis secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Aceh Barat pada 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara riil (7,50%) jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan nominal (3,55%), menunujukkan bahwa terdapat peningkatan output dan produktivitas nyata, bukan hanya karena inflasi. Namun demikian, tidak semua sektor berkontribusi merata terhadap tren ini. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dalam RPJM 2025–2029 ini diarahkan untuk memperkuat sektor yang tumbuh nyata dan memperbaiki sektor yang mengalami stagnasi produktivitas, demi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data pertumbuhan sektor usaha 2024 di Kabupaten Aceh Barat baik dilihat dari harga berlaku (nominal) maupun harga konstan (riil) dan dengan mempertimbangkan kontribusi nyata terhadap PDRB konstan (7,50%), maka sektor yang paling layak diprioritaskan dalam RPJM 2025–2029 dapat dilihat dari tabel matriks berikut:

Tabel 3.11 Prioritas Sektor Usaha Berpotensi Berdasarkan Pertumbuhan Riil Tahun 2024

Sektor Usaha Potensial	Pertumbuhan Riil (%)	Kontribusi terhadap PDRB (indikatif)	Potensi Lapangan Kerja & Daya Ungkit	Status Prioritas
Jasa Keuangan & Asuransi	22,43	Tinggi & stabil	Tinggi (UMKM, koperasi, pembiayaan)	Prioritas Utama (1)
Jasa Lainnya	7,50	Konsisten dan sesuai PDRB riil	Tinggi (ekonomi kreatif & informal)	Prioritas Kedua (2)
Perdagangan Besar & Eceran	3,65	Stabil dan menyokong konsumsi	Sedang – namun luas jangkauannya	Prioritas Ketiga (3)
Industri Pengolahan	1,81	Masih lemah (selisih inflasi tinggi)	Besar jika disertai hilirisasi	Perlu Intervensi Dukungan
Transportasi & Pergudangan	1,18	Kurang efisien	Kritis untuk logistik perdagangan	Perlu Reformasi Infrastruktur
Informasi & Komunikasi	-5,52	Negatif secara riil	Menurun, potensi digitalisasi stagnan	Intervensi Fundamental
Pengadaan Air & Limbah	-3,23	Tumbuh secara biaya, bukan layanan	Rendah, risiko pelayanan publik	Intervensi & Reform Layanan

Berdasarkan hasil prioritas sektor usaha potensial dalam Tabel 3.11 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menempati posisi prioritas tertinggi, disusul oleh Jasa Lainnya, kemudian Perdagangan Besar dan Eceran. Ketiganya diposisikan sebagai sektor unggulan untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Aceh Barat dalam jangka menengah (2025–2029). Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menjadi prioritas utama karena menunjukkan kinerja luar biasa baik dari sisi pertumbuhan nominal maupun riil, yang berarti sektor ini bukan hanya tumbuh karena inflasi atau kenaikan harga, tetapi juga karena ekspansi nyata kegiatan ekonomi. Prioritas ini penting karena sektor ini berperan sebagai katalisator perekonomian: mendukung permodalan UMKM, mendorong inklusi keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sistem keuangan yang lebih dalam dan efisien.

Selanjutnya, Jasa Lainnya yang juga menjadi prioritas, mencerminkan pertumbuhan sektor informal, jasa kreatif, dan ekonomi digital yang mulai signifikan. Sektor ini menjadi sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, khususnya untuk generasi muda, serta meningkatkan daya saing daerah dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Perdagangan Besar dan Eceran juga menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah, terutama karena stabilitas pertumbuhannya yang menunjukkan daya beli

masyarakat masih cukup terjaga. Intervensi terhadap sektor ini harus diarahkan untuk memperkuat ekosistem pasar lokal, mendorong digitalisasi perdagangan, serta memperluas konektivitas dan logistik. Sebaliknya, sektor seperti Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, Pengadaan Air dan Limbah, serta Informasi dan Komunikasi diposisikan sebagai sektor pendukung atau perlu pembenahan. Meskipun demikian, ini tidak berarti sektor-sektor ini diabaikan, melainkan perlu strategi jangka panjang untuk memperbaiki efisiensi, kualitas layanan publik, infrastruktur pendukung, serta ekosistem bisnisnya agar dapat lebih kompetitif.

3.3.2. Pengentasan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan pembangunan suatu daerah maupun negara. Kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran atau pendapatan di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah daerah menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Kemiskinan yang tinggi dapat menjadi penghambat pembangunan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, serta menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang untuk menekan angka kemiskinan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial semata, tetapi juga mencakup strategi pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Jika kemiskinan tidak diturunkan, berbagai dampak negatif dapat muncul, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi, di mana hanya segelintir kelompok yang menikmati pertumbuhan ekonomi sementara sebagian besar masyarakat tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Ketimpangan ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kemiskinan yang tinggi juga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan, karena keluarga miskin cenderung tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Akibatnya, generasi mendatang akan sulit meningkatkan taraf hidupnya, menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus. Kondisi ini juga memperburuk ketahanan pangan, karena masyarakat miskin memiliki daya beli yang rendah sehingga rentan mengalami kekurangan gizi dan gizi buruk, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas tenaga kerja dan kesehatan masyarakat secara umum.

Dampak lain yang juga perlu diperhatikan adalah meningkatnya angka pengangguran dan kesenjangan sosial, yang dapat berujung pada meningkatnya angka kriminalitas dan

ketidakamanan. Ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mereka cenderung mencari cara instan untuk bertahan hidup, yang dalam beberapa kasus bisa berujung pada tindakan kriminal. Selain itu, kemiskinan yang tinggi juga dapat melemahkan stabilitas politik dan pemerintahan, karena masyarakat yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini bisa menimbulkan gejolak sosial, ketidakpuasan, bahkan potensi konflik horizontal di masyarakat. Selain itu, dalam konteks pembangunan ekonomi hijau dan keberlanjutan, kemiskinan juga dapat berkontribusi pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Masyarakat miskin sering kali terpaksa mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan, seperti melalui penebangan liar atau perburuan satwa, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, degradasi lingkungan semakin parah, yang justru memperburuk kondisi kehidupan jangka panjang dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengatasi berbagai dampak tersebut, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang komprehensif dalam upaya menurunkan kemiskinan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah memperkuat sektor ekonomi berbasis kerakyatan seperti UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif agar masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap peluang ekonomi. Selain itu, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan perlu terus ditingkatkan agar sumber daya manusia dapat berkembang dan memiliki daya saing tinggi. Kebijakan fiskal yang tepat, seperti pemberian subsidi yang lebih terarah serta reformasi perpajakan yang berpihak kepada kelompok rentan, juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Tak kalah penting, pendekatan berbasis keberlanjutan seperti penguatan finansial hijau dan pertumbuhan ekonomi inklusif juga harus diperhatikan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, menurunkan angka kemiskinan bukan hanya sekadar tujuan pembangunan, tetapi juga menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, stabil, dan berdaya saing. Upaya ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Jika tidak ditangani dengan serius, kemiskinan tidak hanya akan menjadi beban ekonomi, tetapi juga akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, politik, dan lingkungan yang dapat menghambat kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan harus selalu mempertimbangkan strategi yang mampu mengurangi kemiskinan secara efektif dan inklusif, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas

sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur dasar. Salah satu langkah utama adalah mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih berkembang melalui pelatihan keterampilan, kemudahan akses permodalan, serta pendampingan usaha. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat harus diperkuat dengan teknologi yang lebih modern, peningkatan akses pasar, serta kebijakan subsidi yang tepat sasaran agar produktivitas petani dan nelayan meningkat. Di bidang pendidikan dan kesehatan, program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin serta peningkatan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu perlu terus diperluas guna memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan program padat karya sebagai solusi jangka pendek untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kurang mampu. Selanjutnya, optimalisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan desa, irigasi, dan akses air bersih, menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola potensi lokal serta memperkuat ekonomi berbasis lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi aspek penting agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat untuk periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.2.

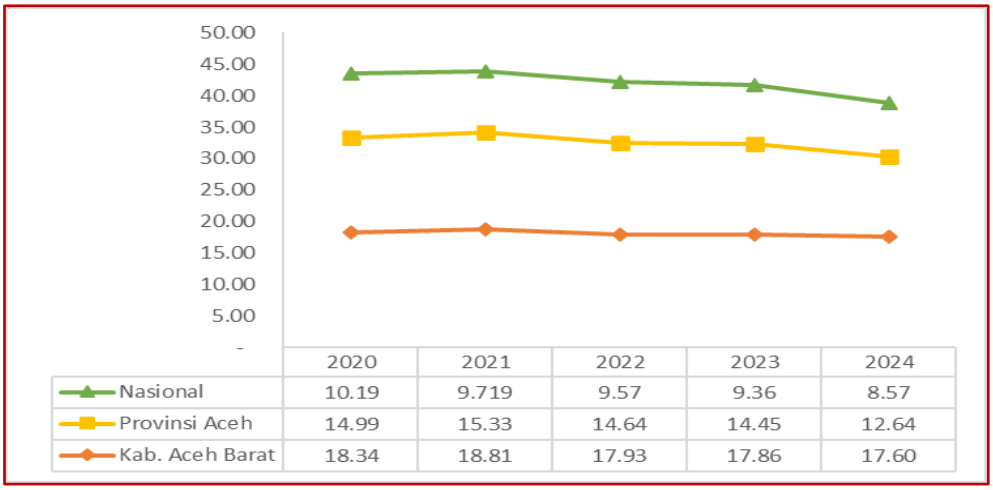

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	10.19	9.719	9.57	9.36	8.57
Provinsi Aceh	14.99	15.33	14.64	14.45	12.64
Kab. Aceh Barat	18.34	18.81	17.93	17.86	17.60

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 3.2
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024

Di tingkat Provinsi Aceh, tren kemiskinan menunjukkan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 14,99%, meningkat menjadi 15,33% pada 2021, sebelum akhirnya mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 12,64% pada 2024. Kenaikan pada 2021 mungkin dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Namun, tren penurunan yang cukup tajam setelah 2021 menunjukkan keberhasilan berbagai program pengentasan kemiskinan

yang diterapkan di Aceh, seperti penguatan sektor ekonomi lokal dan peningkatan akses terhadap pendidikan serta kesehatan.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Barat memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi. Pada 2020, angka kemiskinan di daerah ini mencapai 18,34%, mengalami sedikit peningkatan pada 2021 menjadi 18,81%, sebelum mulai menurun secara perlahan hingga 17,60% pada tahun 2024. Meskipun ada perbaikan, penurunan angka kemiskinan di Aceh Barat relatif lebih lambat dibandingkan Provinsi Aceh secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan di daerah ini masih cukup besar, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya daya saing ekonomi lokal, serta akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun angka kemiskinan secara nasional dan di Provinsi Aceh menunjukkan tren penurunan yang cukup baik, Aceh Barat masih menghadapi tantangan yang cukup berat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah agar penurunan angka kemiskinan dapat lebih cepat dan berkelanjutan..

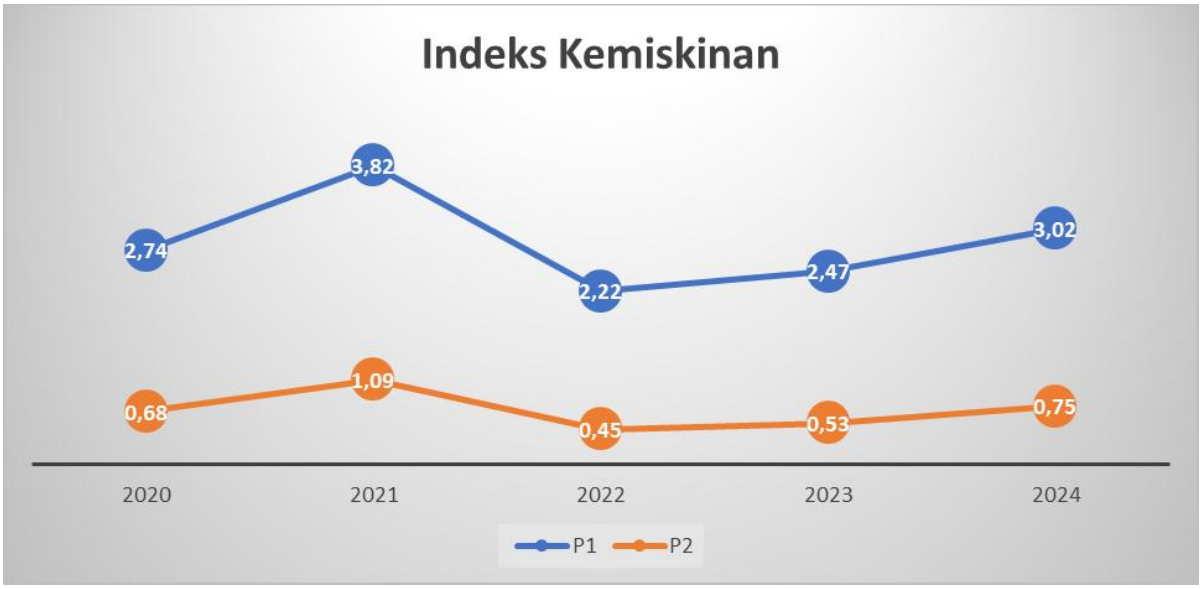

Gambar 3.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Aceh Barat (2020-2024)

Data indeks kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat selama periode 2020 hingga 2024 pada Gambar 3.3 menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang mencerminkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan mengalami fluktuasi cukup tajam. Setelah mencatat angka 2,74 pada 2020, P1 melonjak drastis ke 3,82 di tahun 2021, kemungkinan besar sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Meskipun sempat menurun menjadi 2,22 pada 2022 — menandakan upaya pemulihan mulai berhasil — tren ini kembali meningkat menjadi 2,47 pada 2023 dan 3,02 di tahun 2024. Hal serupa juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan (P2) yang mengukur tingkat ketimpangan antarpenduduk miskin. P2 naik dari 0,68 pada 2020 ke 1,09 pada 2021, lalu menurun ke 0,45 pada 2022, namun kembali naik menjadi 0,53 dan 0,75 pada dua tahun berikutnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum ekonomi mulai pulih, ketimpangan di kalangan warga miskin masih menjadi masalah serius.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi riil menurut data atas dasar harga konstan 2010, terlihat bahwa Aceh Barat mengalami pertumbuhan yang positif di sejumlah sektor. Di antaranya adalah sektor jasa keuangan, pendidikan, pengelolaan air dan limbah, jasa perusahaan, perdagangan, serta konstruksi. Pertumbuhan yang cukup signifikan di sektor-sektor ini seharusnya mampu berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, namun tren P1 dan P2 menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif.

Berdasarkan sektor yang paling berpotensi dalam mendukung pengurangan kemiskinan dilihat dari laju pertumbuhan riil Kabupaten Aceh Barat periode 2020-2024, maka dapat diusulkan beberapa intervensi strategis yang dapat dilakukan Pemda Aceh Barat:

1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TVET)
   Mengingat sektor pendidikan tumbuh stabil, memperluas akses pendidikan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja lokal seperti jasa teknis, konstruksi, dan pertanian dapat langsung meningkatkan daya saing tenaga kerja miskin.
2. Pengembangan UMKM di Sektor Perdagangan dan Jasa Perusahaan
   - Pelatihan kewirausahaan, digital marketing, dan dukungan pembiayaan mikro sangat penting.
   - Menghubungkan UMKM dengan pasar digital dan rantai pasok lebih besar dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan kelompok rentan.
3. Ekonomi Sirkular di Sektor Pengelolaan Limbah
   - Memberdayakan masyarakat melalui program bank sampah, daur ulang berbasis komunitas, dan pemberdayaan pemulung lokal berpotensi besar menciptakan lapangan kerja baru berbasis lingkungan.
4. Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
   - Mendorong literasi keuangan, akses tabungan, asuransi mikro, dan pinjaman produktif untuk kelompok miskin dan pelaku informal dapat mengurangi kerentanan ekonomi mereka.
5. Proyek Padat Karya di Sektor Konstruksi

- Memanfaatkan proyek infrastruktur desa, perbaikan irigasi, dan perumahan rakyat untuk menyerap tenaga kerja lokal miskin secara langsung.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat memfokuskan kebijakan pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki efek pengganda terhadap penyerapan tenaga kerja miskin dan peningkatan pendapatan mereka. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi (TVET) sangat penting untuk membekali masyarakat miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar. Sektor perdagangan dan jasa perusahaan dapat menjadi wadah bagi pengembangan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan dan akses pasar digital. Penguatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah dan daur ulang juga menjanjikan sebagai lapangan kerja alternatif berbasis lingkungan. Selain itu, sektor konstruksi dapat diperkuat melalui proyek padat karya yang langsung menyerap tenaga kerja lokal, sementara sektor keuangan perlu diperluas cakupannya melalui program inklusi dan literasi keuangan yang menyasar masyarakat berpendapatan rendah. Dengan strategi terarah pada sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan dan potensi pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi Aceh Barat akan menjadi lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

3.3.2.1. Optimalisasi Peran Perusahaan Tambang untuk Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Salah satu aktor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk mendorong pengurangan kemiskinan adalah perusahaan pertambangan. Di berbagai wilayah, kegiatan pertambangan seringkali beroperasi di daerah yang justru masih menghadapi persoalan mendasar seperti tingginya angka pengangguran, keterbatasan infrastruktur layanan dasar, serta rendahnya kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat yang memiliki angka kemiskinan serta pengangguran tinggi, belum meratanya pembangunan infrastruktur, serta sektor pendidikan dan kesehatan yang masih belum optimal dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, kehadiran perusahaan tambang perlu dioptimalkan agar tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang signifikan di tingkat lokal.

Strategi pengurangan angka kemiskinan dapat dibangun dengan mengintegrasikan dua potensi utama perusahaan tambang, yaitu kekuatan pendanaan dan aktivitas operasional. Dari sisi pendanaan, perusahaan memiliki kontribusi kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara (DBH Minerba), serta *anggaran Corporate Social Responsibility* (CSR). Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi pengurangan jumlah masyarakat miskin.

Sementara itu, dari sisi operasional, perusahaan tambang membutuhkan berbagai jenis layanan penunjang yang sebenarnya bisa disediakan oleh masyarakat sekitar apabila dibina dan difasilitasi dengan baik. Dengan demikian, penguatan ekonomi masyarakat tidak harus dibangun dari nol, melainkan cukup dengan membuka akses mereka terhadap ekosistem ekonomi perusahaan yang telah mapan.

Pemanfaatan dana CSR dan DBH Minerba dapat diarahkan secara strategis untuk membiayai pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti penyediaan air bersih, perbaikan jalan, pembangunan fasilitas pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan primer. Selain itu, dana tersebut dapat difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, dukungan permodalan, serta penyediaan sarana produksi. Dalam jangka panjang, dukungan ini akan memperkuat ketahanan pangan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Optimalisasi perusahaan tambang dapat dilihat pada bagan berikut :

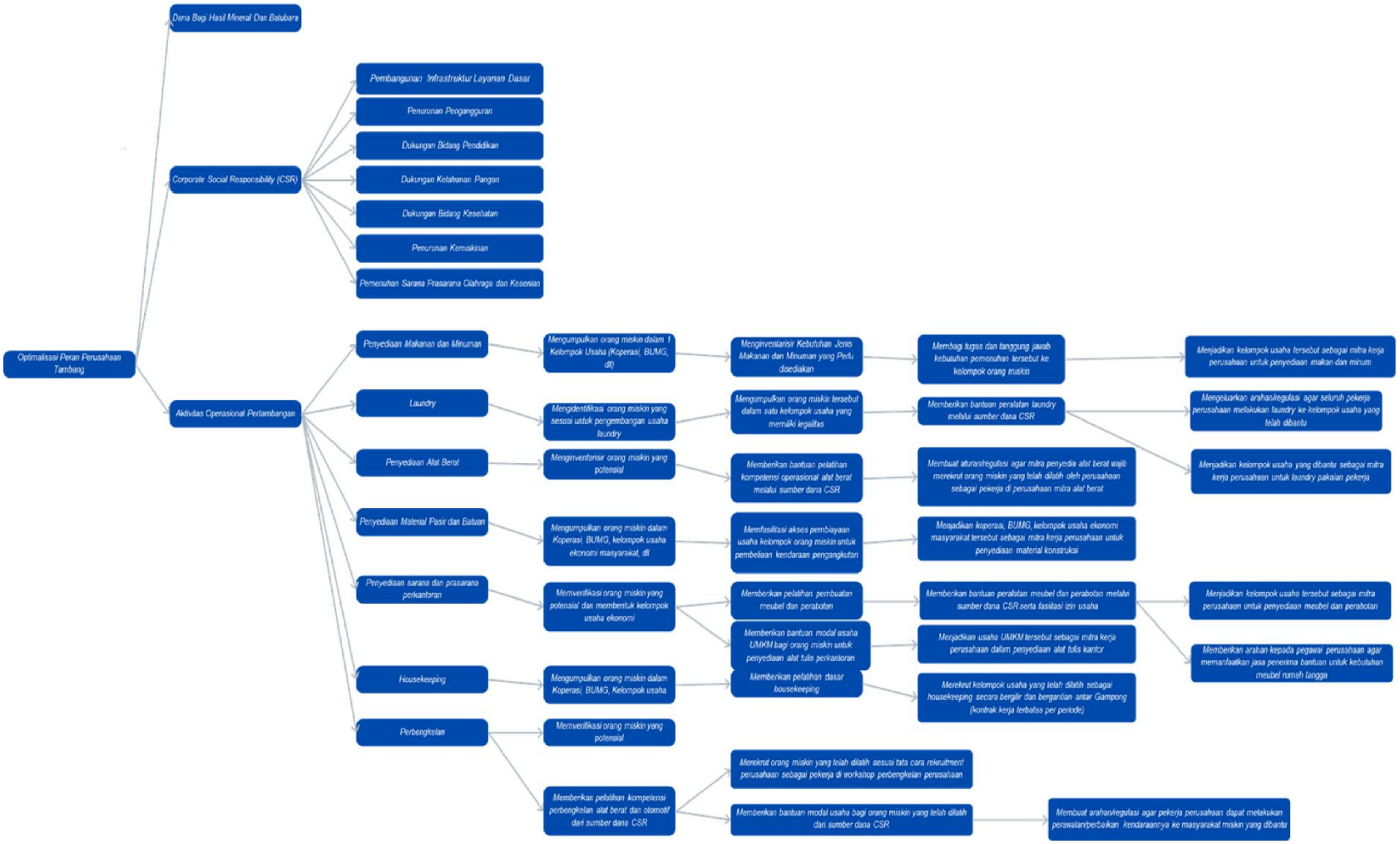

Gambar 3.4
Optimalisasi Peran Perusahaan Tambang untuk Pengentasan Kemiskinan

Upaya lain yang juga sangat penting adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga dan kesenian, yang tidak hanya berdampak pada pembangunan karakter dan kesehatan mental, tetapi juga berfungsi sebagai media pemberdayaan generasi muda.

Namun, pendekatan yang hanya bergantung pada pendanaan tidak akan cukup apabila tidak dibarengi dengan upaya integrasi aktivitas operasional perusahaan sebagai alat pemberdayaan. Setiap hari, perusahaan tambang membutuhkan berbagai layanan seperti penyediaan makanan dan minuman, laundry pakaian kerja, alat berat, material konstruksi, layanan kebersihan, perbengkelan, hingga penyediaan furnitur dan peralatan kantor. Semua kebutuhan ini seharusnya tidak terus-menerus dipenuhi oleh vendor eksternal dari luar daerah, melainkan bisa dijadikan peluang usaha bagi kelompok masyarakat miskin yang telah dibina secara tepat.

Misalnya, untuk kebutuhan konsumsi harian, perusahaan dapat bermitra dengan kelompok usaha masyarakat miskin yang difasilitasi dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Kelompok ini diberikan pelatihan dan peralatan melalui dana CSR, kemudian ditetapkan sebagai mitra penyedia makanan dan minuman bagi karyawan perusahaan. Pola yang sama dapat diterapkan pada layanan laundry, di mana kelompok usaha yang terdiri dari warga miskin diberikan pelatihan serta bantuan peralatan, lalu ditugaskan secara resmi sebagai penyedia jasa pencucian pakaian kerja perusahaan. Melalui kebijakan internal, perusahaan dapat menetapkan bahwa seluruh laundry karyawan hanya dilakukan oleh kelompok usaha binaan tersebut, sehingga ada kesinambungan permintaan yang mampu menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Lebih lanjut, kebutuhan perusahaan terhadap alat berat dan tenaga teknis juga bisa menjadi ruang pemberdayaan. Warga miskin yang memiliki potensi dan minat dalam bidang teknis dapat difasilitasi untuk mengikuti pelatihan pengoperasian alat berat, kemudian direkrut oleh vendor perusahaan atau oleh perusahaan itu sendiri. Kebijakan perekrutan ini dapat diatur melalui regulasi internal yang mewajibkan mitra penyedia alat berat untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. Demikian pula dalam hal pengadaan material pasir dan batu, koperasi masyarakat dapat difungsikan sebagai pemasok utama material konstruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas perusahaan dan infrastruktur desa. Pemerintah daerah dan perusahaan bersama-sama memfasilitasi akses perizinan, modal kerja, serta pembinaan teknis agar masyarakat benar-benar mampu memenuhi permintaan secara profesional.

Di bidang lain seperti housekeeping dan perbengkelan, pola yang sama dapat dijalankan. Untuk housekeeping, perusahaan dapat merekrut kelompok warga lokal yang telah mendapatkan pelatihan sebagai petugas kebersihan kantor dan fasilitas tambang. Sementara untuk kebutuhan perbengkelan, pemuda miskin yang telah mengikuti

pelatihan perbaikan kendaraan dapat dipekerjakan di bengkel perusahaan atau didorong untuk membuka bengkel sendiri yang menjadi mitra resmi perusahaan. Keseluruhan proses ini akan menciptakan ekosistem ekonomi baru yang berakar pada kapasitas lokal dan disinergikan dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Agar semua program ini berjalan efektif, diperlukan penguatan koordinasi antar pihak. Perusahaan harus memiliki komitmen kebijakan internal yang jelas dalam menjadikan kelompok usaha lokal sebagai mitra kerja utama. Pemerintah daerah perlu menyediakan data kemiskinan yang valid dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau pihak ketiga juga dapat dilibatkan sebagai fasilitator program, terutama dalam hal pelatihan, pembinaan, dan monitoring. Keberhasilan program ini diukur bukan hanya dari terserapnya dana CSR, tetapi dari seberapa besar masyarakat miskin dapat mandiri secara ekonomi, meningkatnya pendapatan keluarga, serta berkurangnya ketimpangan sosial di wilayah sekitar tambang.

Dengan pendekatan yang menyatukan antara tanggung jawab sosial dan efisiensi operasional, perusahaan pertambangan dapat menjadi kekuatan pembangunan yang nyata di daerah. Pengurangan kemiskinan tidak hanya menjadi retorika, tetapi diwujudkan dalam bentuk kesempatan kerja, tumbuhnya usaha masyarakat, dan terciptanya keadilan sosial melalui kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.3.2.2. Intervensi Kemiskinan dan Stunting Terintegrasi

Tingkat kesejahteraan masyarakat seringkali diidentifikasi dengan adanya keterbebasan dari kemiskinan seperti kecukupan pangan, adanya jaminan pendidikan dan kesehatan yang layak, serta tersedianya kesempatan kerja bagi mereka yang mencari pekerjaan. Kabupaten Aceh Barat memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, mencapai 17,60% pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh yang sebesar 12,64% serta Nasional yang sebesar 8,57% di tahun yang sama. Pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan telah mengupayakan berbagai program/kegiatan, dan telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan disetiap tahunnya meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan.

Kemiskinan atau serba kekurangan dimana yang secara kuantitif bermakna tidak memiliki harta benda dan secara kualitatif yaitu berada dalam kondisi yang tidak layak. Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah berkomitmen dalam mengurangi jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan dan mencegah bertambahnya kemiskinan baru. Berbagai program/kegiatan direncanakan dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Program/kegiatan yang dihadirkan dalam pembangunan bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan program lainnya yang selaras dengan pengurangan angka kemiskinan. Pengurangan kemiskinan ekstrem, stunting, dan tingkat pengangguran merupakan permasalahan sosial yang sering terjadi dan perlu mendapat perhatian pemerintah. Stunting pada balita umumnya terjadi pada masyarakat yang kurang mampu dengan akses layanan kesehatan yang kurang memadai serta kecenderungan terbatasnya akses gizi yang memadai. Disisi lain, stunting juga terjadi akibat orangtua tidak mampu bekerja dikarenakan terbatasnya kesempatan kerja bagi mereka serta didukung oleh rendahnya pendidikan pencari kerja. Hal ini berdampak langsung pada keterbatasan akses bagi keluarga dalam memperoleh makanan yang bergizi dan menyebabkan stunting atau gizi buruk salah satunya.

Memperhatikan permasalahan tersebut, pemerintah mendorong program/kegiatan dengan mengiintegrasikan berbagai sektor untuk menghasilkan ragam produksi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin serta mengembalikan kesempurnaan asupan gizi masyarakat miskin dengan memanfaatkan lahan mandiri untuk dibudidayakan menjadi berbagai produk dalam rangka diversifikasi pangan. Proses pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstem dan stunting dapat dilhat pada gambar berikut:

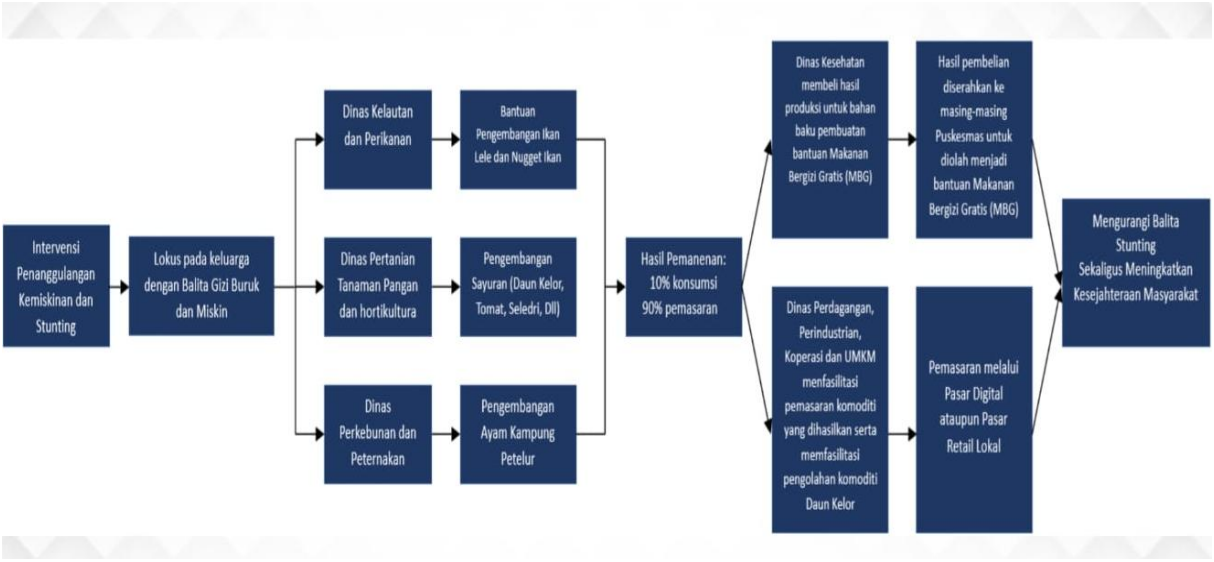

Gambar 3.5
Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Intervensi penanggulangan kemiskinan dan stunting dilaksanakan pada keluarga miskin yang terdapat balita dengan kondisi gizi buruk pada wilayah dalam Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan data yang bersumber dari Satuan Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (Satgas TPPS) Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 terdapat 152 Balita dengan status stunting. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB), pemerintah meluncurkan program DASHAT (Dapur Sehat

Atasi Stunting) yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan gizi seimbang, khususnya pada keluarga berisiko stunting. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mendorong dinas terkait dalam mendukung penyediaan bahan baku dalam makanan bergizi gratis (MBG) untuk antisipasi masyarakat miskin dan stunting (KUMIS). Penyediaan bahan baku untuk MBG dilaksanakan oleh OPD terkait seperti sektor perikanan, pertanian dan perternakan dengan memberdayakan keluarga miskin yang terdampak langsung balita gizi buruk ataupun stunting. Pengolahan lahan yang belum termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat miskin dengan penyediaan bahan oleh OPD terkait dilakukan hingga menghasilkan produk. Bantuan kepada masyarakat miskin akan diberikan sesuai dengan ketersediaan lahan dan prospek pengembangannya. Adapun bantuan yang akan diberikan diantaranya :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan, memberikan bantuan pengembangan benih ikan lele dan nugget ikan. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan nugget ikan berasal dari ikan yang memiliki protein tinggi yang dibutuhkan bagi balit dengan gizi buruk;
2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, akan memberikan bantuan pengembangan tanaman bantuan pangan perkarangan lestari (P2L) berupa daun kelor, tomat, seledri, dan jenis tanaman lainnya yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan gizi balita stunting; dan
3. Dinas Perkebunan dan Peternakan, akan memberikan bantuan pengembangan ayam kampung petelur.

Hasil dari pemanenan produksi dari masing-masing sektor akan digunakan untuk keperluan konsumsi keluarga sebesar 10% dan untuk perdagangan sebesar 90%. Untuk pemasaran berbagai produk tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dalam mengadakan bahan-bahan baku pembuatan Makanan Bergizi Gratis langsung membeli dari keluarga miskin yang menghasilkan produksi ikan lele, nugget ikan, sayuran dan ayam serta telur yang sangat dibutuhkan dalam mengurangi balita gizi buruk. Bahan-bahan baku yang dibeli tersebut akan langsung diolah oleh masing-masing Puskesmas sebagai pelaksana teknis lapangan dalam penurunan angka stunting di masyarakat. Di sisi lain, terhadap hasil produksi yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan MBG, dapat dipasarkan secara digital melalui *e-commerce* maupun ke toko retail dan swalayan yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan, Peridustrian, Koperasi dan UMKM. Dengan adanya stimulasi yang saling menguntungkan ini diharapkan tidak hanya menurunkan persentase balita stunting melalui Makanan Bergizi Gratis, namun juga memberikan kesempatan kerja bagi keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan keluarga serta mampu menurunkan angka kemiskinan daerah kearah yang labih baik lagi. Disisi lain, program/kegiatan lainnya yang dirancang akan diselaraskan dengan target Pembangunan yaitu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan keluarga serta meningkatkan ketahanan pangan keluarga demi terwujudnya diversifikasi pangan daerah.

3.3.3. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah, termasuk Aceh Barat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), TPT perlu menjadi perhatian utama karena mencerminkan jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan meskipun aktif mencari kerja. Tingginya angka pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, dan memicu ketimpangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian TPT harus menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah keterkaitan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah. Aceh Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi di sektor-sektor tersebut dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha, meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, serta mengembangkan infrastruktur pendukung agar tercipta lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri lokal harus diperkuat agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar.

Selanjutnya, perlu menyoroti permasalahan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja. Salah satu penyebab tingginya pengangguran di Aceh Barat adalah kurangnya kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan dan pelatihan kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Program link and match antara dunia pendidikan dengan sektor industri harus diperkuat untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Selain itu, perhatian terhadap pengangguran kaum muda dan perempuan dalam RPJM Aceh Barat juga sangat penting. Kelompok ini seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif seperti program pelatihan berbasis gender, dukungan bagi wirausaha muda, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif harus menjadi bagian dari strategi pengurangan pengangguran. Pemerintah daerah juga perlu mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja dengan menciptakan kebijakan yang mendukung pekerjaan berbasis digital dan ekonomi berbagi, yang dapat memberikan lebih banyak peluang kerja bagi generasi muda.

Permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Barat memiliki urgensi yang tinggi dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Ketenagakerjaan yang optimal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi indikator ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan kompetensi tenaga kerja, yang berpotensi memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan memahami dinamika pasar tenaga kerja, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri lokal, penciptaan ekosistem kewirausahaan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan sektor-sektor unggulan daerah yang mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Selain itu, analisis ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor struktural yang menghambat penciptaan lapangan kerja, seperti regulasi investasi, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia, sehingga strategi pembangunan dapat lebih efektif dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Aceh Barat.

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Penduduk Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia produktif (15 tahun ke atas) dan aktif dalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja, memiliki pekerjaan dan sedang menjalankannya, maupun yang belum mendapat pekerjaan atau pengangguran. Tenaga kerja merupakan indikator yang menggambarkan tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan mencari penghasilan dan menghasilkan produk dan jasa saat proses periode survei di lapangan. Penduduk Bukan Angkatan Kerja (PBAK) merujuk kepada kelompok individu dalam suatu daerah yang tidak tergolong dalam angkatan kerja, yaitu kanak-kanak, Remaja, Ibu Rumah Tangga dan orang tua.

Penduduk Bukan Angkatan Kerja (BAK) boleh jadi bergantung kepada penduduk yang sedang bekerja. Ketergantungan ini berlaku apabila BAK, memerlukan dukungan ekonomi dari individu yang bekerja dalam keluarga atau masyarakat. Gambar 3.4 menunjukkan jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja (BAK) di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan kegiatan utama yang mereka lakukan selama periode 2019 hingga 2023. Kategori BAK ini mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga (RT), dan melakukan kegiatan lainnya (seperti tidak bekerja karena sakit, disabilitas, atau alasan pribadi lainnya).

Selama lima tahun terakhir, jumlah total BAK cenderung fluktuatif, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2019 dan 2022 sebesar 68.366 jiwa, dan terendah pada

tahun 2020 dan 2023 sebanyak 62.187 jiwa. Secara rinci, sebagian besar BAK berasal dari kelompok mengurus rumah tangga, yang consistently merupakan kategori terbesar, dengan angka tertinggi sebesar 43.356 jiwa pada tahun 2019 dan 2022, dan angka terendah sebesar 35.604 jiwa pada 2020 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa peran domestik, terutama perempuan yang mengurus rumah tangga, masih mendominasi proporsi penduduk non-produktif.

Sementara itu, penduduk yang berstatus sekolah menunjukkan penurunan dari 17.832 jiwa pada 2019 menjadi 14.586 jiwa pada 2021, kemudian sedikit meningkat menjadi 16.267 jiwa pada 2023. Kategori lainnya relatif stabil di kisaran 8.146 hingga 10.316 jiwa, yang menunjukkan adanya segmen penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan produktif maupun pendidikan.

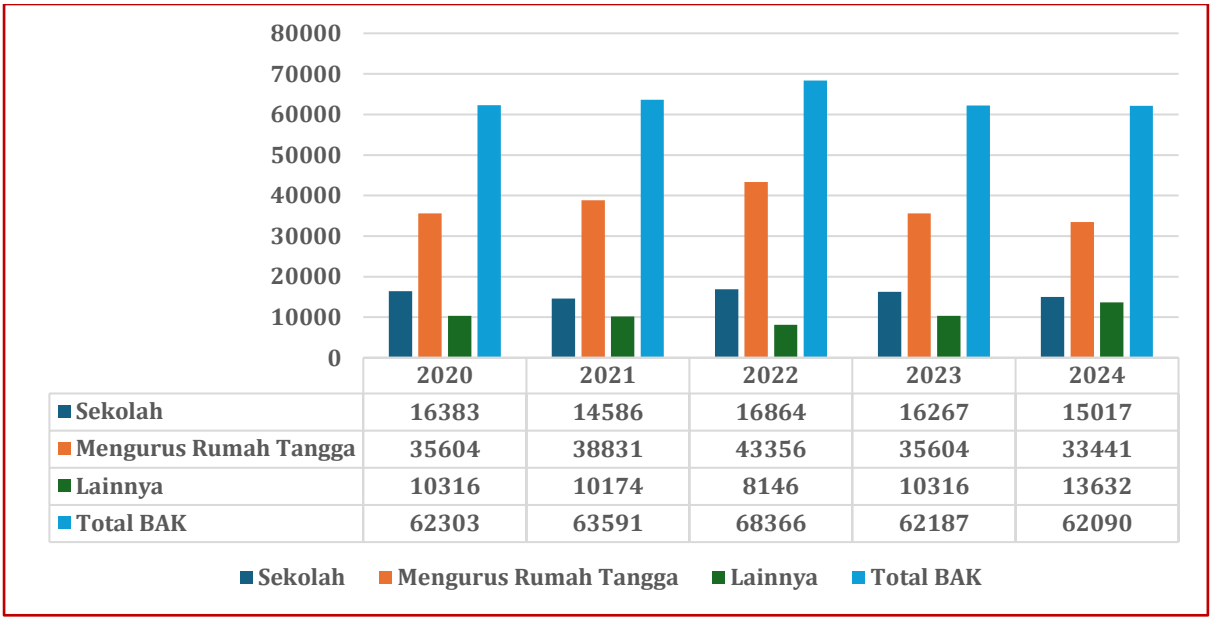

	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah	16383	14586	16864	16267	15017
Mengurus Rumah Tangga	35604	38831	43356	35604	33441
Lainnya	10316	10174	8146	10316	13632
Total BAK	62303	63591	68366	62187	62090

Sumber : BPS Aceh (2024)

Gambar 3.6
Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 (Jiwa).

Data pada Gambar 3.6 menunjukkan dinamika jumlah penduduk bukan angkatan kerja (BAK) di Kabupaten Aceh Barat selama periode 2020 hingga 2024, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kategori lainnya (tidak bekerja karena alasan seperti disabilitas, sakit, usia lanjut, atau alasan pribadi). Secara keseluruhan, jumlah total BAK dalam kurun waktu ini cenderung berfluktuasi, namun relatif stabil dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 68.366 jiwa dan terendah pada tahun 2020 sebesar 62.303 jiwa. Fluktuasi ini dapat mencerminkan respons sosial terhadap perubahan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pasca-pandemi.

Kelompok yang mengurus rumah tangga secara konsisten merupakan komponen terbesar dari populasi BAK, dengan puncaknya juga terjadi pada tahun 2022 (43.356 jiwa). Namun, terjadi penurunan pada dua tahun berikutnya hingga mencapai 33.441 jiwa pada 2024. Penurunan ini berpotensi menunjukkan adanya pergeseran sosial, di mana perempuan sebagai pelaku utama rumah tangga mulai lebih banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik di sektor informal maupun melalui usaha mikro. Sementara itu, jumlah penduduk yang sedang bersekolah sempat mengalami kenaikan pada 2022 (16.864 jiwa), yang kemungkinan besar mencerminkan pemulihan aktivitas pendidikan pasca-pandemi. Namun, penurunan kembali pada 2023 dan 2024 hingga menjadi 15.017 jiwa dapat menjadi sinyal awal terhadap risiko putus sekolah atau keterbatasan akses pendidikan lanjutan.

Yang cukup signifikan adalah peningkatan jumlah BAK pada kategori "lainnya" pada tahun 2024 (13.632 jiwa), setelah sempat menurun pada 2022. Kategori ini mencerminkan penduduk yang tidak bekerja karena faktor non-produktif seperti sakit, disabilitas, atau tidak memiliki minat bekerja. Kenaikan dalam kategori ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama dalam bentuk perluasan jangkauan layanan perlindungan sosial, kesehatan masyarakat, dan dukungan inklusif bagi kelompok rentan.

Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia di Aceh Barat tidak hanya berkaitan dengan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menyentuh dimensi akses pendidikan, peran gender, dan perlindungan sosial. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu merespons situasi ini dengan program yang bersifat partisipatif dan memberdayakan, seperti penguatan pendidikan vokasional untuk usia produktif yang tidak melanjutkan sekolah, pelatihan keterampilan berbasis komunitas bagi perempuan, serta layanan rehabilitasi dan integrasi sosial bagi kelompok rentan. Pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam memperkecil angka bukan angkatan kerja serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

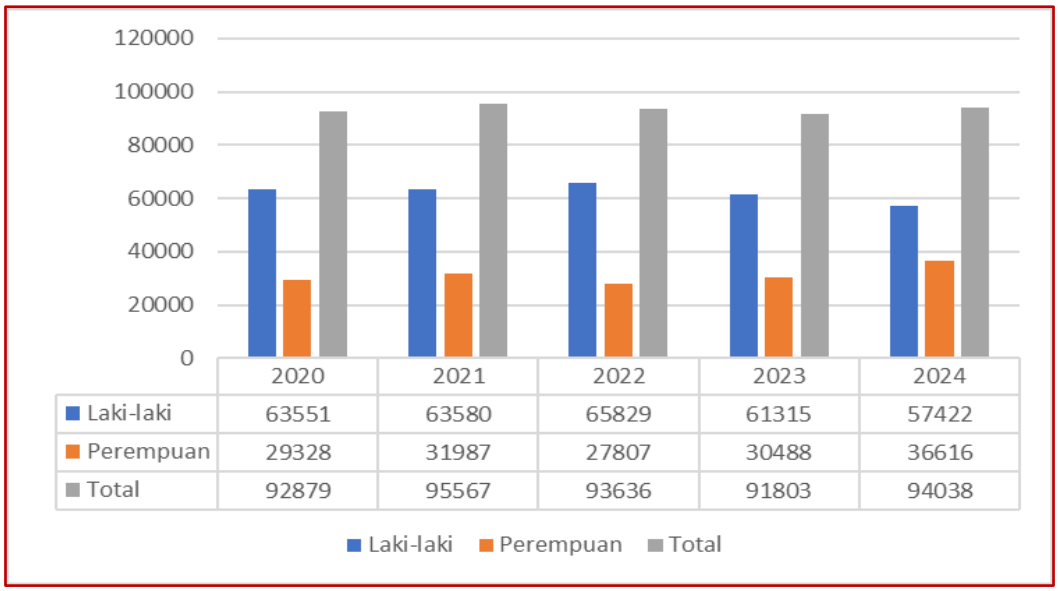

Sumber : BPS Aceh (2024)

Gambar 3.7
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024 (Jiwa)

Kabupaten Aceh Barat, tampak dari Gambar 3.7, jumlah angkatan kerja didominasi oleh laki-laki. Hal ini berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi peran gender dalam masyarakat. Di Aceh Barat, seperti di banyak daerah lainnya, banyak perempuan yang lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, meskipun ada juga perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perempuan untuk lebih memilih menjadi ibu rumah tangga dapat berupa;

1. Norma Sosial dan Budaya
   Peran perempuan sering kali dipandang lebih sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak. Ini sering kali membatasi peluang mereka untuk bekerja di luar rumah.
2. Akses ke Pendidikan dan Pelatihan
   Meskipun tingkat pendidikan perempuan di Aceh Barat semakin meningkat, akses terhadap pelatihan keterampilan atau pekerjaan yang sesuai mungkin masih terbatas, terutama di daerah pedesaan.
3. Keterbatasan Infrastruktur
   Perempuan dapat memilih untuk tidak memasuki pasar kerja karena kurangnya infrastruktur atau peluang pekerjaan di sektor non-pertanian dapat membuat perempuan lebih memilih untuk tidak bekerja di luar rumah.
4. Keseimbangan Keluarga dan Pekerjaan
   Perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga memungkinkan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, terutama ketika memiliki anak kecil.

Namun, meskipun ada kecenderungan ini, beberapa tahun terakhir telah terlihat perubahan dalam masyarakat Aceh Barat, di mana lebih banyak perempuan yang mulai terlibat dalam dunia usaha, bekerja di sektor informal, dan mengembangkan karier di sektor formal. Ini sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat bisa menjadi fokus untuk mengurangi kesenjangan gender dalam dunia kerja dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah cukup besar dan menunjukkan adanya kesempatan kerja yang tersdia dan partisipasi tenaga kerja yang kuat. TPAK menunjukkan besaran relatif pasokan tenaga kerja (labor supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Gambar 2.2.4 memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Aceh Barat secara umum masih berada 60 persen kebawah, ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam hal partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi atau pasar tenaga kerja.

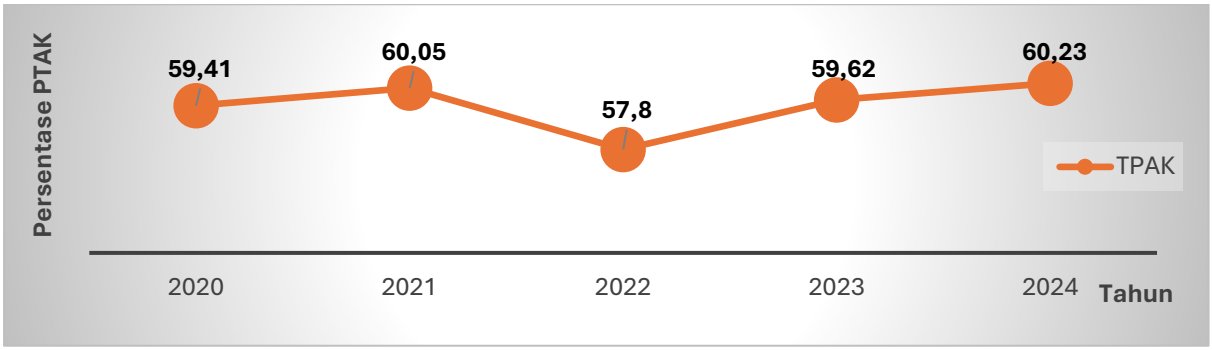

Sumber : BPS Aceh (2025)

Gambar 3.8
Perkembangan Tingkat Partisipasi Kerja di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

TPAK yang rendah bisa mengindikasikan bahwa banyak orang di usia produktif tidak aktif dalam mencari pekerjaan atau tidak bekerja sama sekali, yang dapat memiliki beberapa implikasi penting, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Implikasi tersebut dapat dipahami sebagai berikut;

1. Penurunan Potensi Pertumbuhan Ekonomi
   Implikasi langsung dari TPAK yang rendah berarti sebagian besar penduduk usia kerja tidak terlibat dalam ekonomi formal. Hal ini menghambat kontribusi mereka terhadap produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat. Dengan rendahnya partisipasi angkatan kerja,

banyak potensi individu yang terabaikan, sehingga ekonomi lokal tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah
   TPAK yang rendah bisa berarti ada banyak individu yang mungkin tidak terlihat sebagai pengangguran karena mereka tidak aktif mencari pekerjaan. Mereka bisa jadi berada dalam keadaan tidak produktif, seperti terjebak dalam pekerjaan yang tidak memadai atau tidak bekerja sama sekali. Jika banyak orang tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan, kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan mendapatkan pengalaman kerja berkurang. Ini mengarah pada rendahnya tingkat keterampilan dan produktivitas di kalangan penduduk.
3. Meningkatnya Angka Kemiskinan
   Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan lebih banyak pendduduk yang tidak memiliki pendapatan tetap atau bergantung pada sektor informal dengan penghasilan yang tidak stabil. Ketidakmampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar kerja secara aktif meningkatkan kemungkinan terjadinya kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena ketidakmampuan sistem atau struktur ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai.
4. Pergeseran Struktur Sosial dan Politis
   Peningkatan ketidakpuasan sosial: Ketika banyak orang, terutama kaum muda, merasa tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak, mereka mungkin merasa tidak puas dengan kondisi sosial-ekonomi di daerah mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial atau bahkan protes terhadap pemerintah lokal. TPAK rendahini dapat menunjukkan banyak individu yang migrasi bahkan luar daerah untuk mencari pekerjaan. Hal ini bisa menyebabkan ketimpangan antara daerah asal dan daerah tujuan dalam hal sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.
5. Keterbatasan Diversifikasi Ekonomi
   Salah satu penyebab TPAK rendah, dapat terjadi karena masyarakat terlalu bergantung pada sektor pertanian atau perikanan yang cenderung menyediakan lapangan kerja terbatas. Dengan rendahnya TPAK, upaya untuk mendiversifikasi ekonomi atau mengembangkan sektor lain yang lebih berpotensi tumbuh (seperti industri atau teknologi) akan terhambat. Daerah dengan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung kurang menarik bagi investor. Investor lebih tertarik pada daerah yang memiliki tenaga kerja yang aktif dan terampil, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan maksimal dari kegiatan produksi.
6. Penurunan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan
   Kesejahteraan sosial: Dengan banyaknya individu yang tidak berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, pendapatan per kapita akan rendah, yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Ketidakaktifan dalam bekerja bisa

berhubungan dengan masalah kesehatan mental dan fisik, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan tidur yang terkait dengan ketidakpastian pekerjaan.

7. Perlambatan Inovasi dan Pembangunan
   Potensi inovasi yang terhambat: Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam ekonomi formal atau sektor yang lebih produktif menghambat munculnya ide-ide baru dan inovasi yang bisa mendongkrak perekonomian. Sebuah daerah dengan TPAK yang rendah mungkin kesulitan untuk berkompetisi dengan daerah lain yang memiliki partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Untuk mengatasi rendahnya TPAK, beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dan masyarakat Aceh Barat meliputi:

1. Peningkatan pendidikan dan keterampilan, Melalui program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, agar lebih banyak orang siap untuk bekerja di berbagai sektor.
2. Diversifikasi lapangan pekerjaan, Pemerintah perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang baru dan berpotensi, seperti pariwisata, teknologi, atau industri kreatif.
3. Peningkatan akses terhadap informasi lowongan kerja, Memastikan bahwa warga memiliki akses yang mudah dan cukup informasi terkait peluang pekerjaan, seperti melalui bursa kerja atau platform digital.

Data pada Gambar 3.9 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai perkembangan TPT Kabupaten Aceh Barat selama lima tahun terakhir.

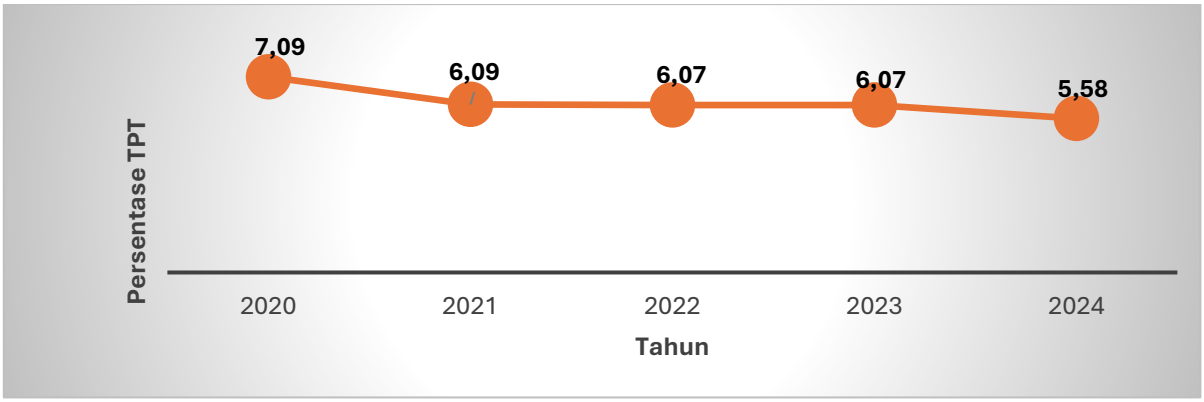

Sumber : BPS Aceh (2025)

Gambar 3.9
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2020-2024

Tahun 2023, TPT mengalami penurunan yang lebih signifikan, mencapai 6,07 %. Hal ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa langkah-langkah untuk mengatasi pengangguran

mulai memberikan dampak positif, dengan adanya peningkatan lapangan kerja di sektor-sektor tertentu serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Tahun 2024, TPT mengalami penurunan namun berada di bawah 6 persen menjadi 5,58 %. Penurunan ini tetap menunjukkan arah perbaikan yang konsisten dalam kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Barat. Upaya pendidikan dan pelatihan kerja mungkin mulai menunjukkan hasil, meskipun tantangan di beberapa sektor masih ada. Penurunan ini mencerminkan adanya keberhasilan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan yang lebih baik. Program-program pemerintah yang fokus pada pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor lainnya di daerah Aceh Barat juga dapat berkontribusi terhadap penurunan TPT ini.

Implikasi tingkat pengangguran, yang terus menurun dapat menunjukkan penurunan ketergantungan dari penduduk yang tidak bekerja. Penurunan tingkat pengangguran ini akan meningkatkan daya beli dan menurunkan kemiskinan di daerah. Implikasi Angka pengangguran yang menurun menandakan bahwa sumber daya manusia yang ada mulai dimanfaatkan kearah maksimal dan ketimpangan ekonomi antara masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap dan yang menganggur mulai menurun. Ini dapat menurunkan kesenjangan sosial-ekonomi yang sebeumnya melebar, yang berpotensi menciptakan kestabilan sosial.

Untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Aceh Barat, ada beberapa kebijakan dan rekomendasi dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan
   Perpres No. 68 Tahun 2022 (didukung oleh penelitian-penelitian kebijakan pendidikan vokasi)**:** Menyatakan perlunya revitalisasi pendidikan vokasi agar sesuai kebutuhan pasar.
   a. Pelatihan Keterampilan.
      Program pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja, terutama bagi para pencari kerja muda, sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai sektor industri yang sedang berkembang. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan atau perusahaan untuk menyediakan kursus-kursus yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
   b. Pendidikan Vokasi.
      Mengembangkan dan memperkuat pendidikan vokasi di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi yang berfokus pada keterampilan teknis yang sesuai dengan permintaan pasar, seperti teknologi informasi, pertanian modern, dan manufaktur.
2. Pengembangan Sektor Ekonomi Lokal

Kesuma & Suriani (2015) dan Fitrianti et al. (2022), menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur penting dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Strategi yang direkomendasikan oleh Kesuma & Suriani (2015) adalah perencanaan pembangunan infrastruktur dasar yang berbasis data, terdesentralisasi, dengan prioritas pada sektor jalan dan listrik yang terbukti signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memfokuskan investasi infrastruktur pada wilayah yang terpinggirkan dan memperkuat kualitas pelayanan, tidak hanya kuantitas pembangunan.

Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yang direkomendasikan oleh Fitrianti et al. (2022) berdasarkan hasil studi literatur berbasis artikel adalah model yang terintegrasi, berbasis masyarakat, adaptif terhadap teknologi, dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Partisipasi lokal bukan hanya penting, tetapi menjadi fondasi keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah perlu terus berinvestasi dalam infrastruktur yang dapat mendukung sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kecil dan menengah (IKM). Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan akan mendorong peningkatan investasi, menciptakan peluang pekerjaan baru, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Mendukung Kewirausahaan

   Inkubator Bisnis dan Pelatihan Kewirausahaan:

   Membentuk pusat inkubasi bisnis yang dapat membantu wirausahawan muda dalam mengembangkan ide usaha mereka, memberikan pendampingan, serta akses ke modal. Ini juga dapat membuka peluang kerja baru dan mengurangi pengangguran di kalangan generasi muda. Selain keterampilan teknis, pelatihan kewirausahaan yang meliputi manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan dapat membantu meningkatkan kemampuan para calon pengusaha.

4. Meningkatkan Investasi dan Kemudahan Berusaha

   Perpres No. 68/2022 & Program Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek (didasarkan pada masukan empiris): merekomendasikan kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha dalam pelatihan dan penyerapan tenaga kerja.

   a. Kemudahan Perizinan, untuk Mempercepat proses perizinan usaha untuk menarik investor yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang mempermudah dan mempercepat prosedur untuk memulai usaha baru.
   b. Stimulus bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan memberikan insentif pajak, subsidi, atau fasilitas pendanaan untuk mendukung UKM agar dapat berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

5. Meningkatkan Kerjasama dengan Sektor Swasta

   Bappenas. (2022) dan SWA. (2023) menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan BUMN dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan

penciptaan lapangan kerja. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, yaitu:

a. Kemitraan antara Pemerintah dan Dunia Usaha, Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan yang kuat dengan dunia usaha, khususnya sektor swasta, untuk menciptakan peluang kerja yang lebih banyak. Hal ini dapat dilakukan melalui program magang, pelatihan kerja, dan rekrutmen langsung.
b. Program Kolaborasi untuk Penciptaan Lapangan Kerja antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menciptakan peluang pekerjaan yang relevan dengan permintaan pasar.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Barat dapat berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat jika terjadinya penciptaan lapangan kerja. Namun, jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan keterampilan tenaga kerja, dampak negatifnya bisa lebih terasa.

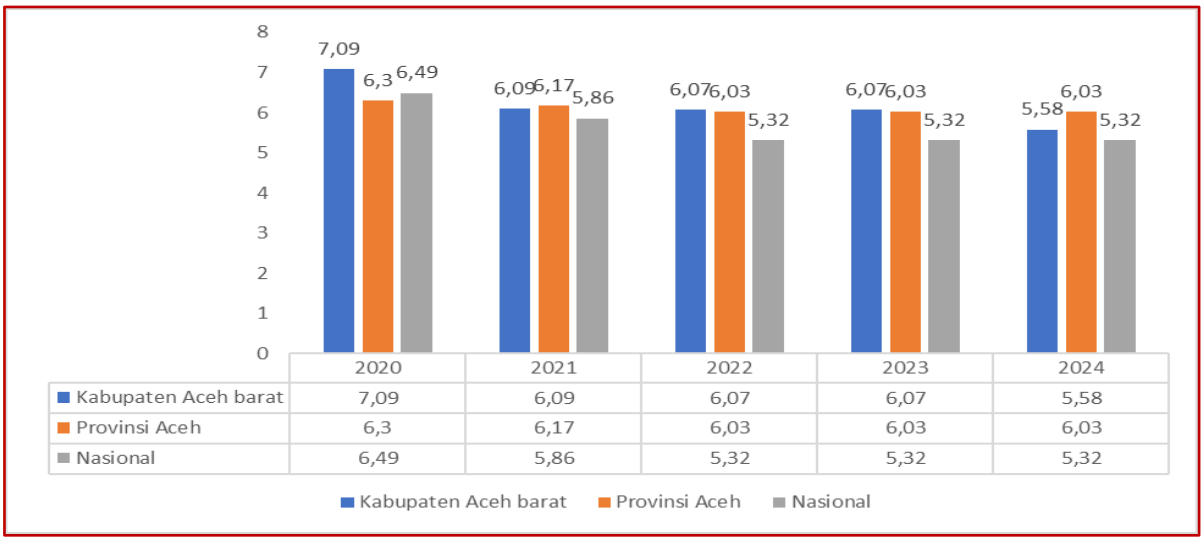

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Aceh barat	7,09	6,09	6,07	6,07	5,58
Provinsi Aceh	6,3	6,17	6,03	6,03	6,03
Nasional	6,49	5,86	5,32	5,32	5,32

Sumber : BPS Aceh (2025)

Gambar 3.10
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional (Persen)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Aceh Barat selama periode 2020 hingga 2024 pada Gambar 3.10 menjelaskan terjadinya tren penurunan secara bertahap, meskipun sempat berada pada level yang cukup tinggi. Pada tahun 2020, TPT Aceh Barat tercatat sebesar 7,09 persen—angka tertinggi dibandingkan Provinsi Aceh (6,30 persen) maupun tingkat nasional (6,49 persen). Tingginya pengangguran pada masa ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi, termasuk lapangan kerja informal yang banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Namun, seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi, angka TPT di Aceh Barat mulai menunjukkan penurunan pada 2021 menjadi 6,09 persen, dan stabil di angka sekitar 6,07 persen pada 2022 dan 2023. Tahun 2024 mencatatkan penurunan lebih lanjut menjadi 5,58 persen, meskipun masih sedikit lebih tinggi dari angka nasional (5,32 persen). Di sisi lain, Provinsi Aceh menunjukkan tren yang relatif stabil, berada di kisaran 6,03 persen sejak tahun 2022, sedangkan tingkat pengangguran nasional berhasil ditekan hingga 5,32 persen sejak tahun 2022 dan bertahan hingga 2024.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penurunan pengangguran di Aceh Barat cukup berhasil, daerah ini masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat program ketenagakerjaan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial seperti jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, perdagangan, konstruksi, serta pengolahan hasil pertanian dan ekonomi sirkular. Selain itu, pengembangan pendidikan vokasional dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja lokal juga menjadi kunci penting dalam menekan angka pengangguran secara lebih signifikan. Dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan, Aceh Barat memiliki peluang besar untuk mencapai TPT yang lebih rendah, bahkan di bawah rata-rata nasional.

Berdasarkan data perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi tren penurunan, angka pengangguran di daerah ini masih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan hampir sejajar dengan rata-rata Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Aceh Barat masih menghadapi tantangan dalam hal penciptaan lapangan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Aceh Barat telah menunjukkan kemajuan dalam menurunkan pengangguran, tetapi perlu intervensi lebih kuat dan terarah untuk mengatasi mismatch keterampilan, rendahnya daya serap tenaga kerja sektor formal, serta lemahnya pengembangan sektor-sektor padat karya.

Rekomendasi Kegiatan yang Dapat Diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dikaitkan dengan sektor lapangan usaha:

1. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Potensi Lokal
    - Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja sesuai kebutuhan sektor-sektor potensial seperti konstruksi, jasa keuangan digital, pengolahan hasil pertanian, dan pariwisata berbasis budaya.
    - Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) terpadu dengan kemitraan dunia usaha dan industri.
2. Program Penciptaan Lapangan Kerja Baru Melalui Padat Karya dan UMKM
    - Mendorong program padat karya berbasis infrastruktur desa dan irigasi pertanian.

- Memberikan insentif dan fasilitasi bagi pelaku UMKM dalam bentuk akses permodalan, pendampingan bisnis, dan digitalisasi usaha.

3. Inkubator Wirausaha dan Start-up Berbasis Teknologi dan Lokalitas
   - Menyiapkan inkubator wirausaha muda dengan fokus pada teknologi tepat guna, ekonomi kreatif, dan agroindustri.
   - Membangun ruang kolaborasi (co-working space) dengan pelatihan dan mentoring.
4. Ekspansi Sektor Potensial yang Mampu Menyerap Tenaga Kerja Lokal
   - Mendorong investasi di sektor jasa keuangan syariah, pengolahan hasil pertanian, dan pengelolaan lingkungan (daur ulang dan ekonomi sirkular).
   - Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu dan sentra produksi komoditas unggulan.
5. Digitalisasi Pusat Layanan Ketenagakerjaan Daerah (Job Matching Platform)
   - Menyediakan platform online yang menghubungkan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan lokal, dilengkapi informasi pelatihan dan sertifikasi.

Jika ditinjau dari jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh barat masih terdapat yang memiliki pendidikan terendah, yaitu yang tidak tamat SD atau hanya memiliki pendidikan dasar, sering kali menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam memasuki pasar kerja. Namun perkembangan untuk masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi dan sarjana mengalami peningkatan signifikan. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat, 2022-2024 ditunjukkan pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat, 2022-2024

	2022			2023			2024		
Pendidikan	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Tidak Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD/Sederajat	6	-	6	-	-	-	1	-	1
SMP/Sederajat	7	-	7	2	-	2	6	-	6
SMA	44	4	48	60	4	64	563	83	646
Kejuruan	10	-	10	24	-	24	73	3	76
diploma	4	-	4	13	8	21	56	18	74
Universitas	20	10	30	145	32	177	328	202	530
Jumlah/Total	**91**	**14**	**110**	**224**	**44**	**288**	**1027**	**306**	**1333**

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat (2025)

Tabel 3.12 menunjukkan perkembangan jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Aceh Barat selama periode 2022–2024 berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin. Secara umum, data ini mengindikasikan adanya tren

peningkatan jumlah pencari kerja setiap tahunnya, terutama dari lulusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) serta pendidikan tinggi (S1).

Pencari kerja lulusan SMA dan SMK mendominasi jumlah keseluruhan dibandingkan lulusan dari jenjang pendidikan lain. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar pencari kerja merupakan tenaga kerja berpendidikan menengah, yang secara ideal siap masuk ke pasar kerja tingkat teknis maupun administrasi. Di sisi lain, jumlah pencari kerja dari lulusan S1 juga menunjukkan peningkatan, menandakan adanya potensi tenaga kerja dengan kompetensi akademis yang lebih tinggi.

Tidak ada lagi pencari kerja dari lulusan SD di Kabupaten Aceh Barat tiga tahun terakhir (2022-2024) dan lulusan SMP memiliki jumlah pencari kerja yang jauh lebih rendah dan cenderung mengalami penurunan. Ini menunjukkan adanya pergeseran positif dalam tingkat pendidikan penduduk usia kerja di Aceh Barat.

Sementara itu, perbedaan berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan bahwa perempuan relatif lebih banyak terdaftar sebagai pencari kerja di beberapa kategori pendidikan, terutama SMK dan S1. Hal ini mengisyaratkan perlunya perhatian khusus pada perencanaan sektor lapangan kerja yang inklusif gender.

Berdasarkan analisis data, beberapa rekomendasi sektor lapangan kerja yang potensial sesuai kebutuhan perkembangan pembangunan untuk proses keberlanjutan di Kabupaten Aceh Barat adalah Sektor Industri Manufaktur dan Industri Kreatif. Ini untuk menyerap lulusan SMK dan SMA, terutama dalam bidang teknik, tata boga, desain grafis, multimedia, dan otomotif. Tujuan lain adalah untuk pengembangan kawasan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis produk lokal dapat menjadi prioritas. Sektor lainnya adalah Sektor Pertanian Modern dan Agroindustri dengan mempertimbangkan Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah dengan potensi agraris, pengembangan pertanian berbasis teknologi (smart farming) akan menyerap banyak tenaga kerja terampil, baik lulusan SMK pertanian maupun sarjana.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan kesempatan kerja antara lain :

a. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesempatan berusaha di Kabupaten Aceh Barat adalah keterbatasan lapangan pekerjaan formal, terutama di daerah-daerah pedesaan atau non-urban, menjadi salah satu tantangan besar bagi pencari kerja; Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja yang semakin berkembang; dan Keterbatasan akses informasi tentang peluang kerja dan pelatihan.
b. Peluang yang dapat diambil untuk meningkatkan usaha penciptaan lapangan pekerjaan adalah meningkatnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) yang dapat menyerap tenaga kerja lokal; Program pelatihan keterampilan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta dapat membantu pencari kerja meningkatkan kualifikasi dan daya saing mereka di pasar tenaga kerja; Adanya peluang kerja di sektor-sektor seperti industri manufaktur dan industri kreatif, digitalisasi, pariwisata, dan pertanian modern.

Secara umum, pencari kerja di Kabupaten Aceh Barat sebagian besar terdiri dari individu dengan berbagai tingkat pendidikan, dengan pendidikan SMP dan SMA menjadi yang paling banyak. Meskipun ada penurunan dalam tingkat pengangguran, pencari kerja masih menghadapi tantangan terkait keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor produktif akan menjadi kunci untuk mengurangi angka pengangguran lebih lanjut di daerah ini.

3.3.4. Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu. Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan tentang perkembangan harga dan dapat dipakai sebagai salah satu informasi dasar dalam pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro maupun makro. Pada tingkat mikro, inflasi menjadi dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan yang relatif tetap. Pada skala makro, angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Inflasi mengurangi daya beli uang, artinya setiap unit mata uang akan membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Penyebab inflasi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu inflasi permintaan *(demand-pull inflation)* dan inflasi biaya *(cost-push inflation*). Inflasi permintaan terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian melebihi penawaran agregat, biasanya akibat pertumbuhan ekonomi yang cepat, peningkatan belanja konsumen, atau kebijakan moneter ekspansif. Di sisi lain, inflasi biaya disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja, yang kemudian diteruskan ke harga konsumen.

Dampak inflasi terhadap perekonomian dapat bervariasi. Pada tingkat moderat, inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan insentif bagi produsen untuk meningkatkan output. Namun, inflasi yang terlalu tinggi atau hiperinflasi dapat merusak ekonomi, menyebabkan ketidakpastian yang tinggi, menurunkan investasi, dan mengikis tabungan masyarakat. Inflasi yang lebih tinggi juga akan meningkatkan ketidakpastian baik mengenai harga relatif maupun tingkat harga di masa depan yang membuatnya lebih sulit untuk membuat keputusan produksi yang tepat. Bank sentral biasanya menggunakan kebijakan moneter, seperti mengatur suku bunga dan mengendalikan jumlah uang beredar, untuk

mengelola tingkat inflasi agar tetap dalam kisaran yang stabil dan dapat diterima. Stabilitas inflasi sangat penting dan menjadi tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter karena akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Peraturan ini menetapkan target inflasi tahunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun tersebut. Berdasarkan peraturan ini, target inflasi untuk tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 3%, sementara untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,5%, dengan deviasi sebesar 1%. Sementara Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027. Berdasarkan peraturan ini, target inflasi untuk tahun 2025 dan 2026 adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen), sedangkan untuk tahun 2027 ditargetkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dengan deviasi sebesar 1,0% (satu koma nol persen). Peraturan ini diundangkan untuk memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan dan pelaku pasar dalam menjaga tingkat inflasi yang stabil dan rendah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta menguatkan komunikasi dan transparansi publik terkait harga.

Stabilitas harga memudahkan perencanaan bisnis dan investasi jangka panjang, karena perusahaan dapat memperkirakan biaya dan pendapatan dengan lebih akurat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perkembangan tren inflasi baik di tingkat daerah, Provinsi dan Nasional mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020-2024. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.11 di bawah ini yang menunjukkan penurunan inflasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 antara lain:

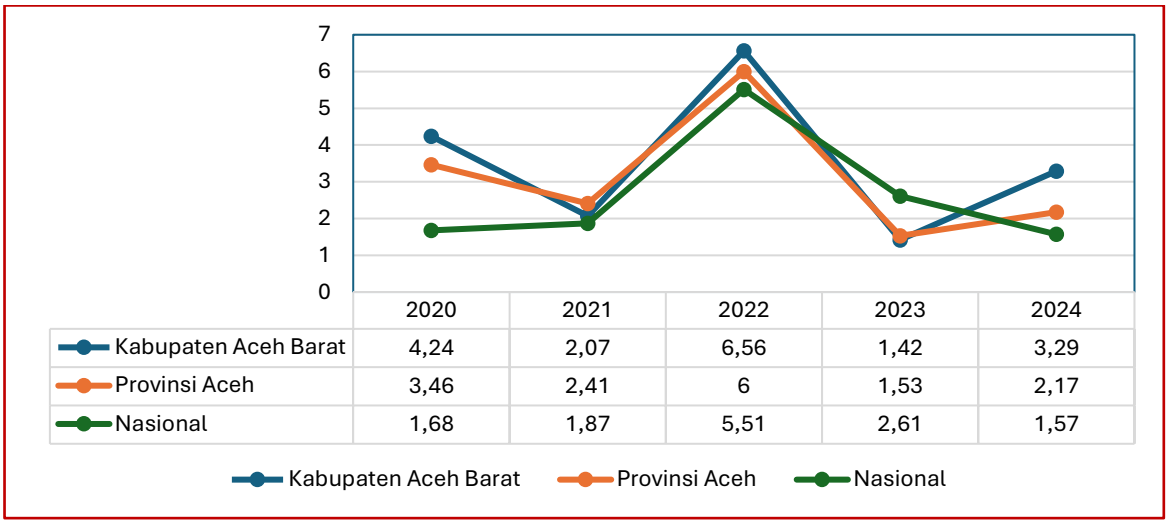

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Aceh Barat	4,24	2,07	6,56	1,42	3,29
Provinsi Aceh	3,46	2,41	6	1,53	2,17
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Gambar 3.11
Inflasi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020- 2024

Berdasarkan Gambar 3.11 inflasi Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan Nasional untuk periode 2020-2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan di antara ketiga wilayah tersebut. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk juga ikut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Pada tahun 2020, inflasi di Kabupaten Aceh Barat tercatat sebesar 4,24%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh yang sebesar 3,46% dan nasional sebesar 1,87 . Pada tahun 2021, inflasi di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh mengalami penurunan menjadi 2,07% dan 2,41%, sementara nasional mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,87%, namun demikian nilai tersebut masih lebih rendah dari pada Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh. Penurunan inflasi ini disebabkan oleh penurunan permintaan agregat akibat pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi. Namun, pada tahun 2022, inflasi mengalami lonjakan signifikan di semua wilayah, dengan Kabupaten Aceh Barat mencapai 6.56%, Provinsi Aceh 6.00%, dan nasional 5.51%. Lonjakan ini dapat distribusikan pada kenaikan harga energi dan bahan makanan, serta gangguan rantai pasokan global yang memperburuk situasi pasca-pandemi.

Pada tahun 2023, inflasi di Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh turun tajam menjadi 1.42% dan 1.53% masing-masing, sedangkan nasional turun menjadi 2.61%. Penurunan ini mencerminkan upaya pemulihan ekonomi yang lebih stabil, perbaikan rantai pasokan, serta langkah-langkah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya, pada tahun 2024, inflasi nasional terus menunjukkan penurunan menjadi 1,57% menunjukkan upaya pemerintah dalam pemulihan harga setelah pandemi covid-19. Sementara itu, tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 3,29% dan 2,17%, namun demikian masih dalam kisaran target sebesar (2,5%±1%). Peningkatan inflasi di Kabupaten Aceh Barat disebabkan kenaikan harga kelompok pengeluaran makanan dan minuman, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran serta perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan komoditas yang dominan memberikan andil dalam inflasi adalah emas, rokok/tembakau, minyak goreng, dan makanan. Secara keseluruhan, variasi inflasi per tahunnya dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk dinamika harga emas, energi, perubahan dalam permintaan dan penawaran agregat, serta kebijakan ekonomi dan moneter yang diterapkan.

Berikut merupakan IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month (m-to-m)*, *Year to Date (y-to-d),* dan *Year on Year (y-on-y)* Meulaboh Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024.

Tabel 3.13 IHK dan Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Desember 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK Desember 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2024 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Desember 2024 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2024 (%)	Andil Inflasi m-to-m Desember 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Desember 2024 (%)
Umum (Headline)	105,17	108,63	0,36	3,29	3,29	0,36	3,29
Makanan, Minuman, dan Tembakau	105,86	109,49	0,75	3,43	3,43	0,28	1,29
Pakaian dan Alas Kaki	102,05	104,95	0,07	2,84	2,84	0	0,2
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,17	104,15	0	1,94	1,94	0	0,28
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,96	104,78	-0,02	0,79	0,79	0	0,03
Kesehatan	106,74	112,82	0,96	5,7	5,7	0,01	0,07
Transportasi	112,96	112,64	0	-0,28	-0,28	0	-0,03
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,65	100,75	0	0,1	0,1	0	0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,83	105,2	0	2,3	2,3	0	0,03
Pendidikan	102,31	102,99	0	0,66	0,66	0	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,16	106,83	0,07	3,56	3,56	0,01	0,38
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107,4	123,35	0,72	14,85	14,85	0,06	1,03

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,84 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,94 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,79 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,70 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,30 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,66 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,56 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,85 persen. Sementara indeks kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,28 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2024, antara lain: emas perhiasan, minyak goreng, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bakso siap santap, nasi dengan lauk, Sigaret Kretek Tangan (SKT), bahan bakar rumah tangga, ikan kembung/ ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, kelapa, telur ayam ras, daging ayam ras, sewa rumah, beras, tomat, baju anak stelan, jus buah siap saji, ikan tongkol/ ikan ambu- ambu, ayam hidup, ikan dencis, dan obat gosok. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-

on-y, antara lain: cabai merah, bensin, ikan cakalang/ ikan sisik, kangkung, shampo, jeruk nipis/limau, cabai rawit, kerudung/jilbab, mie kering instant, dan *hand body lotion*.

Permasalahan

Masih adanya permasalahan terkait stabilitas pasokan dan harga bahan pokok

Sampai dengan Desember 2024, inflasi Kabupaten Aceh Barat (year to year) mencapai 3,29%. Nilai ini jauh melebihi Provinsi Aceh dan nasional. Permasalahan kenaikan harga-harga ini menjadi menjadi perhatian besar, khususnya pada komoditas emas yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Tingginya pengaruh eksternal seperti kebijakan fiscal, kebijakan moneter dan harga BBM menjadi salah satu permasalah dinamika kekuatan daya beli Masyarakat. Kenaikan harga barang *volatile food* seperti cabai, beras, ikan, dan sayuran karena cuaca dan panen mempengaruhi kenaikan harga barang di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, kenaikan *administered price* seperti BBM, Listrik, dan gas subsidi mempengaruhi kenaikan harga. Messkipun inisiatif pengendalian inflasi telah segera dilakukan, namun potensi ketidakstabilan harga masih menjadi ancaman terutama dengan belum kondusifnya situasi perekonomian dan politik global dan nasional.

Strategi yang dilakukan dalam pengendalian inflasi.

Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan di Kabupaten Aceh Barat dengan terus mengimplementasikan strategi, yaitu menjaga keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Perlu juga dilakukan gerakan menanam komoditi penyumbang inflasi dengan menanam bibit di pekarangan rumah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesediaan pangan. Pemerintah juga perlu rutin melaksanakan operasi pasar. Operasi pasar menjadi instrumen daerah dalam menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Peningkatan produktivitas petani perlu dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pasokan.

Secara umum, strategi yang dilakukan dalam pengendalian inflasi yaitu :

a. ***Menjamin ketersediaan supply/ stok barang volatile price,*** khususnya pada acara-acara keagamaan seperti maulid, hari raya, dan lainnya sehingga walau terjadi lonjakan permintaan, supply barang masih tersedia. Dalam menjamin ketersediaan supply/stok barang volatile price, dapat dilakukan dengan koordinasi dinas-dinas terkait dengan melakukan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting seperti beras, penyediaan dan peningkatan produksi pertanian, bantuan bibit unggul, dan subsidi pupuk, revitalisasi irigasi kecil, peningkatan produksi ikan darat (budidaya), swasembada pangan, dan menanam bibit di pekarangan rumah.
b. ***Stabilitas Harga dan Distribusi.*** Dalam menjamin stabilitas harga dan

distribusi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu untuk :

- Melaksanakan operasi pasar murah, khususnya di acara-acara keagamaan
- Pemantauan logistik penyimpanan barang seperti beras, gula, minyak goreng, dan lainnya
- Menjalin kerjasama dengan daerah penghasil barang (ekspor)
- Subsidi biaya transportasi
- Perbaikan jalan produksi, jembatan, dan akses transportasi untuk menekan ongkos logistik dari desa ke pasar.
- Dukungan pembentukan koperasi tani atau pasar tani langsung untuk memotong rantai distribusi.
- Pengembangan pasar daring di desa untuk menekan biaya produksi dan memperluas jangkauan pedagang.
- Pemantauan harga dan pasar secara berkala serta real time

3.3.5. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Aceh Barat merupakan strategi yang penting dalam mencapai pemerataan pembangunan dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Proses pembangunan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan potensi sosial, ekonomi, dan adat istiadat yang ada di setiap wilayah. Dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan khusus setiap kawasan, pembangunan kewilayahan diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya lokal dan menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan kewilayahan berfungsi sebagai pendorong utama bagi pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah serta diharapkan mampu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan membangun infrastruktur yang memadai, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, pembangunan kewilayahan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan industri lokal, akan memberikan dampak langsung pada peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan kewilayahan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan yang dibutuhkan untuk kemajuan daerah secara menyeluruh.

3.3.5.1 Pembangunan Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memiliki batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur

penunjang. Pembangunan kawasan pertanian memiliki peran penting untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan disamping juga meningkatkan kesejahteraan petani.

Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi sektor pertanian yang cukup besar, hal ini terlihat dari ketersediaan lahan pertanian sawah yang mencapai sebesar 9.821,88 ha. Walaupun demikian, ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini terlihat dari jumlah produksi padi pada tahun 2024 hanya mencapai sebesar 52.366,64 ton dengan luas panen mencapai 10.469,01 ha, serta Indeks Pertanaman hanya sebesar 1,3. Upaya yang berbeda dibutuhkan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut, salah satunya adalah membangun kawasan pertanian berbasis korporasi. Potensi pengembangan Kawasan pertanian pada tahap awal yang direncanakan berada di 2 Kecamatan yaitu Kawasan Pertanian Padi 1 di Kecamatan Kaway XVI dan Kawasan Pertanian Padi 2 di Kecamatan Samatiga dengan luas lahan baku sawah yang akan diupayakan mencapai 2008,79 Ha. Lokasi tersebut berada di beberapa Gampong dalam Kecamatan Kaway XVI antara lain Alue Tampak. Beureugang, Blang Beurandang, Kampung Mesjid, Keude Aron, Marek, Meunasah Buloh, Padang Mancang, Pasi Jambu, Peunia, Simpang dan Tanjong Bungong. Sedangkan di Kecamatan Samatiga, beberapa Gampong yang direncanakan untuk pengembangan Kawasan antara lain Alue Raya, Beurawang, Cot Amun, Rangkileh, Cot Lampise, Cot Masjid, Cot Seulamat, Gampong Ladang, Cot Seumeureng, Deuah, Krueng Tinggai, Pange, Leubok, Leuken, Mesjid Baro, Paya Lumpat, Pinem dan Reusak. Lokasi pengembangan Kawasan pertanian komoditas padi dapat dilihat pada gambar berikut :

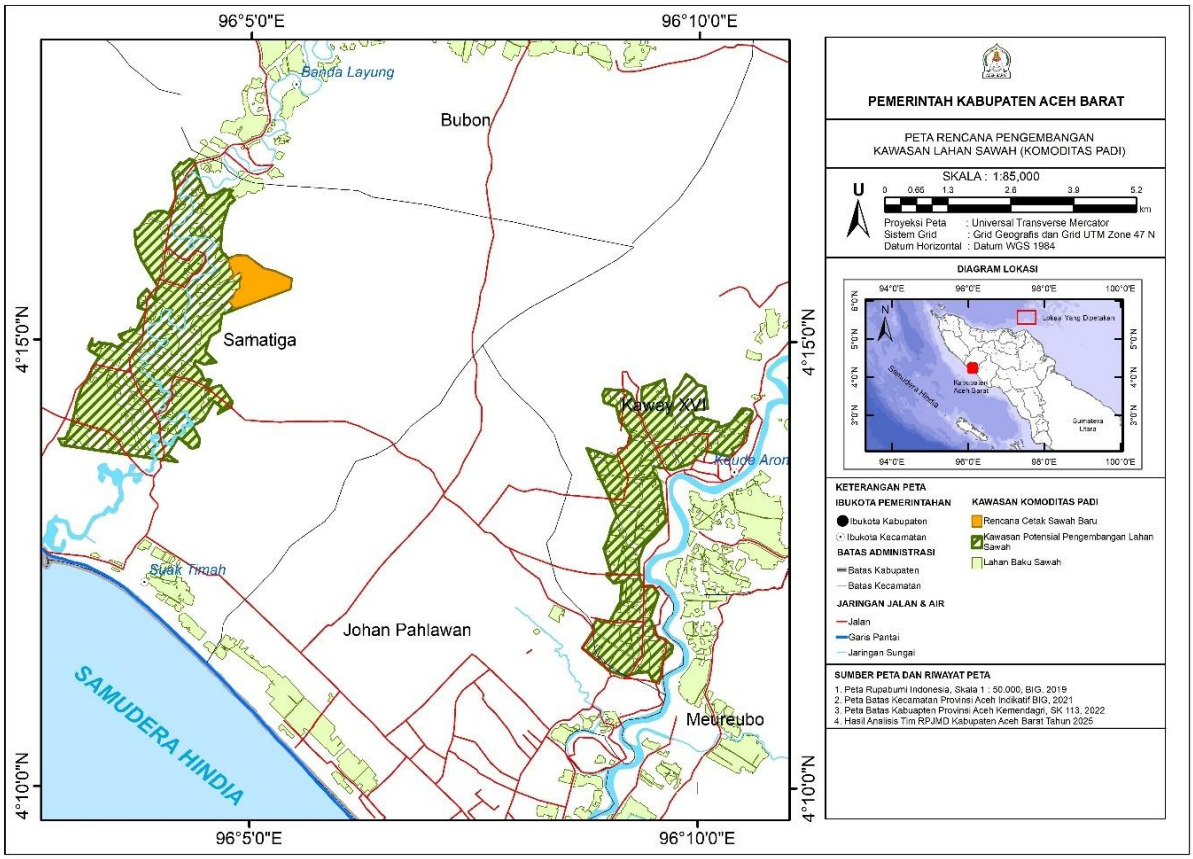

Gambar 3.12
Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Pertanian Padi di Kecamatan Kaway XVI dan Samatiga

Terdapat beberapa pertimbangan untuk pemilihan kedua lokasi tersebut, antara lain :

1. Potensi ketersediaan lahan sawah yang cukup luas;
2. Ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk pengairan;

Pembangunan Kawasan pertanian berbasis korporasi direncanakan melalui Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan sebuah Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kawasan pertanian komoditas padi akan dikelola secara professional oleh BUMD tentunya dengan melibatkan kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai bagian dari sistem pengelolaan kawasan. Terkait dengan keterlibatan petani dalam pembangunan kawasan, terdapat 3 hal yang dapat dilakukan antara lain :

1. Petani/kelompok tani memberikan hak kelola lahan pertanian dengan BUMD dan mendapatkan bagian dari bagi hasil;
2. Petani/kelompok tani akan ikut menyertakan modal sehingga ikut menjadi pemilik saham dari BUMD;

3. Petani/kelompok tani akan menyewakan lahan pertanian untuk dikelola oleh BUMD dengan jangka waktu kontrak sewa 5-10 tahun serta mendapatkan biaya sewanya di awal pelaksanaan kontrak;

Ketiga hal tersebut dapat diterapkan secara bersama dalam upaya konsolidasi lahan pertanian. Sawah akan menjadi bagian dari aset BUMD yang akan dikelola secara professional. Selain itu, BUMD juga dapat mempekerjakan kelompok tani/gapoktan pemilik lahan pertanian serta mendapatkan gaji/upah atas pekerjaan yang telah dilakukan disamping mendapatkan keuntungan dari proses konsolidasi lahan sawah yang telah dilakukan.

Pada tahap awal, BUMD akan melakukan sosialisasi kepada seluruh poktan/gapoktan terutama yang memiliki aset sawah, alat dan mesin pertanian, penyedia sarana dan produksi pertanian, serta pedagang terkait pengelolaan kawasan pertanian berbasis korporasi. Pada tahap selanjutnya, konsolidasi petani, poktan/gapoktan yang memiliki ketertarikan serta visi yang sama akan dilakukan oleh BUMD. Aset pertanian yang dimiliki oleh poktan/gapoktan akan menjadi aset BUMD yang dikelola secara professional dengan pembagian keuntungan yang jelas. BUMD akan mengelola lahan sawah tersebut, mulai dari Pembangunan tempat penangkaran benih hingga penanaman. Dalam upaya penangkaran benih, BUMD akan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset pertanian untuk mengembangkan benih unggul yang akan digunakan oleh petani. Benih yang ditangkarkan selain akan digunakan sendiri juga akan dijual kepada petani lainnya di Aceh Barat sebagai salah satu sumber pendapatan BUMD. Penanaman padi juga akan dilakukan untuk menghasilkan gabah yang seterusnya diolah untuk menghasilkan beras asli Aceh Barat.

Yang membuat model pengembangan Kawasan pertanian ini istimewa adalah integrasinya dengan peternakan. Di area yang sama, dikembangkan ternak sapi atau kerbau secara intensif. Peternakan ini memanfaatkan jerami padi sebagai sumber pakan utama, yang diolah melalui teknologi fermentasi untuk meningkatkan nilai nutrisinya. Sebaliknya, kotoran ternak diolah menjadi pupuk organik yang diaplikasikan ke sawah, menciptakan siklus nutrisi yang sempurna. Integrasi padi-ternak ini menciptakan sistem "zero waste" di mana setiap hasil samping menjadi bahan baku untuk proses lain. Selain jerami dan kotoran, sekam padi dimanfaatkan sebagai media tanam atau bahan bakar, dedak menjadi pakan ternak, bahkan kotoran ternak dapat diolah menjadi biogas untuk energi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi juga meminimalkan dampak lingkungan. Hasil peternakan tersebut akan diolah untuk mendapatkan nilai tambah maksimal. Daging sapi berkualitas dipasarkan dalam bentuk segar maupun olahan. Kulit dapat dimanfaatkan untuk industri kerajinan. Kotoran diolah menjadi pupuk organik padat dan cair yang dikemas menarik untuk pasar ritel. Gas metana dari pengolahan limbah berpeluang dimanfaatkan sebagai sumber energi

alternatif. Bagan rencana pengembangan Kawasan pertanian dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

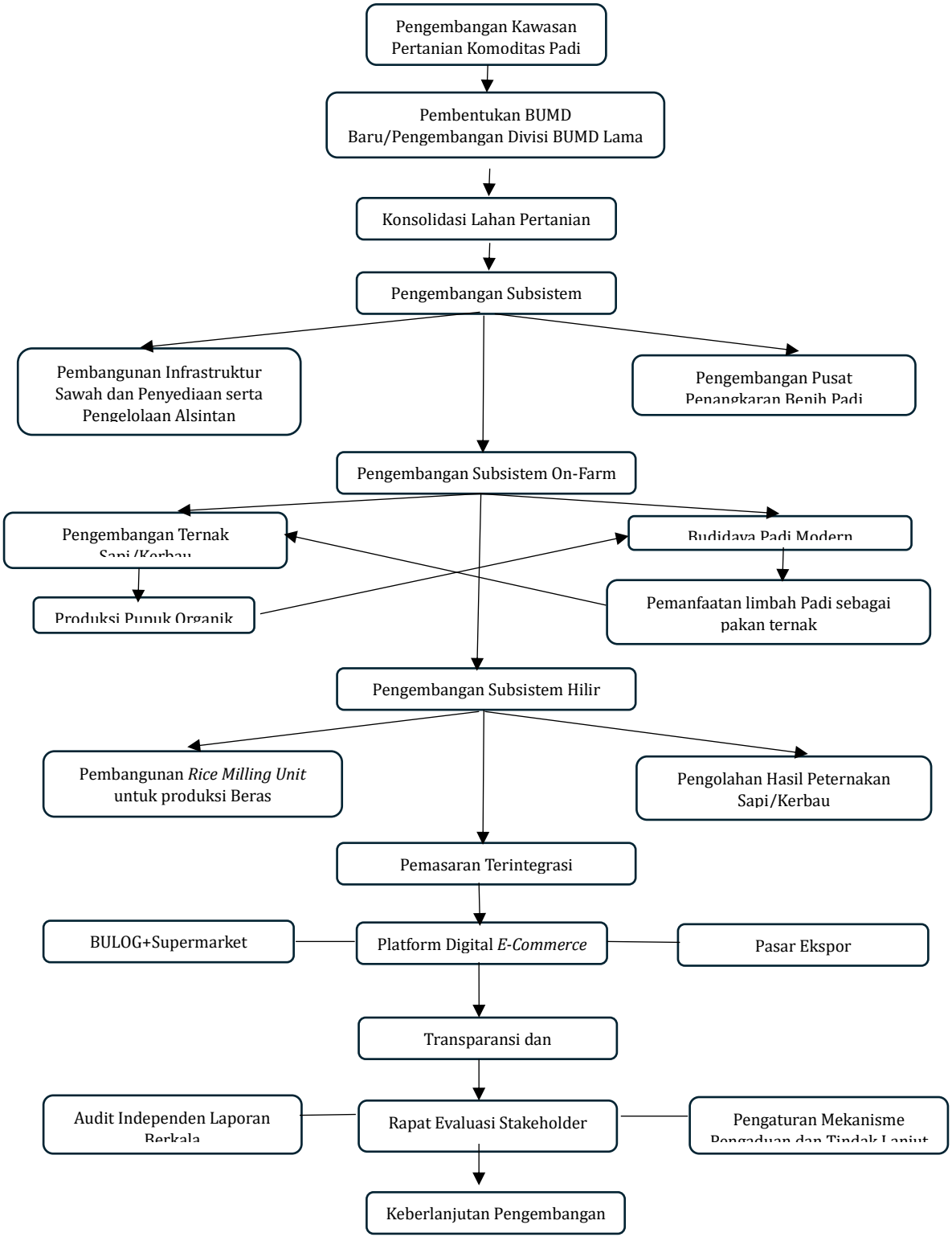

Gambar 3.13
Bagan Alir Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian

Pembangunan pabrik pengolahan padi menjadi beras/ Rice Milling Unit (RMU) juga akan menjadi bagian dari rencana bisnis yang akan dilakukan oleh BUMD. Tidak seperti penggilingan konvensional, RMU ini dilengkapi dengan teknologi pengering (dryer), pemutih beras non-kimia, dan pengemas otomatis. Beras yang dihasilkan dikategorikan menjadi beras premium dan medium, masing-masing dengan segmen pasar yang berbeda. Seluruh produksi padi akan ditampung oleh BUMD dengan harga yang tinggi untuk diolah menjadi beras di RMU. Beras unggulan lokal Aceh Barat akan dihasilkan dari RMU yang dikelola oleh BUMD dengan target awal pemasaran adalah masyarakat lokal di Kabupaten Aceh Barat. Seiring dengan semakin meningkatnya produksi beras, target pemasaran berikutnya adalah Kabupaten tetangga serta beberapa Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Aceh. Penentuan Lokasi pabrik akan dilakukan setelah survey dan adanya kesepakatan kersama antara pengelola BUMD beserta seluruh pemilik saham.

Pembangunan infrastruktur persawahan (irigasi, jalan usaha tani, dan cetak sawah baru), Pembangunan RMU, penyediaan alat dan mesin pertanian tentunya membutuhkan modal yang cukup besar. Beberapa sumber pendanaan yang dapat dipayakan dari BUMD antara lain melalui penyertaan modal pemerintah, saham dari petani, poktan, maupun gapoktan, Kredit Usaha Rakyat dari perbankan serta tambahan modal dari investor dengan rencana bisnis yang jelas untuk pengelolaan, pengembalian pinjaman serta pembagian keuntungan. Dengan adanya rencana Pembangunan Kawasan pertanian tersebut, diharapkan akan mampu mendorong produksi padi, produktivitas, serta indeks pertanaman semakin meningkat, sehingga pada akhirnya akan menjawab tantangan swasembada beras di Kabupaten Aceh Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

3.3.5.2 Pembangunan Kawasan Perkebunan

Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan kawasan perkebunan sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa dan nilam memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan pada kawasan peruntukan perkebunan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk menembus pasar internasional. Dengan pendekatan yang terencana dan berbasis pada potensi lokal, pengembangan sektor perkebunan di Aceh Barat dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan peruntukan Perkebunan rakyat di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

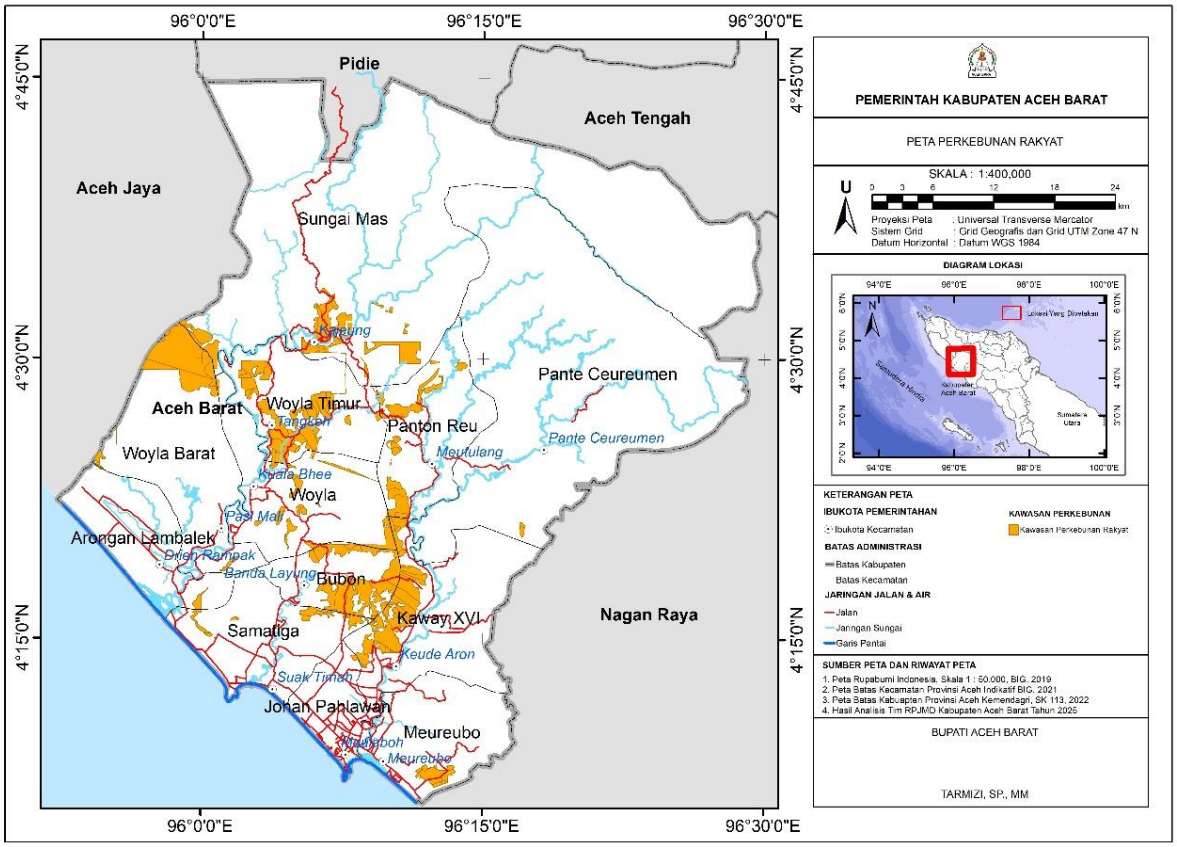

Gambar 3.14
Kawasan Perkebunan Rakyat

Hingga saat ini, luas lahan perkebunan rakyat yang telah diusahakan untuk komoditas kelapa sawit, karet, kopi, dan kelapa telah mencapai 39.451 hektar. Berbagai komoditas tersebut telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup baik serta memberikan peluang serapan tenaga kerja lebih besar di sektor Perkebunan.

Karet merupakan salah satu komoditas yang telah lama dikembangkan oleh masyarakat. Komoditas ini memiliki prospek yang cerah jika dikelola dengan teknologi pertanian yang lebih modern dan ramah lingkungan. Kondisi tanah dan iklim di Aceh Barat sangat mendukung untuk budidaya pohon karet, sehingga dengan penerapan teknik pemangkasan yang tepat dan sistem irigasi yang efisien, hasil produksi dapat meningkat pesat. Melalui peningkatan kualitas getah dan pengolahan yang lebih baik, karet Aceh Barat dapat bersaing di pasar yang lebih luas, bahkan untuk memenuhi kebutuhan industri hilir yang membutuhkan karet dengan kualitas tinggi. Saat ini, jumlah lahan karet yang dikembangkan mencapai 21.921 ha dengan produksi mencapai 14.754 ton/tahun. Potensi tersebut menjadikan karet sebagai salah satu komoditi yang cukup potensial untuk terus dikembangkan.

Selain itu, pengembangan kopi robusta di Kabupaten Aceh Barat juga memiliki potensi yang luar biasa, mengingat kopi robusta sudah cukup dikenal dengan cita rasa khas yang diminati banyak konsumen. Hingga saat ini, pengembangan komoditas kopi oleh masyarakat di Aceh Barat telah dilakukan pada lahan seluas 575,75 hektar dengan jumlah produksi mencapai 84,65 ton/tahun. Dengan memperkenalkan teknik budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta memperhatikan pasca-panen, Kabupaten Aceh Barat bisa menjadi pusat produksi kopi unggulan yang terkenal di pasar global. Kondisi tersebut akan mampu mendorong peningkatan produksi kopi serta pengembangan luas lahan komoditi kopi secara lebih besar. Pelatihan bagi petani mengenai cara pengolahan biji kopi yang baik dan pembuatan kopi olahan berkualitas juga sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan industri kopi lokal. Dengan memperkuat branding kopi Aceh Barat, produk ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga menembus pasar internasional.

Pengembangan komoditi kelapa di Kabupaten Aceh Barat juga memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aceh Barat, dengan iklim tropis yang mendukung, memiliki kondisi yang ideal untuk budidaya kelapa. Tanaman kelapa tidak hanya mudah tumbuh, tetapi juga menawarkan berbagai peluang ekonomi, baik melalui produk olahan kelapa seperti minyak kelapa, kopra, gula kelapa, maupun produk turunan lainnya yang semakin diminati di pasar lokal dan internasional. Luas lahan Perkebunan kelapa yang telah dikembangkan mencapai 3.353 ha dengan jumlah produksi mencapai 1.293,45 ton/ha. Dalam pengembangan kawasan perkebunan kelapa, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelapa itu sendiri. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta penggunaan bibit unggul yang dapat menghasilkan pohon kelapa yang lebih produktif. Selain itu, penerapan teknologi dalam perawatan tanaman dan sistem irigasi yang efisien akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen yang lebih optimal. Dengan pengelolaan yang baik, produksi kelapa di Aceh Barat dapat ditingkatkan sehingga menciptakan surplus yang dapat dipasarkan lebih luas.

Komoditas lainnya yang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan pada Kawasan Perkebunan adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting sebagai produsen sekaligus exportir CPO *(crude palm oil)* yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menopang ekspor nasional. Pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit yang terencana dan berkelanjutan diperlukan untuk menjawab tantangan produktivitas, legalitas lahan, konflik sosial, dan degradasi lingkungan.

Kabupaten Aceh Barat salah satu wilayah produsen CPO *(crude palm oil)* yang ditandai dengan adanya pabrik kelapa sawit (PKS) berjumlah 4 (empat) unit yang kepemilikan oleh perusahaan kelapa sawit. Disisi lain, produksi CPO juga berasal dari perkebunan sawit rakyat. Kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Aceh Barat memiliki luasan sebesar 10.862 Ha dengan produksi mencapai sebesar 17.824 ton pada tahun 2024. Lokasi Perkebunan kelapa sawit tersebut berada di setiap kecamatan serta memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Kabupaten dalam Angka tahun 2025, sebaran luasan tanam tertinggi terdapat di Kecamatan Kaway XVI mencapai 26,85% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat atau sebesar 2.986 hektar dengan produksi sebesar 6.545 ton yang selanjutnya di Kecamatan Arongan Lambalek sebesar 1.235 hektar dengan jumlah produksi 1.650 ton. Pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan masyarakat petani dan masyarakat lokal di wilayah perkebunan. Selain itu, pengembangan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan mendukung pengembangan bioenergy.

Selain perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Aceh Barat yang juga memiliki potensi perkebunan lainnya yang akan menopang pertumbuhan ekonomi daerah yaitu nilam. Tanaman nilam dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga sedang (0-700m dpl). Beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sebagai sentra penghasil nilam terbaik Aceh beberapa tahun yang silam. Pada saat ini, komoditi nilam menjadi salah satu primadona yang berpotensi ekonomi tinggi untuk dikembangkan. Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, pengembangan komoditi nilam direncanakan pada beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Barat diantaranya di Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan Bubon, Kecamatan Pante Ceureumen, Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Meureubo dengan total rencana luasan yang akan dikembangkan mencapai sebesar 40 hektar. Pengembangan tersebut dilakukan dari hulu ke hilir sejak pada tahapan budidaya, hilirisasi hingga pemasarannya. Penguatan kapasitas kelompok tani serta pelaku usaha industri hilir dari komoditi nilam juga dilakukan. Motor penggerak kegiatan tersebut direncanakan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD akan berperan dalam upaya pengembangan tersebut, tahapan awal dimulai dengan konsolidasi lahan tanaman nilam dari petani/kelompok tani. Selanjutnya Pembangunan nursery nilam serta sertifikasi benih akan dilakukan agar benih dengan jaminan kualitas yang unggul dapat digunakan untuk kebutuhan pengembangan sendiri juga dapat dijual ke petani nilam lainnya. BUMD juga akan mengembangkan budidaya nilam dibeberapa Lokasi yang potensial sekaligus meningkatkan kapasitas petani nilam agar mampu melaksanakan kegiatan budidaya dengan baik. Selain sektor hulu, bagian hilir juga akan dikembangkan dengan menghasilkan berbagai produk turunan dari minyak nilam. Pengembangan laboratorium riset serta tempat produksi produk turunan yang representative dan berstandar Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga akan dilakukan agar menghasilkan produk berkualitas serta sesuai standar yang diharapkan. Akses pemasaran minyak nilam serta produk turunannya juga akan dikembangkan oleh BUMD melalui Kerjasama dengan berbagai pihak, disamping itu pemanfaataan digital marketing (e-commerce) juga menjadi bagian dari strategi yang akan dilakukan.

Seluruh hasil produksi akan dilakukan pembagian hasil usaha secara adil dan sesuai kesepakatan dengan berbagai pihak yang terlibat. Upaya ini diharapkan akan mampu mendorong perkembangan komoditi nilam di Aceh Barat secara signifikan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan petani nilam dan pelaku usaha industry pengolahan minyak nilam.

Pengembangan Kawasan Perkebunan membutuhkan strategi yang tepat sehingga dapat terlaksana secara optimal. Strategi pengembangan Kawasan perkebunan di Kabupaten Aceh Barat dapat dilakukan dengan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir, baik dari sisi produksi, peningkatan produktivitas, pengolahan, pemasaran hingga pengembangan industri hilir yang akan menjamin keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat perkebunan. Dapat dijelaskan Langkah-langkah strategi pengembangan Kawasan kelapa sawit:

a. Melakukan identifikasi lahan yang tidak produktif baik merupakan lahan bekas tambang ataupun lahan yang tidak dimanfaatkan dengan memperhatikan peruntukkan lahan tersebut, yaitu dengan melakukan kesesuaian lahan dengan RTRW;
b. Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan melalui peremajaan kebun bagi tanaman yang telah rusak/tua/tidak berproduksi lagi. Peremajaan yang dilakukan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna seperti pupuk organik yang ramah lingkungan dan tekhnologi lainnya yang mendukung;
c. Melakukan peningkatan kapasitas petani kebun terhadap teknik budidaya, pemupukan dan pengendalian hama terpadu bagi pekebun sawit;
d. Membentuk koperasi yang berfungsi sebagai penguatan kelembagaan petani. Koperasi yang beranggotakan kelompok tani untuk memperkuat posisi tawar dalam pemasaran hasil produksi komoditi Perkebunan dan mempermudah akses pembiayaan bagi petani pekebun melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari BPDPKS;
e. Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi komoditi perkebunan merupakan langkah awal dalam keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat petani pekebun. Produksi komoditi perkebunan yang dihasilkan akan dikembangkan hingga ke produk turunannya. Untuk itu, upaya awal yang harus dilaksanakan yaitu mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) skala kecil yang berdekatan dengan perkebunan rakyat serta industri hilir komoditi Perkebunan lainnya. Selain itu juga dikembangkan berbagai produk turunan komoditi perkebunan lainnya melalui riset dan teknologi;

f. Peningkatan akses pasar komoditi perkebunan untuk mendapatkan nilai jual yang kompetitif dapat dilakukan melalui perbaikan sarana prasarana dasar di kawasan perkebunan. Digitalisasi pemasaran menggunakan platform e-commerce atau pasar online serta melalui export secara langsung.

Skema pelaksanaan pengembangan kawasan perkebunan dapat dilihat pada gambar berikut :

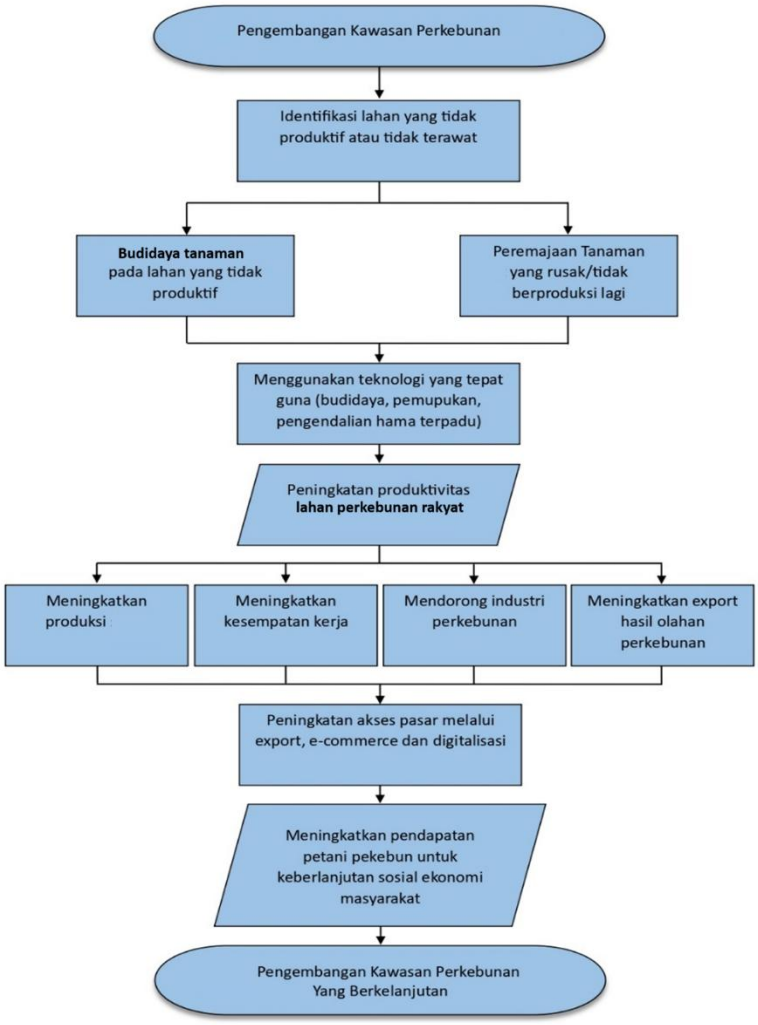

Gambar 3.15
Bagan Alir Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat

3.3.5.3 Pembangunan Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan wilayah yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha peternakan, baik itu berupa lahan yang luas untuk pemeliharaan ternak besar seperti sapi ataupun lokasi untuk peternakan kecil. Peruntukkan kawasan peternakan tidak hanya mencakup area yang mendukung kegiatan peternakan, namun juga didukung dengan lahan yang digunakan sebagai pakan hijauan ternak ataupun fasilitas penunjang seperti kandang dan tempat pemotongan hewan.

Sektor peternakan di Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor produk-produk peternakan. Kondisi alam yang sangat sesuai untuk pengembangan berbagai jenis peternakan seperti Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, dan unggas serta peternakan rumput dan pakan ternak.

Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi sektor peternakan yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari penyebaran populasi ternak yang cukup besar dan terdapat pada seluruh wilayah kecamatan dengan komoditi ternak yang terdiri atas ternak besar dan kecil serta unggas. Berdasarkan data Kabupaten Aceh Barat dalam Angka tahun 2025, jumlah populasi ternak sapi mencapai sebesar 20,71% atau 9.666 ekor dengan sebaran terbesar terdapat di Kecamatan Arongan Lambalek dan Kerbau sebesar 56,97% atau 27.463 ekor dari total populasi ternak besar dan kecil dengan sebaran terbesar terdapat di Kecamatan Kaway XVI.

Pemerintah Daerah perlu memberikan fokus yang lebih besar untuk pengembangan sektor peternakan terutama melalui pembangunan kawasan ternak. Pembangunan Kawasan ternak bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan serta pengembangan ternak terutama bagi ternak besar/ruminansia. Pembangunan Kawasan ternak juga bertujuan untuk mempercepatan pertumbuhan populasi ternak, peningkatan jumlah produksi daging serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Kawasan yang tepat dan professional.

Selain memiliki potensi yang unggul disektor peternakan, Kabupaten Aceh Barat juga memiliki komoditas unggulan perkebunan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, seperti Kelapa Sawit. Kondisi ini juga didukung oleh kondisi iklim, letak kondisi geografis, adanya kepastian pasar serta dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik sehingga Perkebunan sawit rakyat dan Perusahaan terus tumbuh secara optimal.

Perkebunan Kelapa Sawit rakyat tersebar secara merata di berbagai kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan data Kabupaten dalam Angka tahun 2025, sebaran luasan tanam tertinggi terdapat di Kecamatan Kaway XVI mencapai 26,85% dari total luas areal perkebunan Kelapa Sawit rakyat atau sebesar 2.986 hektar yang selanjutnya di Kecamatan Arongan Lambalek dengan luas mencapai 1.235 hektar. Sebaran luasan perkebunan di Kabupaten Aceh Barat tidak hanya melibatkan petani rakyat, tetapi juga sejumlah perusahaan besar yang mengelola perkebunan dalam skala luas.

Keberadaan Perkebunan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Arongan Lambalek serta tingginya populasi ternak sapi yang mencapai 3.273 ekor di Kecamatan tersebut memberikan peluang yang besar untuk pengembangan kawasan peternakan sapi

terintegrasi kelapa sawit. Pengembangan ternak sapi melalui model sistem integrasi sapi dan kelapa sawit dianggap mampu menciptakan sistem perkebunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani kebun, serta mendukung ketahanan pangan. Secara keseluruhan, pengembangan kawasan peternakan terintegrasi dapat menjadi solusi yang sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas perkebunan dan peternakan serta ikut membantu menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Aceh Barat. Lokasi rencana pengembangan Kawasan ternak sapi terintegrasi dapat dilihat pada gambar berikut :

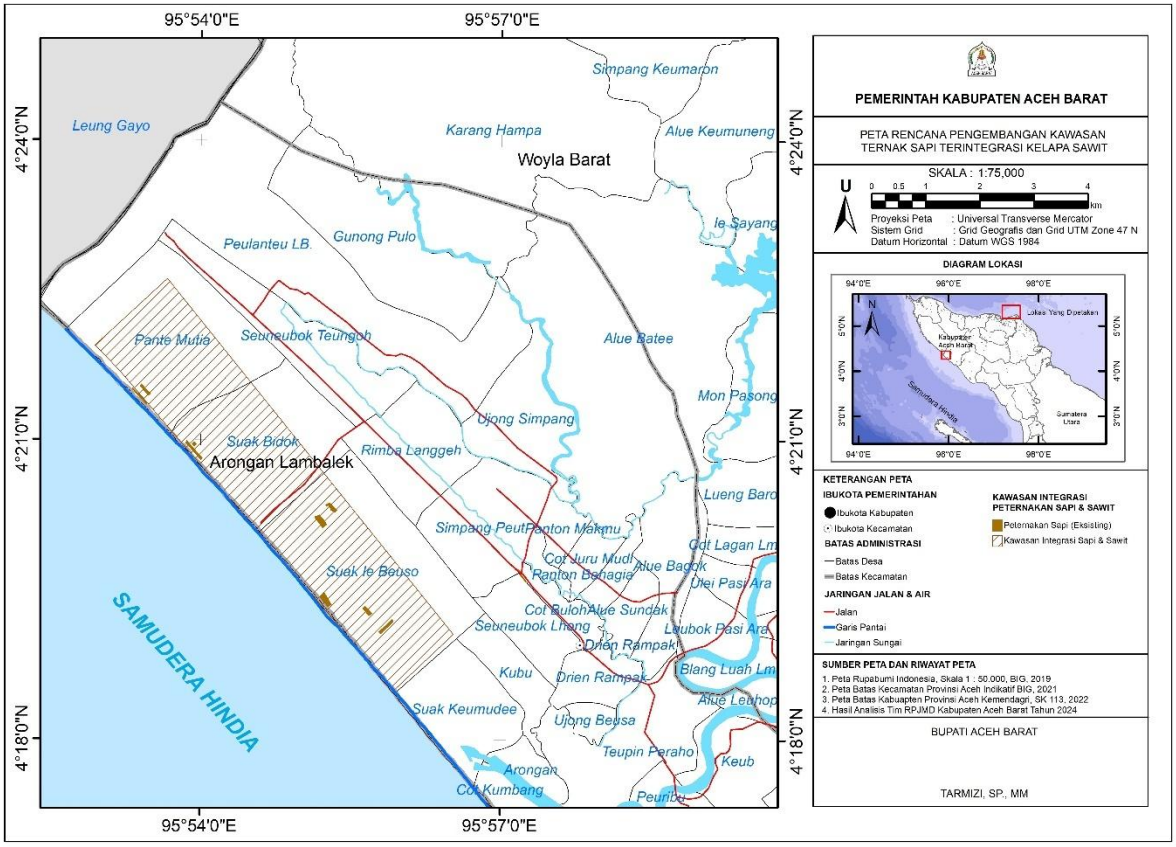

Gambar 3.16
Lokasi Rencana Pengembangan Kawasan ternak sawit terintegrasi Kelapa Sawit di Kecamatan Arongan Lambalek

Luas lokasi Kawasan peternakan sapi terintegrasi kelapa sawit yang berpotensi untuk dikembangkan mencapai ± 630 Ha di Kecamatan Arongan Lambalek yang berada di Gampong Suak Ie Beuso, Suak Bidok dan Pante Meutia. Penerapan Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit dapat dilakukan pada lokasi tersebut, dengan potensi perkebunan sawit dan peternakan sapi yang cukup menjanjikan. Beberapa langkah penting yang dilakukan diantaranya meningkatkan fasilitas peternakan dan sistem pengolahan limbah, pelatihan bagi petani dan peternak mengenai cara pengelolaan secara bersamaan, menyediakan akses kepada petani dan peternak untuk mendapatkan pembiayaan serta mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan yaitu tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan.

Model Integrasi Peternakan dan Perkebunan merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan lahan yang menggabungkan kegiatan usaha perkebunan dengan peternakan, untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem perkebunan tersebut. Konsep pengembangan kawasan peternakan terintegrasi bertujuan untuk mencapai beberapa manfaat baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Integrasi peternakan dan perkebunan mengacu pada sistem di mana kegiatan peternakan seperti pengelolaan ternak sapi dilakukan bersamaan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam satu kawasan yang saling mendukung dan menguntungkan. Peternakan sapi dilakukan di dalam kawasan perkebunan dan dipelihara di antara tanaman kelapa sawit yang akan saling memberikan manfaat. Ternak sapi dapat membantu dalam pemupukan tanah dan pengelolaan gulma, sementara jenis tanaman bawah seperti rumput-rumputan di lokasi perkebunan kelapa sawit memberikan pakan alami bagi ternak.

Skema pengelolaan Kawasan peternakan sapi integrasi kelapa sawit dapat dilihat pada gambar 3.17 berikut :

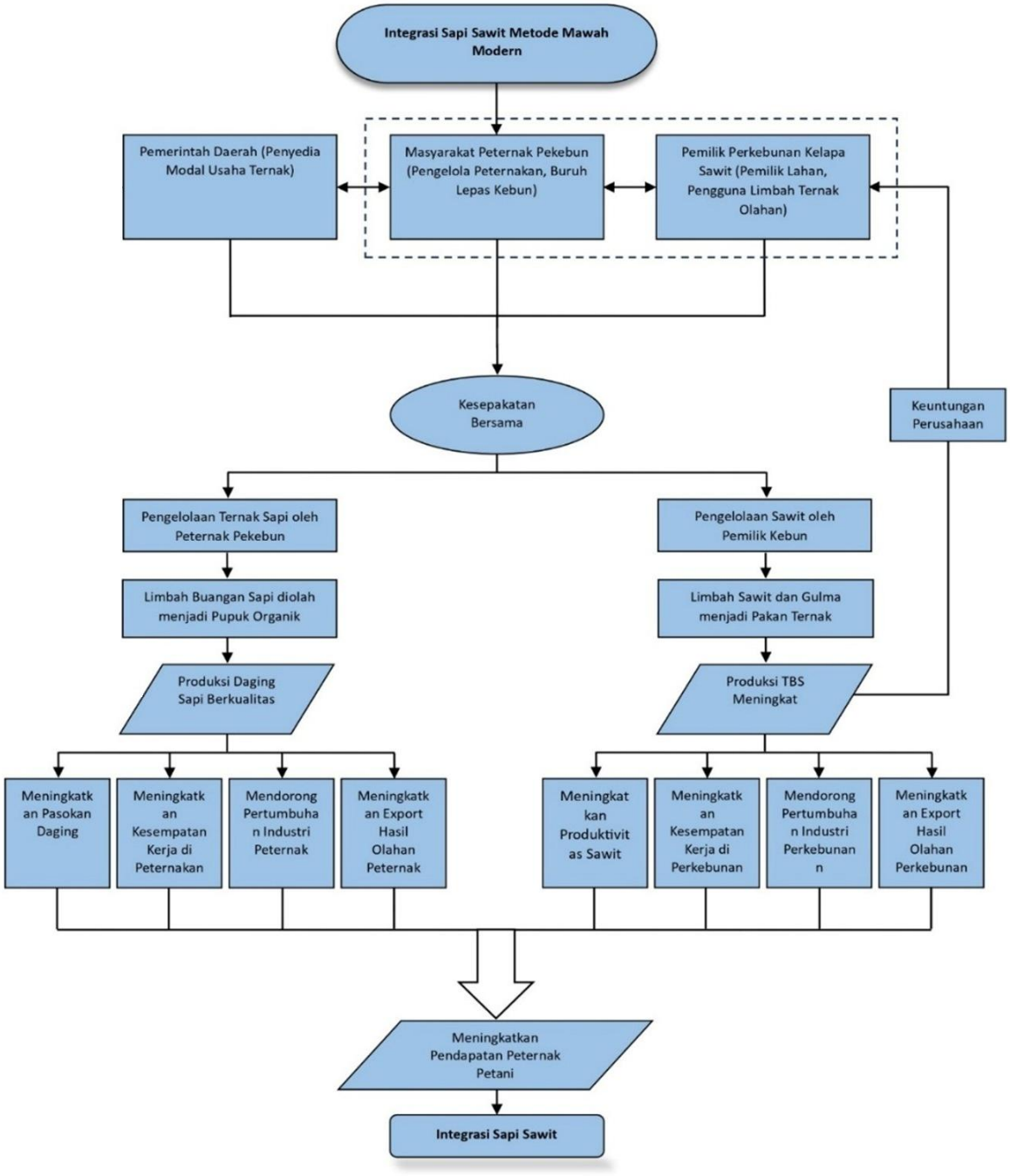

Gambar 3.17
Bagan Alir Pengelolaan Ternak Sapi Integrasi Kelapa Sawit

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa, pelaksanaan integrasi sapi sawit akan melibatkan pemerintah daerah yaitu OPD terkait, peternak pekebun serta pemilik kebun sawit. Penyediaan modal usaha ternak sapi oleh pemerintah untuk kemudian dibiakkan hingga berproduksi pada perkebunan sawit. Selama proses pembiakan, peternak dapat juga menjadi pekebun, yaitu pada saat proses pemanenan sawit dilakukan

ataupun pada aktivitas perkebunan lainnya. Hal ini akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan. Peternak dan pelaku usaha Perkebunan dalam menjalankan perannya di program ini berada dalam kelompok usaha yang beranggotakan peternak serta pelaku usaha perkebunan itu sendiri. Dengan adanya kelompok ini akan memudahkan pengelolaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah hingga menghasilkan produk untuk dijual pada jaringan pasar yang lebih luas lagi. Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit tersebut akan dibuat dengan kesepakatan antar pihak pelaksana dengan sebelumnya memberikan pemahaman terhadap keuntungan masing-masing pihak dalam pelaksanaan program ini.

Rangkaian proses kegiatan integrasi sapi sawit hingga menghasilkan produk setengah jadi dan produk bernilai ekonomi dimulai dari pengolahan kotoran dan urine sapi menjadi pupuk organik untuk kemudian dimanfaatkan oleh pemilik kebun sebagai pupuk alami dalam rangka mengurangi penggunaan pupuk kimia yang akan berdampak langsung pada lingkungan, manusia serta sapi yang sedang dibiakkan dilokasi. Di sisi lain, pelepah sawit akan dimanfaatkan oleh pekebun peternak sebagai pakan dalam pembiakan dengan sebelumnya dilakukan pengolahan terlebih dahulu menggunakan mesin pengolah. Ternak sapi dilokasi juga ikut membantu menekan biaya operasional penyiangan gulma di kawasan perkebunan sawit. Sapi secara alami akan memakan gulma yang ada, dan selanjutnya gulma yang habis dimakan akan tumbuh kembali pada waktu tertentu secara alami ataupun adanya air liur sapi yang mempercepat pertumbuhannya yang kemudian akan dimakan kembali oleh sapi. Untuk selanjutnya proses tersebut terus berlangsung secara alami dan terstruktur hingga mengasilkan produk sapi yang berkualitas dan sesuai dengan permintaan pasar.

Hasil produksi sapi berupa daging yang berkualitas akan dibantu pemasarannya oleh kelembagaan seperti koperasi maupun Pemerintah Daerah ke pasar yang lebih luas. Dan terhadap hasil produksi yang dapat bernilai ekonomi tinggi seperti kulit sapi yang diolah menjadi kerupuk ataupun daging menjadi makanan yang dapat diproses menjadi oleh-oleh khas dan atau lainnya. Hal ini akan memberikan peluang kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan tidak hanya ditingkat peternak ataupun pekebun namun juga pekerja lainnya. Dan yang secara umum dapat disampaikan bahwa, integrasi sapi sawit sangat mendukung ketahanan pangan lokal yang akan menyediakan akses terhadap produk pangan dari peternakan di Kabupaten Aceh Barat.

Dengan adanya integrasi sawit sapi akan memberikan manfaat bagi peternak dan pekebun diantaranya:

1. Kotoran sapi yang dihasilkan selama proses pemeliharaan dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman kelapa sawit sehingga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia;

2. Gulma ataupun tanaman pengganggu yang hidup di lahan sawit dapat dipangkas alami oleh sapi, mengurangi pemakaian herbisida atau bahan kimia lainnya;
3. Peternak dapat memperoleh pendapatan tambahan dari hasil penjualan daging sapi dan produk peternakan lainnya, seperti susu atau kulit sapi. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis usaha , yaitu perkebunan kelapa sawit;
4. Menciptakan peluang kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal didaerah tersebut;
5. Model ini mendukung ketahanan pangan lokal dengan menyediakan akses lebih baik terhadap produk pangan dari peternakan, seperti daging dan susu, yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat lokal.

3.3.5.4 Pembangunan Kawasan Perikanan

Kabupaten Aceh Barat merupakan sebuah wilayah yang berada di pesisir pantai barat Aceh, serta memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Selain itu, pada wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat juga didominasi oleh masyarakat nelayan yang sudah lama menggantungkan hidupnya dari aktivitas penangkapan ikan. Salah satu daerah yang memiliki kegiatan perikanan cukup tinggi adalah Gampong Padang Seurahet di Kecamatan Johan Pahlawan. Gampong tersebut berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, serta masyarakatnya secara turun temurun telah melakukan kegiatan perikanan tangkap. Setelah Gempa dan Tsunami pada tahun 2004, sebagian besar masyarakat Gampong tersebut telah direlokasi ke Gampong lain dalam Kecamatan Johan Pahlawan. Secara praktis, Lokasi Gampong tersebut saat ini hanya digunakan untuk aktivitas kegiatan perikanan tangkap karena keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan dan berbagai fasilitas perikanan lainnya yang terdapat di sekitar lokasi. Kondisi tersebut menjadikan Padang Seurahet sebagai salah satu lokasi yang ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan industri perikanan dengan luas lokasi mencapai hingga 10,24 hektar. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan kawasan tersebut dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Meulaboh Tahun 2021-2041 sebagai Zona Kawasan Peruntukan Industri, sehingga pembangunan Kawasan tersebut telah memenuhi aspek legalitas. Lokasi rencana pengembangan Kawasan industri perikanan dapat dilihat pada gambar berikut :

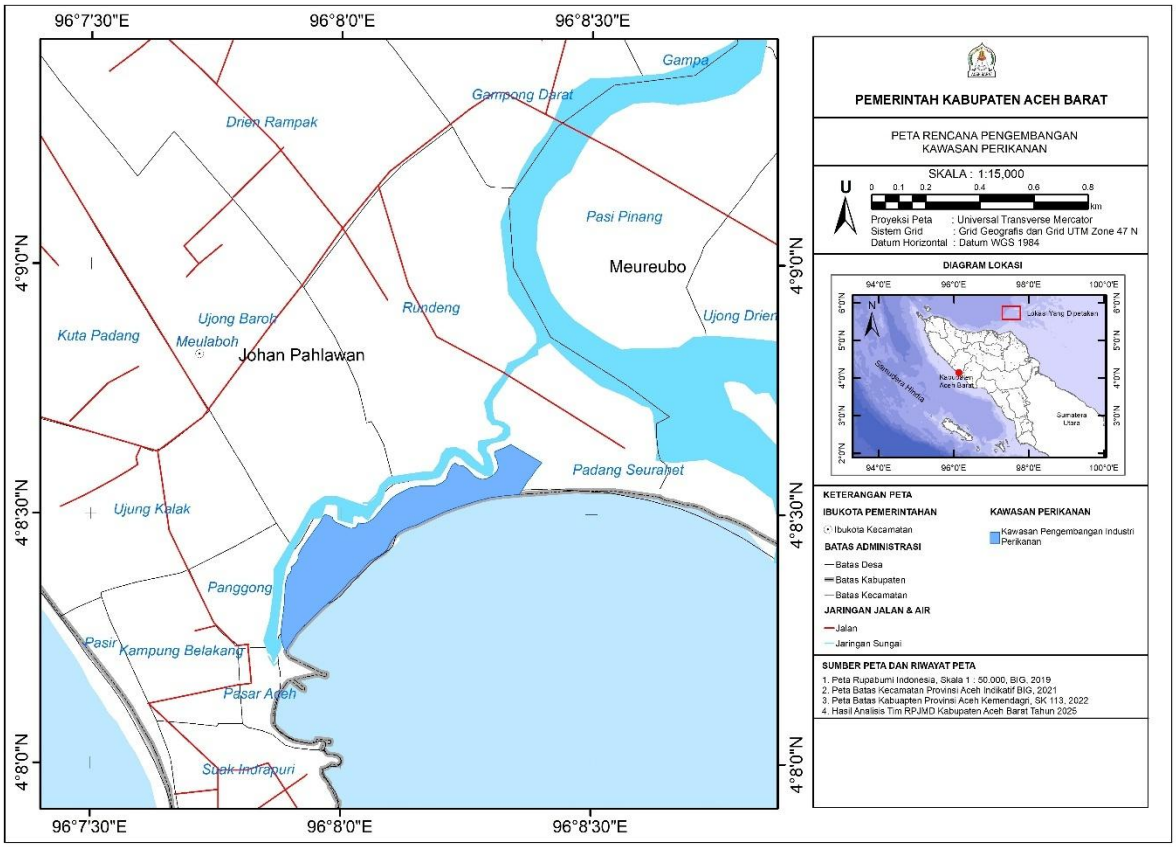

Gambar 3.18
Rencana Lokasi Kawasan Industri Perikanan di Gampong Padang Seurahet

Pembangunan kawasan industri perikanan di Gampong Padang Seurahet difokuskan pada pengembangan hilirisasi produk olahan perikanan, distribusi, dan pemasaran, dengan dukungan infrastruktur serta kelembagaan yang memadai. Pembangunan tersebut melibatkan 4 pihak yaitu Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Masyarakat sebagai pelaku usaha pengolahan serta investor yang diharapkan akan memberikan kontribusi investasi skala menengah maupun besar pada kawasan tersebut.

Langkah awal dalam pembangunan kawasan industri perikanan di Gampong Padang Seurahet adalah keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas wilayah. Pemerintah berperan menyediakan infrastruktur dasar yang menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya kawasan industri. Infrastruktur tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan untuk mempermudah akses distribusi hasil perikanan, penyediaan jaringan listrik yang stabil untuk mendukung aktivitas industri, serta ketersediaan air bersih sebagai komponen utama dalam proses pengolahan hasil laut. Semua aspek ini harus dipersiapkan dengan matang agar investor maupun pelaku usaha dapat beroperasi secara optimal di kawasan tersebut. Rencana pengembangan Kawasan perikanan dapat dilihat pada gambar berikut :

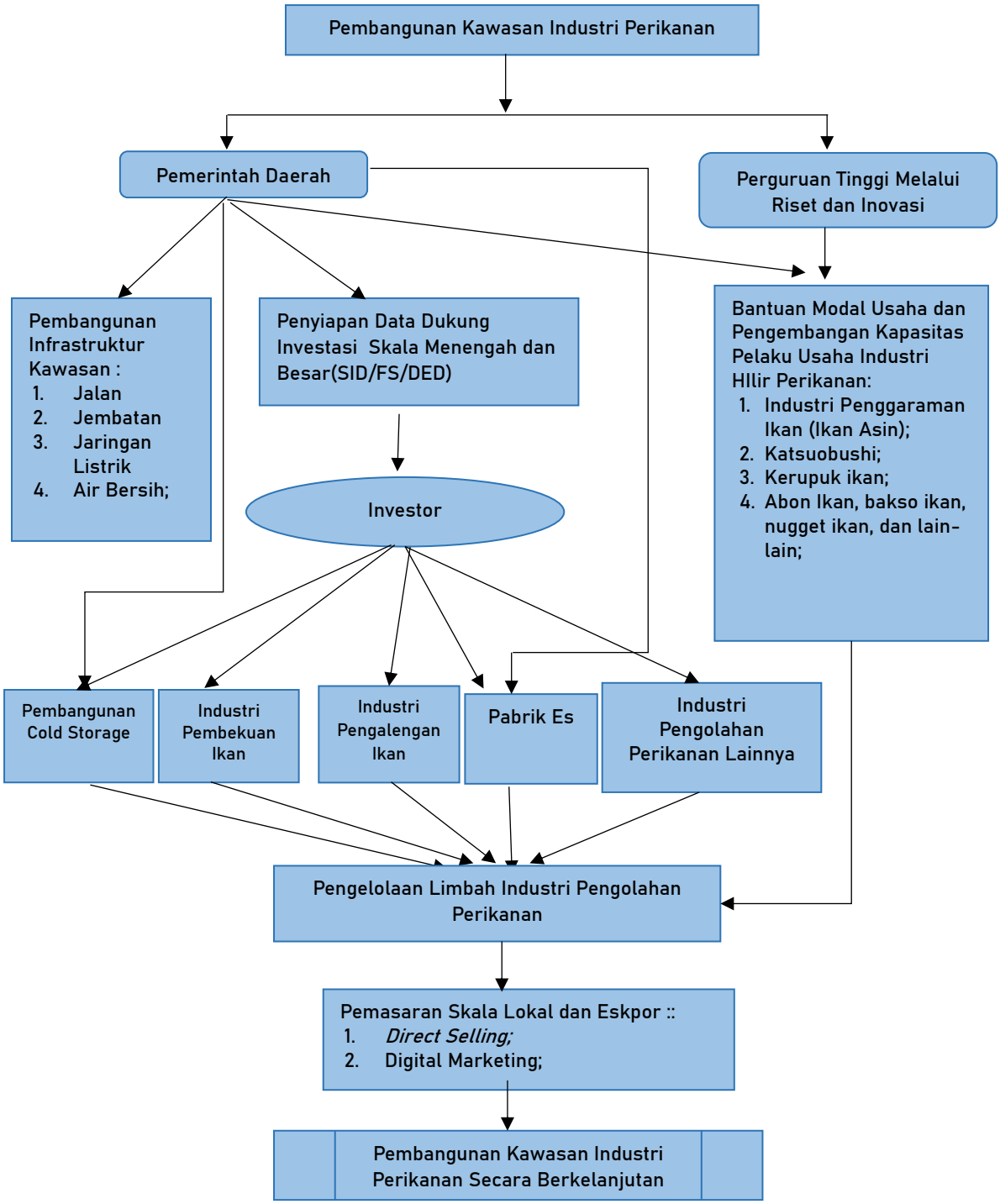

Gambar 3.19
Rencana pengembangan Kawasan Perikanan Kabupaten Aceh Barat

Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga bertugas dalam menyiapkan dokumen pendukung investasi yang bersifat teknis dan strategis. Dokumen ini berupa Survey Investigasi dan Desain (SID), Studi Kelayakan (FS), serta Detail Engineering Design (DED), yang berfungsi sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kelayakan dan potensi keberhasilan proyek pembangunan industri. Dokumen-

dokumen tersebut sangat penting sebagai dasar dalam menarik investasi dari pihak swasta maupun lembaga keuangan, serta memberikan gambaran menyeluruh terhadap potensi ekonomi dan risiko yang mungkin timbul.

Pembangunan kawasan industri perikanan juga memerlukan dukungan dari sektor pendidikan, terutama perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam hal riset dan inovasi. Melalui kerja sama dengan institusi akademik, pemerintah dan pelaku industri dapat memperoleh dukungan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan efisiensi produksi serta menjaga mutu hasil olahan ikan. Di samping itu, perguruan tinggi juga berperan dalam pelatihan teknis kepada pelaku usaha lokal, pengembangan sistem logistik dingin (cold chain), serta pendampingan dalam proses sertifikasi produk dan digitalisasi manajemen usaha. Kontribusi perguruan tinggi sangat penting untuk memastikan bahwa kawasan industri ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga memiliki fondasi pengetahuan dan teknologi yang kuat.

Upaya pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), juga menjadi pilar penting dalam pembangunan kawasan industri di Gampong Padang Seurahet. Pemerintah dan lembaga mitra dapat memberikan bantuan modal usaha serta pelatihan teknis kepada pelaku industri hilir perikanan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Fokus pengembangan diarahkan pada industri penggaraman ikan (ikan asin), pengolahan katsuboushi, produksi kerupuk ikan, serta pembuatan produk olahan modern seperti abon ikan, bakso ikan, dan nugget ikan. Diversifikasi produk ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus memperluas peluang pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Setelah dukungan infrastruktur dan kesiapan SDM tersedia, investor menjadi elemen kunci dalam menggerakkan roda ekonomi kawasan. Para investor diarahkan untuk membangun fasilitas-fasilitas utama seperti cold storage, industri pembekuan dan pengalengan ikan, pabrik es, serta unit pengolahan hasil perikanan lainnya. Keberadaan fasilitas ini akan menciptakan sistem produksi yang terintegrasi dan efisien. Investasi yang masuk juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, menciptakan ekosistem usaha yang sehat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Untuk memfasilitasi investor, Pemerintah Daerah juga akan menyediakan skema insentif fiskal, kemudahan perizinan, serta kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan.

Namun demikian, berbagai kegiatan industri perikanan juga menghasilkan limbah dalam jumlah besar, baik dalam bentuk padat maupun cair. Jika tidak ditangani dengan baik, limbah ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan limbah menjadi bagian integral dari pembangunan kawasan industri. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi

pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pemanfaatan limbah menjadi produk sampingan seperti pakan ternak dan pupuk, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular yang menjadikan limbah sebagai sumber daya alternatif. Dengan pendekatan ini, kawasan industri dapat berfungsi secara produktif tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Produk-produk hasil olahan dari kawasan industri perikanan ini selanjutnya dipasarkan di pasar lokal dan ekspor. Pemasaran lokal dilakukan dengan menjalin kemitraan bersama pasar tradisional, toko modern, dan industri kuliner lokal. Sementara itu, untuk menjangkau pasar nasional dan internasional, pelaku usaha didorong dapat melakukan pemasaran secara langsung (*direct selling)* ke pasar yang telah dituju maupun memanfaatkan platform digital (digital marketing). Penguatan kapasitas pelaku usaha untuk memanfaatkan tren digital ini sangat penting dalam era ekonomi berbasis teknologi informasi, di mana akses pasar tidak lagi terbatas oleh lokasi geografis.
Seluruh tahapan dan intervensi yang dilakukan bermuara pada satu tujuan yaitu membangun kawasan industri perikanan yang berkelanjutan di Gampong Padang Seurahet. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya mendorong produktivitas dan ekspor, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kelestarian sumber daya alam laut. Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, investor, dan masyarakat, Gampong Padang Seurahet berpotensi menjadi model pengembangan industri pengolahan perikanan yang berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam

3.3.5.5 Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kawasan Transmigrasi menurut UU Nomor 29 Tahun 2009 adalah Kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan. Selanjutnya, dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa konsep pembangunan transmigrasi memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Peran transmigrasi terhadap pengembangan wilayah dapat dilihat dalam hal pengembangan akses terhadap faktor-faktor produksi karena adanya transmigrasi telah membangun sarana fisik transportasi berupa jalan, jembatan, gorong-gorong dan saluran drainase yang telah membuka isolasi wilayah yang selama ini tidak tersentuh pertumbuhan.

Kabupaten Aceh Barat terdapat beberapa lokasi transmigrasi yang saat ini secara administrasi telah tercatat sebagai Gampong yaitu di Alue Keumeuneng Kecamatan Woyla Barat, Simpang Teumarom Kecamatan Woyla Barat, Gunong Pulo Kecamatan Arongan Lambalek, Karang Hampa Kecamatan Arongan Lambalek, Lango Kecamatan Pante Ceureumen dan Drien Sibak Kecamatan Sungai Mas. Lokasi transmigrasi di Alue

Keumeuneng Kecamatan Woyla Barat memiliki luas wilayah mencapai 945 hektar. Lokasi tersebut ditunjukkan pada gambar berikut :

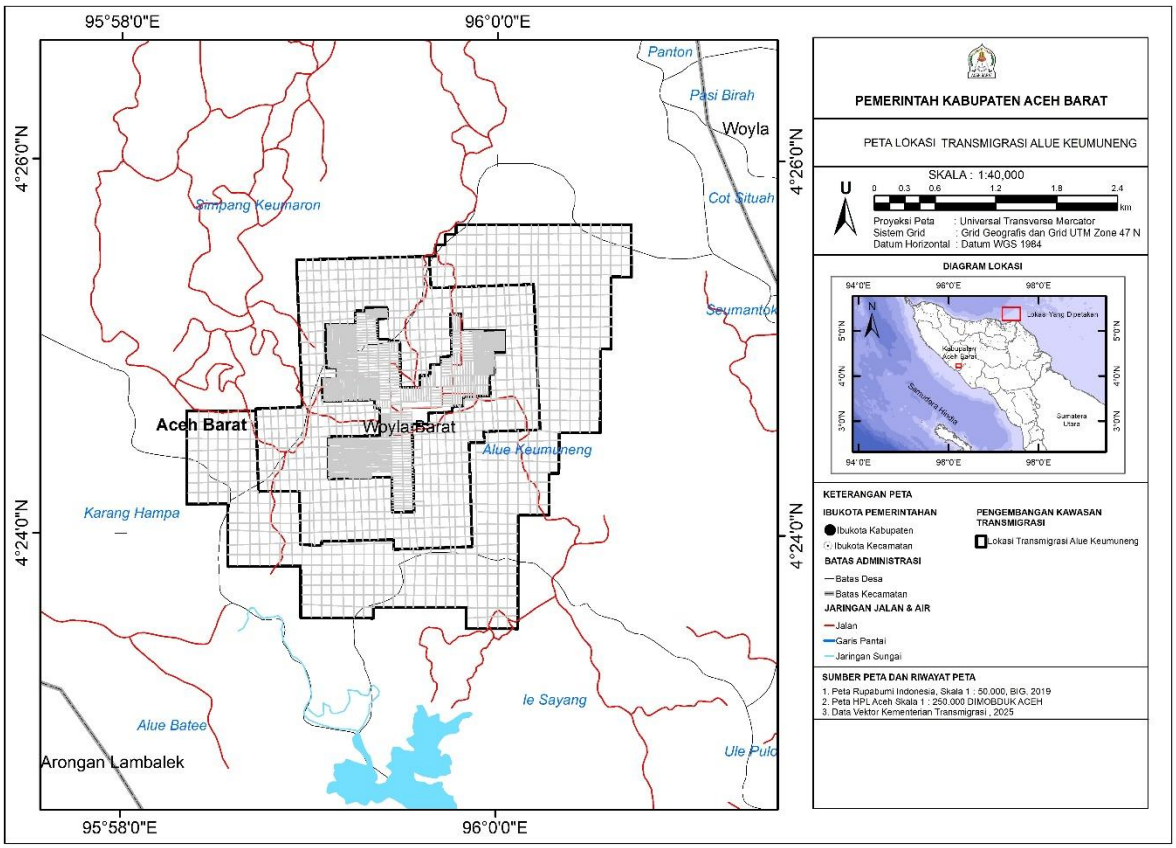

Gambar 3.20
Lokasi Transmigrasi Gp. Alue Keumeuneng Kecamatan Woyla Barat

Lokasi berikutnya berada di Gampong Simpang Teumarom Kecamatan Woyla Barat dengan luas wilayah sebesar 2.150 hektar. Lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

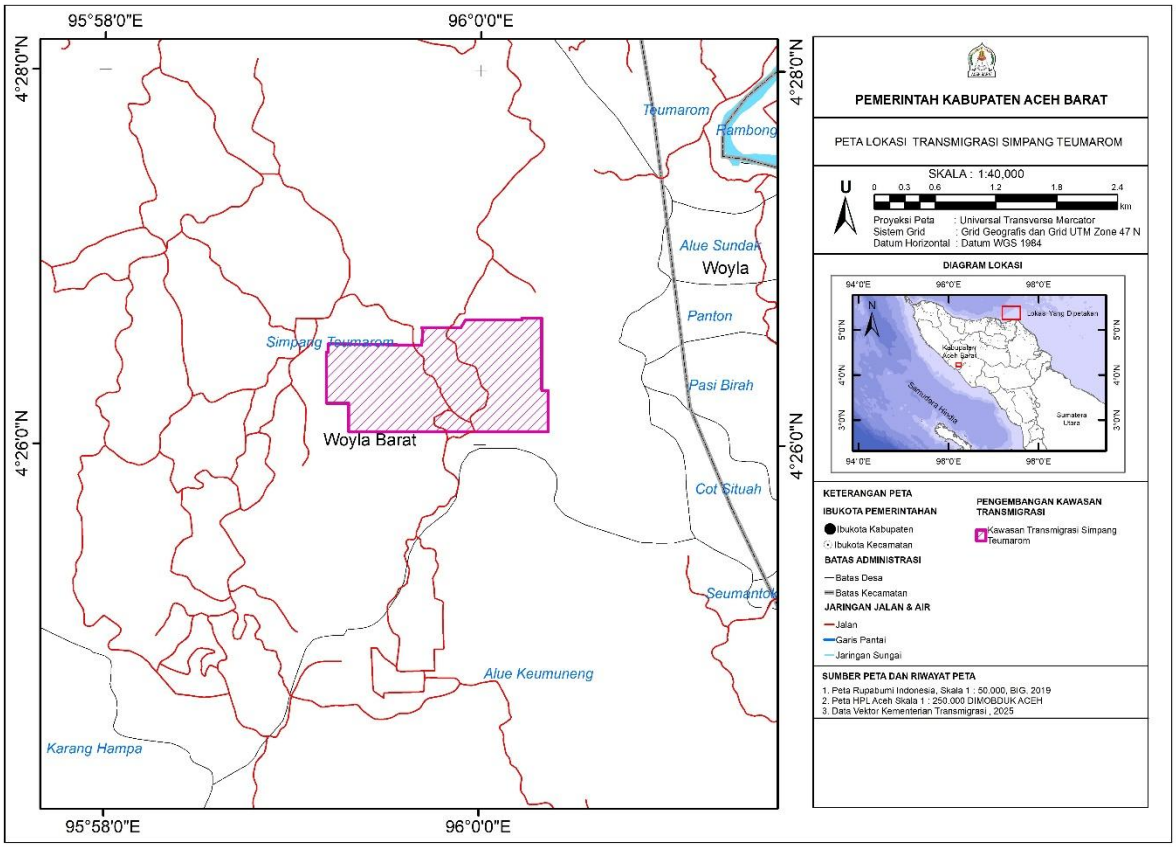

Gambar 3.21
Lokasi Transmigrasi Gampong Simpang Teumarom Kecamatan Woyla Barat

Lokasi selanjutnya berada di Gampong Gunong Pulo Kecamatan Arongan Lambalek dengan luas wilayah mencapai 905 Ha. Berada dalam Kecamatan yang sama juga terdapat Lokasi transmigrasi di Gampong Karang Hampa yang memiliki luas wilayah sebesar 581 hektar. Lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

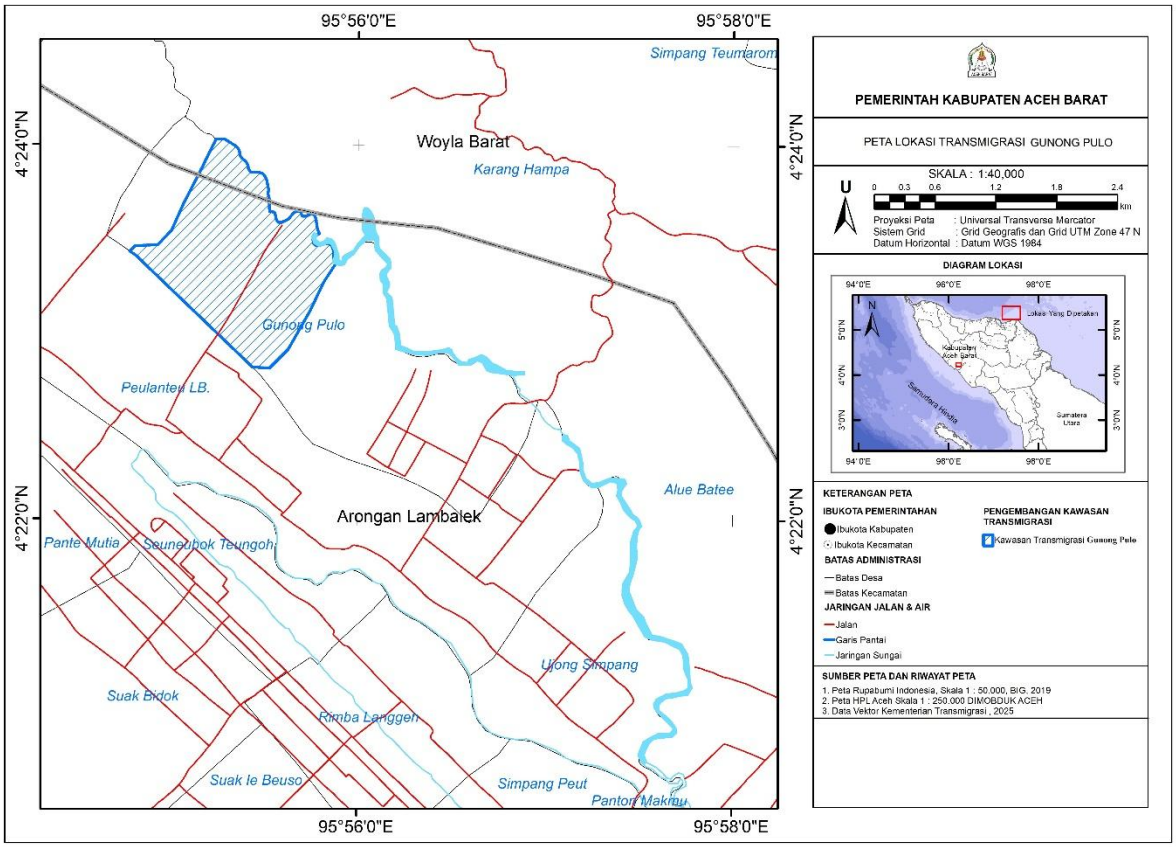

Gambar 3.22
Lokasi Transmigrasi di Gampong Gunong Pulo Kecamatan Arongan Lamabalek

Lokasi transmigrasi lainnya yang juga berada di Kecamatan Arongan Lambalek yaitu berada pada Gampong Karang Hampa dengan luas wilayah mencapai 581 hektar. Lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

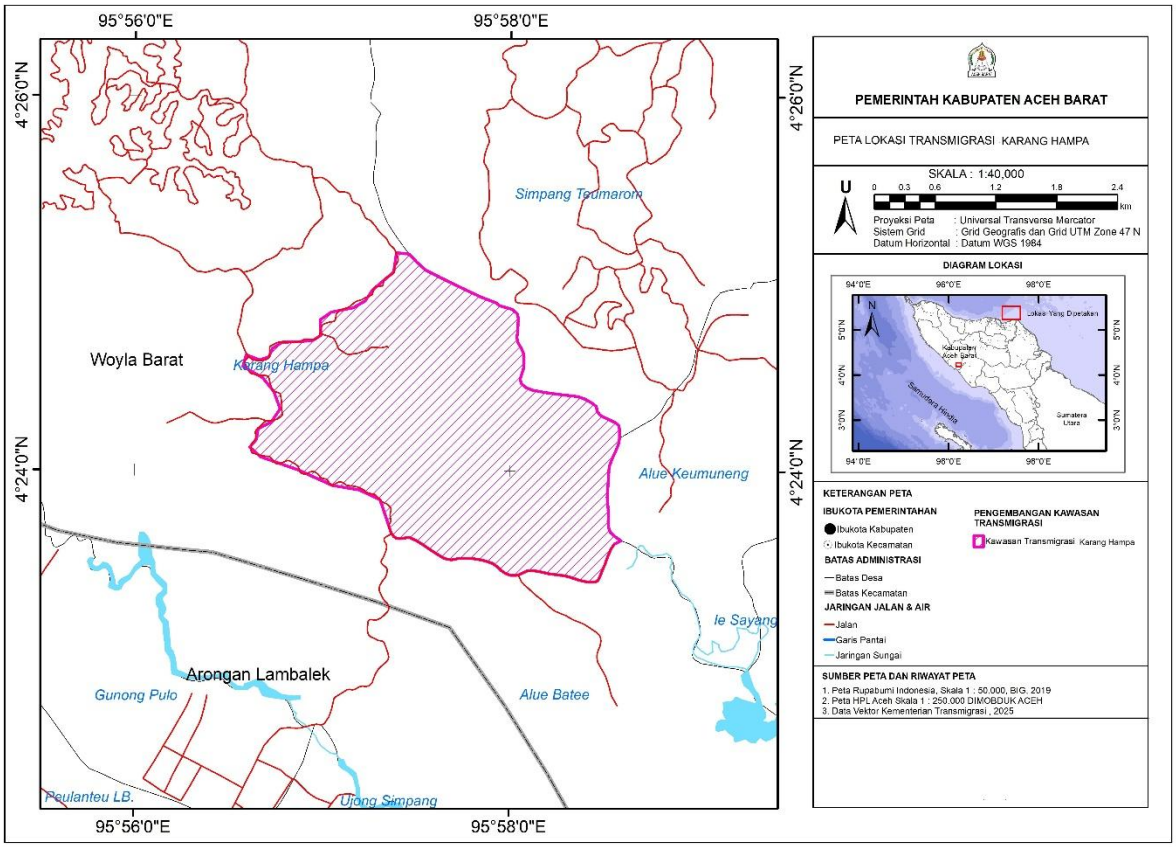

Gambar 3.23
Lokasi Transmigrasi di Gampong Karang Hampa Kecamatan Arongan Lambalek

Lokasi transmigrasi lainnya berada di Gampong Lango Kecamatan Pante Ceureumen dengan luas wilayah mencapai 300 hektar Lokasi transmigrasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

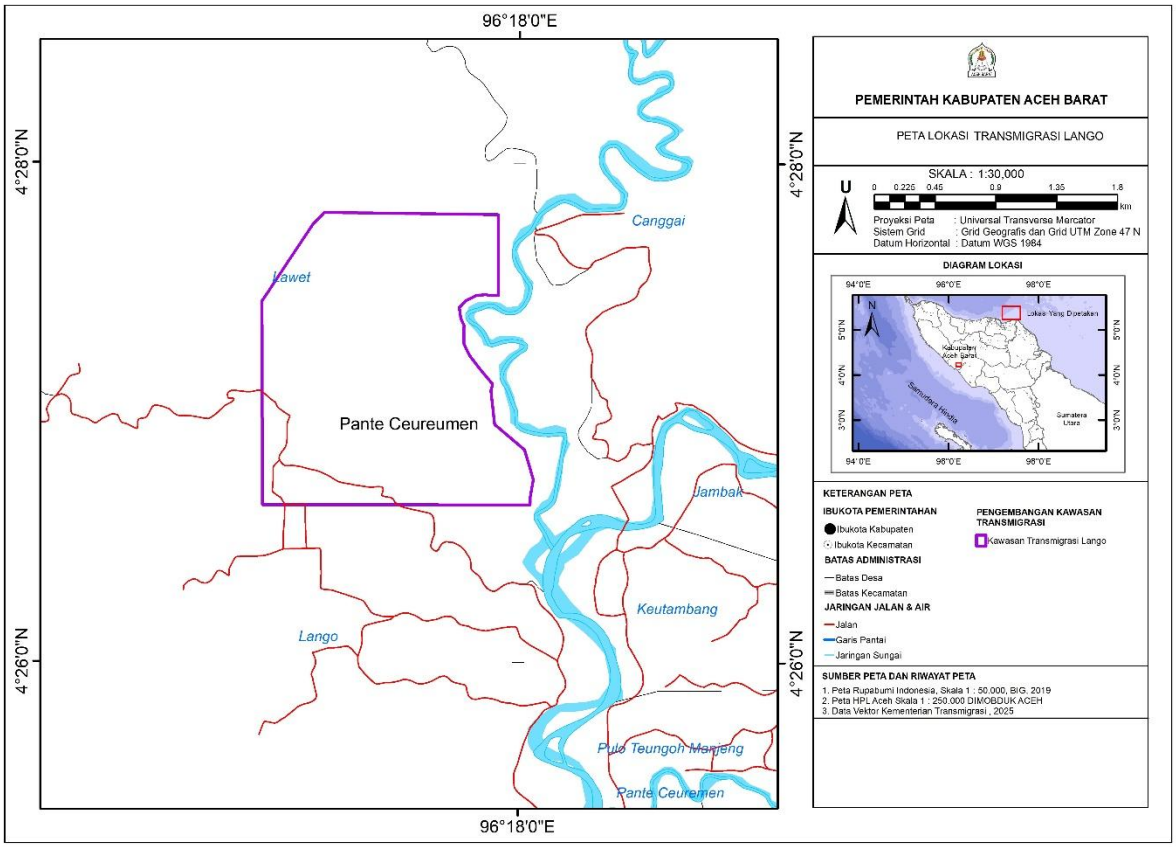

Gambar 3.24
Lokasi Transmigrasi di Gampong Lango Kecamatan Pante Ceureumen

Lokasi berikutnya berada di Gampong Drien Sibak Kecamatan Sungai Mas dengan luas wilayah mencapai 306,14 hektar. Lokasi transmigrasi Gp. Drien Sibak dapat dilihat pada gambar berikut :

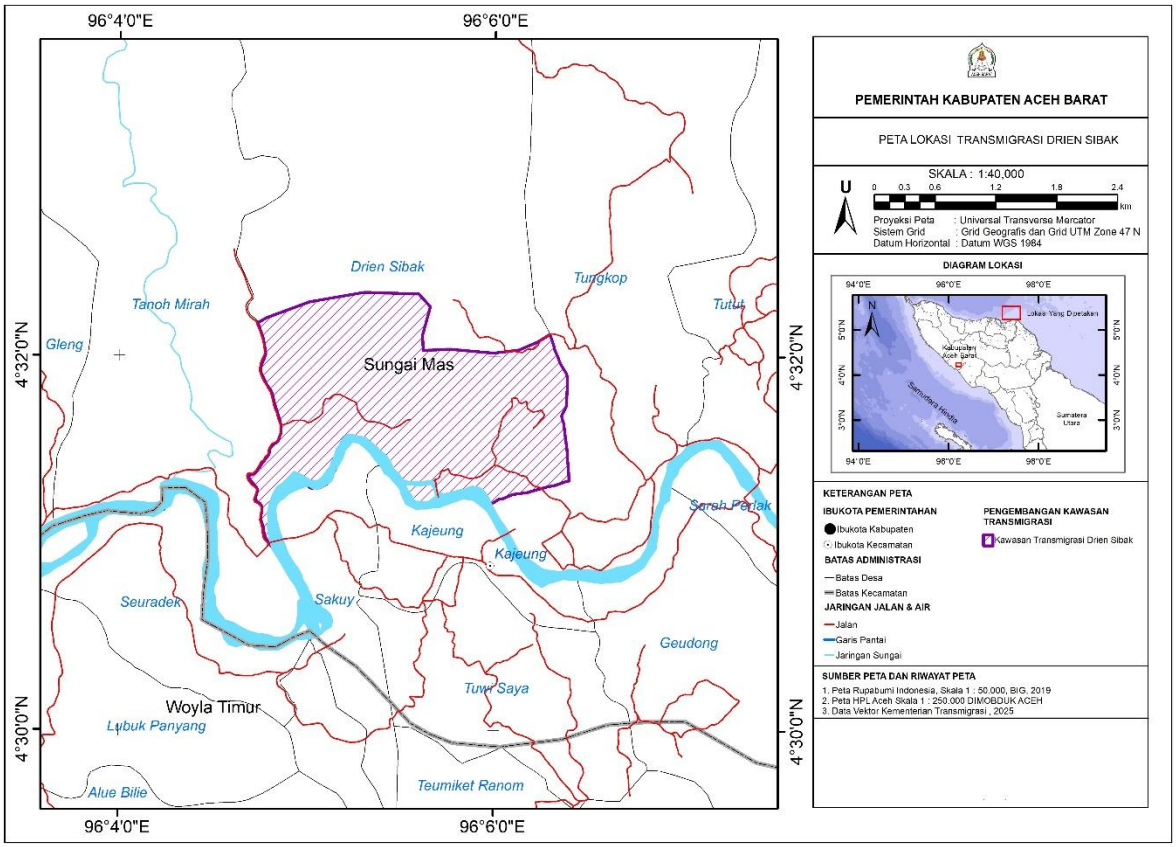

Gambar 3.25
Lokasi Transmigrasi di Gampong Drien Sibak Kecamatan Sungai Mas

Selain beberapa lokasi tersebut diatas juga terdapat kawasan eks transmigrasi di UPT. I Alue Peunyareng SP. 1 yang berada di Gp. Bukit Jaya, UPT. II Alue Peunyareng SP. 2 dan 4 di Gp. Sumber Batu, UPT. III Alue Peunyareng berada di Gampong Batu Jaya dengan luas wilayah hak pengelolaan lahan pada kawasan tersebut mencapai 9.135,5 hektar. Kawasan tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut :

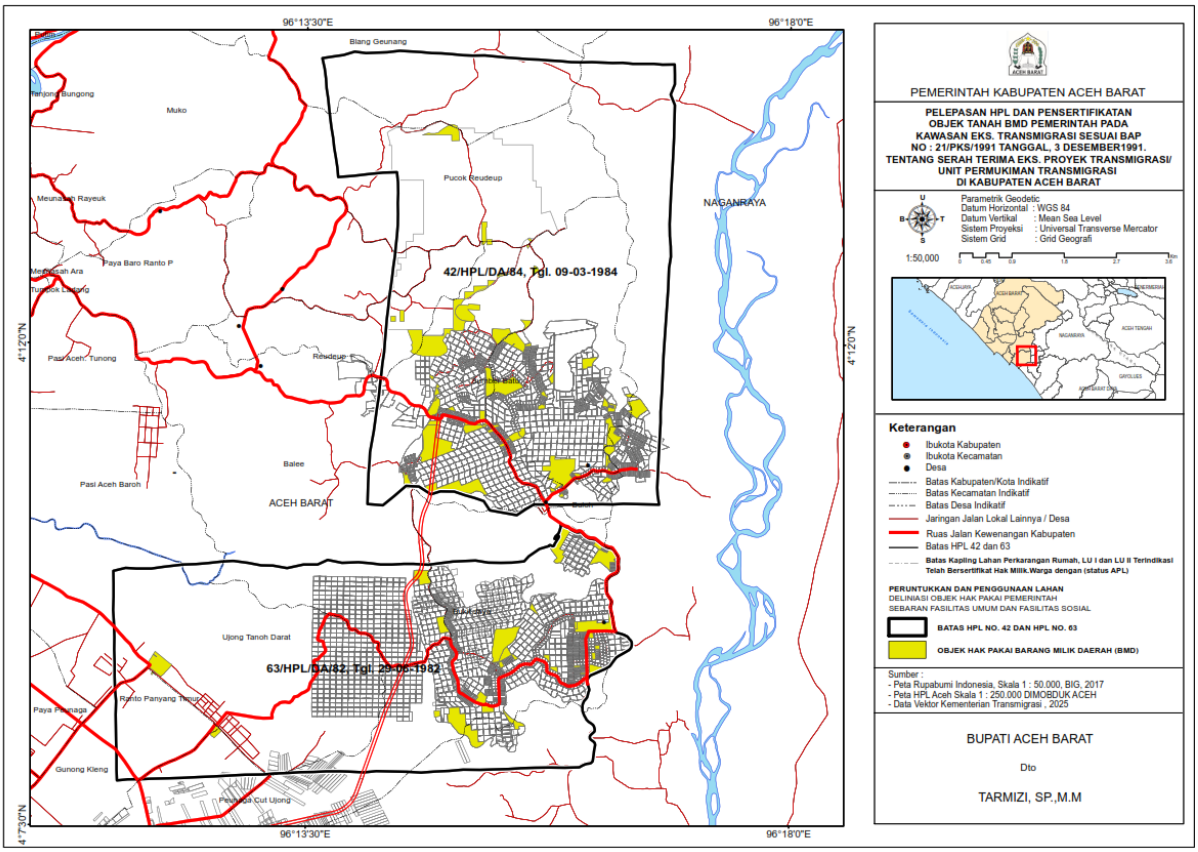

Gambar 3.26
Batas HPL Nol 42 dan No.43 Kawasan Eks Transmigrasi UPT. I, II, dan III Alue Peunyareng

Sebagian besar masyarakat pada kawasan transmigrasi tersebut bermata pencaharian di sektor peternakan dan perkebunan. Sapi dan kambing menjadi salah satu komoditi ternak yang diusahakan pada sektor peternakan, sedangkan di sektor perkebunan, kelapa sawit masih menjadi komoditas yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat setempat selain komoditas karet. Jika dilihat dari komoditas yang diusahakan saat ini dan menjadi mata pencaharian masyarakat, maka komoditas yang paling sesuai untuk dikembangkan pada Kawasan transmigrasi tersebut adalah perkebunan kelapa sawit serta pengembang ternak seperti sapi dan kambing. Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, dibutuhkan upaya dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan potensi sebagai salah satu solusinya. Berikut tabel potensi gampong yang dapat dikembangkan sebagai mata pencaharian penduduk kawasan transmigrasi:

Tabel 3.14 Potensi Alam Yang Dapat Dikembangkan Sebagai Mata Pencaharian Penduduk Yang Berada atau Disekitar Kawasan Transmigrasi

No	Kawasan Transmigrasi	Potensi Pengembangan di Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Sumber Air Sebagai Media Pengembangan Sektor Pertanian	Kondisi Aksesibilitas Pendukung Kawasan Pengembangan Transmigrasi
1	Gampong Alue Keumeuneng, Kec. Woyla Barat	1. Kelapa Sawit; 2. Ternak Sapi; 3. Ternak Kambing;	Kondisi topografi berada di perbukitan/lereng gunung, sehingga kekurangan sumber air baku	Jalan masih dalam kondisi tidak beraspal, sehingga perlu peningkatan.
2	Gampong Simpang Teumarom, Kec. Woyla Barat	1. Kelapa Sawit; 2. Ternak Sapi; 3. Ternak Kambing;	Kondisi topografi berada di perbukitan/lereng gunung, sehingga kekurangan sumber air baku	Jalan masih dalam kondisi tidak beraspal, sehingga perlu peningkatan.
3	Gampong Gunong Pulo, Kec. Arongan Lambalek	1. Kelapa Sawit; 2. Ternak Sapi; 3. Ternak Kambing;	Kondisi topografi berada di Lembah/DAS, sehingga memiliki air baku berupa air permukaan yang cukup.	Jalan masih dalam kondisi tidak beraspal, sehingga perlu peningkatan.
4	Gampong Karang Hampa, Kec. Arongan Lambalek	1. Kelapa Sawit; 2. Karet; 3. Ternak Sapi; 4. Ternak Kambing;	Kondisi topografi berada di lereng/punggung bukit, sehingga kekurangan sumber air baku. Sumber air saat ini berasal dari geunang setempat.	Jalan masih dalam kondisi tidak beraspal, sehingga perlu peningkatan.
5	Gampong Lango, Kec. Pante Ceureumen	1. Kelapa Sawit; 2. Ternak Sapi/Kerbau; 3. Ternak Kambing;	Sumber air berasal daripada D.I. Suak Lango yaitu melalui saluran sekunder. Jarak sumber air ke gampong lango ± 600 meter	Jalan sudah beraspal
6	Gampong Drien Sibak, Kecamatan Sungai Mas	1. Kelapa Sawit; 2. Ternak Kerbau; 3. Ternak Kambing;	Sumber air berasal dari air permukaan atau air sungai	Jalan masih dalam kondisi tidak beraspal, sehingga perlu peningkatan.

Pengembangan kawasan transmigrasi berbasis potensi harus dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah yang menekankan pentingnya pendekatan sistemik, yaitu keterkaitan antar sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, infrastruktur, sosial budaya maupun sektor lainnya yang melaksanakan kebijakan dan kegiatan pembangunan transmigrasi secara terintegrasi. Untuk mewujudkan kawasan yang dimaksud, maka perlu diciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat guna membuat keterkaitan antar wilayah membentuk sistem pengembangan ekonomi wilayah. Fasilitas-fasilitas umum yang menjadi pusat pelayanan dasar perlu dipenuhi, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan yang lainnya. Dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan fasilitas umum lainnya, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat di wilayah

Kawasan transmigrasi. Kondisi fasilitas pendidikan yang berada di Gampong atau berdekatan dengan kawasan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Fasilitas Pendidikan yang Berada Didalam/Berdekatan dengan Kawasan Transmigrasi

No	Tingkat Pendidikan	Nama Sekolah	Lokasi	Kawasan Transmigrasi
1	SD/MI/Setara	Min 19 Aceh Barat	Jl. Teupin Peuraho-Alue Keumuneng KM 8, Gampong Karak	Gampong Alue Keumeuneng, Kecamatan Woyla Barat
2	SLTP/MTSn/ Setara	SLTPN 4 Woyla Barat	Jl. Chik Karak-Alue Keumeueng KM 22, Dusun Mangga	
3		SLTPN 3 Woyla Barat	Jl, Teupin Peuraho – Alue Keumeuneng	
4	SMA/MA/Setara	SMAN 1 Woyla Barat	Jl. Teupin Peuraho - Alue Keumeuneng Pasi Mali KM. 07, Pasie Mali	
5	SD/MI/Setara	SD Swasta Simpang Teumarom	Jl. Pocut Baren KM. 04	Gampong Simpang Teumarom, Kecamatan Woyla Barat
6	SD/MI/Setara	SDN PIR Batee Puteh V	Jl. Pirsus Gunong Pulo – Karang Hampa	Gampong Karang Hampa Gampong Gunong Pulo, Kecamatan Arongan Lambalek
7		SDN UPT IV Kr. Hampa	Jl. Pinus – Batee Puteh	
8	SMA/MA/Setara	SMAN 1 Arongan Lambalek	-	Kecamatan Arongan Lambalek
9		SMKN 1 Arongan Lambalek		
10	SD/MI/Setara	SDN Lango	Jl. Pante Ceureumen – Transmigrasi Lango	Gampong Lango Kecamatan Pante Ceureumen
11	SMA/MA/Setara	SMAN Pante Ceureumen		Kecamatan Pante Ceureumen
12		SMKN Pante Ceureumen		
13	SD/MI/Setara	MTSs Pocut Baren	Gaseu	Gampong Drien Sibak Kecamatan Sungai Mas
14	SMA/MA/Setara	SMAN Sungai Mas		Kecamatan Sungai Mas

Sedangkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang berada/berdekatan dengan kawasan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Fasilitas Kesehatan Yang Berada Didalam/Berdekatan dengan Kawasan Transmigrasi

No	Kecamatan	Jenis Layanan Fasilitas Kesehatan	Lokasi	Kawasan Transmigrasi	Keterangan
1	Meureubo	Puskesmas Meureubo	Jl. Datok Janggot Meueh Kec. Meureubo (di Gampong Meureubo)	Kecamatan Meureubo	- Jarak Puskesmas dengan Gp. Bukit Jaya : ± 1-2 KM
		Pustu Bukit Jaya/SP 1	Desa Bukit Jaya Kec. Meureubo	Gampong Bukit Jaya/SP 1	

No	Kecamatan	Jenis Layanan Fasilitas Kesehatan	Lokasi	Kawasan Transmigrasi	Keterangan
		Pustu Alpen	Desa Alue Peunyereng Kec. Mereubo	Kecamatan Meureubo	
2	Pante Ceureumen	Puskesmas Pante Ceureuemen	Jl. Meulaboh - Pante Ceureumen Kec. Pante Ceureumen (di Gampong Pante Ceureuemen)	Kecamatan Pante Ceureumen	- Jarak Puskesmas dengan Gp. Lango: ± 5,4 KM
3	Sungai Mas	Puskesmas Kajeung	Jl. Tutut - Kajeung Kec. Sungai Mas (di Gampong Kajeung)	Kecamatan Sungai Mas	- Jarak Puskesmas dengan Gp. Drien Sibak: ± 19 KM
4	Woyla Barat	Puskesmas Woyla Barat	Jl. Teupin Peuraho - Karak Kec. Woyla Barat (di Gampong Pasi Mali)	Kecamatan Woyla Barat	- Jarak Puskesmas dengan Gp. Alue Keumeuneng: ± 7 KM - Jarak Puskesmas dengan Gp. Simpang Teumarom: ± 24 KM
5	Arongan Lambalek	Puskesmas Arongan Lambalek	Jl. Meulaboh - Banda Aceh Kec. Arongan Lambalek (di Gampong Drien Rampak)		- Jarak Puskesmas dengan Gp. Gunong Pulo: ± 10,3 KM - Jarak Puskesmas dengan Gp. Karang Hampa: ± 9,8 KM
		Polindes Gunong Pulo	Desa Gunong Pulo Kec. Arongan Lambalek	Gampong Gunong Pulo	

Strategi pengembangan kawasan transmigrasi berfokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan berkelanjutan. Beberapa aspek penting seperti pengembangan infrastruktur dasar (seperti jalan dan jembatan), penyediaan fasilitas publik (sekolah, puskesmas), dan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan akses modal usaha, keterampilan dan pengetahuan. Strategi Pengembangan Kawasan transmigrasi dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara diantaranya:

a. Strategi pengembangan Masyarakat;

Upaya pengembangan dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek Pembangunan. Pelaksanaan strategi ini ditujukan untuk mencapai keberlanjutan pengembangan wilayah transmigrasi. Pelaksanaan strategi ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai, baik untuk pengembangan mental, spiritual maupun kompetensi mereka. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat di kawasan transmigrasi mempunyai kesadaran, rasa memiliki terhadap berbagai upaya pembangunan/pengembangan yang telah dilakukan, sekaligus skill/kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah di kawasan tersebut. Dengan pelaksanaan strategi ini, diharapkan pengembangan wilayah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

b. Strategi pengembangan ekonomi;

Strategi tersebut dilakukan melalui pengembangan komoditi unggulan yang berada di masing-masing wilayah transmigrasi. Pengembangan komoditas unggulan sub sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di kawasan transmigrasi menjadi peluang yang perlu diperhatikan. Fokus dalam proses pembangunan ini untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Beberapa komoditi yang berpeluang untuk dikembangkan di kawasan transmigrasi seperti kelapa sawit, karet, ternak sapi, kerbau dan kambing. Beberapa komoditi ini selain berpeluang pemasarannya di pasar lokal, dalam skala produksi tertentu berpeluang untuk di eskpor ke wilayah lainnya;

c. Strategi pengembangan wilayah;

Strategi ini dilakukan melalui pengembangan wilayah transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan dan diharapkan akan mampu mendukung perkembangan wilayah lainnya. Pusat pertumbuhan umumnya dicerminkan dengan adanya pengembangan kawasan permukiman dan penyediaan infrastruktur dasar. Dengan adanya kawasan transmigrasi, diharapkan permukiman sekitar dapat berkembang pesat karena kawasan transmigrasi dapat menjadi motor penggerak kemajuan wilayah disekitari. Penyediaan sarana dan prasarana dasar serta fasilitas umum dan fasilitas social pada Kawasan transmigrasi diharapkan akan memberikan dukungan perkembangan wilayah lainnya yang berada di sekitar. Berikut bagan alir pengembangan kawasan transmigrasi:

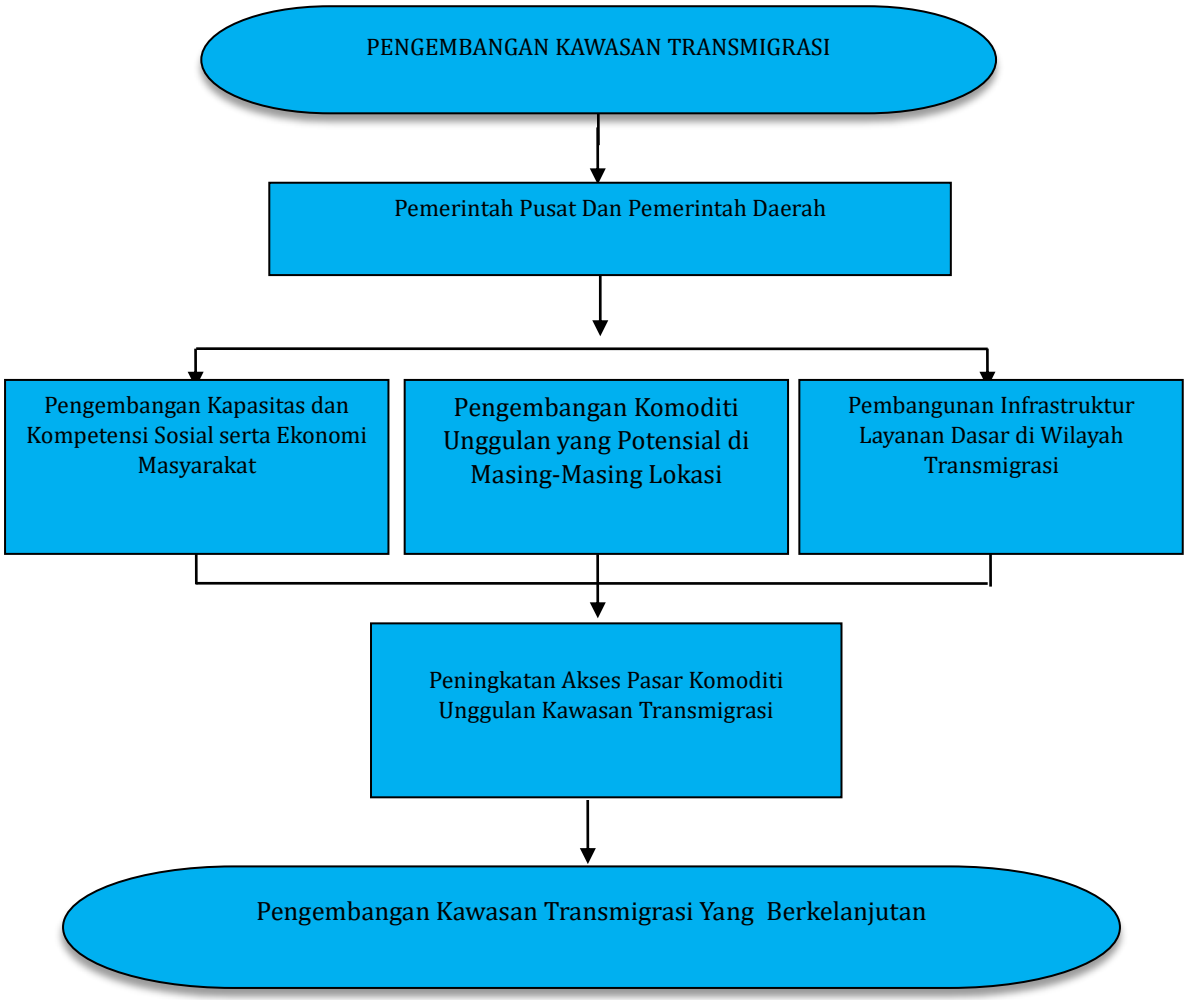

Gambar 3.27
Bagan Alir Pengembangan Kawasan Trasnmigrasi

3.3.5.6 Wilayah Pertambangan Rakyat

Adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) merupakan wujud jaminan keamanan berupa perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di lokasi dengan potensi sumber daya alam seperti mineral logam khususnya emas. Dengan adanya Wilayah pertambangan rakyat yang umumnya dilakukan secara eksklusif dan legal serta hanya ditujukan bagi masyarakat setempat dengan skala yang terbatas akan mempermudah pemerintah daerah dalam pengendalian aktivitas usaha penambangan. WPR ini juga akan menjadi alat proteksi lingkungan dalam rangka pencegahan penambangan dalam skala besar.

Disisi lain, WPR merupakan bagian integral dari wilayah pertambangan yang harus melalui prosedur perizinan guna meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan. Aktivitas pertambangan terutama yang melibatkan mineral logam berpotensi memberikan dampak besar terhadap lingkungan sekitar. Sehingga segala bentuk kegiatan penambangan rakyat harus didasari dengan izin resmi agar

kegiatan pertambangan rakyat ini dapat berlangsung secara legal dan terkontrol maka diperlukan adanya Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Izin pertambangan rakyat dapat diterbitkan setelah wilayah yang bersangkutan ditetapkan sebagai WPR oleh pemerintah pusat. Penetapan WPR merupakan langkah awal yang wajib dilakukan untuk memperoleh IPR dan memastikan kegiatan penambangan rakyat berjalan sesuai aturan. Dengan adanya WPR, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan mengawasi kegiatan penambangan dengan lebih baik, sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam di lingkungannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

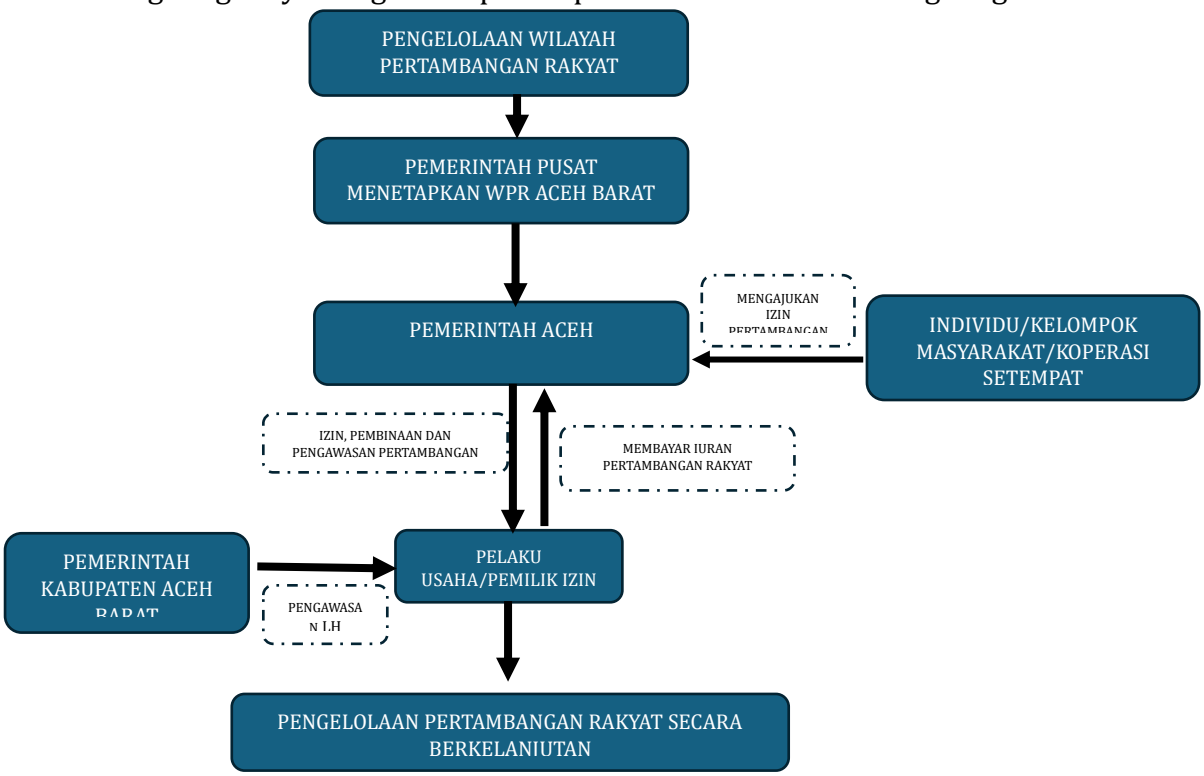

Gambar 3.28
Bagan Alir Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mengajukan beberapa titik lokasi dalam wilayah Kabupaten Aceh barat kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Aceh untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) komoditi Emas. Pengajuan tersebut dilakukan untuk memberikan keleluasan dan jaminan kepada masyarakat setempat agar dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi komoditi emas secara legal dan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Beberapa wilayah WPR yang direncanakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Lokasi Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat Komoditi Emas di Kabupaten Aceh Barat

No	Titik	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Titik 1	Sungai Mas	99,23
2	Titik 2	Sungai Mas	52,75
3	Titik 3	Pante Ceureumen	97,26
4	Titik 4	Pante Ceureumen	88,19
5	Titik 5	Woyla, Woyla Barat	102,30
		Total	**439,73**

Sumber: Bagian Ekonomi Setdakab, 2024

Keseluruhan lokasi WPR tersebut akan dikelola oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Walaupun demikian, pelaksanaan pengelolaan WPR tentunya memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku, baik perizinan, hingga pelaksanaan pasca tambang. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan pada WPR akan melibatkan Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi serta Kabupaten Aceh Barat untuk memastikan agar kegiatan eksploitasi, pengelolaan limbah, reklamasi dan pasca tambang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lokasi rencana wilayah pertambangan rakyat tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

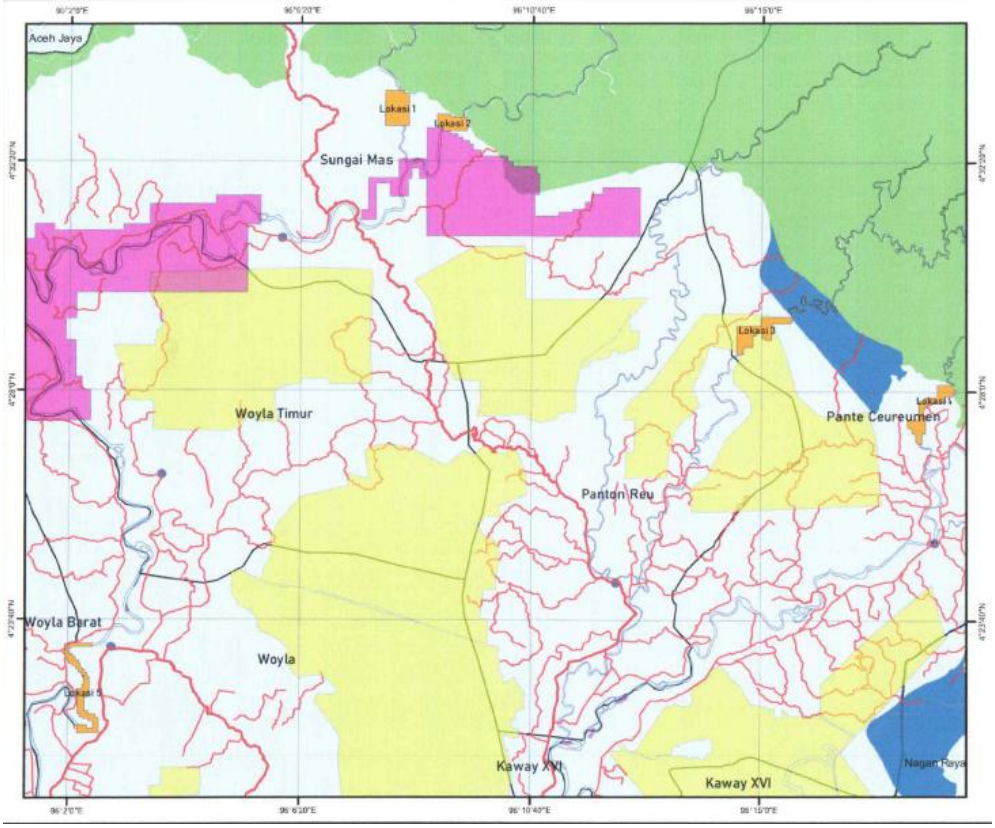

Gambar 3.29
Lokasi Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat Komoditi Emas

3.3.5.7 Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan dimaksudkan agar terciptanya pemerataan Pembangunan antar wilayah dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat. Pembangunan kewilayahan Aceh Barat yang dirumuskan merupakan penyelerasan dari Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Menengah Aceh Tahun 2025-2029. Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029, pembangunan kewilayahan tersebut terbagi ke dalam 3 bagian yaitu : a. Kawasan perkotaan Meulaboh; b. Kawasan swasembada pangan dan energi Pesisir Barat Aceh; dan c. Kawasan komoditas unggulan Sawit dan Karet Pesisir Barat dan Selatan Aceh (B3). Secara lebih lengkap, Pembangunan kewilayahan dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut

Tabel 3.18 Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional, Aceh dan Aceh Barat

No	Pembangunan Kewilayahan			
	Nasional	Aceh		Aceh Barat
1.	Kawasan Perkotaan Meulaboh	Pengembangan Wilayah Perkotaan Meulaboh	1.	Kawasan Perkotaan Meulaboh
	a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Meulaboh, antara lain melalui :			a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Meulaboh :
	- Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;			- Review Rencana Detil Tata Ruang Kota Meulaboh dan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Perkotaan Meulaboh
	- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau			- Revitalisasi PDAM;
	- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan			- Peningkatan layanan persampahan perkotaan, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, kerjasama pengelolaan sampah dengan BUMG/BUMS, pengelolaan limbah dan ruang terbuka hijau
	- Penataan pemukiman kumuh terpadu perkotaan			- Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan swasta
				- Pembangunan Pusat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
				- Pembangunan Rumah Layak Huni, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni,
	b. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di Kawasan Perkotaan Meulaboh (PHTC)			b. Penyediaan/Perbaikan/Operasional Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan perkotaan meulaboh;
	c. Pengembangan SPAM Perkotaan Meulaboh			c. Optimalisasi IPA Lapang
	d. Pengembangan terminal *multipurpose* Pelabuhan Meulaboh			d. Optimalisasi IPA Ranto Panyang

No	Pembangunan Kewilayahan			
	Nasional	Aceh		Aceh Barat
	e. Preservasi jalan ruas Takengon-Meulaboh, Meulaboh-Calang, Meulaboh-Sukamakmue-Blangpidie			e. Optimalisasi IPA Beureugang
	f. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Cut Nyak Dhien (PHTC)			f. Pengembangan Sarana dan Prasarana yang mendukung Layanan Kanker, Jantung, Stroke dan Kanker pada RSUD Cut Nyak Dhien
				g. Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendukung layanan Kanker, jantung, Stroke dan Kanker pada RSUD Cut Nyak Dhien
				h. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Zainal Abidin Aceh sebagai rumah sakit pengampu dalam layanan Kanker, Jantung, Stroke dan Kanker pada RSUD Cut Nyak Dhien
2.	Kawasan Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya)	Pengembangan infrastruktur pengairan untuk mendukung swasembada pangan di pesisir barat Aceh dan Energi Baru Terbarukan	2.	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan dan Energi
	a. Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Tutut (Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya);			a. Penyelesaian dan Penetapan Kawasan Industri pada Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032
	b. Pengembangan gasifikasi batu bara;			b. Pembangunan kawasan pertanian komoditas Padi di Kecamatan Kaway XVI dan Samatiga
	c. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, antara lain pada D. I. Lhok Cuci, D. I. Susoh, dan D. I Jeuram;			c. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah serta penyediaan sistem pompanisasi persawahan di 12 Kecamatan
	d. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah;			d. Pengembangan kawasan peternakan sapi terintegrasi kelapa sawit di Kecamatan Arongan Lambalek
	e. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi);			e. Pengembangan sentra komoditas inflasi (bawang merah) di Kecamatan Kaway XVI
	f. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan);			f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi komoditas cabai dan tanaman hortikultura lainnya di 12 Kecamatan
	g. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura;			g. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan embung, dam, dan parit penampungan sumber air pertanian di 12 Kecamatan

No	Pembangunan Kewilayahan			
	Nasional	Aceh		Aceh Barat
	h. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura;			h. Optimalisasi lahan pertanian serta cetak sawah baru di 12 Kecamatan
	i. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan Iahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik;			i. Intensifikasi lahan pertanian melalui penangkaran untuk penyediaan benih unggul, mekanisasi pertanian, penyediaan pupuk dan obat-obatan, penyediaan sumber daya air pertanian di 12 Kecamatan
	j. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dari bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen;			j. Pengembangan koperasi petani, fasilitasi akses pembiayaan usaha petani, kerjasama pemasaran komoditi pertanian, perbaikan tata niaga komoditi padi melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, Kelompok Tani dan Pabrik Penggilangan Padi, pemberdayaan Kajreun Blang, serta pembentukan petani-petani baru (petani milenial)
	k. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan alses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama;			k. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pemanfaatan hasil riset pengembangan pertanian
	l. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian;			

No	Pembangunan Kewilayahan			
	Nasional	Aceh		Aceh Barat
3.	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet Pesisir Barat-Selatan Aceh (B3) (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil)	Pengembangan kawasan komoditas unggulan sawit dan karet di Kab. Aceh Timur dan Aceh Tamiang) dan Pesisir Barat-Selatan Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam)	3.	Pengembangan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet
	a. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet)			a. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan usaha tani perkebunan sawit dan karet di 12 Kecamatan
	b. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet)			b. Pemenuhan regulasi plasma perkebunan oleh perusahaan di 10 Kecamatan
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet)			c. Pendataan pekebun, pembuatan Surat Tanda Daftar Budidaya dan fasilitasi proses sertifikasi ISPO komoditi sawit di 12 Kecamatan
	d. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan karet)			d. Peningkatan kapasitas petani sawit dan karet serta penyediaan obat-obatan untuk pengendalian OPT dan DPI di 12 Kecamatan
	e. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet			e. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas dan kualitas produksi sawit dan karet di 12 Kecamatan
	f. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan *silvopastura*			

Tabel 3.19 Daftar Program Pendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang Termuat dalam Dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Daftar Program dalam RPJM yang Mendukung KPU	Ket
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
2	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan		
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan		

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Daftar Program dalam RPJM yang Mendukung KPU	Ket
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		Pembangunan pangan akuatik (blue food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Pembangunan pangan hewani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Pembangunan pangan lokal dan nabati	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Fortifikasi dan biofortifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Peningkatan penyediaan energi		
		Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi		
		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan		
		Konservasi sumberdaya air	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Daya Air (SDA)	
		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa		
		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		
		Pengelolaan susut dan sisa pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik		
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau		
		Peningkatan kualitas ekosistem gambut		

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Daftar Program dalam RPJM yang Mendukung KPU	Ket
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	
		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan	
		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
3	Prioritas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya		
		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital		
		Percepatan pembangunan destinasi ariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan		
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena		
		Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba		
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo		
		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Pengembangan koperasi sektor produksi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
4	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi		
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Penurunan kematian ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Daftar Program dalam RPJM yang Mendukung KPU	Ket
		Pencegahan dan penurunan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Investasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
5	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Nikel		
		Pengembangan hilirisasi Tembaga		
		Pengembangan hilirisasi Bauksit		
		Pengembangan hilirisasi Timah		
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Pengembangan hilirisasi Kelapa	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut		
		Pengembangan hilirisasi Kimia		
		Pengembangan industri semikonduktor		
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil		
		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja		

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Daftar Program dalam RPJM yang Mendukung KPU	Ket
		Pengembangan industri dirgantara		
		Pengembangan KEK Sei Mangkei		
		Pengembangan KIT Batang		
		Pengembangan KI Weda bay		
6	Prioritas Nasional 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan		
		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		
		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif		
		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara		
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Pengembangan Perumahan	
7.	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Transformasi digital layanan publik prioritas		
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
8	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa		
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	

3.3.6 Hilirisasi Komoditi unggulan

3.3.6.1 Potensi Hilirisasi Komoditi Padi

Kabupaten Aceh Barat memiliki berbagai potensi sektor pertanian dengan produktivitas dan nilai ekonomi yang cukup tinggi yang dapat dijadikan penopang utama perekonomian wilayah, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa usaha pertanian yang mencapai 24,09 % terhadap struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp. 2,09 Trilyun. Komoditi pangan utama telah dikembangkan secara luas di Kabupaten Aceh Barat, padi menjadi komoditi utama yang banyak diproduksi di dua belas

kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat yaitu dengan luas areal sawah yang tercatat mencapai 10.673,61 Ha. Luas areal penanaman serta kondisi cuaca sepanjang tahun mempengaruh hasil panen. Luasan panen komoditi padi cukup bervariasi selama 5 tahun terakhir, berkisar antara 87,71 – 108,40 persen dari luas tanam dengan produktivitas yang bervariasi yaitu sebesar 5 Ton/Ha pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023.

Pengolahan hasil panen dapat dapat memberikan nilai tambah bagi komoditi. Produksi padi berupa beras merupakan konsumsi utama dan sumber karbohidrat yang dibutuhkan. Saat ini, hanya sebagian kecil kilang padi yang mampu menghasilkan beras premium, dan masih perlu ditingkatkan pengolahannya yaitu dengan penyediaan tekhnologi yang lebih memadai. Pengembangan hilirisasi komoditi padi tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas beras, akan tetapi juga pada produk diversifikasinya produk turunan seperti makanan olahan berbasis beras yaitu tepung beras, kerupuk dan mie serta produk turunan lainnya seperti sereal dan granola yang akan memperluas pasar domestik maupun ekspor. Limbah padi yang tidak dapat dikonsumsi seperti jerami dan sekam berpotensi untuk diolah menjadi pakan ternak, bahan bakar biogass, sabagai bahan pupuk organik, kerajinan tangan dan produk olahan turunan lainnya. Pengolahan produk beras juga sebagai wujud dalam mengantisipasi adanya surplus beras yang akan mengakibatkan risiko menumpukan stok dan harga jual yang rendah. Wilayah pengembangan hilirisasi berdasarkan wilayah produksi tertinggi yaitu pada Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Samatiga dan Kecamatan Woyla.

3.3.6.2 Potensi Hilirisasi Komoditi Jagung

Komoditi tanaman pangan lainnya sebagai alternatif pengganti juga mendapatkan perhatian dalam pengembangannya diantaranya jagung. Produksi Jagung yang tersebar pada 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat mencapai 104,80 Ton pada tahun 2024. Jagung Pipil menjadi komoditas yang paling banyak di budidayakan oleh petani, hal itu dikarenakan adanya permintaan pasar untuk kebutuhan industri yaitu sebagai bahan baku pakan ternak. Produksi jagung sangat tinggi berada di Kecamatan Meureubo dan dilanjutkan pada Kecamatan Woyla Barat.

Jagung termasuk kedalam tanaman palawija dan merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Jagung memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi yaitu sebagai bahan baku industri yang penting dalam memberikan nilai tambah yang cukup besar. Jagung pipil merupakan produk olahan komoditi yang digunakan sebagai bahan pakan ternak. Disisi lain, jagung juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan produk industri seperti pati, tepung jagung, minyak jagung, popcorn, sereal jagung, supleman kesehatan dan turunan lainnya. Sedangkan untuk limbahnya dapat difungsikan sebagai pupuk organik dan juga sebagai bahan bakar alternatif berupa briket biomassa yang berasal dari kulit dan tongkol yang tidak terpakai. Untuk pengembangan komoditi berdasarkan data

produksi yang tercatat yaitu wilayah Kecamatan Meureubo dengan produksi 23,40 Ton, Woyla Barat sebesar 20,10 Ton dan Arongan Lambalek sebesar 15,20 Ton.

3.3.6.3 Potensi Hilirisasi Komoditi Cabai

Cabai merupakan salah satu komoditi pertanian hortikultura yang menjadi unggulan di beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2024, produksi tanaman Cabai Besar mencapai 193 kuintal, Cabai Rawit sebesar 663 kuintal dan Cabai Keriting sebesar 2424 Kuintal. Produksi tertinggi pada komoditi cabai terdapat di Kecamatan Meureubo yang selanjutnya pada Kecamatan Woyla. Potensi lahan yang tersedia sangat mendukung untuk pengembangan komoditi tersebut, salah satunya dengan adanya upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi.

Cabai merah yang merupakan komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan paling banyak dibudidayakan secara komersil. Cabai merah, selain digunakan sebagai bahan pokok dalam berbagai masakan, juga memiliki potensi untuk diproses menjadi berbagai produk olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Komoditi cabai merah yang dapat dikembangkan menjadi cabai kering, sambal cabai, cabai bubuk dan juga dapat dikembangkan kedalam produk kesehatan seperti minyak cabai yang digunakan dalam produk salep untuk perawatan kulit dan produk turunan lainnya. Selain itu, cabai industri pengolahan digunakan sebagai pewarna alami dalam industri makanan, kosmetik dan farmasi.

3.3.6.4 Potensi Hilirisasi Komoditi Kelapa Sawit

Sektor perkebunan juga memegang peranan yang tidak kalah penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat. Beberapa komoditas unggul yang saat ini menjadi primadona masyarakat seperti Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Kopi dan Nilam masih tumbuh dan terus berkembang sebagai salah satu sumber utama ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan produksi kelapa sawit terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu seiring dengan berkembangnya jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Barat ataupun di beberapa Kabupaten tetangga. Kondisi ini menjadi faktor pendorong tumbuh suburnya perkebunan Kelapa Sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh Barat, luas areal sawit didaerah ini mencapai 11.122 Ha dengan produksi sebesar 17.824 ton pada tahun 2024. Produksi sawit tertinggi berada di kecamatan kaway XVI sebesar 6.545 Ton, selanjutnya diikuti Kecamatan Meureubo 1.927 Ton.

Produk yang dihasilkan dari sektor perkebunan juga memiliki peluang yang cukup besar terutama komoditi komoditi kelapa sawit. Berbagai produk industri rumah tangga hingga industri skala besar dapat dihasilkan dari olahan komoditas tersebut. Komoditi kelapa sawit tidak hanya menghasilkan minyak sawit mentah (CPO), namun pada produksi hilir,

produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah baik dalam bentuk produk setengah jadi maupun produk jadi. Adapun produk turunan dari kelapa sawit berupa minyak goreng, sabun mandi, margarin, mie instan, shampoo, biodiesel, detergen, lipstik, cokelat dan selai cokelat.

3.3.6.5 Potensi Hilirisasi Kelapa

Kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan yang banyak terdapat dan dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat. Hingga saat ini, Kecamatan Arongan Lambalek dan Kecamatan Samatiga merupakan sentra produksi Kelapa terbesar di Aceh Barat. Tercatat sebanyak 385 Ton jumlah produksi komoditas tersebut di Kecamatan Arongan Lambalek dan Kecamatan Samatiga sebesar 234 Ton. Salah satu faktor penyebabnya adalah keberadaan varietas unggul pada wilayah perkebunan Arongan Lambalek dan Samatiga yang telah diakui memiliki nilai produktivitas sangat baik. Upaya pengembangan terhadap komoditas tersebut terus dilakukan melalui pendampingan, pembinaan maupun penyediaan bantuan sarana produksi perkebunan sehingga keberlanjutan produksi komoditas tersebut dapat terjaga dan semakin meningkat.

Selain produk olahan minyak Kelapa Sawit, Kelapa juga merupakan komoditi perkebunan yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar baik ditingkat domestik maupun ekspor terutama ketika telah diolah menjadi berbagai produk industri hilir. Ragam produk turunan yang dapat dihasilkan oleh komoditi tersebut menjadikan kelapa menjadi unggulan yang paling banyak diminati oleh pasar domestik maupun internasional, seperti minyak kelapa dalam bentuk VCO, minyak goreng, gula kelapa, kopra, arang tempurung kelapa yang digunakan sebagai bahan baku pada industri kosmetik, makanan, obat hingga sabun, serat kelapa yang digunakan sebagai bahan baku keset, sapu dan tali serta produk turunan lainnya. Berdasarkan produk pengembangan tersebut dan sesuai dengan data yang tersedia wilayah pengembangan hilirisasi yaitu di Kecamatan Arongan Lambalek dan Kecamatan Samatiga.

3.3.6.6 Potensi Hilirisasi Komoditas Karet

Komoditas Karet juga masih menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Karet merupakan salah satu komoditas yang sangat cocok untuk dibudidayakan mengingat kondisi geografis dan topografi yang sesuai. Pada tahun 2024, komoditas karet banyak dibudidayakan di Kecamatan Woyla Barat sebesar 4510 Ha dengan produksi sebesar 3516 Ton, selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Kaway XVI sebesar 2855 Ha dengan produksi sebesar 1681 Ton. Pengelolaan perkebunan saat ini belum begitu baik, seperti tidak produktifnya lahan karet rakyat dikarenakan harga jual yang rendah, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian daerah belum optimal.

Komoditi karet memiliki peluang yang sangat besar untuk diolah menjadi produk jadi ataupun setengah jadi. Berbagai produk bernilai ekonomi tinggi telah dihasilkan dari komoditi ini diantaranya ban kendaraan bermotor, aksesoris kendaraan bermotor, material konstruksi, bahan baku produk kesehatan seperti sarung tangan, kontrasepsi, *bulb* dan *blader* untuk alat tensi darah serta kateter *foley*. Selain beberapa produk yang disebutkan diatas, berbagai produk turunan lainnya juga dapat dihasilkan dari komoditi Karet.

3.3.6.7 Potensi Hilirisasi Komoditi Nilam

Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan komoditi nilam. Hal ini dikarenakan tanaman Nilam dapat tumbuh dengan baik didataran rendah hingga sedang dengan ketinggian antara 0-700 m dpl. Pada beberapa tahun silam, Kabupaten Aceh Barat menjadi daerah penghail nilai terbaik di Aceh berkat potensi lahan yang memadai. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa petani yang mengusahakan tanaman tersebut, walaupun tidak signifikan dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Berkaca dari kondisi yang lalu, pengembangan komoditi Nilam menjadi hal yang perlu difokuskan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping menggiatkan industri pengolahan komoditi tersebut menjadi produk jadi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berbagai potensi produk olahan komoditi Nilam dapat dihasilkan dari industri hilir. Hal ini dikarenakan nilam merupakan tanaman penghasil minyak atsiri yang hingga saat ini minyaknya belum dapat dibuat sama persis secara sintesis. Minyak Nilam sebagai komoditas ekspor memberikan kontribusi sumbangan devisa yang cukup besar dan mempunyai prospek yang baik karena dibutuhkan secara kontinyu dalam industri parfum, kosmetik, sabun, obat-obatan dan lain-lain. Nilam Aceh memiliki potensi yang tinggi untuk masuk pasar international, namun selama ini Nilam Aceh hanya dieksport sebagai bahan bakunya saja. Kebutuhan minyak Nilam dipasaran dunia 90% nya berasal dari Indonesia dan Aceh hanya berkontribusi 10%-20% eksport nilam Indonesia. Selain itu, minyak nilam juga dapat digunakan sebagai bahan pestisida nabati. Limbah dari hasil penyulingan minyak nilam yang terdiri dari ampas daun dan batang mempunyai potensi dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan dupa, obat nyamuk bakar dan pupuk kompos serta sisa air dari hasil penyulingan setelah dipekatkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk aroma terapi.

3.3.6.8 Potensi Hilirisasi Komoditi Kopi

Perkebunan kopi juga menjadi daya tarik untuk dibudidayakan di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan Data Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025, luasan areal perkebunan kopi di Kabupaten Aceh Barat mencapai sebesar 575,75 hektar dengan

produksi sebesar 85 Ton. Wilayah kecamatan yang menjadi pusat budidaya tanaman kopi yaitu Kecamatan Samatiga, Kecamatan Bubon dan Kecamatan Arongan Lambalek.

Biji kopi yang dihasilkan oleh Perkebunan akan memiliki nilai tambah setelah dilakukan pengolahan menjadi berbagai produk turunan lainnya. Jenis olahan produk diversifikasi diantaranya seperti biji kopi sangrai, kopi bubuk, perisa kopi untuk makanan/minuman, atau produk olahan kopi lainnya. Dengan dilakukannya hilirisasi pada komoditi tersebut akan meningkatkan nilai tambah produk kopi, pendapatan petani, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka pengangguran serta meningkatan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan.

3.3.6.9 Potensi Hilirisasi Sektor Peternakan

Secara umum, hampir seluruh wilayah dalam Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi pengembangan sektor peternakan, baik ternak besar dan kecil (ruminansia) maupun unggas. Kebijakan pengembangan sektor peternakan telah tertuang dalam regulasi penetapan kawasan ternak yang berada di Kecamatan Arongan Lambalek untuk komoditi Sapi dan Kecamatan Sungai Mas untuk Kerbau. Sedangkan untuk ternak lainnya belum diatur secara spesifik, yang menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan beberapa komoditas tersebut menyebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Tingginya permintaan terhadap konsumsi ternak tersebut dapat terlihat dari tingginya produksi daging sebesar 342.378 Ton daging kerbau dan sebesar 214.672 Ton ternak sapi.

Pemanfaatan ternak dalam industri hilir hingga saat ini semakin berkembang pesat. Berbagai produk turunan dihasilkan dari komoditas ternak yang dibudidayakan, diantaranya seperti beberapa produk makanan yang sumber bahan bakunya berasal dari daging sapi dan kerbau serta beberapa jenis produk lainnya. Sub sektor peternakan di Aceh Barat memiliki potensi pengembangan hilirisasi yang cukup baik, hal ini terlihat dari perkembangan populasi beberapa komoditas ternak sejak beberapa tahun terakhir. Berbagai industri hilir yang berpotensi untuk dikembangkan seperti produk olahan makanan dari daging ternak (nugget, bakso, daging kaleng, dendeng, dan sebagainya), olahan kulit ternak (sepatu, tas, jaket, dan sebagainya) dan lemak hewan untuk sabun dan mentega. Berbagai strategi terus dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan sektor ini. Pengembangan budidaya ternak yang diiringi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha peternakan terus diupayakan disamping mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah yang menghasilkan berbagai produk turunan peternakan. Selain itu, upaya peningkatan pemasaran berbagai produk tersebut juga terus dilakukan sehingga diharapkan industri hilir sub sektor peternakan semakin maju dan berkembang.

3.3.6.10 Potensi Hilirisasi Sektor Perikanan

Sektor perikanan j memegang peranan penting terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Barat. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan produksi perikanan tangkap maupun budidaya setiap tahunnya. Peranan sektor ini juga didukung oleh kondisi geografis, yaitu berada pada wilayah pesisir sehingga mampu mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap khususnya. Berbagai komoditi perikanan tangkap secara langsung telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor perikanan laut yang mencapai Rp. 492,37 Milyar pada tahun 2024. Nilai tersebut cenderung fluktuatif, sangat dipengaruhi sekali oleh jenis tangkapan ikan yang dihasilkan. Secara umum, komoditi Udang memiliki nilai pengaruh signifikan terhadap pencatatan hasil perikanan laut, yang mana pada tahun 2024, nilai produksi komoditas tersebut sebesar Rp. 219,54 Milyar. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh hasil komoditi udang yang berbeda, yang mana pada beberapa komoditi tertentu memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya.

Pengembangan sektor perikanan dapat dilakukan melalui akselerasi industri hilir perikanan. Potensi industri hilir perikanan di Kabupaten Aceh Barat cukup besar terutama dengan semakin tingginya produksi perikanan beberapa tahun terakhir. Ketersediaan stok bahan baku ikan dalam jumlah memadai menjadi salah satu jaminan keberlangsungan produksi berbagai industri perikanan dalam jangka waktu lama. Beberapa produk industri hilir yang dapat dihasilkan dari komoditi perikanan diantaranya seperti ikan kaleng, ikan asin, keumamah (ikan kayu), ikan sale, katsuboshi, nugget, bakso, empek-empek, tepung ikan, serta berbagai macam produk olahan lainnya. Berbagai produk tersebut memiliki peluang pasar yang cukup tinggi, baik skala domestik maupun internasional. Disisi lain, industri pembekuan ikan dan udang juga dapat menjadi peluang investasi khususnya ikan tongkol. Produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kecamatan Johan Pahlawan dan juga merupakan wilayah pengembangan hilirisasi.

3.3.7 Konsinyasi Pengembangan Sektor Perkebunan dan Peternakan

Konsinyasi atau dalam kalangan masyarakat Aceh dikenal dengan sebutan “MAWAH’ merupakan sistem perjanjian kerja sama usaha, baik itu di sektor perkebunan maupun peternakan yang berbasis bagi hasil antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Pemerintah daerah melalui beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) menyerahkan modal/aset berupa tanah, sarana produksi, prasarana dan alat mesin pertanian yang diperlukan kepada masyarakat untuk dikelola hingga menghasilkan sejumlah produksi. Disisi lain, pemerintah daerah juga ikut serta dalam menyokong pembentukan kelembagaan yang berbasis masyarakat hingga menfasilitasi jaringan pemasaran produk hasil olahan dari program ini. Adapun keuntungan yang didapat setelah dilakukan penjualan hasil, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

"Mawah" yang akan dilaksanakan merupakan transformasi ekonomi dalam pengelolaan aset daerah yang diserahkan kepada masayarakat yang dikelola dan mendapatkan hasil, untuk selanjutnya dikembalikan dalam bentuk hasil penjualan dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga periode tertentu. Masyarakat dalam hal ini sebagai pengelola aset daerah seperti petani, peternak, pekebun hingga nelayan akan di fasilitasi oleh aparatur pemerintah daerah yaitu yang berada pada masing-masing OPD terkait.

Konsep utama yang ditawarkan dalam transformasi ekonomi ini meliputi "MAWAH Modern" merupakan model kerja sama berbasis produktivitas dengan metode bagi hasil antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Kemudian "Special Mission Vehicle (SMV)" yang merupakan entitas investasi dan pengelola aset daerah.

Mawah Modern dan *Special Mission Vehicle* (SMV) menjadi pilihan dalam transformasi ekonomi pada sektor perkebunan maupun peternakan. Kedua sektor tersebut merupakan dapat menjadi percontohan transformasi ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Pemerintah kabupaten melalui dinas terkait memiliki peran sebagai penyedia keperluan kegiatan mawah atau pemodal, juga sebagai regulator sekaligus fasilitator aktif bagi penerima manfaat program Mawah Modern..

Peran pelaku mawah modern ini tentunya akan saling menguntungkan, yaitu pemerintah sabagai pemodal akan kembali modalnya setelah bagi hasil selesai dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditentukan, masyarakat penerima manfaat dapat meningkatkan pendapatannya melalui pengelolaan komoditi ternak, limbahnya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pupuk organik, selain itu juga pada akhirnya akan dihasilkan daging ternak yang berkualitas.

Dalam menjalankan konsep "Mawah Modern", peran kelembagaan seperti kelompok peternak juga memiliki peran penting, diantaranya berfungsi dalam membantu mengakses bantuan dari pemerintah, meningkatkan daya tawar dalam pemasaran hasil kepasar lebih luas, meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mendukung peningkatan kesehatan ternak. Di sisi lain, pembentukan kelembagaan yang terdiri atas beberapa kelompok peternak akan menerapkan transformasi ekonomi guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui PAD.

Pelaksanaan skema "Mawah Modern" sebagaimana dimaksud terhadap program ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah yaitu melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada sektor peternakan mengupayakan untuk menyediakan atau memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat berupa sarana produksi, prasarana yang diperlukan, alat

mesin pertanian, bantuan kelembagaan pekebun peternak, serta akses pemasaran terhadap produk hasil hilirasai dari komoditi tersebut;

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut serta dalam kegiatan produktif dengan menjadi fasilitator aktif disamping perannya sebagai regulator kepada masyarakat pekebun peternak sekaligus menyiapkan kesepakatan bersama antara OPD, masyarakat pekebun peternak dan swasta;
3. masyarakat peternak dibantu pembentukan kelembagaannya untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan ini;
4. kelompok peternak yang telah mendapatkan bantuan pemerintah akan mengelola hasil bantuan pada lahan yang telah ditentukan atau telah disepakati secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta;
5. dalam menjalankan usahanya, peternak mengikuti regulasi yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah serta ketentuan/persyaratan dari pemilik lahan;
6. setelah melalui mekanisme pengelolaan dan mendapatkan hasil yang sesuai, maka di lakukan penjualan hasil produksi secara langsung ataupun diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dengan difasilitasi kelembagaan yang telah dibentuk berupa koperasi;
7. hasil bantuan yang telah dikelola berupa produksi setengah jadi ataupun menjadi produk olahan akan dikembalikan kepada pemilik modal dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjadi bagian dari kontribusi program terhadap pertumbuhan ekonomi dan usaha yang dikembangkan terus berlanjut;
8. kegiatan ini terus berlanjut hingga peternak mandiri dan produktif karena terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi serta menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah daerah.
10. keterlibatan aparatur dinas terkait terkait sebagai fasilitator program ini baik langsung ataupun tidak langsung dalam upaya meningkatkan produksi peternakan dalam mencapai target yang diharapkan.

Program “MAWAH” merupakan skema pertanian berbasis bagi hasil yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam satu sistem yang saling menguntungkan. Dalam pelaksanaannya skema mawah akan tertuju pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada setiap OPD melalui proyek produktif. Organisasi Perangkat Daerah yang tidak dapat menghasilkan PAD secara langsung atas tugas fungsinya maka dapat bersinergi dengan OPD yang punya tugas dan fungsi yang berpotensi menghasilkan PAD. Capaian Produktivitas dapat menjadi peluang memperoleh “tunjangan kinerja khusus” diluar tunjangan kinerja yang telah ada. Kinerja Dinas tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi dari jumlah PAD yang dihasilkan dari program tersebut.

3.3.8 Pengembangan Pariwisata

3.3.8.1 Kalender Pariwisata

Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah yang dikenal dengan sebutan "Aceh Barat Berbudaya". Warisan budaya yang dilestarikan terdahulu saat ini sudah mulai hilang atau bahkan terlupakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah menggali kembali warisan-warisan budaya yang telah mulai hilang. Diantara warisan budaya tersebut yaitu situs bersejarah "Makam Teuku Umar" di Gampong Mugo Rayeuk Kecamatan Panton Reu. Situs ini merupakan situs yang menjadi objek wisata sejarah dalam mengenang pahlawan aceh yang gugur dalam melawan penjajah. Selain itu, Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu daerah yang terkena dampak langsung tsunami 26 desember 2024. Kejadian ini tentunya banyak meninggalkan luka mendalam bagi warga aceh dan dunia. Banyak dari mereka kehilangan keluarga, harta dan lain sebagainya. Untuk mengenang tragedi bencana alam tersebut, Pemerintahan Aceh menetapkan pada tanggal tersebut sebagai "Peringatan Tsunami Aceh" dan menjadi bagian dari wisata sejarah dan pendidikan. Terhadap dua diantara beberapa objek wisata di Aceh Barat, pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan dalam Kalender Pariwisata sebagai berikut

Tabel 3.20 Kalender Wisata Aceh Barat

No	Nama Wisata	Deskripsi Kegiatan	Jenis Wisata	Pelaksanaan
1	Peringatan Syahid Teuku Umar	Menelusuri jalur Tilas Jenazah pelarian Teuku Umar ketika dikejar Belanda di Kec. Johan Pahlawan – Kec. Panton Reu	Wisata Sejarah dan Pendidikan	10 Februari
		Upacara, Kenduri Rakyat, Doa Bersama, dan Jalan Kaki ke Lokasi Makam Teuku Umar di Gampong Mugo Rayeuk, Kec. Panton Reu	Wisata Sejarah dan Pendidikan	10-11 Februari
2	Festival Pameran Ekraf	Mengikuti Lomba Kuliner Makanan dan Minuman Khas Aceh Barat yang memiliki kreatifitas seni	Wisata Kreatif/Wisata Minat Khusus	15 Nopember
3	Peringatan Bencana Tsunami	Dzikir dan Doa Bersama, Ziarah Makam Massal dan Kenduri Rakyat M	Wisata Sejarah dan Pendidikan	26 Desember

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, 2025

3.3.8.2 Pengembangan Kawasan Wisata

Kabupaten Aceh Barat memiliki beragam potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti wisata alam, wisata sejarah maupun kulinernya. Potensi yang paling menonjol dan memiliki peluang cukup besar untuk dikembangkan adalah potensi wisata alam, diantaranya wisata alam Sikundo yang berada di Gampong Sikundo Kecamatan Pante Ceureumen, wisata alam Geunang Geudong yang berada di Gampong Putim Kecamatan Kaway XVI , wisata alam mangrove di Kecamatan Samatiga serta Pasie Jeut yang berada di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Lokasi tersebut secara umum tersebar di berbagai Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Untuk menempuh ke berbagai Lokasi potensi wisata tersebut, jalur akses yang cukup memadai telah tersedia disamping keberadaan kendaraan/travel yang dapat disewa untuk menuju ke Lokasi tersebut. Bagi pengunjung yang berasal dari luar wilayah Aceh, jalur akses ke Lokasi dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan udara yang Lokasi bandaranya berada di Kabupaten Aceh Besar dengan jarak tempuh + 250 km ke Aceh Barat ataupun di Bandara Cut Nyak Dhien Kabupaten Nagan Raya dengan jarak tempuh + 22 km dari Pusat Kota Meulaboh. Sedangkan melalui jalur laut, Aceh Barat telah memiliki Pelabuhan penyeberangan yang berada di Kecamatan Samatiga. Wisatawan yang telah berada di Aceh Barat selanjutnya dapat menggunakan jasa sewa kendaraan/travel untuk berkunjung ke berbagai lokasi potensi wisata yang dinginkan. Lokasi masing-masing wisata tersebut serta rute yang dapat ditempuh untuk menuju ke lokasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.30
Lokasi dan Rute Menuju ke Kawasan Wisata di Kabupaten Aceh Barat

a. Pengembangan Pariwisata Alam Sikundo

Kawasan wisata alam Sikundo dirancang bukan sekadar sebagai tempat rekreasi, tetapi sebagai model destinasi pariwisata berkelanjutan yang menyatukan keindahan alam dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam menyusun strategi pengembangannya, digunakan pendekatan holistik yang memandang sumber daya alam dan manusia sebagai

kekuatan utama. Sikundo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, flora, fauna serta sumber daya air. Dari aliran sungai yang memacu adrenalin hingga hutan yang menyimpan kekayaan hayati endemik, kawasan ini menyuguhkan pemandangan yang cukup memikat serta bersifat edukatif. Potensi pengembangan wisata Arung Jeram menjadi salah satu prioritas utama. Wisata tersebut dikembangkan dengan standar keselamatan yang tinggi untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung. Lokasi rencana pengembangan tersebut cukup strategis dengan luas Kawasan wisata yang dapat dikembangkan mencapai ± 98 hektar. Lokasi rencana wisata Sikundo dapat dilihat pada gambar berikut :

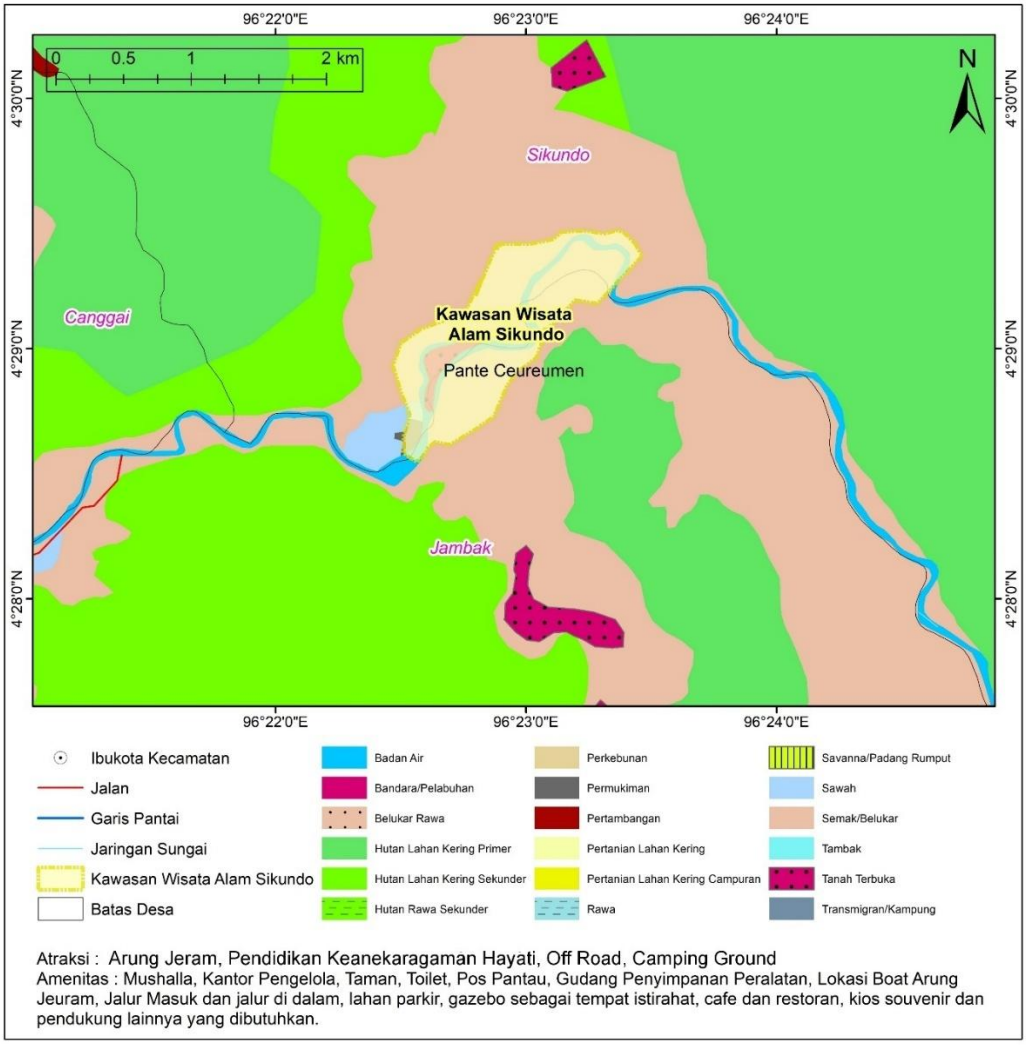

Gambar 3.31
Lokasi Rencana Wisata Alam Sikundo

Bagi yang ingin menyelami sisi lain dari alam Sikundo, wisata edukasi keanekaragaman hayati disiapkan sebagai sarana belajar sekaligus mengenal lebih dekat flora dan fauna khas kawasan ini, dengan pendampingan dari pemandu lokal yang telah terlatih. Sementara itu, bagi para petualang yang mencari sensasi lebih, jalur off-road dan area camping telah dirancang sedemikian rupa agar tetap ramah lingkungan dan aman.

Sedangkan untuk keluarga atau wisatawan yang menginginkan suasana tenang, tersedia rekreasi pasif seperti jalur jalan santai, gazebo, hingga taman bermain yang terintegrasi dengan panorama alam yang mempesona.

Namun, pengembangan wisata dengan keindahan alam saja tak cukup. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar penting dalam strategi ini. Masyarakat lokal diberi pelatihan formal mulai dari bahasa asing, peningkatan kapasitas pelayanan, hingga manajemen usaha kecil agar mampu mengambil peran dalam industri pariwisata yang terus tumbuh. Di sisi lain, pelatihan teknis seperti pemanduan, pengolahan makanan lokal, hingga pemasaran digital dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam mendukung semua ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memainkan peran strategis sebagai regulator dan fasilitator. Infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan listrik, dan sistem pengelolaan air bersih diperkuat agar kawasan ini semakin mudah diakses dan nyaman dikunjungi. Sementara itu, pembangunan fasilitas wisata seperti villa/penginapan yang ramah lingkungan, pusat informasi interaktif, dan layanan transportasi dirancang untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Yang tak kalah penting adalah peran koperasi gampong, yang menjadi penggerak utama pelaksanaan program berbasis masyarakat. Koperasi ini mengelola unit usaha unggulan seperti wisata arung Jeram, camping ground, *off-road*, wisata edukasi serta mengembangkan sektor pendukung seperti gerai kerajinan, restoran lokal, dan jasa katering. Penyediaan sarana atraksi dapat dilakukan melalui kolaborasi kedua pihak seperti perahu karet, tenda camping, serta sarana yang dibutuhkan lainnya. Dengan sistem manajemen yang profesional, koperasi menjembatani antara potensi lokal dan permintaan wisatawan. Atraksi, aksesibilitas dan amenitas wisata alam sikundod dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Wisata Alam Sikundo

No	Atraksi	Aksesibilitas	Amenitas
1	Arung Jeram / Susur Sungai	Jalan, Jembatan, Moda Transportasi, Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi serta Perbankan	*Entrance* yang difasilitasi bangunan pos jaga, Hamparan Rumput (*Lawn*), Jalur Pejalan Kaki (*Pedestrian Walk*), Hotel/Penginapan, Pusat Informasi Wisata, Restoran, Shelter, Gazebo, Kios Souvenir, Area Parkir Wisata, Tempat Ibadah, Toilet, Tempat Sampah
2	Pendidikan Keanekaragaman Hayati		
3	*Off Road*		
4	*Camping Ground*		
5	Rekreasi Pasif		

Keberhasilan pengembangan kawasan ini tentu tak lepas dari sinergi antar pihak. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berperan dalam kebijakan dan promosi, sementara masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengelolaan. Promosi dilakukan secara terpadu baik melalui digital marketing seperti media sosial dan platform daring, maupun promosi konvensional melalui pameran dan kerja sama dengan pelaku industri pariwisata. Dampaknya pun mulai terlihat. Lapangan kerja tumbuh, pendapatan

masyarakat meningkat, dan roda ekonomi lokal berputar lebih cepat. Bahkan, geliat UMKM mulai memperlihatkan bahwa pariwisata dapat menjadi pengungkit ekonomi yang merata dan inklusif.

Di tengah semua hal tersebut, kelestarian lingkungan dan budaya tetap menjadi prioritas utama. Daya dukung kawasan dijaga melalui pembatasan jumlah pengunjung, konservasi dilakukan secara partisipatif, dan budaya lokal dihidupkan melalui pertunjukan dan workshop. Dengan adanya pengembangan wisata tersebut, diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Rencana pengembangan Kawasan wisata Sikundo dapat dilihat pada gambar berikut :

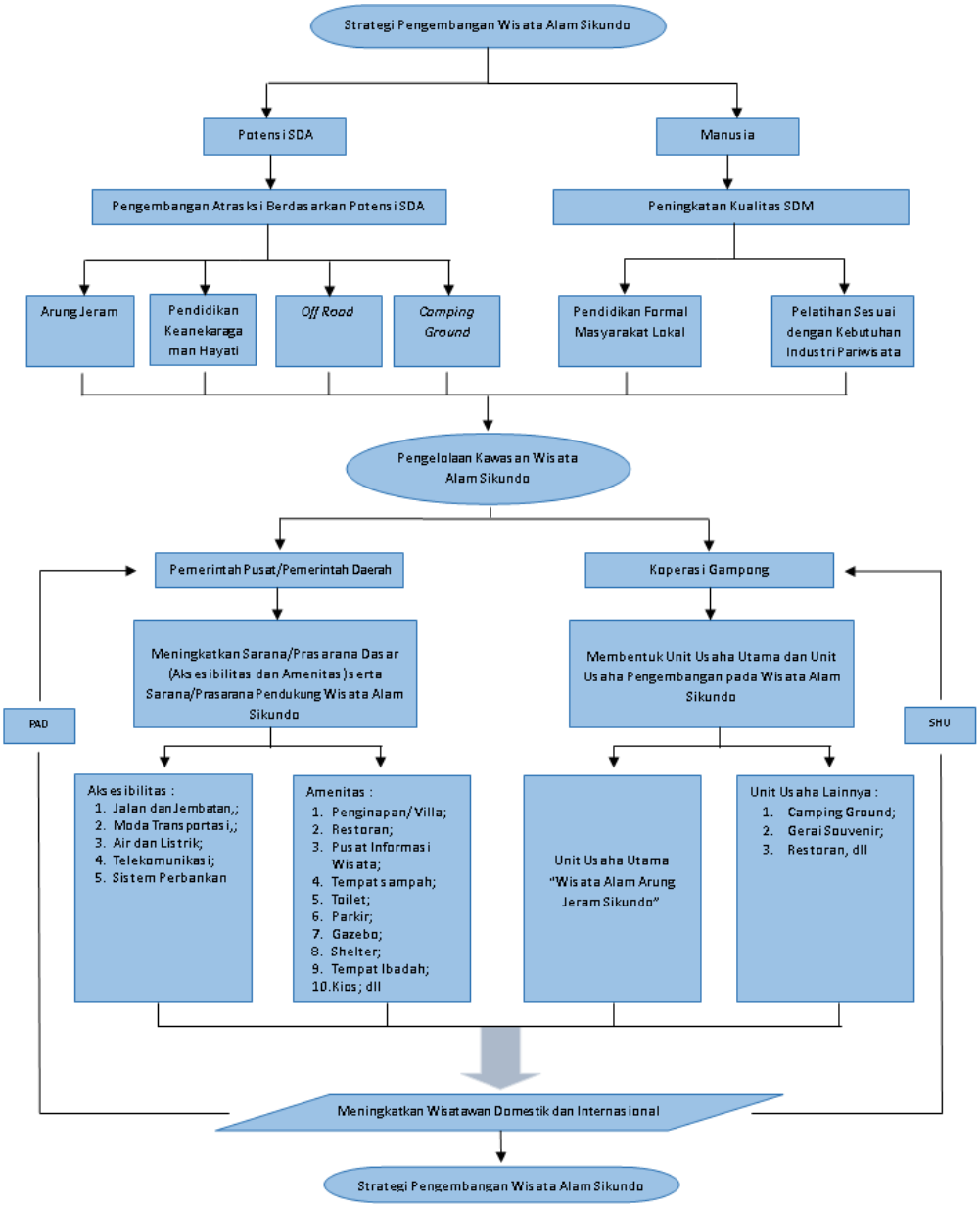

Gambar 3.32
Bagan Alir Pengembangan Wisata Alam Sikundo

b. Pengembangan Kawasan Wisata Geunong Geudong

Pengembangan kawasan wisata air Danau Geunang Geudong merupakan bagian dari upaya transformasi potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi yang dirancang menggabungkan pendekatan ekologi, ekonomi, sosial, dan edukatif, sehingga kawasan ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya, strategi ini bertumpu pada dua elemen utama, yaitu pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Keduanya saling melengkapi dan menjadi fondasi yang kokoh dalam pembangunan destinasi wisata berbasis masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan jangka Panjang. Kawasan wisata Geunang Geudong memiliki luas lahan mencapai 78 hektar. Lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

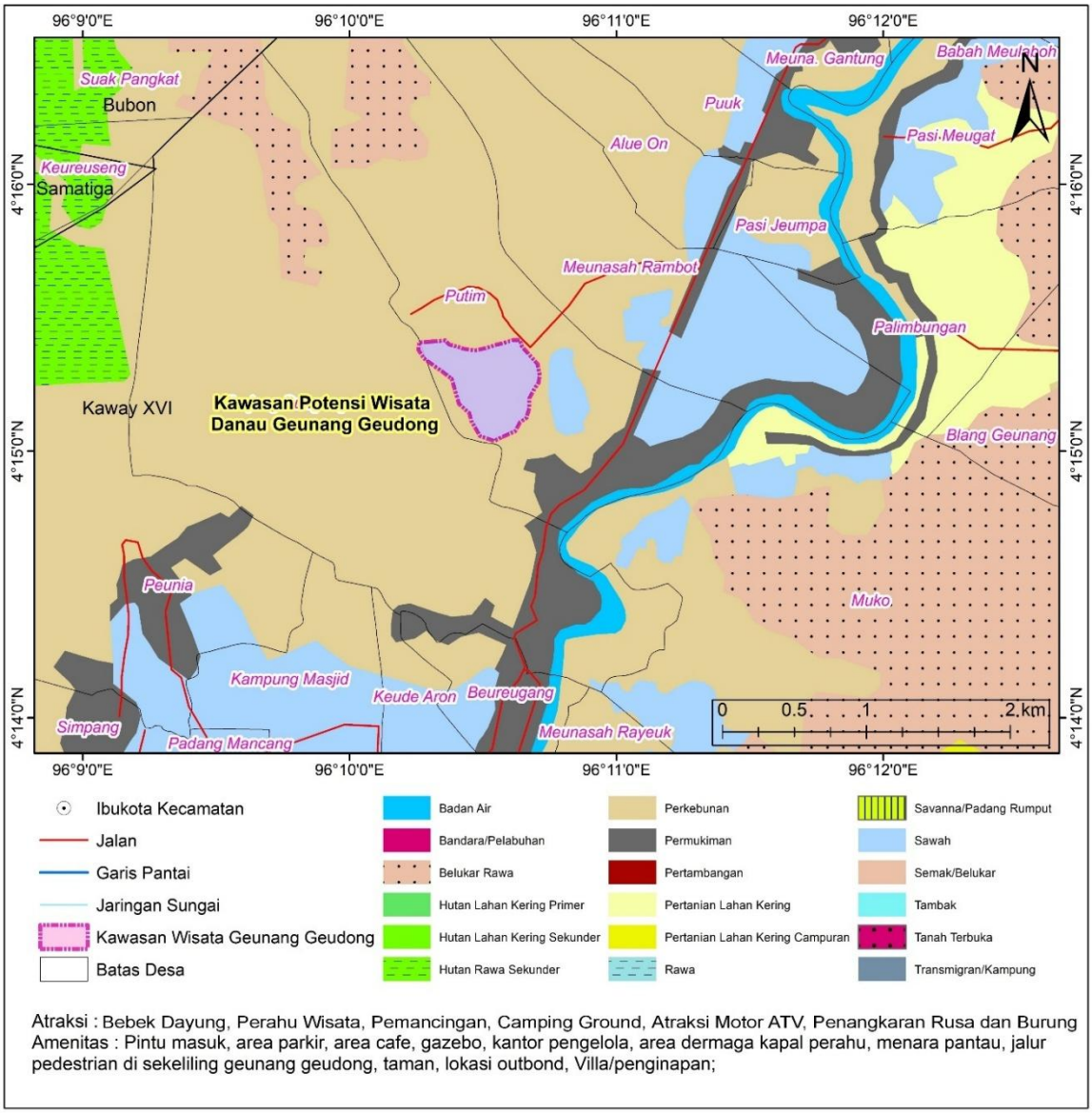

Gambar 3.33
Lokasi Wisata Alam Geunang Geudong

Danau Geunang Geudong dianugerahi kekayaan alam yang menakjubkan, air danau yang luas dan tenang, keindahan panorama sekitarnya, serta keragaman hayati di dalam dan di sekitar perairan. Dari potensi ini, berbagai bentuk atraksi wisata dirancang untuk menyesuaikan dengan minat wisatawan yang beragam. Di antaranya seperti atraksi bebek dayung dan perahu wisata, yang menawarkan pengalaman menyenangkan dan aman untuk keluarga serta anak-anak. Aktivitas ini tidak hanya menghadirkan keseruan, tetapi juga menjadi titik awal keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis air. Selain itu, perahu wisata menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan danau secara lebih santai sambil menyaksikan pemandangan alam dari tengah danau.

Bagi wisatawan yang ingin berinteraksi lebih lama dengan alam, disediakan pula area pemancingan, camping ground serta villa/penginapan yang dikelola secara profesional namun tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Area ini dirancang agar tetap harmonis dengan lingkungan sekitar dan menjadi tempat ideal untuk wisata berbasis pengalaman. Atraksi lain yang dapat dinikmati oleh wisatawan adalah atraksi Motor ATV yang menyusuri wilayah sekitar danau Geunang Geudong. Jalur tracking yang cukup menantang memberikan sensasi tersediri bagi pengunjung yang memanfaatkan fasilitas ini. Tak kalah penting adalah fasilitas rekreasi pasif, seperti taman santai, area piknik, dan jalur pejalan kaki yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana tenang dan kesejukan danau dengan nyaman. Kondisi alam yang masih asri memberikan potensi tersendiri untuk penangkaran Rusa maupun Burung di lokasi tersebut. Keberadaan Rusa dan Burung di penangkaran akan memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin melihat secara lebih dekat kedua jenis hewan yang biasanya hidup di alam liar tersebut.

Di samping penguatan aspek alam, strategi ini menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan pariwisata. Masyarakat lokal bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama yang terlibat langsung dalam setiap tahap pengembangan wisata. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama dalam upaya pengembangan ini. Langkah pertama adalah melalui pendidikan formal bagi masyarakat lokal, yang mencakup pelatihan dasar tentang industri pariwisata, pelajaran bahasa asing, pelayanan pelanggan, serta manajemen usaha kecil. Pelatihan ini bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat tentang peluang ekonomi dari sektor pariwisata dan pentingnya pelayanan yang berkualitas. Selain itu, dilakukan pula pelatihan teknis berbasis kebutuhan industri, seperti pelatihan pemandu wisata, keamanan wisata air, pengelolaan fasilitas, pengolahan makanan dan minuman lokal, hingga pelatihan kerajinan tangan dan digital marketing. Semua pelatihan ini tidak hanya menyiapkan masyarakat untuk bekerja di sektor pariwisata, tetapi juga mendorong munculnya pelaku usaha baru yang mandiri dan kreatif. Atraksi, aksesibilitas dan amenitas Wisata Geunang Geudong dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.22 Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Wisata Geunang Geudong

No	Atraksi	Aksesibilitas	Amenitas
1	Bebek Dayung	Jalan, Jembatan, Moda Transportasi, Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi serta Perbankan	*Entrance* yang difasilitasi bangunan pos jaga, Hamparan Rumput (*Lawn*), Tambatan Perahu, Hotel/Penginapan, Pusat Informasi Wisata, Restoran, Shelter, Gazebo, Kios Souvenir, Area Parkir Wisata, Tempat Ibadah, Toilet, Tempat Sampah
2	Perahu Wisata		
3	Pemancingan		
4	Atraksi Motor ATV		
5	*Camping Ground*		
6	Penangkaran Rusa dan Burung		

Untuk memastikan keberlanjutan program, pengelolaan kawasan wisata dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan Koperasi Gampong. Pemerintah daerah mengambil peran sebagai fasilitator pembangunan fisik dan kebijakan, sementara Koperasi Gampong menjadi pelaksana operasional dan pengelola usaha berbasis masyarakat. Pemerintah daerah bertugas untuk meningkatkan sarana dan prasarana dasar, seperti akses jalan dan jembatan, moda transportasi menuju kawasan wisata, pasokan air bersih dan listrik, sistem telekomunikasi, serta infrastruktur perbankan yang menunjang transaksi wisatawan. Di sisi lain, sarana pendukung wisata seperti hotel, restoran, pusat informasi wisata, toilet umum, gazebo, tempat parkir, dan kios UMKM juga dibangun secara bertahap agar mampu mengakomodasi berbagai segmen wisatawan.

Di tengah pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah, koperasi gampong memainkan peran sentral sebagai ujung tombak partisipasi masyarakat. Koperasi ini membentuk dua kelompok usaha utama. Pertama adalah unit usaha utama yang fokus pada pengelolaan langsung wisata air Danau Geunang Geudong, mulai dari operasional, pemasaran, hingga penyediaan layanan wisata. Kedua adalah unit usaha pendukung, yang meliputi pengelolaan camping ground, gerai souvenir, rumah makan, jasa pemandu, hingga produksi makanan lokal khas yang disukai wisatawan. Penyediaan sarana dan prasarana atraksi dapat dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Koperasi, seperti perahu wisata, bebek dayung, Motor ATV, serta sarana atraksi lainnya. Melalui sistem koperasi, keuntungan usaha tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi didistribusikan secara adil melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) yang kembali kepada masyarakat.

Dengan strategi yang matang dan pelibatan multi pihak, pengembangan wisata air Danau Geunang Geudong menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional. Kombinasi atraksi yang menarik, fasilitas yang nyaman, serta masyarakat yang ramah dan terlatih akan menjadikan Geunang Geudong sebagai destinasi unggulan yang tak hanya dikunjungi sekali, tetapi ingin kembali lagi. Pada akhirnya, tujuan besar dari strategi ini adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas lokal, dan menjaga kelestarian alam. Danau Geunang Geudong tidak hanya menjadi destinasi wisata, melainkan simbol kolaborasi dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pengembangan wisata air Geunang Geudong dapat dilihat pada gambar berikut :

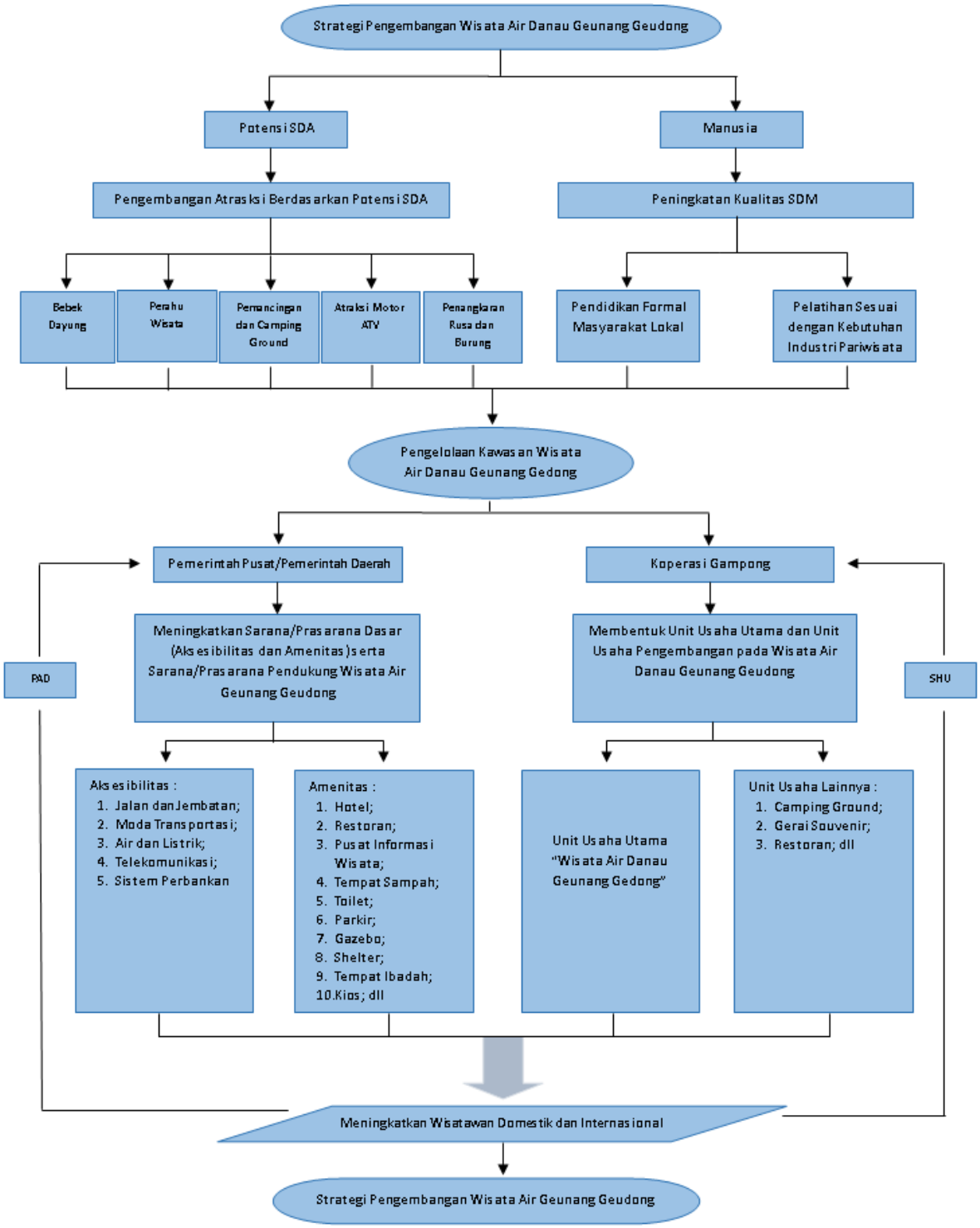

Gambar 3.34
Pengembangan kawasan wisata Geunang Geudong

c. Pengembangan Kawasan Wisata Mangrove di Kecamatan Samatiga

Aceh Barat memiliki kekayaan pesisir yang luar biasa, salah satunya adalah kawasan Hutan Mangrove di Kecamatan Samatiga. Kawasan ini bukan hanya penyangga ekosistem pesisir, tetapi juga menyimpan potensi luar biasa untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Melalui pendekatan yang terpadu dan holistik, strategi pengembangan kawasan ini disusun untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis yang berkelanjutan bagi masyarakat Gampong di sekitar lokasi ekowisata mangrove. Pengembangan Kawasan ekowisata mangrove dapat dilakukan pada lahan hutan mangrove seluas ± 353,37 hektar. Kawasan hutan mangrove tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

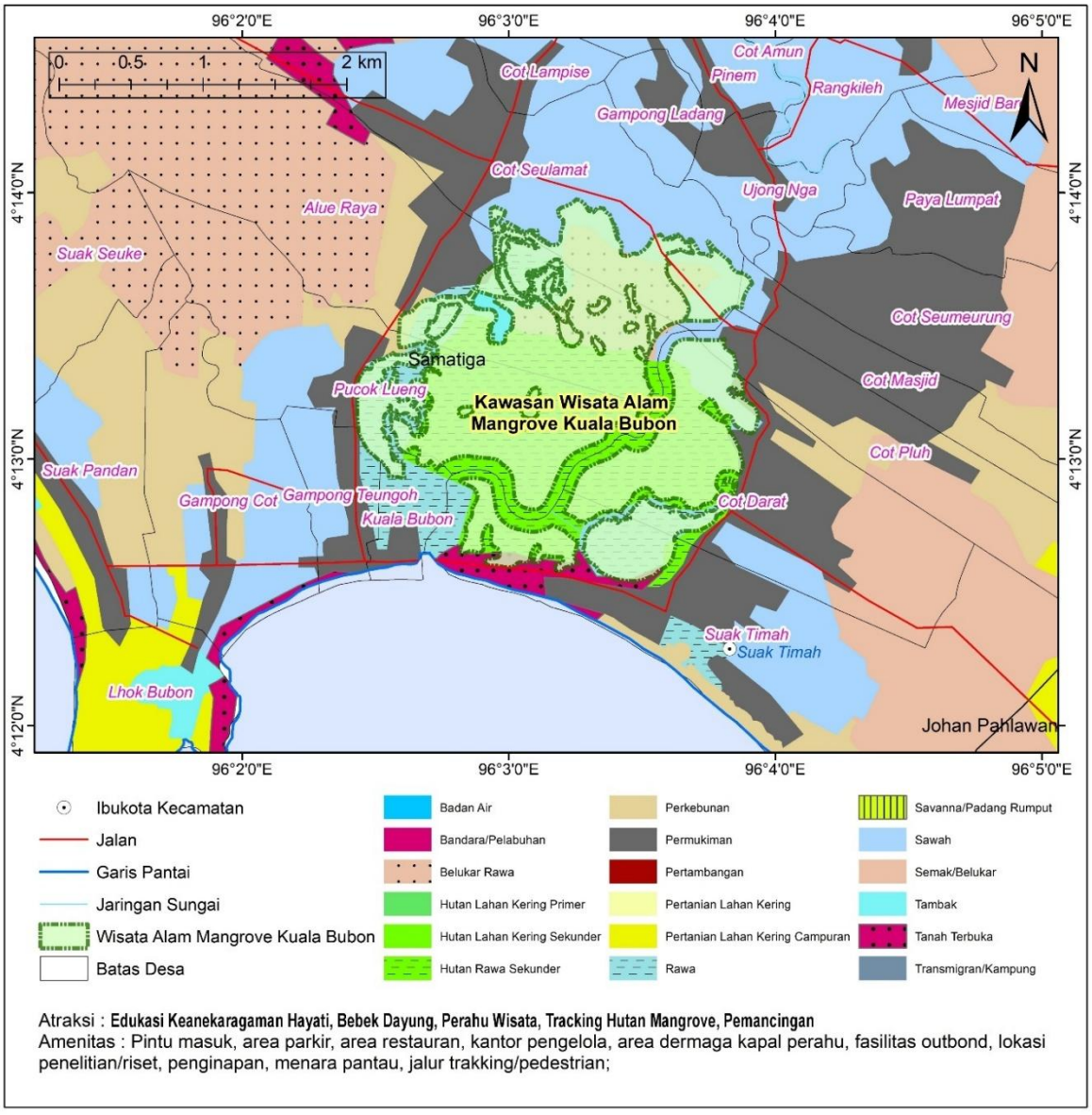

Gambar 3.35
Lokasi Rencana Pengembangan Ekowisata Mangrove Kuala Bubon

Kawasan Hutan Mangrove memiliki karakteristik ekologis yang khas, mulai dari vegetasi mangrove yang rapat dan rimbun, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi habitat bagi burung, ikan, dan biota lainnya. Inilah yang menjadi dasar dalam merancang sejumlah atraksi wisata alam yang edukatif dan menarik. Salah satu program unggulan adalah edukasi keanekaragaman hayati, yang mengajak wisatawan, pelajar, dan peneliti untuk mengenal lebih dekat flora dan fauna khas mangrove. Melalui pemandu lokal yang telah dilatih, wisatawan diajak memahami pentingnya hutan mangrove dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, kegiatan menikmati pemandangan matahari terbenam juga menjadi momen yang banyak diburu wisatawan. Keindahan langit senja menciptakan suasana indah dan menenangkan. Fasilitas titik pandang atau menara pandang disiapkan sebagai bagian dari pengalaman visual ini.

Kegiatan tracking hutan mangrove melalui jembatan kayu yang membelah kawasan hijau juga menjadi atraksi utama. Wisatawan bisa menikmati keheningan hutan sambil menjelajahi jalur yang aman dan menyenangkan. Untuk menambah variasi, tersedia pula wahana bebek dayung dan perahu wisata yang menyusuri kanal-kanal alami mangrove, memberi nuansa rekreasi ringan yang cocok untuk semua kalangan. Rencana pengembangan ekowisata mangrove berikut atrakasi, aksesibilitas dan amenitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23 Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Wisata Mangrove

No	Atraksi	Aksesibilitas	Amenitas
1	Edukasi Keanekaragaman Hayati	Jalan, Jembatan, Moda Transportasi, Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi serta Perbankan	*Entrance* yang difasilitasi bangunan pos jaga, Jalan Setapak Susur Hutan Mangrove, Menara Pandang, Tambatan Perahu, Hotel/Penginapan, Pusat Informasi Wisata, Restoran, Shelter, Gazebo, Kios Souvenir, Area Parkir Wisata, Tempat Ibadah, Toilet, Tempat Sampah
2	Perahu Wisata		
3	Tracking Hutan Mangrove		
4	Bebek Dayung		
5	Pemancingan		

Pengembangan ekowisata hutan mangrove tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, program peningkatan kualitas SDM lokal menjadi salah satu fokus utama strategi ini. Melalui pendidikan formal masyarakat lokal, masyarakat diberikan pemahaman tentang prinsip pariwisata berkelanjutan, pengelolaan layanan wisata, bahasa asing dasar, hingga keterampilan pelayanan. Proses edukasi ini melibatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, pelatih profesional, dan pelaku industri wisata. Seiring dengan itu, dilakukan pula pelatihan berbasis keterampilan praktis yang menyesuaikan dengan kebutuhan langsung di lapangan. Pelatihan meliputi menjadi pemandu wisata mangrove, pembuatan produk kreatif berbasis bahan lokal, pengelolaan jasa makanan dan minuman khas Aceh Barat, hingga strategi pemasaran digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pelatihan ini tidak

hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga membuka peluang usaha mandiri bagi masyarakat di sekitar ekowisata mangrove.

Untuk mendukung pengembangan kawasan secara menyeluruh, diperlukan kerja sama yang erat antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan koperasi gampong sebagai wadah partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan prasarana dasar yang menunjang aksesibilitas dan kenyamanan pengunjung. Ini termasuk pembangunan jalan dan jembatan menuju kawasan wisata, penyediaan air bersih, listrik, transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, serta sistem perbankan untuk transaksi digital. Di sisi lain, dibangun pula fasilitas penunjang wisata, seperti pusat informasi wisata, toilet umum, gazebo, shelter, tempat parkir, kios UMKM, serta jembatan tracking di dalam hutan mangrove. Seluruh infrastruktur ini dirancang agar tetap harmonis dengan lingkungan dan ramah terhadap pengunjung.

Sementara itu, koperasi Gampong di sekitar Lokasi Mangrove menjadi pelaksana utama operasional wisata melalui pembentukan unit usaha utama “Ekowisata Hutan Mangrove Kecamatan Samatiga”. Koperasi ini mengelola seluruh kegiatan wisata, mulai dari pengelolaan atraksi, penjualan tiket, pelayanan pengunjung, hingga evaluasi mutu layanan. Untuk memperkuat dampak ekonomi, koperasi juga mengembangkan unit usaha pendukung, seperti gerai souvenir, restoran lokal, dan jasa persewaan transportasi atau perlengkapan wisata. Melalui sistem Sisa Hasil Usaha (SHU), keuntungan dibagikan kembali kepada masyarakat, menciptakan sirkulasi ekonomi yang inklusif dan merata. Rencana pengelolaan ekowisata mangrove dapat dilihat bagan berikut :

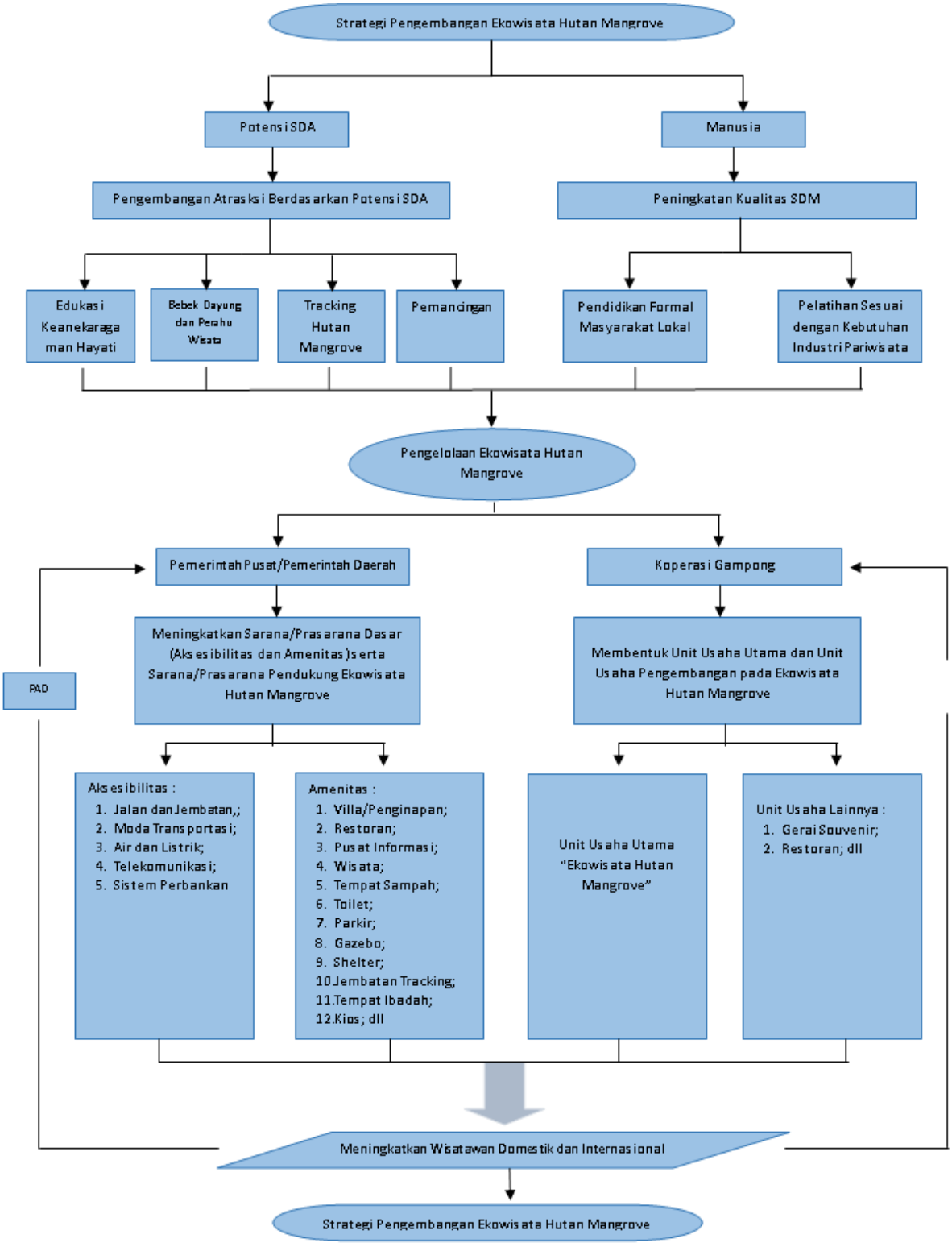

Gambar 3.36
Rencana Pengembangan Ekowisata Mangrove di Aceh Barat

Dengan strategi yang berbasis kolaborasi dan pemberdayaan, kawasan Hutan Mangrove diarahkan menjadi ikon ekowisata Aceh Barat yang mengedepankan nilai edukatif,

keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat. Wisatawan tidak hanya datang untuk rekreasi, tetapi juga untuk belajar, berinteraksi dengan warga lokal, dan menyaksikan langsung praktik konservasi berbasis komunitas. Kehadiran wisatawan domestik maupun internasional akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Gampong setempat, sekaligus memperkuat identitas budaya pesisir yang khas.

d. Pengembangan Wisata Pantai Lanaga Gp. Langung

Kabupaten Aceh Barat menyimpan potensi pariwisata bahari yang luar biasa. Salah satu nya adalah lokasi Pantai Lanaga di Gampong Langung, Kecamatan Meureubo. Pengembangan kawasan wisata ini dirancang secara sistematis melalui pendekatan dua arah yang saling menguatkan yaitu melalui optimalisasi sumber daya alam (SDA) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Strategi ini tidak hanya bertujuan menarik wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya masyarakat pesisir. Pantai Lanaga memiliki potensi pengembangan Kawasan wisata yang cukup luas mencapai ± 16 Hektar yang terdiri atas wilayah daratan dan perairan. Lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

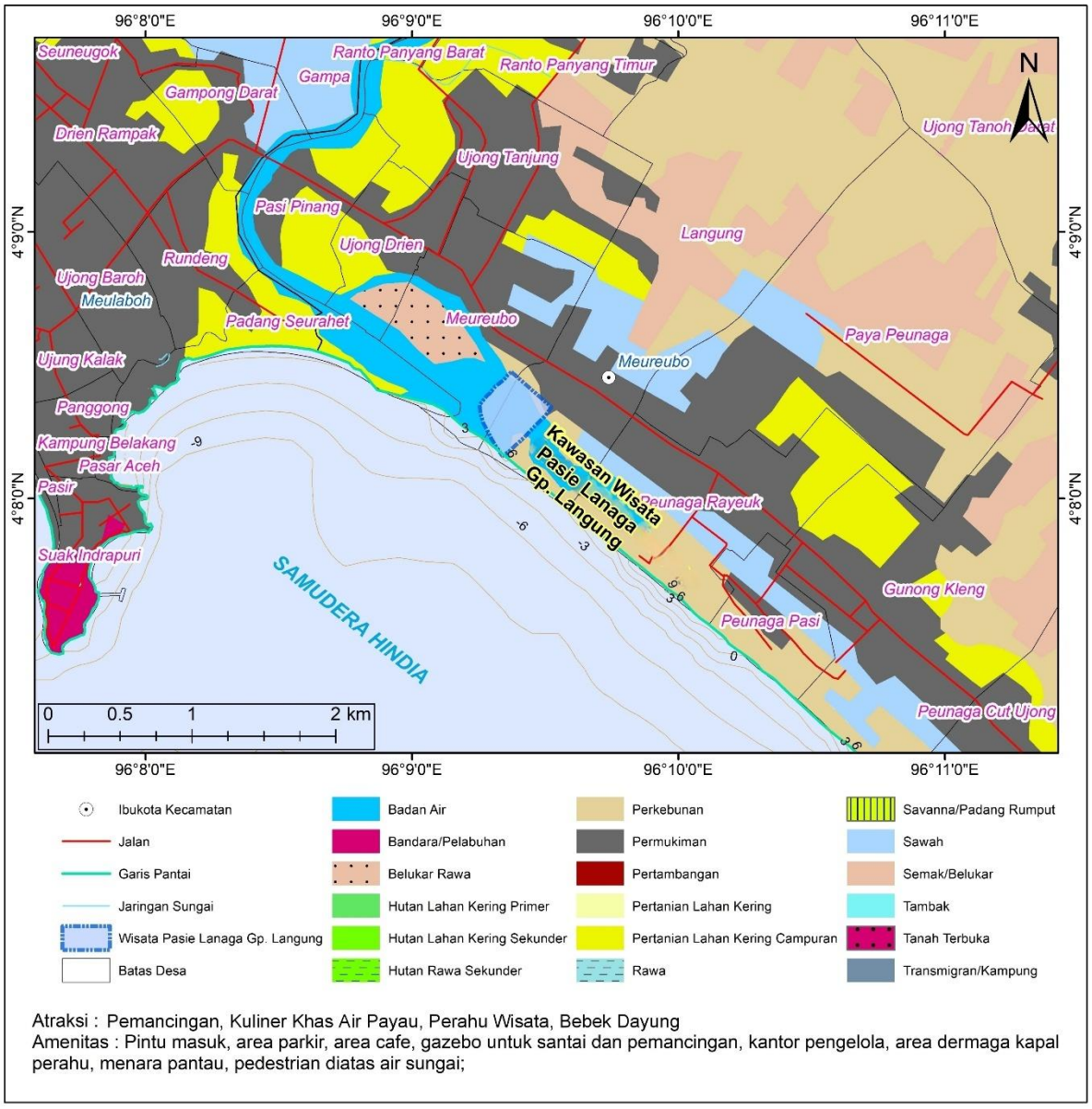

Gambar 3.37
Lokasi Rencana Pengembangan Wisata Pantai/Pasie Lanaga Gp. Langung

Lokasi Pantai Lanaga dianugerahi keunikan ekologis dan geografis yang sangat mendukung pengembangan wisata. Salah satu kegiatan yang diutamakan adalah pemancingan dan rekreasi pasif, yang menyasar wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang, santai, dan menyatu dengan alam. Di area perairan payau, pemancingan bukan sekadar hobi, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman budaya lokal yang dapat dibagikan kepada wisatawan.

Pengembangan kuliner pun tak luput dari perhatian. Kuliner khas air payau, seperti olahan ikan, udang, dan kerang hasil tangkapan lokal, menjadi daya tarik tersendiri yang khas. Pengunjung dapat mencicipi hidangan tradisional yang diolah langsung oleh warga,

menciptakan interaksi budaya yang autentik dan memperkuat identitas lokal. Selain itu, kawasan ini dikenal memiliki panorama matahari terbenam (sunset) yang indah. Fasilitas titik pandang dan gazebo di tepi pantai akan disiapkan untuk mendukung wisatawan menikmati pemandangan tersebut dengan nyaman. Untuk menambah variasi aktivitas, wahana bebek dayung dan perahu wisata juga dirancang di area air tenang untuk wisatawan keluarga dan anak-anak. Semua atraksi ini dirancang berbasis pada prinsip ramah lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem pantai.

Kunci keberhasilan pariwisata berkelanjutan di Pantai Lanaaga terletak pada kapasitas masyarakat lokal. Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan ini sangat menekankan pada pendidikan dan pelatihan masyarakat Gampong Langung agar siap menyambut wisatawan dengan pelayanan profesional. Langkah awalnya adalah melalui pendidikan formal masyarakat lokal, dengan kurikulum pendidikan mengenai pengelolaan pariwisata, keterampilan pelayanan, pengelolaan usaha kecil, hingga pengenalan bahasa asing. Edukasi ini membentuk mentalitas baru di masyarakat bahwa menjadi tuan rumah wisata berarti melestarikan sekaligus mengembangkan. Kemudian, dilakukan pula pelatihan berbasis kebutuhan industri pariwisata, seperti keterampilan pemandu wisata, pengelolaan kebersihan pantai, kuliner lokal, pengolahan produk kerajinan dari hasil laut, dan pemasaran digital untuk menarik pasar wisatawan yang lebih luas. Dengan demikian, warga tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pelaku utama dalam seluruh rantai nilai ekonomi wisata. Pengelolaan wisata tersebut dalam dilihat pada gambar berikut :

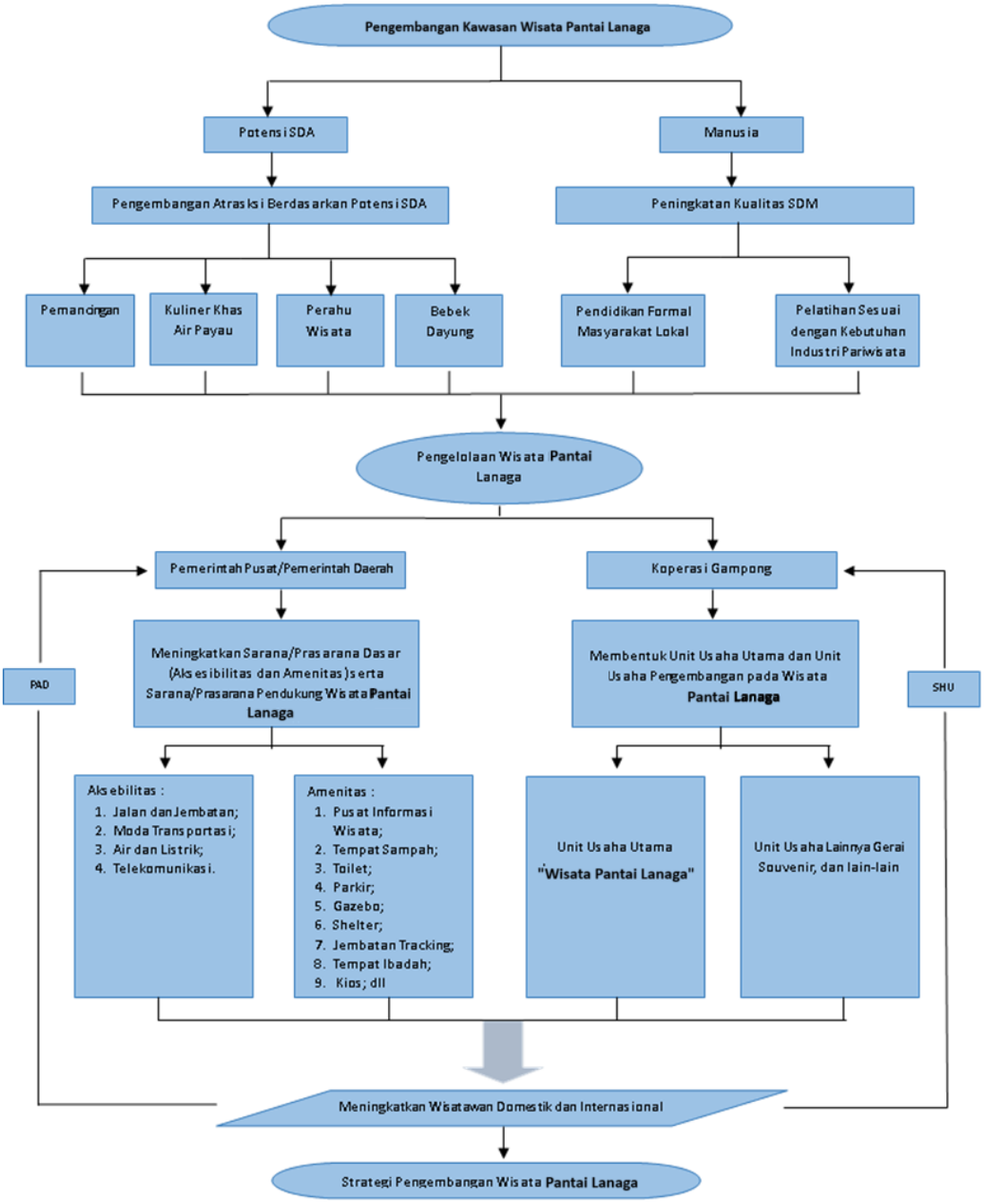

Gambar 3.38
Bagan Alir Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Lanaga Gp. Langung

Pengelolaan kawasan wisata Pantai Lanaga dirancang dengan sistem kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan koperasi gampong, agar pengembangan berjalan terpadu, efisien, dan partisipatif. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berperan dalam menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dasar, seperti pembangunan jalan dan jembatan menuju pantai, penyediaan listrik dan air bersih, sistem transportasi lokal, dan infrastruktur telekomunikasi. Sarana ini mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Di samping itu, dibangun pula sarana pendukung wisata seperti pusat

informasi, toilet umum, tempat parkir, gazebo, shelter, kios UMKM, serta fasilitas ibadah. Jembatan dan jalur tracking juga disiapkan untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan pantai secara menyeluruh. Koperasi Gampong Langung juga menjadi pelaksana lapangan yang mengelola langsung kegiatan ekonomi pariwisata serta bertanggung jawab atas operasional, tiket masuk, layanan wisatawan, hingga pemeliharaan kawasan. Berikut tabel atraksi, aksesibilitas dan amenitas wisata Pasie Lanaga:

Tabel 3.24 Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Wisata Pantai Lanaga

No	Atraksi	Aksesibilitas	Amenitas
1	Pemancingan	Jalan, Jembatan, Moda Transportasi, Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi serta Perbankan	*Entrance* yang difasilitasi bangunan pos jaga, Menara Pandang, Tambatan Perahu, Jembatan dan Jalur *Tracking,* Hotel/Penginapan, Pusat Informasi Wisata, Restoran, Shelter, Gazebo, Kios Souvenir, Area Parkir Wisata, Tempat Ibadah, Toilet, Tempat Sampah
2	Perahu Wisata		
3	Kuliner Khas Air Payau		
4	Pemancingan		
5	Bebek Dayung		

Untuk mendukung keberlanjutan dan memperluas dampak ekonomi, koperasi juga membentuk unit usaha seperti gerai souvenir, warung makan, jasa sewa alat rekreasi, dan lainnya. Dengan sistem Sisa Hasil Usaha (SHU), keuntungan ekonomi disalurkan kembali ke masyarakat, baik dalam bentuk pembagian keuntungan maupun peningkatan fasilitas umum. Tujuan dari pengembangan ini adalah menjadikan Pantai Lanaga sebagai destinasi unggulan di Aceh Barat yang menarik wisatawan. Dampak ekonomi akan terasa dari terbukanya lapangan kerja baru, berkembangnya UMKM, serta meningkatnya pendapatan masyarakat

3.3.9 Pembangunan Desa

Tujuan utama pembangunan nasional telah menjadi perhatian serius para pendiri bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Gagasan-gagasan visioner tersebut kemudian disusun dan berhasil dibukukan dengan baik oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada awal dekade 1970-an dalam dokumen yang berjudul *Pembangunan Semesta Berencana*. Dokumen ini hadir sebagai respons atas kegelisahan para tokoh bangsa, mengenai arah dan strategi konkret yang perlu ditempuh negara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.3.9.1 Pembangunan Nasional : Menemukan Titik Awal dari Desa

Pertanyaan berikutnya, harus darimana kita memulai untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional tersebut?. Dalam konteks Indonesia yang memiliki struktur kewilayahan yang luas dan beragam, jawaban paling relevan adalah desa. Desa menjadi unit pemerintahan terkecil yang sekaligus menjadi fondasi dari keseluruhan sistem

negara Indonesia. Disisi lain, sebanyak 89,8 persen bentuk dominan dari satuan wilayah pemerintahan di Indonesia adalah desa. Merujuk data resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, tercatat bahwa Indonesia secara administratif memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, 74.961 desa, dan 16.772 pulau (Kepmendagri, 2022). Namun, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 14, 15, 16, dan 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Barat Daya, serta pembentukan provinsi baru lainnya yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan (UU 2022), jumlah provinsi di Indonesia kini bertambah menjadi 38.

Desa tidak boleh dimaknai hanya sebagai wilayah administratif saja. Lebih dari itu, desa merepresentasikan wajah Indonesia yang sesungguhnya, tempat dimana kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat berlangsung secara nyata. Gambaran umum tentang desa sebagai tempat sederhana dan tenang seringkali menutupi kenyataan bahwa desa menyimpan dinamika yang kompleks. Nyatanya, di desa berlangsung interaksi antar warga, pengelolaan sumber daya lokal, dan tumbuhnya nilai-nilai lokal. Artinya, desa merupakan ruang hidup yang terus berkembang dan menjadi lokus utama aktivitas masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, posisi strategis desa menjadi sangat jelas. Desa tidak hanya menjadi bagian dari struktur pemerintahan, tetapi menjadi fondasi yang menopang keberhasilan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, mewujudkan tujuan pembangunan nasional harus dimulai dari pembangunan desa. Pembangunan di level desa bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan strategi utama yang bersifat konkret mewujudkan tujuan nasional menjadi tindakan nyata. Dengan memperkuat desa, artinya Indonesia sedang membangun dari titik yang paling dekat dengan masyarakat. Tanpa desa yang mandiri dan berdaya, cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia hanya akan menjadi slogan dan tidak memiliki pijakan struktural yang kokoh.

3.3.9.2 Wajah Desa Indonesia : antara Makro dan Kenyataan Mikro

Momentum kebangkitan desa sebagai aktor utama pembangunan nasional lahir ketika pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa ini tidak hanya menjadi kerangka hukum baru, tetapi juga membangkitkan semangat kolektif masyarakat desa untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan. Melalui konsep desa membangun dan membangun desa, negara memberikan pengakuan bahwa pembangunan yang utama harus tumbuh dari bawah, berasal pada kebutuhan riil masyarakat. Namun, satu dekade setelah UU Desa diimplementasikan, dengan dana desa sebagai instrumen afirmatif negara untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Justru terjadi sebaliknya, saat ini kondisi pedesaan menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Alih-alih menjadi pusat pergerakan ekonomi dan kesejahteraan baru,

desa justru memberi sinyal “lampu kuning” bahkan “lampu merah” bagi arah pembangunan nasional.

Peristiwa pandemi Covid-19, menjadi gejala awal yang membuka persoalan yang selama ini terbungkus dalam narasi optimistik tentang ketimpangan pembangunan desa. Peristiwa pandemi tidak hanya menganggu aspek kesehatan, tetapi juga mengungkap ketimpangan struktural yang telah lama mengakar di desa. Kajian yang dilakukan oleh Sjaf (2021) menyebut bahwa salah satu fenomena paling krusial yang muncul bahkan dirasakan hingga saat ini sebagai dampak ketimpangan struktural adalah ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan sosial di desa. Banyak rumah tangga miskin di desa justru tidak menerima bantuan sosial, sementara penerima bantuan datang dari kelompok rumah tangga yang tidak miskin. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan pada 2 Februari 2025, pun mengakui bahwa program perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos) sebesar 500 triliun, hanya setengahnya yang sampai ke pihak-pihak yang tepat (Susanti 2025). Hal ini bukan hanya sebagai kekeliruan administratif saja, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam kebijakan perlindungan sosial.

Temuan-temuan DDP lainnya mengungkap ketimpangan struktural, krisis sosial, dan keterasingan kultural yang dihadapi masyarakat desa secara nyata. Indikator-indikator utama pembangunan secara mikro seperti indeks rasio gini (ketimpangan), pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia menunjukkan kondisi yang jauh berbeda dengan data makro (Sjaf 2023). Data mikro ini didapatkan dari desa-desa yang telah dilakukan DDP di 10 provinsi, 21 kabupaten, dan 171 desa yang tersebar di berbagai pulau, di luar Pulau Maluku dan Papua.

Pertama, tingkat ketimpangan di desa jauh berbeda dengan data yang dimiliki oleh nasional melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil kajian DDP menunjukkan bahwa ketimpangan berada pada kategori sedang (antara 0,40 hingga 0,50). DDP mencatat bahwa rasio gini di Kalimantan sebesar 0,71, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 0,67, Sumatera sebesar 0,59, dan Jawa sebesar 0,53. Hanya Pulau Sulawesi yang memiliki angka di bawah 0,5 (kategori rendah) yaitu sebesar 0,48. Sementara angka nasional versi data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa angka ketimpangan makro Indonesia sebesar 0,381 (kategori rendah).

Kedua, pengangguran terbuka menjadi satu masalah krusial di desa dan menyentuh angka dua digit hampir di seluruh wilayah (di atas 10 persen). Hasil kajian DDP mencatat, angka pengangguran terbuka di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 22,31 persen, Sulawesi 19,88 persen, Sumatera 13,20 persen, dan Jawa 12,60 persen. Hanya Kalimantan yang beradai di bawah dua digit, yaitu sebesar 9,91 persen. Kondisi ini pun menjadi semakin nyata akhir-akhir ini, dengan maraknya PHK dan munculnya gap yang sangat besar antara

usia kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa krisis lapangan kerja di desa bersifat struktural, bukan sekedar dampak temporer dari pandemi.

Ketiga, terjadi perbedaan dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data DDP menunjukkan bahwa IPM pedesaan nasional berada pada angka 61,96 (kategori sedang) dengan rincian Pulau Sumatera menjadi wilayah dengan IPM tertinggi yaitu 68,25 dan Pulau Bali serta Nusa Tenggara dengan IPM terendah yaitu sebesar 58,88. Padahal, angka makro menunjukkan bahwa IPM nasional tahun 2022 sebesar 72,91 (kategori tinggi). Gap 10,95 poin ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi penanda bahwa kualitas hidup di pedesaan tertinggal jauh dari data nasional yang tersedia.

Lebih dalam lagi, tidak adanya konsolidasi kebijakan pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada sumber daya lokal. Padahal 73,14 persen bentuk tipologi desa Indonesia adalah pertanian dan 15,11 persen lainnya bertipologi pesisir. Potensi desa dibiarkan berjalan tanpa arah, sementara dana desa lebih banyak diarahkan pada proyek jangka pendek ketimbang membangun pondasi ekonomi yang berkelanjutan. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa desa tidak hanya menghadapi persoalan struktural, seperti ketimpangan dan gagalnya distribusi manfaat pembangunan, tetapi juga persoalan sosial seperti rendahnya akses terhadap layanan dasar. Desa pun menghadapi krisis kultural, ketika pembangunan tidak lagi berpijak pada nilai, pola hidup, dan ekonomi lokal masyarakat desa. Desa kehilangan kemampuannya untuk mengartikulasikan masa depannya sendiri, dan terjebak dalam model pembangunan yang berasal dari luar dirinya.

3.3.9.3 Tantangan Pembangunan Desa

Persoalan dalam pembangunan desa terus berulang jika sistem pendataan yang digunakan sebagai dasar perencanaan tidak segera dibenahi. Sejak tahun 2020, suara tentang pembenahan data telah disuarakan. Catatan perbaikan pertama terhadap instrumen basis perencanaan nasional seperti Potensi Desa (Podes) dan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) yang dalam praktiknya tidak cukup akurat menggambarkan realitas sosial-ekonomi warga desa. Sistem data tersebut hanya disusun oleh aparatur desa tanpa keterlibatan warga, sehingga menghasilkan data normatif yang tidak menggambarkan situasi sebenarnya.

Catatan perbaikan kedua terhadap Indeks Desa Membangun (IDM), yang ujung-ujungnya menjadi pendekatan yang cenderung administratif dan tidak mencerminkan realitas kehidupan warga secara utuh (Sjaf 2024). Catatan-catatan perbaikan yang tidak kunjung direspons oleh para pemangku kepentingan teruama di tingkat nasional semakin menegaskan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan, kerangka pembangunan saat ini

masih menempatkan desa sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang membangun dari kekuatan sosial-budaya dan ekonomi lokal (Sjaf 2025).

Kesalahan yang terus diulangi ini, membuat negara gagap dan tidak dapat membaca realitas sosial rakyat, yang membuat berbagai program tidak tepat sasaran. Data yang tidak diperbarui dan tidak partisipatif mengakibatkan banyak kelompok rentan justru tidak terdata, dan yang mampu terus menerima bantuan. Hal ini tidak hanya merugikan dari sisi efektivitas anggaran, tetapi juga melemahkan rasa keadilan sosial di tingkat komunitas. Maka, tantangan pembangunan desa saat ini maupun kedepan adalah membangun sistem data yang presisi dengan melibatkan partisipasi warga sebagai basis perencanaan pembangunan yang bersumber pada kebutuhan aktual warga desa.

3.3.9.4 Strategi Pembangunan Desa di Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu wilayah di Sumatera yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas. Letaknya yang berada di wilayah pesisir barat dengan tipologi pertanian, perkebunan, perikanan, serta memiliki latar sejarah konflik dan merupakan wilayah pemulihan pascakonflik. Strategi pembangunan desa di wilayah ini harus kontekstual dan berbasis pada data mikro yang mencerminkan kondisi aktual warga. Terlebih cakupan wilayah di kabupaten ini termasuk besar dan luas, yang secara administratif, memiliki 321 desa atau gampong dan tersebar di 12 kecamatan (BPS 2025). Hal yang menjadikan kekeliruan pembangunan desa yang terjadi tidak boleh diulang oleh Kabupaten Aceh Barat. Adapun strategi pembangunan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun dengan Data yang Presisi dan Partisipatif

   Ketersediaan data yang presisi menjadi prasyarat utama dalam proses pembangunan suatu wilayah. Hal ini sesuai dengan gagasan pembangunan semesta yang pernah dicetuskan oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas), yang menyimpan satu prinsip mendasar yaitu bahwa pembangunan harus menyeluruh (semesta), terencana, dan menempatkan manusia sebagai inti dari prosesnya. Dalam mewujudkan itu, lahir pendekatan *rural democratic*, sebuah kerangka pembangunan yang menempatkan warga desa bukan hanya objek sensus, penerima bantuan, atau pelaksana program dari pusat, tetapi aktor utama dalam perumusan gagasan, pelaksana sekaligus penerima manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan. Pendekatan ini diperjuangkan melalui Data Desa Presisi (DDP), yang menempatkan warga sebagai sumber dan subjek dari data itu sendiri. Data Desa Presisi merupakan pendekatan pengumpulan data dengan metode *Drone Partisipatory Mapping* (DPM) yang menggabungkan spasial, sensus, dan partisipatif untuk menghasilkan data yang aktual di desa (Sjaf et al. 2020). Hal ini karena pembaruan data desa harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih demokratis dan akuntabel, yang menempatkan warga sebagai subjek utama dan keluarga sebagai unit analisis. Tanpa reformasi sistem data yang

berpihak dan presisi, desa akan terus menjadi objek program, bukan aktor utama pembangunan

2. Penguatan Ekonomi Desa berbasis Agromaritim
   Dengan tipologi pertanian dan pesisir yang dominan di Kabupaten Aceh Barat, pembangunan ekonomi harus diarahkan pada pengolahan hasil pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, serta penguatan lembaga-lembaga ekonomi yang dimiliki oleh setiap desa atau gampong. Skema ini harus melibatkan para kelompok-kelompok rentan seperti pemuda desa dan perempuan, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama dalam pengembangan usaha lokal. Disisi lain, kondolidasi untuk membuat desain pembangunan ekonomi berbasis agromaritim perlu segera dirancang agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
3. Pendidikan Vokasi bagi Pemuda Desa
   Pada konteks pembangunan, tidak cukup hanya dengan penyediaan data presisi, tetapi juga perlu disiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengelola sumber daya yang tersedia di daerah. Dalam pandangan Sjaf (2022), menegaskan bahwa masa depan pembangunan desa berada di tangan generasi muda, khususnya bila mereka dipersiapkan dengan pendidikan vokasi yang kontekstual. Vokasi bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi tentang menghubungkan potensi lokal dengan transformasi ekonomi desa secara mandiri. Ia menyarankan agar vokasi diarahkan pada sektor-sektor unggulan desa, seperti pertanian, perikanan, pengolahan pangan lokal, dan ekowisata, sehingga pemuda tidak hanya bertahan di desa, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Aceh Barat, maka kebutuhan-kebutuhan vokasional dapat diselaraskan dengan potensi-potensi utama yang ada seperti pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Oleh karena itu, strategi membangun desa hari ini dan ke depan harus menempatkan data, partisipasi warga, dan pendidikan vokasi sebagai tiga poros utama transformasi. Ketiganya saling memperkuat: data presisi memetakan kebutuhan; partisipasi memperkuat legitimasi, dan pendidikan vokasi menyiapkan daya manusia desa yang berdaya saing.

3.3.10 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah yang berlaku serta merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah PAD suatu daerah mencerminkan tingkat kapasitas fiskal daerah tersebut melalui pengelolaan sumber daya lokal untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan public secara mandiri tanpa bergantung dari transfer dana Pemerintah Pusat. Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal perlu mengoptimalkan pengelolaan PAD agar dapat meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan. PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan

lain yang sah. PAD memiliki peranan penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang bersifat mandiri dan berkelanjutan sehingga pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pengelolaan PAD yang optimal memungkinkan daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat, meningkatkan pelayanan publik, mempercepatan pencapaian berbagai target Pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

PAD terdiri dari beberapa komponen utama yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk dilakukan pengelolaan antara lain:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun beberapa pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk dikelola seperti pajak hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya, hiburan, reklame, dan penerangan jalan, parker, air tanah, sarang burung walet, pasir dan kerikil, PBBP2, BPHTB, serta OPSEN PKB dan BBNKB.

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Beberapa retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk dilakukan pungutan antara lain seperti retribusi pelayanan Kesehatan di puskesmas, retribusi pelayanan persampahan, pelayanan parkir, retribusi los dan kios, izin mendirikan bangunan, dan layanan kesehatan. Pemerintah kabupaten berwenang mengatur jenis dan tarif retribusi serta memastikan pelayanan yang diberikan berkualitas agar dapat meningkatkan pendapatan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Komponen ini mencakup pendapatan dari pengelolaan aset daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi. Pemerintah kabupaten Aceh Barat mengelola dan mengawasi BUMD agar mampu menghasilkan pendapatan yang optimal.

d. Pendapatan Lain-lain yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan, yang terdiri atas hasil penjualan alat angkutan, jasa giro pada kas daerahm pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, pendapatan BLUD, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,

Meliputi pendapatan dari bunga bank, sewa aset milik daerah, denda administratif, serta pendapatan kerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengelola aset daerah secara optimal guna memaksimalkan sumber pendapatan ini.

Pengelolaan PAD perlu dilakukan secara optimal, sehingga dibutuhkan berbagai strategi dalam pelaksanaannya. Beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengoptimalkan PAD antara lain :

a. Membentuk Satuan Tugas Optimalisasi PAD

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD. Satgas tersebut bertugas untuk melakukan pemungutan pajak daerah bagi wajib pajak yang belum menyelesaikan pembayaran pajaknya/tertunggak. Upaya ini diharapkan akan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari pembayaran kewajiban pajak yang belum diselesaikan oleh wajib pajak.

b. Digitalisasi Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan mengoptimalkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara daring (online) untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi serta mencegah kebocoran penerimaan. Digitalisasi sistem pemungutan PAD diharapkan akan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak maupun retribusi daerah.

c. Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Secara Menyeluruh

Pemetaan potensi pajak dan retribusi dilakukan dengan melakukan pendataan objek dan subjek pajak secara komprehensif, terutama di sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan properti. Pemetaan akan menggambarkan keseluruhan potensi pajak dan retribusi daerah untuk dapat dikelola secara lebih optimal sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara signifikan.

d. Pemberdayaan dan Penguatan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD)

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan mendorong BUMD agar lebih produktif, profesional, dan fokus pada sektor yang memiliki potensi tinggi di daerah seperti pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan, baik di hulu maupun hilir.

e. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Daerah

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan pemafaataan aset yang dimiliki. Aset milik pemerintah daerah seperti tanah, gedung, dan fasilitas umum dapat dimanfaatkan secara komersial melalui kerja sama dengan swasta atau sistem sewa yang sah. Pengoptimalan pemanfaatan aset daerah diharapkan akan mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah untuk tumbuh lebih tinggi.

f. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi wisata alam serta wisata lainnya yang dapat dikembangkan. Pengelolaan daerah pariwisata serta ekonomi kreatif secara optimal akan mendorong meningkatkan minat Masyarakat untuk hadir dan berwisata pada daerah yang dikelola dengan baik. Pendapatan Asli Daerah akan didapatkan melalui retribusi masuk, pengelolaan parkir, dan penarikan pajak dari aktivitas ekonomi di sekitar objek wisata.

g. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah

Untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD, perlu ditingkatkan SDM yang mengelolanya. Peningkatkan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan, pengawasan internal, dan reformasi birokrasi agar pengelolaan PAD dilakukan secara profesional dan akuntabel.

h. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Kesadaran dan kepatuhan Masyarakat untuk membayar pajak dan serta retribusi daerah merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memiliki tanggung jawab dan peran serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3.3.11 Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Dalam upaya membangun Kabupaten Aceh Barat yang lebih inklusif dan berdaya saing, tidak semua pembangunan bersandar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) atau dukungan dari APBN. Ada sumber lain yang tak kalah penting yaitu melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Sumber dana tersebut berasal dari Perusahaan yang penguasaan dana serta pengelolaannya dilakasanakan secara utuh oleh pihak Perusahaan. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Aceh Barat, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Aceh Barat, serta Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Aceh Barat menjadi landasan utama pelaksanaan program ini di Kabupaten Aceh Barat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bukan hanya sekadar bantuan sosial, tetapi upaya sistematis untuk menyelaraskan kontribusi perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan keagamaan, hingga infrastruktur.

Program TJSLP tersebut dijalankan secara mandiri oleh perusahaan, tanpa intervensi anggaran Pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pengarah, bukan sebagai pengelola dana. Inilah bentuk kolaborasi yang mengedepankan sinergi program dan koordinasi yang efisien, dengan harapan agar hasilnya akan terasa lebih nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan program ini dilandasi oleh 7 asas antara lain :

a. Asas kemanfaatan
   Pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan harus dapat memberikan manfaat/kegunaan bagi masyarakat;
b. Asas keterbukaan
   Pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan dilakukan secara terang-terangan/tidak tertutup;
c. Asas Akuntabilitas
   Pelaksanaan TJSLP dilakukan secara terukur dan tercatat;
d. Asas Kepastian Hukum
   Pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan didasarkan pada ketentuan/ketetapan hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara;
e. Asas Keadilan
   Pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan diberikan kepada seluruh anggota Masyarakat tanpa kecuali;
f. Asas Partisipatif
   Pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan peran serta aktif Masyarakat;
g. Asas Proporsionalitas
   Pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan dilakukan berdasarkan program yang tersusun rapi.

Program-program yang dapat dijalankan melalui sumber dana TJSLP sangat beragam, dari pemberdayaan ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial bagi pekerja rentan, hingga pelestarian lingkungan, dukungan pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan UMKM, pembangunan sarana ibadah, hingga revitalisasi infrastruktur di wilayah Gampong dan perkotaan. Selama beberapa tahun terakhir, pelaksanaan pembangunan melalui sumber dana TJSLP di Kabupaten Aceh Barat telah berjalan cukup baik, walaupun belum optimal. Berbagai program tersebut telah mendukung kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah seperti pemberantasan kemiskinan, stunting dan inflasi. Dalam upaya pemberantasan kemiskinan, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pemberian bantuan modal usaha untuk peningkatan perekonomian ke masyarakat melalui program CSR Makin Mesra (CSR untuk Masyarakat Miskin Menuju Sejahtera) antara lain bantuan pengembangan ayam kampung petelur, pengembangan ternak kambing, bantuan pengembangan usaha UMKM Kios, pengembangan komoditas padi, serta adanya alokasi anggaran untuk perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mencegah bertambahnya juga masyarakat miskin akibat

terjadinya kecelakaan kerja. Untuk penanggulangan stunting, Perusahaan telah memberikan bantuan Pemberian Makanan Tambahan ke balita yang terindikasi mengalami stunting, selain itu juga dilakukan penguatan kapasitas posyandu. Untuk menjaga inflasi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat, pelaksanaan pasar murah yang difokuskan pada masing-masing wilayah operasional perusahaan juga telah dilakukan melalui sumber dana TJSLP. Berbagai program lain juga telah dilakukan pada sektor pendidikan dan pelatihan seperti pemberian bantuan beasiswa, sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan kewirausahaan, serta berbagai program lainnya. Begitu juga berbagai program lainnya yang diharapkan mampu mendukung capaian kinerja pemerintah Daerah. Realiasi anggaran TJSLP di Kabupaten Aceh Barat selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

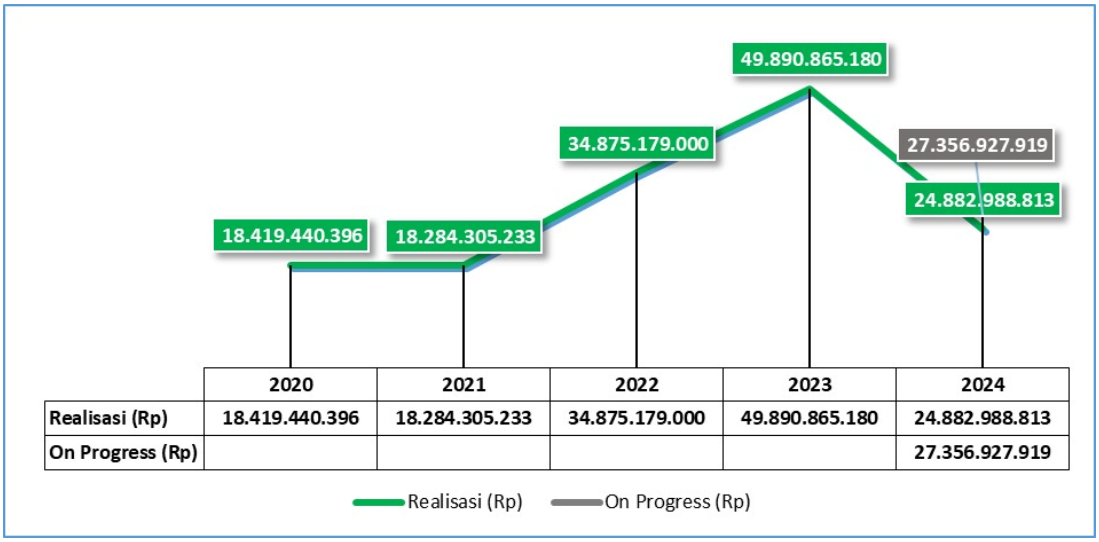

Gambar 3.39
Realisasi Anggaran Pelaksanaan TJSLP 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan nilai realisasi serta target anggaran rencana kerja TJSLP pada tahun 2025, selanjutnya proyeksi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan terhadap jumlah produksi dan pendapatan perusahaan yang diasumsikan akan mengalami kenaikan sebesar 2,5% setiap tahunnya akibat pengaruh inflasi. Proyeksi anggaran TSJLP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25 Proyeksi Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2030

No.	Perusahaan	Proyeksi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Rp)					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	PT. Mifa Bersaudara	47.590.782.228	48.780.551.784	50.000.065.578	51.250.067.218	52.531.318.898	53.844.601.871
2.	PT. Karya Tanah Subur	599.176.000	614.155.400	629.509.285	645.247.017	661.378.193	677.912.647
3.	PT. Pertamina Patra Niaga	100.000.000	102.500.000	105.062.500	107.689.063	110.381.289	113.140.821

No.	Perusahaan	Proyeksi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Rp)					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	Terminal Fuel BBM Meulaboh						
4.	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh	112.998.777	115.823.746	118.719.340	121.687.324	124.729.507	127.847.744
5.	PT. Agrabudi Jasa Bersama	750.000.000	768.750.000	787.968.750	807.667.969	827.859.668	848.556.160
6.	PT. Agro Sinergi Nusantara	175.000.000	179.375.000	183.859.375	188.455.859	193.167.256	197.996.437
7.	PT. Prima Agro Aceh Lestari	110.000.000	112.750.000	115.568.750	118.457.969	121.419.418	124.454.903
8.	PT. PLN (Persero) Area Meulaboh	15.000.000	15.375.000	15.759.375	16.153.359	16.557.193	16.971.123
9.	PT. Indonesia Pacific Energy	470.000.000	481.750.000	493.793.750	506.138.594	518.792.059	531.761.860
10.	PT. Nirmala Coal Nusantara	62.080.000	63.632.000	65.222.800	66.853.370	68.524.704	70.237.822
11.	PT. Bank Syariah Indonesia Area Meulaboh	500.000.000	512.500.000	525.312.500	538.445.313	551.906.445	565.704.106
Total		**50.485.037.005**	**51.747.162.930**	**53.040.842.003**	**54.366.863.053**	**55.726.034.630**	**57.119.185.496**

Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025

Besarnya potensi anggaran tersebut tentunya membutuhkan strategi pengelolaan yang tepat agar pelaksanaan TJSLP dapat terlaksana secara optimal selama 5 tahun ke depan. Beberapa strategi optimalisasi pengelolaan TJSLP yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Pembentuan Badan/Lembaga Independen Pengelolaan CSR;

Badan/Lembaga Independen Pengelola CSR dibentuk untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan CSR. Legalitas Badan tersebut dibentuk melalui Qanun Aceh Barat serta Peraturan Bupati Aceh Barat yang

mengatur hak, fungsi, kewajiban atau tanggung jawab serta struktur organisasi dan sumber pendanaan lembaga tersebut. Lembaga tersebut secara umum akan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana TJSLP Perusahaan dengan berbagai strategi, diantaranya seperti pengumpulan dana TJSLP perusahaan untuk dikelola dan dilaksanakan oleh lembaga tersebut atau pelaksanaan dana TSLP yang tetap dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan dibawah koordinasi Badan tersebut.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan;

Perencanaan TJSLP dilakukan dengan melibatkan masyarakat, baik yang dilaksanakan pada tahapan Musrenbang maupun pada saat pembahasan Rencana Kerja TJSLP. Keterlibatan masyarakat diharapkan akan mampu memberikan informasi dan masukan kegiatan yang dibutuhkan agar berbagai program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

3. Pemanfaatan TJSLP melalui Skema Dana Bergulir

TJSLP dapat ditransformasikan dari bantuan jangka pendek menjadi investasi sosial jangka panjang. Dana TJSLP dapat diberikan kepada koperasi maupun BUMG sebagai pinjaman mikro tanpa bunga. Pinjaman tersebut akan dikelola dengan bijak oleh perusahaan maupun lembaga independen pengelola CSR nantinya tanpa mengurangi kewajiban TJSLP perusahaan setiap tahunnya. Pertanggung jawaban pengelolaan dana tersebut dilakukan secara terpisah agar akuntabilitasnya tetap terjaga. BUMG dan Koperasi yang mendapatkan pinjaman memiliki kewajiban melakukan pengembalian agar dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya dalam jangka panjang. Harapannya, melalui skema tersebut akan meningkatkan profesionalitas penerima manfaat program TJSLP dalam pengelolaan usahanya agar berkelanjutan;

4. Pelaksanaan TJSLP dilaksanakan secara Holistik

Pelaksanaan TJSLP terutama pada sektor perekonomian tidak hanya dilakukan secara parsial dengan pemberian peralatan atau pelatihan, akan tetapi dilaksanakan secara holistik dari hulu ke hilir. Pembinaan dari hulu ke hilir dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan multipihak seperti Perangkat Daerah teknis yang terkait. Perusahaan bersama perangkat daerah terkait melakukan pembinaan secara menyeluruh sejak dari hulu seperti pemberian bantuan modal usaha, penguatan kapasitas pelaku usaha, manajemen pengelolaan usaha hingga pemasaran produk menjadi bagian yang dilaksanakan. Upaya ini diharapkan akan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan secara signifikan terhadap penerima manfaat;

5. Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan Capaian Outcome

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan dengan melihat realisasi fisik dilapangan, akan tetapi juga outcome yang didapatkan dari pelaksanaan program untuk melihat perubahan sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga akan melibatkan berbagai pihak terkait agar hasil kualitas pelaksanaannya semakin meningkat seperti inspektorat, perangkat daerah terkait, serta masyarakat/perangkat Pemerintah Gampong yang berada di lokasi pelaksanaan kegiatan.

6. Pemberian Insentif dan Disinsentif bagi Perusahaan

Pemberina insentif dan Disinsentif perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan TJSLP oleh masing-masing perusahaan. Pemberian insentif dapat dilakukan bagi perusahaan yang berkinerja baik seperti Penghargaan CSR (CSR Award), promosi perusahaan di media resmi Pemerintah Daerah maupun percepatan rekomendasi perizinan. Sedangkan Disinsentif juga dapat dilakukan bagi perusahaan yang berkinerja buruk seperti teguran lisan, teguran tertulis, serta penginformasian kinerja yang tidak baik dari perusahaan di Media resmi Pemerintah Daerah.

3.3.12 ZIS untuk Mengakselerasi Pembangunan

3.3.12.1 Pengertian ZIS

ZIS merupakan singkatan dari **Zakat** yaitu Kewajiban bagi Muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang berhak, sesuai syariat, **Infak**: Pengeluaran harta di jalan Allah, tidak wajib, tapi sangat dianjurkan, tanpa batas jumlah dan waktu tertentu, dan **Sedekah**: Pemberian sukarela untuk kebaikan, lebih luas dari infak, bahkan bisa dalam bentuk non-materi seperti senyum atau bantuan tenaga. Berdasarkan UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa "**Zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan agama, dan diberikan kepada yang berhak menerimanya." Secara detail terdapat perbedaan antara zakat, infak dan sedekah yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.26 Tabel Penjelasan lebih lanjut Terkait ZIS

Aspek	Zakat	Infak	Sedekah
Status hukum	Wajib	Sunah	Sunah
Jumlah & waktu	Ada ketentuan (2.5%, haul, nishab)	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
Penerima	Harus 8 asnaf zakat	Siapa saja	Siapa saja
Pengelola	Lembaga resmi (BAZNAS/LAZ)	Bebas	Bebas

3.3.12.2 Potensi ZIS

Adapun potensi ZIS di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan tingginya jumlah umat Islam di Aceh Barat 99% dari 205.108 jiwa, dengan angkatan kerja pada tahun 2023 yaitu 86.228 jiwa yang berpotensi menjadi muzakki (pembayar zakat). Berdasarkan data Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat bahwa penerimaan ZIS di Kabupaten Aceh Barat rata-rata Rp 10 Milyar per tahun. Dana ZIS disalurkan agar para mustahik (penerima zakat) mendapatkan kemudahan dalam akses beribadah, kemudahan akses kesehatan dan pangan. membangun sarana pendidikan, menyediakan fasilitas, pemeliharaan keluarga mustahik baik dari sisi rohani maupun jasmani.

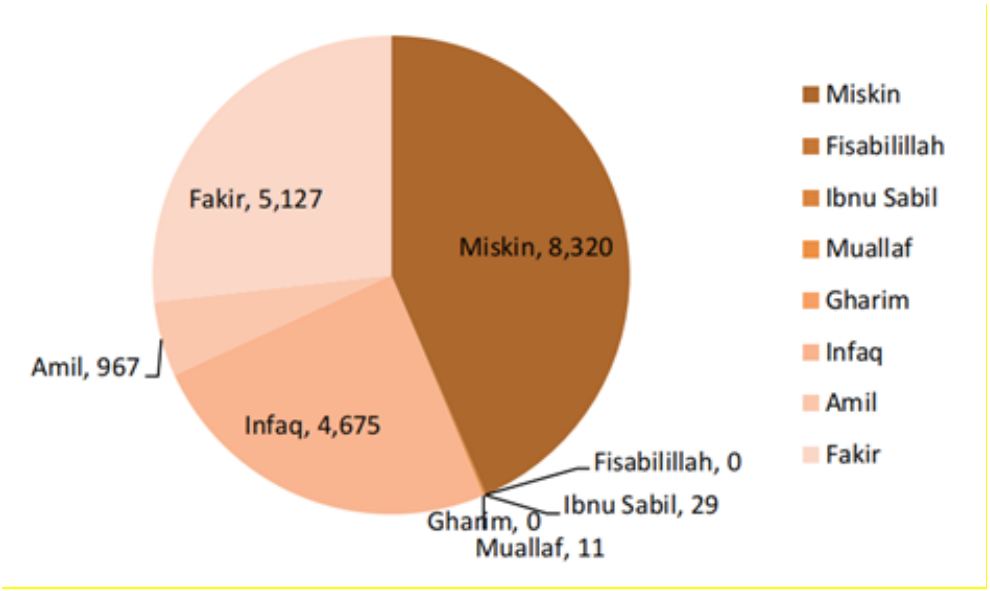

Sumber : BPS Aceh Barat, 2025

Gambar 3.40
Realisasi Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah dan Penerima pada Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

Masih berdasarkan data Baitul Mal realisasi penyaluran dan penerima Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024, penyaluran paling besar pada masyarakat miskin sebanyak 8,320 penerima dan tidak ada penyaluran kepada kelompok Gharim dan Fisabillillah..

3.3.12.3 Upaya Peningkatan ZIS

Pengumpulan ZIS kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat baik secara langsung dengan layanan via Transfer maupun layanan Jemput Zakat. Realisasi penghimpunan ini sebagian besar berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun sebagian masyarakat yang bukan ASN ternyata masih menyalurkan zakat melalui tokoh-tokoh agama ataupun secara langsung kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat (mustahik).

Pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh telah dengan adanya legalitas hukum, yang diatur secara khusus oleh Keputusan Gubernur No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Struktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan juga diperkuat oleh Qanun No. 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan Qanun No. 10 Tahun 2018. Suatu kekhususan di Aceh ialah memberlakukan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai PAD, zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Beberapa tantangan dalam pemanfaatan ZIS di daerah seperti kurangnya integrasi antara pengelolaan ZIS dengan kebijakan pembangunan daerah, belum optimalnya literasi masyarakat mengenai manfaat ZIS untuk pembangunan daerah, minimnya pemanfaatan ZIS secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Baitul MAL, dan sektor swasta dalam pengelolaan ZIS untuk pembangunan.

Oleh sebab itu, perlu adanya upaya peningkatan ZIS oleh pemerintah daerah melalui digitalisasi, Sumber Daya Manusia, regulasi pengelolaan ZIS, kolaborasi dengan berbagai usur dan juga pemberian edukasi bagi masyararakat melalui penjelasan berikut :

1. **Digitalisasi**

   Upaya peningkatan ZIS melalui digitalisasi ini menjadi dorongan untuk dilakukan di era modern saat ini. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi , menuntut penyediaan layanan dengan mudah dan cepat. Oleh sebab itu, pengembangan teknologi informasi ini bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan ZIS pemerintah daerah Aceh Barat kepada masyarakat. Pengembangan ini dilakukan dengan adanya aplikasi penghimpunan zakat digital via mobile, QRIS maupun bentuk *e-payment* lainnya yang telah terintegrasi dan dikelola langsung oleh Baitul Mal Aceh Barat, terdapat basis data mustahik yang terintegrasi dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Selain itu pemerintah daerah juga perlu mengembangkan pengelolaan digital dengan adanya dashboard monitoring dan pelaporan yang secara *real-time* serta dapat diakses publik.

   Transformasi ZIS online dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk terus mengembangkan teknologi dalam pengelolaan zakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Digitalisasi dan transparansi adalah dua aspek penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi operasional, serta jangkauan layanan ZIS oleh lembaga pengelola seperti BAZNAS daerah atau LAZ. Keduanya saling melengkapi: digitalisasi mempermudah proses, transparansi meningkatkan akuntabilitas. Digitalisasi mencakup pemanfaatan teknologi untuk penghimpunan, pendistribusian, pelaporan, dan monitoring dana ZIS. Berikut ini elemen-elemen utamanya:

   1) **Sistem Penghimpunan ZIS Digital :** Sistem pemanfaatan ZIS digital melalui Layanan pembayaran online: QRIS, mobile banking, e-wallet, virtual account maupun Platform donasi online. Sistem penghimpunan juga dapat dilakukan melalui system Payroll untuk ASN daerah yang secara otomatis dipotong dari gaji ASN setiap bulannya.
   2) **Dashboard Manajemen ZIS :** Sistem informasi yang menampilkan real-time data: jumlah zakat terkumpul, jumlah mustahik, jenis program, penyaluran.

3) **Integrasi Data Mustahik dan Muzakki :** Integrasi ini dilakukan dengan sinkronisasi dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), Penggunaan sistem verifikasi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan pemantauan perkembangan mustahik: dari penerima bantuan menjadi mandiri atau bahkan muzakki.
4) **Aplikasi Pelayanan ZIS:** Aplikasi berbasis Android/iOS untuk membayar zakat, infak, sedekah., mengecek status donasi. melihat laporan kegiatan, dan mendaftarkan mustahik secara online.

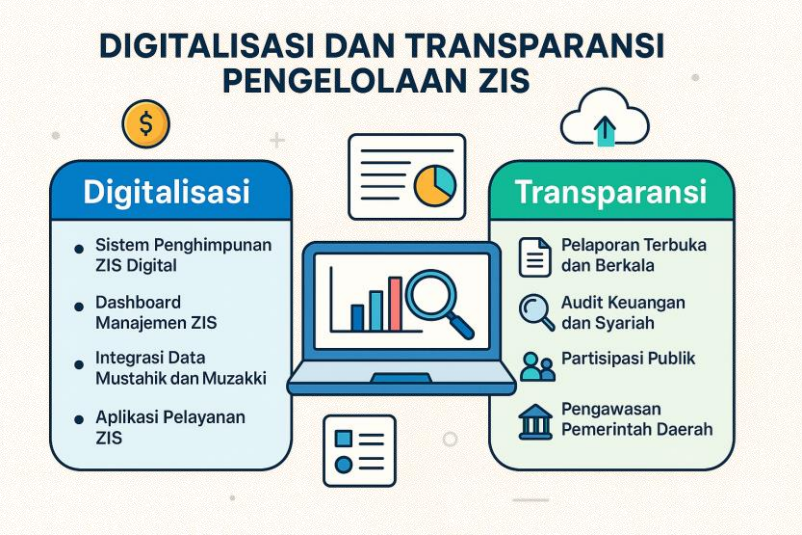

Gambar 3.41
Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan ZIS

Transparansi Pengelolaan ZIS ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan menjamin akuntabilitas pengelolaan dana umat. Fokus utamanya pelaporan terbuka dan berkala dengan laporan triwulanan atau tahunan yang memuat Jumlah ZIS masuk dan keluar, jenis program penyaluran, dan jumlah mustahik penerima manfaat.

2. Peningkatan SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penggerak utama sebuah organisasi, menjadi unsur terpenting untuk selalu diperhatikan mulai dari kualifikasi, kompetensi maupun kinerja yang dihasilkan. Oleh sebab itu Baitul MAL Kabupaten Aceh Barat perlu meningkatkan kapasitas SDMnya. Penguatan kapasitas SDM sebagai pengelola ZIS bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas amil zakat yang dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan teknis bagi amil tentang manajemen zakat, akuntansi syariah, dan teknologi informasi. Selain itu melakukan pelatihan sosial seperti pendekatan kepada mustahik, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan usaha, serta sertifikasi amil zakat berjenjang yang telah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

3. Penguatan Regulasi

Penguatan ZIS melalui regulasi dan legitimasi ini bertujuan untuk memberi dasar hukum dan kejelasan fungsi dari Lembaga pengelola ZIS di Kabupaten Aceh Barat yaitu :

a) Mendorong terbitnya Qanun tentang pengelolaan ZIS di Aceh Barat.
b) Menetapkan Baitul MAL sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan.
c) Memastikan LAZ di wilayah tersebut memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.

Adanya regulasi yang jelas, akan mendorong terlaksananya pengelolaan ZIS sesuai dengan aturan dan rencana pengelolaan dana ZIS yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS untuk mendukung program pembangunan daerah.

4. Kolaborasi

Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat program Baitul MAL dalam pengelolaan ZIS di Kabupaten Aceh Barat. Kolaborasi ini dilakukan dalam bentuk Kemitraan antara Baitul MAL dengan OPD (Dinsos, Bappeda, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, Diskominsa, Dinas Pendidikan) Perguruan Tinggi, Masjid, pesantren, ormas, komunitas, Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), serta Perusahaan untuk kolaborasi pengeloaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis ZIS. Selain itu Baitul MAL juga dapat berkolaborasi dalam forum perencanaan Pembangunan daerah (Musrenbang) agar bantuan yang diberikan memang merata, tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan tidak tumpang tindih dengan bantuan-bantuan sosial lainnya

5. Edukasi

Peningkatan ZIS melalui edukasi bagi masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan akan pentingnya ZIS untuk pembangunan daerah dan memotivasi masyarakat untuk mengalokasikan dana ZIS melalui Baitul MAL Kabupaten Aceh Barat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui iklan yang dipublikasikan melalui media sosial seperti Instragram, youtube, tiktok maupun website pemerintah daerah. Edukasi juga dapat dilakukan dengan memasang flayer, baliho maupun spanduk berisi edukasi dan ajakan kepada masyarakat. Selain itu edukasi juga dapat dilakukan melalui edukasi dalam bentuk sosialisasi secara langsung kepada masyarakat serta edukasi bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Barat.

6. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan transformasi strategi dari model konsumtif menjadi produktif. Artinya, dana ZIS tidak hanya diberikan sebagai bantuan langsung tunai, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik (penerima ZIS), sehingga dalam jangka panjang mereka bisa keluar dari garis kemiskinan dan bahkan menjadi muzakki (pemberi ZIS). Pemberdayaan ekonomi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mustahik terhadap

bantuan sosial, mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, meningkatkan daya saing usaha mikro/mustahik, dan menciptakan *economic upgrading* mustahik dari *penerima zakat* menjadi *pemberi zakat*.

Tabel 3.27 Prinsip Utama Pemberdayaan Ekonomi ZIS

Prinsip	Penjelasan
Tepat Sasaran	Mustahik dipilih berdasarkan data dan potensi
Tepat Program	Jenis usaha sesuai keahlian dan lingkungan
Tepat Dampak	Terukur: peningkatan pendapatan, omzet, aset
Pendampingan Berkelanjutan	Monitoring minimal 6–12 bulan
Transparan dan Akuntabel	Laporan program bisa diakses publik

Pemberdayaan Ekonomi ZIS dapat berupa Zakat Produktif (Modal usaha tanpa bunga dan agunan, bantuan Peralatan produksi, pendampingan usaha melalui pelatihan, mentoring, dan bimtek pengelolaan keuangan. Lalu dapat berupa Program Inkubasi UMKM Mustahik mulai dari **s**eleksi dan pembinaan pelaku usaha mikro dari kalangan mustahik,pPelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan digitalisasi serta Akses ke permodalan tambahan melalui ZIS ataupun CSR, kemitraan pasar. Pemberdayaan ini dapat dibagi ke dalam klaster ataupun sektor sesuai dengan potensi Aceh Barat seperti pertanian, perikanan, peternakan, maupun industri rumah tangga yang dalam pelaksanaannya dapat berkolaborasi dengan pemerintah gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

3.3.12.4 Optimalisasi Pemanfaatan ZIS

a. Alokasi ZIS berdasarkan asnaf

Alokasi ZIS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Baitul Mal, telah menuntaskan penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada tahun 2024 kepada 19.129 orang penerima yang tersebar di 12 Kecamatan se Kabupaten Aceh Barat, dengan total anggaran yang disalurkan sebesar Rp. 8.844.750.000,-. Penyaluran ZIS untuk tahun 2024 terbagi kedalam 4 asnaf, yaitu asnaf fakir berjumlah 5.127 orang dengan dana bantuan sebesar Rp. 800.000/jiwa, asnaf miskin 8.320 orang dengan dana bantuan sebesar Rp. 500.000/jiwa, serta asnaf Amil berjumlah 967 (Petugas Baitul mal Gampong) yang berjumlah 3 orang per desa, Ketua mendapatkan bantuan sebesar 250.000 per orang dan anggota (Sekretaris dan Bendahara) jumlah bantuan sebesar 200.000 per orang. Kemudian infaq sebanyak 4.675 orang, Ibnu sabil 29 orang dengan besaran Rp 500.000/orang, dan asanaf mualaf 11 orang dengan nominal Rp. 2.000.000,- Penyaluran ZIS kepada asnaf fakir, miskin dan amil diberikan menjelang bulan suci ramadhan, yang tujuannya untuk membantu kebutuhan pokok.

Tantangan utama dalam pengelolaan ZIS adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep ZIS dan manfaatnya bagi perekonomian serta pembangunan daerah, masih banyak pihak-pihak yang memanfaatkan ZIS untuk kepentingan pribadi dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat

yang lebih luas. Pengelolaan ZIS sebagai pilar kesejahteraan sosial menuju Indonesia Emas perlu bersinergi antara Baitul MAL, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan ini. ZIS dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan di daerah serta mendorong tercapainya visi Indonesia Emas di daerah. Adanya ZIS ini dapat membantu pemeritah untuk lebih fokus dalam mengalokasikan dananya ke sektor-sektor lain yang lebih membutuhkan perhatian. Selain itu, ZIS juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat perekonomian lokal. Oleh sebab itu adapun beberapa arah kebijakan daerah dalam pengelolaan ZIS yang meliput:

- **Integrasi ZIS dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**

  Integrasi ZIS adalah upaya untuk menyatukan peran pengelolaan zakat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah baik dalam musrenbang RKPD maupun RPJM agar dana sosial keagamaan ini dapat mendukung tujuan pembangunan, terutama pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pemberdayaan ekonomi mustahik serta sebagai salah satu upaya akselerasi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Aceh Barat**.** Manfaat integrasi ini ialah agar tidak terjadi duplikasi program bantuan sosial, bantuan tepat sasaran, masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pembangunan. Integrasi ZIS bertujuan untuk:

  1) Sinkronisasi program sosial dan pemberdayaan antara pemerintah dan lembaga zakat.
  2) Optimalisasi pemanfaatan dana ZIS untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial.
  3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan.
  4) Menjadikan zakat sebagai bagian dari sumber pembiayaan pembangunan non-APBD.

- **Penguatan Regulasi Pengelolaan ZIS**

  Penguatan regulasi melalui Penyusunan Qanun atau Peraturan Bupati tentang pengelolaan zakat yang menjadi dasar hukum pengelolaan ZIS di tingkat kabupaten, memuat kewajiban ASN untuk berzakat, dan mengatur mengatur sinergi antara Baitul MAL dan OPD, mendetailkan implementasi Qanun, serta mendukung pengumpulan zakat profesi dari ASN secara sistematis melalui sistem potong gaji (*payroll system*) dan mengatur tata cara kolaborasi Baitul MAL dan OPD teknis.

- **Kerja Sama Pengelolaan ZIS**

  Kerja Sama pengelolaa ZIS dilakukan dengan menjalin kemitraan. Kemitraan adalah kunci keberhasilan pengelolaan ZIS yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan katalisator, sedangkan Baitul MAL/ LAZ sebagai pengelola teknis dan operasional ZIS di daerah. Oleh sebab itu dalam kerja sama perlu untuk dibentuk MoU yang juga digunakan untuk menjalin kerja sama antara Baitul MAL Aceh Barat dengan OPD terkait

(Dinas Sosial, Diskominsa, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, atau Dinas Pendidikan), Perbankan Syariah, Dunia usaha (CSR) dan Perguruan tinggi, ormas, serta komunitas. Bnetk kemitraan pada masing-masing mitra diuraikan secara lebih rinci dalam tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.28 Mitra Kerja Sama Pengelolaan ZIS Kabupaten Aceh Barat

Mitra	Bentuk Kemitraan
OPD Teknis (Dinas Sosial, Diskominsa, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, atau dinas Pendidikan)	Kolaborasi program zakat produktif, beasiswa, dan bantuan sosial
BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat	Integrasi program ZIS dalam RPJM dan Musrenbang
Kemenag Kabupaten Aceh Barat	Dukungan edukasi zakat dan pemetaan potensi muzakki
Perusahaan dan BUMN (CSR)	*Co-funding* program pemberdayaan mustahik
Bank Syariah	Penyaluran dan pencatatan transaksi ZIS, QRIS untuk pembayaran ZIS
Perguruan Tinggi	Riset dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat melalui ZIS

b. ZIS mendukung pencapaian target pembangunan

Penerima manfaat ZIS yang tepat sasaran berarti bahwa ZIS memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bukan hanya bantuan sesaat. ZIS didistribusikan berdasarkan data dan kondisi riil, bukan karena kedekatan atau formalitas semata serta Disalurkan kepada mustahik yang benar-benar berhak sesuai 8 asnaf zakat yaitu kepada :

1. **Fakir** – Sangat miskin, tidak punya penghasilan.
2. **Miskin** – Punya penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar.
3. **Amil** – Petugas pengelola zakat.
4. **Mu'allaf** – Orang yang baru masuk Islam dan perlu dikuatkan keimanannya.
5. **Riqab** – Hamba sahaya atau orang yang terbelenggu (konteks modern: korban human trafficking).
6. **Gharimin** – Orang yang terlilit utang untuk kebutuhan dasar halal.
7. **Fisabilillah** – Pejuang di jalan Allah (termasuk dakwah, pendidikan Islam, dll).
8. **Ibnu Sabil** – Musafir yang kehabisan bekal di perjalanan.

Oleh sebab itu secara idealnya penyaluran dana ZIS kepada 8 asnaf yang diuraikan sebelumnya perlu untuk disesuaikan dengan program pembangunan daerah, agar manfaat dapat lebih dirasakan secara maksimal oleh para penerima ZIS ini. Adapun hubungan antara asnaf ZIS dengan target pembangunan Kabupaten Aceh Barat pada tabel 3.29, sebagai berikut :

Tabel 3.29 Tabel hubungan antara asnaf ZIS dengan target pembangunan

No	Asnaf	Definisi	Area Interfensi	Hubungan dengan Indikator Pembangunan	Target Indikator Pembangunan	OPD
1	Fakir	Sangat miskin, tidak punya penghasilan.	Pengurangan kemiskinan ekstrim	Tingkat Kemiskinan		Dinas Sosial, BAPPEDA
2	Miskin	Punya penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar	Gizi balita miskin	Prevalensi Stunting		Dinas Kesehatan
			Modal Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		Dinas Perdangan, Perindustrian , Koperasi dan UKM
			Rumah layak huni	Tingkat Kemiskinan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Amil	Petugas pengelola zakat	Kesejahteraan Birokrat	Tata kelola pemerintah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
4	Mua'laf	Orang yang baru masuk Islam dan perlu dikuatkan keimanannya.	-	-	-	-
5	Riqab	Hamba sahaya atau orang yang terbelenggu (konteks modern: korban human trafficking).	-	-	-	-
6	Gharimin	Orang yang terlilit utang untuk kebutuhan dasar halal.	-	-	-	-
7	Fisabilillah	Pejuang di jalan Allah (termasuk dakwah, pendidikan Islam, dll).	Beasiswa	Mutu Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Ibnu Sabil	Musafir yang kehabisan bekal di perjalanan.	-	-	-	-

Pemerintah daerah perlu untuk memastikan ketepatan sasaran dari Data penerima ZIS / mustahik idealnya disinkronkan dengan basis data yang ada seperti DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), ataupun setidaknya berdasarkan Survei lapangan, data Gampong/Kecamatan, dan tokoh

masyarakat sesuai dengan kriteria kelayakan zakat. Selain berdasarkan data juga perlu dilakukan penilaian dan verifikasi Pendekatan partisipatif: mustahik diverifikasi melalui visitasi, wawancara, dan dokumen pendukung dan Sistem skor atau kategori mustahik (sangat miskin, miskin, rentan). Kemudian dapat disusun berupa pemetaan secara Geospasial mustahik berdasarkan desa/kecamatan agar dapat diketahui sebaran mustahik yang ada, selanjutnya dengan penentuan segmentasi berdasarkan aspek zakat konsumtif untuk fakir, sakit, lansia, korban bencana, lalu zakat produktif (miskin potensial, UMKM, petani, nelayan, difabel), Disesuaikan berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, potensi, dan tantangan.

3.3.12.5 Program ZIS dalam Pembangunan Daerah

Pengelolaan ZIS perlu untuk bersinergi untuk mengaselerasi pembangunan daerah, untuk itu program pemanfaatan ZIS dapat diselaraskan dengan progran pembangunan daerah, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat semakin optimal.

a. **Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Mustahik**
   Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki hunian yang layak untuk dilakukan perbaikan dengan harapan kondisi rumah yang lebih layak, sehat dan bersih dapat meningkatkan kualitas hidup dari para mustahik tersebut. Pada program 100 hari pemerintah Kabupaten Aceh barat terdapat beberapa program yang berhubungan dengan program rehabilitasi rumah layak huni ini yaitu program **SANIKU** (Sanitasi untuk Kesehatan Lingkungan) dengan menyediakan WC bagi Rumah Tangga Miskin dan program **TIRTA** (Tingkatkan Ketersediaan Air Bersih). Kedua program tersebut dilakuka dibawah OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat.
b. **Program ZIS bersama UMKM**
   Program ini merupakan program bantuan modal yang berasal dari dana ZIS daerah yang terkumpul dan kemudian diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha. Bantuan ini dapat diberikan pada periode tertentu, misalnya diberikan setiap 6 (enam) bulan sekali ataupun setahun sekali kepada beberapa orang pengelola UMKM dengan besaran bantuan Rp.500.000 – Rp. 1.000.000 ataupun disesuaikan dengan dana ZIS yang terkumpul. Bantuan ini merupakan stimulus yang diberikan oleh baitul MAL berkolaborasi dengan dinas teknis, sehingga dapat mengoptimalkan dana bantuan yang diberikan dengan tepat sasaran. Pada program 100 hari pemerintah Kabupaten Aceh barat terdapat beberapa program yang berhubungan dengan program ZIS bersama UMKM ialah program **modal UMKM BERKAH** (Bersama Kembangkan Akses dan Pemasaran UMKM) dan **program SEJAHTERA** (Sinergi Ekonomi untuk Jaminan Akses Modal terhadap Rakyat) yang keduanya menjadi tanggung jawab oleh dinas teknis yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat.

c. **Rumah Sehat ZIS**

Program Rumas Sehat ZIS ini bukan saja memberikan fasilitas kesehatan pertama kepada masyarakat kurang mampu, namun juga membantu program-program Kesehatan pemerintah daerah terkait penurunan angka stunting melalui kegiatan pemeriksaan gratis untuk bayi dan balita serta pemberian bantuan bahan pokok dengan nominal per paket yang telah disesuaikan dengan ZIS yang terkumpul. Pemerintah kabupaten Aceh Barat telah menyusun 100 program pembangunan selama 5 tahun ke depan. Pada program Rumas Sehat ZIS ini Baitul MAL dapat berkolaborasi bersama Dinas kesehatan dan Rumah sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien baik dari segi perencanaan maupun implementasinya dilapangan.

Berdasarkan 100 program tersebut terdapat beberapa program yang dapat mendukung terlaksananya program Rumah Sehat ZIS yaitu program RUMOH LON (Rumah Orang Singgah untuk Layanan Pengobatan), DOKTERKU (Dokter Kunjungi Rumah untuk Kesehatan Unggul, SEHATI (Sehat di Rumah Anda Tanpa Biaya), PEDULI (Pendampingan Ibu Hamil dan Kelahiran), dan program PROTEIN (Program Tepat Gizi bagi Balita Miskin) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.

d. **Program Beasiswa ZIS**

Program beasiswa ini dapat diberikan kepada siswa maupun mahasiswa Kabupaten Aceh Barat. Beasiswa dapat diberikan mulai dari jenjang SD hingga SMP yang miskin berprestasi ataupun yatim berprestasi. Kategori mahasiswa diberikan dengan beberapa indikator yang telah ditentukan misalnya seperti status mahasiswa aktif yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, mahasiswa minimal semester 2 dengan IPK minimal 3,50 atau memiliki prestasi akademik ataupun non akademik. Nominal beasiswa yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dana ZIS yang terkumpul.

Seluruh penerima beasiswa ditingkat mahasiswa selanjutnya dapat diberikan pelatihan-pelatihan upgrading sebagai pendukung softskill mereka seperti kepemimpinan, public speaking, digital networking, dan kemampuan lainya untuk mempersiapkan generasi emas daerah di masa mendatang. Adapun program dalam 100 program Prioritas Pemerintah kabupaten Aceh Barat yang selaras dengan program beasiswa ZIS ialah program PRESTASI (Program Beasiswa untuk Siswa Miskin Berprestasi) dan Program BALSEM (Bantuan Alat Perlengkapan Sekolah bagi Keluarga Miskin).

e. **Program Ketahanan Pangan ZIS**

Ketahanan pangan dilakukan sebagai bentuk percepatan perwujudan asta cipta Presiden RI dan juga sebagai wujud Pembangunan sosial masyarakat kabupaten Aceh barat. Program Ketahanan pangan ZIS ini diberikan untuk sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Penerimanya ialah petani, peternak maupun nelayan kecil yang masuk dalam indikator yang telah ditentukan oleh pengelola Zakat daerah. Bantuan ini juga melibatkan Dinas teknis untuk menjamin ketepatan sasaran bantuan yang diberikan. Bantuan yang diberikan dapat berupa peralatan maupun

dana yang kemudian dapat dimanfaatkan. Selain itu bantuan yang diberikan nantinya harus ditinjau kembali penggunaannya sehingga azaz tepat, adil, kebermanfaatan dan keberlanjutan bantuan dapat direalisasikan sesuai dengan prinsip syariah.

Terdapat beberapa program prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang dapat endukung program Ketahanan Pangan ZIS diantaranya program **PEKAN (**Pemberdayaan Keluarga Nelayan) yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) , lalu Program **HIKMAT** (Hilirisasi Komoditi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan) oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan. Progam prioritas pembangunan tersebut dapat berkolaborasi pelaksanaannya dengan dana ZIS yang terkumpul sehingga capaian dapat semakin optimal dengan dukungan dana yang diberikan oleh Baitul MAL Kabupaten Aceh Barat.

f. Program Gampong Usaha ZIS

Program Gampong Usaha ZIS ini merupakan kolaborasi Baitul MAL dengan BUMG yang memiliki usaha produktif dan memiliki sifat keberlanjutan. Program ini diberikan dengan memberikan bantuan dana untuk tambahan modal ataupun berupa peralatan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha BUMG.

Adapun program pada 100 program prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang dapat menunjang program Gampog usaha ZIS yaitu program BUNGA (Badan Usaha Milik Gampong untuk Pembangunan) yang dilakukan dibawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG).

g. **Santunan Dhuafa'**,

Santunan Dhuafa merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Daerah dan bersumber dari Dana ZIS yang terkumpul. Pemberian santuanan diberikan daam periode tertentu sesuai dengan yang datur oleh lembaga pengelola ZIS. Santuan atau bantuan tersebut perlu dilakukan sesuai prinsip syariah dengan indikator penerima yang telah ditentukan dan dilakukan update data secara berkala dan divalidasi dengan turun lapangan secara berkala guna memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya. Pemberian santunan ini dapat diberikan kepada masyarakat miskin, orang sakit, santunan kematian, maupun guru ngaji yang tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah.

Ada pun 100 program pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terkiat santunan dhuafa ialah **program SALAM** (Santunan Sosial bagi Masyarakat Miskin) yang menjadi tanggung jawab pelaksana ialah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat dan **program INTAN** (Insentif untuk Imam dan Guru Mengaji) dengan OPD teknis ialah Dinas Syariat Islam.

3.3.13 MCSP

3.3.13.1 Pengertian MCSP

Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memantau kinerja pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah.

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang merugikan kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tiga puluh delik tindak pidana korupsi (tipikor), kemudian disederhanakan menjadi tujuh bentuk tipikor yang mencakup merugikan keuangan negara, benturan dalam kepentingan, suap, gratifikasi yang dianggap suap, pemerasan, perbuatan curang, dan penggelapan dalam jabatan. Data statistik tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024, kelompok instansi dengan pelaku korupsi tertinggi yaitu Pemerintah Daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota) yaitu sebanyak 854 perkara dari 1.666 perkara atau 51% dari total perkara yang terjadi di seluruh instansi. Oleh sebab itu KPK bersama dengan stakeholder terkait berkomitmen untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di daerah salah satunya adalah melalui koordinasi sebagaimana amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK melakukan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tipikor dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Tugas ini dilakukan baik dalam rangka pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK melaksanakan kewenangan dengan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tipikor. Pelaporan upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah disampaikan melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* yang saat ini berubah menjadi *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)* yang dapat diakses pada laman resmi JAGA.ID. Hasil kegiatan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dinilai oleh verifikator dan dilakukan quality assurance (QA) oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP. Hasil tersebut lalu akan diumumkan melalui nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP.

3.3.13.2 Tujuan *Monitoring, Controlling, Surveilance For Prevention* (MCSP)

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 huruf b dan e

bahwa dalam pelaksanaannya, koordinasi upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan melalui pengelolaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk mendapatkan laporan atas upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah. Sinergi bersama pencegahan korupsi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong inisiasi dan komitmen kepala daerah beserta pejabat dan ASN daerah termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
2. Sebagai salah satu bentuk pendampingan kepada Pemda dalam upaya meningkatkan sistem pencegahan korupsi;
3. Memperkuat pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP yang bertugas melakukan pengawasan secara intens;
4. Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun;
5. Memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik korupsi daerah sebagaimana tercantum dalam area pencegahan korupsi pada aplikasi JAGA.ID, baik berdasarkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari hasil Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Secara umum MCSP bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi di tingkat daerah melalui pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan upaya preventif yang komprehensif.

3.3.13.3 Ruang Lingkup *Monitoring, Controlling, Surveilance For Prevention (MCSP)*

Upaya pencegahan korupsi diarahkan pada pencegahan terjadinya grand corruption dan petty corruption. Memperhatikan hasil evaluasi atas upaya pencegahan korupsi daerah melalui MCSP, data penanganan kasus korupsi yang ditangani KPK, skor Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil penilaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2024, maka fokus area pencegahan korupsi pada pemerintah daerah tahun 2025 yaitu:

1. Area Perencanaan;
2. Area Penganggaran;
3. Area Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Area Pelayanan Publik;
5. Area Manajemen ASN;
6. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Area Optimalisasi Penerimaan Daerah
8. Area Penguatan APIP.

Delapan area tersebut dilengkapi dengan sasaran, aspek, dan indikator sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah..

Terdapat perubahan area pencegahan korupsi tahun 2025 jika dibandingkan dengan area pencegahan korupsi tahun 2024. Perbedaan area optimalisasi pajak daerah berubah menjadi optimalisasi penerimaan daerah. Perubahan ini untuk mengakomodasikan konteks penerimaan daerah yang lebih luas daripada hanya penerimaan dari pajak saja. Lalu, area pengawasan APIP berubah menjadi area penguatan APIP. Perubahan ini dilakukan karena kondisi saat ini APIP sangat memerlukan penguatan dari aspek anggaran, sumber daya alam (SDM), independensi dan objekvitas, serta peran dan layanan.

Upaya pencegahan korupsi dilaksanakan antara lain melalui implementasi pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi. Dalam mewujudkannya perlu adanya komitmen bersama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola dan melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penajaman indikator sehingga diharapkan mendorong efektivitas untuk menurunkan tingkat korupsi maka KPK telah melakukan beberapa evaluasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention yang selanjutnya disebut sebagai IPKD MCSP. Beberapa penyesuaian dan penajaman yang akan dilaksanakan terutama untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Substansi indikator IPKD MCSP Tahun 2025 terdiri dari beberapa aspek yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

a. Aspek Transparansi

Aspek ini mendorong keterbukaan dalam memberikan informasi relevan dan material yang diberikan pemerintah kepada pemangku kepentingan terkait dengan keterbukaan informasi (prosedur, biaya, tanggung jawab), keterbukaan proses pengambilan keputusan, dan pelayanan. Dalam hal ini keterbukaan agar dipastikan dapat berjalan untuk mendapatkan kemudahan bagi masyarakat.

b. Aspek Regulasi dan Kebijakan

Aspek ini mendorong tersedianya seperangkat aturan untuk mengatur, mengarahkan, atau mengontrol perilaku dan sistem tertentu. Regulasi yang disusun baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan dan/ atau Keputusan Kepala Daerah, dan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh pejabat terkait (Sekretaris Daerah dan/ atau Kepala Dinas).

c. Aspek Akuntabilitas

Aspek ini mendorong pelaksanaan atau kepatuhan terhadap regulasi dan sistem yang telah dibangun. Implementasi diharapkan mencerminkan ketepatan waktu, pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan upaya pencegahan korupsi, peningkatan kinerja dan kualitas pencegahan korupsi. Dalam hal terdapat pelanggaran maka perlu adanya pemberian sanksi, atau jika terdapat prestasi maka dapat diberikan penghargaan dan apresiasi.

Pedoman teknis penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Area Perencanaan.

A. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area perencanaan, masih ditemukan permasalahan korupsi terutama pada **perencanaan pembangunan daerah, pokok pikiran, serta penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan** sehingga sasaran pencegahan korupsi pada area perencanaan difokuskan pada ketiga hal tersebut. Ketiga sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area perencanaan yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi..

a. Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada perencanaan pembangunan daerah antara lain:

1. Perencanaan pembangunan daerah tidak dilaksanakan secara transparan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
2. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak dilaksanakan secara tepat waktu karena adanya intervensi yang menimbulkan terjadinya penyuapan/ pemerasan/ gratifikasi.
3. Program dan kegiatan dipaksakan untuk dilaksanakan walaupun tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan/ atau Renstra karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
4. Hasil fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak ditindaklanjuti Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan adanya celah korupsi pada pelaksanaan anggaran.

b. Pokok Pikiran

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pengajuan pokok pikiran antara lain:

1. Pokok pikiran tidak disampaikan secara transparan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
2. Pokok pikiran disampaikan di luar batas waktu yang telah ditentukan karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
3. Pokok pikiran dipaksakan untuk diajukan padahal tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.

c. Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pengajuan hibah dan bantuan pemerintah antara lain:

1) Hibah, bantuan sosial dan bantuan pemerintah tidak disampaikan secara transparan sehingga berpotensi adanya benturan kepentingan dalam pengalokasian hibah dan bantuan pemerintah
2) Kondisi di atas menimbulkan adanya permintaan komitmen fee pada saat pencairan hibah dan bantuan pemerintah oleh sejumlah oknum tertentu.
3) Keterlambatan penyampaian proposal hibah dan bantuan pemerintah namun tetap dipaksakan untuk diakomodir karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.
4) Keterlambatan penyampaian pengajuan hibah dan bantuan pemerintah namun tetap dipaksakan untuk diakomodir karena adanya benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.

B. Strategi mewujudkan MCSP

Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan capaian MCSP pada area perencanaan yaitu :

a. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Transparansi perencanaan pembangunan dengan mempublikasi tangkap layar RKPD murni tahun selanjutnya dan RPKP – P tahun berjalan pada website pemeritah daerah paling lambat 1 bulan sejak ditetapkan paling lambat 31 Juli tahun berjalan;
2. Transparansi perencanaan pembangunan daerah dengan mempublikasi tangkap layar inputan usulan masyarakat, inputan RKPD murni tahun selanjutnya dan RKPD-P tahun berjalan telah dilakukan melalui aplikasi SIPD;
3. Terpenuhinya regulasi kebijakan terkait RKPD dan Rencana Kerja (Renja);
4. Tersedianya SOP Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
5. Ketepatan waktu penetapan RKPD, untuk RKPD murni tahun selanjutnya dan RKPD-P tahun berjalan sudah ditetapkan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan;
6. Ketepatan waktu penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah APBD murni tahun selanjutnya dan Renja Perubahan tahun berjalan paling lambat 1 bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
7. Keselarasan dokumen RKPD dan RKA pada RAPBD tahun selanjunya dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
8. Kepatuhan terhadap hasil fasilitasi Provinsi dan Tindak lanjut hasil Reviu Inspektorat terhadap RKPD murni tahun selanjuntnya dan RKPD-P tahun berjalan.

b. Pokok Pikiran

1. Trasparansi Pokok Pikiran dalam SIPD dengan mempublikasi tangkap layer akun total pokir tahun selanjutnya di SIPD;
2. Tersedia daftar akun Pokok Pikiran di SIPD;
3. Tersedia kamus usulan Pokok Pikiran beserta laporan pelsksanaan sosialisasi kamus usulan Pokor Pikiran;
4. Data Pokok Pikiran lengkap yang memuat tentang Daftar Pokir, Nama Pengusul, Usulan Anggaran, Volume dan Rincian Usulan.
5. Terpenuhinya Kebijakan Daerah terkait kepatuhan Pokok Pikiran
6. Kesesuaian Pokok Pikiran dengan prioritas pembangunan daerah;
7. Ketepatan waktu penyampaian Pokok Pikiran maksimal 1 minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
8. Melaksanakan Pokok Pikiran dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku

c. Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah

1. Transparansi hibah dan bantuan pemerintah melalui publikasi informasi Jumlah Pengusul dan identitas (termasuk data pengusul yang di-approve dan tidak di -approve) dan keterangan penolakan, Objek usulan, Total Nilai dan OPD Pelaksana;
2. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mengatur tentang penyaluran bantuan hibah dan bantuan pemerintah (bantuan sosial dan bantuan keuangan).
3. Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan dengan baik ke semua OPD pelaksana agar pengajuannya tepat waktu;
4. Tersedianya SOP tentang Penyaluran hibah;
5. Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dari OPD pelaksana.

2. Area Penganggaran

A. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area penyusunan anggaran, masih ditemukan permasalahan korupsi **terutama penyalahgunaan penggunaan anggaran dan penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan pada proses pengesahan anggaran** sehingga sasaran pencegahan korupsi pada area penyusunan anggaran difokuskan pada kedua hal tersebut. Kedua sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area penyusunan anggaran yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi.

a. Penyalahgunaan Anggaran

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan anggaran antara lain:

1. Pemda belum memiliki regulasi yang mengatur standar harga sehingga memicu mark up anggaran.
2. Praktik mark up anggaran dan standar harga yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak ada kepatutan dan kewajaran harga satuan.
3. Penyalahgunaan penggunaan anggaran terutama honorarium dan perjalanan dinas.

b. Benturan kepentingan pada Pengesahan APBD

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pengesahan anggaran antara lain:

1. Penyuapan/ pemerasan/ gratifikasi terutama pada proses penetapan KUA PPAS, penyerahan dan penetapan APBD.
2. Benturan kepentingan terutama terkait dengan proses penetapan KUA-PPAS, penyerahan dan penetapan APBD karena ada maksud beberapa pihak untuk memasukkan proyek tertentu ke dalam APBD dan bahkan sudah ada calon pelaksana pekerjaan.

B. Strategi mewujudkan MCSP

Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan capaian MCSP pada area penganggaran yaitu :

a. Penyalahgunaan Anggaran

Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran perlu dilakukan upaya :

1. Transparansi Standar Harga Satuan (SHS) dengan publikasi tangkap layar Perkada/Surat Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga (SHS) dalam website pemda untuk APBD Murni tahun selanjutnya, paling lambat tanggal 6 Juli tahun berjalan, untuk SHS Perubahan paling lambat 30 Juli tahun berjalan;
2. Transparansi Analisis Standar Biaya (ASB) dengan publikasi tangkap layar Perkada ASB dalam website pemda dan Screenshot hasil input ASB ke dalam SIPD.
3. Tersedianya regulasi dan kebijakan (Perkada/SK) dan SOP tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Biaya (ASB);
4. Melakukan Evaluasi dan menindaklanjuti Reviu Inspektorat terhadap SHS dan ASB;
5. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dugaan penyalahgunaan honorarium dan perjalanan dinas.

b. Benturan kepentingan pada Pengesahan APBD

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan pada pengesahan APBD perlu dilakukan upaya :

1. Transparansi APBD dan APBD Perubahan dengan publikasi tangkap layar Peraturan Daerah tentang APBD Murni tahun berjalan pada

website pemda telah dilakukan maksimal tanggal 31 Januari tahun berjalan dan untuk APBD-P tahun berjalan maksimal tanggal 31 Oktober tahun berjalan;

2. Tersedianya regulasi dan kebijakan penetapan APBD dan APBD perubahan tahun berjalan;
3. Ketepatan waktu penyerahan dan pengesahan Rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun berjalan paling lambat tanggal 7 Juli tahun berjalan, dan penetapannya paling lambat tanggal 17 Agustus tahun berjalan;
4. Ketepatan waktu penyerahan dan pengesahan Rancangan KUA dan PPAS APBD Murni tahun selanjutnya paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan, dan penetapannya paling lambat tanggal 17 Agustus tahun berjalan;
5. Ketepatan waktu penyusunan RKA-SKPD Perubahan dan RAPBD-P Tahun berjalan paling lambat tanggal 21 Agustus tahun berjalan, dan penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD Tahun selanjutnya paling lambat tanggal 7 September tahun berjalan;
6. Ketepatan waktu penyerahan kesepakatan bersama dan penetapan RAPBD murni dan RAPBD-P tahun berjalan, penyerahan RAPBD-P tahun berjalan paling lambat tanggal 15 September tahun berjalan dan kesepakatan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan, untuk RAPBD murni tahun selanjutnya penyerahan paling lambat tanggal 1 Oktober tahun berjalan dan kesepakatan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.
7. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
8. Menindaklanjuti hasil reviu RKA dan hasil evaluasi pengesahan RAPBD dan RAPBD-P.

3. Area Pengadaan Barang dan Jasa

A. Kerawanan Korupsi

Hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area pengadaan barang dan jasa, masih ditemukan permasalahan korupsi terutama **penyuapan/ gratifikasi** sejak dari perencanaan, pelaksanaan, serah terima hingga pemanfaatan hasil pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah dengan modus. Permasalahan ini muncul baik dalam **proses pengadaan barang dan jasa secara umum, pengadaan barang dan jasa strategis** pemerintah daerah, maupun **pengadaan barang dan jasa melalui e- purchasing**. Ketiga sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan anggaran antara lain:]

1. Sebelum Tahun Anggaran berikutnya dimulai pemda belum menyiapkan untuk ditetapkan sebagai kegiatan strategis/prioritas untuk waktu pelaksanaan kegiatan yang dimulai awal tahun sd akhir tahun, agar bisa melaksanakan lelang dini
2. Benturan kepentingan yang memunculkan pemecahan proyek, reviu perencanaan dan konsolidasi paket pengadaan yang tidak berjalan optimal.
3. Konsolidasi pengadaan lebih mudah melalui SIPD keuangan namun SIPD belum diutilisasi pada konsolidasi pengadaan.
4. Pola penyerapan belanja daerah, terutama PBJ yang menumpuk di akhir tahun.
5. Keterlambatan sepanjang proses PBJ.
6. Kesalahan dalam mengartikan lelang dini, sebagai pengadaan pada tahun sebelumnya.
7. Mark up satuan harga pada kegiatan pengadaan barang dan jasa karena ada permintaan fee dari beberapa pihak yang berkepentingan.
8. Temuan penyimpangan dalam PBJ sesuai dengan hasil audit BPK.
9. Konsolidasi pengadaan tidak optimal (pembagian kegiatan sudah di serahkan ke masing-masing PPTK pada setiap kepala bagian di OPD terkait sebelum DPA disahkan). Eviden konsolidasi harus sudah masuk dalam RUP.

b. Pengadaan Barang dan Jasa Strategis

1. Tidak semua PBJ strategis bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
2. Barang dan jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
3. Serah terima barang/jasa tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan.
4. Pengawasan melalui probity audit tidak dapat berjalan dengan optimal karena keterbatasan dan/ atau kompetensi SDM APIP, kurangnya anggaran pengawasan, atau APIP kurang optimal dalam melakukan pengawasan mengingat kurangnya independensi.
5. PBJ strategis dilakukan untuk kegiatan prioritas yang ditetapkan dengan SK kepala daerah yang dilaksanakan oleh dinas PUPR untuk Prioritas Pembangunan, Dinas Kesehatan untuk Prioritas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk Prioritas Pendidikan , serta dinas yang melaksanakan kegiatan untuk makan gratis bagi siswa sekolah dan sudah dilakukan pada tahun sebelumnya (dapat dimintakan sertifikasi TKDN).

c. Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Purchasing

1. Resiko markup harga pada e-katalog sehingga harus dilakukan reviu harga satuan untuk mencegah kecenderungan harga di atas harga pasar
2. Resiko adanya negosiasi harga e-purchasing di luar sistem karena sudah ada pengaturan pemenang dan pengkondisian mark up anggaran.
3. Pasar persaingan sempurna tidak terbentuk dengan optimal sehingga tidak ada kompetisi dalam pemilihan calon penyedia.
4. Pengadaan konstruksi melalui e-katalog tidak terdeteksi di SIRUP.
5. Pengadaan langsung Barang dan Jasa melalui e-katalog rawan dikarenakan pengguna jasa dan penyedia jasa dapat bernegosiasi diluar katalog.
6. Belum optimal Seleksi penyedia yang mendaftar katalog pemerintahan untuk menjual barang/jasa.

B. Startegi Mewujudkan MCSP

a. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Transparansi seluruh pengadaan barang dan jasa dengan tangkap layar data inputan SIRUP seluruh paket PBJ tahun berjalan per 31 Maret tahun berjalan;
2. Tersedianya regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berupa 1). Surat Edaran Sekda yang menegaskan tentang tugas dan tanggung jawab pelaku pengadaan, pelaksanaan reviu perencanaan pengadaan barang dan jasa pelaksanaan konsolidasi, kepatuhan input SIRUP paling lambat 31 Maret tahun berjalan. 2). Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa, dan 4). Produk Hukum (Perkada atau SK Kada/SK Sekda) tentang SOP keuangan yang mengakomodir pembayaran terhadap pengadaan melalui konsolidasi yang akuntebel;
3. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait pangadaan barang dan jasa.

b. Pengadaan Barang dan Jasa Strategis

1. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa dengan publikasi tangkap layar Proyek Strategis Daerah tahun berjalan pada SIRUP dalam website pemda paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan;
2. Tersedianya regulasi dan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis tahun berjalan sudah ditetapkan maksimal 31 Maret tahun berjalan;
3. Pencegahan korupsi pada tahapan PBJ mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima.

c. Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Purchasing

1. Transparansi e-Katalog dengan sosialisasi dan publikasi PBJ yang dilaksanakan melalui e-purchasing;
2. Tersedianya regulasi dan kebijakan implementasi dan pengawasan e-purchasing;
3. Melaksanakan pencegahan korupsi serta mendorong akuntabilitas dalam penggunaan e-purchasing mulai dari perencanaan, persiapan

implementasi e-puchasing, proses pemilihan penyedia, dan proses serah terima

4. Area Pelayanan Publik

A. Kerawanan Korupsi

Secara umum beberapa permasalahan korupsi pada Layanan Publik adalah pemberian gratifikasi seperti membayar lebih agar layanan bisa dipercepat, adanya pemerasan atau pungutan liar, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, birokrasi yang rumit, pelayanan yang tidak responsif, sehingga minim kepuasan publik. Layanan publik pada sektor **perizinan, pendidikan, kesehatan, serta kependudukan dan pencatatan sipil** adalah 4 (empat) area layanan publik yang berhubungan langsung dan banyak digunakan oleh masyarakat sehingga menjadi prioritas untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan korupsi yaitu :

a. Sektor Perizinan

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pelaksanaan pelayanan publik sektor perizinan antara lain:

1. Penyuapan/pemerasan/gratifikasi pada penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan. SDM yang seharusnya memberikan pelayanan rekomendasi teknis dan perizinan tidak memberikan konsultasi teknis yang membantu pemohon. Bahkan terdapat potensi benturan kepentingan dengan mengarahkan konsultan tertentu untuk melengkapi persyaratan.
2. Persyaratan dan mekanisme penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan rumit dan berbelit-belit sehingga pemohon memilih untuk memberikan sejumlah uang dalam rangka memperlancar proses atau memproses rekomendasi teknis dan perizinan melalui calo.
3. Aplikasi pengajuan rekomendasi teknis dan perizinan tidak memberikan informasi secara transparan sejauh mana proses telah dilakukan. Tidak ada tracking system yang dapat digunakan oleh pemohon untuk memantau sejauh mana proses rekomendasi teknis dan perizinan telah berjalan.
4. Penetapan RTRW dan/atau RDTR masih belum tersedia sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan rekomendasi teknis dan perizinan. Hal ini menimbulkan transaksional dalam pengajuan rekomendasi teknis dan perizinan yang terkait dengan tata ruang.

b. Sektor Pendidikan

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pelaksanaan pelayanan publik sektor pendidikan antara lain:

1. Penyuapan/pemerasan/gratifikasi pada penerimaan peserta didik baru//Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Kurangnya transparansi kuota dan persyaratan dalam penerimaan peserta didik baru/Sistem Penerimaan Murid penyuapan/pemerasan/gratifikasi. Baru sehingga membuka celah penyuapan/pemerasan/gratifikasi.

3. Penyalahgunaan jalur masuk penerimaan peserta didik yang tidak sesuai (prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan zonasi/domisili).
4. Untuk zonasi seringkali terjadi pemalsuan dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), melakukan perpindahan sementara; (Tahun 2025, zonasi diubah menjadi domisili).
5. Untuk Afirmasi data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) banyak tidak sesuai, banyak yang sebenarnya mampu tapi masuk dalam DTSEN;
6. Untuk perpindahan tugas orang tua baru khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan untuk orang tua yang bekerja swasta tidak diakomodir;
7. Seringkali terbit piagam-piagam palsu untuk dapat masuk jalur prestasi. Dan untuk prestasi hanya tafis Quran hanya terbatas bagi pemeluk agama tertentu dan tidak mengakomodir seluruh pemeluk agama;
8. Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seringkali tidak sesuai peruntukan, dan pertanggungjawaban dana BOS seringkali tidak disertai bukti;
9. Variabel penentuan BOS berdasarkan jumlah siswa, berjenjang dari sekolah meningkat s.d. ke Kementerian. modus pelanggaran Dana BOS diantaranya kolaborasi antara pihak sekolah dan dinas terkait untuk mempermainkan jumlah siswa.

c. Sektor Kesehatan

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pelaksanaan pelayanan publik sektor kesehatan antara lain:

1. Penyuapan/ pemerasan/ gratifikasi pada layanan kesehatan dan pendaftaran jaminan kesehatan.
2. Tidak adanya transparansi ketersediaan layanan kesehatan sehingga makin membuka celah penyuapan/ pemerasan/ gratifikasi.
3. Tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan sehingga membuka celah penyuapan/ pemerasan/ gratifikasi.

d. Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada pelaksanaan pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil antara lain:

1. Penyuapan/ pemerasan/ gratifikasi pada layanan kependudukan dan pencatatan sipil karena masih rendahnya integritas petugas layanan termasuk pihak RT dan/ atau RW.
2. Tidak adanya transparansi pengajuan layanan kependudukan dan pencatatan sipil karena masih diproses secara manual, sehingga makin membuka celah penyuapan/ pemerasan/ gratifikasi.

3. Pemohon menginginkan proses yang cepat dan mudah sehingga dengan sukarela memberikan sejumlah uang tertentu untuk percepatan prosesnya.

B. Strategi Mewujudkan MCSP

a. Sektor Perizinan

1. Transparansi Tata Ruang dengan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/ atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar dalam pemberian izin dan publikasi Perda RDTR pada website pemda;
2. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka pencegahan korupsi layanan perizinan (Perda RTRW, Perda/ Perkada RDTR dan Data (Shortlist) jumlah kewajiban pembuatan RDTR sesuai yang diamanatkan dalam RTRW;
3. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang mencegah terjadinya korupsi dalam penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan;
4. Ketepatan waktu proses penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan;
5. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), yaitu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik;
6. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait dengan layanan perizinan;
7. Penanganan pengaduan masyarakat terkait penerbitan perizinan;
8. Menindaklanjuti reviu layanan perizinan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

b. Sektor Pendidikan

1. Transparansi persyaratan pendaftaran peserta didik baru dengan publikasi informasi mengenai pendaftaran peserta didik baru pada setiap jalur pendidikan sesuai kewenangannya;
2. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya pungli sektor Pendidikan;
3. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SPMB tanpa praktik penyuapan/ gratifkasi/ pungli pada setiap lembaga Pendidikan.
4. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik, yaitu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik;
5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terkait dengan layanan Pendidikan;
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait sektor Pendidikan.

c. Sektor Kesehatan

1. Transparansi Layanan Kesehatan dengan publikasi melalui media online dan/atau offline terkait unit layanan kesehatan pemerintah daerah

mencakup jenis layanan, ketersediaan ruang rawat dan tarif yang dekenakan;
2. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor Kesehatan;
3. Melaksanakan penghitungan Indeks Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit pemerintah daerah;
4. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik, yaitu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan public;
5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait dengan layanan Kesehatan;
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait sektor Kesehatan
7. menindaklanjuti reviu layanan publik sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat

d. Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Transparansi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil pelayanan dengan publikasi melalui online pada website Dukcapil/Pemda maupun offline terkait jenis-jenis layanan kependudukan (foto/ screenshoot/link website persyaratan pelayanan kependudukan);
2. Adanya Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor kependudukan dan pencatatan sipil (SE Kepala Daerah, PKS/ mekanisme/SOP terkait keperluan verifikasi data calon peserta didik, penerima bantuan iuran BPJS (PBI) dan DTSEN untuk bantuan sosial;
3. Melaksanakan cleansing/update data secara berkala dalam rangka penyaluran bantuan social;
4. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik, yaitu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan public;
5. Melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terkait dengan layanan kependudukan dan catatan sipil;
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait sektor kependudukan dan catatan sipil.

5. Area Manajemen ASN

A. Kerawanan Korupsi

Modus korupsi dalam manajemen ASN pada umumnya adalah penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam jual beli jabatan, terutama pasca Pilkada serentak Tahun 2024 dimana potensi jual beli jabatan akan menyertai pergantian periode Pimpinan Kepala Daerah Periode 2024-2029. sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area manajemen ASN yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi, kerawanan yang dimaksud adalah :

d. Transparansi Manajemen ASN
   Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat sehingga menurunkan risiko jual beli jabatan.
e. Regulasi dan Kebijakan Manajemen ASN dengan tujuan
   Adanya regulasi dan kebijakan dalam upaya penegakkan integritas, pengendalian, pengawasan kode etik dan disiplin ASN.
f. Manajemen Kinerja ASN
g. Pencegahan Resiko Korupsi terhadap proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN.
h. Budaya Antikorupsi
i. Adanya upaya dalam rangka memberikan pemahaman antikorupsi yang diikuti dengan implementasi budaya antikorupsi.
j. Penegakan Kode Etik dan Disiplin
   Terlaksananya penegakan kode etik dan disiplin pada ASN yang diketahui telah melakukan pelanggaran disiplin.

B. Startegi Mewujudkan MCSP

1. Penggunaan sistem informasi ASN yang terintegrasi dalam lingkup pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian (Surat edaran Kepala BKN No 7 Tahun 2024 tentang pemanfaatan aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara);
2. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam upaya penegakkan integritas, pengendalian, pengawasan kode etik dan disiplin ASN;
3. Pencegahan Resiko Korupsi terhadap proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN;
4. Kepatuhan Wajib Lapor dalam melaporkan LHKPN dan pelaksanaan evaluasi terhadap harta dan kekayaan yang dilaporkan;
5. Menciptakan pemahaman antikorupsi dan diikuti dengan implementasi budaya antikorupsi;
6. Melaksanakan penegakan kode etik dan disiplin pada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin;
7. Menindaklanjuti reviu Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

6. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

A. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan korupsi, pada area Pengelolaan Barang Milik Daerah masih ditemukan permasalahan korupsi yaitu pada **penyalahgunaan BMD** sehingga berakibat terjadinya kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan karena:

a. Setelah melakukan pengadaan barang, BMD tidak dicatatkan sebagai aset milik pemerintah daerah dan tidak dilakukan pengamanan hukum melalui sertifikasi BMD (terutama untuk BMD tanah).
b. Sistem penatausahaan BMD yang memfasilitasi pencatatan BMD yang handal dan akuntabel belum optimal.
c. Proses sertifikasi BMD tidak didukung dengan anggaran yang memadai, bahkan proses sertifikasi juga dinilai berbelit-belit.
d. BMD disalahgunakan oleh beberapa oknum ASN, BMD tidak dikembalikan setelah selesai menjabat atau BMD dikembalikan dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan.
e. Pemanfaatan BMD tidak dilakukan penghitungan sesuai dengan nilai yang seharusnya.

B. Strategi Mewujudkan MCSP

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Salah satu Barang Milik Daerah yang termasuk dalam titik kerawan korupsi adalah tanah, untuk memaksimalkan capaian MCSP salah satunya dengan memberikan dukungan pendanaan Sertifikasi BMD terutama aset tanah. Besarnya pendanaan yang dibutuhkan sangat tergantung pada jumlah aset tanah yang akan disertifikasi, Selanjutnya perlu juga diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Transparansi BMD dengan membuat sistem database BMD dalam rangka penatausahaan BMD sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan BMD;
2. Membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan BMD yang transparan dan akuntabel termasuk pencegahan penyalahgunaan BMD sebagai bentuk pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
3. Mengalokasikan anggaran pada Dinas Pertanahan untuk mendukung pendanaan sertifikasi BMD;
4. Pemanfaatan BMD di utamakan untuk peningkatan penerimaan daerah;
5. Ketepatan waktu penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tahun selanjunya paling lambat pada minggu ke-4 bulan Juni tahun berjalan;
6. Ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaian laporan BMD ke Kemendagri, untuk laporan BMD semester II tahun sebelumnya dilaporkan paling lambat 1 bulan sejak diterima LHP BPK, untuk laporan semester I tahun berjalan dilaporkan paling lambat minggu ke-4 bulan Agustus tahun berjalan;
7. Melaksanakan rekonsiliasi dan inventarisasi BMD sehingga mendorong kepatuhan pencatatan BMD sebagai pelaksanaan aspek pengamanan BMD termasuk menunjukkan inventarisasi BMD bermasalah, rekonsiliasi dapat dilaksanakan per triwulan atau semester dalam tahun berjalan;

8. Melaksanakan penertiban BMD dengan menandatangani Berita Acara Penggunaan BMD;
9. Menindaklanjuti hasil reviu inspektorat terhadap pengelolaan BMD.

7. Area Optimalisasi Penerimaan Daerah

A. Kerawanan Korupsi

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan korupsi, pada area Optimalisasi Penerimaan Daerah masih ditemukan potensi korupsi terutama penyuapan/pemerasan/gratifikasi maupun penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah terutama **kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah**, maupun **penagihan piutang pajak dan retribusi daerah**. Kedua hal tersebut tersebut menjadi prioritas dan sasaran pencegahan korupsi pada area Optimalisasi Penerimaan Daerah yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kebocoran penerimaan daerah dan menurunkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Masing – masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada penerimaan pajak dan retribusi daerah secara umum antara lain:

1. Penerimaan pajak dan retribusi tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah dan masuk dalam kantong pribadi petugas pajak. Dalam hal ini modus yang sering dilakukan adalah pembayaran pajak dan retribusi secara manual;
2. Penyuapan/gratifikasi kepada pegawai Pemda agar pembayaran pajak dan retribusi dapat dikurangi dari pembayaran yang sesungguhnya;
3. Database pajak dan retribusi yang tidak di mutakhirkan secara berkala, sehingga potensi penerimaan pajak dan retribusi tidak terpetakan dengan baik;
4. Karena pembayaran pajak bersifat self assessment, penerimaan pajak tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah karena disembunyikan/tidak seluruhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak;
5. Nilai dasar pengenaan pengenaan pajak dan retribusi tidak dievaluasi secara berkala berdasarkan data terkini karena ada kepentingan tertentu;
6. Pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah tidak dilakukan sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
7. Penetapan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan tidak optimal sehingga mengurangi potensi penerimaan pemda;

8. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak atas kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

b. Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah

Permasalahan dan kerawanan korupsi yang masih ditemukan pada proses penagihan piutang pajak dan retribusi daerah secara umum antara lain:

1. Benturan kepentingan dan campur tangan pihak-pihak yang memegang kekuasaan sehingga memunculkan hambatan non teknis dalam proses penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;
2. Penyuapan/gratifikasi kepada pegawai Pemda agar pembayaran piutang pajak dan retribusi dapat dikurangi dari pembayaran yang sesungguhnya;
3. Tidak ada peraturan daerah maupun pedoman teknis yang mendukung penegakan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban piutang pajak dan retribusi daerah;
4. Database piutang pajak dan retribusi yang tidak dimutakhirkan secara berkala, sehingga potensi piutang pajak dan retribusi tidak terpetakan dengan baik.

B. Startegi Mewujudkan MCSP

Penerimaan Derah adalah semua pendapatan yang masuk ke Kas Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di suatu daerah. Penerimaan Daerah terdiri dari **Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah**. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari SILPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaam kembali pemberian Pinjaman Daerah dan/atau, Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarakan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan oleh Bupati (PBB-P2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB).

Sedangkan Pajak yang dipungut berdasarakan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak yaitu (BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak MBLB, dan Pajak sarang burung wallet)

Retribusi Daaerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan

oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi terdiri dari beberapa jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemandirian Fiskal Kabupaten Aceh Barat masih sangat rendah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, untuk itu, potensi dan sumber pendapatan yang ada harus kita maksimalkan dengan melakukan langkah-langkah pembaharuan terhadap tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah, diantaranya yaitu :

1. Transparansi pajak daerah dengan menciptakan Database Pajak Daerah yang lengkap dan akurat berbasis elektronik, yang dapat dimutakhirkan secara berkala;
2. Menciptakan sistem pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mudah diakses oleh wajib pajak;
3. Menetapkan regulasi dan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Membuat SOP tentang Tata Cara Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Memberikan Sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang menunggak Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Menginventarisir dan melakukan penagihan terhadap piutang Pajak dan Retribusi Daerah
7. Menciptakan Inovasi dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran pajak daerah yang turut memberikan dampak terhadap peningkatan pajak daerah;
8. Menindaklanjuti hasil pengawasan internal.

8. Area Penguatan APIP

A. Kerawanan Korupsi

Area Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat pengawasan APIP dalam rangka pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Dalam melakukan pengawasan, terdapat beberapa permasalahan antara lain:

a. Jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia APIP masih kurang memadai sehingga tugas pengawasan masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan termasuk masih kurang memadainya kualitas tugas pengawasan yang dilaksanakan;
b. APIP masih belum didukung dengan anggaran yang memadai sehingga kurang optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan.
c. APIP masih berhadapan dengan permasalahan independensi dan objektivitas sehingga hasil pengawasan kurang berdampak pada perbaikan termasuk penajaman upaya pemberantasan korupsi.
d. APIP belum didukung dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang memadai dalam rangka mendorong independensi dan

objektivitasnya. e. APIP belum optimal didukung dengan sarana dan prasarana serta dukungan sekretariat untuk melaksanakan pengawasan yang efektif.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, KPK telah mendorong penguatan regulasi dan beberapa upaya lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2024, KPK bersama Kemendagri dan BPKP menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/ SJ dan Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama KPK, Kemendagri dan BPKP tersebut maka prioritas area Pengawasan APIP difokuskan pada 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Aspek Anggaran;
   - Kecukupan anggaran APIP
   - Anggaran Sarana dan Prasarana
2. Aspek Sumberdaya Manusia;
   - Kecukupan Kualitas SDM
   - Peningkatan Kompetensi SDM
   - Dukungan pelaksanaan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat
3. Aspek Independensi dan Objektivitas;
   - Akses Langsung dan Tak Terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter (IAC)
   - Pengawasan Dugaan Penyimpangan
   - Pengisian Jabatan Inspektur dan atau Irbansus
4. Aspek Peran dan Layanan.
   - Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR)
   - Penanganan pengaduan Berkadar Pengawasan
   - Probity Audit
   - Pengawasan dalam rangka Pencegahan Korupsi
   - Tidak Lanjut SPI

B. Startegi Mewujudkan MCSP

1. Aspek Anggaran
   - Terpenuhi kecukupan anggaran dan sarana prasarana dalam rangka pengawas APIP
2. Aspek Sumber Daya Manusia
   - Terpenuhinya kuantitas SDM;
   - Peningkatan Kompetensi SDM APIP sesuai ketentuan;
   - Dukungan pelaksanaan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat.
3. Aspek Independensi dan Objektivitas

- Akses Langsung dan Tak Terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan
  Internal Audit Charter (IAC);
- Pengawasan Dugaan Penyimpangan;
- Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Irbansus.

4. Aspek Peran dan Layanan
   - Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR);
   - Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan;
   - Probity Audit pada pengadaan Strategis Daerah;
   - Pengawasan dalam Rangka Pencegahan Korupsi;
   - Tindak Lanjut Sistem Pengendalian Internal.

3.3.15 Peningkatan Mutu Pendidikan

3.3.15.1 Upaya dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam Pembangunan daerah. Pendidikan merupakan jalan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mutu pendidikan juga harus terus ditingkatkan baik dari kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan . Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, maka capaian Mutu Pendidikan saat ini dapat dilihat berdasarkan capaian rapor pendidikan daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2025, posisi Rapor pendidikan Aceh Barat mencapai 60,21 %. Nilai capaian ini turun jika dibandingkan capaian Rapor pendidikan Aceh Barat pada tahun 2024 sebesar 62,80 %. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Aceh, Aceh Barat meduduki pada urutan yang paling rendah dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Tabel 3.30 Capaian Rapor Pendidikan Kab/Kota se Aceh Tahun 2025

No.	Kab/Kota	Nilai Rapor pendidikan	Predikat
1	Aceh Jaya	78,81	Tuntas Pratama
2	Sabang	78,65	Tuntas Pratama
3	Banda Aceh	75,31	Tuntas Pratama
4	Langsa	72,18	Tuntas Pratama
5	Aceh Besar	71,87	Tuntas Pratama
6	Bener Meriah	71,71	Tuntas Pratama
7	Lhokseumawe	71,18	Tuntas Pratama
8	Aceh Tamiang	70,87	Tuntas Pratama
9	Pidie Jaya	69,89	Tuntas Muda
10	Aceh Tengah	69,81	Tuntas Muda
11	Pidie	68,9	Tuntas Muda
12	Simeulue	68,73	Tuntas Muda
13	Aceh Barat Daya	66,82	Tuntas Muda
14	Aceh Timur	66,26	Tuntas Muda
15	Aceh Selatan	65,7	Tuntas Muda
16	Bireun	65,43	Tuntas Muda

No.	Kab/Kota	Nilai Rapor pendidikan	Predikat
17	Aceh Singkil	65,01	Tuntas Muda
18	Gayo Lues	64,96	Tuntas Muda
19	Subulussalam	62,77	Tuntas Muda
20	Aceh Tenggara	61,42	Tuntas Muda
21	Nagan Raya	62,32	Tuntas Muda
22	Aceh Utara	60,61	Tuntas Muda
23	Aceh Barat	60,21	Tuntas Muda

Sumber : LPMP Aceh, 2025

Data pada tabel diatas disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini, yang menunjukkan bahwa capaian Rapor Pendidikan Kab. Aceh Barat berada dibawah garis 60.

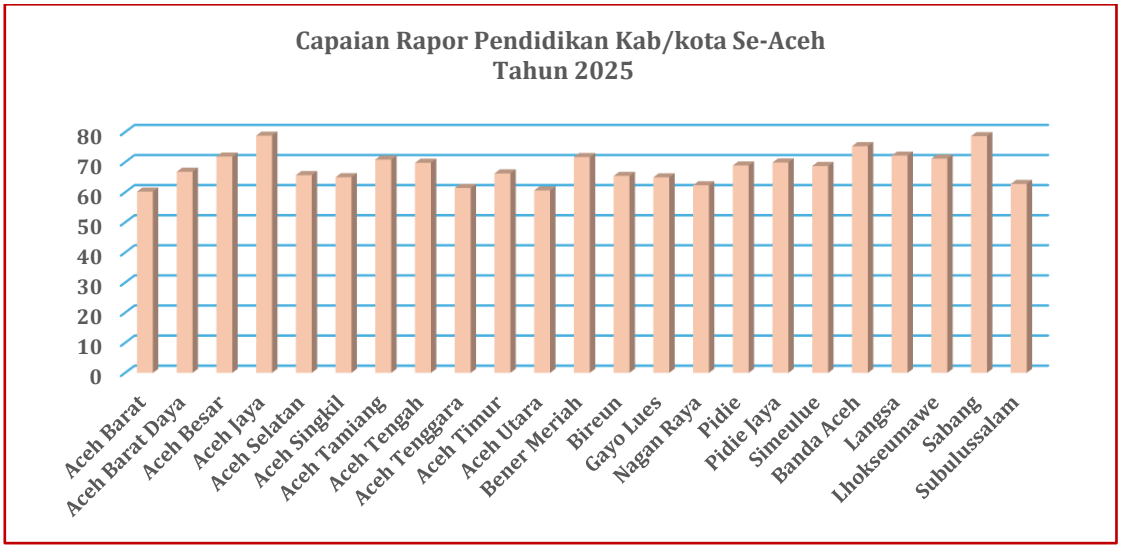

Gambar 3.42
Grafik Capaian Rapor Pendidikan Kab/Kota se-Aceh Tahun 2025.

Berdasarkan hasil rapor Pendidikan Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 terdapat beberapa aspek yang mendapatkan skor capaian terendah yaitu pertama pada jenjang PAUD mendapatkan skor terendah pada indikator proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4. Kedua pada jenjang SD Umum dengan capaian terendah pada indikator kemampuan numerasi. Kemudian yang ketiga pada jenjang SMP Umum yang terendah juga pada kemampuan numerasi. Meskipun terjadi kenaikan nilai kemampuan numerasi pada jenjang SD dari tahun 2023 ke tahun 2024 menjadi sebesar 35,46%, tetapi nilai ini masih masuk dalam peringkat bawah secara nasional. Pada jenjang SMP mendapatkan peningkatan skor dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 6,74 % dan mendapatkan peringkat menengah bawah yaitu sebesar 51,53%. Hasil rapor pendidikan kabuaten Aceh Barat ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk selalu berupaya untuk secara konsisten melakukan peningkatan mutu pendidikan daerah.

Adapun beberapa srategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan aspek Guru, Sarana dan Prasarana, Sistem Pendidikan, Siswa dan Lingkungan sebagai berikut :

1. **Guru**

   Peningkatan Kompetensi Guru

   Kompetensi menjadi aspek penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada aspek guru ini menjadi upaya pembenahan padacapaian kualifikasi guru yang dinilai masih rendah berdasarkan Rapor Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024. Distribusi ini diprioritaskan bagi jenjang PAUD, dimana berdasarkan hasi rapor bahawa kualifikasi Guru PAUD di kabupaten Aceh Barat dengan kualifikasi S1/D4 masih kurang. Kemudian pada jenjang SD dan SMP kualifikasi guru D4/S1 dinilai mencukupi secara jumlah. Kompetensi Guru bukan hanya dilihat dari aspek kualifikasi pendidikan akhir namun juga dari sertifikasi dosen yang telah diperolah oleh setiap guru baik pada jenjang dasar dan menengah.

   Adanya sertifikasi guru yang dimiliki menujukkan kompetensi yang dimiliki guru, namun terlepas dari itu guna menunjang capain idikator literasi dan numerasi maka diperlukan kompetensi melalui pelatihan sesuai dengan kebutuhan para guru seperti pelatihan literasi numerasi, pembelajaran berdiferensiasi, atau penggunaan teknologi pembelajaran terintegrasi, ataupun bentuk pelatihan kolaborasi dengan lembaga lainnya, ataupun pelatihan yang diberikan secara berkelanjutan untuk peningkatan profesionalisme guru pada PAUD, SD dan SMP.

2. **Sarana dan Prasarana**

   a. **Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Prasarana mendukung literasi dan numerasi**

      Pada upaya ini perlu untuk dilakukan, guna meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, seperti penyediaan perangkat internet sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Kondisi infrastruktur dan Sarpras yang memadai sangat menunjang pelaksanaan pembelajaran kepada siswa. Selain itu dapat memaksimalkan pengajaran yang dilakukan oleh guru dalam sekolah dengan metode yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Bukan hanya guru bahkan siswa juga akan lebih termotivasi untuk belajar dengan maksimal sehingga nantinya dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Oleh sebab itu keberadaan ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan menjadi sebuah keharusan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di semua tingkatan. Tambah komputer

   b. **Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan**

      Strategi peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan ini bukan hanya dilakukan pada daerah perkotaan namun lebih kepada meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan, terutama di daerah

terpencil dan kurang terlayani. Hal tersebut dilakukan dengan Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah

Pembangunan dan rehabilitasi sekolah dapat dilakukan dengan mendirikan unit sekolah baru (USB) di wilayah yang belum memiliki fasilitas Pendidikan, melakukan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak atau tidak layak pakai, dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, toilet, dan air bersih.

c. Pemanfaatan Teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan

Pemanfaatan teknologi ini dilakukan dengan penyediaan perangkat digital, fasilitas internet sekolah, dan sistem pembelajaran daring dengan menyediakan aplikasi atau *learning system* yang terintegrasi dan dapat diakses progressnya bersama dengan orang tua murid. Selain itu juga strategi ini dilakukannya dengan adanya Gerakan Literasi Digital dan Sekolah Digital di beberapa daerah, sehingga dapat mengoptimalkan program pemanfaatan teknologi dalam pendidikan di tingkat daerah**.**

3. Sistem Pendidikan

a. **Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan**

Mengembangkan mutu Pendidikan melalui kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan global, serta meningkatkan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Kurikulum harus mencerminkan karakteristik budaya, potensi ekonomi, dan masalah sosial daerah, misalnya dengan muatan lokal seperti Bahasa Aceh, nilai-nilai adat dan budaya lokal Aceh.

Pengembangan Kurikulum pada sekolah-sekolah perlu untuk dipetakan berdasarkan kebutuhan lokal dan tren global untuk meningkatkan kualitas Pendidikan yang diberikan. Selain itu dalam penyusunan kurikulum perlu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Implementasi kurikulum dilakukan dengan berbasis proyek sesuai dengan tingkatan pendidikan untuk mendukung pembelajaran kontekstual. Setelah kurikulum diimplementasikan maka pengembangan dilakukan dengan adanya evaluasi secara berkala untuk dapat melihat ketercapaian target dalam pelaksanaan kurikulum dan juga selalu dapat menyesuaikan kebutuhan kondisi lokal dan global. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah dapat dilakukan oleh pendamping satuan pendidikan secara berkala, dan hasil rekomendasi ataupun program tindak lanjut dapat dilaporkan secara langsung pada sekolah dan Dinas Pendidikan. Keberadaaan Pendamping Satuan pendidikan dapat membantu memperkuat sekolah, memberikan bimbingan yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi satuan dengan metode pendampingan tertentu sehingga tercipta sinergitas dalam pencapaian mutu pendidikan.

b. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Penguatan tata kelola dan akuntabiitas ini dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, termasuk penggunaan

anggaran dan manajemen sekolah. Hal tersebut perlu untuk dilakukan agar dapat menunjang kinerja dari guru sebagai SDM utama dalam peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Anggaran yang disediakan dapat dialokasikan secara maksimal untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan meingkatkan kompetensi guru baik dalam memberikan pengajaran maupun mengelola sekolah, selain itu anggaran yang telah disusun berdasarkan Rencana Pembenahan yang tertuang pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai upaya tidak lanjut atas capaian Rapor Mutu Pendidikan sebelumya. Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas ini juga dapat dilakukan dengan desentralisasi dan otonomi pendidikan, sistem pengawasan intenal dan eksternal, Digitalisasi manajemen pendidikan, peningkatan kapasitas pengelola, tranparansi informasi melalui media sosail muapun website, peningkatan partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan , maupun dengan monev berbasis data seperi Rapor Pendidikan yang selama ini sudah dilakukan.

4. Siswa

a. Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan
   Startegi ini dilakukan dengan pemberian bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban biaya Pendidikan dan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu atau daerah 3T agar tetap melanjutkan sekolah. Pemberian beasiswa ini dapat dikolaborasikan dengan dana non APBD lainnya seperti dari ZIS maupun dana CSR dari perusahaan yang ada pada wilayah Kabupaten Aceh Barat.

b. Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan
   Pendidikan inklusif dan kesetaraan ini dilakukan dengan menyediakan layanan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, menyediakan program Paket A, B, dan C untuk anak yang putus sekolah agar bisa kembali belajar, dan Sekolah terbuka atau *home learning* dengan sistem daring/luring kombinasi di daerah sulit akses. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin pemerataan Pendidikan bagi seluruh masyarakat.

5. Lingkungan

Lingkungan menjadi aspek yang mendukung dan menguatkan implementasi kebijakan pemerintah. Kondisi lingkungan yang medukung peningkatan mutu pendiidkan suatu daerah menjadi faktor pendorong keberhasilan maupu kegagalan pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu untuk memperhatikan kondisi lingkungan guna meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Strategi yang dapat dilakukan dalam pada aspek lingkungan dengan melalui:

a. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan untuk Anak
   Kondisi tingkat pendidikan yang berbeda di masyarakat mengakibatkan pemahaman tentang pendidikanpun juga berbeda. Oleh sebab itu pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi, maupun organisaasi peduli pendidikan

untuk dapat melakukan edukasi baik secara langsung maupun melalui produk kampanye pendidikan melalui media online ataupun baliho, poster dan sebagainya diberbagai wilayah Kabupaten Aceh Barat.

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, orang tua, dan sektor swasta dalam mendukung dan memajukan pendidikan di daerah.

3.3.15.2 Arah Kebijakan Mutu Pendidikan

1. Guru

Arah kebijakan mutu pendidikan pada aspek guru yaitu mengarah pada Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan. Arah kebijakan ini dengan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier yang berkelanjutan. Guru dan tenaga kependidikan adalah aktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Mutu pembelajaran sangat ditentukan oleh kompetensi, komitmen, dan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, penguatan tersebut menjadi prioritas strategis nasional, terutama dalam konteks transformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada hasil belajar murid. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan adalah pilar utama reformasi pendidikan nasional. Strategi ini tidak hanya fokus pada kualifikasi D4/S1 pada guru PAUD, sertfikasi guru, pelatihan teknis, tetapi juga menciptakan budaya belajar sepanjang hayat bagi para guru, memperkuat profesionalisme, serta memastikan bahwa setiap anak di mana pun berada dapat memperoleh layanan pendidikan bermutu dari guru yang berkualitas dan berdedikasi. Peningkatan ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru secara berkelanjutan, mewujudkan sistem karier dan kesejahteraan yang adil dan berbasis kinerja, mengembangkan ekosistem pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan yang kolaboratif dan berbasis data serta menjamin ketersediaan dan pemerataan distribusi guru berkualitas di daerah.

2. Sarana dan Prasarana

Arah kebijakan mutu pendidikan pada aspek sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan mendukung proses pembelajaran yang efektif, inklusif, dan berkeadilan. Tujuannya ialah untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan dukungan fasilitas modern, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Pada prinsipnya arah kebijakan pada aspek sarana dan prasarana pendidikan ini mengacu pada ketersediaan sarana dan prasaran yang layak pada seluruh satuan pendidikan memenuhi standar pendidikan, mengakomodir perkembangan IPTEK dan kebutuhan zaman, dan ramah lingkungan. Pada pelaksanaan kebijakannya pemerintah daerah perlu untuk berkolaborasi lintas sektor, penyelenggaraan sarpras berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan, peningkatan kapasitas pengelola, adanya

pembiayaan prioritas bagi sekolah rusak berat, serta pemantauan dan evaluasi berkala dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

3. Sistem Pendidikan

Arah kebijakan mutu pendidikan pada aspek sistem pendidikan ini mengarah pada digitalisasi manajemen pendidikan, penguatan program sekolah, dan monev berbasis data yang ketiganya secara komprehensif dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

a. Digitalisasi Manajemen Pendidikan

Arah kebijakan pada digitaliasasi ialah dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik, sesuai dengan kebijakan nasional. Digitalisasi manajemen pendidikan adalah proses penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengelolaan pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan, daerah, maupun nasional. Ini mencakup semua aspek pengelolaan: administrasi, keuangan, akademik, SDM, sarana-prasarana, dan evaluasi pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pendidikan, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, menyediakan data real-time dan akurat, mempercepat transformasi layanan pendidikan menuju sistem berbasis teknologi, dan mempermudah kolaborasi antara pemangku kepentingan (sekolah, orang tua, pemerintah, masyarakat). Digitalisasi manajamen pendidikan ini dapat dilakukan dari berbagai aspek seperti infrastruktur, SDM yang kompeten, sistem digital, regulasi, dan dukungan teknis seperti Tim IT Pendamping di Aceh Barat. Digitalisasi manajemen pendidikan bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi transformasi menyeluruh terhadap cara kerja lembaga pendidikan. Arah kebijakan ini menuntut kolaborasi lintas sektor, dukungan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan kapasitas SDM yang kompeten dalam pengoperasioan digitaliasai manajemen pendididikan agar dapat menciptakan sistem pendidikan yang tangguh, adaptif, dan berkualitas di era digital.

b. Penguatan Program Sekolah

Arah kebijakan dari penguatan program sekolah ialah untuk mendukung sekolah-sekolah untuk menjadi pelopor dalam inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Penguatan Program Sekolah berfokus pada mendorong satuan pendidikan (sekolah) agar tidak hanya menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan penggerak perubahan dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekolah didorong untuk lebih otonom, adaptif, dan kreatif dalam merancang program yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokalnya, bukan bersifat administratif dan reaktif terhadap kebijakan pusat.

Tujannya ialah untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pengembangan kualitas pembelajaran dan karakter peserta didik, memberikan ruang bagi

sekolah untuk berinovasi dan menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal dan global, mendorong kolaborasi antar sekolah, guru, masyarakat, dan dunia usaha/industri, dan memperkuat manajemen berbasis sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah. Penguatan program Sekolah ini dapat dilakukan dengan memperkuat prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), fleksibilats pengelolaan anggaran, Mendorong inovasi Pembelajaran Proyek sekolah (PJBl), contohnya sekolah mengembangkan program wirausaha siswa, kewirausahaan sosial, ekoliterasi, atau program literasi dan numerasi kontekstual, adanya ekosistem kolaboratif sekolah dengan mitra lainnya. Tentunya penguatan program ini perlu diintegrasikan oleh APBD daerah.

c. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

Arah Kebijakan dari monitoring dan evaluasi berbasis data ini ialah menggunakan data dan informasi yang akurat untuk merancang kebijakan dan program pendidikan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen pendidikan tentunya memerlukan proses monitoring dan evaluasi guna memastikan ketercapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kesesuaian aturan dengan pelaksanaan juga dilihat dalam kegiatan moniroeing ini. Monitoring pendidikan merupakan proses pemantauan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbasis data maupun informasi yang telah tersedia seperti dapodik maupun pelaksanaan Standar nasional pendidikan. Evaluasi adalah proses menilai capaian hasil terhadap tujuan atau standar mutu pendidikan, seperti melalui rapor pendidikan , maupun Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Tujuan monev ini ialah untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan satuan pendidikan secara spesifik, menyediakan dasar perumusan kebijakan yang tepat dan berbasis bukti *(evidence-based policy*), dan mendorong perbaikan berkelanjutan di sekolah dan dinas pendidikan daerah.

Monitoring dan Evaluasi Berbasis data ini dapat berhasil apabila terdapat kelengkapan data dan validitas dapodik, terdapat kesesuain hasil Rapor pendidikan dengan perencanaan sekolah yang terdokumentasi dalam RKAS dan RTL, meningkatnya jumlah sekolah yang menyusun program berbasis data, partisipasi Dinas Pendidikan yang selalu aktif memfasilitasi dan menindaklanjuti, serta penggunaan dashboard dan sistem monitoring daerah yang diakses datanya secara berkala Beberapa upaya dapat dilakukan melalui :

1) Penguatan Sistem Informasi dan Data Pendidikan Daerah

Penguatan sistem informasi dan data pendidikan di tigkat daerah ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sistem data seperti Dapodik, Rapor Pendidikan, Education Management Information System (EMIS), maupun Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Selain itu juga perlu adanya penyediaan dashboard pendidikan daerah yang update

akan data dan informasi, serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola data pendidikan di daerah.

2) Pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai Instrumen Evaluasi Utama
Rapor Pendidikan adalah alat bantu analisis dan refleksi berbasis data yang digunakan oleh sekolah, dinas pendidikan, dan pemangku kebijakan untuk mengukur capaian mutu pendidikan, mengidentifikasi akar masalah pendidikan, dan menyusun program perbaikan yang berbasis data. Rapor ini sebagai peta mutu yang menunjukkan posisi capaian dan area yang perlu ditingkatkan. Rapor Pendidikan disusun sebagai alat strategis untuk mendorong perbaikan mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan, Dengan memanfaatkan data yang tersedia, sekolah dan pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat, berbasis masalah nyata, dan berorientasi pada hasil belajar murid. Hasil rapor pendidikan ini, selanjutnya digunakan untuk menyushun program sebagai upaya pembenahan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), Rencana Tindak Lanjut Daerah (RTL), dan perencanaan program afirmatif.

3) Penguatan Evaluasi Diri Sekolah dan Analisis Mutu
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan secara periodik oleh sekolah, selain itu analisis mutu juga dilakukan oleh sekolah, dengan menyusun Program Berbasis Data (PBD) yang merujuk pada hasil evaluasi, yang selnjutnya Dinas pendidikan memberi pendampingan dan supervisi berbasis data mutu, sehingga peningkatan mutu terus dilakukan secara berkesinambungan.

4) Digitalisasi Proses Monev
Penggunaan aplikasi dan sistem digital untuk Pelaporan program dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), Penilaian kinerja guru/kepala sekolah, Penelusuran efektivitas dana BOS serta guna menunjang digitalisasi perlu adanya pelatihan operator dan tenaga teknis agar mampu menggunakan aplikasi data secara optimal.

Monitoring dan Evaluasi berbasis data merupakan pondasi dalam kebijakan pendidikan yang efektif. Tanpa adanya ketersediaan data yang baik dan analisis yang kuat, maka kebijakan pendidikan akan bersifat spekulatif dan tidak terarah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti, serta mendayagunakan teknologi informasi untuk mendukung transformasi mutu pendidikan yang berkelanjutan.

4. Siswa

Arah kebijakan mutu pendidikan pada aspek siswa merupakan inti dari peningkatan kualitas pendidikan, karena siswa adalah subjek utama dalam proses belajar. Kebijakan ini berfokus pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh agar menjadi individu yang cerdas, berkarakter, sehat, dan kompeten di era global. Oleh sebab itu prinsip dari arah kebijakan ini ialah bersifat *student centre*

learning (SCL), inklusivitas dan berkeadilan, pengembangan secara holistik, dan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan setara.

Oleh sebab itu, perlu kebijakan afirmatif untuk memastikan bahwa setiap anak dapat belajar dan berkembang sesuai potensinya. Pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari sistem pendidikan, menjamin akses dan partisipasi aktif semua anak, termasuk kelompok rentan, membangun sistem pendidikan yang ramah terhadap keberagaman (gender, budaya, kebutuhan khusus), dan memberikan dukungan afirmatif dan adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau dalam kondisi rentan. Pelayanan yang diberikan bukan hanya sekedar infrasturktur sekolah yang merata dan memadai, namun juga ketersediaan dan pelayanan guru, kebijakan yang inklusif, teknologi yang menunjang pendidikan, serta kolaborasi yang menunjang pelayanan pendidikan tingkat daerah. Beberapa komponen terkait arah kebijakan peningkatan mutu pendidikan ini berupa :

a. Penguatan Karakter Islami dan Profil Pelajar Pancasila yang dilakukan dengan pembiasaan kegiatan yang menumbuhkan karakter seperti gotong royong, integritas, dan tanggung jawab sehingga menumbuhkan dan mengamalkan nilai syariat islam dan nilai-nilai pancasila dalam keseharian siswa.

b. Kesehatan dan Gizi Siswa yang dilakukan dengan pemberian makanan bergizi gratis untuk siswa PAUD dan SD, pemeriksaan kesehatan berkala bekerja sama dengan puskesmas daerah, adanyan layanan psikososial, serta pencegahan dan penangan kekerasan serta perundungan siswa.

c. Pembinaan Minat, Bakat, dan Prestasi yang dilakukan dengan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, pengembangan bakat dengan mengikuti lomba-lomba tingkat regional, nasional dan internasional maupun memfasilitasi sisiwa berbakat dari kelurga tidak mampu untuk mengakses pendidikan ke jenjang berikutnya.

d. Perlindungan dan Keamanan Peserta Didik yang dilakukan dengan penerapan sekolah ramah anak, penegakan aturan anti diskriminasi, kekerasan seksual, perundungan dan eksploitasi, serta penguatan guru BK dan konselor sekolah.

e. Inklusi dan Layanan Pendidikan Khusus yang dilakukan dengan dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyediaan guru pendamping khusus dan sarana pembelajaran yang adaptif.

f. Dukungan Psikososial dan Kesehatan Mental yang dilakukan dengan melakukan pendampingan psikologis melalui layanan konseling dan edukasi kesehatan mental serta melakukan pelatihan guru dalam identifikasi masalah mental dan pembinaan perilaku siswa.

5. Lingkungan

Arah kebijakan peningkatan mutu pada aspek lingkungan ini mengarah pada pembentukan ekosistem pendidikan yang kondusif, aman, sehat, ramah anak, dan berkelanjutan, serta mendukung perkembangan optimal peserta didik secara

menyeluruh, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Lingkungan pendidikan yang dimaksud adalah seluruh kondisi fisik, sosial, dan psikologis di dalam dan sekitar sekolah yang mempengaruhi proses belajar-mengajar. Lingkungan pendidikan yang kondusif bertujuan menciptakan suasana yang mendukung seluruh proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa secara optimal, agar mereka tumbuh menjadi insan yang cerdas, sehat, tangguh, dan berakhlak mulia. Beberapa arahnya meliputi :

a. Mewujudkan sekolah yang aman dan ramah anak dengan menerapkan Sekolah Ramah Ranak (SRA), pencegahan kekerasan seksual, fisik,verbal dan perundungan, serta dengan penguatan regulasi terkait perlindungan peserta didik.
b. Membangun Lingkungan Belajar yang Inklusif dengan memberikan dukungan kepada siswa berkebutuhan khusus
c. Mengembangkan Budaya Positif di Sekolah dengan menerapkan nilai-nilai toleransi dan disiplin, serta penguatan budaya sekolah melalui kegiatan rutin, simbol dan keteladanan guru
d. Mewujudkan sekolah yang sehat dan hijau dengan menerapkan sekolah peduli lingkungan, edukasi dan praktik pemeliharaan lingkungan serta penyediaan sanitasi yang baik.
e. Pemanfaatan teknologi untuk lingkungan pembelajaran dengan pengembangan lingkunga belajar digital dan penyediaan ruang belajar denan sistem offline-online yang sehat dan produktif.

3.1.15.2 Program Pembangunan Daerah Terkait Mutu Pendidikan

Adapun program pembangunan daerah terkait peningkatan mutu pendidikan yang dapat dilakukan berdasarkan aspek guru, sarana dan prasarana, sistem pendidikan, siswa, dan lingkungan sebagai berikut :

1. Program bagi Tenaga Pendidik

a. SETARA (Sebaran Tenaga Ajar Merata)

Program Pemenuhan Kebutuhan Guru secara inklusif dan proporsional . Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki jumlah dan kualitas guru serta tenaga kependidikan yang sesuai kebutuhan, adil, dan merata, baik dari sisi jumlah (proporsional) maupun aksesibilitas (inklusif). Penempatan guru didasarkan pada rasio ideal guru-murid, jenis mata pelajaran, dan jenjang pendidikan, tanpa kelebihan atau kekurangan guru secara signifikan. Selain untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru antar daerah dan antar jenjang, program ini juga utuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mneghadirkan guru yang kompeten di semua wilayah.

b. PINTAR (Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Guru)

Merupakan program untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan tenaga Kependidikan. Sertifikasi guru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dasar baik pada aspek literasi yaitu untuk meningktakan kemampuan membaca dan memahami serta numerasi yaitu kemampuan berhitung dan berpikir logis pada siswa. Program ini diberikan kepada guru PAUD, SD, dan SMP, serta tenaga kependidikan agar mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan relevan di era digital melalui komunitas belajar yang aktif dan kolaboratif. pada program ini guru diberikan pelatihan dan pengembagan kompetensi guru melalui pelatihan literasi dan numerasi mandiri, pelatihan media pembelajaran digital, media asessment digital.

c. TERAS (Teman Edukasi dan Belajar di Sekolah)

Merupakan program pendamping guru bagi guru maupun tenaga kepedidikan yang merupakan *fresh graduate* maupun yang dinilai belum berpengalaman. Pendampingan dilakukan oleh guru yang dinilai memiliki kompetensi lebih dan sudah memiliki sertifikasi guru. Metode pendampingan bersifat *mentor dan coaching* untuk mendukung peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

d. BAKTI (Bantuan Kesejahteraan untuk Tenaga Pendidikan dan Medis)

Program ini merupakan pemberian tambahan insentif bagi tenaga pendidikan yang belum mendapatkan sertifikasi guru ataupun yang bertugas pada sekolah di daerah terpencil.

2. Program Bagi Sarana dan Prasarana

a. SELARAS (Sediakan dan Lengkapi Sarana Prasarana Sekolah)

Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, mendukung pembelajaran aktif, dan sesuai standar pendidikan nasional. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas pendidikan, kesetaraan akses, serta pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Lingkup sarana dan prasarana yang ditingkatkan seperti Ruang kelas, Laboratorium, Perpustakaan, Toilet dan sanitasi, ruang guru dan kepala sekolah, askses internet, fasilitas olah raga dan seni, media pembelajaran digital, Sarana ABK,maupun peralatan lainnya yang mendukung pembelajaran. Perencanaan dan pemenuhan berbasis data dan skala prioritas yang kemudian pemerintah daerah juga melakukan survei dan audit berkala, serta pemeberan insentif bagi sekolah yang dapat mengelola sarpras secara efektif.

b. SAINS (Sekolah Andal dan Inklusif bagi Seluruh Siswa)

Program ini merupakan program penyediaan fasilitas gedung sekolah yang memadai dilengkapi dengan sarana prasarana yang disesuikan juga dengan siswa berkebutuhan khusus. Program ini bertujuan untuk mendukung pembelajaran yang inklusif .

3. Program Bagi Sistem Pendidikan

a. BERKAT (Bimbel Edukasi Rakyat tanpa Biaya)

Program ini merupakan penyediaan pelayanan bimbingan belajar secara gratis bagi masyarakat untuk dapat menigkatkan kemampuan iterasi dan numerasi, serta meningkatkan motivasi belajar siswa.

b. Digitalisasi Pendidikan dengan "DIGITAL BELAJAR"

Mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan manajemen pendidikan. Pemasangan WiFi sekolah dan pemasangan wifi berbasis VSAT di sekolah yang belum terjangkau jaringan, penyediaan tablet edukatif dan konten offline (video & *e-book*) dan Pelatihan *digital literacy* untuk guru dan siswa untuk meningkatkan kemampuan digital guru dan siswa.

c. Optimalisasi Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran secara rutin dan berkelanjutan

Program ini berfokus pada pada proses introspeksi, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan oleh guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Program ini merupakan implementasi dari prinsip *Continuous Professional Development (CPD)* dan berorientasi pada perbaikan praktik pembelajaran berdasarkan data dan pengalaman nyata di kelas.Program ini bertujuan untuk mendorong budaya reflektif dilakangan pendidik, mengoptimalkan peran guru sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran yang adaptif. Adapun beberapa tahapan yang dapat dilakukan diaeali dengan perencanaan dan penjadwalan, pelaksanaan pembelajaran, refeleksi mandiri dengan menganalisis hasil belajar dengan RPP, diskusi kolektif sesama guru untuk mendapat umpan balik, perbaikan RPP, dan implementasi perbaikan.

d. Layanan Pengaduan Penyelenggaraan Pendidikan tingkat daerah

Program ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan aduan masyarakat terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Program ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif. Permasalahan yang terjadi seperti : pungli, perundungan, kekerasan, ketidaklayakan fasilitas, tindakan tidka profesionalnya guru dan tenaga pendidik, dan penyalah gunaan lainnya daat dilaporkan melalui call centre resmi daerah melalui WA , telepon, aplikasi ataupun secara langsung melapor dan direspon cepat oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

e. Penguatan Peran Pendamping Satuan Pendidikan

Program ini merupakan upaya dalam melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan tingkat daerah. Satuan Penjamin mutu pendidikan dasar ini menjadi tim pengendali mutu layanan pendidikan tingkat daerah. Anggota satuan merupakan personil daerah yang terdiri dari para pengawas sekolah, perwakilan

dinas pendidikan, maupun dapat dari akademisi yang kompeten dibidang manajemen pendidikan yang memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Satuan ini bertugas untuk menyusun panduan monev, instrumen monev dan melakukan monev secara berkala ke suluruh pendidikan dasar tingkat daerah dan melaporkan langsung hasil monev kepada Kepala daerah

4. Program Bagi Siswa

a. PRESTASI (Program Beasiswa untuk Siswa Miskin Berprestasi)

Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SD hingga SMA dengan status kurang mampu, yang meliputi biaya seragam, buku, transportasi, dan SPP yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah. Sumber dana beasiswa ini dapat bersinergi dengan dana APBD, CSR perusahaan, dan ZIS daerah, sehingga dengan penambahan dana dari berbagai sumber dapat memaksimalkan jumlah penerima beasiswa tersebut.

b. BUPENA (BUS GRATIS UNTUK PENDIDIKAN)

Program ini merupakan penyediaan kendaraan antar-jemput bagi siswa di wilayah dengan jarak tempuh jauh ke sekolah yang disediakan oleh Pemerintah daerah, seperti **mobil/minibus khusus** dengan biaya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD.

c. BALSEM (Bantuan Alat Perlengkapan Sekolah bagi Keluarga Miskin)

Program ini merupakan program pemberian alat perlengkapan sekolah bagi keluarga miskin. Program ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa dalam pemenuhan kebutuhan sekolah dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Peralatan diberikan setiap kenaikan kelas oleh Pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak setiap sekolah. Setiap sekolah memberikan data kepada pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang telah ditentukan. Kemudian berdasarkan data tersebut, maka bantuan akan diberikan kepada setiap sekolah untuk disalurkan langsung kepada siswa yang bersangkutan.

5. Program Bagi Lingkungan

a. Program Keamanan, Inklusivitas dan Kebhinekaan pencegahan Diskriminasi di Lingkungan Sekolah

Program ini berfokus pada menciptakan ekosistem sekolah yang aman secara fisik dan psikologis, menjunjung nilai keberagaman, serta mencegah segala bentuk diskriminasi, perundungan, kekerasan, intoleransi, dan marginalisasi terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik. Program ini perlu didukung dengan adanya kebijakan sekolah ramah inklusif dan anti diskriminasi, dimana daderah erlu menyusun pedoman perlindungan anak dan kebijakan perlakuan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus, serta pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat daerah sesuai Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 . Perlu adanya keterliabatan orang tua

dalam menjamin keamanan dan inklusivitas sekolah dengan pengawsan bersama melalui sebuah platform pengaduan ataupun layanan pengaduan dan konseling yag difasilisatsi oleh tenaga profesional daerah

b. Edukasi Pendidikan melalui Duta Pendidikan

Peningkatan partisipasi sekolah perlu ditingkatkan melalui kampanye kesadaran Pendidikan yang dilakukan oleh OPD terkait dengan program "Duta Pendidikan" . duta pendidikan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, sebagai ambasador daerah dalam mengajak masyarakat untuk sadar akan pendidikan dari usia dini hingga perguruan tinggi. Edukasi maupun Kampanye dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial yang dimiliki, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga angka partisipasi sekolah dapat lebih meningkat.

3.1.16 Peningkatan Kualitas Kesehatan

3.3.16.1 Kriteria Kualitas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tanpa masyarakat yang sehat, segala aspek pembangunan baik ekonomi, pendidikan, maupun sosialtidak akan dapat tumbuh secara optimal. Dalam konteks ini, teori determinan kesehatan dari H.L. Blum (1974) memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Teori ini menekankan bahwa kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Dalam pengukuran praktis, derajat kesehatan sering kali direpresentasikan melalui indikator-indikator kuantitatif seperti angka harapan hidup (AHH), angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), ketersediaan dan kualitas tenaga serta fasilitas layanan kesehatan, serta status gizi kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Berikut gambaran profil kesehatan Kabupaten Aceh Barat yang menjadi dasar penting dalam menganalisis kondisi kesehatan saat ini, sehingga dapat memudahkan perumusan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator makro paling penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu daerah. AHH mencerminkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian yang berlaku saat ini akan tetap konstan sepanjang hidupnya. Semakin tinggi angka ini, semakin baik pula kualitas kesehatan dan pelayanan publik yang tersedia di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat tahun 2025, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan yang konsisten pada Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2022, AHH tercatat sebesar 71,76 tahun, meningkat menjadi 71,89 tahun pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 72,03 tahun pada tahun 2024. Tren kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam sektor kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 73,06 tahun, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif dan terarah dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan AHH agar dapat mendekati atau bahkan melampaui rata-rata nasional.

Peningkatan AHH tidak terlepas dari perbaikan dalam berbagai aspek penentu kesehatan, seperti akses terhadap layanan kesehatan dasar, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, intervensi gizi, serta program pencegahan dan pengendalian penyakit. Oleh karena itu, tren positif ini perlu dijaga melalui kebijakan kesehatan yang berkelanjutan, penguatan sistem pelayanan kesehatan primer, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga kesehatan individu dan komunitas.

Tabel 3.31 Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	69,22	69,24	69,44	69,57	69,69
Aceh Singkil	69,45	69,49	69,72	69,85	69,96
Aceh Selatan	69,85	69,91	70,15	70,49	70,33
Aceh Tenggara	72,08	72,16	72,43	72,62	72,75
Aceh Timur	71,78	71,80	72,00	72,13	72,24
Aceh Tengah	72,61	72,62	72,81	72,93	73,04
Aceh Barat	71,56	71,57	71,76	71,89	72,03
Aceh Besar	72,78	72,79	72,97	73,11	73,24
Pidie	69,55	69,56	69,75	69,88	69,99
Bireuen	73,26	73,30	73,50	73,66	73,82
Aceh Utara	72,30	72,30	72,50	72,63	72,75
Aceh Barat Daya	69,98	70,04	70,28	70,47	70,63
Gayo Lues	69,32	69,39	69,64	69,80	69,92
Aceh Tamiang	73,17	73,22	73,46	73,63	73,79
Nagan Raya	72.00	72,19	72,39	72,53	72,67
Aceh Jaya	70,39	70,41	70,62	70,76	70,89
Bener Meriah	72,44	72,48	72,69	72,85	73,00
Pidie Jaya	72,74	72,77	72,98	73,16	73,31
Banda Aceh	74,49	74,55	74,80	75,02	75,25
Sabang	72,91	72,95	73,17	73,34	73,52
Lhokseumawe	74,34	74,38	74,59	74,76	74,93
Subulussalam	69,22	69,28	69,55	69,68	69,80

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

2. Angka Kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian ibu dan bayi merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat serta efektivitas sistem pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Tingginya angka kematian pada ibu dan bayi sering kali mencerminkan berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, kurangnya tenaga medis, keterlambatan penanganan komplikasi, hingga faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis data kematian ibu dan bayi sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam upaya perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di Kabupaten Aceh Barat, data kematian ibu dan bayi dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan variasi antar wilayah yang dapat menjadi cerminan permasalahan spesifik di masing-masing kecamatan. Data jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Aceh Barat selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang memerlukan perhatian khusus, terutama di beberapa kecamatan dengan angka kejadian yang tinggi. Secara keseluruhan, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 21 kasus dalam kurun waktu empat tahun, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 8 kasus, diikuti oleh 5 kasus pada tahun 2021, serta masing-masing 4 kasus pada tahun 2023 dan 2024. Kecamatan Johan Pahlawan mencatat angka kematian ibu tertinggi dengan total 8 kasus, tersebar pada tahun 2021, 2022, dan 2024. Sementara itu, beberapa kecamatan lainnya seperti Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Kaway XVI, Meureubo, Pante Ceureumen, dan Panton Reu masing-masing melaporkan 1 hingga 2 kasus dalam satu tahun. Tiga kecamatan, yaitu Woyla Barat, Woyla Timur, dan Sungai Mas, tidak mencatat kematian ibu sama sekali selama periode ini. Sementara itu, angka kematian bayi menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, dimulai dari 60 kasus pada tahun 2021, menurun menjadi 48 kasus pada tahun 2022 dan 2023, dan kemudian turun lagi menjadi 39 kasus pada tahun 2024. Total kematian bayi selama empat tahun mencapai 195 kasus. Kecamatan Johan Pahlawan kembali menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 37 kematian bayi, yang menunjukkan beban besar terhadap layanan kesehatan ibu dan anak di daerah tersebut. Kecamatan Meureubo dan Panton Reu juga mencatat angka kematian bayi yang cukup tinggi, masing-masing sebanyak 23 kasus. Di sisi lain, kecamatan seperti Woyla Barat dan Sungai Mas mencatat jumlah kematian bayi yang sangat rendah, yakni hanya satu kasus selama empat tahun. Melihat data tersebut, terlihat bahwa meskipun terjadi penurunan angka kematian bayi secara keseluruhan, beberapa wilayah masih menghadapi tantangan besar dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Tingginya angka di kecamatan Johan Pahlawan, yang merupakan pusat aktivitas dan rujukan utama, mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan, kesiapan fasilitas kesehatan, serta kualitas pelayanan. Diperlukan pula penguatan program kesehatan ibu dan anak, termasuk audit medis maternal perinatal (AMMP), peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta optimalisasi layanan di tingkat puskesmas untuk mencegah keterlambatan penanganan kasus yang berisiko tinggi. Sebaran data per kecamatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.32 Sebaran Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi Tahun 2021-2024

Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu				Jumlah Kematian Bayi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Johan Pahlawan	4	2		2	18	11		8
Samatiga	-	2		-	6	6		6
Bubon	-	1		-	2	6		1
Arongan Lambalek	-	1		-	2	6		1
Woyla	-	-		-	-	5		1
Woyla Barat	-	-		-	1	-		-
Woyla Timur	-	-		-	1	1		2
Kaway XVI	1	-		2	9	4		8
Meureubo	-	1		2	9	4		8
Pante Ceureumen	-	1		-	5	2		1
Panton Reu	-	-		-	9	1		3
Sungai Mas	-	-	-		1	-		-
Total	**5**	**8**		**4**	**60**	**48**		**39**

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

3. Ketersediaan sumber daya kesehatan yang meliputi: fasilitas pelayanan Kesehatan, sumberdaya manusia, perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya lain yang diperlukan

Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 20 dinyatakan bahwa sumber daya kesehatan yang meliputi: fasilitas pelayanan Kesehatan, sumberdaya manusia, perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya lain yang diperlukan

a) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan data RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025, ketersediaan layanan kesehatan menunjukkan perkembangan positif. Terdapat 4 unit rumah sakit yang terdiri dari 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 1 Rumah Sakit TNI AD, dan 2 rumah sakit swasta. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk yaitu 1 rumah sakit untuk melayani sekitar 49.135 jiwa telah melampaui standar nasional yang menetapkan 1 rumah sakit untuk setiap 100.000 jiwa, menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan sekunder sudah relatif baik. Selain itu, terdapat 13 unit puskesmas yang tersebar di wilayah kabupaten dengan rasio 6,18 per 100.000 penduduk. Angka ini masih berada di bawah standar ideal WHO yang menyarankan minimal 1 puskesmas per 30.000 jiwa atau setara dengan 3,3 per 100.000 penduduk, namun secara nasional masih dinilai memadai untuk wilayah dengan karakteristik geografis seperti Aceh Barat. Sementara itu, Puskesmas Pembantu (Pustu) menunjukkan rasio yang cukup tinggi yaitu 22,84 per 100.000 penduduk, yang mencerminkan upaya pemerataan akses layanan kesehatan dasar hingga ke tingkat desa. Perkembangan jumlah klinik kesehatan juga menjadi indikator positif,

meningkat hampir dua kali lipat dari 8 unit pada tahun 2019 menjadi 15 unit pada tahun 2023, yang menandakan adanya peningkatan partisipasi sektor swasta maupun lembaga lainnya dalam penyediaan layanan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Aceh Barat menunjukkan kemajuan dan mendukung peningkatan akses serta cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat.

b) Sumber Daya manusia (SDM) kesehatan

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025, kondisi sumber daya manusia (SDM) kesehatan menunjukkan adanya kemajuan dalam jumlah dan kualitas, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu segera ditangani. Pada tahun 2023, jumlah tenaga kesehatan tercatat sebanyak 957 orang yang terdiri dari 98 orang dokter, 537 orang perawat dan bidan, 41 orang tenaga farmasi, 36 orang ahli gizi, 13 orang tenaga kesehatan masyarakat (kesmas), dan 232 orang tenaga kesehatan lainnya seperti analis laboratorium, sanitarian, dan tenaga penunjang lainnya. Jumlah ini menggambarkan komitmen daerah dalam memperkuat layanan kesehatan, namun sebaran dan proporsi antar profesi masih belum merata. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk mencapai 26,63 per 100.000 penduduk, yang masih jauh di bawah standar WHO yaitu 100 dokter per 100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan target rasio ideal nasional sebesar 0,35% dari jumlah penduduk (setara dengan ±1.288 dokter untuk populasi sekitar 368.000 jiwa), jumlah dokter yang tersedia baru mencakup sekitar 7,6% dari kebutuhan ideal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Barat masih menghadapi kekurangan tenaga dokter, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di wilayah terpencil dan daerah dengan beban penyakit tinggi. Sementara itu, tenaga perawat dan bidan relatif lebih mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar di Puskesmas dan pos pelayanan kesehatan lainnya. Namun, tenaga ahli gizi yang hanya berjumlah 36 orang, serta tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 13 orang, masih sangat terbatas jika dikaitkan dengan upaya penguatan intervensi promotif dan preventif, khususnya dalam pencegahan stunting, pengendalian penyakit menular, serta edukasi masyarakat. Padahal, peran tenaga kesmas sangat krusial dalam pembangunan kesehatan berbasis komunitas. Dari sisi kualitas, capaian jumlah tenaga kesehatan yang telah bersertifikasi mencapai 86% dari total, yang menunjukkan bahwa sebagian besar SDM kesehatan telah memenuhi standar kompetensi sesuai regulasi. Hal ini menjadi salah satu pencapaian positif karena dapat mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan secara menyeluruh. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu melanjutkan upaya rekrutmen dan distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata berdasarkan kebutuhan wilayah. Program pelatihan dan pengembangan kapasitas juga harus diperkuat untuk mempertahankan serta

meningkatkan proporsi tenaga bersertifikasi. Selain itu, diperlukan strategi insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil agar terjadi pemerataan akses layanan. Penguatan tenaga gizi dan kesmas juga menjadi prioritas penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan, terutama di bidang perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit berbasis lingkungan serta perilaku.

c) Perbekalan dan Teknologi Kesehatan

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025, aspek perbekalan dan teknologi kesehatan menjadi salah satu fokus penting dalam mendukung terselenggaranya layanan kesehatan yang efektif dan efisien. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyediakan sebanyak 150 unit alat kesehatan dan alat penunjang medik, yang mencakup peralatan diagnostik, peralatan tindakan, serta instrumen penunjang pelayanan klinis di berbagai fasilitas kesehatan. Jumlah ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat infrastruktur alat kesehatan, terutama pada tingkat Puskesmas dan klinik, yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di daerah. Selain pengadaan, seluruh unit alat kesehatan tersebut juga telah masuk dalam program pemeliharaan rutin tahunan. Pemeliharaan alat secara berkala menjadi langkah strategis untuk menjaga keberfungsian dan keandalan peralatan, serta untuk mencegah kerusakan dini yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan. Langkah ini penting mengingat alat kesehatan yang tidak terawat seringkali menyebabkan keterlambatan diagnosis, kesalahan prosedur medis, atau bahkan membahayakan pasien dan tenaga kesehatan. Di sisi lain, kebutuhan akan bahan habis pakai (BHP) seperti sarung tangan medis, kasa steril, jarum suntik, dan reagen laboratorium juga telah dipenuhi melalui paket pengadaan yang dirancang rutin setiap tahun. Penyediaan BHP secara konsisten sangat krusial untuk mendukung kelancaran pelayanan, menjaga mutu intervensi medis, serta menjamin keselamatan pasien dan petugas kesehatan.

Di Kabupaten Aceh Barat belum ada program pengembangan teknologi kesehatan berbasis digital seperti telemedicine, sistem rekam medis elektronik, atau integrasi layanan berbasis aplikasi. Namun demikian, penguatan prasarana dan pengadaan alat kesehatan merupakan bagian dari prioritas pembangunan kesehatan daerah. Dengan demikian pembangunan teknologi kesehatan masih berada pada tahap awal yang lebih menitikberatkan pada infrastruktur fisik dan alat medik konvensional. Ke depan, pengembangan teknologi kesehatan yang lebih komprehensif perlu menjadi perhatian, termasuk integrasi dengan sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA), penguatan sistem monitoring digital di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses layanan ke wilayah terpencil. Peningkatan kapasitas SDM dalam mengoperasikan alat kesehatan dan

teknologi informasi juga merupakan aspek penting agar investasi dalam alat dan sistem tidak menjadi sia-sia akibat keterbatasan operasional di lapangan.

d) Sistem Informasi Kesehatan

Berdasarkan dokumen *RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025*, sistem informasi kesehatan mengalami perkembangan positif melalui penguatan integrasi data dan digitalisasi layanan publik yang inovatif. Hal ini tercermin dari dua program unggulan yang telah diimplementasikan, yaitu SIJANTAN (Sistem Pelayanan Adminduk Keliling Terpadu Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan) dan SILATIF HAJATAN (Sistem Layanan Terpadu Integratif Holistik untuk Bayi Baru Lahir). Kedua program ini dirancang untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan layanan kesehatan secara langsung di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, sehingga proses administrasi bagi masyarakat, seperti perekaman e-KTP dan pengurusan BPJS maupun dokumen kelahiran, dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

SIJANTAN berkolaborasi langsung antara Dinas Kependudukan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan perekaman data dan aktivasi jaminan kesehatan secara terintegrasi. Inovasi ini dinilai strategis karena mampu menurunkan hambatan administratif yang sering dialami masyarakat, terutama dalam hal kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Sedangkan SILATIF HAJATAN berfungsi untuk mempercepat pendataan dan penerbitan dokumen identitas bayi baru lahir secara otomatis di rumah sakit, sehingga anak dapat langsung masuk dalam sistem kependudukan dan jaminan sosial sejak dini. Kedua sistem ini tidak hanya mengefisiensikan proses administrasi, tetapi juga memperkuat prinsip *"one citizen, one data"* dalam sistem kesehatan.

Secara lebih luas, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berkomitmen dalam membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari tingkat kabupaten hingga ke gampong untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Langkah ini mencakup peningkatan konektivitas, penguatan regulasi seperti Perbup No. 56 Tahun 2018 tentang pengelolaan website resmi pemerintah, serta peningkatan kapabilitas pengelola data di seluruh OPD termasuk sektor kesehatan.

Namun demikian, aspek pengembangan teknologi kesehatan berbasis digital seperti *telemedicine*, rekam medis elektronik, atau dashboard pemantauan layanan belum tersedia. Masih diperlukan strategi jangka menengah untuk mendorong digitalisasi penuh dalam manajemen data kesehatan, termasuk sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) yang terintegrasi dengan data kependudukan dan jaminan sosial.

Dengan demikian, Aceh Barat menunjukkan langkah awal yang baik dalam digitalisasi layanan kesehatan dan integrasi data lintas sektor. Ke depan, penguatan infrastruktur teknologi dan kompetensi SDM serta perluasan sistem

informasi berbasis bukti menjadi kunci dalam mengoptimalkan transformasi digital sistem kesehatan daerah.

e) Pendanaan Sektor Kesehatan

Pendanaan sektor kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia. Total anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan mencapai angka yang signifikan, dengan distribusi yang mencerminkan pendekatan menyeluruh terhadap kebutuhan pelayanan, pengembangan SDM, serta pemberdayaan masyarakat.

Program utama yang menyerap anggaran terbesar adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat yang dikelola oleh BLUD RS Cut Nyak Dhien Meulaboh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp38,76 miliar. Program ini mencakup berbagai layanan esensial seperti kesehatan ibu dan anak, imunisasi, eliminasi malaria, hingga pengendalian penyakit tidak menular. Kinerja program ini cukup menggembirakan dalam beberapa indikator, misalnya cakupan pelayanan bayi baru lahir dan balita yang mencapai 100%, serta cakupan pelayanan K1 dan hipertensi yang juga mencapai target maksimal. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target, seperti prevalensi wasting balita dan cakupan imunisasi dasar.

Selain itu, Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan memperoleh alokasi sebesar Rp2,16 miliar. Program ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan, termasuk dokter, bidan, perawat, dan tenaga teknis lainnya yang bertugas di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun rumah sakit. Alokasi ini penting untuk menjawab tantangan kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta untuk memastikan mutu layanan tetap terjaga seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan memperoleh anggaran sebesar Rp180 juta.

Analisis terhadap proporsi pendanaan kesehatan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 menunjukkan adanya ketimpangan alokasi anggaran, di mana program promotif dan preventif masih menerima porsi anggaran yang relatif kecil, yaitu hanya Rp180 juta untuk program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Dokumen RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 menunjukkan bahwa alokasi anggaran kesehatan masih dominan pada program kuratif. Program *Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat* (BLUD RS Cut Nyak Dhien) memperoleh alokasi sebesar Rp38,76 miliar, sedangkan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, yang mewakili pendekatan promotif dan preventif, hanya menerima Rp180 juta atau kurang dari 0,5% total anggaran kesehatan.

Hal ini kontras dengan arah kebijakan nasional dan global yang menekankan penguatan layanan kesehatan primer, promotif dan preventif sebagai upaya strategis dalam menurunkan beban penyakit dan biaya kesehatan jangka panjang.

f) Sumber Daya Lain

Sumber daya pendukung yang sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal dan sejalan dengan arah pembangunan kesehatan nasional. Analisis berikut mencakup empat aspek utama: kebutuhan SDM, pemeliharaan alat kesehatan, cakupan rumah tangga sehat, dan indikator layanan kesehatan dasar. Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan terus menjadi fokus. Pada tahun 2023, jumlah SDM kesehatan yang memenuhi standar mencapai 96 orang dan ditargetkan meningkat menjadi 140 orang pada tahun 2025. Walaupun capaian ini cukup menggembirakan, pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah terpencil dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Kabupaten Aceh Barat telah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rutin dan berkala terhadap 150 unit alat kesehatan atau alat penunjang medik. Pemeliharaan ini mencakup kegiatan yang memastikan alat berfungsi sesuai standar dan mendukung kelancaran layanan di Puskesmas maupun rumah sakit. Komitmen ini sangat penting untuk menjaga mutu layanan dan menghindari gangguan teknis yang bisa berdampak pada keselamatan pasien.

Indikator cakupan rumah tangga sehat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pendekatan promotif dan preventif. Pada tahun 2023, cakupan rumah tangga sehat di Aceh Barat baru mencapai **49%**, dan ditargetkan naik drastis menjadi **88%** pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya promotif seperti edukasi gizi, PHBS, dan peningkatan sanitasi masih perlu diperkuat baik melalui peran Puskesmas maupun pelibatan lintas sektor seperti desa, pendidikan, dan agama. Pelayanan kesehatan dasar menunjukkan capaian yang relatif baik, seperti cakupan ASI eksklusif yang mencapai 97,4%**,** dan pelayanan kesehatan untuk usia produktif mencapai 100%. Namun, cakupan imunisasi rutin lengkap masih dinilai rendah dan tidak merata, meskipun mengalami tren peningkatan. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat, yang kini mulai diatasi melalui kerja sama dengan tokoh agama dan pendekatan komunitas.

Secara umum, ketersediaan dan pengelolaan sumber daya lain yang dibutuhkan dalam sistem kesehatan di Aceh Barat telah menunjukkan kemajuan. Namun, keberhasilan peningkatan cakupan rumah tangga sehat dan layanan kesehatan dasar akan sangat bergantung pada penguatan lintas sektor, digitalisasi pelayanan, serta optimalisasi promosi kesehatan. Diperlukan strategi lebih agresif dalam integrasi program promotif dan preventif,

peningkatan kualitas tenaga kesehatan di level pelayanan dasar, serta peningkatan infrastruktur pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan sistem informasi kesehatan.

4. Penyakit Malnutrisi

Malnutrisi khususnya pada kelompok balita, masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang signifikan di Kabupaten Aceh Barat. Bentuk malnutrisi yang paling umum mencakup gizi buruk (*severe wasting*), gizi kurang (*moderate wasting*), dan stunting (gizi kronis). Ketiga kondisi ini sangat terkait erat dengan status gizi ibu hamil, tingkat kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, serta kondisi sanitasi lingkungan yang belum memadai. Berdasarkan dokumen *RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025* dan *Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2025*, jumlah kasus balita gizi buruk pada tahun 2023 tercatat sebanyak 470 kasus. Kasus ini diklasifikasikan sebagai wasting berat dengan indikator Z-score berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB) di bawah -3 SD dan/atau disertai tanda-tanda klinis seperti marasmus atau kwashiorkor. Tingginya angka ini dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas pemantauan tumbuh kembang anak oleh tenaga kesehatan dan kader Posyandu, sehingga deteksi dini menjadi lebih cepat dan menyeluruh. Namun, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah balita gizi buruk yang tercatat hanya sebanyak 5 anak dari total 21.921 balita yang ditimbang (0,022%). Disparitas ini kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan sumber data, metode pencatatan, atau indikator pengukuran yang digunakan, dan dapat mengindikasikan adanya underreporting pada tahun 2024. Salah satu faktor risiko penting terjadinya malnutrisi adalah bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 113 bayi lahir dengan BBLR dari total 3.889 kelahiran (sekitar 2,91%). Angka ini menurun menjadi 36 bayi dari 2.823 kelahiran pada tahun 2024 (sekitar 1,27%). Penurunan ini dapat diartikan sebagai indikasi awal adanya perbaikan status kesehatan ibu hamil dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan antenatal. Gizi buruk yang tidak ditangani secara memadai memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi stunting, terutama apabila berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam *RKPD 2025* dinyatakan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan hingga mencapai 33,4%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dan perlu diperkuat, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil dengan status Kurang Energi Kronik (KEK), bayi BBLR, dan keluarga miskin. Penanganan wasting akut membutuhkan pendekatan komprehensif melalui layanan gizi terapeutik, edukasi keluarga berbasis komunitas, serta sistem rujukan dan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif sangat diperlukan untuk menurunkan beban malnutrisi secara berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat.

5. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gangguan, serta terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menghambat produktivitas dan kesejahteraan. Kesehatan yang optimal juga berkontribusi pada peningkatan usia harapan hidup serta menurunkan beban ekonomi akibat biaya pengobatan yang tinggi. Secara umum, penyakit dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular.

5.1 Penyakit Menular

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lainnya melalui berbagai media penularan seperti udara, cairan tubuh, atau kontak langsung. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, sejumlah penyakit menular yang menjadi perhatian adalah tuberkulosis (TBC), infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, pneumonia, serta rendahnya cakupan imunisasi dasar masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Aceh Barat. Penyakit-penyakit ini tidak hanya berdampak pada peningkatan angka kesakitan anak, tetapi juga berpotensi memicu kejadian luar biasa jika tidak ditangani secara sistematis.

Tuberkulosis (TBC) termasuk dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menjadi salah satu prioritas nasional dalam program pengendalian penyakit menular. Data SSGI 2024 mencatat bahwa sebanyak 0,3% balita di Provinsi Aceh pernah melakukan kontak erat dengan penderita TBC paru. Temuan ini menunjukkan masih adanya transmisi TBC di tingkat rumah tangga yang harus segera ditangani melalui skrining aktif, edukasi, dan pengobatan tuntas berbasis komunitas.

Sementara itu, ISPA merupakan salah satu penyakit menular yang paling sering menyerang anak balita. Proporsi balita yang mengalami ISPA dalam satu bulan terakhir tercatat 1,0% berdasarkan diagnosis medis, namun melonjak hingga 26,1% berdasarkan gejala, menurut data SSGI. Ini mencerminkan potensi tingginya angka ISPA yang belum seluruhnya terjangkau oleh layanan kesehatan formal, sehingga diperlukan penguatan layanan primer, pengawasan lingkungan rumah tangga, serta peningkatan kesadaran keluarga tentang penanganan gejala awal ISPA.

Kondisi serupa juga terlihat pada penyakit diare, yang tercatat dialami oleh 2,8% balita menurut diagnosis dan 3,4% berdasarkan gejala. Diare erat kaitannya dengan buruknya kualitas sanitasi, air bersih, dan praktik kebersihan yang tidak memadai. Intervensi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta perbaikan akses air minum layak dan sanitasi dasar menjadi kunci utama pengendaliannya. Sedangkan pneumonia, meskipun prevalensinya menurut diagnosis medis relatif rendah (0,1%), namun sebanyak 3,1% balita tercatat mengalami gejala pneumonia, yang menandakan bahwa banyak kasus

belum teridentifikasi secara klinis dan berisiko tidak mendapatkan penanganan tepat waktu. Hal ini menjadi penting karena pneumonia merupakan salah satu penyebab utama kematian balita yang sebenarnya dapat dicegah.

Salah satu aspek kunci dalam pengendalian penyakit menular pada anak adalah cakupan imunisasi dasar. Dalam RKPD disebutkan bahwa cakupan imunisasi di Kabupaten Aceh Barat belum mencapai target yang diharapkan. Fakta ini diperkuat oleh data SSGI 2024 yang menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dasar Provinsi Aceh masih sangat rendah, yakni hanya 47,3% untuk BCG, 18,0% untuk DPT-HB-Hib lengkap, 6,9% untuk imunisasi polio lengkap, dan 21,2% untuk campak-rubella (MR). Cakupan yang jauh di bawah standar ini menunjukkan masih tingginya kerentanan anak-anak terhadap penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), seperti campak, polio, difteri, dan pertusis. Rendahnya cakupan ini tidak hanya berdampak pada anak secara individu, tetapi juga mengancam terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity), sehingga meningkatkan risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat.

Tabel 3.33 Distribusi Penyakit Menular Tahun 2024

Kecamatan	Malaria	Tuberkulosis Paru	Radang Paru-paru	Kusta
Johan Pahlawan	-	190	29	5
Samatiga	2	16	-	2
Bubon	-	2	-	-
Arongan Lambalek	1	13	1	1
Woyla	-	-	6	-
Woyla Barat	-	2	-	-
Woyla Timur	-	-	4	1
Kaway XVI	-	24	41	1
Meureubo	-	7	11	1
Pante Ceureumen	-	12	2	1
Panton Reu	-	1	-	-
Sungai Mas	-	16	13	2
Aceh Barat	**3**	**284**	**107**	**14**

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat, 2025

5.2 Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak menular antar individu, namun justru menjadi penyebab kematian tertinggi di masyarakat saat ini. Penyakit-penyakit ini berkembang akibat faktor risiko seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, serta faktor genetik. Penyakit tidak menular berdasarkan kementerian kesehatan adalah penyakit jantung, kanker, diabetes melitus, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan stroke. Kelima jenis penyakit ini tergolong sebagai penyakit kronis yang dapat menurunkan kualitas hidup secara drastis, bahkan menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan sedini mungkin.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 dan SSGI 2024 Dalam Angka, penyakit tidak menular (PTM) semakin menempati posisi penting dalam profil kesehatan masyarakat. Arah kebijakan kesehatan daerah menunjukkan perhatian yang cukup serius terhadap penguatan upaya promotif dan preventif untuk mencegah dan mengendalikan PTM. Hal ini tercermin dalam program peningkatan deteksi dini penyakit seperti hipertensi dan diabetes melalui layanan primer di puskesmas, serta integrasi upaya edukasi perilaku hidup sehat melalui berbagai media dan komunitas lokal. Data dari SSGI 2024 memperkuat urgensi tersebut. Kabupaten Aceh Barat menunjukkan prevalensi gizi berlebih yang cukup tinggi yang berdampak pada kelima penyakit tidak menular tersebut.

3.3.16.2 Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

a. Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen *RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025*, *Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2025*, dan *SSGI 2024 Dalam Angka*, strategi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dapat dikelompokkan ke dalam empat pendekatan utama: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

1. Langkah Promotif (Peningkatan Kesehatan)

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, diperlukan perencanaan strategi promotif yang sistematis dan berbasis evidensi untuk mendorong perubahan perilaku serta peningkatan kesadaran individu maupun kelompok terhadap pentingnya gaya hidup sehat. Strategi promotif dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Promosi Kesehatan Berkualitas melalui program PRO SEHAT
2. Program Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM)
   a) Pemeriksaan rutin tekanan darah, gula darah, dan kolesterol melalui Posyandu dan Posbindu.
   b) Sosialisasi bahaya rokok dan penggunaan zat adiktif melalui pendekatan adat.
3. Pemanfaatan Kearifan Lokal dalam Promosi Kesehatan: Menyampaikan pesan kesehatan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang sudah dikenal dalam masyarakat, serta menyelaraskan dengan nilai-nilai budaya lokal, seperti tradisi gotong royong atau kebiasaan berkumpul dalam acara adat yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi.
4. Kampanye Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA) Berbasis Kearifan Lokal
   a) Pengembangan media edukasi berbasis bahasa Aceh dan budaya lokal.
   b) Edukasi gizi dengan resep tradisional yang sehat (ex.MP-ASI Lokal berbasis riset)
5. Gerakan Gampong Sehat
   a) Setiap gampong didorong membuat kebun gizi, bank sampah, dan lumbung pangan lokal.

b) Perlombaan antar gampong dalam praktik hidup bersih dan sehat.

6. Penguatan jaringan sosial dalam pencegahan kesehatan:
   a) Membentuk kelompok-kelompok kecil berbasis komunitas yang fokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, misalnya kelompok ibu hamil untuk edukasi gizi atau kelompok lansia untuk pencegahan penyakit kronis.
   b) Memanfaatkan peran tokoh adat atau pemuka agama yang memiliki pengaruh di komunitas untuk menyampaikan pesan kesehatan yang relevan dengan budaya lokal seperti Tuha Peut dan teungku meunasah
7. Pelibatan Pesantren dan Dayah dalam Promosi Kesehatan
   a) Materi fiqh kesehatan (thaharah, adab makan, dan kebersihan diri) sebagai bagian dari kurikulum.
   b) Santri sebagai agen perubahan untuk perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Langkah Preventif (Pencegahan)

Strategi preventif merupakan suatu pendekatan proaktif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi masalah kesehatan sejak dini, melalui intervensi promotif yang terstruktur dan upaya perlindungan yang berkelanjutan, dengan tujuan mengurangi beban penyakit di masa depan. Strategi preventif dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pencegahan Melalui Kebijakan Lokal yang Mendukung Kesehatan
   1. Menyediakan Bantuan Dana bagi Keluarga Pasien yang Dirujuk
   2. Pendampingan Ibu Hamil dan 1000 Hari Pertama Kehidupan)
   3. BISKUIT (Bantuan Stimulus untuk Balita Kesulitan Gizi)
   4. Pemeriksaan dan Perawatan Kesehatan Gratis bagi Pasien dengan Kondisi Tertentu di Rumah
   5. DOKMARU (Dokter Masuk Rumah)
   6. Revitalisasi Peran Tuha Peut dan Teungku Meunasah
      a) Pelatihan Tuha Peut dalam promosi kesehatan
      b) Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan tokoh agama/adat dalam edukasi kesehatan.

B. Pencegahan melalui pendekatan Kesehatan Berbasis Keluarga dan Lingkungan
   1. Berbasis Keluarga

      Strategi pencegahan berbasis keluarga dilakukan dengan memberdayakan keluarga sebagai agen utama dalam menjaga kesehatan melalui edukasi rutin, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pemantauan tumbuh kembang anak, serta deteksi dini penyakit. Pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas dan posyandu berperan dalam memberikan pendampingan dan kunjungan rumah, sementara dukungan komunitas, teknologi informasi, dan bantuan sosial turut memperkuat keberlangsungan program. Pendekatan

ini menempatkan keluarga sebagai pusat perubahan perilaku sehat secara berkelanjutan dan berbasis nilai budaya lokal.

2. Berbasis Lingkungan
   a) Penguatan kelembagaan KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) dengan peran tokoh adat.
   b) Penggunaan teknologi tepat guna ramah lingkungan dari lokal
   c) Pembangunan dan Perbaikan Sarana Air Bersih melalui Pembangunan sistem penyediaan air bersih skala kecil berbasis sumber air lokal (mata air, sumur bor, tadah hujan), dengan teknologi tepat guna.
   d) Pelatihan masyarakat untuk pengelolaan instalasi air bersih dan pemeliharaan sistem (misal: filter sederhana dari bahan lokal seperti arang tempurung kelapa dan pasir halus).
   e) Penguatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk mengelola layanan air bersih secara berkelanjutan.
   f) Pembangunan Jamban Sehat dan Pengelolaan Limbah Domestik melalui Pembangunan jamban keluarga di rumah tangga miskin dan rentan, dengan skema subsidi silang melalui dana gampong.
   g) Sosialisasi pentingnya Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) melalui pendekatan adat dan kampanye.
   h) Pembuatan lubang biopori dan komposter rumah tangga, memanfaatkan limbah organik sebagai pupuk kebun gizi.

   Strategi pencegahan berbasis lingkungan difokuskan pada penciptaan kondisi fisik dan sosial yang mendukung perilaku hidup sehat melalui penyediaan air bersih, sanitasi layak, pengelolaan sampah, pengendalian vektor penyakit, serta perbaikan kualitas permukiman. Upaya ini diperkuat dengan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong, edukasi lingkungan, pemanfaatan ruang terbuka hijau, dan penerapan regulasi lokal terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan.

3. Langkah Kuratif (Pengobatan Dan Pemulihan)

Kabupaten Aceh Barat memiliki komitmen untuk memperkuat langkah kuratif dalam sistem pelayanan kesehatannya, dengan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagai pusat rujukan utama di wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela). Rumah sakit tipe B ini menjadi tulang punggung layanan pengobatan dan pemulihan, dengan menyediakan berbagai pelayanan spesialistik seperti penyakit dalam, bedah, jantung, paru, dan anak, serta unit perawatan intensif seperti ICU, NICU, dan PICU untuk mendukung proses pemulihan pasien pascaoperasi, stroke, maupun penyakit kronis. Namun demikian, keterbatasan daya tampung dan kondisi overkapasitas, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD), telah menjadi hambatan serius dalam efektivitas pelayanan kuratif. Banyak pasien terpaksa menunggu lama atau bahkan dirujuk ke luar daerah, yang berisiko memperburuk kondisi klinis mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, untuk memastikan

operasional rumah sakit regional dapat segera berjalan. Sejalan dengan itu, Universitas Teuku Umar (UTU) juga sedang mempersiapkan pembukaan Fakultas Kedokteran pada tahun 2026, dengan pendekatan kedokteran komunitas berbasis agro-maritim. Langkah ini diharapkan mampu mendukung sistem kuratif daerah melalui peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis lokal, penerapan kurikulum berbasis problem-based learning (PBL) serta community-based education, serta kolaborasi strategis dengan RSUD dan rumah sakit regional sebagai wahana pendidikan klinik. Sinergi antara pembangunan infrastruktur rumah sakit dan penguatan institusi pendidikan kedokteran ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan mutu layanan pengobatan dan pemulihan di Kabupaten Aceh Barat secara berkelanjutan. Berikut beberapa langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau, serta memperhatikan kultural masyarakat.

1. SIGAP RS Regional (Sinergi Gerak Cepat Pembangunan Rumah Sakit Regional)
2. RUMOH LON (Rumah Orang Singgah untuk Layanan Pengobatan)
3. PEDULI (Program Empati Berupa Dana bagi Keluarga Pasien)
4. Menyediakan Dokter Spesialis melalui program DOSIS (Dokter Spesialis)
5. Pemeriksaan dan Perawatan Kesehatan Gratis bagi Pasien dengan Kondisi Tertentu di Rumah
6. Penguatan Puskesmas sebagai Fasilitas Layanan Primer secara komprehensif
    a) Penambahan tenaga medis seperti dokter, tenaga gizi, kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, dan bidan desa
    b) Pelatihan berkelanjutan bagi dokter, tenaga gizi, kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, dan bidan desa tentang: Komunikasi efektif berbasis budaya lokal, Penyakit tidak menular dan kesehatan masyarakat, Integrasi layanan kesehatan tradisional yang aman
    c) Rehabilitasi bangunan dan ruang layanan sesuai standar pelayanan minimal (SPM), termasuk ruang laktasi dan ruang ramah anak.
    d) Penyediaan alat kesehatan esensial, seperti alat cek gula darah, tekanan darah digital, dan USG portable untuk pemeriksaan kehamilan.
    e) Pelayanan home visit untuk lansia, disabilitas, dan pasien kronis dengan pendekatan humanis dan berbasis nilai kekeluargaan.
    f) Posyandu, kelas ibu hamil, penyuluhan gizi dengan melibatkan kader dan tokoh adat
    g) Memastikan pengaktifan RGG disetiap gampong/desa
7. Sarana Prasarana Daerah Terpencil
    a) Menyediakan Ambulan Gratis bagi Masyarakat melalui program AGAM (Ambulan Gratis bagi Masyarakat)
    b) SATPAM (Sarana dan Prasarana dan Alat Penunjang Kesehatan Memadai)
    c) Fasilitas penunjang transportasi seperti kendaraan dinas Puskesmas keliling (ambulan motor atau mobil sehat).
    d) Layanan kesehatan keliling dengan bahasa dan budaya lokal.

e) Telekonsultasi untuk masyarakat pesisir dan pegunungan dengan keterbatasan akses.
f) Pemanfaatan telemedicine untuk konsultasi spesialis di wilayah terpencil

Tabel 3.34 Strategi Penguatan Layanan Kesehatan Dasar

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
STRATEGI PROMOTIF				
(menggunakan bahasa strategi) Promosi Kesehatan Berkualitas melalui program PRO SEHAT	1. Pemetaan Masalah Kesehatan Prioritas 2. Pengembangan Materi dan Media Edukasi yang Kontekstual 3. Pelatihan Kader dan Tenaga Kesehatan 4. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Langsung 5. Monitoring, Umpan Balik, dan Revisi Strategi	1. Indikator Proses a) 100 % kader/tokoh yang dilatih sebagai agen promosi PRO SEHAT b) 100 % sasaran (ibu hamil, remaja, lansia) yang mengikuti minimal 1 sesi promosi c) Seluruh gampong tersedia media promosi yang diproduksi dan disebarkan (fisik/digital) d) Setiap bulan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan 2. Indikator Output a. Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang topik kesehatan yang dipromosikan (berdasarkan pre-post test) b. Jumlah keluarga yang menerapkan minimal 5 indikator PHBS rumah tangga	1. Penurunan AKI dan AKB 2. Penuruan prevalensi stunting menjadi 14% 3. 90% remaja putri usia 12–18 tahun mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 1x per minggu, mengikuti edukasi gizi melalui media kelas, booklet, atau aplikasi digital 4. Penurunan anemia dan kekurangan energi kronik pada ibu hamil 5. Peningkatan jumlah ibu hamil yang mengikuti pemeriksaan kesehatan minimal 4 kali selama kehamilan menjadi 90%	OPD / Mitra — Peran Dinas Kesehatan — Koordinator utama; menyusun materi, pelatihan tenaga kesehatan dan kader, serta monitoring dan evaluasi. Puskesmas / RSUD — Melaksanakan promosi kesehatan langsung di masyarakat, pengusul kegiatan, dan pelaksana pre-post test edukasi. Puskesmas / RSUD — Pengusul pasien dan pemberi informasi medis Dinas Sosial — Verifikasi penerima manfaat program; mendukung kelompok rentan agar terlibat dalam kegiatan promosi. Dinas PMG / Desa — Mendorong desa mengalokasikan dana untuk kegiatan promosi dan integrasi ke RPJMes. Dinas Pendidikan — Mengintegrasikan materi promosi kesehatan dalam

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		c. Persentase remaja putri yang memahami pentingnya gizi dan kesehatan reproduksi	6. 100 % masyarakat Perilaku hidup bersih dan sehat dengan ditunjukkan nilai indeks keluarga sehat > 1	dan Kebudayaan: kurikulum sekolah; dukungan kegiatan UKS, kantin sehat, dll. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo): Menyebarkan informasi promosi melalui media lokal, sosial media, dan platform digital edukatif. ZIS: Mendukung pendanaan promosi bagi kelompok miskin melalui zakat, infak, dan sedekah. PKK Kabupaten dan Desa: Pelaksana utama promosi di tingkat rumah tangga; kader Dasa Wisma sebagai penggerak promosi. Tokoh Adat / Agama (Tuha Peut, Teungku Meunasah): Agen promosi yang menyampaikan pesan kesehatan melalui pendekatan budaya dan agama.
Program Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	1. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat 2. Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Kader Masyarakat 3. Penyediaan Sarana dan Fasilitas Pemeriksaan	1. Indikator Proses a. Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi mengenai PTM dan deteksi dini (misalnya: seminar,	1. Penurunan angka kematian akibat PTM di wilayah sasaran sebesar 10% dalam 3 tahun	OPD/Mitra: Peran dan Tanggung Jawab Dinas Kesehatan (Dinkes): 1. Koordinator utama program 2. Menyusun kebijakan teknis, SOP, dan pelatihan tenaga kesehatan serta kader

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
	4. Pelaksanaan Skrining Rutin di Posyandu, Puskesmas, dan Sekolah 5. Pendampingan dan Rujukan ke Fasilitas Kesehatan	sosialisasi, poster, media sosial) b. Jumlah kader kesehatan dan tenaga medis yang dilatih dalam deteksi dini PTM (hipertensi, diabetes, kanker, dll) c. Jumlah pos kesehatan atau posyandu yang menyediakan layanan deteksi dini PT d. Jumlah alat pemeriksaan (tensi meter, glukometer, timbangan, dsb.) yang tersedia di puskesmas dan posyandu 2. Indikator Output a. Jumlah individu yang menjalani deteksi dini PTM (pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan IMT) b. Jumlah individu yang dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lanjutan setelah deteksi dini	2. Peningkatan prevalensi deteksi dini PTM pada usia 30 tahun ke atas menjadi 90% dalam 5 tahun 3. Pengendalian angka penderita PTM di masyarakat dengan 80% individu menjalani pengobatan yang sesuai dan berkualitas.	3. Menyediakan alat skrining (tensi meter, glukometer, dll). 4. Monitoring dan evaluasi capaian program. Puskesmas 1. Pelaksana teknis kegiatan skrining di posyandu, sekolah, dan komunitas. 2. Rujukan pasien yang ditemukan berisiko atau terdeteksi penyakit. 3. Edukasi individu dan kelompok masyarakat. Dinas Sosial 1. Verifikasi dan pendampingan bagi masyarakat rentan yang terdeteksi berisiko PTM. 2. Sinkronisasi dengan program bantuan sosial untuk pasien PTM miskin. ZIS 1. Mendukung pembiayaan alat skrining atau pengobatan awal bagi masyarakat tidak mampu. 2. Pendanaan tambahan melalui dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah). Transportasi Daerah: Penyediaan ambulans sosial jika diperlukan untuk rujukan pasien hasil deteksi dini. Rumah Singgah: Tempat tinggal sementara bagi pasien PTM rujukan yang berasal dari daerah terpencil.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		c. Jumlah kegiatan skrining yang dilakukan di sekolah, posyandu, dan komunitas d. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai faktor risiko PTM (melalui pre-test dan post-test edukasi)		
Pemanfaatan Kearifan Lokal dalam Promosi Kesehatan	1. Edukasi dan Penyuluhan Melalui Tradisi Lokal 2. Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat dan Pemangku Adat 3. Pengembangan Program Kesehatan Berbasis Komunitas 4. Penguatan Sistem Dukungan Sosial Berbasis Kearifan Lokal	1. Indikator Proses a. Jumlah penyuluhan dan kegiatan yang melibatkan kearifan lokal (misalnya ceramah berbasis cerita adat, festival budaya kesehatan, dll) b. Jumlah tokoh masyarakat atau pemangku adat yang dilibatkan dalam kegiatan promosi kesehatan c. Persentase desa atau komunitas yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam program kesehatan (misalnya pencegahan dan penanggulangan KEK pada ibu hamil melalui peran Tuha Peut)	1. 100% Jumlah desa atau komunitas yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam program kesehatan 2. 50-75 Jumlah kegiatan budaya yang mempromosikan kesehatan secara aktif 3. 100% Tingkat pengetahuan dan penerapan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terkait pola makan, kebersihan, dan	OPD/Mitra Peran dan Tanggung Jawab Dinas Kesehatan (Dinkes) 1. Koordinator utama program. 2. Menyusun strategi promosi kesehatan berbasis lokal 3. Melatih tenaga kesehatan dan kader untuk menyampaikan pesan kesehatan melalui simbol dan narasi lokal. 4. Menyediakan media promosi yang sesuai budaya. Dinas Sosial 1. Memastikan kelompok rentan (seperti ibu hamil KEK, lansia) terlibat dalam kegiatan promosi berbasis budaya. 2. Menyelaraskan intervensi sosial-kesehatan dengan pendekatan lokal. Puskesmas 1. Melaksanakan penyuluhan langsung menggunakan pendekatan budaya lokal.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		2. Indikator Output a. Jumlah kegiatan yang memanfaatkan media lokal (seperti radio komunitas atau media sosial lokal) untuk menyebarkan pesan promosi kesehatan berbasis kearifan lokal *(Target: 10-15 kegiatan setiap tahun)* b. Persentase penerapan pola hidup sehat berdasarkan kearifan lokal (misalnya makan dengan bahan pangan lokal yang bergizi, kebiasaan gotong royong untuk menjaga kebersihan desa) *(Target: 60-70% keluarga di wilayah sasaran)*	pencegahan penyakit	2. Berkoordinasi dengan tokoh adat/agama untuk pelibatan komunitas. Dinas PMG / Desa 1. Mendorong integrasi nilai kearifan lokal ke dalam perencanaan desa (RPJMes dan RKPDes). 2. Memfasilitasi kegiatan promosi berbasis adat dan tradisi lokal di gampong. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 1. Menyebarluaskan pesan kesehatan dalam bahasa lokal melalui media digital, radio komunitas, dan media sosial. 2. Mendukung produksi konten promosi berbasis nilai-nilai lokal. Majelis Adat Aceh (MAA) 1. Sebagai mitra utama dalam pelestarian dan integrasi nilai-nilai adat dalam pesan kesehatan. 2. Menyusun narasi budaya yang mendukung perilaku hidup sehat. Lembaga Pendidikan/ Pesantren/ Dayah 1. Menyisipkan pesan kesehatan dalam pengajaran agama dan tradisi lokal. 2. Santri dan ustadz sebagai duta promosi perilaku sehat berbasis nilai Islam.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
Kampanye Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA) Berbasis Kearifan Lokal	1. Identifikasi kearifan lokal 2. Penyusunan Pesan Kampanye 3. Pengembangan Media Edukasi 4. Pelatihan Kader Kesehatan 5. Pelaksanaan Kampanye 6. Monitoring dan Evaluasi	1. Indikator Proses a) Jumlah kader/tokoh masyarakat yang dilatih sebagai duta kampanye b) Jumlah kegiatan kampanye yang dilaksanakan c) Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye 2. Indikator Output a) Peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan berbasis budaya lokal b) Adopsi pesan kampanye dalam kehidupan sehari-hari c) Perubahan sikap dan praktik gizi ibu hamil dan ibu balita d) Peningkatan kunjungan ibu ke Posyandu e) Peningkatan keterlibatan tokoh	○ 70% partisipasi ibu hamil, menyusui, dan keluarga dalam kegiatan kampanye. ○ Peningkatan ≥50% kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil. ○ Peningkatan konsumsi makanan bergizi lokal yang tinggi protein pada ibu hamil dan ibu menyusui. ○ Peningkatan praktik MP-ASI berbasis pangan lokal pada ibu balita minimal 50%. ○ Peningkatan ≥20% kunjungan ibu ke Posyandu dibandingkan baseline sebelum kampanye.	OPD/Mitra Peran dan Tanggung Jawab Dinas Kesehatan (Dinkes) 1. Menyusun materi kampanye berbasis lokal (bahasa, budaya, simbol). 2. Pelatihan kader dan tenaga kesehatan untuk edukasi gizi dan kesehatan ibu-anak. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kampanye. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) 1. Memfasilitasi pelaksanaan kampanye di tingkat desa/gampong. 2. Mendorong alokasi Dana Desa untuk kegiatan kampanye dan penyediaan PMT lokal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1. Mengintegrasikan materi gizi dan KIA dalam PAUD dan SD. 2. Mengembangkan media edukasi berbasis budaya lokal dalam pembelajaran. Dinas Sosial Mengidentifikasi dan memfasilitasi kelompok rentan seperti ibu hamil KEK, anak yatim, dan keluarga miskin sebagai sasaran prioritas kampanye. Dinas Komunikasi 1. Menyebarkan materi kampanye melalui media lokal dan digital (radio lokal, sosial media, dll).

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		adat dalam isu kesehatan dan gizi	○ Tokoh adat dan tokoh agama aktif terlibat dalam ≥1 kegiatan kampanye per bulan.	dan Informatika (Diskominfo) 2. Mendukung produksi media promosi berbasis lokal. TP-PKK Kabupaten dan Desa 1. Kader PKK sebagai pelaksana lapangan edukasi langsung kepada ibu dan keluarga. 2. Pendampingan konsumsi tablet tambah darah, praktik MP-ASI lokal, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Majelis Adat Aceh (MAA) 1. Integrasi nilai adat dan budaya lokal dalam pesan-pesan gizi dan pengasuhan ibu-anak. 2. Kolaborasi dalam penyusunan narasi kampanye. Tokoh Adat dan Agama (Tuha Peut, Teungku Meunasah) 1. Agen penyampai pesan kampanye dalam kegiatan sosial keagamaan dan adat. 2. Dukungan terhadap perubahan perilaku masyarakat terkait gizi dan kesehatan. Perguruan Tinggi / LSM 1. Pendukung riset dan pengembangan media edukatif berbasis lokal. 2. Pelatihan kader dan pendampingan kampanye berbasis komunitas.
Gerakan Gampong Sehat	1. Persiapan dan Mobilisasi Komunitas	1. Indikator process	1. Penurunan prevalensi balita	1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota *(OPD Penanggung Jawab Utama)*

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
	2. Pemetaan Masalah Kesehatan di Gampong 3. Penyusunan Rencana Aksi Gampong Sehat 4. Implementasi Program 5. Monitoring dan Evaluasi 6. Penguatan Regulasi dan Keberlanjutan	b. Terlaksananya minimal 1 kegiatan rutin kesehatan per bulan (Posyandu, kelas ibu hamil, dan senam sehat) c. Jumlah rumah tangga yang ikut serta dalam kegiatan gampong sehat d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan kesehatan secara langsung (door-to-door atau kelompok). e. Tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah kesehatan desa meningkat ≥50% dari baseline. 2. Indikator output a. 80% rumah tangga memiliki jamban	stunting minimal 10% dalam 1 tahun. 2. Penurunan jumlah ibu hamil dengan KEK minimal 15%. 3. Peningkatan indeks gampong sehat (misalnya skor minimal 80 dari 100 dalam penilaian mandiri). 4. Kepatuhan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat meningkat ≥30% (berdasarkan survei KAP – knowledge, attitude, practice). 5. Gampong ditetapkan sebagai "Gampong Sehat	Peran: a. Menyusun pedoman teknis Gerakan Gampong Sehat b. Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan kader desa c. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program d. Menyediakan dukungan logistik: alat kesehatan dasar, media edukasi, alat ukur gizi, dll 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong/Desa (DPMG) Peran: a. Mendorong integrasi Gerakan Gampong Sehat dalam RPJMes dan RKPDes b. Memfasilitasi pembentukan Forum Gampong Sehat dan penguatan kapasitas aparatur desa c. Mendorong alokasi Dana Desa untuk kegiatan kesehatan berbasis masyarakat 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Peran: a. Mengintegrasikan Gerakan Gampong Sehat ke dalam RPJM dan rencana sektoral lintas OPD b. Memonitor keterpaduan program antar sektor di tingkat kabupaten/kota c. Mendukung evaluasi capaian indikator pembangunan kesehatan daerah 4. Dinas Sosial Peran:

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		sehat dan akses air bersih. b. ≥85% ibu hamil mengonsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama kehamilan. c. ≥70% balita mengalami kenaikan berat badan dalam 3 bulan terakhir. d. ≥90% bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. e. ≥70% rumah tangga menerapkan 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). f. ≥80% anak usia 0–2 tahun mendapat MP-ASI sesuai standar gizi.	Mandiri" oleh kabupaten/kota. 6. Integrasi program kesehatan ke dalam RPJMes, RKPDes, dan penganggaran rutin desa. 7. Masyarakat mampu menjalankan kegiatan kesehatan secara swadaya tanpa ketergantungan penuh pada Puskesmas.	a. Menyasar kelompok rentan (ibu hamil KEK, lansia, anak yatim) dalam intervensi sosial-kesehatan b. Sinkronisasi dengan program PKH, BPNT, dan JKN-KIS 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Peran: a. Mendukung program pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan b. Membina kader lingkungan desa dalam program 3R, Bank Sampah, dan jambanisasi 6. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Peran: a. Menyebarluaskan informasi kampanye Gerakan Gampong Sehat melalui media lokal, radio, dan sosial media b. Mendukung digitalisasi laporan desa sehat dan promosi edukatif 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peran: a. Mengintegrasikan edukasi kesehatan dalam PAUD dan SD b. Mendorong kegiatan UKS, kantin sehat, dan PHBS di lingkungan sekolah 8. Dukungan Lintas Sektor Tambahan a. Kementerian Agama (Kemenag): Memberdayakan penyuluh agama untuk menyampaikan pesan kesehatan berbasis nilai keagamaan b. PKK: Kunci dalam pelaksanaan program di tingkat rumah tangga

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
				c. Lembaga Adat/Tokoh Masyarakat: Untuk penguatan nilai lokal dan dukungan sosial budaya
Penguatan jaringan sosial dalam pencegahan kesehatan	1. Identifikasi dan Pemetaan Jaringan Sosial 2. Penguatan Kapasitas (Capacity Building) 3. Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelompok Dukungan 4. Intervensi Berbasis Komunitas 5. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif 6. Kolaborasi Lintas Sektor	1. Indikator Proses a) Jumlah dan jenis jaringan sosial yang berhasil diidentifikasi dan difasilitasi b) Jumlah kegiatan pelatihan atau edukasi yang dilaksanakan c) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau pertemuan komunitas d) Tingkat partisipasi komunitas dalam pertemuan atau kegiatan kesehatan e) Jumlah agen perubahan (change agents) atau peer educators yang aktif 2. Indikator Output a) Terbentuknya kelompok-kelompok dukungan masyarakat	4. Penurunan angka kejadian penyakit yang bisa dicegah 5. Peningkatan status kesehatan kelompok rentan 6. Penguatan ketahanan sosial masyarakat terhadap isu kesehatan	1. Dinas Kesehatan (Dinkes) – OPD Utama / Leading Sector Tanggung Jawab: a. Merancang, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan program. b. Menyusun materi edukasi dan pelatihan kesehatan masyarakat. c. Melatih kader kesehatan, tenaga kesehatan, dan relawan komunitas. d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kesehatan berbasis masyarakat. e. Menyediakan data dan informasi epidemiologis untuk pemetaan jaringan sosial. 2. Dinas Sosial Tanggung Jawab: a. Memfasilitasi kelompok rentan (lansia, disabilitas, keluarga miskin) agar terlibat dalam jaringan sosial. b. Menyediakan pendamping sosial untuk integrasi dengan kegiatan kesehatan. c. Berperan dalam penguatan solidaritas sosial dan ketahanan masyarakat. 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Tanggung Jawab: a. Mendukung pembentukan dan pembinaan kader dan kelompok masyarakat desa. b. Mendorong alokasi dana desa untuk kegiatan promotif dan preventif kesehatan.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		b) Peningkatan frekuensi interaksi sosial tentang isu kesehatan c) Jumlah media komunikasi sosial yang digunakan untuk promosi kesehatan d) Tersedianya modul atau materi edukasi berbasis lokal dan jaringan sosial 6.		c. Memfasilitasi musyawarah desa yang melibatkan isu kesehatan. 4. Dinas Pendidikan Tanggung Jawab: a. Integrasi edukasi kesehatan ke dalam kegiatan sekolah, terutama dalam UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). b. Pelibatan siswa, guru, dan komite sekolah dalam jejaring sosial promotif. c. Mendukung program peer educator dan sekolah sehat. 5. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tanggung Jawab: a. Mendukung penyebaran informasi kesehatan melalui media lokal dan digital. b. Menyediakan platform komunikasi antar komunitas dan OPD. c. Mengelola kampanye promosi kesehatan digital berbasis komunitas. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanggung Jawab: a. Memasukkan program penguatan jaringan sosial ke dalam perencanaan pembangunan daerah. b. Mengintegrasikan program dengan RPJM dan Renstra OPD. c. Mendukung koordinasi lintas sektor dan penganggaran program. 7. KUA / Kantor Urusan Agama (bermitra non-OPD) Tanggung Jawab (bersifat kolaboratif):

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
				a. Mendukung penyuluhan kesehatan melalui majelis taklim, khutbah, dan kegiatan keagamaan. b. Menggerakkan tokoh agama sebagai agen perubahan dalam jejaring sosial.
Pelibatan Pesantren dan Dayah dalam Promosi Kesehatan	1. Pemetaan dan Identifikasi Pesantren/Dayah 2. Pendekatan dan Advokasi kepada Pimpinan Pesantren/Dayah 3. Pelatihan Kader Santri Sehat / Duta Kesehatan Santri 4. Integrasi Materi Kesehatan dalam Kurikulum atau Kegiatan Pesantren 5. Aksi Promosi Kesehatan Berbasis Pesantren	1. Indikator Proses a) Jumlah pesantren/dayah yang terlibat aktif dalam program 7. Target: minimal 70% dari total pesantren yang dipetakan. b) Jumlah kader santri sehat/duta kesehatan yang telah dilatih 8. Target: minimal 10 kader per pesantren. c) Jumlah kegiatan pelatihan, penyuluhan, atau edukasi yang dilakukan di pesantren 9. Termasuk pelatihan PHBS, kesehatan reproduksi, gizi, dll. d) Tingkat partisipasi pimpinan pesantren dan ustadz dalam kegiatan promosi kesehatan	1. Terbentuknya budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan pesantren/dayah 2. Peningkatan status kesehatan santri secara umum 3. Kemandirian pesantren dalam melanjutkan promosi kesehatan tanpa ketergantungan program luar 4. Replikasi atau pengembangan program ke pesantren lain di daerah yang sama	Dinas Kesehatan (Dinkes) – OPD Utama / Leading Sector Tanggung Jawab: a. Menyusun program promotif dan preventif berbasis pesantren/dayah. b. Melatih kader santri sehat dan memberikan materi edukasi kesehatan. c. Menyediakan pelayanan kesehatan rutin di lingkungan pesantren. d. Menjalin kemitraan dengan puskesmas untuk pemantauan dan pembinaan. 2. Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten/Kota Tanggung Jawab: a. Memfasilitasi koordinasi dengan pimpinan dayah dan pesantren. b. Mendukung integrasi nilai-nilai kesehatan dalam kurikulum diniyah. c. Mendorong partisipasi lembaga pendidikan Islam dalam promosi kesehatan. d. Menjadi jembatan antara OPD dan lembaga keagamaan. 3. Dinas Pendidikan (jika pesantren berada di bawah naungan Diknas) Tanggung Jawab: a. Mendukung kegiatan edukasi kesehatan di pesantren berbasis formal.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		2. Indikator Output a) Jumlah pesantren yang membentuk kader santri sehat secara resmi b) Adanya materi kesehatan yang diintegrasikan dalam kegiatan pesantren c) Jumlah dan jenis media promosi kesehatan yang dibuat dan digunakan d) Fasilitas sanitasi yang diperbaiki atau dibangun sebagai dampak program		b. Menyediakan dukungan kurikulum tambahan dan kegiatan UKS untuk pesantren madrasah/sekolah. 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Tanggung Jawab: a. Mendorong alokasi dana desa untuk mendukung sanitasi dan kesehatan lingkungan pesantren. b. Melibatkan pesantren sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat. 5. Dinas Sosial Tanggung Jawab: a. Memberikan dukungan bagi pesantren yang menampung anak yatim/piatu, dhuafa, atau kelompok rentan. b. Menyediakan bantuan sosial atau fasilitas yang menunjang kesehatan di lembaga tersebut. 6. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tanggung Jawab: a. Menyebarkan informasi promosi kesehatan berbasis keislaman. b. Mendukung produksi dan distribusi media digital edukatif di pesantren. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanggung Jawab: a. Mengintegrasikan program ini ke dalam rencana pembangunan daerah (RPJM/RKPD). b. Menyusun indikator kinerja daerah yang mencakup intervensi kesehatan berbasis keagamaan.
LANGKAH PREVENTIF				

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah	
Menyediakan Bantuan Dana bagi Keluarga Pasien yang Dirujuk	1. Identifikasi dan Pendataan Keluarga Sasaran 2. Penetapan Kriteria dan Mekanisme Pemberian Bantuan 3. Koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan dan Lembaga Sosial 4. Penyaluran Bantuan Secara Transparan dan Tepat Waktu 5. Monitoring dan Evaluasi 6. Advokasi dan Penganggaran	1. Jumlah pasien/keluarga yang menerima bantuan dana rujukan per tahun Target dapat disesuaikan berdasarkan estimasi kebutuhan dan kapasitas anggaran. 2. Jumlah pengajuan bantuan yang diproses dan diverifikasi dengan benar 3. Rasio pengajuan yang lengkap dan valid terhadap total pengajuan masuk. 4. Persentase bantuan yang disalurkan tepat waktu (sebelum atau saat keberangkatan rujukan) 5. Minimal 90% disalurkan sebelum keluarga mengalami kendala ekonomi di perjalanan. 6. Waktu rata-rata dari pengajuan hingga realisasi bantuan	**1.** Berkurangnya kesenjangan akses layanan kesehatan antar kelompok sosial-ekonomi **2.** Terwujudnya sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan mendesak warga sakit **3.** Peningkatan angka rujukan pasien yang tuntas dirawat di rumah sakit lanjutan (komparatif) **4.** Program menjadi model replikasi untuk bantuan sosial berbasis kebutuhan medis di daerah lain	OPD / Mitra	Peran
				Dinas Sosial	Penanggung jawab utama verifikasi dan penyaluran bantuan
				Dinas Kesehatan	Menentukan rujukan dan koordinasi antar fasilitas kesehatan
				Puskesmas / RSUD	Pengusul pasien dan pemberi informasi medis
				Baznas / Lembaga Zakat	Pendanaan tambahan dari zakat, infaq, sedekah
				Dinas PMG / Desa	Mendukung identifikasi keluarga tidak mampu
				Transportasi Daerah	Jika memungkinkan, menyediakan transportasi darurat (ambulans sosial)
				Rumah Singgah	Tempat tinggal sementara pasien dan pendamping

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		(misalnya < 3 hari kerja)		
Pendampingan Ibu Hamil dan 1000 Hari Pertama Kehidupan)	1. Identifikasi Sasaran dan Pemetaan Wilayah Risiko Tinggi 2. Rekrutmen dan Pelatihan Kader Pendamping Keluarga 3. Pelaksanaan Pendampingan Terstruktur dan Berkala 4. Pemberdayaan Keluarga dan Suami 5. Pemantauan dan Evaluasi Berkala 6. Integrasi Lintas Sektor dan Dukungan Program Tambahan 7. Edukasi dan Komunikasi Perubahan Perilaku (KIE)	1. Indikator Proses a) Jumlah kader/tim pendamping keluarga yang dilatih dan aktif b) Persentase ibu hamil yang mendapatkan kunjungan pendampingan minimal 1 kali per bulan Target: >80% ibu hamil mendapatkan kunjungan rutin. c) Persentase ibu menyusui dan balita yang mendapatkan edukasi tentang gizi dan kesehatan Jumlah kegiatan kelas ibu hamil dan kelas balita yang dilaksanakan per bulan/per desa Persentase pengisian buku KIA secara lengkap oleh kader/bidan 2. Indikator Output	1. Penurunan prevalensi stunting pada anak usia 0–24 bulan 2. Meningkatnya kualitas SDM (berdasarkan status gizi, kecerdasan, dan daya tahan tubuh anak) 3. Terbangunnya sistem perlindungan gizi keluarga berbasis komunitas (TPK, kader desa aktif)	Dinas Kesehatan (Dinkes) → OPD Penanggung Jawab Utama Peran: 1. Merancang dan mengoordinasikan pelaksanaan program pendampingan 1000 HPK. 2. Melatih tenaga kesehatan dan kader (bidan, gizi, promkes). 3. Menyediakan logistik seperti TTD, buku KIA, dan media edukasi. 4. Mengawasi pemantauan status gizi dan pertumbuhan anak melalui Puskesmas. 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong/Desa (DPMG/DPMPD) Peran: 1. Mendorong desa mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan 1000 HPK (PMT, kelas ibu hamil, dll). 2. Mengintegrasikan kegiatan ini dalam Posyandu dan program desa sehat. 3. Membina dan menggerakkan kader desa serta lembaga kemasyarakatan desa. 3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB / BKKBN Daerah) Peran: 1. Mengkoordinasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader KB, bidan, dan kader PKK.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		a) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama kehamilan b) Persentase ibu yang memberikan ASI eksklusif hingga bayi usia 6 bulan c) Persentase anak usia 6–23 bulan yang mendapatkan MP-ASI sesuai standar WHO (jumlah, frekuensi, dan keragaman makanan) d) Persentase balita yang memiliki status gizi normal (BB/U, TB/U, BB/TB sesuai KMS atau e-PPGBM) e) Jumlah keluarga sasaran yang mengikuti seluruh rangkaian pendampingan 1000 HPK		2. Mengintegrasikan pesan gizi dan kesehatan dalam program Bangga Kencana. 3. Melakukan edukasi dan konseling keluarga tentang peran orang tua dalam 1000 HPK. 4. Dinas Sosial Peran: 1. Memastikan keluarga rentan/miskin penerima PKH dan bantuan sosial lainnya menjadi prioritas sasaran. 2. Berkoordinasi dengan pendamping sosial agar dana bantuan digunakan mendukung kesehatan ibu dan anak. 5. Puskesmas dan Posyandu (Pelaksana Teknis Lapangan) Peran: 1. Melaksanakan layanan ANC, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan. 2. Menyediakan kelas ibu hamil dan balita. 3. Memonitor dan melaporkan status gizi ibu-anak melalui e-PPGBM dan sistem kesehatan lainnya. 6. PKK dan Kader Posyandu/TPK Peran: 1. Melakukan pendampingan langsung ke rumah sasaran. 2. Memberikan edukasi berbasis komunitas secara berkelanjutan. 3. Menjadi penghubung antara keluarga dan petugas kesehatan. Kolaborator Tambahan:

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
				1. Baitul Mal dalam bentuk Dukungan PMT atau transportasi rujukan. 2. Lembaga Pendidikan/Pesantren untuk Edukasi remaja putri sebelum menikah. 3. Tokoh agama/tokoh adat membantu Sosialisasi pentingnya 1000 HPK di komunitas.
BISKUIT (Bantuan Stimulus untuk Balita Kesulitan Gizi)	1. **Identifikasi dan Pemetaan Sasaran** 2. Penentuan Jenis Biskuit Bergizi berbasis pangan lokal 3. Mekanisme Distribusi Bantuan 4. Pendampingan Konsumsi dan Monitoring 5. Evaluasi Efektivitas dan Pelaporan 6. Pelibatan Masyarakat dan Kolaborasi OPD	Indikator Proses Jumlah balita sasaran yang menerima biskuit bergizi sesuai kriteria Target: >90% balita gizi kurang/BBTN mendapatkan bantuan tepat waktu. Persentase distribusi biskuit tepat waktu dan sesuai dosis Misalnya: 1 bungkus/hari selama 30–90 hari tanpa putus. Jumlah kader/petugas yang melakukan monitoring konsumsi di rumah/Posyandu	Penurunan prevalensi stunting dan wasting pada anak usia 0–59 bulan di wilayah sasaran dalam waktu 1–2 tahun. Tersedianya model intervensi gizi cepat tanggap berbasis lokal (biskuit, pangan lokal, PMT desa). Terbangunnya sistem respon cepat untuk balita bermasalah gizi di tingkat Puskesmas/desa.	1. Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes) sebagai Penanggung Jawab Utama Peran: Menentukan sasaran balita bermasalah gizi berdasarkan data e-PPGBM. Menyusun pedoman pelaksanaan dan pemantauan distribusi biskuit bergizi. Melatih tenaga kesehatan (bidan, petugas gizi) dan kader untuk pemantauan. Bertanggung jawab atas pengadaan, distribusi, dan evaluasi dampak program. Mengintegrasikan intervensi ini ke dalam kegiatan Posyandu dan Puskesmas. 2. Puskesmas Peran: Pelaksana teknis lapangan: distribusi biskuit ke bidan/kader desa.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		Target: Minimal 1 kunjungan/monitoring per minggu. Jumlah ibu yang mendapat edukasi tentang fungsi biskuit dan gizi seimbang Misalnya melalui Posyandu, kelas ibu balita, atau kunjungan rumah. Indiktor Output Persentase balita dengan kenaikan berat badan ≥200 gram per bulan selama intervensi Standar WHO menyebut kenaikan BB 200–400 gram/bulan sebagai indikator pemulihan yang baik. Persentase balita gizi kurang yang keluar dari status "gizi kurang" setelah intervensi 90 hari		Memantau pertumbuhan anak sebelum, selama, dan setelah pemberian biskuit. Melaporkan hasil intervensi kepada Dinas Kesehatan secara berkala. 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG/DPMPD) Peran: Mendorong desa untuk mengalokasikan Dana Desa guna mendukung atau menambah bantuan pangan lokal (sebagai pelengkap biskuit). Mengkoordinasikan keterlibatan kader desa dan PKK dalam pelaksanaan. 4. Dinas Sosial Peran: Mengidentifikasi keluarga miskin/DTKS yang menjadi prioritas penerima intervensi.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
		Target: ≥60% pulih ke status gizi normal. Persentase balita dengan BBTN yang kembali mengalami pertambahan BB sesuai kurva KMS Diukur selama minimal 2 bulan berturut-turut. Tingkat kepatuhan konsumsi biskuit oleh anak Target: ≥80% balita menghabiskan biskuit yang diberikan setiap hari.		Bersinergi dengan PKH dan bantuan sosial lainnya untuk dukungan menyeluruh. 5. Baitul Mal Peran: Potensial mendukung keluarga sasaran ekstrem atau kasus gizi kronis melalui dana zakat. Membantu pembiayaan transportasi atau tambahan PMT lokal jika diperlukan. 6. Tim Pendamping Keluarga (TPK - BKKBN) Peran: Ikut serta dalam edukasi keluarga sasaran dan pendampingan konsumsi. Menjadi penghubung antara data keluarga dan layanan kesehatan. 7. TP-PKK Kabupaten dan Kader Posyandu Peran: Mendampingi keluarga dalam pelaksanaan pemberian biskuit. Melakukan edukasi dan pemantauan konsumsi di rumah. Melaporkan pelaksanaan program pada tingkat desa.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
Pemeriksaan dan Perawatan Kesehatan Gratis bagi Pasien dengan Kondisi Tertentu di Rumah	1. Identifikasi dan Pemetaan Sasaran Dilakukan oleh Puskesmas bersama kader, bidan desa, dan pendamping sosial. Kriteria pasien: a) Tidak mampu datang ke fasilitas kesehatan. b) Terdata dalam DTKS, PKH, atau sebagai penerima bantuan iuran (PBI) d c) Pasien rawat jalan jangka panjang atau terminal (misalnya kanker, stroke berat). 2. Penyusunan Jadwal Kunjungan dan Tim Pelaksana a) Dibentuk Tim Layanan Kesehatan Rumah (Home Care Team) di setiap Puskesmas terdiri dari: dokter, perawat, bidan, petugas gizi, tenaga promkes. b) Jadwal kunjungan disusun per minggu/bulan sesuai kondisi pasien. c) Kunjungan dilakukan secara gratis, dan tercatat dalam sistem pelaporan. 3. Penyediaan Alat dan Obat Puskesmas menyiapkan:	1. Indikator Proses a. Jumlah pasien sasaran yang berhasil diidentifikasi dan diverifikasi dengan target: ≥95% dari pasien yang memenuhi kriteria menerima layanan home care. b. Jumlah kunjungan rumah yang dilakukan oleh tim kesehatan per bulan yang bandingkan dengan jumlah kunjungan yang dijadwalkan. c. Proporsi kunjungan tepat waktu oleh tim home care dengan target: ≥90% kunjungan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. d. Ketersediaan logistik dan obat-obatan untuk layanan home care e. Minimal 1 paket layanan dasar (alat +	1. Penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS karena kondisi yang bisa dicegah di rumah 2. Peningkatan kepuasan pasien dan keluarga terhadap layanan kesehatan 3. Peningkatan jumlah pasien kronis yang tercatat dan terpantau aktif 4. Penurunan angka kejadian komplikasi pada pasien dengan penyakit kronis yang rutin dikunjungi 5. Peningkatan kualitas hidup pasien kronis dan lansia 6. Peningkatan cakupan layanan	1. Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes) sebagai Penanggung Jawab Utama Peran: a. Menyusun pedoman teknis dan standar operasional program kunjungan rumah. b. Menentukan kriteria pasien sasaran (dari data Puskesmas, RS, DTKS). c. Mengalokasikan anggaran (APBK, JKN, atau Dana Alokasi Khusus). d. Melatih dan memfasilitasi tenaga kesehatan di Puskesmas untuk pelayanan home care. e. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap cakupan dan dampak layanan. 2. Puskesmas sebagai Pelaksana Teknis Lapangan Peran: a. Melakukan identifikasi pasien sasaran di wilayah kerja. b. Menyusun jadwal kunjungan dan membentuk Tim Home Care. c. Melaksanakan kunjungan dan dokumentasi pelayanan. d. Berkoordinasi dengan keluarga pasien dan kader desa. e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Kesehatan. 3. Dinas Sosial Peran: a. Menyediakan data rumah tangga miskin (DTKS), lansia terlantar, penyandang disabilitas.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
	a) Alat pemeriksaan portabel (tensi, gula darah, stetoskop, timbangan, dll). b) Peralatan luka kronis atau perawatan paliatif. c) Obat-obatan dasar dan obat kronis (dari APBD atau JKN). d) Jika butuh rujukan, difasilitasi ambulans desa atau rujukan berjenjang ke RSUD. 4. Pemberian Edukasi dan Konseling Keluarga Tim tidak hanya memeriksa, tetapi juga mengedukasi: a) Perawatan luka, pemberian makan pasien, manajemen emosi keluarga. b) Pencegahan komplikasi dan tanda bahaya. c) Keluarga dilatih agar mampu melakukan perawatan dasar harian. 5. Pelaporan dan Monitoring a) Setiap kunjungan dicatat dalam buku register pelayanan home care. b) Evaluasi kondisi pasien dilakukan secara berkala meliputi Perubahan kondisi klinis, Kepatuhan pengobatan dan Kualitas hidup pasien.	obat) tersedia per kunjungan. 3. Indikator Output a. Persentase pasien yang mengalami perbaikan gejala atau stabilisasi kondisi b. Persentase pasien yang mematuhi pengobatan setelah kunjungan rumah dengan Target: ≥80% pasien melanjutkan terapi sesuai anjuran. c. Jumlah keluarga yang mendapat edukasi perawatan pasien di rumah, minimal 1 anggota keluarga per pasien teredukasi dan aktif dalam perawatan. d. Persentase pasien yang tidak memerlukan rawat inap setelah intervensi di rumah sebagai indikator efektivitas	kesehatan berbasis rumah sebagai bagian dari sistem primer. 7. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan pasien rentan.	b. Mendukung pembiayaan non-medis (misalnya bantuan sembako, transport pasien). c. Menyediakan pendamping sosial bagi pasien rentan atau terlantar. 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG/DPMPD) Peran: a. Mendorong penggunaan Dana Desa untuk mendukung kegiatan pendampingan pasien. b. Mengaktifkan kader desa/Posyandu untuk membantu pemantauan dan edukasi. c. Mengintegrasikan kegiatan ini dalam RKPDes dan APBDes di desa sasaran. 5. ZIS Kabupaten pelibatan bantuan sosial Peran: Memberikan bantuan tambahan berupa alat bantu (kursi roda, tempat tidur pasien), sembako, atau biaya transportasi jika diperlukan. 6. Tim Pendamping Keluarga (TPK - BKKBN) dengan sasaran ibu hamil, lansia, dan pasien rumah tangga miskin) Peran: a. Mendampingi keluarga dalam perawatan dasar dan pengawasan konsumsi obat. b. Menghubungkan pasien dengan layanan sosial atau rujukan bila dibutuhkan. 7. Koordinasi Lintas Sektor

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
	c) Data dikompilasi oleh Puskesmas dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan setiap bulan. 6. Sumber Dana dan Kolaborasi Pendanaan melalui: a) APBD b) Dana kapitasi JKN (untuk kunjungan rumah). c) Dana Desa untuk kebutuhan transportasi/pendampingan. d) Kolaborasi dengan Dinas Sosial untuk pasien miskin dan lansia terlantar serta ZIS atau organisasi filantropi lokal untuk bantuan tambahan (makanan, alat bantu).	deteksi dini dan perawatan preventif.		Program ini sebaiknya dikoordinasikan dalam Forum Konvergensi Layanan Sosial Dasar dan Kesehatan Masyarakat, dengan BAPPEDA atau Sekretariat Daerah sebagai pengarah lintas kebijakan dan pengawasan.
DOKMARU(Dokter Masuk Rumah)	1. Penentuan Sasaran Rumah Kunjungan Kriteria rumah tangga sasaran meliputi: a. Rumah tangga dengan ibu hamil, balita, lansia, atau pasien penyakit kronis. b. Rumah di daerah terpencil, miskin, atau akses terbatas ke layanan kesehatan. c. Rumah tangga dengan status PHBS rendah (berdasarkan data Puskesmas/Posyandu). Dilakukan pemetaan awal oleh Puskesmas bersama kader desa.	1. Indikator Proses a. Jumlah rumah tangga sasaran yang dikunjungi dokter dan tim dengan target ≥90% dari target bulanan b. Frekuensi kunjungan yang sesuai dengan jadwal dengan target ≥90% kunjungan dilakukan tepat waktu c. Jumlah tenaga kesehatan yang aktif	1. Penurunan jumlah rujukan ke rumah sakit karena kasus yang bisa dicegah di rumah dengan penurunan ≥30% dalam 6–12 bulan 2. Penurunan kasus penyakit menular berbasis rumah tangga (Diare, ISPA) Dengan target ≥50% dari sasaran	**1**. Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes) sebagai Penanggung Jawab Utama Peran: 1. Merancang pedoman teknis pelaksanaan program DOKMARU. 2. Menyiapkan anggaran, SDM, dan logistik pendukung (APBK, JKN, BOK). 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dengan Puskesmas dan lintas sektor. 4. Melakukan pelatihan tenaga medis dan kader untuk kegiatan home visit. 5. Monitoring dan evaluasi capaian serta dampak program. **2**. Puskesmas sebagai Pelaksana Lapangan

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
	2. Pembentukan Tim Pelaksana Tim pelaksana DOKMARU dibentuk di tingkat Puskesmas, terdiri dari: a. Dokter b. Perawat/bidan c. Tenaga promosi kesehatan/gizi d. Kader kesehatan desa/TPK Tim dijadwalkan untuk melakukan kunjungan berkala (mingguan/bulanan) sesuai wilayah sasaran. 3. Pelaksanaan Kunjungan Rumah Selama kunjungan, tim melakukan: a. Pemeriksaan kesehatan dasar: tekanan darah, gula darah, status gizi balita, dll. b. Edukasi kesehatan keluarga: gizi seimbang, pengasuhan anak, perawatan lansia, sanitasi. c. Penerapan praktik PHBS secara langsung di rumah (cara cuci tangan, kebersihan air, dll). d. Motivasi keluarga untuk mengubah perilaku (misalnya stop merokok, pola makan sehat). e. Identifikasi risiko dan rujukan dini jika ditemukan tanda bahaya atau penyakit kronis tidak terkendali. 4. Edukasi dan Pemberdayaan Keluarga	dalam program dengan target ≥1 dokter dan ≥2 tenaga kesehatan per wilayah Puskesmas d. Jumlah kader/kader kesehatan desa yang terlibat dengan target ≥1 kader per dusun atau desa e. Penyediaan media edukasi dan logistik kunjungan Tersedia dan digunakan pada setiap kunjungan 2. Indikator output a. Persentase keluarga yang memahami materi edukasi setelah kunjungan dengan target ≥80% keluarga sasaran b. Persentase keluarga yang mulai menerapkan PHBS di rumah dengan target	program dalam 1 tahun 4. Peningkatan jumlah rumah yang memenuhi kriteria "Rumah Sehat Unggul" 5. Peningkatan status gizi anak dan ibu hamil dalam keluarga sasaran dengan terjadi perbaikan status pada ≥60% kasus terpantau	Peran: 1. Melaksanakan kunjungan rumah bersama tim DOKMARU. 2. Menentukan sasaran keluarga berdasarkan data wilayah kerja. 3. Mengisi dan melaporkan logbook kegiatan serta status kesehatan keluarga. 4. Memberikan tindak lanjut medis dan rujukan jika diperlukan. 5. Berkoordinasi dengan kader desa dan pemerintah gampong. **3.** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Peran: 1. Mendorong alokasi Dana Desa untuk mendukung kegiatan DOKMARU (logistik, edukasi, kader). 2. Mengkoordinasikan peran perangkat desa dan kader dalam pelaksanaan di tingkat gampong. 3. Memfasilitasi integrasi program ini dalam RPJMes/RKPDes. 4. Dinas Sosial Kabupaten Peran: 1. Menyediakan data keluarga miskin, disabilitas, lansia terlantar (DTKS). 2. Memberikan dukungan sosial seperti bantuan transportasi atau kebutuhan non-medis lainnya. 3. Bekerja sama dengan Dinkes dalam kunjungan ke keluarga rentan secara sosial-ekonomi. 5. BAPPEDA Peran:

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
	a. Setiap kunjungan dilengkapi dengan leaflet/buku saku "Keluarga Sehat Unggul". b. Keluarga dibimbing agar mampu: 1. Mengelola kesehatan anggota keluarga secara mandiri. 2. Mengelola kebun gizi keluarga (Toga). 3. Melakukan pemantauan mandiri (misalnya tekanan darah atau tinggi badan anak). 5. Pelaporan dan Evaluasi a. Tim mencatat hasil kunjungan pada buku register DOKMARU dan sistem pelaporan Puskesmas. b. Evaluasi dilakukan triwulanan: 1) Cakupan kunjungan. 2) Perubahan status kesehatan rumah tangga. 3) Peningkatan kepatuhan terhadap edukasi yang diberikan. 6. Kolaborasi dan Sumber Pendanaan Pendanaan bisa bersumber dari: 1) APBK bidang kesehatan 2) Dana kapitasi JKN (kunjungan rumah)	≥70% dari keluarga yang dikunjungi c. Persentase keluarga dengan anggota yang mengalami peningkatan status kesehatan ≥60% dalam 3 bulan d. Jumlah kasus risiko tinggi yang terdeteksi dini 10.		1. Mengarahkan kebijakan integrasi program DOKMARU ke dalam RPJM dan Renstra Kabupaten. 2. Memastikan konvergensi program ini dengan program kesehatan lainnya di tingkat kabupaten. **6**. PKK Kabupaten dan Desa Peran: 1. Menggerakkan kader Dasa Wisma untuk mendampingi kunjungan rumah. 2. Menyampaikan edukasi dan penguatan perilaku hidup sehat keluarga.

Strategi	Metode Implementasi	Indikator Keberhasilan	Target Pencapaian (2029)	Perangkat Daerah
	3) Dana Desa (untuk mendukung logistik dan kader) Kolaborasi dengan: 1) PKK dan BKKBN untuk data keluarga. 2) Dinas Sosial jika keluarga masuk kategori miskin. 3) ZIS/CSR untuk dukungan alat bantu atau sembako. 7. Integrasi dengan Program Lain Terhubung dengan: a. Posyandu, BKB, dan program 1000 HPK. b. Rumah Gizi Gampong.			

4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Strategi dalam penguatan layanan kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer yang Berkeadilan
   a) Mendorong penyediaan layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan daerah terpencil.
   b) Penyebaran fasilitas dan tenaga kesehatan secara merata antar gampong dan kecamatan.
2. Peningkatan Upaya Preventif dan Promotif melalui Pemberdayaan Masyarakat
   a) Mengintegrasikan program promosi kesehatan dengan pelibatan aktif masyarakat, kader, dan tokoh adat/agama.
   b) Mendorong perubahan perilaku sehat melalui kampanye PHBS, edukasi gizi, dan intervensi kesehatan berbasis sekolah.
3. Revitalisasi Puskesmas sebagai Pusat Layanan Primer
   a) Memperkuat fungsi Puskesmas sebagai garda depan pelayanan kesehatan dengan pendekatan keluarga dan gampong sehat.
   b) Peningkatan akreditasi, SDM, dan digitalisasi layanan di seluruh Puskesmas dan jaringannya.
4. Sinergi Lintas Sektor dalam Pembangunan Kesehatan
   a) Penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan sektor pendidikan, sosial, perikanan, PUPR, dan lainnya dalam penyediaan sanitasi, gizi, dan layanan dasar.
   b) Optimalisasi penggunaan Dana Desa, CSR, dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah.
5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi dan Berbasis Komunitas
   a) Mewujudkan sistem informasi kesehatan yang partisipatif dari tingkat gampong hingga kabupaten, berbasis data real-time dan pelaporan berbasis indikator kinerja.
   b) Pemanfaatan teknologi digital dan integrasi dengan sistem e-health nasional.
6. Integrasi Nilai Kearifan Lokal dan Keislaman dalam Program Kesehatan
   a) Membangun narasi kesehatan yang selaras dengan budaya Aceh dan nilai-nilai keislaman untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas program.
   b) Menghidupkan kembali praktik lokal seperti penggunaan TOGA (tanaman obat keluarga), tradisi tolong-menolong dalam menjaga kesehatan, dan nilai-nilai bersih dalam Islam.

3.3.17 Pengembangan Komoditi Ekspor

3.3.17.1 Potensi Komoditi Ekspor di Kabupaten Aceh Barat

Komoditi ekspor merupakan barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu negara atau daerah dan dijual ke pasar internasional karena memiliki nilai jual, daya saing, serta permintaan yang stabil atau meningkat di luar negeri. Komoditas ini biasanya berasal dari sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, maupun industri olahan, yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan devisa negara dan pendapatan daerah.

Berdasarkan data ekspor resmi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2024, kopi tetap menjadi komoditas unggulan Provinsi Aceh, dengan kontribusi devisa mencapai sekitar 22% dari total nilai ekspor barang nonmigas provinsi Aceh. Keunggulan ini terutama didorong oleh tingginya permintaan yang telah menembus pasar internasional.

Selain kopi, komoditas kelapa dan produk turunannya, seperti kelapa kering dan briket arang tempurung, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor daerah, dengan total devisa sebesar Rp30.083.528.609,41. Sementara itu, komoditas kelapa sawit, baik dalam bentuk crude palm oil (CPO) maupun produk olahan lainnya, menyumbang devisa sebesar Rp138.624.542.601,72, menjadikannya salah satu komoditas ekspor strategis, khususnya untuk pasar Asia Selatan dan Timur Tengah. Selanjutnya untuk komoditi Nilam juga menyumbang devisa sebesar Rp 20,631,466,869.00. Data ini mencerminkan peran sentral subsektor perkebunan dalam struktur ekonomi ekspor Aceh yang berbasis pada keunggulan agribisnis.

Sejalan dengan itu, Kabupaten Aceh Barat, sebagai bagian integral dari Provinsi Aceh, memiliki karakteristik geografis, agroklimat, dan sosial ekonomi yang serupa dengan wilayah-wilayah penghasil komoditas unggulan ekspor tersebut. Beberapa wilayah di Aceh Barat seperti Kecamatan Samatiga, Meureubo, dan Pante Ceureumen memiliki konsentrasi lahan dan aktivitas produksi yang cukup tinggi terhadap komoditas kopi, kelapa, dan kelapa sawit, sementara Kecamatan Sungai Mas dan Woyla dikenal sebagai sentra tanaman karet. Potensi komoditas-komoditas ini tidak hanya memiliki prospek pengembangan untuk ekspor, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam pembentukan struktur ekonomi daerah. Aktivitas produksi dan distribusi dari sektor-sektor tersebut menjadi penggerak utama perekonomian lokal, yang tercermin dalam besarnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Barat.

Menurut Laporan yang diterbitkan oleh BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat tiga sektor utama dengan kontribusi terbesar terhadap total PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24.08%; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 27,79%; serta sektor perdagangan besar-eceran, transportasi, dan penyediaan akomodasi makan-minum sebesar 12,66%. Ketiga sektor ini mencerminkan struktur ekonomi Kabupaten Aceh Barat yang berbasis sumber daya alam dan aktivitas distribusi barang dan jasa. Rincian lengkap kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.35 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Barat Menurut Lapangan Usaha (2020–2024) ***Dalam Miliar Rupiah***

Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023*	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry, and Fishing	1.974,84	1.892,99	2.003,07	2.133,53	2.087,36
Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	1.539,00	1.912,38	1.855,15	1.898,52	2.407,72
Industri Pengolahan / Manufacturing	102,52	108,71	116,75	116,01	118,12
Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	9,94	10,05	10,25	10,68	10,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / Water Supply, Sewerage, Waste Management, etc.	1,15	1,12	1,12	1,13	1,09
Konstruksi / Construction	762,15	763,18	759,63	795,46	830,98
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade	934,81	954,91	1.030,15	1.093,83	1.097,05
Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	281,08	309,77	333,91	326,67	358,27

Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023*	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation and Food Service Activities	67,66	68,64	88,73	92,93	94,46
Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	215,05	230,71	260,31	268,45	272,28
Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	132,23	126,20	121,75	110,36	135,11
Real Estat / Real Estate Activities	204,06	212,77	222,89	226,32	232,20
Jasa Perusahaan / Business Activities	27,73	27,84	30,88	30,36	31,70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence, etc.	487,49	513,73	512,64	553,88	578,72
Jasa Pendidikan / Education	135,01	138,48	145,15	148,46	151,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	167,61	183,83	203,74	204,29	206,04
Jasa Lainnya / Other Services Activities	41,79	42,92	47,88	49,33	51,13
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product	**7.084,15**	**7.498,18**	**7.744,00**	**8.060,20**	**8.664,92**

Sumber: Aceh Barat dalam Angka, 2025

Berdasarkan data diatas, Secara keseluruhan, PDRB Aceh Barat meningkat sebesar 22,3%, dari Rp 7.084,15 miliar pada 2020 menjadi Rp 8.664,92 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan struktur ekonomi daerah yang semakin berkembang dan membuka peluang besar untuk pengembangan ekspor dari sektor-sektor unggulan berbasis sumber daya lokal. Penentuan komoditi ekspor merupakan langkah strategis dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang memiliki prospek pasar global. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis komoditas yang paling layak dikembangkan guna menunjang peningkatan nilai tambah, memperkuat struktur ekonomi daerah, serta memperluas akses pasar internasional. Secara metodologis, penentuan dilakukan melalui pendekatan analitis seperti Location Quotient (LQ) untuk melihat keunggulan komparatif suatu komoditas di wilayah tertentu dibandingkan dengan wilayah lain, serta Shift Share Analysis (SSA) untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor terkait secara dinamis.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnama et al. (2019), komoditas unggulan utama dalam sektor perkebunan rakyat di Kabupaten Aceh Barat meliputi tanaman karet, kelapa, dan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif dan pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga komoditas ini memiliki potensi signifikan dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, karakteristik produksi yang relatif stabil, ketersediaan lahan yang luas, serta permintaan pasar yang tinggi menjadikan komoditas ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor unggulan, baik dalam bentuk bahan mentah maupun produk olahan.

Berdasarkan dokumen RPJM Teknokratik Kabupaten Aceh Barat tahun 2025-2029, menunjukkan adanya pergeseran fokus komoditas unggulan. Komoditas kopi, dan kelapa sawit kini menempati posisi strategis sebagai komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai kecamatan. Pergeseran ini mencerminkan dinamika

sektor pertanian dan perkebunan di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan pola produksi, permintaan pasar, serta potensi pengembangan nilai tambah melalui orientasi ekspor. Berikut hasil analisis indeks LQ dan DS untuk seluruh sektor yang ada di Kabupaten Aceh Barat disajikan pada Tabel 3.36 berikut ini.

Tabel 3.36 Penyandingan Nilai Indeks LQ dan DS untuk Komoditas Perkebunan yang Ada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kelapa sawit		Kelapa		Karet		Kopi	
		LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS	LQ	DS
1	Johan Pahlawan	**1,68**	-0,142	**2,36**	-0,009	0,37	-0,029	0,30	**0,273**
2	Samatiga	0,40	**0,148**	**2,42**	**0,024**	**1,15**	-0,103	**1,00**	**0,273**
3	Bubon	**1,27**	-0,016	**1,24**	-0,009	0,78	-0,082	**1,31**	**0,273**
4	Arongan Lambalek	0,89	-0,111	**2,32**	-0,009	0,84	-0,067	0,33	-0,172
5	Woyla	0,97	-0,138	0,35	-0,009	**1,12**	-0,055	**1,05**	-0,201
6	Woyla Barat	0,38	-0,136	0,15	-0,134	**1,54**	-0,029	0,94	-0,049
7	Woyla Timur	0,91	-0,073	0,23	-0,009	**1,21**	-0,071	**1,21**	-0,182
8	Kaway XVI	**1,54**	-0,125	0,62	-0,009	0,73	-0,087	**1,20**	**0,273**
9	Meureubo	**1,16**	-0,058	**1,36**	**0,011**	0,83	-0,031	0,71	-0,054
10	Pante Ceureumen	**1,11**	**0,204**	**1,18**	-0,009	0,90	-0,101	**1,72**	**0,087**
11	Panton Reu	**1,47**	-0,002	0,37	-0,009	0,79	-0,029	0,75	**0,059**
12	Sungai Mas	**1,00**	**0,056**	0,36	**0,229**	**1,10**	-0,044	**1,54**	-0,093

Sumber: Hasil Analisis LQ dan SSA Tahun 2023

Hasil analisis nilai Location Quotient (LQ) dan Differential Shift (DS) terhadap komoditas subsektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa sejumlah kecamatan memiliki keunggulan komparatif dan dinamis dalam pengembangan tanaman perkebunan. Kecamatan Samatiga, Pante Ceureumen, dan Sungai Mas tercatat memiliki dua jenis tanaman unggulan masing-masing. Samatiga unggul dalam komoditas kelapa dan kopi; Pante Ceureumen pada kelapa sawit dan kopi; serta Sungai Mas pada kelapa sawit. Sementara itu, kecamatan lainnya yang memiliki satu jenis tanaman unggulan, yaitu Kecamatan Bubon (kopi), Kaway XVI (kopi), dan Meureubo (kelapa), Penetapan status komoditas unggulan di kecamatan-kecamatan tersebut didasarkan pada terpenuhinya dua kriteria utama, yaitu: (1) nilai LQ lebih besar dari satu (LQ > 1), yang menunjukkan keunggulan relatif komoditas di wilayah tersebut dibandingkan rata-rata wilayah lainnya, dan (2) nilai DS bernilai positif, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan dinamis dan prospektif terhadap komoditas tersebut dalam konteks perkembangan regional.

Berdasarkan data ekspor Provinsi Aceh tahun 2024 dan hasil analisis indeks LQ dan DS dalam dokumen RPJM Teknokratik Kabupaten Aceh Barat 2025–2029, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan lima komoditi utama ekspor: kopi, kelapa, kelapa sawit, karet, dan nilam. Potensi ini didukung oleh kesamaan karakteristik agroklimat, sosial-ekonomi, serta ketersediaan lahan produksi yang luas dan tersebar di beberapa kecamatan strategis seperti Samatiga, Meureubo, Pante Ceureumen, dan Woyla.Komoditas kopi menonjol karena kontribusinya yang signifikan terhadap devisa ekspor Provinsi Aceh, serta tingginya permintaan global yang membuat pengembangan kopi arabika dan robusta di dataran tinggi Aceh Barat sangat prospektif.

Kelapa memiliki prospek ekspor yang tinggi, terutama ke China, yang menjadi tujuan utama ekspor kelapa Indonesia dengan volume mencapai 68.065 ton senilai USD 29,5 juta pada

Februari 2025. Kelapa sawit juga memiliki prospek ekspor yang tinggi karena permintaan internasional terhadap produk turunan seperti CPO yang terus meningkat, diiringi pula oleh luasnya areal tanam di wilayah pesisir. Karet, meskipun produksinya belum optimal, memiliki keunggulan berdasarkan analisis LQ dan tengah mendapatkan momentum dengan adanya rencana pembangunan industri pengolahan oleh pemerintah pusat. Sedangkan nilam, sebagai komoditas penyumbang devisa signifikan, menunjukkan daya saing ekspor tinggi karena kualitas minyak atsiri dari Aceh dikenal di pasar global. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima komoditas ini layak dijadikan prioritas pengembangan ekspor karena memiliki keunggulan komparatif, dukungan agroekosistem, dan posisi strategis dalam peta perdagangan global.

3.3.17.2 Strategi Pengembangannya dari Budidaya Sampai Pemasaran

a. Strategi Penguatan Produksi dan Standarisasi Mutu untuk Akselerasi Ekspor Komoditi Unggulan.

Fokus strategi ini diarahkan untuk menjawab permasalahan rendahnya produktivitas, mutu produk yang belum memenuhi standar ekspor, dan terbatasnya penerapan teknologi serta sertifikasi mutu di tingkat petani. Tujuan utama dari strategi ini adalah menciptakan sistem produksi yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan standar internasional melalui lima pilar utama yang disajikan dalam bentuk infografis dibawah ini:

Gambar 3.43
Strategi Penguatan Produksi dan Strandarisasi Mutu untuk Akselesasi Ekspor Komoditi Unggulan

Strategi penguatan produksi dan standardisasi mutu komoditi ekspor di Kabupaten Aceh Barat bertumpu pada lima pilar utama untuk mempercepat ekspor berbasis pertanian dan perkebunan. Pilar pertama adalah Peremajaan dan Intensifikasi Tanaman, yaitu mengganti tanaman tidak produktif seperti kopi tua atau kelapa sawit yang sudah melewati usia optimal dengan varietas unggul yang lebih adaptif dan produktif, serta menerapkan teknik budidaya yang efisien. Pilar kedua, Penggunaan Teknologi dan Mekanisasi, mendorong pemanfaatan alat pertanian modern seperti hand tractor, sistem irigasi tetes, dan mesin pengolahan hasil panen untuk meningkatkan efisiensi dan mutu. Pilar ketiga, Pelatihan dan Sertifikasi, bertujuan meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan sertifikasi standar

internasional seperti *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), serta sertifikasi organik dan berkelanjutan agar dapat masuk pasar ekspor. Pilar keempat, Penguatan Lembaga Penyuluhan dan Kelembagaan Petani, dilakukan dengan memperkuat Balai Penyuluhan Pertanian, kelompok tani, dan koperasi agar lebih berdaya dalam rantai nilai ekspor. Terakhir, pilar kelima yaitu Sistem Informasi dan Pemantauan Produksi Berbasis Digital, menggunakan teknologi seperti *Geographic Information System* (GIS), database petani, sistem peringatan dini, serta aplikasi informasi harga dan prediksi panen untuk mendukung pertanian presisi dan meningkatkan konektivitas petani dengan pasar secara efisien.

b. Strategi Penguatan Kelembagaan Petani dan Akses Pasar

Tujuan dari strategi ini adalah agar petani tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga memiliki peran sebagai pelaku usaha yang memiliki kontrol terhadap proses hulu hingga hilir, termasuk dalam aspek pemasaran produk secara kolektif dan berdaya saing tinggi. Berikut langkah-langkah dalam penerapannya yang tersaji dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3.44
Strategi Penguatan Kelembagaan Petani dan Akses Pasar

Infografis di atas menggambarkan enam langkah strategis yang saling terhubung dalam penguatan kelembagaan petani dan akses pasar. Langkah pertama adalah membentuk dan memperkuat kelembagaan petani seperti koperasi, Gapoktan, atau BUMDes, agar memiliki peran sentral dalam tata niaga dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Selanjutnya, dilakukan peningkatan kapasitas dan literasi usaha melalui pelatihan manajemen, pencatatan keuangan, negosiasi harga, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan kelembagaan yang profesional dan adaptif. Langkah ketiga yaitu memperkuat akses permodalan dengan pendampingan dalam penyusunan proposal usaha dan legalitas, agar dapat mengakses KUR, dana bergulir, atau pembiayaan mikro berbasis kelompok. Strategi ini kemudian dilanjutkan dengan mendorong kemitraan usaha dan akses distribusi primer melalui kerja sama langsung dengan offtaker, pedagang besar, pasar modern, hingga platform e-commerce. Tahap kelima berfokus pada penguatan distribusi dan pemasaran digital melalui platform daring untuk pemesanan, pengiriman, dan promosi produk pertanian. Terakhir, pemerintah daerah memberikan insentif bagi kelembagaan

berprestasi berupa bantuan alat, pelatihan lanjutan, atau akses prioritas ke proyek pengembangan sebagai bentuk dukungan dan motivasi.

c. Strategi: Hilirisasi Produk dan Penguatan Rantai Nilai *(Value Chain)*

Strategi Hilirisasi Produk dan Penguatan Rantai Nilai bertujuan mendorong agar komoditi ekspor unggulan seperti kopi, karet, kelapa sawit, kelapa dan nilam tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diproses menjadi produk olahan yang bernilai tambah tinggi. Fokus utama strategi ini adalah memperkuat proses pengolahan di tingkat lokal serta memperkuat keterhubungan antar pelaku usaha dari hulu hingga ke hilir, mulai dari petani, pengolah, koperasi, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan untuk menciptakan rantai pasok yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Strategi ini juga menjawab tantangan belum berkembangnya agroindustri lokal serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah di Aceh Barat.

Langkah-langkah pelaksanaan strategi hilirisasi produk pertanian dan perkebunan difokuskan pada aspek yang belum tercakup dalam strategi sebelumnya, meliputi: (a) Pemetaan Potensi dan Jenis Produk Hilir Unggulan, untuk mengidentifikasi produk turunan bernilai tambah dari komoditas utama seperti kopi kemasan, cold brew, VCO, arang briket, dan lateks sintetis, guna menentukan arah pengembangan industri lokal; (b) Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Agroindustri, berupa rumah produksi bersama atau Unit Pengolahan Hasil (UPH) di tingkat desa/kecamatan yang dilengkapi fasilitas pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan laboratorium uji mutu; (c) Pengembangan Kemasan, Branding, dan Legalitas Produk, melalui fasilitasi desain kemasan ekspor, pendaftaran merek, sertifikasi halal, izin edar, dan barcode produk untuk memperkuat daya saing di pasar modern dan ekspor; (d) Penguatan Kemitraan Rantai Nilai, dengan membangun jejaring bisnis antara petani, koperasi, pengolah, dan pelaku pasar untuk menciptakan rantai pasok yang efisien dan terintegrasi dengan kebutuhan pasar; (e) Penguatan Infrastruktur Produksi dan Fasilitas Pengolahan di Tingkat Lokal, yang mencakup pengadaan alat pascapanen, pembangunan rumah produksi, tempat pengeringan, cold room desa, dan fasilitas penunjang lainnya, agar proses hilirisasi dapat dilakukan langsung di lokasi produksi; serta (f) Inovasi Produk dan Diversifikasi Usaha, dengan mendorong riset sederhana untuk menghasilkan produk baru berbasis komoditas lokal seperti kopi instan, minuman fermentasi kelapa, atau kosmetik berbasis VCO, guna memperluas peluang pasar dan meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan. (g) Integrasi dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah, dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan hilirisasi komoditas unggulan subsektor perkebunan di Aceh Barat seperti kopi, kelapa, kelapa sawit, karet dan nilam secara konsisten diarusutamakan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJM, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja tahunan. Selanjutnya, penganggaran untuk kegiatan ini perlu diakomodasi dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD guna menjamin tersedianya dukungan sumber daya dan keberlanjutan program. Langkah ini penting untuk memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah, mendorong tumbuhnya industri hilir lokal, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas ekspor berbasis perkebunan secara berkelanjutan

d. Strategi Penguatan Infrastruktur Perdagangan dan Pengembangan Ekosistem Ekspor

Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memperkuat daya saing produk unggulan Aceh Barat di pasar internasional melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan efektivitas promosi perdagangan. Strategi ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan utama di Aceh Barat, yakni terbatasnya infrastruktur, serta lemahnya sistem promosi dan informasi pasar global. Dalam konteks ini, konektivitas transportasi dan keterjangkauan pasar ekspor menjadi isu krusial yang perlu dijawab secara sistematis dan terintegrasi.

Gambar 3.45
Strategi Penguatan Infrastruktur Perdagangan dan Pengembangan Ekosistem Ekspor

Langkah-langkah pelaksanaan strategi penguatan infrastruktur perdagangan dan pengembangan ekosistem ekspor difokuskan pada aspek logistik dan akses pasar global, mencakup: (a) pengembangan sarana transportasi seperti peningkatan konektivitas jalan produksi menuju pelabuhan dan bandara untuk mempercepat distribusi barang dan menekan biaya logistik; (b) optimalisasi pelabuhan dan bandara ekspor melalui modernisasi fasilitas dan sistem bongkar muat; (c) pengembangan sistem informasi logistik berbasis digital yang mendukung transparansi dan efisiensi proses ekspor; serta (d) promosi dagang dan perluasan kemitraan ekspor melalui partisipasi aktif dalam misi dagang dan branding komoditas unggulan daerah. (tambah terkait beberapa infrastuktur terkait kegiatan eskpor seperti gudang, ruang pengawetan

3.3.17.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan komoditi ekspor Kabupaten Aceh Barat tahun 2025–2029 difokuskan pada upaya menjawab tantangan utama daerah, yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan lahan, serta belum berkembangnya agroindustri pertanian. Komoditi unggulan seperti kopi, karet, kelapa sawit, nilam dan kelapa memiliki potensi besar untuk didorong sebagai penggerak ekonomi berbasis ekspor apabila didukung kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, berikut arah kebijakan pengembangan komoditi ekspor Kabupaten Aceh Barat:

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi petani serta penguatan standar ekspor

Arah kebijakan ini bertujuan untuk membangun kapasitas sumber daya manusia tani yang terampil, produktif, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar global, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hasil pertanian agar sesuai dengan standar ekspor internasional. Maka dari itu implementasi kebijakan ini meliputi :

Tabel 3.37 Implementasi Kebijakan Pengembangan Komoditi Ekspor

Komponen	Implementasi Kebijakan
Peningkatan Kapasitas Petani	Pelatihan GAP, GHP, dan pertanian organik; pendampingan teknis berkelanjutan
Dukungan Sarana Produksi	Akses benih unggul, Alsintan, dan teknologi pertanian presisi
Sertifikasi Ekspor	Fasilitasi sertifikat organik, halal, ISPO, dan mutu produk

b. Mendorong Pengembangan Agroindustri Dan Hilirisasi Produk Berbasis Komoditi Unggulan,

Arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian serta menciptakan peluang ekonomi baru di tingkat lokal. Di Kabupaten Aceh Barat, komoditi seperti kopi, karet, nilam, kelapa sawit, dan kelapa selama ini didominasi oleh penjualan dalam bentuk bahan mentah, yang membuat daerah kehilangan potensi pendapatan dari sektor pengolahan. Oleh karena itu, kebijakan ini diarahkan pada pembangunan unit-unit pengolahan hasil pertanian berskala UMKM maupun industri menengah, seperti pengolahan kopi sangrai dan bubuk, crumb rubber yaitu karet yang telah diolah menjadi serbuk atau butiran halus, biasanya dari ban bekas dari karet rakyat, minyak kelapa VCO, sabut kelapa, serta produk turunan kelapa sawit seperti biodiesel dan oleokimia. Selain pembangunan fasilitas fisik, arah kebijakan ini juga mencakup penguatan kapasitas SDM agroindustri, peningkatan akses teknologi tepat guna, dukungan perizinan usaha dan sertifikasi produk olahan, serta fasilitasi pemasaran produk turunan ke pasar domestik dan ekspor. Dengan mendorong hilirisasi, Aceh Barat diharapkan tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi juga menjadi pusat pengolahan dan distribusi komoditi unggulan yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

c. Memperkuat kelembagaan petani serta akses pembiayaan dan pasar ekspor

Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan posisi tawar petani dalam rantai nilai komoditi ekspor, sekaligus memastikan keberlanjutan usaha tani melalui dukungan kelembagaan, pembiayaan, dan akses pasar. Di Kabupaten Aceh Barat, kelembagaan tani yang masih lemah, minimnya akses ke lembaga keuangan formal, serta keterbatasan jaringan pemasaran menjadi hambatan utama dalam pengembangan komoditi unggulan seperti kopi, karet, kelapa sawit, kelapa dan nilam. Untuk itu arah kebijakan ini mencakup :

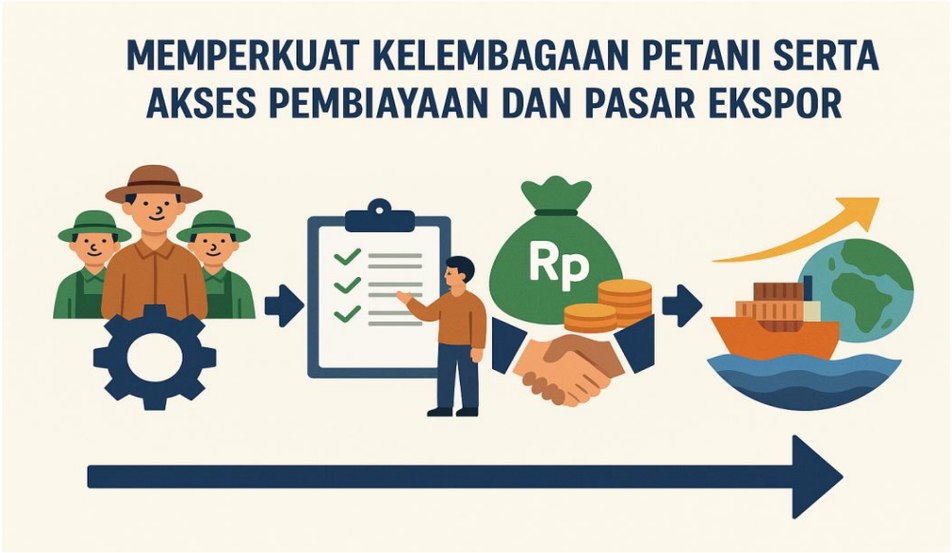

Gambar 3.46
Penguatan Kelembagaan Petani serta Akses Pembiayaan dan Pasar Ekspor

Infografis diatas menggambarkan secara sistematis empat elemen utama arah kebijakan untuk memperkuat posisi petani dalam rantai nilai komoditi ekspor. Tahapan pertama adalah penguatan kelembagaan petani, yang digambarkan melalui simbol kerja sama, menunjukkan pentingnya organisasi seperti kelompok tani, Gapoktan, dan koperasi komoditi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran. Tahap kedua menampilkan akses pembiayaan, yang diilustrasikan dengan ikon keuangan dan kemitraan dengan lembaga perbankan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan BUMD, serta pemanfaatan skema seperti KUR dan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Tahapan ketiga menggambarkan akses pasar ekspor, ditandai dengan ikon perdagangan internasional dan logistik, mencerminkan pentingnya business matching, digital marketing, dan kerja sama ekspor langsung. Tahapan akhir adalah penguatan daya tawar dan keberlanjutan usaha tani, yang disimbolkan dengan ikon petani terhubung ke pasar global, menandakan bahwa petani kini lebih terorganisir, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

d. Mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi pendukung perdagangan ekspor berbasis teknologi digital.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sistem perdagangan ekspor di Kabupaten Aceh Barat melalui penguatan infrastruktur fisik dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi digital. Salah satu tantangan utama di Aceh Barat adalah belum optimalnya infrastruktur pendukung perekonomian, seperti jalan produksi, sarana transportasi, dan fasilitas logistik, yang menghambat kelancaran distribusi komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, karet, kelapa sawit dan nilam menuju pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan ekspor. Oleh karena itu, kebijakan ini diarahkan pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur fisik yang strategis, termasuk jalan penghubung sentra produksi dengan titik distribusi, gudang penyimpanan, serta fasilitas bongkar-muat di kawasan potensial ekspor.

Di samping itu, rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses informasi perdagangan juga menjadi penghambat bagi pelaku usaha lokal dalam menembus pasar internasional. Untuk itu, aspek digitalisasi turut menjadi fokus kebijakan ini melalui pengembangan sistem informasi perdagangan ekspor yang terintegrasi. Implementasinya meliputi pendirian pusat

informasi ekspor berbasis digital yang menyediakan data harga pasar global, tren permintaan komoditas, persyaratan ekspor, serta peluang kemitraan dengan buyer internasional. Pemerintah daerah juga akan memfasilitasi katalog digital produk ekspor, sistem promosi daring, dan penyediaan informasi logistik digital yang dapat diakses oleh pelaku usaha secara real-time. Selain itu, digitalisasi proses perizinan dan dokumen ekspor akan diterapkan untuk mempermudah pelayanan publik dan mempersingkat waktu proses ekspor.

Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang besar namun belum tergarap maksimal. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil tambang (batu bara dan emas), hasil perkebunan (kelapa sawit, kelapa, kopi, dan nilam), hasil pertanian, serta hasil perikanan laut yang menjadi komoditas ekspor. Meski demikian, akses langsung ke pasar ekspor masih sangat terbatas karena belum adanya pelabuhan ekspor yang memadai dan terintegrasi. Saat ini, sebagian besar hasil produksi dikirim melalui jalur darat ke pelabuhan di Banda Aceh maupun luar Aceh seperti Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara). Hal ini menyebabkan tingginya biaya logistik, keterlambatan distribusi, serta ketergantungan terhadap pihak ketiga.

Pelabuhan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem transportasi nasional dan internasional. Secara hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendefinisikan pelabuhan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu, yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pengusahaan, serta difungsikan sebagai lokasi kapal bersandar, tempat naik-turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang. Pelabuhan juga mencakup terminal dan lokasi berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, serta menjadi tempat berlangsungnya kegiatan penunjang pelabuhan dan perpindahan antar moda transportasi, baik secara intra maupun antarmoda. pelabuhan bukan sekadar titik fisik untuk kegiatan bongkar muat, tetapi merupakan simpul penting dalam jaringan logistik dan transportasi yang mendukung integrasi sistem perdagangan nasional. Keberadaan pelabuhan juga mengandung unsur penyelenggaraan fungsi negara, yaitu pengawasan, pelayanan, dan pengaturan pergerakan barang dan manusia lintas wilayah. Dari sudut pandang ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai penggerak utama roda perekonomian suatu wilayah. Pelabuhan merupakan infrastruktur vital yang memungkinkan kegiatan distribusi barang hasil produksi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Keberadaan pelabuhan yang efisien akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk ekspor dari suatu daerah. Oleh karena itu, pelabuhan sering kali menjadi titik awal dan akhir dari aktivitas rantai pasok industri.

Pembangunan Pelabuhan ekspor di Kabupaten Aceh Barat menjadi sebuah kebutuhan strategis. Terdapat beberapa pertimbangan strategis untuk pembangunan tersebut seperti :

a. Mempercepat pengiriman barang ke pasar internasional;
b. Menurunkan biaya logistik nasional;
c. Mendorong pertumbuhan ekonomi global dan regional;
d. Menjadikan Aceh Barat sebagai simpul perdagangan Internasional di pesisir barat Sumatera;

Dalam merencanakan Lokasi Pembangunan ekspor, digunakan beberapa pendekatan sebagai analisa awal untuk pemilihan alternatif lokasi, sebagai berikut :

a. Lokasi pelabuhan diupayakan dapat terintegrasi/sedekat mungkin dengan Kawasan Peruntukan Industri yang telah/akan ditetapkan;
   Upaya pendekatan ini menekankan pentingnya kesesuaian lokasi pelabuhan dengan rencana pengembangan KPI. Pelabuhan yang berada dekat atau terintegrasi dengan KPI akan mempermudah alur logistik barang ekspor, mengurangi biaya angkut, serta mempercepat proses distribusi. Integrasi ini dapat berupa koneksi langsung ke pusat-pusat produksi, kawasan industri, maupun ke jalur distribusi lainnya.
b. Memiliki kedalaman yang memungkinkan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan;
   Kedalaman perairan menjadi syarat penting karena menentukan jenis kapal yang dapat bersandar. Lokasi dengan kedalaman alamiah yang cukup akan mengurangi kebutuhan pengerukan (*dredging*) dan menekan biaya awal pembangunan. Kedalaman yang memadai juga menentukan kemampuan pelabuhan untuk menerima kapal besar, yang menjadi kunci dalam efisiensi ekspor skala besar.
c. Tersedianya lokasi pengembangan (minimal 50 ha utk pelabuhan utama, ataupun sesuai kebutuhan untuk pelabuhan pengumpul);
   Lahan pengembangan dibutuhkan untuk membangun fasilitas pendukung pelabuhan seperti gudang, terminal kontainer, kantor pengelola, serta fasilitas logistik lainnya. Ketersediaan lahan juga berkaitan dengan kemudahan dalam pengadaan dan pembebasan lahan.
   Memiliki akses terhadap sistem jaringan infrastruktur jalan nasional;
d. Pelabuhan harus terhubung dengan jaringan jalan nasional agar lalu lintas barang dari dan ke pelabuhan dapat berlangsung lancar.
   Akses ini meliputi jalan arteri, jalan tol, hingga jalur rel kereta (jika ada). Tanpa akses jalan yang memadai, pelabuhan akan menghadapi hambatan distribusi, yang pada akhirnya menurunkan daya saing ekspor dari wilayah tersebut.
e. Kemungkinan biaya non standar yang akan timbul dalam pemenuhan spesifikasi Pelabuhan;
   Potensi biaya tambahan yang timbul perlu diantisipasi sejak awal jika lokasi memerlukan intervensi khusus untuk memenuhi spesifikasi teknis pelabuhan. Misalnya, lokasi dengan tanah lunak mungkin memerlukan perkuatan pondasi, atau lokasi jauh dari jaringan listrik harus ditopang dengan infrastruktur energi tersendiri.

Berdasarkan analisa awal dengan menggunakan pendekatan diatas terhadap rencana Pembangunan Pelabuhan ekspor di Aceh Barat, terdapat 5 alternatif lokasi yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk pembangunan yaitu : (a) Pelabuhan Pengumpul Meulaboh (Eksisting) di Gp. Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan; (b) Pembangunan Pelabuhan Baru pada Area Kawasan Peruntukan Perikanan Padang Seurahet Gp. Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan; (c) Pembangunan Pelabuhan Baru pada Area sekitar Kawasan Peruntukan Industri Peunaga Cut Ujong Gp. Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo; (d) Pembangunan Pelabuhan Baru pada area sekitar Kawasan Peruntukan Industri Suak Timah di Gp. Suak Timah Kecamatan Samatiga; (e) Pembangunan Pelabuhan baru pada sekitar area Rencana Kawasan Peruntukan Industri Arongan Gp. Suak Keumeude Kecamatan Arongan Lambalek. Berbagai alternatif Lokasi tersebut memiliki beberapa pertimbangan untuk dikembangkan sebagai Pelabuhan ekspor dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. lokasi pengembangan Pelabuhan pengumpul di Gp. Suak Indrapuri sebagai Pelabuhan ekspor dapat dilihat pada gambar berikut :

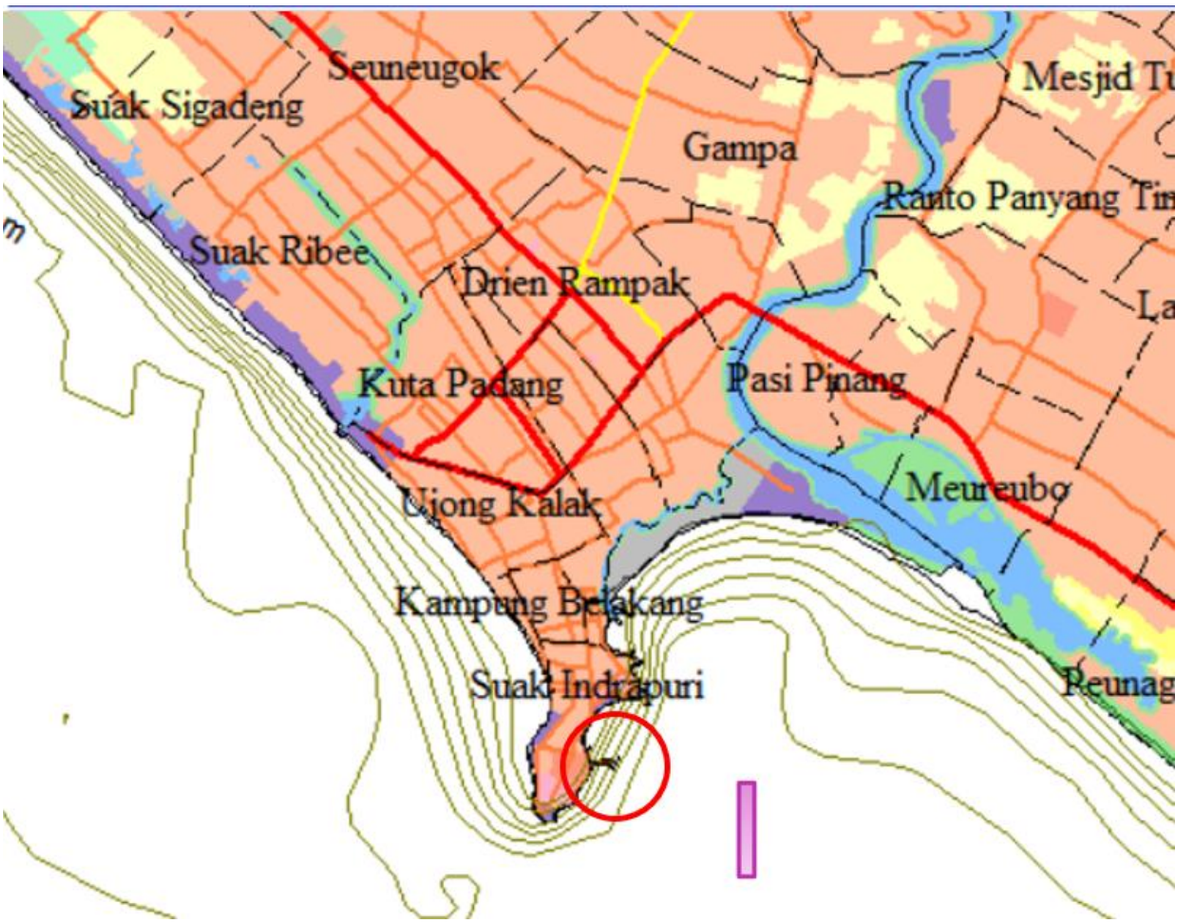

Gambar 3.47
Lokasi Alternatif ke-I Pelabuhan Ekspor di Pelabuhan Pengumpul Meulaboh (Eksisting) di Gp. Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan

Lokasi yang diusulkan untuk pembangunan pelabuhan memiliki sejumlah keunggulan geografis dan teknis yang patut diperhitungkan, meskipun terdapat pula beberapa keterbatasan yang perlu diantisipasi dalam perencanaan lebih lanjut. Beberapa Kawasan strategis sekitar lokasi tersebut antara lain : a. KPI Perikanan (Gp. Padang Seurahet) (±1,5 km); b. KPI Peunaga Cut Ujong (± 8 km); c. Rencana KPI Suak Timah (±10 Km); d. Rencana KPI Arongan (±29,5 Km); e. Kawasan WIUP Batu Bara (± 10 Km); f. Kawasan WIUP Emas (± 50,5 Km); g. Sentra Kelapa Arongan (±30 Km); h. Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAAL (±21.5 Km); i. Pusat Kawasan Perkotaan Meulaboh (±1,5 Km). Selain kedekatan dengan kawasan strategis, beberapa hal teknis berikut juga dapat menjadi pertimbangan pembangunan pada lokasi tersebut antara lain :

a. Kondisi perairan
   Secara alami, perairan di sekitar lokasi pelabuhan ditandai oleh ombak yang tenang dan relatif stabil. Kondisi ini sangat mendukung dari segi keselamatan pelayaran dan efektivitas operasional pelabuhan, karena risiko gangguan akibat gelombang tinggi dapat diminimalisir. Stabilitas perairan ini juga mengindikasikan bahwa pelabuhan tidak akan terlalu membutuhkan intervensi struktural besar seperti pemecah gelombang, sehingga dapat menekan biaya konstruksi awal.
b. Potensi pengembangan sisi laut
   Area pengembangan di sisi laut cukup menjanjikan. Ketersediaan ruang untuk memperpanjang dermaga serta memperdalam kolam pelabuhan membuka peluang pengembangan bertahap ke depan.
c. Keterbatasan lahan sisi darat

Kendala utama terletak pada keterbatasan lahan di sisi darat. Lahan pengembangan yang tersedia hanya sekitar ±5,6 hektar, yang tergolong minim untuk skala pelabuhan utama. Hal ini membatasi ruang bagi pembangunan fasilitas pendukung seperti gudang, area logistik, kantor pelabuhan, dan infrastruktur tambahan. Sehingga dibutuhkan strategi untuk mengoptimalkan keterbatasan lahan tersebut.

d. Aspek tata ruang dan konektivitas
Lokasi ini telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Meulaboh, yang berarti secara legal sudah masuk dalam peruntukan pengembangan pelabuhan. Dari segi konektivitas, lokasi ini juga unggul karena memiliki akses langsung ke jaringan jalan nasional yang akan mempermudah distribusi logistik.

Secara keseluruhan, lokasi pelabuhan ini memiliki potensi pengembangan yang baik di sisi laut, didukung kondisi perairan yang stabil serta konektivitas ke jalan nasional. Namun demikian, tantangan utama berada pada keterbatasan lahan sisi darat yang perlu ditangani lebih lanjut.

Alternatif pembangunan berikutnya berada di Area Kawasan Peruntukan Perikanan Padang Seurahet Gp. Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan. Lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

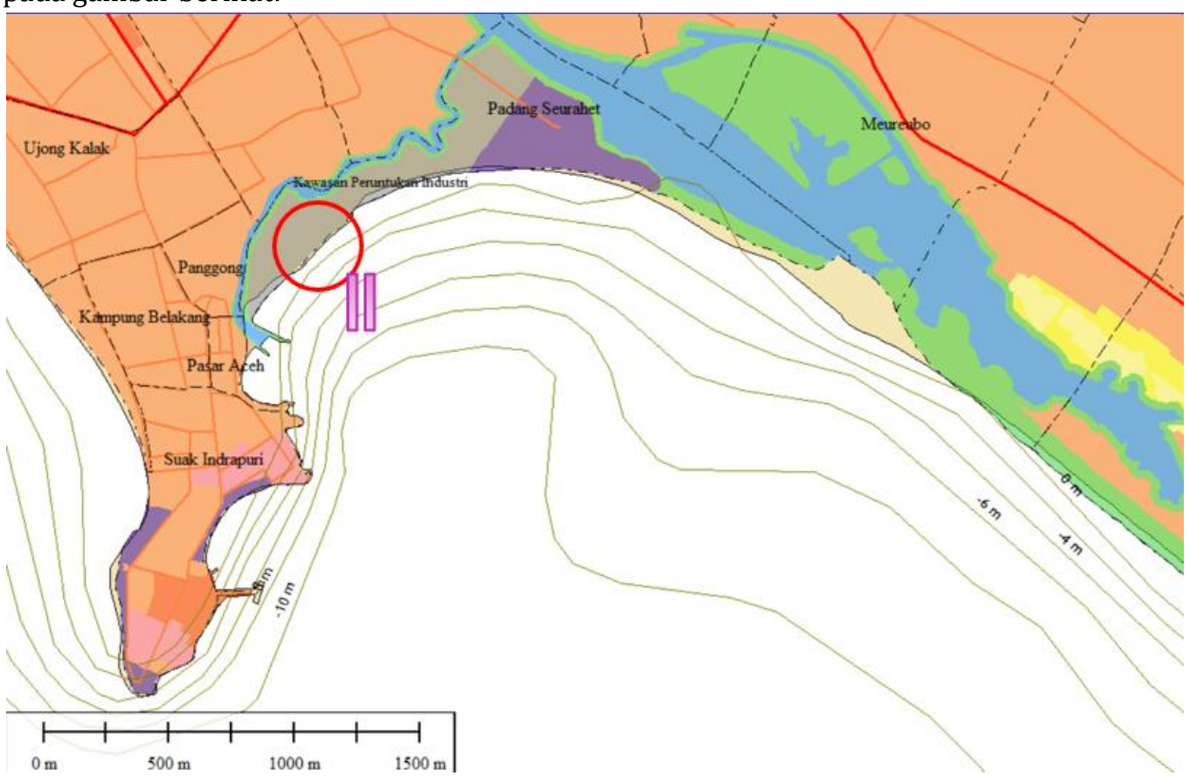

Gambar 3.48
Lokasi Alternatif ke-II Pembangunan Baru Pelabuhan Ekspor di Area Kawasan Peruntukan Perikanan Padang Seurahet Gp. Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan

Pemilihan lokasi tersebut mempertimbangkan jarak dengan beberapa kawasan strategis sekitar seperti : a. KPI Perikanan (Padang Seurahet) (0 Km); b. Kpi Peunaga Cut Ujong (± 7 Km); c. Rencana KPI Suak Timah (±9 Km); d. Rencana KPI Arongan (±28 Km); e. Kawasan WIUP Batu Bara (± 10 Km); f. Kawasan WIUP Emas (± 49 Km); g. Sentra Kelapa Arongan (±30 Km); h. Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAAL (±20 Km); i. Pusat Kawasan Perkotaan Meulaboh (±1 Km). Selain pertimbangan kedekatan dengan kawasan strategis, pertimbangan teknis lain agar Pembangunan dapat dilakukan antara lain :

a. Kondisi perairan di sekitar pelabuhan;

Lokasi pelabuhan berada di kawasan perairan yang tenang dan relatif stabil, sebuah karakteristik penting dalam pemilihan lokasi pelabuhan karena akan mendukung operasional kapal secara aman dan efisien sepanjang tahun. Kondisi ini mengurangi risiko gangguan akibat cuaca ekstrem atau gelombang besar, serta memungkinkan penurunan biaya konstruksi karena tidak diperlukan perlindungan besar terhadap kondisi laut.

b. Kebutuhan Pembangunan Jetty
   Meskipun lokasi sisi laut memungkinkan pembangunan dermaga, kontur laut yang cenderung landai memerlukan pendekatan teknis tertentu agar pelabuhan dapat melayani kapal ukuran menengah (3.000–5.000 DWT).
c. Kebutuhan pemecah gelombang (*breakwater*);
   Kawasan muara Sungai Krueng Cangkoi berpotensi mengalami sedimentasi yang dapat menghambat aktivitas pelabuhan. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan konstruksi pemecah gelombang (*breakwater*) guna mengendalikan arus dan endapan sedimen. Ini penting untuk menjaga kestabilan alur pelayaran dan mengurangi frekuensi pengerukan berkala.
d. Ketersediaan lahan sisi daratan;
   Luas lahan pengembangan di sisi darat mencapai ± 11 hektar. Luas ini tergolong cukup untuk pelabuhan pengumpul dan industri pendukung seperti cold storage, gudang, kantor operasional, serta area industri perikanan.
e. Penetapan Tata Ruang dalam RDTR
   Kawasan peruntukan industri di Padang Seurahet telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Meulaboh. Hal ini memperkuat legalitas untuk pengembangan dan menunjukkan adanya dukungan perencanaan tata ruang dari Pemerintah Daerah. Penetapan RDTR menjadi dasar hukum yang penting untuk pelaksanaan perizinan dan pembiayaan proyek.
f. Kebutuhan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
   Salah satu kendala adalah keterbatasan konektivitas jalan. Akses menuju jalan nasional belum begitu baik, sehingga dibutuhkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak. Tanpa infrastruktur yang memadai, distribusi logistik dari dan ke pelabuhan akan terhambat dan menurunkan efisiensi rantai pasok ekspor. Oleh sebab itu, aspek konektivitas harus menjadi bagian penting dalam perencanaan proyek pelabuhan ini secara terintegrasi.

Alternatif ke III berada di area sekitar Kawasan Peruntukan Industri Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo. Pada area tersebut terdapat beberapa Kawasan strategis sekitar seperti : a. KPI Perikanan (Padang Seurahet) (6 Km); b. KPI Peunaga Cut Ujong (±1,5 Km); c. Rencana KPI Suak Timah (±14,5 Km); d. Rencana KPI Arongan (±34 Km); e. Kawasan WIUP Batu Bara (± 6 Km); f. Kawasan WIUP Emas (± 45 Km); f. Sentra Kelapa Arongan (±36 Km); g. Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAAL (±25 Km); h. Pusat Kawasan Perkotaan Meulaboh (±7 Km). Lokasi alternatif ke III dapat dilihat pada gambar berikut :

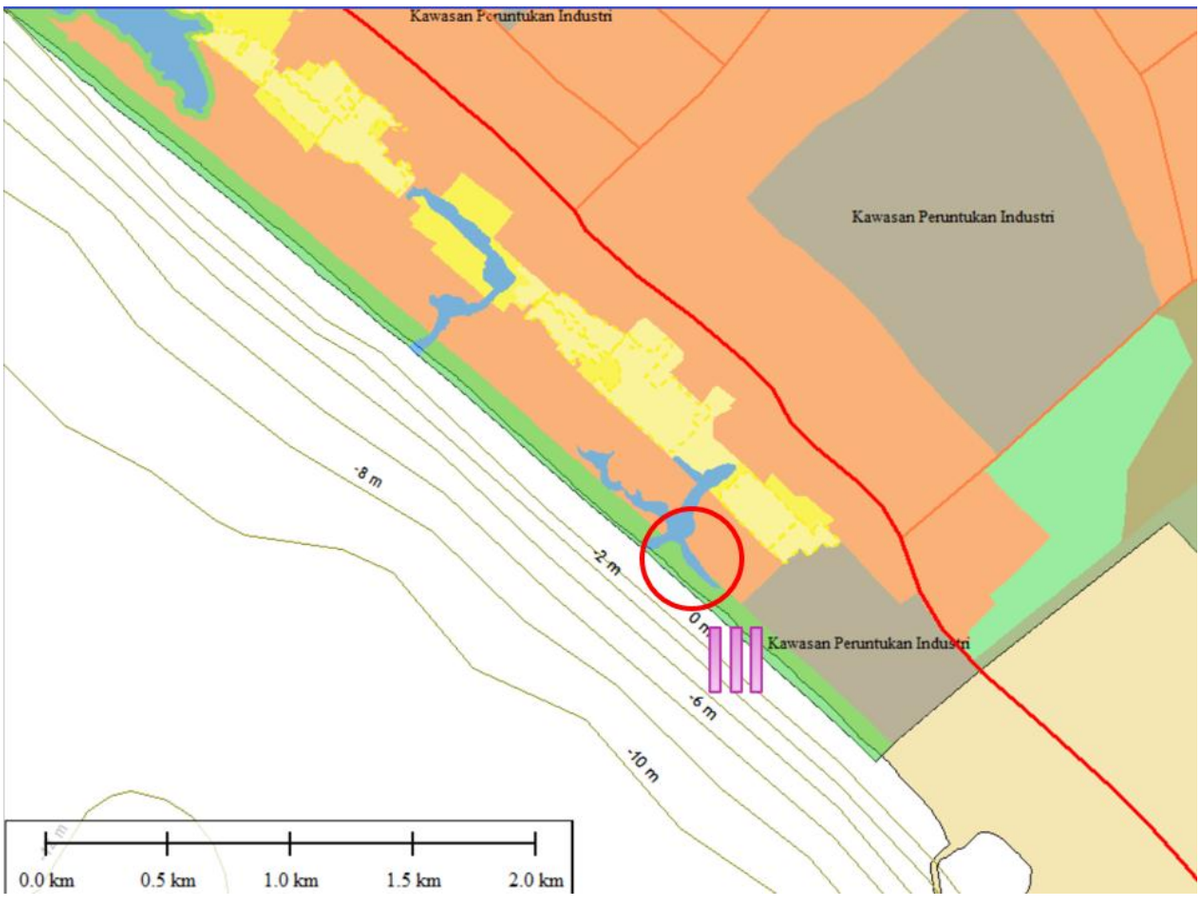

Gambar 3.49
Lokasi Alternatif Ke-III Pembangunan Baru Pelabuhan Ekspor di Area Kawasan Peruntukan Industri Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo

Secara teknis, beberapa pertimbangan awal untuk perencanaan pembangunan pada lokasi tersebut antara lain :

a. Kondisi perairan yang bergelombang;
   Lokasi pelabuhan yang direncanakan berada di perairan dengan karakteristik ombak yang relatif besar. Kondisi ini membawa dua implikasi utama yaitu potensi gangguan terhadap aktivitas bongkar-muat dan adanya kebutuhan untuk infrastruktur pelindung seperti pemecah gelombang guna menjamin keselamatan dan keberlangsungan operasional pelabuhan dalam jangka panjang. Gelombang besar juga dapat meningkatkan risiko sedimentasi di area pelabuhan, sehingga sistem pengendalian sedimen dan alur navigasi harus dirancang secara optimal.
b. Kebutuhan jetty dan pengerukan pada sisi laut;
   Lahan pengembangan sisi laut memiliki topografi yang agak landai. Untuk kebutuhan sandaran kapal berukuran besar, dibutuhkan Pembangunan jetty maupun pengerukan dasar laut (*dredging*) yang tentunya membutuhkan biaya cukup besar.
c. Kebutuhan pembangunan *breakwater*;
   Untuk mengantisipasi dampak negatif dari gelombang besar dan mencegah sedimentasi yang dapat mengganggu kedalaman kolam pelabuhan, sangat penting untuk membangun struktur pemecah gelombang (*breakwater*). Konstruksi ini tidak hanya berperan sebagai pelindung dermaga dari gelombang tinggi, tetapi juga akan menjaga kestabilan dasar laut di sekitar alur pelayaran sehingga kapal dapat bersandar dengan aman dan efisien.

d. Keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
   Di sisi darat, lokasi pengembangan berbatasan dengan lahan sawah yang termasuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini menimbulkan tantangan dari sisi legalitas dan keberlanjutan lingkungan, karena setiap konversi LP2B memerlukan kajian yang mendalam dan persetujuan dari berbagai pihak serta dampak lainnya. Selain itu, pengurangan terhadap LP2B juga akan berimplikasi terhadap menurunnya produksi komoditi padi yang akan mempengaruhi terhadap ketahanan pangan daerah.
e. Dukungan Tata Ruang Wilayah Industri;
   Kawasan peruntukan industri yang berdekatan, yaitu Peunaga Cut Ujong, telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Meulaboh. Ini merupakan nilai tambah strategis karena kehadiran pelabuhan akan memperkuat fungsi kawasan industri tersebut, memungkinkan sinergi logistik antara pelabuhan dan industri lokal. Kejelasan status tata ruang ini mempercepat proses perizinan dan pengembangan kawasan penunjang pelabuhan.
f. Konektivitas langsung ke jalan Nasional;
   Keunggulan utama lainnya adalah potensi konektivitas langsung ke jaringan jalan Nasional. Konektivitas darat yang baik akan memperlancar distribusi barang dari dan ke Pelabuhan serta mengurangi biaya logistik.

Alternatif ke-IV pembangunan pelabuhan ekspor berada di area sekitar Rencana Kawasan Peruntukan Industri Suak Timah. Lokasi tersebut berdekatan dengan beberapa Kawasan strategis lainnya seperti : a. KPI Perikanan (Padang Seurahet) (±8,5 Km); b. KPI Peunaga Cut Ujong (±14,5 Km); c. Rencana KPI Suak Timah (±0,3 Km); d. Rencana KPI Arongan (±18 Km); e. Kawasan WIUP Batu Bara (± 21 Km); f. Kawasan WIUP Emas (± 49 Km); g. Sentra Kelapa Arongan (±20 Km); h. Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAAL (±11 Km); i. Pusat Kawasan Perkotaan Meulaboh (±8,5 Km). Lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

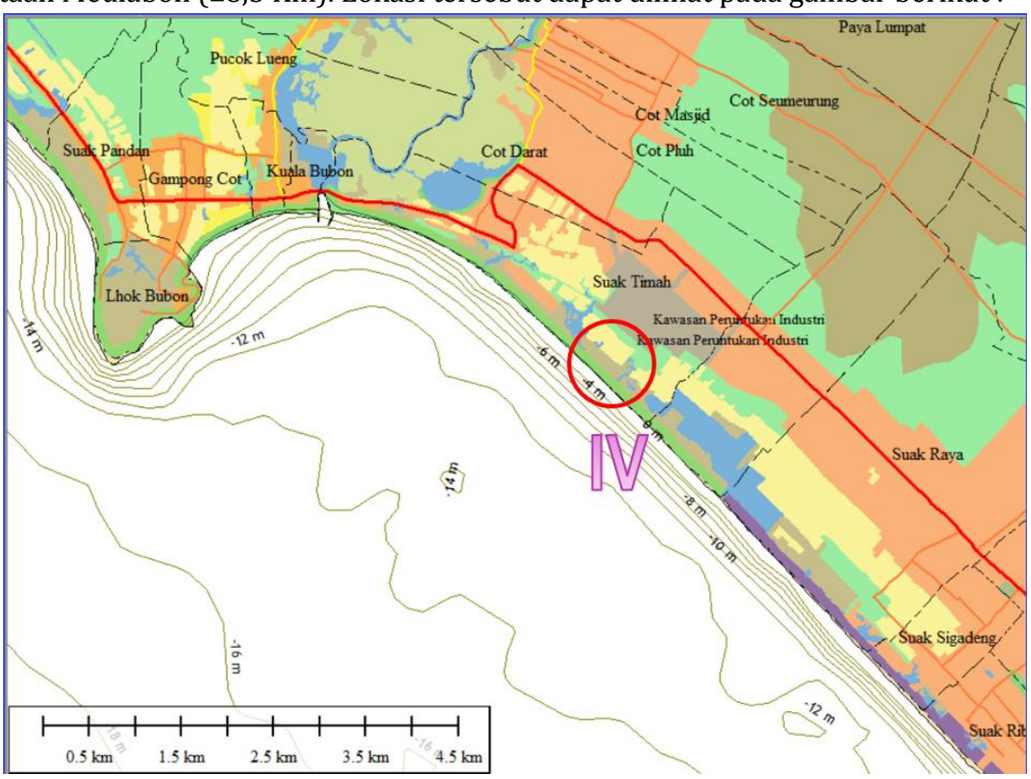

Gambar 3.50
Lokasi Alternatif Ke-IV Pembangunan Baru Pelabuhan Ekspor di Rencana Kawasan Peruntukan Industri Suak Timah

Beberapa pertimbangan teknis untuk perencanaan pembangunan pada lokasi alternartif ke-IV tersebut antara lain :

a. Kondisi Perairan;
   Lokasi pelabuhan ekspor yang direncanakan berada pada kawasan perairan dengan gelombang relatif besar. Kondisi ini mengharuskan desain konstruksi pelabuhan memiliki ketahanan tinggi terhadap gaya gelombang, serta memperhatikan keselamatan navigasi kapal. Pelabuhan dengan kondisi seperti ini biasanya memerlukan infrastruktur tambahan seperti pemecah gelombang (*breakwater*) untuk memastikan keamanan operasional dan kenyamanan aktivitas pelayaran, bongkar-muat barang, serta mengurangi risiko kerusakan pada dermaga.
b. Kondisi topografi;
   Secara topografi, area pengembangan di sisi laut memiliki kontur yang agak landai. Kondisi ini membutuhkan penanganan khusus untuk mencapai kedalaman optimal agar kapal dengan kapasitas 3.000 hingga 5.000 DWT dapat sandar dengan aman. Solusi yang paling memungkinkan adalah pembangunan jetty atau melakukan pengerukan (*dredging*) secara intensif untuk menciptakan kedalaman kolam pelabuhan yang mencukupi.
c. Kebutuhan infrastruktur pemecah gelombang;
   Untuk memastikan keberlangsungan operasional dan mitigasi dampak lingkungan dari sedimentasi dan ombak besar, rencana pembangunan pada pelabuhan baru ini membutuhkan konstruksi pemecah gelombang yang kuat dan efektif. Infrastruktur tersebut bukan hanya akan melindungi dermaga dan kapal dari hantaman gelombang tinggi tetapi juga menjaga kedalaman pelabuhan tetap stabil, mengurangi biaya perawatan akibat sedimentasi yang berlebihan, serta memastikan keamanan aktivitas bongkar-muat barang.
d. Keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
   Di sisi darat, lokasi pengembangan pelabuhan sebagian mencakup lahan sawah yang termasuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Status ini memberikan tantangan tambahan dalam hal tata ruang dan regulasi, karena setiap perubahan pemanfaatan lahan LP2B memerlukan kajian dampak yang komprehensif dan persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan untuk meminimalkan dampak sosial-ekonomi dan memastikan keberlanjutan fungsi pertanian.
e. Integrasi dengan Kawasan Industri Suak Timah;
   Rencana penetapan kawasan industri Suak Timah dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat menjadi nilai tambah signifikan bagi pelabuhan ekspor ini. Keberadaan pelabuhan akan memperkuat sinergi logistik antara kawasan industri dengan infrastruktur transportasi laut, mempercepat proses ekspor produk lokal, dan mendukung pertumbuhan industri di kawasan tersebut secara terintegrasi.
f. Konektivitas dengan jalan Nasional;
   Kelebihan strategis lainnya adalah konektivitas langsung ke jaringan jalan Nasional. Kemudahan akses ke infrastruktur jalan utama akan sangat membantu kelancaran distribusi barang dari dan ke pelabuhan, serta mengurangi biaya logistik. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap daya tarik investasi kawasan pelabuhan, memudahkan mobilitas produk, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Alternatif terakhir untuk lokasi Pembangunan Pelabuhan ekspor berada di sekitar Rencana Kawasan Peruntukan Industri Arongan. Lokasi tersebut berdekatan dengan beberapa Kawasan strategis antara lain : a. KPI Perikanan (Padang Seurahet) (±29,5 Km); b. KPI Peunaga Cut Ujong (±34 Km); c. Rencana KPI Suak Timah (±18 Km); d. Rencana KPI Arongan (±1 Km); e. Kawasan WIUP Batu Bara (± 42 Km); f. Kawasan WIUP Emas (± 42 Km); g. Sentra Kelapa Arongan (±4 Km); h. Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAAL (±10 Km); i. Perkebunan Kelapa Sawit PT. ASN (±16,4 Km); j. Pusat Kawasan Perkotaan Meulaboh (±30 Km).Rencana lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

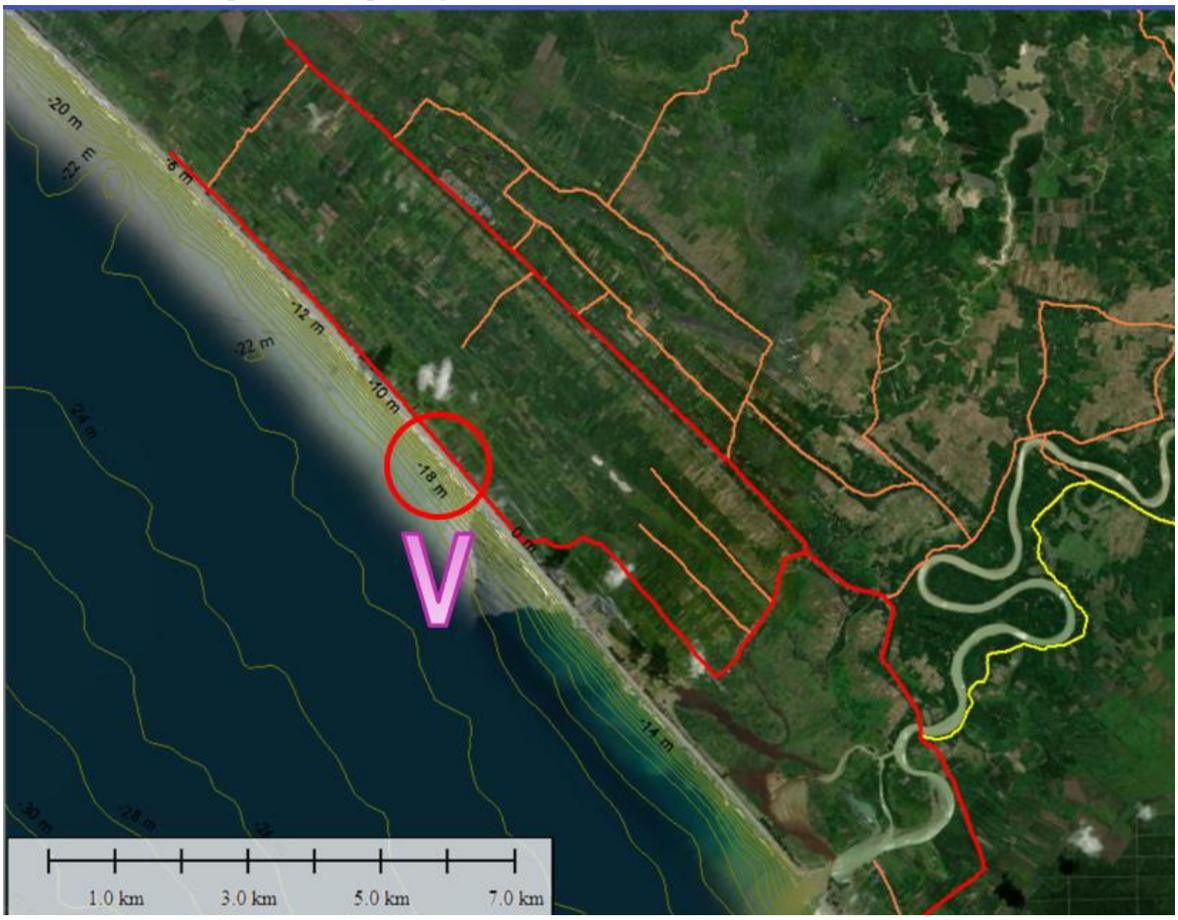

Gambar 3.51
Lokasi Alternatif Ke-V Pembangunan Baru Pelabuhan Ekspor pada Area Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Arongan

Pembangunan pelabuhan baru pada lokasi tersebut perlu mempertimbangkan beberapa kondisi teknis sebagai berikut :

a. Kondisi perairan;
   Lokasi yang direncanakan untuk pembangunan pelabuhan baru berada di kawasan perairan dengan gelombang yang relatif besar. Hal ini membawa tantangan tersendiri terutama dari segi stabilitas konstruksi dan keamanan operasional kapal. Penanganan khusus dalam desain struktur dermaga dan fasilitas lainnya perlu diperhatikan agar mampu menahan energi gelombang serta menjaga keselamatan kapal selama berlabuh dan kegiatan bongkar muat berlangsung.
b. Kondisi pantai dan kedalaman laut;
   Salah satu keunggulan utama lokasi ini adalah elevasi pantainya yang relatif curam. Kondisi ini memungkinkan tercapainya kedalaman laut lebih dari 10 meter dalam jarak relatif dekat, yakni sekitar ±300 meter dari garis pantai. Kedalaman ini cukup untuk mengakomodasi kapal berkapasitas 3.000 hingga 5.000 DWT yang memerlukan

kedalaman operasional sekitar 8 hingga 9 meter. Dengan kedalaman yang cepat tercapai ini, biaya infrastruktur tambahan, seperti jetty yang panjang atau pengerukan dapat diminimalkan.

c. Kebutuhan konstruksi pemecah gelombang;
Mengingat lokasi ini menghadapi gelombang besar dan risiko sedimentasi, pembangunan pemecah gelombang (*breakwater*) dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan operasional pelabuhan. Infrastruktur ini akan berfungsi mengurangi energi gelombang secara signifikan, menjaga kestabilan alur navigasi, dan mengurangi risiko sedimentasi yang bisa mengganggu kedalaman operasional pelabuhan.

d. Potensi lahan yang luas;
Lahan yang tersedia di lokasi ini sangat luas, yakni lebih dari 50 hektar. Ketersediaan lahan yang luas ini memberikan peluang besar untuk dikembangkan sebagai pelabuhan utama. Dengan area sebesar itu, pelabuhan dapat dilengkapi berbagai fasilitas pendukung yang komprehensif seperti gudang logistik, kawasan penyangga, fasilitas penanganan barang, dan infrastruktur pendukung lainnya, yang dapat menunjang pengembangan jangka panjang pelabuhan.

e. Integrasi dengan Rencana Kawasan Industri Arongan;
Keuntungan strategis lainnya adalah integrasi langsung dengan kawasan peruntukan industri Arongan. Lokasi pelabuhan ini akan memperkuat konektivitas logistik antara pelabuhan dan kawasan industri, memudahkan distribusi barang untuk espor maupun impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan melalui peningkatan nilai tambah industri lokal.

f. Aksesibilitas jalan Nasional;
Lokasi pelabuhan yang direncanakan ini juga memiliki keuntungan signifikan karena dapat terhubung langsung dengan jaringan jalan Nasional. Akses yang mudah ini dibutuhkan untuk efisiensi transportasi logistik darat, membantu menekan biaya operasional, serta meningkatkan daya tarik investasi.

Penyelenggaraan pelabuhan laut untuk kegiatan eskpor membutuhkan ketersediaan fasilitas yang memadai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, fasilitas yang harus tersedia pada suatu pelabuhan terbagi atas fasilitas pokok di wilayah daratan dan perairan serta fasilitas penunjang di wilayah daratan dan perairan. Beberapa fasilitas yang dimaksud antara lain :

a. Fasilitas pokok wilayah darat, antara lain:
   - dermaga;
   - gudang lini 1;
   - lapangan penumpukan lini 1;
   - terminal penumpang;
   - terminal peti kemas;
   - terminal ro-ro;
   - fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
   - fasilitas bunker;
   - fasilitas pemadam kebakaran;
   - fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya Beracun (B3); dan
   - fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP).

b. Fasilitas penunjang wilayah darat, antara lain :
   - kawasan perkantoran;

- fasilitas pos dan telekomunikasi;
- fasilitas pariwisata dan perhotelan;
- instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
- jaringan jalan dan rel kereta api;
- jaringan air limbah, drainase dan sampah;
- areal pengembangan pelabuhan;
- tempat tunggu kendaraan bermotor;
- kawasan perdagangan;
- kawasan industri; dan
- fasilitas umum lainnya.

c. Fasilitas pokok wilayah perairan, antara lain :
- alur-pelayaran;
- perairan tempat labuh;
- kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
- perairan tempat alih muat kapal;
- perairan untuk kapal yang mengangkut
- Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
- perairan untuk kegiatan karantina;
- perairan alur penghubung intrapelabuhan;
- perairan pandu; dan
- perairan untuk kapal pemerintah.

d. Fasilitas penunjang wilayah perairan, antara lain :
- perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
- perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
- perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
- perairan tempat kapal mati;
- perairan untuk keperluan darurat; dan
- perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.

Pembangunan berbagai fasilitas kepelabuhanan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan pelabuhan ekspor yang akan dibangun nantinya. Kajian secara lebih mendalam akan dilakukan untuk menentukan lokasi yang ideal serta infrastruktur serta fasilitas yang akan dibangun untuk menunjang aktivitas ekspor berbagai produk/komoditi yang dihasilkan oleh Kabupaten Aceh Barat. Dengan terbangunnya pelabuhan ekspor, tidak hanya akan memberikan daya ungkit perekonomian Aceh Barat secara signifikan, akan tetapi juga diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian di Kabupaten lain pada wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh.

3.3.17.4 Program Pembangunan Daerah

Untuk mendukung penguatan sistem ekspor komoditas unggulan di Kabupaten Aceh Barat, dirumuskan lima program prioritas sebagai implementasi konkret dari strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program-program ini disusun untuk menjawab tantangan nyata di lapangan sekaligus mempercepat pencapaian target ekspor daerah secara sistematis dan terukur.

a. Program Budidaya Unggulan Berbasis Teknologi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing komoditas ekspor unggulan di Aceh Barat, seperti karet, kopi, kelapa, kelapa sawit, dan

nilam, melalui penerapan teknologi pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan. Program ini mencakup penyediaan benih unggul, rehabilitasi lahan, penerapan sistem budidaya berbasis irigasi hemat air dan pertanian terpadu, serta penguatan kapasitas petani melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pemanfaatan teknologi digital pertanian. Program ini juga mendorong regenerasi petani dengan melibatkan generasi muda dalam kegiatan agribisnis modern, serta membangun ekosistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berbasis komunitas. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga menciptakan sistem pertanian yang tangguh, berorientasi ekspor, dan berbasis inovasi.

Pelaksanaan program ini diperkuat dengan program Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yaitu Program Mekanisasi dan Penerapan Teknologi di Sektor Pertanian (MESIN) yang mendorong transformasi sistem budidaya dari manual menuju mekanisasi dan digitalisasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas seluruh komoditas unggulan seperti kopi, nilam, kelapa, karet, dan kelapa sawit. Selanjutnya, program membangun kawasan sentra pertanian/ peternakan dengan branding SINTA (Sistem Integrasi Pertanian dan Peternakan) yang berfokus pada optimalisasi pemanfaatan lahan dan sumber daya melalui pendekatan pertanian terpadu yang relevan untuk semua komoditas, baik di dataran tinggi maupun rendah. Pembangunan infrastruktur irigasi melalui program LACI (Layanan Lhok Guci untuk Pertanian) menjadi kunci dalam menjamin ketersediaan air pada lahan tadah hujan, mendukung keberlanjutan usaha tani di seluruh wilayah produksi. Dalam rangka regenerasi petani, program ADAB (Aku Muda Aku Bertani) membuka ruang partisipasi aktif generasi muda untuk terlibat di semua rantai usaha pertanian, dari hulu hingga hilir. Selain itu, program BANNIER (Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian) memperluas akses petani terhadap input pertanian yang berkualitas seperti benih unggul, pupuk, dan sarana produksi lainnya untuk semua jenis komoditas ekspor. Integrasi berbagai program ini membentuk fondasi yang kuat dan sistematis dalam membangun sektor pertanian ekspor Aceh Barat secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi daerah yang menyeluruh.

b. Program Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Agribisnis

Program ini bertujuan membangun ekosistem agribisnis yang kokoh dan berdaya saing melalui penguatan kelembagaan petani serta perluasan kemitraan usaha. Program ini memfasilitasi penguatan koperasi dan kelompok tani sebagai entitas ekonomi lokal yang mampu mengakses pembiayaan, teknologi, dan pasar secara kolektif. Di samping itu, program ini juga mendorong pembentukan unit usaha bersama, pelatihan manajemen agribisnis, serta pengembangan kemitraan strategis antara petani dan pelaku industri, eksportir, maupun lembaga keuangan. Harapannya, petani dapat meningkatkan posisi tawar dalam rantai nilai, memperluas pasar, dan membangun sistem usaha tani yang berbasis komunitas, berkelanjutan, serta inklusif terhadap nilai-nilai lokal.

Pelaksanaan program ini didukung dengan beberapa program Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diantaranya Program KAYA NIRA (Kajreun Blang Berdaya Petani Sejahtera) menjadi fondasi utama dalam memperkuat peran kelembagaan adat melalui revitalisasi dan pelibatan aktif *Keujruen Blang*—lembaga adat tradisional Aceh yang memiliki otoritas dalam pengaturan sistem pertanian, penyelesaian konflik lahan, serta pembinaan sosial dan adat masyarakat petani. *Keujruen Blang* berperan strategis sebagai penghubung antara nilai-nilai kearifan lokal dan sistem agribisnis modern, terutama dalam pengelolaan lahan secara

kolektif di berbagai komoditas seperti kopi, kelapa, nilam, karet, dan kelapa sawit. Di sisi kapasitas manajerial, program HEPI (Hebat Penyuluhnya, Makmur Petaninya) program ini memperkuat kelembagaan petani melalui pelatihan teknis, pendampingan usaha, dan penguatan tata kelola kelembagaan agribisnis. Selanjutnya Program branding BERKAH (Bersama Kembangkan Akses dan Pemasaran UMKM) membuka akses kemitraan dan jalur pemasaran yang lebih luas bagi produk-produk pertanian, memperkuat branding dan penetrasi pasar baik domestik maupun ekspor untuk seluruh komoditas. Sementara itu, dalam aspek pembiayaan, program dengan branding SEJAHTERA (Sinergi Ekonomi untuk Jaminan Akses Modal terhadap Rakyat) memberikan dukungan permodalan yang inklusif untuk petani agar mampu berinvestasi dan memperluas skala usahanya. Integrasi seluruh program ini membangun ekosistem kelembagaan pertanian yang kuat, partisipatif, dan berkelanjutan—mendorong akselerasi pertumbuhan agribisnis ekspor Aceh Barat berbasis potensi lokal dan tata kelola yang modern.

c. Program Hilirisasi Komoditi Ekspor dan Inovasi Produk

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan melalui strategi pengolahan pascapanen dan diversifikasi produk ekspor. Program ini mencakup pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian, pelatihan inovasi produk, pendampingan dalam pengemasan dan branding, serta fasilitasi perizinan seperti sertifikasi halal dan izin edar produk. Melalui pendekatan ini, petani dan pelaku usaha lokal tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah, tetapi juga sebagai produsen produk jadi yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi lebih tinggi di pasar nasional maupun global. Transformasi ini diharapkan memperkuat posisi Aceh Barat sebagai pusat agribisnis yang tidak hanya berbasis produksi, tetapi juga hilirisasi dan inovasi.

Pelaksanaan program ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yaitu Program Mengembangkan Hilirisasi Komoditi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan dengan branding HIKMAT (Hilirisasi Komoditi Pertanian Terpadu) yang secara langsung mendorong pengembangan produk turunan dari seluruh komoditas unggulan Aceh Barat, seperti minyak nilam murni, kopi kemasan siap saji, virgin coconut oil (VCO) dari kelapa, dan olahan lateks dari karet. Dukungan terhadap hilirisasi ini diperluas melalui Program Membangun Kemitraan Pemasaran Produk UKM, IKM, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan dengan branding BERKAH (Bersama Kembangkan Akses dan Pemasaran UMKM) yang memfasilitasi pelatihan pengemasan, pemasaran digital, serta perluasan jejaring distribusi bagi produk-produk hilir pertanian, termasuk yang dikelola oleh pelaku UMKM. Infrastruktur penunjang hilirisasi turut dibangun melalui Program TABANGUN (Investasi untuk Membangun), yang mencakup pendirian rumah pengolahan nilam, rumah roasting kopi, unit pengeringan kelapa, serta gudang penyimpanan berbasis sistem rantai pasok modern. Kolaborasi ketiga program ini membentuk ekosistem hilirisasi yang terintegrasi, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, serta memperluas kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

d. Program Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Logistik Ekspor Daerah

Program ini merupakan jawaban atas keterbatasan infrastruktur fisik dan logistik yang selama ini menjadi hambatan utama dalam ekspor. Fokus program ini adalah pembangunan dan peningkatan jalan produksi, optimalisasi pelabuhan dan terminal muat, penyediaan gudang dan cold chain, serta penerapan sistem informasi logistik berbasis digital. Dengan

infrastruktur logistik yang efisien, komoditas unggulan dapat menjangkau pasar ekspor secara cepat, murah, dan terjamin mutunya.Pelaksanaan program ini telah mendapat dukungan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yakni melalui Program TABANGUN (Investasi untuk Membangun). Program ini mendorong masuknya investasi ke sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan produksi dan gudang penyimpanan hasil pertanian. Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat konektivitas dari sentra produksi ke titik distribusi komoditas ekspor.

e. Program Standardisasi, Sertifikasi Mutu, dan Promosi Ekspor Komoditi Unggulan

Program Penguatan Mutu, Sertifikasi, dan Promosi Komoditas Ekspor dirancang untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk unggulan Aceh Barat dengan cara memperkuat aspek mutu, legalitas, dan citra produk. Program ini meliputi pelatihan serta fasilitasi sertifikasi seperti organik, ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dan SNI, guna memastikan bahwa produk memenuhi standar nasional maupun global. Selain itu, peningkatan kualitas dilakukan melalui penerapan SOP (Standard Operating Procedure) pada proses produksi hulu dan hilir. Promosi produk dilakukan secara strategis melalui partisipasi dalam pameran dagang tingkat nasional dan internasional. Upaya branding komoditas—seperti kopi, minyak nilam, olahan kelapa, dan karet—juga menjadi pilar penting dalam membangun identitas dan positioning produk Aceh Barat di pasar global, sehingga mampu bersaing dan meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan.

3.3.18 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Salah satu permasalahan utama di Kabupaten Aceh Barat adalah semakin menurunnya lahan pertanian untuk menunjang ketahanan pangan daerah terutama pada komoditas tanaman padi. Tercatat jumlah luas tanam tanaman padi pada tahun 2018 mencapai 24.708,5 hektar, mengalami penurunan hingga mencapai 12.759,3 hektar di tahun 2024. Menurunnya jumlah lahan yang dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas padi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman, perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan, maupun peruntukan non pertanian lainnya. Selain itu, adanya lahan sawah yang tidak digarap lagi dan dibiarkan terbengkalai juga menjadi salah satu sebab menurunnya pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian tanaman pangan.

Kondisi lahan yang terbengkalai sangat memungkinkan untuk ditingkatkan menjadi lahan yang produktif, yaitu dengan meningkatkan kemampuan dan potensi dari sumber daya manusia agar lebih produktif dalam pengelolaan lahan yang belum termanfaatkan secara optimal. Lahan-lahan terbengkalai dapat diupayakan menjadi lahan yang bernilai ekonomis yaitu dengan mengolah lahan menjadi kawasan budidaya. Adapun sektor yang sesuai yaitu sektor tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, dan juga peternakan besar dan kecil serta perikanan yang menjadi ciri khas wilayah pesisir yang saat ini serta menjadi sumber utama dalam menopang ekonomi daerah.

Pemanfaatan lahan yang tidak produktif dapat diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum masih terdapat sejumlah tantangan dan hambatan dalam pemanfaatan lahan yang terbengkalai yaitu diawali dari keberadaan petani yang belum optimal diberdayakan dalam pengembangan lahan terbengkalai, masih minimnya inovasi dalam sektor pertanahan dan belum optimalnya sinergitas lintas sektoral untuk optimalisasi lahan terbengkalai.

Belum optimalnya pemberdayaan petani dalam peningkatan lahan produktif dapat dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif, dan berpartisipasi dalam Pembangunan daerah. Terhadap minimnya inovasi dapat dilakukan dengan mendorong mekanisasi pola pengelolaan lahan atau tanah serta inovasi yang benar-benar bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Dan sinergitas antar sektoral akan terbentuk, yaitu dengan menumbuhkan komitmen politik untuk mendorong perbaikan kinerja pertanian, melibatkan lembaga pemerintahan lain yang berkompeten dibidangnya, dan mendorong inovasi teknik pertanian berkelanjutan.

Pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan yang merupakan tujuan akhir dari pemanfaatan lahan yang terbengkalai, dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan menerapkan sistem pertanian terpadu. Sistem ini dilakukan dengan menggabungkan antara beberapa jenis tanaman dengan hewan dalam satu kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan dari sistem tersebut.

Disisi lain, dalam mengoptimalkan fungsi lahan yang terbengkalai juga dapat dilakukan dengan menggunakan tekhnologi pertanian yang modern. Hal ini dilakukan agar hasil panen yang diperoleh memilki kualitas yang baik serta berproduksi secara terus-menerus. Selain itu, penggunaan teknologi sebagai upaya dalam mengoptimalkan lahan yang terbengkalai juga mampu menekan biaya produksi. Penggunaan bibit unggul, irigasi tetes, mulsa dan pemakaian pupuk organik merupakan cara-cara terbaik dalam pemanfaatan tekhnologi modern untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Diversifikasi tanaman juga menjadi solusi dalam mengoptimalkan fungsi lahan yang terbengkalai. Penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada satu kawasan dalam rangka memenuhi pangan lokal sekaligus sebagai ketahanan pangan. Komoditas yang sesuai untuk ditanami yaitu tanaman pangan dan palawija, hortikultura dan lainnya. Diversifikasi tanaman ini bertujuan agar pendapatan masyarakat menjadi lebih baik dari semula.

Optimalisasi lahan untuk pemanfaatan pada berbagai sektor termasuk sektor pertanian membutuhkan analisis lebih lanjut secara detil dan komprehensif sesuai dengan kondisi eksisting. Namun secara umum dapat dijelaskan beberapa stratagi optimalisasi lahan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Menerapkan sistem pertanian terpadu, yaitu dengan menggabungkan antara beberapa jenis tanaman dengan hewan ternak dalam satu kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan dari sistem tersebut;
2. Menggunakan tekhnologi pertanian modern, yaitu dilakukan agar hasil panen yang diperoleh memilki kualitas yang baik serta berproduksi secara terus-menerus. Selain itu, penggunaan teknologi sebagai upaya dalam mengoptimalkan lahan yang terbengkalai juga mampu menekan biaya produksi. Penggunaan bibit unggul, irigasi tetes, mulsa dan pemakaian pupuk organik merupakan cara-cara terbaik dalam pemanfaatan tekhnologi modern untuk meningkatkan produktifitas lahan;
3. Melakukan diversifikasi tananaman, yaitu dengan melakukan penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada satu kawasan dalam rangka memenuhi pangan lokal sekaligus sebagai ketahanan pangan. Komoditas yang sesuai untuk ditanami yaitu tanaman pangan dan palawija, hortikultura dan lainnya. Diversifikasi tanaman ini bertujuan agar pendapatan masyarakat menjadi lebih baik dari semula;

4. Konservasi tanah dan air, yaitu dengan menjaga ketersediaan air tanah yang diperlukan baik secara alami ataupun buatan untuk keberlangsungan pengelolaan lahan produktif. Konservasi air dapat dilakukan melalui pembangunan biopori, sumur serapan, peningkatan vegetasi tanaman bawah/serasah yang memicu peningkatan infliltrasi serta rehabilitasi embung/danau/rawa/sumber air lainnya. Sumur bor merupakan sumber air tanah yang dapat menjadi sumber air pada lahan pertanian. Di sisi lain, adanya embung air dan kegiatan penghijauan juga menjadi alternatif tersedianya air disamping fungsi hijauan sebagai media dalam pencegahan erosi tanah;
5. Penguatan kelembagaan, yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat dalam optimalisasi lahan terutama sebagai petani sesuai dengan komoditasnya. Selanjutnya, perlu adanya penguatan kelembagaan antar petani dan kelompok tani yang akan memberikan peluang bagi mereka dalam mengakses informasi hingga pendanaan yang diperlukan dalam meningkatkan hasil panen;
6. Kebijakan pemerintah, yaitu dengan menghadirkan kebijakan yang diperlukan oleh para petani sekaligus kelompok tani semisal dengan memberikan insentif bagi mereka yang melakukan pengoptimalan lahan terbengkalai menjadi lahan produktif. Disisi lain, dukungan pemerintah dalam perlidungan bagi petani juga sangat diperlukan terutama dalam alih fungsi lahan yang mereka kerjakan;
7. Kerja sama dengan sektor swasta, yaitu dengan melibatkan sektor swasta sebagai sumber investasi dalam pengelolaan lahan terbengkalai dalam pengembangan agribisnis yang sesuai dengan komoditas potensi.

Pelaksanaan optimalisasi lahan dapat ditunjukkan pada gambar berikut :

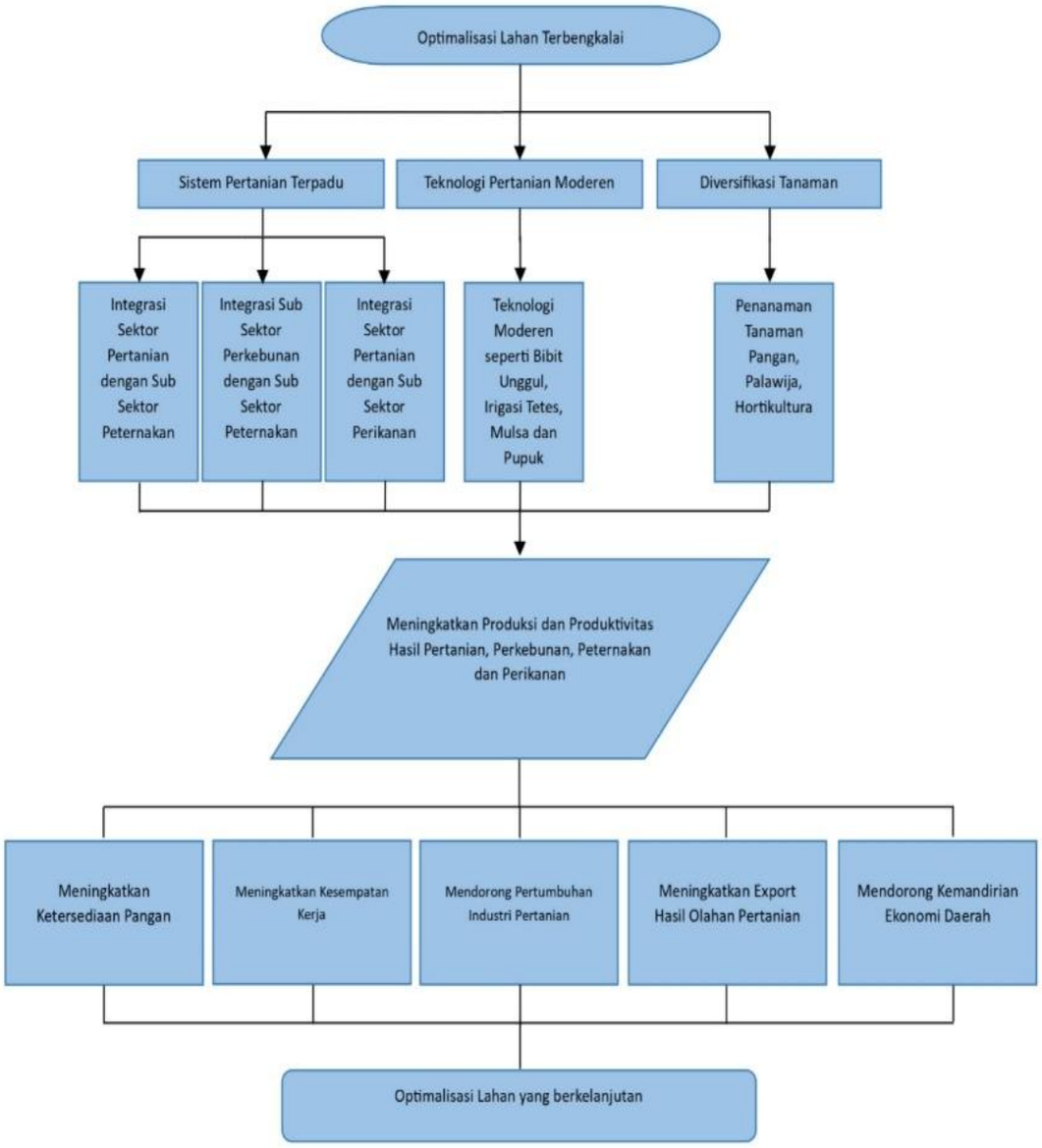

Gambar 3.52
Bagan Alir Optimalisasi Lahan Yang Berkelanjutan

Melalui optimalisasi lahan yang akan dilaksanakan nantinya diharapkan akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, peningkatan ketahan pangan serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat.

3.3.19 Kebencanaan

3.3.19.1 Risiko Bencana di Kabupaten Aceh Barat

Sejak beberapa dekade terakhir, terdapat lima jenis bencana yang signifikan mempengaruhi kondisi Kabupaten Aceh Barat, yaitu gempa bumi dan tsunami Aceh 2004, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, daan badai-gelombang ekstrim. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka bencana pantai memberikan dampak besar terhadap Kabupaten Aceh Barat. Lebih lanjut, mengingat Kabupaten Aceh Barat memiliki dua sungai besar, yaitu Sungai Krueng Meurebo dan Sungai Krueng Mas, maka banjir kerap melanda berbagai tempat di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) kedua sungai besar tersebut.

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia, indeks risiko Aceh Barat tahun 2024 adalah 173.76. Indeks Risiko ini turun dari tahun 2023 yaitu 185.57. Gambar 3.53 memperlihatkan fluktuasi indeks risiko bencana Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2015. Fluktuasi indeks risiko tersebut memperlihatkan bahwa risiko bencana di Kabupaten Aceh Barat secara umum terus turun yang menandakan bahwa upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat telah berjalan dengan baik meskipun kelas risiko ini masih berada pada kelas tinggi. Untuk menurunkan satu kelas risiko dari tinggi ke tingkat sedang, maka indeks risiko tersebut harus kurang dari nilai 144,00. Ini berarti bahwa masih perlu upaya-upaya lainnya agar tingkat risiko bencana di Kabupaten Aceh Barat dapat turun ke kelompok sedang. Catatan lain yang perlu diperhatikan bahwa penurunan indeks risiko ini tidak seluruhnya konsisten turun dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, dibandingkan dengan Indeks Risiko Bencana Provinsi Aceh, Indeks Risiko Bencana di Aceh Barat masih tinggi. Ini berarti bahwa upaya yang terus menerus dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Aceh Barat perlu diformulasi lebih lanjut agar lebih efektif dan konsisten menurunkan indeks risiko bencana.

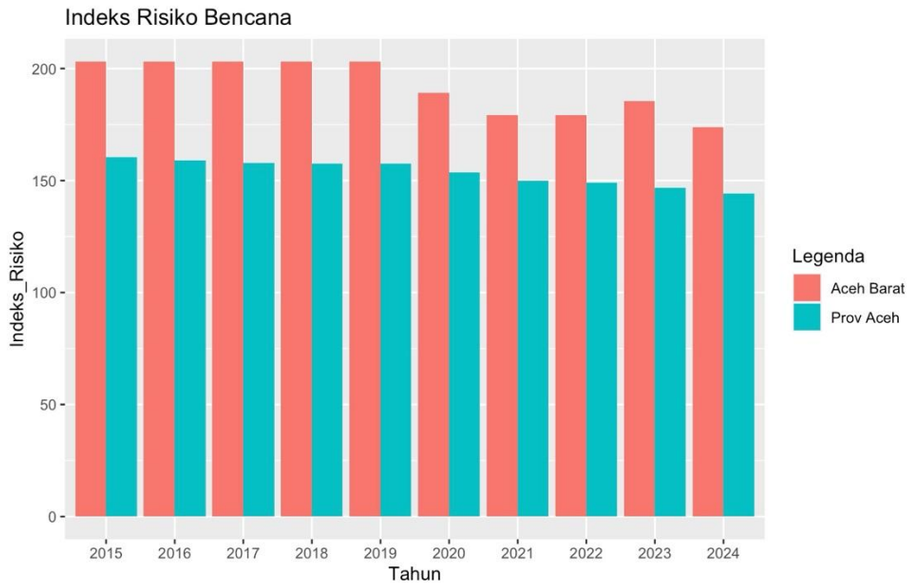

Gambar 3.53
Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Aceh Barat dan Provinsi Aceh 2015-2024.

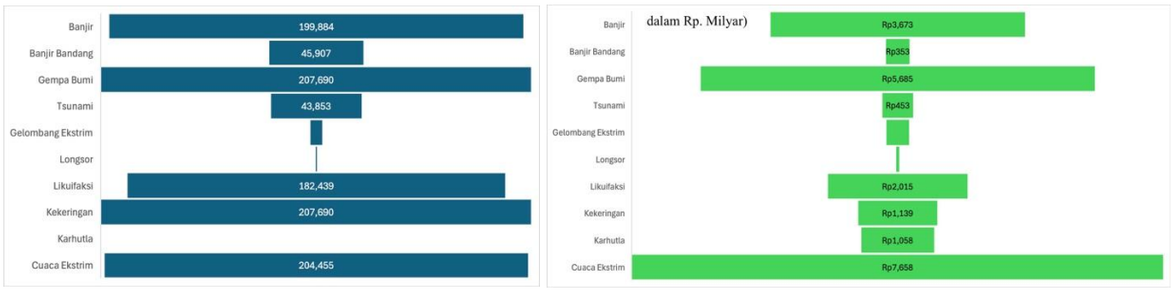

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Aceh Barat, 2024.

Gambar 3.54
Jumlah jiwa terpapar terhadap masing-masing jenis bahaya di Kabupaten Aceh Barat (kiri) dan Jumlah estimasi kerugian yang akan ditimbulkan oleh risiko bencana di Kabupaten Aceh Barat (kanan).

Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan (RPB) Aceh Barat kurun waktu 2025-2029, terdapat beberapa jenis bencana yang perlu menjadi prioritas penanganan. Bencana-bencana tersebut adalah gempa bumi, gelombang ekstrim, banjir, kebakaran hutan dan lahan

(karhutla), banjir bandang dan tanah longsor. Gambar 3.55 memperlihatkan matriks prioritas penanganan bencana di Kabupaten Aceh Barat menurut tingkat risiko dan kecenderungan kejadian bencana bersumber dari RPB. Meskipun tsunami tidak berada pada zona prioritas penanganan, namun mengingat dampak luas yang dihasilkan dan investasi mitigasi yang memerlukan upaya jangka panjang, maka selayaknya tsunami tetap menjadi prioritas penanggulangan bencana Aceh Barat kurun waktu 2025-2029.

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN			
	TETAP		• Kekeringan • Likuefaksi • Tsunami	• Gelombang Ekstrem dan Abrasi • Gempabumi
	MENINGKAT		• Banjir Bandang • Tanah Longsor	• Banjir • Cuaca Ekstrem • Kebakaran Hutan dan Lahan

Keterangan:

I	Prioritas Pertama
II	Prioritas Kedua
III	Prioritas Ketiga

Gambar 3.55
Matrik Penanganan Bencana di Kabupaten Aceh Barat

3.3.19.1 Rekomendasi Penanggulangan Bencana Aceh Barat 2025-2029

Secara umum, Kabupaten Aceh Barat perlu menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Barat di bawah 150.0 sampai dengan tahun 2029. Untuk itu diperlukan sejumlah upaya agar indeks risiko bencana tersebut dapat turun.

Dalam rangka hal tersebut, maka rekomendasi generik penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

   Secara kelembagaan, fungsi dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat perlu diperkuat melalui revisi regulasi yang secara tegas menyatakan peran BPBD dalam memimpin dan mengkoordinir penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat. Penguatan kelembagaan ini perlu disertai dengan alokasi anggaran rutin BPBD yang proporsional dengan tugas dan tanggung jawab BPBD.

   Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Aceh Barat memiliki peran penting untuk menghubungkan dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat. Selama ini, FPRB Aceh Barat belum mendapatkan perhatian dan penguatan yang maksimal sehingga pada saat dibutuhkan sulit menggerakkan sumber daya lokal dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana yang lebih integratif.

   Integrasi Pengurangan Risiko Bencana pada peraturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Barat wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

   Penguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) Kabupaten Aceh Barat guna menjalankan upaya pengurangan risiko bencana yang lebih optimal.

b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
   Pemutakhiran peta bahaya dan peta risiko bencana Kabupaten Aceh Barat perlu dilakukan dalam setiap 2-3 tahun sekali mengingat kecenderungan bencana yang berubah dari waktu ke waktu dan adanya peristiwa bencana penting yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.
c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
   - Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bagi Masyarakat.
   - Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Aceh Barat.
   - Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem
   - Pendataan Nasional.
   - Penyediaan peralatan dan gudang logistik kebencanaan daerah.
   - Peningkatan kapasitas personil penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat dalam mengelola sistem informasi dan logistik kebencanaan. Ini termasuk mengirimkan personil PB Aceh Barat untuk latihan tersertifikasi dan juga memberikan beasiswa untuk program magister ilmu kebencanaan.
   - Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik.
   - Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif dan pasokan pangan untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk.
d. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
   - Penguatan dan peningkatan kapasitas Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kabupaten Aceh Barat. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ditargetkan program SPAB ini dalam terlaksana di 75% jumlah sekolah dari tingkatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sampai Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
   - Peningkatan kapasitas fasilitas dan personil pada pusat pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Rumah Sakit (RS) yang ada di Kabupaten Aceh Barat sehingga dapat menjadi Puskesmas/RS Aman Bencana.
   - Pembangunan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Aceh Barat.
   - Penguatan satuan pendidikan dayah/pesantren dengan juga melibatkan para ulama untuk meningkatkan pemahaman terhadap risiko dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
   - Penyusunan Rencana Kontijensi beberapa jenis bencana untuk Kabupaten Aceh Barat. Dalam kurun waktu ini disarankan untuk disusun Rencana Kontijensi Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, dan Kebakaran Hutan-Lahan (Karhutla).
   - Penyusunan Peraturan Bupati terkait Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana di Kabupaten Aceh Barat.
   - Penyusunan dan Uji Coba Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.
   - Penguatan dan pengembangan Tim Reaksi Cepat untuk Penyelamatan dan Pertolongan Korban Bencana. Ini perlu pula disertai dengan pengadaan peralatan yang memadai untuk penyelamatan korban akibat bencana. Pada tahapan ini direkomendasikan pengadaan peralatan evakuasi korban akibat banjir, gempa bumi (korban akibat reruntuhan bangunan), dan tsunami.

- Penguatan kebijakan dan mekanisme pengerahan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana.

e. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
   - Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana (RRR) Kabupaten Aceh Barat yang akan menjadi panduan bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jika terjadi bencana.
   - Menyusun panduan perencanaan pemulihan pelayanan dasar masyarakat pasca bencana. Panduan ini akan menjadi rujukan teknis khusus pada sarana dan prasaran yang berhubungan dengan pelayanan dasar seperti sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan layanan administrasi kependudukan.
   - Menyusun panduan perencanaan perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana. Kabupaten Aceh Barat perlu memastikan bahwa mekanisme dan/atau rencana perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang dimiliki telah mempertimbangkan prinsip risiko bencana jangka panjang (*slow onset*) guna menghindari risiko baru dari pembangunan.
   - Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana.

Selanjutnya untuk rekomendasi spesifik penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2029) adalah sebagai berikut:

a. Bencana Banjir
   - Perlu penataan kawasan pada bantaran banjir (flood plain) Sungai Krueng Meurebo dan Sungai Krueng Mas. Ini termasuk mencantumkan peraturan khusus terhadap penataan kawasan sempadan sungai pada kedua sungai tersebut baik melalui RTRW Kabupaten Aceh Barat atau regulasi khusus terkait sempadan sungai.
   - Pembangunan tanggul pada pias-pias yang sering terjadi banjir luapan di kedua kawasan Sungai utama yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
   - Penataan drainase dan tata guna lahan di kawasan rawan banjir seperti di beberapa gampong di Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Meureubo.
   - Penyusunan rencana kontijensi banjir Kabupaten Aceh Barat dan juga uji coba rencana kontijensi tersebut menjadi rencana operasi penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Barat.
   - Normalisasi sungai dan muara pada dua sungai Krueng Meureubo, Sungai Krueng Mas, dan Muara Kuala Bubon. Ini termasuk pengerukan pada beberapa bagian pada Krueng Cangkoy di Kecamatan Johan Pahlawan.
   - Kampanye dan pembuatan sumur resapan dan biopori terutama di kawasan yang rawan banjir genangan di Kabupaten Aceh Barat.
   - Pembuatan dan pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan kawasan tangkapan air terutama yang berada di wilayah hulu dari Sungai Krueng Mas dan Sungai Krueng Meurebo.
   - Pemeliharaan tanggul sungai, embung, dan pembuatan kolam retensi terutama di Kecamatan Johan Pahlawan yang rawan terhadap banjir genangan.

b. Bencana Cuaca Ekstrem
   - Perlu penguatan struktur atap pada bangunan-bangunan publik dan individu karena kerusakan paling banyak terjadi akibat cuaca ekstrim terjadi pada bagian atap bangunan.

- Perlu penghijauan kota, penambahan hutan kota di Meulaboh dan kota-kota penting di Aceh Barat untuk mengurangi dampak angin kencang pada pemukiman. Penanaman pohon-pohon tersebut tidak dimaksudkan pada tepi jalan atau tepi bangunan namum berupa wilayah yang terkonsentrasi dengan vegetasi jenis tanaman keras.

c. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
   - Perlu penataan ulang sempadan Pantai di Kota Meulaboh terutama di daerah Gampong Ujong Kalak, Suak Ribee, dan beberapa gampong di Kecamatan Meureubo.
   - Pelaksanaan kajian yang komprehensif terkait penataan sempadan Pantai Kabupaten Aceh Barat dan integrasi peraturan terkait sempadan pantai ini ke dalam RTRW Kabupaten Aceh Barat.

d. Bencana gempa bumi
   - Perlu penegakan *building code* (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 tahun 2006 dan SNI No. 1726:2019 terkait perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Ini penting diterapkan pada perencanaan bangunan dan gedung di Kabupaten Aceh Barat terutama pada fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, dan pasar. Penegakan peraturan tersebut perlu juga diterapkan pada fasilitas swasta yang digunakan oleh masyarakat seperti hotel, mall, dan pertokoan dengan jumlah lantai 2 atau lebih.
   - Pengetatan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan menyertakan syarat tahan gempa pada bangunan gedung dua lantai atau lebih di Kabupaten Aceh Barat. Pengetatan juga perlu dilakukan pada konstruksi perubahan terhadap bangunan yang ada atau pada konstruksi penambahan elemen bangunan yang dapat membahayakan pengguna/penghuni bangunan tersebut.
   - Perlu pemetaan gempa bumi lebih komprehensif melibatkan para ilmuwan kegempaan di Aceh untuk mengetahui sumber-sumber gempa bumi darat yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
   - Pelatihan evakuasi dan identifikasi korban akibat reruntuhan bangunan kepada SAR, Kepolisian, TNI, PMI dan tenaga medik untuk menekan potensi jumlah korban akibat runtuhnya bangunan baik akibat gempa bumi atau sebab lainnya.
   - Pelatihan para tukang dan mandor konstruksi bangunan untuk memahami lebih lanjut terkait teknis pembangunan gedung dan non-gedung tahan gempa bumi.
   - Penyusunan Rencana Kontijensi Gempa Bumi Aceh Barat dan uji coba rencana kontijensi tersebut yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti BPPD Aceh Barat, Pemadam Kebakaran, tenaga medis, TNI, Kepolisian, PMI, SAR, Media, BMKG, TAGANA, dan TRC.

e. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
   - Pengadaan fasilitas pemadam kebakaran di sekitar lahan yang rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ini termasuk pembuatan kolam tandon (retention dam) di dekat wilayah yang rawan karhutla untuk memudahkan akses pemadaman karhutla.
   - Menyusun Rencana Kontijensi Karhutla Kabupaten Aceh Barat yang juga diuji-coba dengan melibatkan Pemadam Kebakaran (DAMKAR), BPBD Aceh Barat,

PMI, Polisi, TNI, pimpinan gampong dimana karhutla sering terjadi, TAGANA, dan tenaga medis.

f. Bencana Likuifaksi
   - Pemetaan lanjut untuk mengetahui potensi likuifaksi di Kabupaten Aceh Barat melibatkan para akademisi dan ilmuwan geoteknik, kegempaan, dan geofisika yang ada di Aceh.
   - Sosialisasi kontruksi rumah atau bangunan sederhana yang tahan terhadap proses likuifaksi.

Gambar 3.56
Pertokoan yang dimodifikasi menjadi tempat evakuasi tsunami alternatif di Kota Meulaboh.

g. Bencana Tsunami
   - Memperbaharui dan mensosialisasikan rambu-rambu jalur evakuasi tsunami di Kecamatan-kecamatan yang berhampiran dengan laut.
   - Melakukan latihan evakuasi tsunami yang melibatkan sekolah-dayah, rumah sakit, pimpinan gampong, kelompok perempuan, BPBD, TNI, Polri, TAGANA, TRC, PMI, BMKG, dan lain-lain.
   - Menambah jumlah bangunan privat yang sesuai untuk dijadikan sebagai tempat evakuasi tsunami alternatif (seperti toko, mall, dan hotel). Contoh pertokoan yang pernah dimodifikasi menjadi tempat evakuasi tsunami alternatif di Kota Meulaboh dapat dilihat pada Gambar 3.
   - Menambah jumlah luasan hutan pantai yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang akan mereduksi energi gelombang tsunami dan menahan aliran sampah tsunami.
   - Melakukan sosialisasi bahaya gempa bumi dan tsunami secara berkala kepada masyarakat.
   - Membangun unit-unit SPAB terutama pada wilayah rawan tsunami dan gempa bumi di Kabupaten Aceh Barat.
   - Memperkuat dan menguji Rencana Kontijensi Tsunami Kabupaten Aceh Barat dengan melibatkan sekolah-dayah, rumah sakit, pimpinan gampong, kelompok perempuan, BPBD, TNI, Polri, TAGANA, TRC, PMI, BMKG, dan lain-lain.
   - Mengintegrasikan upaya mitigasi tsunami ke dalam RTRW Kabupaten Aceh Barat.

- Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka memperkuat pendidikan kebencanaan di Kabupaten Aceh Barat.

3.3.20 Agenda Pembangunan Strategis

3.3.20.1 Bantuan Dana Bagi Keluarga Pendamping Pasien yang Dirujuk ke Luar Daerah

Peningkatan pelayanan di sektor kesehatan menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada periode Tahun 2025-2029. Saat ini, Kabupaten Aceh Barat telah memiliki 13 Puskesmas yang tersebar di 12 Kecamatan dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Kecamatan Johan Pahlawan. Setiap tahun, lebih dari 60 ribu orang mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan diperkirakan rata-rata sebanyak 3 ribu pasien harus mendapatkan penanganan lebih lanjut melalui rujukan ke luar daerah dengan berbagai penyakit yang dialami. Berdasarkan data yang bersumber dari Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh tahun 2024, sebanyak 200 hingga 250 setiap bulannya pasien dirujuk keluar daerah yang berasal dari pasien rawat inap. Jumlah pasien yang dirujuk keluar daerah periode bulan April-Desember tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

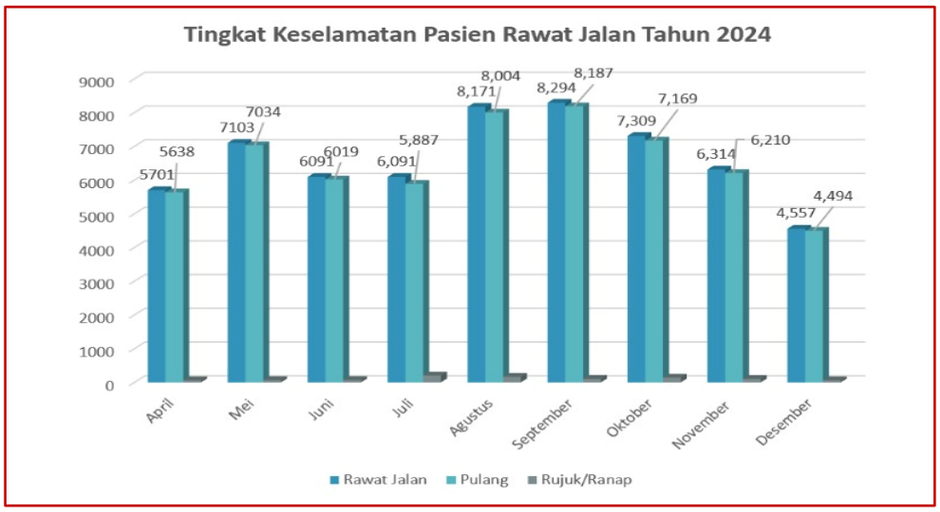

Sumber : RSUD Cut Nyak Dhien, 2024

Gambar 3.57
Jumlah Perkiraan Pasien yang Dirujuk ke Luar Daerah Melalui Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat, sekaligus dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat, Bupati Aceh Barat memiliki salah satu Program Prioritas serta unggulan dalam Mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2025-2029 yaitu Kartu Aceh Barat Sehat melalui pemberian bantuan Dana Pendamping bagi Keluarga Pasien yang Dirujuk Keluar Daerah sebesar Rp. 1.000.000 per Kepala Keluarga. Program ini bertujuan memberikan bantuan dana kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh keluarga pasien selama ikut mendampingi pasien yang dirujuk keluar daerah oleh Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Dana tersebut diberikan kepada seluruh mayarakat yang memilki kartu tanda penduduk Kabupaten Aceh Barat yang dirujuk serta di rawat inap di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien dan mendapatkan keterangan rujukan. Pelaksanaan program tersebut telah diatur melalui penetapan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Kartu Aceh Barat Sehat dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

Pasien rujukan yang dirawat inap di IGD Rumah Sakit Cut Nyak Dhien akan menerima dana rujukan apabila dalam keterangan rujukan telah mendapatkan rekomendasi dari dokter yang berkompeten dalam menangani pasien. Rujukan diberikan agar pelayanan kesehatan yang berkualitas didapatkan oleh pasien, dan bagi keluarga yang mendampingi akan diberikan bantuan dana oleh pihak rumah sakit dengan melampirkan surat keterangan rujukan oleh dokter bagi pasien. Pemberian bantuan tersebut diharapkan akan mengurangi beban pengeluaran keluarga yang ikut mendampingi pasien selama masa rujukan diluar daerah.

3.3.20.2 Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah

Kabupaten Aceh Barat memiiliki beberapa komoditi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Padi, Kacang Tanah, Jagung, Cabai, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Sapi, Kerbau, Ayam dan Itik petelur serta aneka perikanan tangkap dan budidaya. Diantara komoditi unggulan tersebut, komoditas padi banyak ditanami di seluruh bagian wilayah kecamatan. Lahan sawah yang cukup luas mencapai 9.821,88 hektar menjadikan Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu lumbung padi di Aceh.

Padi menjadi komoditas penting yang merupakan sumber pangan utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transformasi padi menjadi beras melalui serangkaian proses pengolahan hingga menjadi beras yang layak dikonsumsi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat tahun 2025, luasan panen padi sawah terbesar terdapat di Kecamatan Kaway XVI sebagaimana dapat dilihat pada pada gambar dibawah ini :

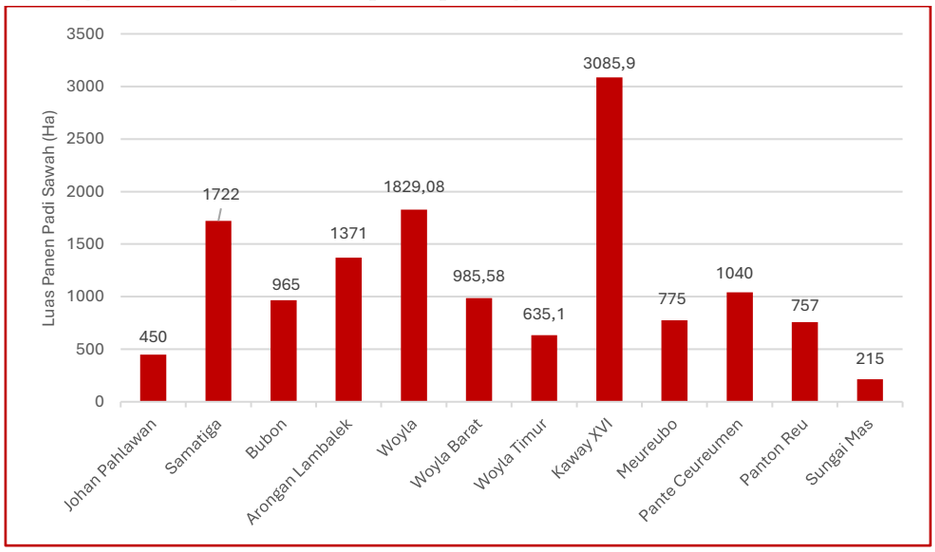

Sumber: BPS Aceh Barat, 2025

Gambar 3.58
Luasan Panen Padi (Ha) di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

Data diatas menunjukkan bahwa, seluruh wilayah dalam Kabupaten Aceh Barat memiliki luasan panen dengan jumlah yang beranekaragam dan luasan panen terbesar terdapat pada Kecamatan Kaway XVI. Produksi padi yang dihasilkan umumnya tidak dapat meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Hal itu terjadi dikarenakan adanya fluktuasi harga jual gabah ditingkat petani sehingga sangat mempengaruhi pendapatan petani. Disisi lain, kemampuan petani dalam meningkatkan produksi padi menjadi "Beras Khas Lokal Aceh Barat" yang bernilai jual tinggi untuk dipasarkan ke jaringan pasar lebih luas juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan pendapatan petani cenderung relatif kecil.

Produktiviitas padi meningkat yang diikuti oleh pendapatan petani meningkat menjadi motivasi bagi petani dalam mengembangkan komoditi unggulan padi. Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan komoditi unggulan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai upaya terpadu dan berkelanjutan terhadap komoditi unggulan, seperti dengan menambah luasan tanam padi, budidaya dengan tekhnologi tepat guna, dan langkah-langkah lainnya yang diperlukan. Penangangan pasca panen terhadap komoditi unggulan padi akan menghasilkan Beras Khas Lokasl Aceh Barat yang akan menjadi sumber ketahanan pangan sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal.

Melalui berbagai sumber anggaran yang tersedia, Pemerintah Daerah merencanakan pengembangan komoditi Beras Lokal Aceh Barat yang sumber bahan bakunya berasal dari petani lokal. Program ini menjadi Proyek Strategi Daerah yang akan dilaksanakan sepanjang 5 tahun kedepan. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan diawali dengan adanya hubungan kemitraan dengan swasta/perusahaan ataupun perguruan tinggi untuk melakukan pengembangan bibit padi unggul dan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui riset dan inovasi serta pembiayaan yang bersumber dari dana CSR. Kemudian disusul dengan program cetak sawah baru yang akan menambah luasan tanam komoditi unggulan, selanjutnya program peningkatan kapasita penyuluh dan petani serta pembentukan kelambagaan petani. Disisi lain, program pembangunan infrastruktur pendukung pertanian juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program pertanian. Dan program yang menjadi penentu dalam meningkatkan pendapatan petani yaitu stabilitas harga beras melalui menetapkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah dan operasi pasar dalam rangka menjaga harga beras tetap stabil di pasaran.

Pengembangan program-program yang mendukung secara langsung program strategis daerah dalam “Pengembangan Komoditi Unggulan Beras Khas Lokal” tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, namun juga akan menciptakan *brand* baru bagi daerah berupa Beras Khas Lokal yang akan bersaing dengan beras-beras lainnya baik pada pasar domestik maupun internasional. Sementara itu, pengembangan komoditi beras lokal melalui program-program yang diluncurkan juga akan berdampak langsung bagi Pembangunan daerah diantaranya peningkatan pendapat perkapita, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, dan menurunkan angka kemiskinan. Disisi lain, sinergitas antara pemerintah, petani dan pihak lainnya dalam mengembangkan komoditi beras lokal dari “tidak ada” menjadi “ada” akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Keterbatasan infrastruktur pendukung pertanian, tekhnologi pasca panen yang belum optimal, dan masih belum optimalnya sistem pemasaran menjadi sebab keberlanjutan produksi beras lokal serta pemasarannya. Disisi lain, ketidakstabilan produktivitas akibat perubahan iklim, maraknya perubahan alih fungsi lahan pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan serta intern petani akan menghambat keberlanjutan produksi dan pemasaran dikemudian hari apabila tidak diantisipasi lebih awal.

Pemerintah Daerah dalam memastikan keberlanjutan produksi beras lokal dan akses pemasaran yang lebih luas telah meluncurkan program strategis daerah yaitu pengembangan komoditi unggulan beras khas lokal yang akan mendorong ketahanan pangan daerah dan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Keterpaduan antara berbagai pihak seperti pemerintah, petani, pelaku usaha dan lembaga terkait lainnya dalam

keberlanjutan produksi unggulan dan pemasaran sangat diutamakan. Pemerintah mendorong para petani sekaligus ikut menfasilitasi penggunaan terknologi pertanian modern seperti penggunaan alat mesin pertanian yang fungsinya untuk panen dan pasca panen serta mendorong penggunaan varietas benih unggul yang tahan hama penyakit. Disisi lain, praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta mengurangi penggunaan pestisida kimia juga perlu diterapkan pada keberlanjutan komoditi unggulan beras khas lokal. Dan untuk keberlanjutan pemasarannya, perlu mengaktifkan peran kelompok tani sebagai lembaga pemasaran serta sebagai dukungan pemodal sekaligus penyuluh bagi petani

3.3.20.3 Pengembangan Kawasan Pertanian

Ketersedian lahan yang cukup luas mencapai 9.821,88 ha dan belum optimal dimanfaatkan serta tersedianya sumber air untuk pengairan yang memadai berpeluang besar untuk dikembangkan Kawasan pertanian berbasis korporasi di Kabupaten Aceh Barat. Pengembangan Kawasan pertanian berbasis korporasi direncanakan berada di 2 kawasan yaitu Kawasan Pertanian Padi 1 berada Kecamatan Kaway XVI dan Kawasan Pertanian Padi 2 berada di Kecamatan Samatiga dengan luas lahan baku yang diusahakan sebesar 2008,79 Ha. Lokasi pengembangan berada di beberapa Gampong dalam Kecamatan Kaway XVI antara lain Alue Tampak. Beureugang, Blang Beurandang, Kampung Mesjid, Keude Aron, Marek, Meunasah Buloh, Padang Mancang, Pasi Jambu, Peunia, Simpang dan Tanjong Bungong. Sedangkan di Kecamatan Samatiga, direncanakan untuk pengembangan Kawasan antara lain Alue Raya, Beurawang, Cot Amun, Rangkileh, Cot Lampise, Cot Masjid, Cot Seulamat, Gampong Ladang, Cot Seumeureng, Deuah, Krueng Tinggai, Pange, Leubok, Leuken, Mesjid Baro, Paya Lumpat, Pinem dan Reusak.

Pembangunan Kawasan pertanian padi berbasis korporasi direncanakan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kawasan pertanian akan diintegrasikan dengan peternakan yang juga dikelola langsung oleh BUMD. Dalam proses pengelolaan terhadap kedua sektor, akan saling menguntungkan yaitu dengan adanya pemanfaatan limbah satu sama lainnya untuk kebutuhan produktivitas komoditas. Padi yang ditanam pada lahan yang dikembangkan akan menghasilkan gabah yang selanjutnya diolah menjadi “Beras Khas Lokal Aceh Barat.” Pabrik pengolahan padi menjadi beras unggulan Aceh Barat akan di bangun oleh BUMD setelah adanya kesepakatan berasama antara pengelola beserta pemilik saham dan menjadi bagian dari usaha berkelanjutan bagi BUMD. Beras Khas Lokal Aceh Barat terbagi atas beras premium dan mediun dengan target pemasaran utama adalah pasar lokal dan selanjutanya adalah kabupaten tetangga hingga seluruh kabupaten di provinsi Aceh.

Disisi lain, Pembangunan infrastruktur sebagai pendukung pengembangan kawasan pertanian dimulai dari irigasi, jalan usaha tani dan cetak sawah baru serta pengadaan alsintan akan melibatkan penyertaan modal dari pemerintah, saham dari petani, poktan maupun gapoktan. Hal ini dilakukan karena biaya yang akan di alokasikan cukup besar sehingga perlu penyertaan modal dari pemerintah. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis korporasi dengan komoditi unggulan berupa “Beras Khas Lokal”. Dan pengembangan Kawasan ini dijabarkan melalui program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas terkait sesuai kebidangan sektornya. Pengembangan Kawasan pertanian diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas padi, namun juga meningkatkan kesejahteran petani di Kabupaten Aceh Barat.

3.3.20.4 Pengembangan Kawasan Perikanan

Posisi Kabupaten Aceh Barat yang berada dipesisir barat Pantai Barat Aceh dengan sumber daya alam perikanan yang melimpah menjadikan peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gampong Padang Seurahet merupakan salah satu daerah yang yang terkenal dengan aktivitas lautnya hingga saat ini dan lokasinya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Lokasi ini yang secara turun menurun melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan fasilitas penangkapan ikan serta tempat pendaratan ikan berada disekitar lokasi.

Berdasarkan potensi yang tersedi, Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan sangat ideal untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi Kawasan Industri Perikanan. Kawasan tersebut memiliki luasan menacapai 10,24 Ha. Pengembangan Kawasan ini didukung adanya aspek legalitas daripada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Meulaboh Tahun 2021-2014 sebagai Zona Kawasan peruntukan Industri. Mekanisme Pembangunan Kawasan Indutri Perikanan di Gampong Padang Seurahet dilakukan dengan melibatkan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, Perguruan Tinggi dalam penelitian dan pengembangan perikanan tangkap, Masyarakat Nelayan sebagai pelaku usaha dan Investor yang akan mengembangkan industri perikanan.

Masyarakat nelayan khususnya pelaku usaha UMKM akan menjadi pilar penting dalam Pembangunan Kawasan industri di Gampong Padang Seurahet. Pemerintah bersama dengan mitra usaha dapat menfasilitasi pelaku usaha dalam bentuk bantuan modal usaha serta pelatihan teknis kepada pelaku usaha hilir perikanan agar mampu bersaing dipasar yang lebih luas, dengan jenis pengembangan yaitu indutri penggaraman ikan (ikan Asin), pengolahan Katsuboshi, kerupuk ikan serta turunan produk lainnya. Produk-produk hasil perikanan akan dipasarkan di pasar lokal dan ekspor. Pemasaran lokal dilakukan dengan menjalin kemitraan bersama dengan pasar tradisional, toko dan industri kuliner. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan yang akan menjadi proyek strategi daerah dan akan dilaksanakan sepanjang 5 tahun kedepan dan diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mampu menyediakan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun.

3.3.20.5 Pengembangan Kawasan Peternakan Terintegrasi

Sektor peternakan menjadi potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat. Pengembangan Kawasan Peternakan Terintegrasi yang menjadi Proyek Stratetegis Daerah merupakan konsep gabungan bersama antara sektor peternakan dan sektor perkebunan. Proyek ini dikembangkan didasari atas potensi sumber daya alam perkebunan yang semakin berkembang ditambah dengan kebutuhan konsumsi akan ternak besar yang masih diminati di kalangan masyarakat lokal. Pengembangan Kawasan peternakan terintegrasi memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan impor poduk-produk peternakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah populasi ternak sapi mencapai 20,71% atau 9.666 ekor dengan sebaran terbesar terdapat di Kecamatan Arongan Lambalek dan Kerbau sebesar 56,97% atau 27.463 ekor dari total populasi ternak besar dan kecil dengan sebaran terbesar terdapat di Kecamatan Kaway XVI. Sementara itu, perkebunan Kelapa Sawit rakyat berdasarkan data statistik tahun 2025, sebaran luasan tanam tertinggi

terdapat di Kecamatan Kaway XVI mencapai 26,85% dari total luas areal perkebunan Kelapa Sawit rakyat atau sebesar 2.986 hektar yang selanjutnya di Kecamatan Arongan Lambalek dengan luas mencapai 1.235 hektar.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit yang cenderung berada di lokasi Kecamatan Arongan Lambalek serta diikuti dengan jumlah populasi ternak sapi yang relatif besar, berpotensi untuk dilakukan Pengembangan Kawasan Peternakan Terintegrasi dan menjadi proyek yang akan dikembangkan sepanjang 5 tahun kedepan serta menjadi Proyek Strategi Daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengembangan tersebut yang akan dilaksanakan oleh dinas sesuai dengan sektor kebidangannya serta sektor lainnya yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengembangan kawasan.

Pengembangan Kawasan terintegrasi ini merupakan sistem integrasi sapi sawit yang merupakan model pengelolaan lahan dengan menggabungkan kegiatan usaha perkebunan dan peternakan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem perkebunan serta meningkatkan kesejahteraan petani pekebun dan ketahanan pangan lokal. Konsep yang diciptakan bertujuan untuk mencapai beberapa manfaat diantaranya manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling mendukung dan menguntungkan. Pemanfaatan silang hasil limbah masing-masing komoditi yang telah melalui pemosresan secara teknologi modern mampu menekan biaya operational kedua sektor, meningkatkan pendapatan pekebun peternak serta menciptakan lapangan kerja baru

3.3.20.6 Pemantapan Jalan dan Jembatan untuk Peningkatan Konektivitas Daerah

Pembangunan jalan dan jembatan menjadi prioritas dan menjadi proyek strategis daerah dalam mendorong pembangunan daerah. Keberhasilan kebijakan Peningkatan infrastruktur dasar jalan dan jembatan yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat serta berkelanjutan akan memperkuat peran Kabupaten Aceh Barat sebagai simpul konektivitas di wilayah barat Aceh. Infrastruktur dasar yang telah terbangun dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dapat mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik antar wilayah dalam kabupaten serta membuka akses ekonomi bagi daerah *hinterland* ataupun daerah yang menyediakan bahan baku industri, bahan baku makanan serta tenaga kerja bagi kawasan perkotaan. *Hinterland* tidak hanya berfungsi sebagai penyangga daerah perkotaan, namun juga dapat menjadi tujuan wisata alam yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pembangunan infrastruktur dasar masih terus berjalan hingga saat ini, namun demikian masih perlu menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan infrastuktur dasar jalan dan jembatan baik yang telah terbangun ataupun belum. Panjang infrastruktur jalan yang telah terbangun dengan kontruksi aspal dan dalam kondisi baik selama kurun waktu 2020-2024 sepanjang 412,98 km. Sedangkan kondisi jalan yang belum beraspal mengalami penurunan hingga 240,19 km dari total Panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu 682,43 km. Berdasarkan hal tersebut, konektivitas antarwilayah belum sepenuhnya rampung sehingga perlu dilakukan pembangunan/peningkatan kuantitas dan kualitas dari infrastruktur jalan tersebut. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai konektivitas antarwilayah di Kabupaten Aceh Barat, akan tetapi menjadi intrumen utama dalam mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah melalui proyek strategis daerah sepanjang 5 tahun kedepan menganggarkan biaya untuk pembangunan/peningkatan jalan yang tersebar pada 12 kecamatan.

Disisi lain, jembatan juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Jembatan terutama jembatan gantung merupakan instrumen utama dalam aksesibiltas yang menjadi penghubung dalam aktivitas sosial ekonomi terutama bagi masyarakat perdesaan. Wilayah perdesaan memiliki kondisi bentang alam sungai dan badan air lainnya yang beragam dengan ketersediaan infrastruktur dasar dan tingkat layanan masih belum optimal. Dengan kondisi ini, pemerintah mengalokasikan anggaran disepanjang 5 tahun kedepan dan menjadi proyek strategi daerah. Pembangunan/peningkatan infrastuktur dasar berupa jembatan yang dianggarkan sepangang 5 tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel 3.38 Rencana Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Aceh Barat

No	Nama Ruas Jembatan	Kecamatan	Volume		Kondisi
			Panjang (M)	Lebar (M)	
1	Pasi Jambu-Pasi Teungoh	Kaway XVI	100	1,5	Fungsional
2	Meunasah Buloh-Meunasah Ara	Kaway XVI	100	1,5	Fungsional
3	Pasi Jeumpa-Palimbungan	Kaway XVI	100	2,5	Fungsional
4	Tanjong – Babah Meulaboh	Kaway XVI	100	1,5	Fungsional
5	Babah Krueng-Teklep	Kaway XVI-Pante Ceureumen-	100	1,5	Fungsional
6	Lhok Guci-Cot Manggi	Pante Ceureumen-Panton Reu	120	2,5	Rusak Berat (Tidak Fungsional)
7	Cot Manggi-Menuang Kinco	Pante Ceureumen-Panton Reu	120	1,5	Rusak Berat (Tidak Fungsional)
8	Babah Iseung-Alue Keumang	Pante Ceureumen			Baru (Abutmen)
9	Pante Ceuremen-Lango	Pante Ceureumen	120	1.5	Tidak Fungsional
10	Lawet-Keutapang	Pante Ceureumen	120	1.5	Fungsional
11	Canggai-Lueng Baro	Pante Ceureumen	120	1.5	Fungsional
12	Sikundo	Pante Ceureumen	120	1.5	Fungsional
13	Gunong Mata Ie-Blang Balee	Panton Reu	100	2.5	Fungsional
14	Gampong Baro-Tamping	Panton Reu-Pante Ceureumen	120	2.5	Fungsional
15	Meutulang-Kuala Manyeu	Panton Reu	120	1.5	Tidak Fungsional
16	Qur'an Wangi-Panton Reu	Panton Reu	100	1.5	Fungsional
17	Kampung Baro-Ujong Raja	Panton Reu	120	2.5	Fungsional
18	Sibintang-Blang Teungoh	Panton Reu	120	1.5	Fungsional
19	Sakoi-Tanoh Mirah	Sungai Mas	120	1.5	Tidak Fungsional
20	Kajeung-Tungkop	Sungai Mas	120	1.5	Fungsional
21	Gunong Buloh-Pungki	Sungai Mas	120	1.5	Fungsional
22	Pasi Lunak-Karak	Woyla-Woyla Barat	100	1.5	Fungsional
23	Pasi Pandan-Pasi Panyang	Woyla-Woyla Barat	120	1.5	Fungsional
24	Lhok Malee-Cot Lagan	Woyla Barat	120	1.5	Fungsional
25	Cot Punti-Panton	Woyla Timur-Woyla	120	1.5	Fungsional
26	Paya Baro-Leubok Beutong	Woyla Timur-Sungai Mas	120	1.5	Fungsional
27	Simpang Peut-Ujong Simpang	Arongan Lambalek	100	2.5	Fungsional
28	Ujong Beusa-Rimba L:anggeh	Arongan Lambalek	100	1.5	Tidak Fungsional
29	Seuneubok Teungoh (SMP N2 Arongan)	Arongan Lambalek	100	2.5	Fungsional
30	Alue Leuhob-Blang Luah	Arongan-Woyla Barat	120	1.5	Fungsional
31	Drien Mangko-Jawa	Woyla	120	2.5	Bangun Baru

Sumber Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat, 2025

Pembangunan/peningkatan jembatan gantung pada proyek strategis daerah tidak hanya berfungsi sebagai konektivitas dan aksesibiltas antar wilayah dalam kecamatan yang

terpisahkan oleh bentang alam seperti Sungai. Selain itu, Pembangunan ini juga akan meningkatkan mobilitas masyarakat dalam bersosial serta secara ekonomi akan memudahkan masyarakat perdesaan dalam mobilitas hasil-hasil sumber daya alam ke perkotaan untuk di jual. Disamping itu, jembantan gantung juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi lokal serta mempermudahk aksesibiltas dalam pengembangan kawasan wisata.

3.3.20.7 Pemugaran Sarana dan Prasarana Olahraga yang Represantif

Masyarakat dan para atlet Kabupaten Aceh Barat terutama yang bermukim di perkotaan saat ini memerlukan suatu ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengapreasikan diri dalam bidang olah raga yang secara manfaat tidak hanya sehat secara fisik namun juga mampu ikut andil dalam perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan ditingkat lokal, nasional hingga international. Sarana prasarana yang tersedia saat ini masih relatif sedikit serta kurang memadai atau bahkan tidak layak untuk dipergunakan. Hal ini akan menghambat para atlet daerah untuk berprestasi dibidangnya. Kondisi lapangan yang cenderung tidak representatif dalam mendukung cabang-cabang olah raga tertentu yang ditekuni oleh para atlet daerah. Disamping itu, prasarana olahraga yang berada di gampong pasi pinang yaitu Gedung olah Raga dan Seni, kecamatan meureubo tidak digunakan untuk kegiatan pembinaan atlet dan hanya digunakan pada perlombaan daerah atau lainnya yang membutuhkan ruang indoor.

Keterbatasan akses bagi atlet-atlet daerah untuk berlatih sedikit banyak akan menghambat pengembangan atlet tersebut yang berdampak pada belum optimalnya peran para atlet dalam mengukir prestasi bagi daerah. Disisi lain, keterbatasan ruang gerak bagi masyarakat perkotaan juga menjadi peluang dalam menciptakan dampak sosial kearah yang tidak baik. Dengan kondisi sarana prasarana yang tersedia saat ini juga akan mengurangi minat masyarakat untuk berolahraga.

Kondisi sarana dan prasarana olahraga yang tidak memenuhi standar serta adanya pemusatan ragam jenis olahraga disatu titik dengan ketersediaan fasilitas yang ada sudah mulai usang ataupun kurang memadai serta kurang lengkapnya sarana dan prasarana olah raga, menyebabkan pemerintah daerah merencanakan pemugaran sarana prasarana olah raga yang berada di Kabupaten Aceh Barat dan termasuk kedalam proyek strategis daerah yang akan dilaksanakan sepanjang 5 tahun kedepan. Pemugaran sarana prasarana olah raga, diharapkan mampu menumbuhkan minat masyarakat untuk berolahraga dalam mencapai hidup sehat serta bagi para atlet tersedianya wadah dalam mengembangkan prestasi olahraga tidak hanya untuk atlet namun juga bermanfaat bagi daerah dalam kancah perolahragaan di Kabupaten Aceh Barat. Lokasi pemugaran sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.39 Lokasi Pemugaran dan Kebutuhan Sarana Prasarana Olah Raga di Kabupaten Aceh Barat

No	Cabang Olahraga Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Pemugaran Prasarana/Penyediaan Sarana Olahraga
1	Sepak Bola	Lapangan Bola Kaki Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan	Pembangunan ruang Ganti pemain, musholla, sumur bor, tower dan pipa distribusi air, rehabilitasi pagar lapangan, rehabilitasi pintu utama serta jaringan Listrik dan lampu utama stadion
2	Bola Volly	Kawasan Gedung Olahraga dan Seni	Pembangunan Lapangan dan Penyediaan Net, Bola Voly, dan sarana lainnya
3	Bola Basket	Kawasan Gedung Olahraga dan Seni	Pembangunan Lapangan dan Penyediaan Net, Bola Basket dan sarana lainnya

No	Cabang Olahraga Pengembangan	Lokasi	Kebutuhan Pemugaran Prasarana/Penyediaan Sarana Olahraga
4	Bulu Tangkis	Kawasan Gedung Olahraga dan Seni	Pembangunan Lapangan dan Penyediaan Net, Bulu Tangkis dan sarana lainnya
5	Panahan	Stadion Alpen, Ujong Tanoh Darat, Meureubo	Penyediaan Gabus Target dan Timer Board
6	Atletik		Penyediaan Matras Lompat Tinggi
7	Panjat Tebing		Penyediaan Peralatan Panjat Tebing dan Peralatan Keselamatan
8	Taekwondo	Mess Atlet, Suak Indrapuri, Johan Pahlawan	Penyediaan Matras dan Digital Scoring System
9	Silat		Penyediaan Matras
10	Anggar		Penyediaan Perlengkapan Pertandingan
11	Muay Thai		Pembangunan Ring Muay Thai

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat, 2025

Dengan adanya fokus penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana olahraga yang dibutuhkan oleh setiap cabang olah raga diharapkan para atlet Kabupaten Aceh Barat mampu mengukir prestasi di tingkat nasional hingga international. Pelaksanaan pemugaran sarana dan prasarana olahraga juga diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan ruang publik masyarakat Aceh Barat untuk berolahraga.

3.3.20.8 Revitalisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh

Suplai air minum dari Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Meulaboh kepada pelanggan masyarakat Kota Meulaboh sempat terhenti selama kurun waktu tertentu di tahun 2024. Kondisi ini diperburuk dengan tidak berfungsinya Unit Pengolahan SPAM Lapang dan SPAM Ranto Panjang dalam mendistribusikan air kepada pelanggan. Aliran Listrik yang terputus total juga menjadi sebab utama tidak berfungsinya pendistribusian air kepada pelanggan. Disamping itu, kebocoran pada jaringan perpipaan akibat perbaikan jalan dan pembangunan drainase, kesalahan pencatatan meter, pencurian air dan *water meter* pelanggan yang rusak serta kesalahan pencatatan meter berakibat pada nilai penjualan air lebih kecil dari nilai operasional perusahaan dan selanjutnya menjadi beban perusahaan serta mengurangi pelayanan air minum kepada pelanggan.

Air minum yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan berasal dari air baku permukaan aliran Sungai Krueng Meureubo dan Krueng Woyla. Sistem pengolahan air minum dilakukan dengan sistem pompanisasi. Pendistribusian air minum saat ini hanya tersisa sebanyak 1 unit di lokasi pipa *intake* dan 1 unit di SPAM Lapang. Adapun jumlah air yang didistribusikan kepada pelanggan rumah tangga berdasarkan Hasil Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Tahun Buku 2023 mencapai 10,81 meter kubik/bulan atau 113,83 liter/orang/hari dengan kontinuitas air yang didistribusikan berkisar 16 jam perhari. Kondisi air hasil pengolahan di SPAM Lapang yang didistribusikan kepada pelanggan saat ini masih belum optimal baik dari kualitas maupun kuantitas. Kapasitas produksi terpasang sampai dengan tahun 2023 sebesar 7.568.640 m3 dengan jumlah yang tidak termanfaatkan dari nilai produksi tersebut sebesar 4.257.360 M3. Hal ini disebabkan oleh rusaknya instalasi pengolahan serta jumlah pelanggan yang masih terbatas. Keterbatasan sarana pendukung SPAM Lapang serta belum berfungsinya sejumlah SPAM lainnya secara optimal seperti SPAM Ranto Panyang, SPAM Beureugang dan SPAM Arongan Lambalek menyebabkan distribusi kebutuhan air minum kepada pelanggan masih belum optimal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan Optimalisasi PDAM Tirta Meulaboh yaitu melalui Revitalisasi PDAM Tirta Meulaboh.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tahun 2023 yang lalu, terdapat berbagai temuan serta kekurangan yang perlu dilakukan tindak lanjut dalam upaya mengoptimalkan Pelayanan PDAM Tirta Meulaboh. Beberapa saran dan rekomendasi yang akan dilaksanakan untuk revitalisasi antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan berdasarkan indikator Kementerian PUPR, dengan cara sebagai berikut:
   a. Mengupayakan peningkatan *Return of Equity* (ROE) melalui peningkatan profitabilitas.
      a. Mengupayakan penurunan rasio operasi melalui efisiensi dan pengendalian biaya serta memaksimalkan pendapatan operasi.
      b. Memperbaiki rasio kas (*cash ratio*).
      c. Meningkatkan efektivitas penagihan melalui inovasi strategis, sebagai berikut:
         1) Bekerja sama dengan ulama guna meningkatkan kesadaran pelanggan yang menunggak tagihan air.
         2) Bekerja sama dengan instansi penegak hukum guna mempercepat penerimaan tunggakan air.
         3) Mengembangkan sarana pembayaran secara *online* atau *e-commerce.*
         4) Menyediakan mobil keliling disaat keramaian di wilayah tertentu.
2. Mengupayakan peningkatan kinerja aspek pelayanan dengan fokus sebagai berikut:
   a. Menambah jumlah pelanggan baru;
   b. Melakukan pengujian kualitas air minum secara berkala serta berkesinambungan dengan parameter uji yang Memenuhi Syarat Air Minum dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan memperbaiki sistem jaringan distribusi yang rusak guna memperluas dan menambah cakupan pelayanan;
   c. Meningkatkan konsumsi air domestik dengan menambah jam distribusi dan menambah jaringan perpipaan ke pelanggan sambungan rumah (SR).
3. Mengupayakan peningkatan kinerja aspek operasional dengan fokus sebagai berikut:
   a. Meningkatkan rasio produksi dengan meningkatkan jumlah pelanggan;
   b. Menurunkan tingkat kehilangan air melalui penggantian meter air pelanggan yang rusak, perbaikan sistem jaringan distribusi dan penggantian pipa yang rusak serta penerapan pembacaan meter mobile (*Mobile Meter Reading* - MMR) untuk mengurangi kesalahan pencatatan meter;
   c. Meningkatkan jam pelayanan/distribusi air ke pelanggan 24 jam sesuai standar;
   d. Melakukan dan mencatat pengujian tekanan air di sambungan pelanggan;
   e. Mengupayakan penggantian/kalibrasi meter air.
4. Mengalokasikan anggaran diklat bagi pegawai sebesar minimal 10% dari total anggaran biaya pegawai serta berkoimitmen untuk memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Menyusun Rencana Bisnis Tahun 2023 – 2026 dan RKA Perusahaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan menyampaikan kepada Dewan Pengawas dan Bupati Kabupaten Aceh Barat untuk ditandatangani bersama (mendapat persetujuan) dan pengesahan.
6. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menerapkan Zona Air Minum Prima (ZAMP) dan *Smart Grid Water Management*.
7. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).
8. Menerapkan sepenuhnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
9. Membentuk unit manajemen risiko/tim pengelola manajemen risiko dan menyusun pedoman manajemen risiko, dokumen *risk register* serta mitigasi risiko dalam rangka

implementasi manajemen risiko perusahaan.

10. Membentuk dan memfungsikan Satuan Pengawas Intern sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017.
11. Melakukan pendeteksian pencurian air dengan menerapkan *District Meter Area* (DMA), dan/atau melakukan pemeriksaan pemakaian air secara illegal terutama pada daerah bisnis (perhotelan, perkantoran, pasar, dll) secara kontinyu/berkala sehingga persentase kehilangan air yang mencapai 82,44% dapat diminimalisir serta menerapkan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada pelanggan yang mencuri air.
12. Mempelajari kembali kebocoran air pada tiap-tiap unit produksi dan menganalisis pemakaian bahan-bahan kimia pengolah air sehingga pemborosan pemakaian bahan dapat ditekan.
13. Melakukan kajian untuk menerapkan denda keterlambatan pembayaran air dengan bekerja sama institusi Kejaksaan untuk menagih piutang pelanggan yang telah menunggak selama rentan waktu yang ditentukan.

Pelaksanaan revitalisasi ini menargetkan pendistribusian air minum dengan standar Zona Air Minum Prima (ZAMP) dan *Smart Grid Water Managent* akan menjadi pelayanan prima dari perusahaan. Selain itu, Revitalisasi PDAM Tirta Meulaboh juga akan melakukan program perbaikan pada 4 lokasi SPAM yaitu SPAM Lapang, SPAM Ranto Panyang, SPAM Beureugang dan SPAM Arongan Lambalek bagi pelangan air minum. Rencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40 Rencana Optimalisasi PDAM Tirta Meulaboh pada SPAM Lapang, SPAM Beureugang dan SPAM Ranto Panyang

No	Uraian Pekerjaan
A	SPAM LAPANG
1	Pembangunan Jaringan Perpipaan
2	Rehabilitasi Dosing, Rumah Dosing IPA WKE, Rumah Operator, Rumah Pompa Distributor, IPA KAP 2x40 L/DT Dan IPA KAP 40/L/DT
3	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Transmisi dan Distribusi serta Pompa Dosing
4	Pengadaan dan Pemasanagan Meter Induk, Magnetik Flow Meter
B	SPAM BEUREUGANG
1	Pembangunan Jaringan Perpipaan
2	Rehab Rumah Dosing IPA KAP 2x15 L/DT, Rumah Genset dan Dosing IPA KAP 40 L/DT, Rumah Operator, Rumah Panel, IPA KAP 2x15 L/DT, IPA KAP, 40 L/DT, Saluran Box dan Kontrol dan Talud
3	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Transmisi dan Distribusi, pompa Dosing dan BAK Pembubuhan Bahan Kimia
4	Pengadaan dan Pemasangan Meter Induk – Magnetik Flow Meter
C	SPAM RANTO PANYANG
1	Pembangunan Jaringan Perpipaan
2	Rehab Rumah Genset, Rumah Jaga, rumah Pompa Dosing dan Pompa Distribusi Intake dan IPA 10 L/DT
3	Pengadaan dan Pemasagan Pompa Transmisi, Pompa Dosing dan Bak Pembubuhan Bahan Kimia
4	Pengadaan dan Pemasangan Meter Induk – Magnetik Flow Meter

Sumber: Perencanaan Optimalisasi PDAM Tirta Meulaboh;

3.3.20.9 Pengembangan Sentra UMKM Kuliner

Pengembangan pariwisata dan UMKM berbasis potensi merupakan strategi utama yang harus diterapkan agar peluang keberhasilan intervensi Pemerintah Daerah dalam pembangunan perekonomian menjadi lebih besar. Kabupaten Aceh Barat selain memiliki potensi sumber daya alam di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan serta komoditas pertambangan (batubara dan emas), juga memiliki potensi pariwisata pantai

yang menjanjikan. Samudra hindia yang berbatasan langsung dengan wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat memberikan peluang besar pengembangan sektor maritim termasuk pariwisata dan UMKM.

Kuliner merupakan salah satu potensi usaha UMKM yang cukup menjanjikan di Kabupaten Aceh Barat. Potensi ini terpotret dari data pertumbuhan PDRB ADHK lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh positif sebesar 1,64% pada tahun 2024. Besarnya potensi sektor ini juga terlihat pada tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan signifikan hingga sebesar 29,27% setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -8,28% dan perlahan tumbuh kembali di tahun 2021 sebesar 1,43%. Potensi yang cukup besar pada lapangan usaha tersebut serta letak geografis Kabupaten Aceh Barat yang berbatasan dengan samudera hindia memberikan peluang cukup besar untuk pengembangan UMKM Kuliner yang dipadukan dengan wisata pantai. Salah satu lokasi yang cukup strategis untuk pengembangan sentra UMKM Kuliner berada di Gp. Suak Indrapuri. Keindahan panorama laut yang membentang disepanjang wilayah tersebut memberikan nuansa tersendiri sebagai peluang pengembangan wisata serta sebagai simpul penting dalam pengembangan sektor jasa dan usaha mikro. Dengan adanya potensi ini, dibutuhkan sebuah rancangan yang sesuai agar mampu menjadikan Gampong Suak Indprapuri sebagai Kawasan wisata sekaligus Sentra UMKM Kuliner Unggulan di Kabupaten Aceh Barat yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru secara berkelanjutan.

Pengembangan sentra kuliner ini tidak hanya ditujukan untuk menata kawasan secara fisik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Selama ini, para pelaku usaha kuliner masih tersebar secara tidak terorganisir, fasilitas yang tersedia belum memadai, dan belum ada manajemen terpadu yang mendukung keberlanjutan usaha. Karena itu, pembangunan sebuah kawasan kuliner yang terintegrasi, tertata, dan mampu mencerminkan identitas khas Aceh Barat sebagai wilayah yang kaya akan cita rasa dan tradisi kuliner menjadi sangat dibutuhkan.

Walaupun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut terutama terkait ketersediaan lahan Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa alternatif dapat digunakan untuk menata kawasan tersebut menjadi sentra UMKM kuliner. Alternatif pertama yang dapat ditempuh antara lain :

1. Pembebasan lahan milik masyarakat yang berada didalam kawasan wisata dan berada diluar kawasan lindung setempat (sempadan pantai);
2. Pembangunan kios-kios kuliner permanen, area makan terbuka, jalur terbuka, taman tematik, area parkir dan sistem sanitasi yang layak;
3. Pengelolaan sentra dilakukan secara profesional dengan mengepankan prinsip ramah lingkungan, estetika lokal serta berbasis syariat islam;

Kelemahan dari alternatif pertama adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan pada tahap awal oleh Pemerintah Daerah untuk pembebasan lahan serta pembangunan berbagai infrastruktur pada lokasi tersebut. Walaupun demikian, dalam jangka panjang pelaksanaan alternatif pertama akan memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah dengan adanya pemasukan Pendapatan Asli Daerah melalui penyewaan tempat/kios usaha serta pengelolaan lahan parkir.

Alternatif kedua dapat dilakukan melalui upaya berikut :

1. Mengindentifikasi lahan yang telah tersedia milik Pemerintah Daerah di lokasi tersebut;

2. Melakukan pembangunan berbagai fasilitas UMKM kuliner pada lahan tersebut seperti kios, area makan terbuka, jalur terbuka, taman, area parkir dan sistem sanitasi yang layak;
3. Melakukan pengelolaan secara profesional terhadap sentra UMKM Kuliner;

Pelaksanaan alternatif kedua memiliki kelemahan dari sisi tidak adanya pilihan lahan yang sesuai dan strategis. Ketergantungan terhadap lahan yang telah tersedia tidak memberikan pilihan terhadap peluang pemilihan lahan yang lebih baik dan layak. Kelebihan dari alternatif ini adalah rendahnya investasi awal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan. Investasi awal dapat langsung difokuskan pada Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan sentra UMKM Kuliner.

Alternatif selanjutnya dalam upaya penyediaan sentra UMKM Kuliner dapat dilakukan melalui upaya berikut :

1. Pemerintah Daerah bekerjasama dan membuat kesepakatan dengan pemilik lahan yang berada di lokasi kawasan wisata;
2. Kesepakatan berupa hibah sebagian lahan masyarakat ke Pemerintah Daerah untuk dilakukan penataan area publik seperti jalur terbuka, pedestrian dan taman;
3. Penataan area di sepanjang kawasan wisata pantai akan memberikan peluang UMKM Kuliner tumbuh dan berkembang lebih baik;

Pelaksanaan alternatif ketiga dapat dilakukan jika kedua alternatif sebelumnya sulit dilaksanakan. Alternatif ketiga memberikan kemudahan dari sisi penganggaran pembangunan yang lebih kecil. Walaupun demikian, kelemahan alternatif ketiga adalah kurangnya kepastian terhadap pelaku UMKM Kuliner yang akan bersedia mengembangkan usahanya di lokasi tersebut. Dibutuhkan upaya lainnya agar berbagai pelaku usaha UMKM Kuliner dapat melakukan kegiatan usahanya pada Lokasi yang telah ditata tersebut.

Selain pembangunan fisik, pengembangan sentra kuliner ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah melalui lembaga pelatihannya, instansi pendidikan, serta pelaku industri kuliner yang professional akan memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM kuliner. Materi pelatihan meliputi standar kebersihan dan keamanan pangan, inovasi produk, manajemen usaha, pemasaran digital, hingga pelayanan pelanggan. Dengan peningkatan kapasitas ini, para pedagang tidak hanya menjadi bagian dari proyek fisik, tetapi juga mendapatkan bekal untuk bersaing secara profesional di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam rangka memperluas daya tarik sentra kuliner ini, pemerintah juga merancang program-program pendukung seperti *Car Free Day*, promosi wisata melalui media sosial dan platform digital, serta kerja sama dengan agen perjalanan dan komunitas kreatif lokal. Harapannya, Gampong Suak Indrapuri tidak hanya menjadi tujuan wisata warga Kabupaten Aceh Barat, tetapi juga menarik minat wisatawan dari kabupaten lain di Aceh maupun luar daerah.

Tak kalah penting, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah akan membentuk unit pengelola kawasan kuliner yang berfungsi sebagai pengatur, pengawas, sekaligus fasilitator bagi para pelaku usaha. Sistem pengelolaan akan berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, perwakilan pedagang, dan komunitas lokal. Dengan adanya manajemen kawasan yang profesional, diharapkan sentra kuliner ini tidak hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi tumbuh sebagai pusat ekonomi rakyat yang berkesinambungan.

3.3.20.10 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Pengelolaan sampah yang tidak baik dalam suatu lingkungan terutama perkotaan akan berdampak pada rusaknya kualitas lingkungan. Disisi lain, dampak yang akan hadir atas buruknya pengelolaan sampah yaitu hilangnya estetika dari wajah kota serta meningkatkan risiko terdampaknya pengaruh negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan akan terus meningkat jika tidak adanya kepastian atas pengelolaan sampah, timbunan sampah dari sumbernya yang secara terus menerus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin heteregonnya aktivitas manusia yang pada akhirnya akan mengurangi ketersediaan ruang sehat dan menghambat aktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Kabupaten Aceh Barat memiliki luasan wilayah ±2.927,95 km^2 dengan jumlah penduduk 209.220 jiwa (BPS, 2025). Pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh setiap individu. Hal ini juga sejalan dengan semakin kompleknya aktivitas seiring dengan pertumbuhan penduduk dan adanya pengembangan wilayah kearah modernisasi. Tingginya jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan sumber data pengelolaan sampah nasional (SIPN) , jumlah timbunan sampah di Kabupaten Aceh Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya yang terlihat dari timbulan sampah pada tahun 2023 sebesar 101 ton/hari, kemudian meningkat menjadi 102,55 ton/hari pada tahun 2024 atau sebanyak 37.432,21 ton/tahun.

Untuk menjamin keberlangsungan lingkungan serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kiranya perlu menghadirkan sistem pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan dengan target capaian Zero Waste. Berbagai upaya dan kebijakan akan dikembangkan dimulai dari hulu yang merupakan sumber sampah hingga hilir yang menjadi produk akhir dari pengolahan sampah. Disamping itu, peran pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam pengelolaan persampahan melalui kelembagaan juga menjadi bagian dari keberlanjutan dari pengelolaan sampah terpadu tersebut. Disisi lain, dalam pengelolaan sampah di tingkat sumbernya atau pada tahapan hulu, keterlibatan masyarakat sangat diutamakan. Peran masyarakat akan didukung oleh komunitas tertentu yang dibentuk dan menjadi bagian dari program gampong dalam penanggulan sampah lingkungan sejak dari sumbernya.

Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir menjadi konsep awal yang akan dikembangkan dengan tujuan mengurangi sampah yang diangkut dan dibuang langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau bahkan menjadi sampah yang diproduksi di tingkat hulu untuk kemudian diolah hingga limbah sampah menjadi *zero waste*. Pengelolaan sampah dengan metode terintegrasi dari hulu ke hilir akan diterapkan dengan cara mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan dan mendaur ulang sesuai jenis sampah yang dihasilkan baik secara tradisional maupun modernisasi di TPST/TPS 3R. Berikut Konsep Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir di Kabupaten Aceh Barat:

Tabel 3.41 Konsep Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir di Kabupaten Aceh Barat.

Konsep	Sistematika Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Persiapan awal :

Konsep	Sistematika Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
	- Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun Komunitas di tingkat gampong sebagai penggerak sekaligus pelaksana pengumpulan sampah di gampong, Selain KSM, upaya awal tersebut juga dapat dimulai melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); - OPD terkait melakukan sosialisasi program, pelatihan bagi KSM/BUMG. - Melalui musyawarah gampong, menetapkan tarif sampah yang sesuai dari setiap rumah tangga sebagai sumber biaya operasional KSM/BUMG serta Pendapatan Asli Gampong; - Ditingkat gampong, jika diperlukan dapat memberikan insentif bagi setiap rumah tangga yang memilah sampah sesuai jenisnya. - Penyediaan berbagai sarana dan prasarana persampahan ditingkat gampong oleh OPD terkait serta BUMG;
	Pengumpulan dan Pemilahan - Pengumpulan dan pemilihan dilakukan dimulai dari tingkat rumah tangga, untuk kemudian dilakukan pengumpulan oleh KSM/Komunitas Gampong/BUMG; - TPS 3R di Gampong merupakan pusat pengumpulan pertama sebelum selanjutnya dilakukan pengolahan lebih lanjut. - Jika Gampong belum memiliki TPS 3R, maka sampah yang telah dipilah dapat diserahkan ke truk pengangkut sampah untuk dibawa ke TPA untuk diolah pada TPST 3R;
	Pengolahan di TPS 3R/TPST di TPA - Pemilahan lebih lanjut dilakukan di TPS 3R yaitu dengan klasifikasi sampah: Organik, An-Organik dan Residu; - Sampah Organik akan diolah menjadi pupuk kompos dan pakan magot. - Sampah An-Organik akan dilakukan pemilahan dan dibersihkan serta dikumpulkan untuk selanjutnya didaur ulang menjadi produk yang memilki nilai ekonomi seperti bahan RDF, Paving Plastik serta Genteng Plastik; - Sampah Residu yang dihasilkan dari limbah rumah tangga dan tidak dapat diolah di TPS3R akan diangkut ke TPST 3R yang berada di TPA. Sampah tersebut akan dibakar dengan peralatan pirolisis non insenerator; - TPST 3R di TPA juga akan mendaur ulang sampah untuk menjadi berbagai produk bernilai ekonomi dari sampah yang langsung diserahkan oleh KSM atau rumah tangga tanpa proses pengolahan awal di TPS 3R
	Pemanfaatan dan Ekonomi Lokal - Produk hasil pengolahan sampah di TPS 3R/TPST seperti kompos dapat digunakan untuk sektor pertanian dan perkebunan lokal ataupuan dapat dijual ke luar daerah dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditentukan untuk pemasaran produk lokal. Sedangkan RDF akan dijual ke PLTU yang terdekat sebagai bahan bakar alternatif; - Hasil penjualan produk sampah dapat digunakan sebagai pendukung operasional, penambahan sarana prasarana serta juga dapat digunakan sebagai insentif KSM/Komunitas atau juga bahkan sebagai reward bagi masyarakat yang mampu memilah sampah dengan tepat ditingkat rumah tangga. - Di Tingkat Kabupaten, hasil penjualan berbagai produk olahan sampah di TPST 3R yang berada pada TPA akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
	Monitoring - OPD terkait melakukan monitoring, evaluasi, dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalan pengolahan sampah seperti: mesin pencacah, mesin pengolah, timbangan dan peralatan lainnya yang

Konsep	Sistematika Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
	dibutuhkan. Disaamping itu, perlu adanya sosialisasi terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara kontinyu; - Perlu adanya regulasi (Qanun) terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus menyediakan anggaran untuk Pembangunan TPST 3R agar operasional dapat berkelanjutan.

Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir akan dilakukan dengan cara menggerakkan masyarakat agar mau mengelola sampah sejak hulu melalui pembentukan KSM atau melalui BUMG, serta merubah fungsi TPA konvensional menjadi TPST yang terintegrasi. Sistem pengurangan tumpukan sampah yang tidak hanya di lingkungan perkotaan, namun juga disekitaran lokasi TPA akibat fungsi cell sudah mengalami degradasi menjadikan metode TPST menjadi solusi yang sangat menjajjikan dalam pengelolaan persampahan daerah sekaligus akan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah serta sumber lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi angka pengangguran.

Skema pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dapat dilihat pada bagan berikut :

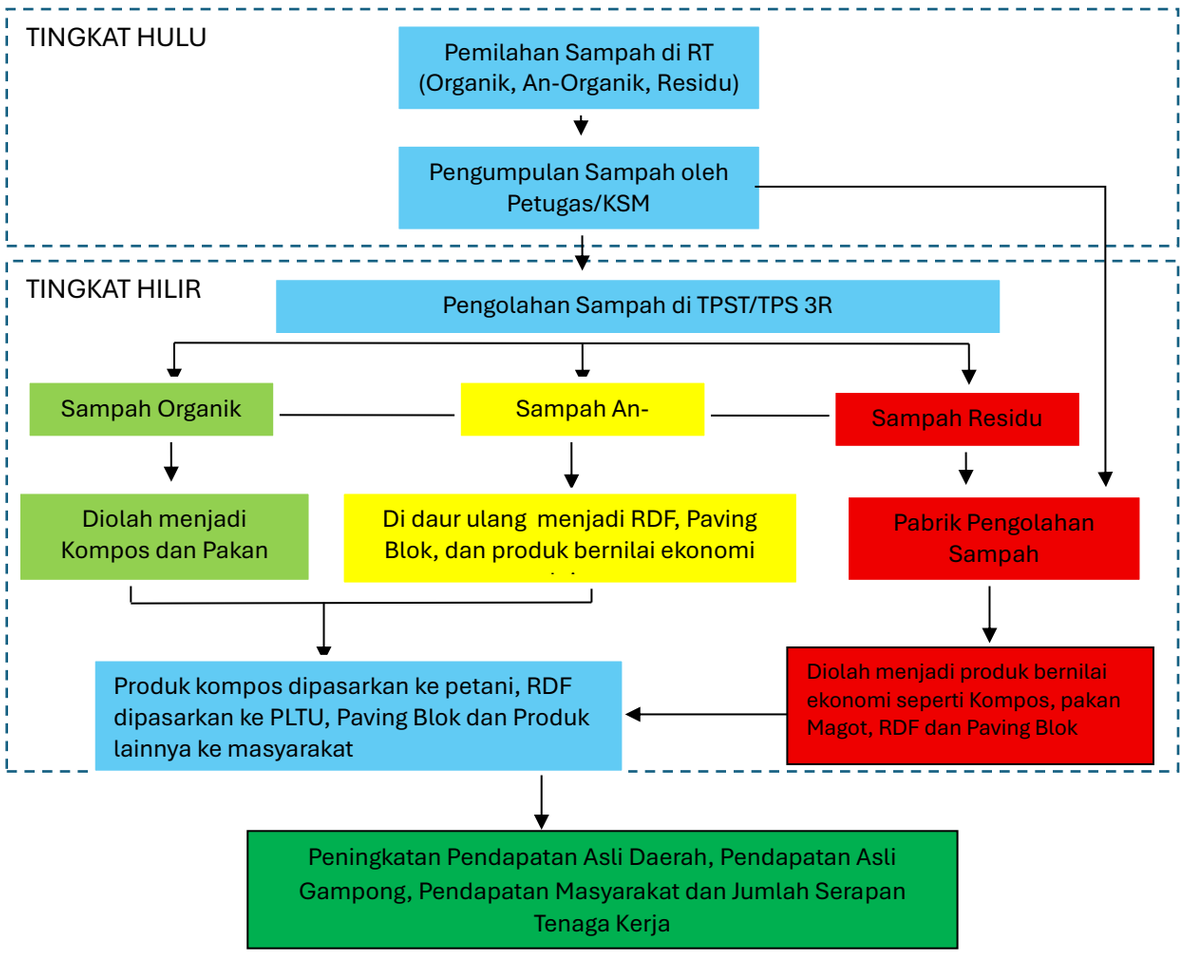

Gambar 3.59
Bagan Alir Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Pembangunan TPST direncanakan akan dibangun pada lokasi TPA Gunong Mata Ie, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Ketersediaan lahan yang memadai di TPA Gunong Mata Ie menjadi solusi dalam pembangunannya. Dengan jumlah produksi sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya, Pembangunan TPST diharapkan akan mampu

mengolah sampah menjadi berbagai produk hingga 100 ton/hari. Pengolahan ini sebagai upaya dalam mengurangi volume sampah yang diolah melalui metode *sanitary landfill* pada cell-cell di TPA atau bahkan jika memungkinkan target capaian *zero waste* menjadi target akhir dalam pengolahan sampah di Kabupaten Aceh Barat.

Pembangunan TPST akan menjadi bagian dari proyek strategis daerah dengan penyediaan anggaran sepanjang 5 tahun kedepan melalui berbagai sumber pembiayaan yang sah seperti APBN, APBK, serta sumber dana CSR. Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pembangunan TPST 3R pada lokasi TPA Gunong Mata Ie antara lain :

Tabel 3.42 Sarana dan Prasarana yang di Butuhkan pada Pembangunan TPST 3R di TPA Gunong Mata Ie

No	Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan
1	Bangunan TPST
2	Peralatan TPST Kapasitas 100 ton/hari - Hidraulic Bunker With Apron Pan Flighat Conveyor - Manual Sorting Conveyor - Pre Shredder - Tromel Screen with Automation - Flight Conveyor With Automation - Wind Shifter - Fine Shredder With Automation - Dewatering MSW Press Machine
3	Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah - Dump Truck Pengangkut Sampah - Kendaraan Pengangkut Sampah L300 - Sepeda Motor Roda 3 Pengangkut Sampah - Container Bin - Tong Sampah Terpilah

Beberapa produk yang dapat dihasilkan melalui pengolahan sampah di TPSR dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.43 Produk Hasil Yang Diolah TPST di TPA Gunong Mata Ie

No	Klsifikasi Sampah	Jenis Sampah	Produk Hasil Olahan Sampah
1	Organik	Sisa Makanan, syur, Buha dan limbah Dapur	Kompos dan Pakan Magot
2	An- Organik	Plastik, Kaleng, Kertas, Kaca, Logam, stayrofoam	Bahan RDF, Paving Plasti, Genteng Plastik
3	Residu	Popok Pampers, Tisu Bekas, Abu Sisa Pembakaran, limbah B3 Rumah Tangga	Abu (hasil pembakaran dan tidak dapat diolah lebih lanjut)

Dengan pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu ke hilir, diharapkan akan menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan persampahan di Kabupaten Aceh Barat. Solusi tersebut selain memberikan manfaat secara ekologi, sekaligus juga menjadi memberikan manfaat terhadap peningkatan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

3.3.20.11 Pembangunan Taman Olahraga

Ruang terbuka publik yang tidak hanya berfungsi secara fungsional yaitu aman dan nyaman serta indah secara estetika sangat mendesak untuk dihadirkan. Kabupaten Aceh Barat saat ini masih belum memiliki ruang terbuka publik yang representative untuk menampung aktivitas masyarakat dalam skala luas, baik aktivitas berupa kegiatan olahraga, rekreasi aktif

dan pasif serta kegiatan positif lainnya yang dapat menyehatkan fisik dan mental masyarakat ditengah tantangan kehidupan modern.

Taman olahraga salah satu ruang yang dapat menjawab kebutuhan dalam memperbaiki fisik dan mental sekaligus digunakan dalam mengembangkan bakat minat masyarakat pada olahraga tertentu. Setiap ruang pada taman olahraga yang dihadirkan akan berfungsi sebagai ruang inklusif multifungsi yang mendorong masyarakat untuk dapat mengekspresikan gaya hidup sehat melalui ragam aktivitas olahraga sekaligus ruang interaksi sosial ekonomi masyarakat.

Potensi Pembangunan taman olahraga tidak hanya menyehatkan namun demikian juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk berniaga dalam meningkatkan pendapatannya sekaligus menciptakan lapangan kerja mandiri. Disisi lain, taman olahraga yang bersifat publik juga menjadi tujuan destinasi rekreasi bagi masyarakat lokal sekaligus pengunjung dari luar daerah mengingat posisi taman olahraga yang akan dibangun berada pada jalan arteri primer yang menghubungkan antar pusat ibukota provinsi sekaligus menjadi pintu masuk ke Kota Meulaboh.

Pembangunan Taman Olahraga menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan. Adanya taman olahraga yang inklusif multifungsi sejalan dengan program nasional yaitu Gerakan Hidup Sehat (GERMAS) sekaligus mendukung target Pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam aspek kesehatan, kesejateraan serta pembangunan kota yang berkelanjutan. Salah satu Lokasi ideal untuk Pembangunan Taman Olahraga berada di Kawasan Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Gp. Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kesamaan pemanfaatan fungsi GOS sebagai prasarana olahraga, ketersediaan lahan yang memadai serta kedekatan dengan pusat kota Meulaboh. Program ini akan menjadi bagian dari proyek strategis jangka menengah daerah yang ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Pembangunan Taman Olahraga yang terintegrasi dengan GOS memiliki konsep sebagai ruang terbuka publik yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh lapisan masyarakat untuk hidup sehat melalui penyediaan berbagai sarana pertamanan, Gym Outdoor, Jogging Track sekaligus menumbuhkan interaksi sosial antar kelompok serta menjadi wadah pengembangan ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penyediaan ruang bagi UMKM.

Pengembangan konsep taman olahraga mencerminkan kebutuhan aktivitas yang bersifat positif dengan mengintergasikan sumber daya alam dan manusia yang ada di sekitarnya ataupun dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dan lebih luas lagi dengan wilayah kabupaten tetangga. Dalam pengembangannya, aspek fisik, sosial dan ekonomi menjadi fokus utama yang akan dikembangkan, dan ini bertujuan agar Taman Olahraga tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tersedianya ruang-ruang yang berpatutan diantaranya terbuka untuk publik, ramah anak-anak dan lansia, penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya. Disisi lain, adanya kemudahan akses bagi kalangan masyarakat luas dengan memberikan kesempatan berusaha seperti berniaga dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Penjabaran konsep pengembangan taman diantaranya:

Tabel 3.44 Konsep Pengembangan Taman Olahraga di Kabupaten Aceh Barat

Konsep Utama		Konsep Pengembangan	Keterangan
Taman Olahraga	1	multifungsi (olahraga, rekreasi dan niaga)	Menyediakan ruang, aktivitas dan fasilitas yang mendukung kegiatan olahraga dan berniaga yang memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Hal ini untuk memastikan taman berfungsi, aman, nyaman dan estetika serta sesuai dengan kebutuhan pengguna serta lingkungan.
	2	berbasis pada potensi dan partisipasi masyarakat	Dirancang dengan memanfaatkan potensi untuk pengembangan taman dan melibatkan pengguna melalui metode wawancara atau lainnya dalam rangka merancang kebutuhan ruang, aktivitas dan fasilitas
	3	Ramah lingkungan	Vegetasi yang dihadirkan harus berfungsi secara fungsional yaitu aman dan nyaman serta indah secara estetika.
	4	kemudahan akses bagi pengguna	Fasilitas yang dihadirkan pada ruang-ruang di taman olahraga harus representative bagi seluruh pengguna.
	5	aman, nyaman dan estetik	Ruang, aktivitas, fasilitas berfungsi secara fungsional serta estetik.

Konsep pengembangan yang akan dirancang diharapkan mampu menampung seluruh aktivitas yang menyehatkan fisik dan mental masyarakat serta adanya kemudahan akses bagi pelaku ekonomi dalam meningkatkan pendapatan sekaligus menjadi sumber lapangan pekerjaan mandiri. Ruang, aktivitas, fasilitas berdasarkan pengembangan konsep sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45 Ruang, Aktivitas dan Fasilitas Yang di Butuhkan Dalam Taman Olahraga

No	Konsep Pengembangan	Ruang	Aktivitas	Fasilitas
1	Multifungsi (olahraga, rekreasi dan niaga)	Ruang Olahraga (lapangan)	Jogging Track dan Mini Fitness Outdoor	Lapangan Multifungsi, Peralatan Fitnes, Papan Informasi, Shelter, Toilet, Kantin
		Ruang Rekreasi Aktif (Taman Artifisial)	Permainan Ramah dan Rekreasi Aktif	Taman Bermain anak, Hamparan Rumput
		Ruang Niaga (Pelaku UMKM)	Bazar, Even Daerah bagi Pelaku UMKM	Plaza, Gerobak UMKM Portable
2	berbasis pada potensi dan partisipasi masyarakat	Ruang Terbuka Hijau	Rekreasi Pasif	Gazebo, Tempat Duduk, Papan Informasi
		Ruang Terbuka Perkerasan (Plaza)	Aktivitas Publik, Aktivitas Seni Budaya	Plaza Artistik, Panggung Mini, Amphiteater
3	ramah lingkungan	Ruang Vegetasi Edukatif dan Jalur Pejalan Kaki	Edukasi Flora dan Fauna, Berjalan Kaki dalam taman olahraga	Vegetasi Fungsional, Estetik sekaligus Edukatif, Tempat Duduk, Tempat Sampah, Papan Informasi, Toilet
4	kemudahan akses bagi pengguna	Ruang Parkir Inklusif, Jalur Pejalan Kaki Utama dan Khusus	Mobilitas tanpa hambatan bagi semua pengguna taman	Plaza, Ramp, Toilet, Tempat Duduk, Papan Informasi
5	aman, nyaman dan estetik	Taman Tematik, Penerangan Taman	Rekreasi aktif dan pasif	Lampu Taman, Kursi Taman, Hardscape dan Softscape artifisial, CCTV

Kehadiran taman olahraga dapat menjadi sumber kesehatan psikis dan mental bagi masyarakat yang membutuhkan ruang yang tidak hanya sekedar untuk berolahraga ringan namun juga dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin berekreasi ataupun sekedar bersantai dan menikmati keindahan taman. Disamping itu, keberadaan Taman Olahraga tersebut juga dapat menjadi ruang publik yang digunakan sebagai wadah dalam mengembangkan komunitas kearah aktivitas positif sekaligus dimanfaatkan bagi pelaku niaga lokal/UMKM dalam usaha meningkatkan pendapatannya. Jika dilihat dari ketiga aspek tersebut, manfaat besar akan hadir dengan terbangunnya ruang publik tersebut, dan berikut lebih detail manfaat langsung yang akan diperoleh dengan hadirnya taman jika dilihat dari fungsi olahraga, rekreasi dan juga peningkatan ekonomi masyarakat lokal :

Tabel 3.46 Ruang, Aktivitas dan Fasilitas yang di Butuhkan Dalam Taman Olahraga

No	Fungsi Taman	Manfaaat Ketersediaan Taman Olahraga
1	Olahraga	Mendorong Gaya Hidup Sehat Bagi Masyarakat dengan tersedianya sarana dan prasrana olahraga yang representative
		Adanya pembinaan bakat minat masyarakat lokal yaitu sebagai ruang pelatihan sekaligus sebagai ruang pembinaan para atlet daerah
		Sebagai upaya konkret dalam mengurangi penyakit bagi masyarakat yaitu dengan melakukan aktivitas fisik yang rutin akan membantu pencegahan dari penyakit didalam tubuh.
2	Rekreasi	Sebagai sarana rekereasi aktif dan rekereasi pasif bagi masyarakat lokal, dan luar daerah
		Tersedianya ruang publik yang mampu meningkatkan kualitas hidup yaitu dengan hadirnya ruang-ruang yang mampu mengelola stress serta meningkatkan kesehatan mental masyarakat.
		Ruang yang tidak hanya berfungsi menyehatkan namun juga ruang kumpul bagi ragam komunitas dengan berbagai latar belakang.
		Ruang publik yang dirancang dapat diakses oleh semua kalangan
3	Peningkatan ekonomi Masyarakat Lokal (UMKM)	Meningkatan pendapatan pelaku UMKM yaitu dengan menghadirkan jajanan khas Aceh Barat serta kerajinan khas produk lokal
		Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yaitu hadirnya taman dengan konsep pengembangan UMKM salah satunya mejadi daya tarik tersendiri tidak hanya bagi pelaku UMKM dalam berniaga hasil produknya, namun juga menjadi magnet bagi masyarakat pendatang untuk ambil bagian sebagai pembeli produk.
		Tersedianya lapangan pekerjaan baru, baik lapangan pekerjaan mandiri yang akan dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, namun juga ada pembukaan lapangan kerja oleh pihak pengelola taman dengan ragam spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dalam pengelolaan taman olahraga
		Dengan hadirnya taman olaharaga ini yang memiliki konsep peningkatan ekonomi lokal diantaranya, akan menjadi wadah bagi pelaku UMKM dalam mempromosikan komoditi unggulan yang menjadi kekhasan kabupaten aceh barat kepda pengunjung luar Kabupaten Aceh Barat

3.3.20.12 Pemantapan Sanitasi

Lingkungan di sekitar fasilitas dasar (sekolah, dayah) dan fasilitas umum (perkantoran, fasilitas publik) yang bersih dan sehat memenuhi beberapa kriteria diantaranya tersedianya air bersih, adanya pengelolaan sampah dan air limbah dari berbagai sumber dengan baik dan sistematik serta adanya perilaku sehat daripada unsur-unsur pengguna fasilitas. Sistem pengelolaan air limbah pada lingkungan sekolah, dayah, perkantoran, fasilitas publik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem terpusat (*off site system*) dan sistem tidak terpusat (*on site system*) ataupun gabungan keduanya.

Sistem tidak terpusat lebih representatif diterapkan di fasilitas dasar dan umum yang ada, yaitu dengan melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan untuk kemudian diolah di lokasi sumbernya berasal yaitu menggunakan septitank ataupun sumur resepan untuk selanjutnya di alirkan ke lingkungan melalui saluran drainase. Disamping itu, pengeloaan sampah dilingkungan tersebut dapat dilakukan dengan meyediakan fasilitas berupa tong sampah ataupun tempat sampah.

Melalui proyek strategis daerah, pemantapan sanitasi pada lingkungan fasilitas dasar dan umum menjadi fokus pembangunan dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang akan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan yaitu terciptanya lingkungan kesehatan masyarakat yang baik serta terhindar dari penyakit menular. Berikut daftar fasilitas dasar dan umum yang akan menjadi target pemantapan sanitasi dalam 5 tahun kedepan diantaranya:

Tabel 3.47 Pemantapan Sanitasi Pada Lingkungan Sekitar Fasilitas Dasar dan Fasilitas Umum di Kabupaten Aceh Barat

No	Nama	Sarana Sanitasi
1	Fasilitas Dasar (Sekolah Formal dan Pendidikan Dayah)	MCK Plus, Drainase Lingkungan, Tempat Pengelolaan Sampah Sementara
2	Fasilitas Umum (perkantoran, Pasar dan fasilitas publik)	MCK Plus, Drainase Lingkungan, Tempat Pengelolaan Sampah Sementara

Dengan adanya upaya perbaikan sanitasi pada berbagai lokasi tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Dengan meningkatnya kebersihan, maka akan memperbaiki kehidupan generasi muda di masa yang akan datang.

3.3.21 Pengembangan Ekonomi Kreatif

Keanekaragaman pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat menandakan bahwa minat bakat masyarakat dalam mengeluarkan ide dan kreatifitas yang inovatif terhadap suatu usaha yang berdaya saing cukup tinggi. Hal itu dapat dilihat dari berbagai jenis pelaku usaha ekonomi kreatif yang di Kabupaten Aceh Barat seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.48 Klasifikasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Aceh Barat

No	Sektor Usaha	Sub Sektor Usaha	Jenis Usaha Kreatif
1	Ekonomi Kreatif	Kuliner Kreatif	- Produksi Makanan Untuk Oleh-Oleh (Keripik); - Produksi Makanan Khas Aceh Barat; - Produksi Masakan Khas Oleh2 Siap Saji (Keumamah, Ikan Asin); - Warung Kopi Khas Aceh Barat.
2		Kerajinan Tangan (Kriya)	- Pengrajin Kasab Khas Aceh Barat; - Pengrajin Rangkat atau Hiasan Dengan Bordiran Benang Emas ataupun Perak; - Pengrajin Souvenir Khas Lokal dan Anyaman.
3		Desain dan Fashion	- Produksi Pakaian Adat Aceh; - Produksi Aksesoris Lokal; - Fashion Designer.
4		Seni dan Hiburan	- Seni Lukis; - Video Kreator; - Event Organizer.

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, 2025

Saat ini tercatat sebanyak 131 pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan jenis usaha yang ditekuni oleh pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kabupaten Aceh Barat, sektor kuliner kreatif masih menjadi andalan disusul dengan kerajinan tangan. Kuliner kreatif yang dihadirkan menjadi tulang punggung pelaku usaha ekraf. Adanya kemudahan ide pengembangan serta didukung oleh kepastian pasar menjadi suatu nilai tambah bagi pelaku usaha untuk terus mengembangkan ide-ide kreatif agar mampu berdaya saing di pasar lokal hingga luar daerah. Kerajinan tangan tidak kalah pentingnya dengan usaha kuliner kreatif, dimana usaha kerjainan tangan (Kriya) memamerkan sekaligus melakukan penjualan atas produk-produk yang dihasilkan terutama pada even-even yang diselenggarakan oleh daerah ataupun provinsi bahkan hingga pusat. Kekhasan yang ditampilkan dan adanya perbedaan ide dari daerah lainnya, terutama pada jenis usaha kasab menjadi fokus utama pemerintah dalam melindungi hak kekakayaan intelektual yang dimiliki oleh daerah. Perlindungan terhadap kekayaan Kabupaten Aceh Barat telah terlebih dahulu diperoleh dalam usaha kuliner kreatif yaitu “Kopi Khop’ yang di berikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Inteletual (DJKI), Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia pada tahun 2024.

Pelaku usaha kreatif tersebar pada seluruh wilayah kecamatan dengan mayoritas pelaku usaha didominasi oleh perseorangan dan kaum perempuan dengan klasifikasi usaha yaitu mikro. Keragaraman pada usaha kreatif ini umumnya berperan dalam menjaga kelesetarian budaya lokal disamping juga digunakan sebagai peningkatan pendapatan ekonomi. Adanya pelestarian budaya lokal melalui ragam usaha kreatif akan menjadi pionir bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk dapat bersaing di pasar domestik dan internasional.

Pengetahuan digitalisasi pemasaran bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif sangat diperlukan untuk didukung melalui peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha kreatif. Belum optimalnya pemasaran produk-produk kreatif secara elektronik menandakan bahwa pelaku usaha kreatif harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Disisi lain, faktor pendukung persaingan bisnis ekraf juga harus didukung dengan menghadirkan *branding* atas produk yang dihasilkan yang akan mempermudah pemasaran ke pasar yang lebih luas. Jadi dapat sampaikan bahwa kondisi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat sangatlah beragam dan berbasis kearifan lokal. Dukungan pemerintah pada sektor ekraf ini diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah, menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus menjaga nilai-nilai budaya daerah ditengah kehidupan modern yang terus mengalami pengembangan.

Strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat yang beragam dan berbasis kearifan lokal harus direncanakan secara menyeluruh, terstruktur dan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan potensi lokal serta perkembangan teknologi. Adapun beberapa strategi pengembangan ekonomi kreatif yang dapat diterapkan sebagai berikut :

1. Identifikasi serta pengelompokan pelaku usaha ekonomi kreatif secara menyeluruh di Kabupaten Aceh Barat;
2. Penguatan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif;
3. Pengembangan Produk Berbasis Kearifan Lokal Untuk Identitas Khas Lokal;
4. Pemberian bantuan modal usaha ke pelaku usaha ekonomi kreatif;
5. Fasilitasi akses permodalan pelaku usaha ekonomi kreatif ke Lembaga keuangan
6. Digitalisasi dan Fasilitasi Akses Pasar ke Tingkat Nasional dan Internasional;

7. Melakukan Kolaborasi dan Kemitraan ;
8. Melakukan Integrasi Sektor Ekonomi Kreatif dan Sektor Pariwisata ;

Pendekatan sistematik dan berkelanjutan serta fokus pada pemberdayaan pelaku usaha ekonomi kreatif yang mengembangkan identitas lokal yang terintegrasi pada teknologi modern serta masuk kedalam bagian daripada pariwisata daerah menjadi strategi pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Strategi pertama dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan pelaku usaha ekraf yang telah ada dan berbasis pada kearifan lokal serta pelaku usaha lainnya yang terjaring yang memiliki peluang untuk dikembangkan kearah ekraf berbasis kearifan lokal. Dalam mengindentifikasi, minat bakat serta pengetahunan bagi pelaku ekraf sangat diutamakan, hal ini agar tercipta usahawan yang memilki ide-ide kretaif dan inovatif untuk mengembangkan produknya tidak hanya dalam skala lokal, namun juga hingga ke tingkat nasional atau bahkan internasional. Disisi lain, identifikasi dan pengelompokkan yang dilakukan akan memudahkan dalam pembentukan sentra ekraf yang sesuai yang akan mendapatkan pembinaan, pelatihan hingga pemberian bantuan.

Setelah dilakukan pemetaan dan pengelompokkan pelaku usaha ekraf, selanjutkan dilakukan pembinaan, pelatihan yang sesuai dengan jenis usaha seperti manajemen bisnis dan keuangan hingga ke pelatihan pemasaran dengan literasi digtal serta pemanfaatan e-commerce. Strategi selanjutnya yaitu dengan melakukan pengembangan produk ekraf yang mengangkat budaya dan warisan lokal kedalam produk yang dihasilkan. Hal ini perlu di dilakukan, agar produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha ekraf mampu memperkernalkan budaya lokal hingga ketingkat nasional dan internasional. Disisi lain, usaha kreatif yang dihasilkan dengan memanfaatkan kearifan lokal akan memilki nilai tambah tersendiri yang berdampak pada peningkatan usaha kretaif sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah. ‘Kerajinan Kasab” khas Aceh Barat memiliki daya tarik tersendiri dan hingga saat ini cukup dikenal di kalangan masyarakat lokal. Dengan kekahsannya diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional.

Dalam usaha meniagakan hasil usaha kreatif ke pasar tingkat nasional dan internasional, pelaku usaha dapat memanfaatkan platfooam digital diantaranya dengan membuat akun bisnis di marketplace dan media sosial lainnya. Disisi lain, pelaku ekraf dalam mengembangkan usahanya juga perlu menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, komunitas kreatif, pemerintah daerah hingga lembaga keuangan. Hal ini dilakukan agar usaha kreatif mampu bersaing secara lebih luas dengan melakukan peningkatan pengetahuan dari akademisi perguruan tinggi, promosi dari pemerintah daerah hingga bantuan keuangan dari lembaga pembiayaan dalam rangka memperluas jejaring usaha kreatifnya.

Tahapan pengembangan selanjutnya yaitu adanya strategi integrasi lintas sektoral untuk menarik pengunjung yang hadir ke daerah Kabupaten Aceh Barat. Dengan menjadikan produk-produk ekraf sebagai oleh-oleh wisata, penyediaan sentra kerajinan ataupun galeri ekraf yang menjadi bagian dari rute pariwisata hingga menggelar event budaya dan festival ekraf akan menumbuhkembangkan para pelaku ekraf daerah. Disisi lain promosi produk-produk ekraf yang dihasilkan dapat dilakukan melalui pemberian landmark yang kuat misalkan pembuatan logo “Ekraf Aceh Barat”, konten kreatif promosi hingga ikut serta dalam pameran nasional hingga internasional. Strategi pengembangan akhir yaitu dengan

memastikan keberlanjutan dari produk ekonomi kreatif daerah, diantaranya melalui dukungan pemerintah daerah, yaitu dengan memberikan fasilitas perizinan, pelatihan hingga pameran, menyediakan bantuan permodalan serta fasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan.

Dengan adanya strategi pengembangan pada ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat, diharapkan para pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya secara dinamis dengan tetap memperhatikan identitas pelaku usaha, melakukan usaha dengan berbasis budaya lokal, melakukan pemasaran tidak hanya secara langsung namun juga melalui digitalisasi serta kolaborasi antar sektor dengan tetap mempertahankan branding “Ekraf Aceh Barat’ serta mendapat dukungan pemerintah daerah.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025 hingga 2030 disusun sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil *(outcome-based planning),* serta sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam menjaga kesinambungan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Periode ini merupakan tahapan strategis dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025–2030 dan sebagai bagian dari kontribusi terhadap capaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025–2030 hingga tahun 2045.

Program pembangunan yang dirancang untuk tahun 2030 tidak hanya dimaksudkan untuk menuntaskan target-target RPJM periode berjalan, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme transisi dan kesinambungan perencanaan yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030. Dengan demikian, seluruh rencana program tahun 2030 menjadi rujukan bagi kepala daerah terpilih pada periode 2030–2034 dalam menetapkan arah dan prioritas pembangunan pada awal masa pemerintahannya.

Informasi lebih rinci mengenai program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026-2030

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.041.149.516	1	2.041.149.516	1	2.041.149.516	1	2.041.149.516	1	2.041.149.516	1	10.205.747.580	1.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		1.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
1.01.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Muatan Lokal	Sekolah	N/A	32	746.596.780	32	786.879.714	34	745.901.570	35	789.379.567	36	834.668.033	36	3.903.425.665	1.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
		Jumlah Dayah yang Menerapkan Muatan Lokal	Dayah	N/A	16		18		19		21		22		22		1.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.891.814.234	1	2.891.814.234	1	2.891.814.234	1	2.891.814.234	1	2.891.814.234	1	14.459.071.170	1.01.0.00.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		1.01.0.00.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAYAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.01.07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Cakupan Dayah Terakreditasi	Persen	56,00	67,02	4.307.707.869	71,28	4.411.740.963	76,60	4.305.912.448	81,91	4.418.196.985	87,23	4.535.157.164	87,234	21.978.715.429	1.01.0.00.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAYAH
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	273.669.657.039	1	273.669.657.039	1	273.669.657.039	1	273.669.657.039	1	273.669.657.039	1	1.368.348.285.195	1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (7-15 Tahun)	Persen	98,65	98,96	36.581.260.810	99,11	41.086.588.148	99,27	34.760.734.420	99,43	39.596.217.010	99,58	44.633.054.054	99,58	196.657.854.442	1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun)	Persen	88,15	89,75		91,34		92,32		94,53		96,12		96,12		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) kesetaraan	Persen	45,79	54,00		60,49		66,98		73,47		74,23		74,23		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam	Persen	65,37	65,75		66,00		66,25		67,00		70,00		70		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pendidikan Khusus (APS)															
		Persentase PAUD yang Terakreditasi	Persen	72,00	76,00		79,00		82,00		85,00		88,00		88		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Indeks Iklim keamanan Satuan Pendidikan SD	Indeks	68,21	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Indeks Iklim keamanan Satuan Pendidikan SMP	Indeks	68,98	73,00		75,00		77,00		79,00		80,00		80		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Indeks Iklim kebhinekaan Satuan Pendidikan SD	Indeks	63,96	70,00		73,00		76,00		79,00		80,00		80		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Indeks Iklim kebhinekaan Satuan Pendidikan SMP	Indeks	68,53	73,00		75,00		77,00		79,00		80,00		80		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Indeks Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan SD	Indeks	53,53	60,00		63,00		66,00		69,00		70,00		70		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Indeks Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan SMP	Indeks	56,24	61,00		63,00		65,00		67,00		70,00		70		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase SD yang Terakreditasi	Persen	13,48	43,00		43,00		53,00		63,00		73,00		73,00		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase SMP yang Terakreditasi	Persen	19,39	30,00		40,00		50,00		60,00		70,00		70,00		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	N/A	60,00	10.000.000	62,00	10.000.000	65,00	10.000.000	67,00	10.000.000	70,00	10.000.000	70	50.000.000	1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	N/A	60,00	10.317.300	62,00	10.317.300	65,00	10.317.300	67,00	10.317.300	70,00	10.317.300	70	51.586.500	1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Pendidik yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Bidang	Persen	74,95	76,00		80,00		82,00		85,00		87,00		87		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain atau Psikologi.															
		Persentase Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik Jenjang SD	Persen	48,54	50,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik Jenjang SMP	Persen	46,04	50,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75		1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	112.290.773.332	1	112.290.773.332	1	112.290.773.332	1	112.290.773.332	1	112.290.773.332	1	561.453.866.660	1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	Persen	N/A	46,00	45.904.076.286	55,00	47.908.376.186	61,00	45.255.119.105	70,00	47.166.493.211	70,00	49.944.787.955	70,00	236.178.852.743	1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	23,48	40,00		45,00		50,00		55,00		55,00		55,00		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	67,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Cakupan Penemuan Kasus TB	Persen	N/A	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen	N/A	35,00		40,00		45,00		50,00		55,00		55,00		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Persentase Lanjut Usia yang Mendiri	Persen	N/A	77,00		79,00		81,00		83,00		85,00		85,00		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Persentase Merokok Penduduk Usia 10-21 Tahun	Persen	N/A	12,40		11,40		10,40		9,40		8,40		8,40		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter Spesialis Terhadap Populasi	Rasio	0,193	0,193	1.504.854.200	0,197	1.704.854.200	0,197	1.257.654.200	0,202	1.704.854.200	0,207	1.912.254.200	0,207	8.084.471.000	1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Rasio Dokter Terhadap Populasi	Rasio	0,035	0,035		0,036		0,036		0,037		0,038		0,038		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Rasio Dokter Gigi	Rasio	0,072	0,072		0,077		0,077		0,082		0,082		0,082		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terhadap Populasi															
		Rasio Perawat Terhadap Populasi	Rasio	0,003	0,003		0,003		0,003		0,003		0,003		0,003		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Rasio Bidan Terhadap Populasi	Rasio	0,004	0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Rasio Tenaga Apoteker Terhadap Populasi	Rasio	0,063	0,063		0,067		0,067		0,072		0,072		0,072		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Rasio Nutrisionis Terhadap Populasi	Rasio	0,534	0,549		0,559		0,568		0,578		0,587		0,587		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Rasio Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Terhadap Populasi	Rasio	0,284	0,284		0,289		0,294		0,299		0,303		0,303		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat Terhadap Populasi	Rasio	0,020	0,020		0,021		0,021		0,022		0,022		0,022		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Rasio Tenaga Sanitarian Terhadap Populasi	Rasio	0,018	0,018		0,019		0,019		0,020		0,020		0,020		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Puskesmas dengan Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	N/A	86,00	101.990.000	89,00	125.990.000	92,00	98.950.000	95,00	123.990.000	95,00	130.575.000	95	581.495.000	1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Persentase Pangan IRT Aman dan Bermutu	Persen	N/A	65,00		65,00		70,00		70,00		75,00		75		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Persentase Sarana Produksi IRTP yang Memenuhi Ketentuan	Persen	N/A	65,00		70,00		70,00		75,00		75,00		75		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
		Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan	Persen	N/A	80,00		85,00		87,00		90,00		93,00		93		1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persen	N/A	68,00	219.733.000	71,00	315.733.000	75,00	179.720.000	80,00	290.733.000	80,00	325.733.000	80	1.331.652.000	1.02.0.00.0.00.05.0000 DINAS KESEHATAN
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	11.378.229.878	1	11.378.229.878	1	11.378.229.878	1	11.378.229.878	1	11.378.229.878	1	56.891.149.390	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	29,21	30,00	38.291.568.634	31,65	38.679.605.879	32,00	39.349.137.352	33,50	39.795.400.060	34,00	40.620.874.405	34,00	196.736.586.330	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Kawasan Terbangun Bebas Banjir	Persen	13,00	12,75		12,55		12		11,80		11,50		11,50		1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak,	Persen	68,00	69,50	7.350.622.000	70,00	7.425.111.377	70,50	7.524.423.417	71,50	7.674.911.885	72,00	7.798.714.767	72,00	37.773.783.446	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Perkotaan dan Perdesaan															
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio Ketersediaan Fasilitas Pengumpulan Sampah Diperkotaan	Rasio	0,40	0,45	2.578.633.400	0,55	2.604.764.630	0,60	2.639.603.769	0,70	2.692.395.845	0,75	2.735.826.489	0,75	13.251.224.133	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	90,75	91,22	5.327.222.000	92,00	5.381.206.744	93,22	5.453.181.236	94,65	5.562.244.861	95,00	5.651.968.620	95,00	27.375.823.460	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	49,70	51,50	5.595.750.000	52,50	5.652.455.940	54,00	5.728.058.433	55,00	5.842.619.601	56,00	5.936.866.044	56,00	28.755.750.019	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah yang Dapat Berfungsi	Persen	95,00	95,00	8.627.000.000	95,50	8.714.423.875	96,00	8.830.980.673	96,50	9.007.600.286	97,00	9.152.900.570	97,00	44.332.905.404	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Bangunan yang Memiliki PBG	Rasio	0,0219	0,0220		0,0250		0,0280		0,0320		0,0350		0,035		1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Per Satuan Bangunan															PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	Persen	0	0	2.851.352.149	0	2.880.247.043	0	2.918.770.803	0	2.977.146.219	0	3.025.170.130	0	14.652.686.345	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (> 40 Km/Jam)	Persen	57,83	54,70	49.884.575.550	55,20	50.936.010.948	56,00	47.128.104.854	56,75	48.070.666.951	57,50	48.846.087.854	57,50	244.865.446.158	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	Kawasan	1	1		1		1		1		1		1,00		1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap Regulasi Rencana Tata Ruang	Persen	N/A	84,50	616.094.000	85,00	622.337.344	86,00	630.661.204	86,50	643.274.428	87,00	653.650.994	87,00	3.166.017.969	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	Persen	N/A	1,82	346.632.000	2,00	350.144.683	2,50	354.827.923	3,00	361.924.482	3,50	367.762.632	3,50	1.781.291.720	1.03.0.00.0.00.06.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	5.493.564.754	1	5.493.564.754	1	5.493.564.754	1	5.493.564.754	1	5.493.564.754	1	27.467.823.770	1.04.1.03.0.00.07.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		1.04.1.03.0.00.07.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	32,00	32,05	704.284.182	32,10	711.327.024	32,20	697.100.483	32,30	842.975.251	32,40	895.462.855	32,40	3.851.149.795	1.04.1.03.0.00.07.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	N/A	80,00	102.000.000	81,00	103.020.000	82,00	100.959.600	83,00	102.534.570	84,00	104.175.123	84,00	512.689.293	1.04.1.03.0.00.07.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	Persen	N/A	80,00	2.755.016.000	81,00	2.782.566.160	82,00	2.726.914.837	83,00	2.769.454.708	84,00	2.813.765.984	84,00	13.847.717.689	1.04.1.03.0.00.07.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman dengan PSU Baik	Persen	45,00	46,00	13.353.176.082	47,00	13.641.359.273	48,00	13.258.660.793	49,00	13.416.195.511	50,00	13.679.751.675	50,00	67.349.143.335	1.04.1.03.0.00.07.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	6.601.887.998	1	6.601.887.998	1	6.601.887.998	1	6.601.887.998	1	6.601.887.998	1	33.009.439.990	1.05.0.00.0.00.08.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		1.05.0.00.0.00.08.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	60,00	65,00	1.860.857.624	70,00	1.983.144.298	75,00	1.858.747.180	80,00	1.990.733.089	85,00	2.128.215.026	85	9.821.697.218	1.05.0.00.0.00.08.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	6.125.843.034	1	6.125.843.034	1	6.125.843.034	1	6.125.843.034	1	6.125.843.034	1	30.629.215.170	1.05.0.00.0.00.09.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		1.05.0.00.0.00.09.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Jiwa	Jiwa	N/A	480	1.236.118.472	430	1.342.498.816	380	1.274.282.542	330	1.346.161.350	280	1.397.699.932	280	6.596.761.111	1.05.0.00.0.00.09.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota yang Tertangani	Persen	100,00	100	6.948.816.115	100	7.049.226.508	100	6.907.083.216	100	7.058.396.865	100	7.239.344.704	100	35.202.867.408	1.05.0.00.0.00.09.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	4.268.441.039	1	4.268.441.039	1	4.268.441.039	1	4.268.441.039	1	4.268.441.039	1		1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial Melalui Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga	250	200	775.714.120	220	797.617.849	210	766.618.212	210	789.523.935	220	821.090.142	220	3.950.564.258	1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Terpenuhi kebutuhan Dasarnya	Persen	60,15	70,00	338.562.000	75,00	658.562.000	80,00	330.562.000	85,00	350.562.000	90,00	370.562.000	90	2.048.810.000	1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi kebutuhan Dasarnya	Persen	95,00	96,00		97,00		97,00		98,00		98,00		98		1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL
		Persentase Usia Lanjut Terlantar yang Terpenuhi kebutuhan Dasarnya	Persen	95,33	96,00		97,00		97,00		98,00		98,00		98		1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL
		Persentase Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi kebutuhan Dasarnya	Persen	80,00	83,00		86,00		89,00		90,00		92,00		92		1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL
		Persentase PPKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang	Persen	65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90		1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terpenuhi kebutuhan Dasarnya															
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi kebutuhan Dasarnya	Persen	10,79	83,00	107.558.000	86,00	127.558.000	89,00	100.558.000	90,00	123.558.000	92,00	143.558.000	92	602.790.000	1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100,00	122.919.000	100	137.919.000	100	113.919.000	100	133.919.000	100	148.919.000	100	657.595.000	1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persen	100	100,00		100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional	Persen	100	100,00	54.884.000	100	59.884.000	100	54.884.000	100	56.884.000		61.884.000	0	288.420.000	1.06.0.00.0.00.10.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		yang Terkelola dengan Baik															
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	4.251.398.197	1	4.350.398.197	1	4.280.398.197	1	4.292.398.197	1	4.295.398.197	1	21.469.990.985	3.32.2.07.0.00.27.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		3.32.2.07.0.00.27.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Implementasi Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja	Persen	N/A	50,00	50.000.000	55,00	50.000.000	60,00	50.000.000	65,00	50.000.000	70,00	50.000.000	70	250.000.000	3.32.2.07.0.00.27.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terlatih yang Memperoleh Pekerjaan	Persen	37,04	40,00	1.221.184.290	45,00	1.207.476.608	50,00	1.159.717.512	55,00	1.217.517.511	60,00	1.274.616.300	60	6.080.512.221	3.32.2.07.0.00.27.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Mendapatkan Pekerjaan	Persen	18,40	20,00	80.000.000	23,00	80.000.000	25,00	80.000.000	27,00	80.000.000	30,00	80.000.000	30	400.000.000	3.32.2.07.0.00.27.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan	Persen	76,92	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	510.000.000	3.32.2.07.0.00.27.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	3.495.587.116	1	3.495.587.116	1	3.495.587.116	1	3.495.587.116	1	3.495.587.116	1	17.477.935.580	2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	85,98	85,00	85.180.007	85,20	120.180.007	85,40	85.180.007	85,70	98.180.007	86,00	98.180.007	86,00	486.900.035	2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Rasio	0,333	0,099	135.955.400	0,098	140.955.400	0,097	135.955.400	0,096	128.955.400	0,095	153.955.400	0,095	695.777.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Berkualitas	Persen	31,06	45,96	53.000.000	45,96	58.000.000	45,96	50.000.000	45,96	54.000.000	45,96	60.000.000	45,96	275.000.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Profil Gender	Dokumen	-	1	18.139.650	1	40.139.650	1	18.139.650	1	40.139.650	1	45.139.650	5	161.698.250	2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	50,00	72,41	193.420.020	72,45	215.420.020	72,49	193.420.020	72,53	197.420.020	73,32	205.420.020	73,32	1.005.100.100	2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan	Persen	0,047	0,047	50.442.497	0,046	70.442.497	0,045	50.442.497	0,044	70.442.497	0,043	110.442.497	0,043	352.212.485	2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.841.944.512	1	2.855.944.512	1	2.842.803.495	1	2.851.803.495	1	2.852.803.495	1	14.245.299.509	2.09.0.00.0.00.12.0000 DINAS PANGAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.09.0.00.0.00.12.0000 DINAS PANGAN
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kebijakan Pangan yang Diimplementasikan	Persen	100	100	30.000.000	100	35.000.000	100	29.000.000	100	32.000.000	100	40.000.000	100	166.000.000	2.09.0.00.0.00.12.0000 DINAS PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	71920	34923	500.000.000	34950	508.000.000	35000	500.000.000	35050	510.000.000	35100	500.000.000	35100	2.518.000.000	2.09.0.00.0.00.12.0000 DINAS PANGAN
		Tingkat Inflasi (Komoditas Pangan Bergejolak)	Persen	4,47	±2,5-3,5		±2,5-3,5		±2,5-3,5		±2,5-3,5		±2,5-3,5		±2,5-3,5		2.09.0.00.0.00.12.0000 DINAS PANGAN
		Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kapita/tahun	2079	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2.09.0.00.0.00.12.0000 DINAS PANGAN
		Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan	gram/kapita/tahun	63,70	65		65		65		65		65		65		2.09.0.00.0.00.12.0000 DINAS PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN	Persentase Daerah	Persen	8,70	8	85.396.739	7,5	104.222.320	7	80.000.000	6,5	100.550.135	6,5	150.000.000	6,5	520.169.193	2.09.0.00.0.00.12.0000 DINAS PANGAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	KERAWANAN PANGAN	Rawan Pangan															
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar yang Beredar	Persen	100	92	60.000.000	93	65.000.000	94	45.000.000	95	57.000.000	96	65.371.793	96	292.371.793	2.09.0.00.0.00.12.0000 DINAS PANGAN
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.829.577.178	1	2.829.577.178	1	2.829.577.178	1	2.829.577.178	1	2.829.577.178	1	14.147.885.890	2.10.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERTANAHAN
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.10.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERTANAHAN
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah yang Tersedia untuk kepentingan Umum	Persen	N/A	80	20.402.000	80	20.696.809	80	20.696.809	80	21.019.679	80	29.355.994	80	112.171.291	2.10.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERTANAHAN
2.10.12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Jumlah Usulan Sertifikat Tanah Pemerintah	Hak Alas	543,00	50	60.439.030	50	73.438.416	50	63.438.416	50	86.428.055	50	96.810.904	50	380.554.821	2.10.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERTANAHAN
2.10.13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Jumlah Tanah Pemerintah yang Sudah Terinventarisasi	Hak Alas	543,00	100	60.795.585	100	79.674.082	100	63.674.082	100	86.667.397	100	97.327.310	100	388.138.456	2.10.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERTANAHAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.10.16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase Tanah Pemerintah yang dicatat dalam Sim Tanah	Persen	41,67	49	40.848.160	57	52.199.764	64	33.620.981	72	34.145.469	81	43.691.796	81	204.506.170	2.10.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERTANAHAN
2.10.17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Kasus Tanah yang Diselesaikan	Persen	80,36	81	20.636.120	82	20.934.312	83	20.934.312	84	21.402.291	85	31.744.728	85	115.651.763	2.10.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERTANAHAN
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	3.292.561.643	1	3.292.561.643	1	3.292.561.643	1	3.292.561.643	1	3.292.561.643	1	16.462.808.215	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Implementasi kebijakan Lingkungan Hidup	Persen	63	65	209.460.200	67	212.486.900	68	208.237.162	71	211.485.662	73	214.869.432	73	1.056.539.356	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pencemaran Lingkungan	Persen	100	100	345.347.922	100	350.338.199	100	340.331.435	100	345.640.606	100	351.170.856	100	1.732.829.018	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Kawasan kehati yang Terkelola	Kawasan	1	1	348.553.456	1	353.590.053	1	330.292.985	1	335.445.556	1	340.812.684	1	1.708.694.734	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pemegang Izin Usaha yang Taat Terhadap Peraturan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	28	30	167.646.884	35	170.575.131	40	166.463.628	45	169.060.461	50	172.880.164	50	846.626.269	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemegang Izin Usaha yang Taat Terhadap Peraturan Terkait Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Persen	N/A	30	35.000.000	35	35.000.000	40	35.000.000	45	35.546.000	50	35.000.000	50	175.546.000	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah keterlibatan kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kelompok	2	3	49.137.618	4	49.847.657	4	48.850.703	5	49.612.774	5	50.406.579	5	247.855.331	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PartisIPasi Masyarakat dalam Peningkatan kepedulian Lingkungan Hidup	Desa	1	2		3	47.577.516	4		5	51.363.962	5	52.185.785	5	151.127.262	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus yang diselesaikan	Persen	100	100	67.426.300	100	68.400.610	100	67.032.598	100	68.078.306	100	69.167.559	100	340.105.373	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah Perkotaan yang ditangani	Persen	86,00	90	5.327.982.380	95	5.404.971.725	100	5.296.872.291	100	5.379.503.499	100	5.518.256.541	100	26.927.586.436	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Sampah Perkotaan yang Terkelola	Persen	N/A	0,1		0,2		0,3		0,4		0,4		0,4		2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Penanganan Sampah Kabupaten	Persen	48,00	50		55		60		65		70		70		2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 5R	Persen	N/A	15		17		20		25		30		30		2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	3.732.697.291	1	3.732.697.291	1	3.732.697.291	1	3.732.697.291	1	3.732.697.291	1	18.663.486.455	2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																PENCATATAN SIPIL
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	2,74	20	191.023.962	30	227.926.106	40	186.667.518	50	223.079.982	60	270.633.315	60	1.099.330.883	2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	55,46	65		70		75		80		85		85		2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	97,68	98	32.000.000	99	35.000.000	99	25.000.000	100	30.000.000	100	32.000.000	100	154.000.000	2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Akta Kematian yang diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100		100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	56,75	65		70		75		80		85		85		2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	44,56	55		60		65		70		75		75		2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	11,53	15,38	20.000.000	19,23	25.000.000	23,08	15.000.000	26,92	20.000.000	30,77	23.000.000	30,7692308	103.000.000	2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan Profil Data kependudukan untuk Pembangunan	Nilai	Ada	Ada	15.000.000	Ada	18.000.000	Ada	12.000.000	Ada	17.000.000	Ada	18.000.000	Ada	80.000.000	2.12.0.00.0.00.15.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	3.844.398.528	1	3.844.398.528	1	3.844.398.528	1	3.844.398.528	1	3.844.398.528	1	19.221.992.640	2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	N/A	20,00	150.000.000	30,00	150.000.000	40,00	150.000.000	50,00	150.000.000	60,00	150.000.000	60	750.000.000	2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan KapasitASNya	Persen	N/A	20,00	322.699.719	30,00	392.306.789	40,00	294.572.683	50,00	369.280.634	60,00	447.099.500	60	1.825.959.325	2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
		Persentase Fasilitasi Tata kelola Desa	Persen	N/A	20,00		30,00		40,00		50,00		60,00		60		2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa	Persen	N/A	20,00	500.000.000	30,00	500.000.000	40,00	500.000.000	50,00	500.000.000	60,00	500.000.000	60	2.500.000.000	2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertilty Rate/TFR)	Nilai	2,18	2,18	44.000.000	2,17	45.000.000	2,17	40.000.000	2,17	46.000.000	2,17	52.000.000	2,17	227.000.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rate Nett Recent Migration	Persen	75,28	77,20		78,16		79,12		80,08		81,04		81,04		2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pasca Persalinan	Persen	79,17	79,25	7.880.231.564	79,35	7.943.743.364	79,45	7.817.118.387	79.55	7.941.345.319	79,65	8.045.326.932	79,65	39.627.765.566	2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	8,92	9,50		10,00		11,00		12,00		12,50		12,50		2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Persen	87,24	89,30	51.780.800	90,20	51.780.800	91,03	51.780.800	91,79	51.780.800	92,48	51.780.800	92,48	258.904.000	2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Indeks Lansia Berdaya	Persen	57,43	59,60		60,66		61,68		62,66		63,69		63,69		2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	49,50	50,68		51,23		51,77		52,29		52,80		52,80		2.08.2.14.0.00.11.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	5.994.165.049	1	5.994.165.049	1	5.994.165.049	1	5.994.165.049	1	5.994.165.049	1	29.970.825.245	2.15.0.00.0.00.17.0000 DINAS PERHUBUNGAN
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.15.0.00.0.00.17.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Trayek Angkutan	Persen	2,00	3,00	1.300.846.268	3,00	1.405.259.181	3,00	1.256.800.277	3,00	1.366.915.336	3,00	1.479.692.622	3	6.809.513.684	2.15.0.00.0.00.17.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Capaian PAD	Persen	N/A	100	40.787.740	100	42.377.123	100	42.000.000	100	45.655.200	100	51.385.683	100	222.205.745	2.15.0.00.0.00.17.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.831.690.118	1	2.831.690.118	1	2.831.690.118	1	2.831.690.118	1	2.831.690.118	1	14.158.450.590	2.16.2.21.2.20.18.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.16.2.21.2.20.18.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Persen	N/A	70,00	900.000.000	75,00	900.000.000	80,00	875.000.000	85,00	900.000.000	90,00	900.000.000	90	4.475.000.000	2.16.2.21.2.20.18.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPBE	Persen	N/A	90,00	1.250.000.000	91,00	1.250.000.000	92,00	1.200.000.000	93,00	1.250.000.000	94,00	1.250.000.000	94	6.200.000.000	2.16.2.21.2.20.18.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	5.221.055.854	1	5.235.055.854	1	5.205.055.854	1	5.245.055.854	1	5.250.055.854	1	26.156.279.270	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan Pengawasan Koperasi	Persen	64,06	68	30.000.000	71	31.000.000	74	29.000.000	77	29.500.000	79	30.500.000	79	150.000.000	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) Sehat	Persen	57,81	60	20.000.000	70	22.000.000	80	18.000.000	80	21.000.000	80	19.000.000	80	100.000.000	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus yang Mendapatkan Pelatihan	Persen	N/A	8,00	90.000.000	8,00	95.000.000	8,00	80.000.000	8,00	85.000.000	8,00	87.000.000	8	437.000.000	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Bergabung dalam Koperasi	Persen	N/A	2,00	50.000.000	2,00	65.000.000	2,00	68.000.000	2,00	68.500.000	2,00	70.000.000	2	321.500.000	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Pendapatan UMKM	Persen	34,88	5,50-6,00	50.000.000	6,00-6,50	60.000.000	6,00-6,50	52.000.000	7,00-7,50	52.500.000	7,00-7,50	53.500.000	7,00-7,50	268.000.000	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dan Menengah	Persen	5,98	5,00	349.377.552	5,00	350.000.000	5,00	320.000.000	5,00	330.000.000	5,00	335.000.000	5	1.684.377.552	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	4.721.710.492	1	4.780.000.000	1	4.725.503.613	1	4.730.505.070	1	4.733.902.351	1	23.691.621.526	2.18.0.00.0.00.19.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.18.0.00.0.00.19.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Rencana Investasi	Rupiah (Milyar)	N/A	300	50.000.000	310	52.000.000	320	49.000.000	330	51.000.000	340	55.000.000	340	257.000.000	2.18.0.00.0.00.19.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	4	1	150.000.000	1	152.330.218	1	140.000.000	1	170.000.000	1	188.000.000	5	800.330.218	2.18.0.00.0.00.19.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	94,46	A (88,00-100,00)	421.400.275	A (88,00-100,00)	427.000.000	A (88,00-100,00)	400.000.000	A (88,00-100,00)	440.950.000	A (88,00-100,00)	498.000.000	A (88,00-100,00)	2.187.350.275	2.18.0.00.0.00.19.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi	Milyar	1613,76	540	50.000.000	560	55.000.000	580	48.000.000	600	52.000.000	620	55.000.000	2900	260.000.000	2.18.0.00.0.00.19.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Update Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan	Persen	95,00	95	20.000.000	95	25.000.000	95	19.000.000	95	21.000.000	95	23.000.000	95	108.000.000	2.18.0.00.0.00.19.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	3.433.966.904	1	3.433.966.904	1	3.433.966.904	1	3.433.966.904	1	3.433.966.904	1	17.169.834.520	3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Persen	1	1	455.000.000	2	480.000.000	2	475.000.000	3	486.874.514	3	506.874.514	3	2.403.749.028	3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti	Cabor	22	24	2.012.350.000	24	2.032.350.000	26	2.006.661.471	28	2.032.350.000	30	2.052.350.000	30	10.136.061.471	3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
		Jumlah Perolehan Medali	Medali	11	12		13		14		16		18		18		3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Penggalang Kategori Rakit	Persen	33,33	35	500.000.000	36	510.776.726	36	503.776.726	37	510.776.726	38	530.776.726	38	2.556.106.903	3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	N/A	2,5	150.000.000	2,7	150.000.000	2,9	150.000.000	3	150.000.000	3,2	150.000.000	3,2	750.000.000	2.16.2.21.2.20.18.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANdiAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	N/A	70	117.334.784	75	193.183.194	80	161.685.727	85	168.092.391	90	252.888.911	90	893.185.007	2.16.2.21.2.20.18.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	1.650.946.311	1	1.650.946.311	1	1.650.946.311	1	1.650.946.311	1	1.650.946.311	1	8.254.731.555	2.22.0.00.0.00.20.0000 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.22.0.00.0.00.20.0000 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
2.22.07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase Nilai-Nilai Adat Istiadat	Persen	90	92	534.833.103	93	566.417.616	94	522.070.337	95	555.969.397	95	591.280.048	95	2.770.570.501	2.22.0.00.0.00.20.0000 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
		Persentase Gampong yang Telah Menerapkan Hukum Adat	Persen	88,16	90		92		95		97		99		99		2.22.0.00.0.00.20.0000 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan kebudayaan	Persen	N/A	50	557.729.950	60	557.729.950	65	557.729.950	70	557.729.950	75	557.729.950	75	2.788.649.750	1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen	N/A	50	173.204.150	60	173.204.150	65	173.204.150	70	173.204.150	75	173.204.150	75	866.020.750	1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	N/A	50	424.661.600	60	424.661.600	65	424.661.600	70	424.661.600	75	424.661.600	75	2.123.308.000	1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	N/A	50	87.228.210	60	87.228.210	65	87.228.210	70	87.228.210	75	87.228.210	75	436.141.050	1.01.2.22.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	4.444.704.934	1	4.444.704.934	1	4.444.704.934	1	4.444.704.934	1	4.444.704.934	1	22.223.524.670	2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Per Tahun	Persen	N/A	5	1.981.092.371	5	2.022.542.185	5	1.942.118.753	5	1.977.118.753	5	2.022.118.753	25	9.944.990.815	2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0,32	0,45		0,48		0,51		0,54		0,57		0,57		2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang Terdata/Teridentifikasi	Naskah	5	2	32.500.000	2	57.500.000	2	32.500.000	2	57.500.000	2	82.500.000	10	262.500.000	2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan Implementasi Srikandi pada OPD dan BLUD Lingkup Pemkab Aceh Barat	Persen	N/A	40	216.424.534	60	246.424.450	75	216.424.450	80	259.942.120	95	297.770.373	95	1.236.985.927	2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase Arsip Statis yang dimasukkan dalam SIKN Melalui JIKN	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase Arsip Covid-19 yang diakuisisi	Persen	35	40		50		60		70		80		80		2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	3.974.239.083	1	3.978.239.083	1	3.978.239.083	1	3.988.239.083	1	3.998.239.083	1	19.917.195.414	3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	20150	20150	1.121.647.950	20250	1.142.130.314	20350	1.124.452.926	20450	1.153.442.322	20550	1.256.469.224	20550	5.798.142.736	3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan	Persen	9	9		9,1		9,2		9,3		9,4		9,4		3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Kelompok Pembudidaya Ikan	Ton	802,39	810	4.000.000.000	820	4.100.000.000	830	3.950.000.000	840	4.050.000.000	850	4.080.000.000	850	20.180.000.000	3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya	Persen	9	6		6,5		6,6		6,7		6,8		6,8		3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Wilayah Perikanan Tangkap Terawasi	Kecamatan	4	4	32.892.500	4	33.500.000	4	31.500.000	4	32.500.000	4	35.500.000	4	165.892.500	3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Industri Perikanan yang Mendapatkan Kerjasama Pemasaran	Unit Usaha	N/A	3	220.000.000	4	230.000.000	5	210.000.000	6	215.000.000	7	220.000.000	7	1.095.000.000	3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Industri Perikanan	Persen	6-6,5	5-6		5-6		5-6		5-6		5-6		5-6		3.25.0.00.0.00.22.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Tamu Wisatawan	Persen	N/A	5,2	337.459.491	6,1	352.459.491	7.3	327.459.491	8.5	352.459.491	9,8	377.001.262	9,8	1.746.839.228	3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Persen	0,74	0,75	434.885.100	0,77	454.885.100	0,78	429.885.100	0,79	454.885.100	0,8	474.885.100	0,8	2.249.425.500	3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
		Persentase PAD Sektor Pariwisata	Persen	4,26	4,28		4,30		4,32		4,35		4,40		4,40		3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Ekonomi Kreatif yang Memiliki kekayaan Intelektual	Persen	1,00	2,17	27.500.000	3,50	27.500.000	4,25	22.500.000	5,65	27.500.000	6,85	27.500.000	6,85	132.500.000	3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif	Persen	28,99	30,00	465.047.896	31,00	485.047.896	32,00	465.047.896	32,50	485.047.896	33,00	505.047.896	33	2.405.239.480	3.26.2.19.0.00.23.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	24.005.903.476	1	24.007.182.188	1	24.006.182.188	1	24.004.671.481	1	24.015.671.481	1	120.039.610.814	3.27.0.00.0.00.24.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		3.27.0.00.0.00.24.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	87.410,57	98611	1.000.000.000	106964	1.102.000.000	115592	945.416.356	124499	1.103.000.000	133579	1.202.000.000	133579	5.352.416.356	3.27.0.00.0.00.24.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Produksi Tanaman Pangan Lainnya (Jagung, Kacang Tanah dan Ubi)	Ton	572,40	550		610		630		650		670		670		3.27.0.00.0.00.24.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Produksi Tanaman Hortikurtura (Cabai Merah dan Bawang Merah)	Ton	537	550		565		580		595		610		610		3.27.0.00.0.00.24.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Lahan yang Dimanfaatkan untuk Persawahan	Ha	9.821,81	9630	900.000.000	9680	1.000.000.000	9730	900.000.000	9780	1.100.000.000	9822	1.151.502.744	9822	5.051.502.744	3.27.0.00.0.00.24.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Indeks Pertanaman (IP)	Indeks	1,30	1,60		1,70		1,80		1,90		2,00		2,00		3.27.0.00.0.00.24.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Panen Pertanian	Ha	14.026	16000	100.000.000	17000	120.000.000	18000	80.000.000	19000	90.000.000	20000	117.000.000	20000	507.000.000	3.27.0.00.0.00.24.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Penyuluh Pertanian Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Orang	N/A	206	983.284.939	206	1.150.000.000	206	900.000.000	206	952.500.000	206	1.200.000.000	206	5.185.784.939	3.27.0.00.0.00.24.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Jumlah Petani Milenial Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	N/A	100		100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.24.0000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	6.995.265.340	1	7.001.069.869	1	6.998.265.340	1	6.999.528.140	1	7.004.856.590	1	34.998.985.278	3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	9611	9899	1.000.000.000	10196	1.084.000.000	10502	1.020.000.000	10817	1.126.000.000	11142	1.180.000.000	11142	5.410.000.000	3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Jumlah Populasi Ternak Kerbau	Ekor	27463	28286		29135		30010		30910		31837		31837		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Jumlah Populasi Ternak Kambing	Ekor	10225	10531		10847		11173		11508		11854		11854		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Jumlah Populasi Ternak Domba	Ekor	855	880		907		934		962		991		991		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	299445	308428		317681		327212		337028		347139		347139		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Produksi Daging	Kg	1106857	1140062,81		1174264,70		1209492,64		1245777,42		1283150,74		1283150,74		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Perkebunan (Sawit)	Ton	16.518	18175,20	2.934.927.246	19650,96	2.980.000.000	20633.51	2.850.000.000	21665,18	2.900.000.000	22748,44	3.000.000.000	22748,44	14.664.927.246	3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Sektor Perkebunan (Kelapa)	Ton	3.158	1345,71		1372,62		1400,07		1428,07		1456,63		1456,63		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Sektor Perkebunan (Karet)	Ton	14.754,00	15.196,62		15.652,52		16.122,09		16.605,76		17.103,39		17103,39		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Sektor Perkebunan (Nilam)	Ton	9,75	9,85		9,95		10,05		10,15		10,25		10,25		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Sektor Perkebunan (Kopi)	Ton	N/A	92		95		98		125		145		145		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka Kematian Ternak Ruminansia	Ekor	86	85	350.000.000	84	370.000.000	82	354.303.131	81	360.000.000	79	370.000.000	79	1.804.303.131	3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Angka Kematian Ternak Unggas	Ekor	23.741	23266		22345		21898		21460		21031		21031		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Persentase Kasus Penyakit Ternak yang Ditangani	Persen	100,00	90		90		95		95		100		100		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		Jumlah Populasi Ternak yang di Vaksinasi	Ekor	32.025	32986		33975		34995		36045		37126		37126		3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Plasma Perkebunan yang Terimplementasi	Persen	N/A	1,2	55.000.000	1,3	60.000.000	2,1	50.000.000	3,34	60.000.000	4,68	70.000.000	4,68	295.000.000	3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani Perkebunan dan Peternakan yang Aktif Dibina	Persen	N/A	65	75.000.000	70	80.000.000	75	71.000.000	80	75.000.000	85	80.000.000	85	381.000.000	3.27.0.00.0.00.25.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Induk Komoditi Pertanian	Pasar Induk	N/A	0	300.000.000	0	304.079.815	0	290.000.000	1	310.000.000	1	330.000.000	1	1.534.079.815	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah Gudang Komoditi Pertanian	Gudang	N/A	0		0		0		1		1		1		3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Kebutuhan Harga Barang Pokok	Persen	3,29	2,50-4,50	590.000.000	2,50-4,50	640.000.000	2,50-4,50	638.000.000	2,50-4,50	662.978.699	2,50-4,50	739.392.052	2,50-4,50	3.270.370.751	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar Rupiah	958,8	1268,472	30.000.000	1423,308	30.000.000	1578,144	30.000.000	1732,98	30.000.000	1887,816	30.000.000	1887,816		3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Akurasi Kemetrologian	Persen	100	100	100.000.000	100	101.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	96.000.000	100	482.000.000	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah UMKM Komoditi Pertanian yang Memiliki Akses E-Commerce	Jumlah UMKM	0	2	190.000.000	2	191.000.000	2	175.000.000	2	180.000.000	2	181.000.000	2	917.000.000	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rata-rata Peningkatan Pendapatan IKM Hilir	Persen	5	6-6,5	230.000.000	6,5-7	231.000.000	7-7,5	212.367.101	7,5-8	213.000.000	7,5-8	215.000.000	7,5-8	1.101.367.101	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang Dibantu Tepat Sasaran	Persen	100	100	30.000.000	100	30.500.000	100	30.500.000	100	30.800.000	100	32.000.000	100	153.800.000	3.30.3.31.2.17.26.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Jumlah Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang Terimplementasi	Persen	N/A	55	50.000.000	60	50.000.000	65	50.000.000	70	50.000.000	75	50.000.000	75	250.000.000	3.32.2.07.0.00.27.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Aktif	Persen	N/A	30	75.000.000	35	75.000.000	40	75.000.000	45	114.744.230	50	125.000.000	50	464.744.230	3.32.2.07.0.00.27.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman Mandiri pada Kawasan Transmigrasi	Satuan Permukiman	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	73.001.600	1	55.000.000	1	70.000.000	1	348.001.600	3.32.2.07.0.00.27.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	23.360.164.792	1	23.360.164.792	1	23.360.164.792	1	23.360.164.792	1	23.360.164.792	1	116.800.823.960	4.01.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DAERAH
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		4.01.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	2,66	2,8	2.350.000.000	2,9	2.350.000.000	3,1	2.350.000.000	3,3	2.350.000.000	3,5	2.350.000.000	3,5	11.750.000.000	4.01.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Kasus Hukum yang didampingi (Litigasi)	Persen	50,00	60		70		72		74		76		76		4.01.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Kasus Hukum yang didampingi (Non Litigasi)	Persen	50,00	60		70		72		74		76		76		4.01.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembanguna	Persen	60,00	75	2.375.440.463	80	2.781.277.458	85	2.211.448.613	87	2.647.025.783	90	3.100.740.832	90	13.115.933.149	4.01.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		n Kabupaten Aceh Barat															
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	23.451.217.155	1	23.451.217.155	1	23.451.217.155	1	23.451.217.155	1	23.451.217.155	1	117.256.085.775	4.02.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DPRK
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		4.02.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DPRK
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun Berjalan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1.017.484.498	Tepat Waktu	1.380.821.015	Tepat Waktu	870.666.372	Tepat Waktu	1.260.628.581	Tepat Waktu	1.666.829.217	Tepat Waktu	6.196.429.683	4.02.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DPRK
		Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Berjalan	Persen	80,00	90		90		90		90		90		90		4.02.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DPRK
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	6.549.058.716	1	6.549.628.107	1	6.519.628.107	1	6.520.970.783	1	6.523.306.316	1	32.662.592.030	5.01.5.05.2.20.30.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		5.01.5.05.2.20.30.0000 BADAN PERENCANAAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	80	707.301.501	85	750.500.000	90	698.000.000	93	750.000.000	93	860.000.000	93	3.765.801.501	5.01.5.05.2.20.30.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	50		55		60		65		65		65		5.01.5.05.2.20.30.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDiNASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	635.000.000	100	685.000.000	100	626.000.000	100	650.000.000	100	660.000.000	100	3.256.000.000	5.01.5.05.2.20.30.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		5.01.5.05.2.20.30.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100		100		100		100		100		100		5.01.5.05.2.20.30.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	35.005.739.087	1	35.005.739.087	1	35.005.439.087	1	35.010.439.087	1	35.015.439.087	1	175.042.795.435	5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	32,66	30,97	306.712.221.755	30,00	311.214.214.109	30,00	304.714.515.045	30,00	309.745.026.330	30,00	314.897.713.776	30	1.547.283.691.016	5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	39,98	39,97		40,72		41,47		42,22		42,97		42,97		5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Persentase Alokasi Belanja Pemenuhan Standar	Persen	6,44	7,82		9,20		10,58		11,95		13,33		13,33		5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pelayanan Minimal															
		Tingkat Kesesuaian Program RKPD dengan KUA-PPAS dan KUA-PPAS dengan APBD	Persen	100,00	100		100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Daerah	Persen	94,75	95		95		95		95		95		95		5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Persentase Penurunan SILPA	Persen	34,44	-4,5		-4,71		-4,94		-5,2		-5,49		-5,49		5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100,00	100		100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	3,17	3	889.327.321	3	980.000.000	3	850.000.000	3	900.000.000	3	1.000.000.000	3	4.619.327.321	5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan	Kali	4	4	1.421.449.770	4	1.800.000.000	4	1.450.000.000	4	1.700.000.000	4	2.000.000.000	4	8.371.449.770	5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengelolaan Pendapatan															
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	100	100		100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	7.644.583.094	1	7.644.583.094	1	7.644.583.094	1	7.644.583.094	1	7.644.583.094	1	38.222.915.470	5.03.5.04.0.00.32.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		5.03.5.04.0.00.32.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	Persen	N/A	94	1.353.899.541	96	1.398.377.615	98	1.295.518.400	100	1.350.583.984	100	1.412.106.657	100	6.810.486.197	5.03.5.04.0.00.32.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase ASN yang Ditingkatan Kompetensinya	Persen	N/A	85		90		95		100				0		5.03.5.04.0.00.32.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	N SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	Persen	N/A	85		90		95		100				0		5.03.5.04.0.00.32.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	N/A	85		90		95		100				0		5.03.5.04.0.00.32.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	N/A	25	1.000.000.000	25	1.100.000.000	25	1.000.000.000	25	1.100.000.000	25	1.200.000.000	25	5.400.000.000	5.03.5.04.0.00.32.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persen	N/A	20		20		20		20				0		5.03.5.04.0.00.32.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	N/A	25		25		25		25				0		5.03.5.04.0.00.32.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	N/A	25		25		25		25				0		5.03.5.04.0.00.32.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	100	100	200.396.999	100	225.000.000	100	200.297.438	100	250.000.000	100	260.000.000	100	1.135.694.437	5.01.5.05.2.20.30.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	N/A	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	5.01.5.05.2.20.30.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	10.972.260.354	1	10.972.260.354	1	10.972.260.354	1	10.972.260.354	1	10.972.260.354	1	54.861.301.770	6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTOrat
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTOrat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Persen	N/A	40	2.478.297.713	50	2.730.458.277	60	2.376.403.904	70	2.647.043.067	80	2.928.951.922	80	13.161.154.883	6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTOrat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyelesaian Temuan di Perangkat Daerah	Persen	N/A	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	20.000.000.000	6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTOrat
		Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	2,86	2,82		2,80		2,78		2,76		2,74		2,74		6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTOrat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	3.102.550.670	1	3.102.550.670	1	3.102.550.670	1	3.102.550.670	1	3.102.550.670	1	15.512.753.350	KECAMATAN KAWAY XVI
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN KAWAY XVI

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	95	25.000.000	100	46.030.038	100	146.030.038	KECAMATAN KAWAY XVI
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal yang Difasilitasi	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN KAWAY XVI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	85.068.000	85	85.068.000	90	85.068.000	95	85.068.000	100	85.068.000	100	425.340.000	KECAMATAN KAWAY XVI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN KAWAY XVI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN KAWAY XVI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	9.523.054	100	9.523.054	100	9.523.054	100	9.523.054	100	19.523.054	100	57.615.271	KECAMATAN KAWAY XVI

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.065.600.004	1	2.065.600.004	1	2.065.600.004	1	2.065.600.004	1	2.065.600.004	1	10.328.000.020	KECAMATAN WOYLA
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN WOYLA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN WOYLA
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal yang Difasilitasi	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN WOYLA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	84.703.680	85	84.703.680	90	84.703.680	95	84.703.680	100	106.074.344	100	444.889.064	KECAMATAN WOYLA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN WOYLA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN WOYLA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	15.873.054	100	15.873.054	100	15.873.054	100	15.873.054	100	15.873.054	100	79.365.271	KECAMATAN WOYLA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	1.841.086.917	1	1.841.086.917	1	1.841.086.917	1	1.841.086.917	1	1.841.086.917	1	9.205.434.585	KECAMATAN WOYLA TIMUR
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN WOYLA TIMUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN WOYLA TIMUR
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal yang Difasilitasi	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN WOYLA TIMUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	85.222.080	85	85.222.080	90	85.222.080	95	67.014.168	100	107.552.120	100	430.232.528	KECAMATAN WOYLA TIMUR

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN WOYLA TIMUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN WOYLA TIMUR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	8.873.054	100	20.202.714	100	20.202.714	100	20.202.714	100	20.202.714	100	89.683.911	KECAMATAN WOYLA TIMUR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.019.105.212	1	2.019.105.212	1	2.019.105.212	1	2.019.105.212	1	2.019.105.212	1	10.095.526.060	KECAMATAN WOYLA BArat
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN WOYLA BArat
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN WOYLA BArat
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN WOYLA BArat

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		yang Difasilitasi															
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	56.814.720	85	77.394.372	90	77.394.372	95	77.394.372	100	91.497.101	100	380.494.937	KECAMATAN WOYLA BArat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN WOYLA BArat
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN WOYLA BArat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	8.110.000	100	18.110.000	100	18.110.000	100	18.110.000	100	18.110.000	100	80.550.000	KECAMATAN WOYLA BArat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	1.910.409.794	1	1.910.409.794	1	1.910.409.794	1	1.910.409.794	1	1.910.409.794	1	9.552.048.970	KECAMATAN PANTE CEUREUMEN
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN PANTE CEUREUMEN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN PANTE CEUREUMEN
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal yang Difasilitasi	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN PANTE CEUREUMEN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	113.629.440	85	114.612.050	90	113.629.440	95	113.629.440	100	113.629.440	100	569.129.810	KECAMATAN PANTE CEUREUMEN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN PANTE CEUREUMEN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN PANTE CEUREUMEN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	9.263.054	100	10.333.520	100	10.333.520	100	10.333.520	100	33.648.712	100	73.912.327	KECAMATAN PANTE CEUREUMEN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	1.692.431.524	1	1.692.431.524	1	1.692.431.524	1	1.692.431.524	1	1.692.431.524	1	8.462.157.620	KECAMATAN PANTON REU
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN PANTON REU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN PANTON REU
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal yang Difasilitasi	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN PANTON REU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	85.222.080	85	95.222.080	90	95.222.080	95	95.222.080	100	105.903.570	100	476.791.890	KECAMATAN PANTON REU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN PANTON REU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN PANTON REU

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	17.800.000	100	21.831.661	100	21.831.661	100	21.831.661	100	21.831.661	100	105.126.644	KECAMATAN PANTON REU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.842.733.135	1	2.842.733.137	1	2.842.733.137	1	2.842.733.137	1	2.842.733.137	1	14.213.665.683	KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal yang Difasilitasi	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	113.605.525	85	113.605.525	90	113.605.525	95	113.605.525	100	113.605.525	100	568.027.625	KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	8.823.054	100	8.823.054	100	8.823.054	100	8.823.054	100	8.823.054	100	44.115.270	KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.290.602.469	1	2.290.602.469	1	2.290.602.469	1	2.290.602.469	1	2.290.602.469	1	11.453.012.345	KECAMATAN MEUREUBO
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN MEUREUBO
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN MEUREUBO
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN MEUREUBO

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		yang Difasilitasi															
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	56.814.720	85	56.814.720	90	56.814.720	95	56.814.720	100	56.814.720	100	284.073.600	KECAMATAN MEUREUBO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN MEUREUBO
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN MEUREUBO
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	5.303.054	100	5.303.054	100	5.303.054	100	5.303.054	100	5.303.054	100	26.515.270	KECAMATAN MEUREUBO
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	1.812.699.645	1	1.812.699.644	1	1.812.699.644	1	1.812.699.644	1	1.812.699.644	1	9.063.498.221	KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal yang Difasilitasi	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	56.814.720	85	76.814.720	90	76.814.720	95	56.814.720	100	92.032.019	100	359.290.899	KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	14.019.162	100	14.019.162	100	14.019.162	100	14.019.162	100	14.019.162	100	70.095.810	KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	1.902.149.807	1	1.902.149.807	1	1.902.149.807	1	1.902.149.807	1	1.902.149.807	1	9.510.749.035	KECAMATAN SUNGAI MAS
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN SUNGAI MAS
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN SUNGAI MAS
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal yang Difasilitasi	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN SUNGAI MAS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	56.814.720	85	70.993.839	90	66.814.720	95	66.814.720	100	76.814.720	100	338.252.719	KECAMATAN SUNGAI MAS
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN SUNGAI MAS
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN SUNGAI MAS

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	11.773.054	100	11.773.054	100	11.773.054	100	11.773.054	100	28.712.832	100	75.805.048	KECAMATAN SUNGAI MAS
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.152.616.602	1	2.152.616.602	1	2.152.616.602	1	2.152.616.602	1	2.152.616.602	1	10.763.083.010	KECAMATAN SAMATIGA
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN SAMATIGA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN SAMATIGA
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal yang Difasilitasi	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN SAMATIGA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	170.444.160	85	170.444.160	90	170.444.160	95	170.444.160	100	170.444.160	100	852.220.800	KECAMATAN SAMATIGA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN SAMATIGA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN SAMATIGA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	9.023.054	100	9.023.054	100	9.023.054	100	9.023.054	100	29.131.340	100	65.223.556	KECAMATAN SAMATIGA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.243.180.366	1	2.243.180.366	1	2.243.180.366	1	2.243.180.366	1	2.243.180.366	1	11.215.901.830	KECAMATAN BUBON
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		KECAMATAN BUBON
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelayanan SPM di Kecamatan	Persen	60	70	25.000.000	80	25.000.000	90	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	KECAMATAN BUBON
		Persentase Kegiatan Daerah/Instansi Vertikal	Persen	N/A	70		80		90		95		100		100		KECAMATAN BUBON

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		yang Difasilitasi															
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Program PKK	Persen	N/A	80	85.222.080	85	85.222.080	90	85.222.080	95	85.222.080	100	85.222.080	100	426.110.400	KECAMATAN BUBON
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN BUBON
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasus Sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Kasus	N/A	4	10.000.000	3	10.000.000	2	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN BUBON
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Gampong yang Melaksanakan Musyawarah Gampong Tepat Waktu	Persen	100	100	9.163.054	100	9.163.054	100	9.163.054	100	9.163.054	100	9.163.054	100	45.815.270	KECAMATAN BUBON
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	3.025.777.925	1	3.025.777.925	1	3.025.777.925	1	3.025.777.925	1	3.025.777.925	1	15.128.889.625	8.01.0.00.0.00.46.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		8.01.0.00.0.00.46.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	60	70	952.132.600	75	990.132.600	80	962.132.600	85	970.132.600	90	1.020.132.600	90	4.894.663.000	8.01.0.00.0.00.46.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENdidiKAN MELALUI PENdidiKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	50	60	980.321.500	65	1.000.321.500	70	955.321.500	75	989.321.500	80	1.040.321.500	80	4.965.607.500	8.01.0.00.0.00.46.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	60	70	92.430.210	75	96.430.210	80	91.430.200	85	96.430.210	90	99.430.210	90	476.151.040	8.01.0.00.0.00.46.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	50	60	39.931.049	62	41.018.055	65	34.917.840	67	41.018.055	70	56.018.055	70	212.903.054	8.01.0.00.0.00.46.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100	1.933.421.000	100	1.971.831.000	100	1.913.421.000	100	1.969.255.591	100	1.963.726.565	100	9.751.655.156	8.01.0.00.0.00.46.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	2.066.061.452	1	2.066.061.452	1	2.066.061.452	1	2.066.061.452	1	2.066.061.452	1	10.330.307.260	9.01.0.00.0.00.13.0000 SEKRETARIAT MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Maturitas SPIP	Indeks		2		2		2		2		2		2		9.01.0.00.0.00.13.0000 SEKRETARIAT MAJELIS PEMUSYAWArat AN ULAMA
9.01.03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Peran Ulama Dalam Bidang Kesehatan	Persen	N/A	16,666667	653.253.869	26,666667	692.547.975	33,333333	637.375.787	40	679.549.408	50	723.479.181	50	3.386.206.220	9.01.0.00.0.00.13.0000 SEKRETARIAT MAJELIS PEMUSYAWArat AN ULAMA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	1.885.818.691	1	1.885.818.691	1	1.885.818.691	1	1.885.818.691	1	1.885.818.691	1	9.429.093.455	9.01.0.00.0.00.14.0000 SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		9.01.0.00.0.00.14.0000 SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN
9.01.04	PROGRAM BAITUL MAL	Persentase Peningkatan Ziswaf	Persen	2,35	2,55	11.915.514.778	2,65	12.114.944.047	2,75	11.834.928.792	2,85	12.048.972.453	2,95	12.271.929.111	2,95	60.186.289.181	9.01.0.00.0.00.14.0000 SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	3.468.823.505	1	3.468.823.505	1	3.468.823.505	1	3.468.823.505	1	3.468.823.505	1	17.344.117.525	9.01.0.00.0.00.47.0000 DINAS SYARIAT ISLAM
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		9.01.0.00.0.00.47.0000 DINAS SYARIAT ISLAM

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.01.02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Persentase Masjid yang Melaksanakan Shalat Berjamaah Lima Waktu Secara Rutin	Persen	65,00	70	4.489.076.429	72	4.604.068.082	80	4.442.610.250	83	4.566.028.616	85	4.694.586.250	85	22.796.369.627	9.01.0.00.0.00.47.0000 DINAS SYARIAT ISLAM
		Persentase BKM Masjid yang Aktif	Persen	70,00	75		77		80		82		85		85		9.01.0.00.0.00.47.0000 DINAS SYARIAT ISLAM
		Persentase Gampong yang Menyelenggarakan Pengajian	Persen	60,00	75		80		82		87		90		90		9.01.0.00.0.00.47.0000 DINAS SYARIAT ISLAM
		Cakupan Tenaga Keagamaan	Persen	70,00	75		78		80		83		85		85		9.01.0.00.0.00.47.0000 DINAS SYARIAT ISLAM
		Jumlah Qori yang Dibina	Orang	60,00	-		65		-		65		-		65		9.01.0.00.0.00.47.0000 DINAS SYARIAT ISLAM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	112.200.000.000	1	123.420.000.000	1	135.762.000.000	1	149.338.200.000	1	164.272.020.000	1	684.992.220.000	BLUD RSU
		Maturitas SPIP	Indeks	N/A	2		2		2		2		2		2		BLUD RSU
		Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		BLUD RSU
		Kelas Rumah Sakit	B	B Pendidikan	B Pendidikan		B Pendidikan		B Pendidikan		B Pendidikan		B Pendidikan		B Pendidikan		BLUD RSU

Kode	Urusan. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program RPJMD 2025-2029	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Kondisi Kinerja Akhir RPJM (2030)		PD Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Persen	76,53	78,00	650.000.000	80,00	650.000.000	82,00	404.518.037	84,00	861.137.986	86,00	650.000.000	86,00	3.215.656.023	BLUD RSU
		Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Sesuai Standar	Persen	78,50	80,50		82,50		84,50		86,50		88,50		88,50		BLUD RSU
		Rasio SDM Kesehatan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Persen	N/A	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		88,00		BLUD RSU
						1.402.054.104.870		1.431.769.706.448		1.418.191.567.465		1.451.785.902.390		1.487.576.420.883		7.169.885.496.863	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator penyelenggaraan pemerintah daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,80-5,70	5,10-6,00	5,30-6,20	5,50-6,40	5,70-6,60	5,90-6,80	Indikator Tujuan
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,50-16,50	15,00-16,00	14,50-15,50	14,00-15,00	13,50-14,50	13,00-14,00	Indikator Tujuan
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,40	5,30	5,20	5,10	5,00	4,90	Indikator Sasaran
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,61	76,31	76,73	77,15	77,57	78,00	Indikator Tujuan
5	Rapor Mutu Pendidikan	Persen	64,23	66,09	67,96	70,21	72,55	74,52	Indikator Tujuan
6	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	20,00	18,50	16,50	15,20	14,50	13,20	Indikator Sasaran
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,00	77,20	77,40	77,60	77,80	77,82	Indikator Tujuan
8	Indeks Pembangunan Syariah (IPS)	Indeks	85,94	86,35	86,76	87,17	87,58	88,00	Indikator Tujuan
9	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	Indikator Tujuan
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,00-80,00 (BB)	70,00-80,00 (BB)	70,00-80,00 (BB)	70,00-80,00 (BB)	80,00-90,00 (A-)	80,00-90,00 (A-)	Indikator Tujuan

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**												
1	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**76,72**	**77,00**	**77,20**	**77,40**	**77,60**	**77,80**	**77,82**	**Dinas Lingkungan Hidup**	5.2		√
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,45	0,46	0,47	0,51	0,56	0,59	0,60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		5.2.1	
3	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan	9	9	9	9	8	8	8	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman		4.1.1	
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,27	78,50	78,80	79,10	79,40	79,70	79,80	Dinas Pangan		5.1.4	√
5	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	62,69	62,79	62,89	62,99	63,09	63,19	63,29	Dinas Lingkungan Hidup		5.2.1	
6	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	173,76	134,60	133,10	131,60	130,10	128,60	128,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		5.2.1	√
7	Jumlah Desa yang Melakukan Pengolahan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, Recycle, Refused, dan Rot (5R)	Desa	N/A	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup		5.2.1	
8	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,592	0,590	0,600	0,610	0,620	0,630	0,640	Dinas Lingkungan Hidup	5.2		√
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	13,01	14,31	15,61	16,91	17,21	18,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		4.1.1	√
10	Persentase Sampah yang Tertangani	Persen	N/A	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	Dinas Lingkungan Hidup		5.2.1	√
11	Proposi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	N/A	29,07	30,10	30,35	35,00	40,00	50,00	Dinas Lingkungan Hidup		5.2.1	√
12	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh	N/A	1922	1925	1927	1929	1930	1931	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman		4.1.3	√
13	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	N/A	5,81	5,75	5,50	5,25	5,10	4,45	Dinas Pangan		5.1.4	√

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	0,91	1,65	1,77	1,94	2,20	2,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		4.1.3	√
15	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	68,48	69,49	70,50	71,51	72,52	73,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		4.1.3	√
16	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	N/A	29,56	33,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Dinas Lingkungan Hidup	5.2		√
17	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persen	N/A	18,54	19,02	20,50	22,00	24,00	25,00	Dinas Lingkungan Hidup	5.2		√
18	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	N/A	19,55	20,30	22,00	24,00	26,00	28,00	Dinas Lingkungan Hidup	5.2		√
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**												
1	**Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**7,50**	**4,80-5,70**	**5,10-6,00**	**5,30-6,20**	**5,50-6,40**	**5,70-6,60**	**5,90-6,80**		**1.2**		√
2	**Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**17,60**	**15,50-16,50**	**15,00-16,00**	**14,50-15,50**	**14,00-15,00**	**13,50-14,50**	**13,00-14,00**		1.1		√
3	**PDRB/Kapita**	**Juta Rupiah**	**67,94 (ADHB)**	**70 (ADHB)**	**73 (ADHB)**	**76 (ADHB)**	**79 (ADHB)**	**81,34 (ADHB)**	**81,50 (ADHB)**		**1.2**		√
			41,89 (ADHK)	**43 (ADHK)**	**44 (ADHK)**	**45 (ADHK)**	**46 (ADHK)**	**47 (ADHK)**	**48 (ADHK)**				
4	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Persen**	**5,58**	**5,40**	**5,30**	**5,20**	**5,10**	**5,00**	**4,90**			1.2.1	√
5	**Indeks Gini**	**Indeks**	**0,237**	**0,270**	**0,260**	**0,250**	**0,250**	**0,240**	**0,220**		**1.2**		√
6	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**75,45**	**75,61**	**76,31**	**76,73**	**77,15**	**77,57**	**78,00**		1.1		√
7	**Indeks Pembangunan Syariah (IPS)**	**Indeks**	**83,47**	**85,94**	**86,35**	**86,76**	**87,17**	**87,58**	**88,00**	**Dinas Syariat Islam**	3.1		√
8	**Prevalensi Stunting pada Balita**	**Persen**	**25,60**	**20,00**	**18,50**	**16,50**	**15,20**	**14,50**	**13,20**	**Dinas Kesehatan**		1.1.1	√
9	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,03	72,41	72,79	73,07	73,45	73,54	73,54	Dinas Kesehatan		1.1.1	√
10	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	112	105	100	95	90	85	80	Dinas Kesehatan		1.1.1	√
11	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Kasus	N/A	563	483	417	369	333	305	Dinas Kesehatan		1.1.1	√

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan		1.1.1	√
13	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	14	12	10	8	6	4	3	Dinas Kesehatan		1.1.1	
14	**Rapor Mutu Pendidikan**	**Persen**	**62,80**	**64,23**	**66,09**	**67,96**	**70,21**	**72,55**	**74,52**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		1.1.2	
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,93	14,95	14,97	14,99	15,02	15,03	15,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.1.2	√
16	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,99	10,22	10,23	10,24	10,25	10,26	10,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.1.2	√
17	Jumlah Lulusan SMP yang Memiliki Kemampuan Bahasa Inggris dengan Score TOEFL Minimal 350	Persen	N/A	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	67,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.1.2	
18	Skor literasi SD/ Skor Kemampuan Literasi SD	Persen	44,00	46,50	49,00	51,50	54,00	56,5	59,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.1.2	√
19	Skor Numerasi SD /Skor Kemampuan Numerasi SD	Persen	41,47	44,37	47,27	50,17	53,07	55,97	58,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.1.2	√
20	Skor literasi SMP/ Skor Kemampuan Literasi SMP	Persen	59,4	60,50	61,60	62,70	63,80	64,90	66,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.1.2	√
21	Skor Numerasi SMP/ Skor Kemampuan Numerasi SMP	Persen	55,72	57,22	58,72	60,22	61,72	63,22	64,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.1.2	√
22	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	55,37	58,57	61,57	64,57	67,57	70,57	73,57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1.1.2	√
23	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) Diploma/Sarjana/Magister/Doktor	Persen	N/A	51,38	51,40	51,42	51,45	51,50	51,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.1.2	√
24	Persentase Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja	Persen	N/A	54,08	56,00	58,00	60,00	63,00	68,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.1.2	√

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	42,90	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.1		√
26	Persentase Belanja Pemerintah untuk Perlindungan Sosial	Persen	N/A	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.1.3	
27	Persentase Belanja CSR untuk Perlindungan Sosial	Persen	0,35	0,51	0,60	0,70	0,80	0,90	0,93	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1.1.3	
28	Jumlah Gampong yang Sesuai dengan Syariat Islam	Jumlah Gampong	48	53	58	63	68	73	75	Dinas Syariat Islam	3.2		
29	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	N/A	72,30	75,92	79,71	83,70	87,88	92,28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.1		√
30	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	52,91	55,30	60,30	65,30	70,30	75,30	75,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.1		√
31	Persentase Gampong Ramah Anak	Persen	1,55	2,18	3,12	4,67	6,23	7,79	8,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		1.1.5	
32	Jumlah Anak Terlantar dan Rentan Terlantar yang Terpenuhi Layanan Dasar	Orang	144	110	110	100	100	90	90	Dinas Sosial		1.1.5	
33	Persentase Sekolah Ramah Anak Jenjang SD/SMP	Persen	12,38	12,38	16,97	21,55	26,14	30,73	35,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		1.1.5	
34	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	66,10	67,10	68,10	69,10	70,00	70,90	71,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		1.1.5	
35	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,95	68,00	69,10	70,00	71,00	71,90	72,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		1.1.5	√

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,231	0,231	0,231	0,230	0,229	0,228	0,227	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		1.1.4	√
37	Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang Berhasil	Kelompok	50	55	60	63	65	67	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		1.1.4	
38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	47,23	48,28	49,33	50,38	51,43	52,48	53,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		1.1.4	√
39	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Pemerintahan dan BUMN	Persen	N/A	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.2.1	√
40	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Perusahaan Swasta	Persen	N/A	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.2.1	√
41	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	56,33	56,35	56,37	56,39	56,41	56,43	56,50	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.1		
42	Jumlah Pemuda yang Dibina	OKP	N/A	15	17	19	21	23	23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		7.1.1	
43	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Bidang Olahraga di Tingkat Nasional	Orang	9	11	14	18	23	28	30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		7.2.1	
44	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Bidang Non Olahraga di Tingkat Nasional	Orang	15	17	20	24	29	35	40	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		7.2.1	
45	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,327	0,330	0,340	0,340	0,350	0,350	0,360	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.2		
46	Pertumbuhan UMKM/IKM	Persen	2,17	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,35	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		1.2.1	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	Proporsi Anggaran CSR yang Mendukung Pembangunan Daerah	Persen	N/A	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		2.3.1	
48	Persentase Keselarasan Prioritas Pembangunan di Gampong dan di Kabupaten	Persen	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong		2.4.1	
49	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	10,85	13,57	14,76	15,57	16,96	17,90	17,92	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		2.5.1	
50	Jumlah Variasi Komoditi Pertanian	Komoditi	19	20	21	22	23	24	25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		5.1.2	
51	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	119,25	120	121	122	123	124	125	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		5.1.3	√
52	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	104,75	105,00	105,50	106,00	106,50	107,12	107,15	Dinas Kelautan dan Perikanan		5.1.3	√
53	Jumlah Produk Industri Hilir Komoditi Pertanian/ Perikanan/ Perkebunan/ Peternakan yang Dikembangkan	Produk	N/A	2	2	2	2	2	2	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		5.1.3	
54	Jumlah Panjang Ruas Jalan yang Memiliki Lampu Penerangan	KM	N/A	3	3	3	3	3	3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		4.1.3	
55	Jumlah Panjang Ruas Jalan yang Memiliki Pedestrian	KM	0,90	0,56	0,56	0,58	0,70	0,70	0,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		4.1.3	
56	Rasio Daerah Irigasi yang Terlayani oleh Jaringan Irigasi	Rasio	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.2		
57	Jumlah Lahan Baku Sawah	Ha	9821,81	9821,81	9901,81	9981,81	10061,81	10141,81	10221,81	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		5.1.1	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**												

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Inflasi**	**Persen**	**3,29**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	**2,50-3,50**	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		1.2.3	√
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,04	3,14	3,24	3,34	3,44	3,54	3,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.2		
3	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	63,58	64,76	65,94	67,12	68,30	69,48	69,48	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.1		√
4	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	54,00	76,10	98,20	120,30	142,40	164,50	164,50	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.1		√
5	Nilai PMA/ PMDN	Milyar Rupiah	N/A	475	560	570	580	600	620	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.5		√
6	Rasio PDRB Transportasi dan Pergudangan	Persen	N/A	3,85	3,80	3,75	3,70	3,65	3,60	Dinas Perhubungan		1.2.2	√
7	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	N/A	1,69	1,72	1,74	1,83	1,84	1,94	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		1.2.2	√
8	PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (ADHK)	Milyar Rupiah	2087,36	2200	2300	2400	2500	2600	2700	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.1		√
9	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	1,81	2,10	2,40	2,70	3,00	3,20	3,20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		1.2.2	√
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	N/A	31,00	30,95	30,90	30,85	30,80	30,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1.2.2	√
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		2.5.1	√
12	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	N/A	18,90	20,00	23,40	25,00	27,00	28,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		1.2.3	√

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Total Kredit/PDRB	Persen	N/A	28,87	29,40	29,60	30,01	32,30	35,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		1.2.3	√
14	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	N/A	3,15	3,19	3,22	3,26	3,29	3,31	Bagian Ekonomi Setdakab	2.5		√
15	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	11,60	14,38	14,39	14,40	14,42	14,50	14,60	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		1.2.2	√
16	Jumlah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	KPBU	N/A	1	1	1	1	1	1	Bagian Pemerintahan Setdakab		4.1.2	
17	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada Level Kabupaten	Persen	N/A	89,05	89,10	89,14	89,19	89,24	89,29	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		1.2.1	√
18	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kabupaten	Persen	N/A	1,67	1,70	1,78	1,80	1,82	1,85	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		1.2.1	√
19	Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio	N/A	3,33	3,40	3,50	3,60	3,80	3,90	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		7.1.2	√
20	Persentase Wirausaha Muda	Persen	N/A	50	55	60	65	70	71	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		7.1.2	
21	Presentase Dana untuk Inovasi dari APBK	Persen	N/A	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		2.2.3	√
22	Persentase Desa Mandiri	Persen	6,52	7,76	9,01	9,94	11,18	12,42	12,45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong	2.4		√
23	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong	2.4		√

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Indeks Desa	Indeks	N/A	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong			
25	Persentase Cakupan Pelayanan Dasar	Persen	66,23	66,34	66,43	66,52	66,61	66,70	66,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.1		
26	Luasan Daerah Irigasi yang Terlayani oleh Jaringan irigasi	Ha	1891	1941	1993	2103	2126	2226	2259	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		4.2.1	
27	Persentase Wilayah yang Memiliki Jaringan Internet Minimal 4G	Persen	N/A	74,00	74,00	75,00	75,00	76,00	76,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		4.1.3	√
28	Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	N/A	83,79	83,80	83,90	84,10	84,20	84,30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.1		√
29	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	10	20	30	35	40	45	46	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		1.2.2	√
30	Jumlah Event yang Diikuti Pelaku Seni dan Budaya	Jumlah Event	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		6.1.1	
31	Jumlah Sanggar Seni yang Representatif dan Aktif	Sanggar	25	26	27	28	29	30	31	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		6.1.1	
32	Jumlah Lembaga yang Bekerjasama dalam Pengembangan Kebudayaan	Lembaga	N/A	4	5	6	7	8	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		6.1.2	
33	Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar	Cagar Budaya	5	7	9	11	13	15	15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		6.1.3	
34	Jumlah Tamu Wisatawan	Ribu Orang	N/A	179	180	181	182	183	184	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		6.1.3	√
35	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,936	0,936	0,976	0,996	1,016	1,036	1,050	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.5		
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**												
1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	69,23	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	Inspektorat	2.1		√

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	N/A	56,50	57,00	57,50	58,00	59,00	60,00	Bagian Hukum Setdakab	2.1		√
3	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**70,09 (BB)**	**70,00-80,00 (BB)**	**70,00-80,00 (BB)**	**70,00-80,00 (BB)**	**70,00-80,00 (BB)**	**80,00-90,00 (A-)**	**80,00-90,00 (A-)**	**Bagian Organisasi Setdakab**	2.1		
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	3,51-4,00 (B)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,01-4,50 (A-)	4,51-5,00 (A)	Bagian Organisasi Setdakab	2.2		√
5	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	N/A	55,30	60,30	65,30	70,30	75,30	75,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.2		√
6	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	60,00	62,00	65,00	68,00	70,00	75,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	3.2		√
7	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Indeks**	**85,00**	**84,50**	**85,00**	**85,50**	**86,00**	**86,50**	**87,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**	2.1		
8	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71,93	72,13	72,33	72,55	72,75	72,95	73,10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2.2.1	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	N/A	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	88,31-100 (A)	Bagian Organisasi Setdakab		2.2.2	
10	Indeks SPBE	Indeks	2,68	2,68	2,70	2,72	2,75	2,78	2,80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		2.2.2	√
11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,19	60,20	60,40	60,60	60,80	70,00	71,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		2.2.3	√
12	Indeks Pencegahan Korupsi MCP	Indeks	88,52	87,14	88,14	89,14	90,14	91,14	92,14	Inspektorat		2.1.1	
13	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		2.1.1	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Jumlah Perusahaan Pelaksana CSR	Perusahaan	12	13	14	15	16	17	17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.3		
15	Persentase APBG yang Selaras dengan Visi Misi Bupati	Persen	N/A	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong	2.4		
16	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		2.1.2	
17	Persentase Masjid yang Aktif sesuai dengan Fungsi Masjid	Persen	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	90,00	Dinas Syariat Islam		3.1.1	
18	Persentase Majelis Taklim Gampong yang Aktif	Persen	N/A	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00	Dinas Syariat Islam		3.1.2	
19	Persentase Dayah Mandiri	Persen	25,00	31,00	31,25	31,50	31,75	32,00	32,25	Dinas Pendidikan Dayah		3.2.1	√
20	Jumlah Dayah yang Terakreditasi	Dayah	53	70	70	75	75	80	80	Dinas Pendidikan Dayah		3.2.1	
21	Jumlah Dayah yang Aktif dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	Dayah	N/A	5	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan Dayah		3.2.1	
22	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	583	400	320	256	204	163	130	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah		3.2.2	
23	Jumlah Qori Internasional	Orang	N/A	1	1	1	1	1	1	Dinas Syariat Islam		3.2.3	
24	Jumlah Pelanggaran Qanun Ketentraman dan Ketertiban	Kasus	N/A	300	275	250	225	200	175	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah		3.2.2	√
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**												
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Melaksanakan Muatan Lokal	Persen	N/A	N/A	60,00	70,00	75,00	80,00	82,00	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah			
	Persentase Dayah yang Melaksanakan Muatan Lokal	Persen	N/A	N/A	50,00	60,00	75,00	80,00	82,00	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah			
	Jumlah Dayah yang Terakreditasi	Dayah	53	70	70	75	75	80	80	Dinas Pendidikan Dayah			
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,93	14,95	14,97	14,99	15,02	15,03	15,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,99	10,22	10,23	10,24	10,25	10,26	10,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	Indeks Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Indeks	81,92	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,03	72,41	72,79	73,07	73,45	73,54	73,54	Dinas Kesehatan			
	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	N/A	7	6	5	4	3	2	Dinas Kesehatan			
	Jumlah Kematian Balita	Jumlah	N/A	65	63	61	59	57	55	Dinas Kesehatan			
	Indeks Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Indeks	90	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan			
	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Tertangani	Persen	N/A	98,00	98,25	98,50	98,75	99,00	99,25	RSUD Cut Nyak Dhien			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
	Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	48,00	57,93	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	13,01	14,31	15,61	16,91	17,21	18,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indeks Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	Indeks	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Luasan Daerah Irigasi yang Terlayani oleh Jaringan irigasi	Ha	1891	1941	1993	2103	2126	2226	2259	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN												
	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	Persen	46,10	46,10	46,15	46,20	46,25	46,30	46,35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	N/A	83,79	83,80	83,90	84,10	84,20	84,30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Indeks Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan	Indeks	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	60,00	62,00	65,00	68,00	70,00	75,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah			
	Indeks Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks	92,67	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah			
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,45	0,46	0,47	0,51	0,56	0,59	0,60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indeks Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Indeks	79,69	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial			
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	44,13	45,45	46,81	48,21	49,65	51,00	Dinas Sosial			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Mendapatkan Pekerjaan	Persen	8,33	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	Persen	17,37	18,50	19,50	20,50	21,50	22,50	23,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,231	0,231	0,231	0,230	0,229	0,228	0,227	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,32	73,30	74,79	76.28	77.32	78,36	79,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,27	78,50	78,80	79,10	79,40	79,70	79,80	Dinas Pangan			
	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,60	86,70	87,00	87,20	87,50	87,60	87,70	Dinas Pangan			
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Luas Lahan/Tanah Pemerintah Bersertifikat	Persen	22,57	47,00	53,00	59,00	65,00	67,00	73,00	Dinas Pertanahan			
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,72	77,00	77,20	77,40	77,60	77,80	77,82	Dinas Lingkungan Hidup			
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	2,74	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	30,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	Indeks Desa	Indeks	N/A	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong			
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	66,10	67,10	68,10	69,10	70,00	70,90	71,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,95	68,00	69,10	70,00	71,00	71,90	72,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB)	Persen	57,73	59,25	59,35	59,45	59,55	59,65	59,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan			
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	Persentase Wilayah yang Memiliki Jaringan Internet Minimal 4G	Persen	N/A	74,00	74,00	75,00	75,00	76,00	76,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
	Persentase Koperasi yang Melakukan RAT Tepat Waktu	Persen	9,41	9,41	10,41	11,41	12,41	13,41	14,41	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
	Jumlah UMKM yang Memiliki Kerjasama Pemasaran	UMKM	0	2	2	2	2	2	2	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	Jumlah Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	1616	540	560	580	600	620	640	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
	Tingkat Partisipasi Olahraga dan Kebugaran Masyarakat	Persen	N/A	10	15	20	25	30	35	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,62	2,62	2,70	2,70	2,75	2,75	2,80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
	Indeks SPBE	Indeks	2,68	2,68	2,70	2,72	2,75	2,78	2,80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
	Persentase Pembinaaan Adat Istiadat	Persen	N/A	70	72	75	78	80	84	Sekretariat Majelis Adat Aceh			
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	52,91	55,30	60,30	65,30	70,30	75,30	75,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	55,37	58,57	61,57	64,57	67,57	70,57	73,57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Indeks	N/A	49,72	52,72	55,72	58,72	61,72	64,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	104,75	105,00	105,50	106,00	106,50	107,12	107,15	Dinas Kelautan dan Perikanan			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
	Jumlah Tamu Wisatawan	Ribu Orang	N/A	179	180	181	182	183	184	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
	Produktivitas Padi	Ton/Ha	6,30	6,40	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	Indeks Pertanaman (IP)	Indeks	1,30	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat	Indeks	163,05	165,05	167,05	169,05	171,05	173,05	175,05	Dinas Perkebunan dan Peternakan			
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
	Inflasi	Persen	3,29	2,50-3,50	2,50-3,50	2,50-3,50	2,50-3,50	2,50-3,50	2,50- 3,50	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
	Pertumbuhan Industri	Persen	2,09	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
	Jumlah Produk/Komoditi Unggulan dari Kawasan Transmigrasi	Produk/ Komoditi	N/A	1	1	1	1	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
31	SEKRETARIAT DAERAH												
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	**70,09 (BB)**	**70,00-80,00 (BB)**	**70,00-80,00 (BB)**	**70,00-80,00 (BB)**	**70,00-80,00 (BB)**	**80,00-90,00 (A-)**	**80,00-90,00 (A-)**	Bagian Organisasi Setdakab			
32	SEKRETARIAT DPRD												
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRK terhadap Pelayanan Sekretariat DPRK	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRK			
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
33	PERENCANAAN												
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
34	KEUANGAN												
	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	10,85	13,57	14,76	15,57	16,96	17,90	17,92	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			
35	KEPEGAWAIAN												
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71,93	72,13	72,33	72,55	72,75	72,95	73,10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	Indeks Sistem Merit	Indeks	N/A	80,00	80,10	80,20	80,30	80,40	80,50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indeks Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	Indeks	N/A	71,58	71,60	71,62	71,64	71,66	71,68	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,19	60,20	60,40	60,60	60,80	70,00	71,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
38	INSPEKTORAT DAERAH												
	Indeks Pencegahan Korupsi MCP	Indeks	88,52	87,14	88,14	89,14	90,14	91,14	92,14	Inspektorat			
	UNSUR KEWILAYAHAN												
39	KECAMATAN												
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	57,14	61,90	66,66	71,40	76,19	80,95	85,71	Kecamatan Johan Pahlawan			
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	0	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	Kecamatan Kaway XVI			
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	4,7	3,10	6,25	9,37	12,50	15,62	18,75	Kecamatan Samatiga			
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	0	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	Kecamatan Woyla			
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	0	5,50	11,11	16,66	22,22	27,77	38,88	Kecamatan Sungai Mas			
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	33,3	26,90	30,76	34,61	38,46	42,30	46,15	Kecamatan Meureubo			
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	0	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	Kecamatan Pante Ceureumen			
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	0	5,88	11,76	17,64	23,52	29,41	35,29	Kecamatan Bubon			
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	4,7	3,70	7,40	11,11	14,81	18,51	22,22	Kecamatan Arongan Lambalek			
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	0	3,84	7,69	11,53	15,38	19,23	23,07	Kecamatan Woyla Timur			
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	0	4,16	8,33	12,50	16,66	20,83	25,00	Kecamatan Woyla Barat			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun						Perangkat Daerah	Kode Tujuan	Kode Sasaran	IUP RPJPD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Desa Mandiri dalam Kecamatan	Persen	0	5,26	10,52	15,78	21,05	26,31	31,57	Kecamatan Panton Reu			
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	N/A	72,30	75,92	79,71	83,70	87,88	92,28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	UNSUR KEKHUSUSAN												
41	KEKHUSUSAN ACEH												
	Persentase Pedoman Keagamaan yang Disosialisasikan	Persen	N/A	50	100	100	100	100	100	Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama			
	Proporsi ZIS terhadap PAD	Persen	6,18	6,56	7,01	7,56	8,02	8,57	9,04	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten			
	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0	0,38	0,39	0,41	0,42	0,44	0,44	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten			
	Indeks Pembangunan Syariah (IPS)	Persen	83,47	85,94	86,35	86,76	87,17	87,58	88,00	Dinas Syariat Islam			

1. Perangkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Barat agar melaksanakan program-program dalam RPJM ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berpedoman pada RPJM yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat (Renja OPD).
3. RPJM ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran RPJM ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka RPJM ini juga menekankan pentingnya analisis manajemen risiko yang bersifat kontekstual dan sesuai dengan praktik nyata di daerah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan memitigasi berbagai potensi hambatan pelaksanaan program, serta memperkuat sistem pengendalian dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Manajemen risiko perlu dijadikan bagian integral dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar setiap intervensi pembangunan dapat dikawal secara efektif dan efisien.

Disamping itu, kaidah ini juga menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat. Penetapan prioritas pembangunan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara adil dan merata. Kaidah pelaksanaan RPJM ini juga mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi yang berfungsi sebagai alat pengendali untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap proses pembangunan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI ACEH BARAT,

TARMIZI

PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2025